



**BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2019**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang akan dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2020.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

- a. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2020.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARINUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Penyusunan RKPD	I-6
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-48
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-138
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019	II-163
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-163
2.2.2 Aspek Daya Saing	II-164
2.2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-164
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-192
2.3.1 Permasalahan Perekonomian Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-192
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-192
2.3.3 Isu Strategis Daerah	II-19
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	 III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017	III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-6
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-9
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-10

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran PembangunanIV-2

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan DaerahIV-5

4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Magelang IV-12

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN V-1

5.1. Kerangka pendanaan Tahun 2020 V-1

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020 V-1

5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar V-1

5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar..... V-4

5.2.3 Urusan Pilihan V-9

5.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan V-11

5.3. Rencana Implementasi Program Unggulan V-15

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAHVI-1

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah.....VI-1

6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat DaerahVI-4

6.3 Indikator Kinerja DaerahVI-21

BAB VII PENUTUPVII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-2
Tabel 2.2	Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang	II-3
Tabel 2.3	Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya.....	II-5
Tabel 2.4	Data Mata Air Kabupaten Magelang.....	II-7
Tabel 2.5	Tipe Iklim di Kabupaten Magelang.....	II-5
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 (Ha)	II-9
Tabel 2.7	Perhitungan Daya Dukung Lahan Terbangun per Kecamatan	II-10
Tabel 2.8	Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Kabupaten Magelang Tahun 2017	II-11
Tabel 2.9	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang.....	II-12
Tabel 2.10	Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang	II-16
Tabel 2.11	Data Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-18
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-19
Tabel 2.13	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-20
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang per Kecamatan Tahun 2014-2018	II-22
Tabel 2.15	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-23
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018...	II-26
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-27
Tabel 2.18	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018	II-28
Tabel 2.19	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-29
Tabel 2.20	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017.....	II-30
Tabel 2.21	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Di Kabupaten Magelang	II-32

Tabel 2.22	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah) II-33
Tabel 2.23	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) II-33
Tabel 2.24	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 II-34
Tabel 2.25	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 II-34
Tabel 2.26	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 II-35
Tabel 2.27	Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2014-2018 II-36
Tabel 2.28	Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 II-37
Tabel 2.29	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-38
Tabel 2.30	Kemiskinan Berdasarkan Tingkat Konsumsi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-39
Tabel 2.31	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2014-2018 II-40
Tabel 2.32	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang Dengan Kota/Kabupaten Se-Eks Karisidenan Kedu 2014-2019 II-40
Tabel 2.32	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017 II-42
Tabel 2.33	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-42
Tabel 2.34	Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-44
Tabel 2.35	Indeks Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-44
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-45
Tabel 2.37	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 II-45
Tabel 2.38	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-46
Tabel 2.39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 II-47
Tabel 2.40	Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-48
Tabel 2.41	Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-48
Tabel 2.42	Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 II-49

Tabel 2.43	Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-49
Tabel 2.44	Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-50
Tabel 2.45	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-52
Tabel 2.46	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-52
Tabel 2.47	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-53
Tabel 2.48	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-55
Tabel 2.49	Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-56
Tabel 2.50	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-56
Tabel 2.51	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-58
Tabel 2.52	Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-59
Tabel 2.53	Prevelensi HIV/AIDs di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-59
Tabel 2.54	Penyakit Tidak Menular Tahun 2014-2018 di Kabupaten Magelang	II-59
Tabel 2.55	Data Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kabupaten Magelang	II-60
Tabel 2.56	Kondisi Permukaan Jalan Di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2014-2018	II-61
Tabel 2.57	Kondisi Standar Jalan Di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangannya Tahun 2017 - 2018	II-61
Tabel 2.58	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten....	II-62
Tabel 2.59	Kebutuhan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2017	II-63
Tabel 2.60	Ketersediaan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2017.....	II-63
Tabel 2.61	Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-63
Tabel 2.62	Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-64
Tabel 2.63	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-65
Tabel 2.64	Kineerja Makro Urusan Penataan Tahun 2014-2018	II-66
Tabel 2.65	Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang.....	II-66
Tabel 2.66	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018	II-67
Tabel 2.67	Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-67

Tabel 2.68	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-68
Tabel 2.69	Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-69
Tabel 2.70	Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2014-2018	II-71
Tabel 2.71	Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-71
Tabel 2.72	Cakupan Penanganan PMKS Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-73
Tabel 2.73	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan	II-73
Tabel 2.74	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-74
Tabel 2.75	Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-74
Tabel 2.76	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-75
Tabel 2.77	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-76
Tabel 2.78	Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)	II-77
Tabel 2.79	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-78
Tabel 2.80	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-79
Tabel 2.81	Desa dan kecamatan Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-79
Tabel 2.82	Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2015-2018.....	II-81
Tabel 2.83	Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2017	II-82
Tabel 2.84	Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) Kabupaten Magelang	II-83
Tabel 2.85	Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.86	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018.....	II-85
Tabel 2.87	Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru Tahun 2017-2018.....	II-86
Tabel 2.88	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018.....	II-87
Tabel 2.89	Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018.....	II-88

Tabel 2.90	Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018	II-89
Tabel 2.91	Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-90
Tabel 2.92	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018.....	II-91
Tabel 2.93	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan Berakta Perkawinan, Penduduk Meninggal Berakta Kematian Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-91
Tabel 2.94	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-92
Tabel 2.95	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-92
Tabel 2.96	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-94
Tabel 2.97	Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-94
Tabel 2.98	Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018 ..	II-95
Tabel 2.99	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi Informasi di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018	II-96
Tabel 2.100	Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan PD di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-96
Tabel 2.101	Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik di Kabupaten Magelang tahun 2017-2018.....	II-97
Tabel 2.102	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-98
Tabel 2.103	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-99
Tabel 2.104	Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-99
Tabel 2.105	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Yang Dibina Di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-100
Tabel 2.106	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-101
Tabel 2.107	Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-102
Tabel 2.108	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-102
Tabel 2.109	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-103
Tabel 2.110	Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-104
Tabel 2.111	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-105

Tabel 2.112	Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-105
Tabel 2.113	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-107
Tabel 2.114	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-108
Tabel 2.115	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-108
Tabel 2.116	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-112
Tabel 2.117	Kontribusi PDRB Kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017.....	II-113
Tabel 2.118	Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-114
Tabel 2.119	Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-114
Tabel 2.120	Perkembangan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-123
Tabel 2.121	Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-123
Tabel 2.122	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-124
Tabel 2.123	Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-125
Tabel 2.124	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-125
Tabel 2.125	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-126
Tabel 2.126	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-127
Tabel 2.127	Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2014-2018.....	II-128
Tabel 2.128	Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-129
Tabel 2.129	Prosentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-129
Tabel 2.130	Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 ..	II-130
Tabel 2.131	Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-131
Tabel 2.132	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-131

Tabel 2.133	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-131
Tabel 2.134	Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2014-2018 (Dalam Juta Rupiah)	II-132
Tabel 2.135	Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-134
Tabel 2.136	Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-134
Tabel 2.137	Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-135
Tabel 2.138	Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP	II-136
Tabel 2.139	Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018....	II-136
Tabel 2.140	Komposisi Pendidikan PNS (orang) Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018	II-137
Tabel 2.141	Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018 (Orang)	II-137
Tabel 2.142	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-138
Tabel 2.143	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-140
Tabel 2.144	Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2014-2016.....	II-141
Tabel 2.145	Cakupan Pembangunan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018	II-142
Tabel 2.146	Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-143
Tabel 2.147	Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-144
Tabel 2.148	Luas Wilayah Pertanian Produktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-145
Tabel 2.149	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-146
Tabel 2.150	Luas Wilayah Peruntukan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-146
Tabel 2.151	Luas Wilayah Permukiman Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-147
Tabel 2.152	Wilayah Rawan Bencana Erupsi dan Banjir Lahar Dingin Gunung Api di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-148
Tabel 2.153	Wilayah Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-148
Tabel 2.154	Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-149
Tabel 2.155	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-150

Tabel 2.156	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-150
Tabel 2.157	Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-151
Tabel 2.158	Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-152
Tabel 2.159	Angka Kriminalitas Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-152
Tabel 2.160	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-153
Tabel 2.161	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-155
Tabel 2.162	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-155
Tabel 2.163	Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-157
Tabel 2.164	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-157
Tabel 2.165	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-158
Tabel 2.166	Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.....	II-160
Tabel 2.167	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-161
Tabel 2.168	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-162
Tabel 2.169	Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-163
Tabel 2.170	Capaian Kinerja Aspek Daya Saing.....	II-164
Tabel 2.171	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-165
Tabel 2.172	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-167
Tabel 2.173	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum	II-168
Tabel 2.174	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang.....	II-169
Tabel 2.175	Capaian Kinerja Urusan Perumahan	II-170
Tabel 2.176	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.....	II-171
Tabel 2.177	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-172
Tabel 2.178	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan	II-173
Tabel 2.179	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II-173
Tabel 2.180	Capaian Kinerja Lingkungan Hidup.....	II-175
Tabel 2.181	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II-176
Tabel 2.182	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-176
Tabel 2.183	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-177

Tabel 2.184	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-178
Tabel 2.185	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	II-179
Tabel 2.186	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	II-180
Tabel 2.187	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-180
Tabel 2.188	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga.....	II-181
Tabel 2.189	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-182
Tabel 2.190	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan.....	II-183
Tabel 2.191	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-183
Tabel 2.192	Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-184
Tabel 2.193	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	II-184
Tabel 2.194	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	II-185
Tabel 2.195	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan.....	II-185
Tabel 2.196	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II-186
Tabel 2.197	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan	II-188
Tabel 2.198	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	II-188
Tabel 2.199	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-189
Tabel 2.200	Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-189
Tabel 2.201	Capaian kinerja Urusan Perdagangan.....	II-190
Tabel 2.202	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-190
Tabel 2.203	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan....	II-191
Tabel 2.204	Capaian Kinerja Urusan Keuangan.....	II-191
Tabel 2.205	Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-201
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017.....	III-2
Tabel 3.2	Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017	III-2
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017.....	III-3
Tabel 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017.....	III-4
Tabel 3.5	Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2020	III-6
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan Tahun 2017- 2018 dan target 2019 serta Proyeksi Tahun 2020-2021	III-8
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Tahun 2017 - 2018, Target Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021	III-10
Tabel 3.8	Realisasi Pembiayaan Tahun 2017- 2018, Target 2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021	III-11
Tabel 3.9	Realisasi APBD Tahun 2017- 2018 dan Target 2019, dan Proyeksi Tahun 2020-2021	III-13
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang Tahun 2020	IV-3

Tabel 4.2.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi, dan Nasional	IV-9
Tabel 5.1.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020	V-1
Tabel 5.2.	Rencana Implementasi Program Unggulan Tahun 2020....	V-16
Tabel 6.1.	Matriks Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020	VI-1
Tabel 6.2.	Matriks Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020	VI-5
Tabel 6.3.	Matriks Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020	VI-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya	I-5
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	II-2
Gambar 2.2.	Posisi Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang ..	II-6
Gambar 2.3.	Grafik Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang	II-10
Gambar 2.4.	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang	II-18
Gambar 2.5.	Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018	II-21
Gambar 2.6.	Grafik Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-21
Gambar 2.7.	Grafik Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-24
Gambar 2.8.	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2018	II-25
Gambar 2.9.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-26
Gambar 2.10.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018	II-28
Gambar 2.11.	PDRB Perkapita (ADHK dan ADHBm) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018	II-36
Gambar 2.12.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2017.....	II-43
Gambar 2.13.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2017.....	II-43
Gambar 2.14.	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018	II-51
Gambar 2.15.	Prevalensi Kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2015-2018	II-54
Gambar 2.16.	Angka Kesakitan Kab. Magelang Tahun 2013-2017	II-57
Gambar 2.17.	Cakupan CNR TBC BTA di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-57
Gambar 2.18.	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017.....	II-76
Gambar 2.19.	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2013-2017	II-77
Gambar 2.20.	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-80
Gambar 2.21.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-81
Gambar 2.22.	Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-82

Gambar 2.23.	Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) ..	II-83
Gambar 2.24.	Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1).....	II-84
Gambar 2.25.	Grafik Perkembangan Pengolah Arsip yang menerapkan Pengelolaan Arsip secara Baku Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018	II-109
Gambar 2.26.	Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-110
Gambar 2.27.	Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-110
Gambar 2.28.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2014- 2018	II-111
Gambar 2.29.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-111
Gambar 2.30.	Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-115
Gambar 2.31.	Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 (Ton).....	II-116
Gambar 2.32.	Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-116
Gambar 2.33.	Total Produksi Sayur-sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-117
Gambar 2.34.	Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-118
Gambar 2.35.	Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-119
Gambar 2.36.	Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-119
Gambar 2.37.	Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-120
Gambar 2.38.	Grafik Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-121
Gambar 2.39.	Grafik Perkembangan Produksi Daging Ternak Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-122
Gambar 2.40.	Grafik Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018	II-122
Gambar 2.41.	Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/kapita).....	II-139
Gambar 2.42.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-139
Gambar 2.43.	IPM Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017	II-200
Gambar 2.44.	Perbandingan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Magelang, Provinsi JawaTengah Dan Nasional	II-202
Gambar 2.45.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-204

Gambar 2.46. Idenks Pemberdayaan Gender (IDG) Di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 II-205

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 III-4

Gambar 3.2. Grafik Laju Inflasi Tahun 2018 Menurut Kelompok Pengeluaran..... III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek. Rencana pembangunan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah kurun waktu 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan jangka pendek kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dan mendukung pencapaian target pembangunan yang satu dengan lainnya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai program tahunan. RKPD memuat rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan, yang mendasarkan pada arahan dan program prioritas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 265 ayat (3) menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020, dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2020. Hal ini sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Tahap penyusunan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2020 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal RKPD, penyiapan Rancangan RKPD, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir RKPD. Masukan-masukan pada saat Musrenbang akan membahas proses penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan Rapat Teknis.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Pada saat RKPD ini ditetapkan tahap penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024 masih dalam proses penyusunan rancangan akhir RPJMD. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan tahapan strategis karena merupakan titik awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

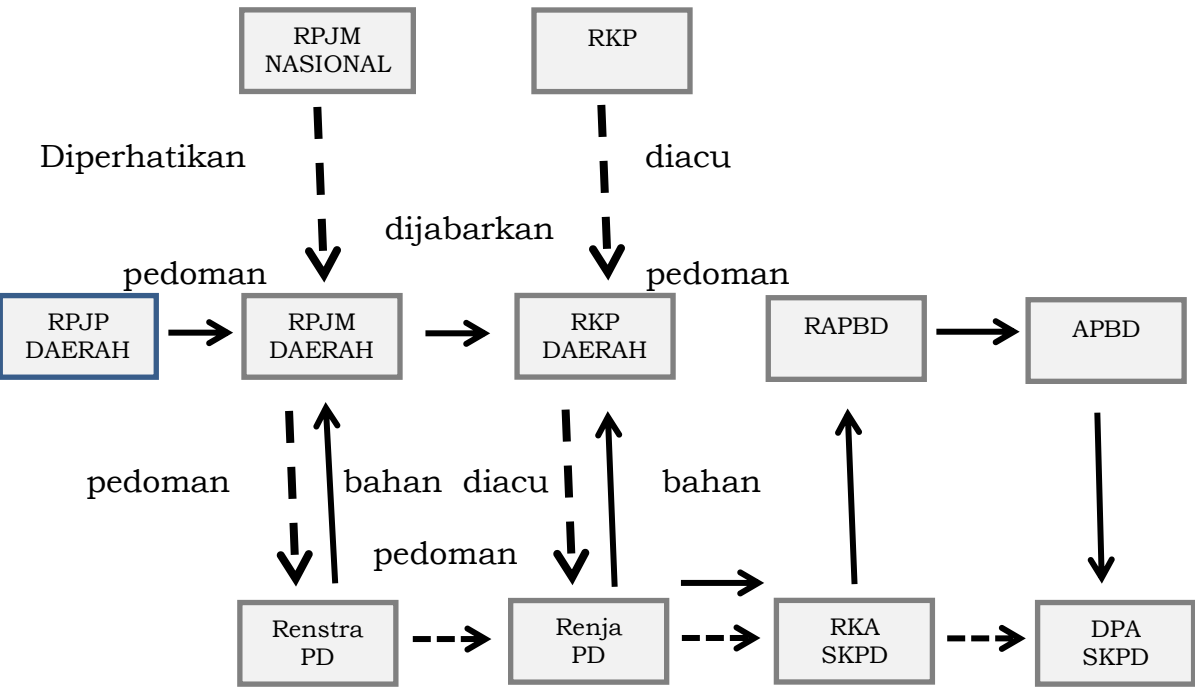
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD). RPJMD berfungsi untuk menjalankan pembangunan tahunan dan mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kondisi saat ini dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 masih dalam proses penyusunan Rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

RPJMD dan Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara rinci dengan prioritas utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan mencakup indikator dan target kinerja, serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahunan dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2020.

Tujuan penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

3. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2020.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum kondisi daerah yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah Tahun 2017, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat arahan pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Magelang yang meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1 Kondisi Umum Daerah

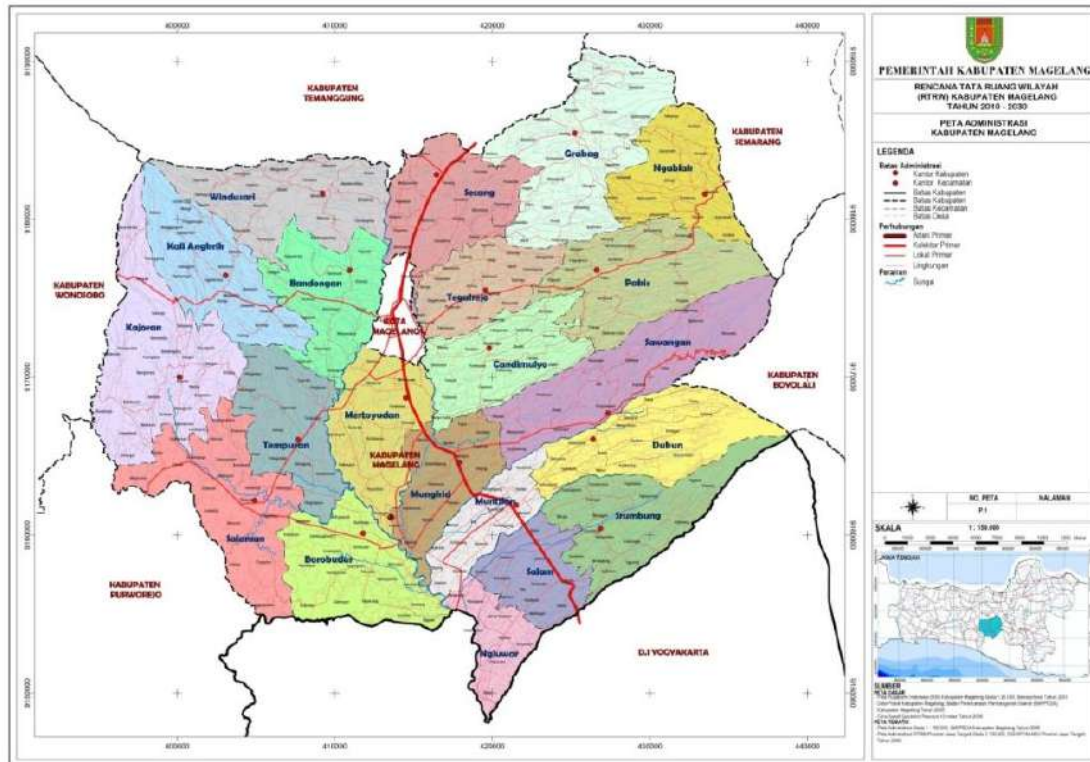
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Magelang termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah menurut BPS seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih adalah 113.034,84 hektar. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Sebelah utara	: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
Sebelah timur	: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
Sebelah selatan	: Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebelah barat	: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
Bagian tengah	: Kota Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang.



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan,
serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan
di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel di atas, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kajoran dengan luas 83,41 km² atau sekitar 7,68% dari luas wilayah kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Ngluwar seluas 22,44 km² atau sekitar 2,07 % dari luas wilayah kabupaten. Terdapat empat kecamatan yang memiliki kelurahan, yaitu Kecamatan Muntilan, Mertoyudan, dan Secang, masing-masing memiliki 1 kelurahan, kecuali Kecamatan Mungkid yang memiliki 2 kelurahan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak, yaitu Kecamatan Kajoran dengan 29 desa. Adapun kecamatan yang memiliki desa paling sedikit, yaitu Kecamatan Ngluwar dengan hanya 8 desa.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan Kabupaten Magelang berada di Kota Mungkid.

2.1.1.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara topografis sangat beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, membentuk 'basin' (cekungan) dengan dikelilingi gunung-gunung (Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing) dan Pegunungan Menoreh. Terdapat beberapa sungai di antaranya Sungai Progo, Sungai Elo, Sungai Tangsi, Sungai Pabelan dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng gunung-gunung tersebut. Daerah yang bertopografi datar seluas 8.599 ha, bergelombang seluas 44.784 ha, topografi curam seluas 41.037 ha, dan sangat curam seluas 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2%	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (± 1,5% dari luas wilayah)
2	2 – 15%	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah
3	15 – 40%	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah)

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
4.	> 40%	Berbukit sampai bergunung gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18% dari luas wilayah)

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Variasi kemiringan lereng di Kabupaten Magelang memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bahwa variasi tersebut menjadi salah satu faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam seperti kegiatan pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Dampak negatifnya adalah potensi bencana alam gerakan tanah (tanah longsor) di Kabupaten Magelang.

2.1.1.3. Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Kecamatan Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk Dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

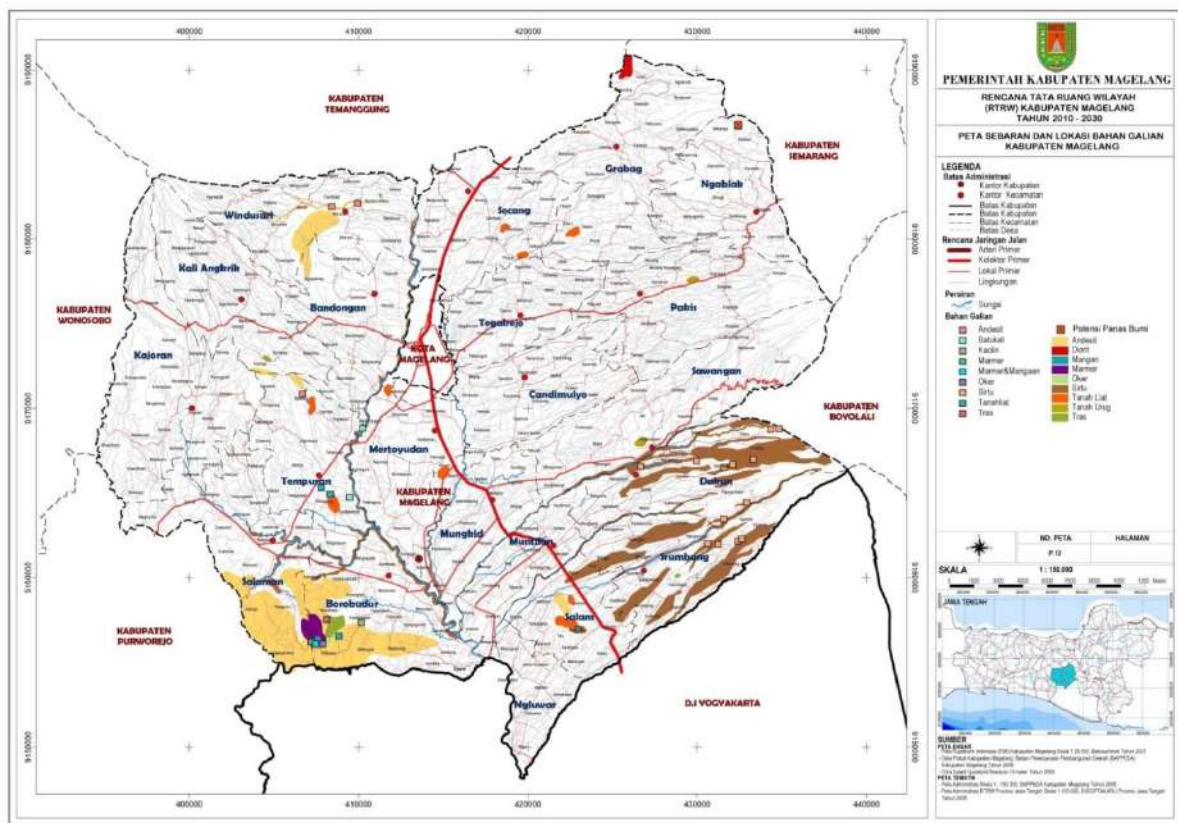
- (1) Alluvial kelabu, alluvial coklat, regosol coklat kelabu, dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Kecamatan Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalrejo, Muntilan, Srumbung, Salam, dan Ngluwar.
- (2) Regosol kelabu dan coklat tua, andosol coklat, lithosol latosol coklat, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan, seperti Kecamatan Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, dan Bandongan.
- (3) Latosol coklat kemerahan ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak.
- (4) Latosol coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.
- (5) Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur.

Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Perbukitan Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang, seperti berlimpahnya bahan galian tambang golongan B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Jenis bahan tambang yang jumlahnya relatif banyak adalah pasir batu dan marmer. Marmer berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang selama ini hanya ditambang saja. Tabel di bawah ini akan menunjukkan berbagai macam sumber daya mineral yang terdapat di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.3
Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya

No.	Jenis Bahan Galian	Kegunaan	Lokasi
1	Trass	Bahan baku pembuatan semen puzolan, bahan baku pembuatan batako, bahan bangunan konstruksi ringan/berat, semen alam, dan tanah urug	- Kecamatan Salaman - Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur - Desa Bawang Kecamatan Tempuran
2	Tanah Liat	Bahan baku pembuatan batu bata, gerabah, genteng, semen, dan keramik	- Kecamatan Salaman - Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur - Desa Sidoagung dan Somoketro Kecamatan Salam
3	Batu Gamping	Digunakan dalam berbagai macam bidang seperti aneka industri kimia, industri bangunan, dan pertanian	- Kecamatan Salaman - Kecamatan Borobudur
4	Marmer	Untuk pembuatan tegel, meja, patung, pilar, dan perangkat toilet	- Kecamatan Salaman - Kecamatan Borobudur
5	Andesit	Bahan pondasi, bangunan gedung, jalan raya, dan dam. Selain itu bisa digunakan sebagai batu split, pasir, dan abu batu sebagai bahan utama pembuatan beton	- Desa Giripurno Kecamatan Borobudur - Desa Bawang Kecamatan Tempuran
6	Pasir dan batu	Bahan bangunan perumahan, jalan, dan saluran air	- Kecamatan Windusari - Kecamatan Bandongan - Kecamatan Borobudur - Kecamatan Srumbung - Kecamatan Dukun - Kecamatan Sawangan - Kecamatan Pakis - Kecamatan Salam - Kecamatan Candimulyo
7	Kaolin	Bahan baku industri keramik, filler dalam industri kertas, karet, cat, dan plastik	- Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur
8	Oker	Sebagai pigmen dan serbuk poles, bahan pewarna cat, pembuatan semen, plester, campuran karet, dan campuran platik	- Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan - Desa Giripurno Kecamatan Borobudur
9	Mangaan	Menjadi bahan baku industri metalurgi maupun non metalurgi. Bahan non metalurgi bisa menjadi produksi baterai, kimia, keramik dan gelas, glasir dan frit, pertanian, dan proses produksi uranium	- Desa Giripurno Kecamatan Borobudur - Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.2
Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran bahan tambang paling banyak terdapat di sekitar Gunung Merapi dan Pegunungan Menoreh. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber bahan tambang dominan berasal dari Gunung Merapi dan Pegunungan Menoreh. Meskipun Merapi juga sering erupsi, tetapi dari erupsi tersebut mengeluarkan berbagai macam sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar.

2.1.1.4. Hidrologi

Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. DAS Progo bagian hulu terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi wilayah di Kecamatan Windusari, Secang, Bandongan, Mertoyudan, Tempuran, Borobudur, Mungkid, Tegalrejo, Muntilan, Salam, Ngluwar, Grabag, Sawangan, Dukun, dan Srumbung. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

- Air permukaan yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yang ada di Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo.
- Air tanah, di Kabupaten Magelang air tanah berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:

- 1) Mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing.
- 2) Mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada di antara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 m di atas permukaan laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas akuifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Penyusunan Profiling Mata Air tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terdapat 223 sumber mata air, yang mana 55 mata air merupakan sumber mata air baru yang berhasil diidentifikasi. Pengukuran dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Agustus 2018 yang merupakan bagian dari musim kemarau. Berdasarkan kajian tersebut, dari 223 mata air, ada sebanyak 13 mata air diidentifikasi mati dan 5 mata air tidak ada limpasan, sehingga mata air yang memiliki debit sebanyak 205 mata air dengan total debit dari hasil perhitungan sebesar 8.173,28 liter/detik. Debit tersebut jika dikonversi dalam setahun, maka memiliki potensi air mencapai 257.752.602 m³/tahun.

Tabel 2.4
Data Debit Mata Air Kabupaten Magelang

No	Klasifikasi Debit Mata Air (liter/detik)	Jumlah Mata Air (buah)	Debit Total Mata Air (liter/detik)	Persentase (%)
1	0 < mata air < 10	142	265,13	3,29
2	10 ≤ mata air < 20	14	202,14	2,51
3	20 ≤ mata air < 30	11	271,48	3,37
4	30 ≤ mata air < 40	8	271,70	3,37
5	40 ≤ mata air < 50	3	122,52	1,52
6	50 ≤ mata air < 60	1	53,00	0,66
7	60 ≤ mata air < 70	1	65,00	0,81
8	70 ≤ mata air < 80	2	146,00	1,81
9	80 ≤ mata air < 90	2	169,60	2,11
10	90 ≤ mata air < 100	1	92,00	1,14
11	mata air ≥ 100	20	6393,92	79,40
	JUMLAH	205		

Sumber: *Pendataan Mata Air, DLH Kabupaten Magelang 2018 diolah*

Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten

Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

2.1.1.5. Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62°C dengan kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 189 hari dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018, curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 0 - 506 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi. Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Tipe Iklim di Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Sc. Ferguson	Mohr	Oldeman
1	Salaman	B	I	B2
2	Borobudur	C	III	C3
3	Ngluwar	-	-	-
4	Salam	B	I	B3
5	Srumbung	B	I	B1
6	Dukun	C	I	B3
7	Muntilan	C	I	C3
8	Mungkid	B	II	C3
9	Sawangan	B	I	C3
10	Candimulyo	B	I	B2
11	Mertoyudan	B	I	B2
12	Tempuran	B	I	B2
13	Kajoran	B	I	B1
14	Kaliangkrik	B	I	B2
15	Bandongan	B	I	C2
16	Windusari	B	I	C2
17	Secang	B	II	C2
18	Tegalrejo	B	I	B2
19	Pakis	C	I	B3
20	Grabag	B	I	B2
21	Ngablak	C	I	C2

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kahutanan Kabupaten Magelang, 2014 dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson, Mohr maupun Oldeman, Kabupaten Magelang sebagian besar bertipe iklim basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm.

Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di daerah tertentu, sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Misalnya, jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup

untuk membudidayakan padi sawah. Adapun untuk membudidayakan palawija, jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan. Selain itu, musim hujan selama 5 bulan dianggap cukup untuk membudidayakan padi sawah selama satu musim.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

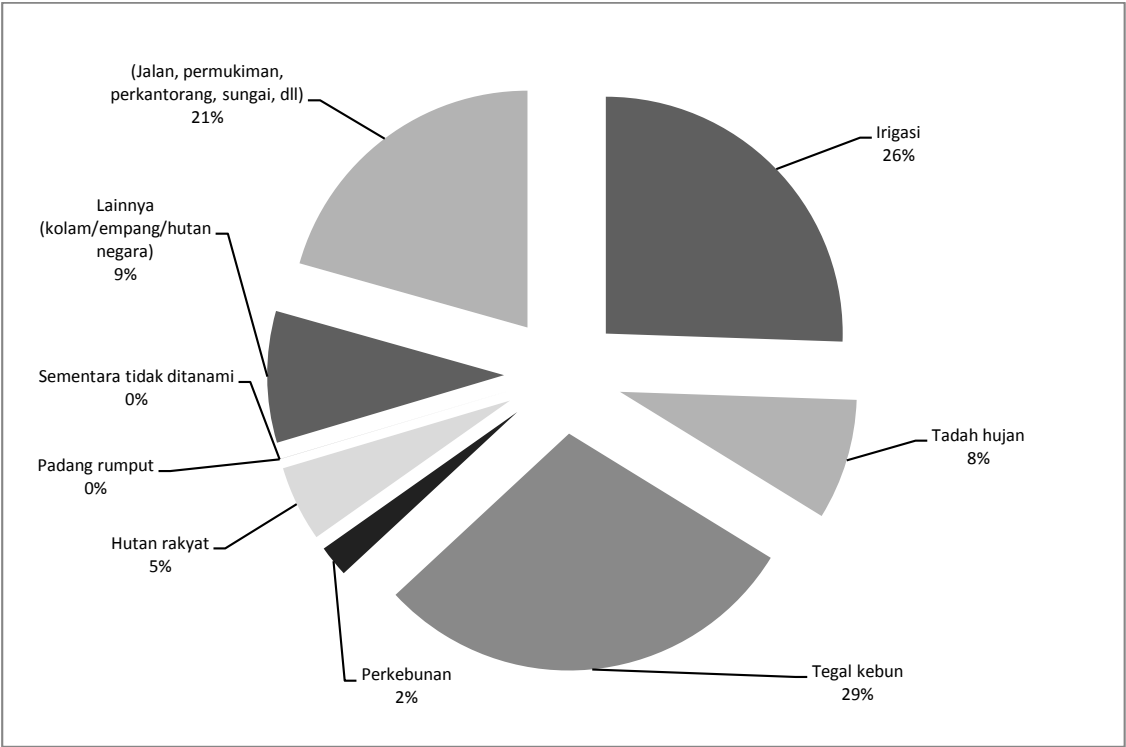
Berdasarkan data Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2018, rincian penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017, yaitu lahan pertanian menempati lahan seluas 86.175 hektar yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.681 ha dan lahan kering (*dryland*) seluas 49.494 ha. Selain itu, ada lahan bukan pertanian yang mencakup jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lainnya memiliki luasan sebesar 22.398 hektar. Adapun untuk lahan peruntukan sawah di antaranya sawah irigasi seluas 27.732 ha dan tadah hujan (reservation) seluas 8.949 ha. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2014-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017 (ha)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
A	Lahan Sawah				
1	Irigasi	28.028	27.898	27.653	27.732
2	Tadah hujan	8.854	8.964	9.202	8.949
	Jumlah	36.882	36.862	36.855	36.681
B	Lahan Kering				
1	Tegal kebun	32.437	32.100	31.904	31.813
2	Perkebunan	399	399	2.219	2.317
3	Hutan rakyat	6.562	6.919	5.611	5.609
4	Padang rumput	2	2	2	2
5	Sementara tidak ditanami	107	107	7	7
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	10.016	10.016	9.807	9.746
	Jumlah	49.523	49.543	49.550	49.494
	Total lahan pertanian (A+B)	86.405	86.405	86.405	86.175
C	Lahan Bukan Pertanian				
1	(Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll)	22.168	22.168	22.168	22.398
	TOTAL (A+B+C)	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2015, 2016, 2017, 2018

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian (79,37%) dan lahan bukan pertanian (jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain) 20,63%. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan. Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Hasil Olahan, 2018

Gambar 2.3
Grafik Persentase Penggunaan Lahan
di Kabupaten Magelang Tahun 2017

Untuk menghitung sejauh mana lahan terbangun di Kabupaten Magelang, masih mempunyai daya tampung untuk pengembangan atau tidak, maka dihitung daya dukung lahan untuk bangunan. Daya dukung lahan untuk bangunan mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun.

Berdasarkan hasil penghitungan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan, namun ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Magelang. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak ada kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk. Kategori bersyarat/sedang terdapat di 12 kecamatan dan kategori baik terdapat di 9 kecamatan.

Tabel 2.7
Perhitungan Daya Dukung Lahan Terbangun per Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas (%)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDLB	STATUS
BANDONGAN	4.891,98	0%	640,84	769,00	3,82	BAIK
BOROBUDUR	5.761,38	5%	1386,53	1.663,84	2,08	SEDANG
CANDIMULYO	4.928,56	4%	830,41	996,49	2,97	SEDANG
DUKUN	5.852,40	5%	589,14	706,96	4,97	BAIK

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas (%)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDL	STATUS
GRABAG	8.143,19	7%	1177,94	1.413,53	3,46	BAIK
KAJORAN	8.648,78	8%	841,91	1.010,30	5,14	BAIK
KALIANGKRIK	5.709,82	5%	527,78	633,33	5,41	BAIK
MERTOYUDAN	4.897,43	4%	1857,64	2.229,17	1,32	SEDANG
MUNGKID	4.102,56	4%	1093,63	1.312,36	1,88	SEDANG
MUNTILAN	3.019,63	3%	989,60	1.187,52	1,53	SEDANG
NGABLAK	4.607,46	4%	452,54	543,05	5,09	BAIK
NGLUWAR	2.430,15	2%	713,32	855,99	1,70	SEDANG
PAKIS	6.820,31	6%	684,82	821,79	4,98	BAIK
SALAM	3.361,33	3%	965,08	1.158,09	1,74	SEDANG
SALAMAN	6.679,37	6%	1289,52	1.547,43	2,59	SEDANG
SAWANGAN	7.373,78	7%	765,16	918,19	4,82	BAIK
SECANG	5.294,87	5%	1178,76	1.414,51	2,25	SEDANG
SRUMBUNG	5.699,14	5%	962,48	1.154,98	2,96	SEDANG
TEGALREJO	3.798,93	3%	726,30	871,56	2,62	SEDANG
TEMPURAN	4.824,39	4%	864,73	1.037,67	2,79	SEDANG
WINDUSARI	6.189,36	5%	526,94	632,33	5,87	BAIK
KAB. MAGELANG	113.034,84	100%	19.065,08	22.878,10	2,96	SEDANG

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lindung di Kabupaten Magelang, digunakan daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah. Daya dukung fungsi lindung (DDL) memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Apabila nilai mendekati angka 1, semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila mendekati angka 0, fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.8
Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2017

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	Σ (ci x Ai)
Cagar Budaya	102,24	0,09%	0,18	18,40
Danau	1,56	0,00%	0,98	1,53
Hutan Lindung	1.363,57	1,21%	1	1.363,57

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	$\sum (ci \times Ai)$
Hutan Produksi Terbatas	1.792,44	1,59%	0,68	1.218,86
Hutan Produksi Tetap	2.049,51	1,81%	0,68	1.393,67
Industri	152,52	0,13%	0,18	27,45
Kebun Campur	43.060,87	38,10%	0,54	23.252,87
Kolam	16,60	0,01%	0,98	16,27
Lahan Terbuka	221,57	0,20%	0,21	46,53
Permukiman	18.912,56	16,73%	0,18	3.404,26
Rumput	0,22	0,00%	0,28	0,06
Sawah	28.688,43	25,38%	0,46	13.196,68
Taman Nasional	4.406,78	3,90%	1	4.406,78
Tegalan	11.310,22	10,01%	0,21	2.375,15
Tubuh Air	955,75	0,85%	0,98	936,64
Total	113.034,84	100%	0,46	51.658,71

Sumber: KLHS RPJMD 2019-2024

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Magelang memiliki koefisien 0,46 berada dalam kategori sedang. Luas lahan kebun memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil.

Untuk hutan rakyat, luasannya selalu mengalami perubahan setiap tahunnya selama tahun 2014-2017. Secara implisit, penambahan luas hutan rakyat di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sumber daya hutan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi ekonomi dan juga mengurangi dampak bahaya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang seperti bencana gerakan tanah.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Tabel 2.9
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang
Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	
	Hutan produksi terbatas	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak , dan Windusari

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	Hutan produksi tetap	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salaman, Tempuran, dan Windusari
2	Kawasan hutan rakyat	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salam, Sawangan, Secang, Tempuran, dan Windusari
3	Kawasan peruntukan pertanian	
	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
4	Kawasan peruntukan perkebunan	Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur, dan Salaman
5	Kawasan peruntukan perikanan	
	Daerah pembenihan	Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, dan Mungkid
	Daerah pembesaran perikanan	Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, dan Tegalrejo
6	Kawasan peruntukan peternakan	
	Kawasan peternakan besar	Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, dan Kaliangkrik, Bandongan, Secang, Srumbung, dan Salam
	Kawasan peternakan sedang	Semua kecamatan
	Kawasan peternakan unggas	Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, dan Ngluwar
7	Kawasan peruntukan pertambangan	
	Kawasan peruntukan pertambangan batuan pasir batu	Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Salam, Secang, Grabag, dan Salaman.
	Kawasan peruntukan pertambangan batuan marmer	Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.
	Kawasan peruntukan pertambangan mineral	Kecamatan Borobudur dan Salaman

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	logam	
8	Kawasan peruntukan pariwisata	
	Kawasan peruntukan pariwisata budaya	Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pasarean Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid, dan Candi Umbul
	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe, dan Telaga Bleder
	Kawasan peruntukan pariwisata buatan	Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening, dan Deyangan
9	Kawasan peruntukan industri	
	kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah	tersebar di masing-masing kecamatan
	Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	tersebar di masing-masing kecamatan
	Kawasan peruntukan industri besar	Kecamatan Tempuran dan Salaman
10	Kawasan peruntukan permukiman	
	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 2. Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 3. Ibukota-ibukota kecamatan yang meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan, dan Candimulyo
	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	tersebar di luar ibukota kecamatan
10	Kawasan peruntukan lainnya	

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo, dan Tempuran
	Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	tersebar di masing-masing kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (*main prime mover*), yaitu sebagai berikut.

- Kawasan strategis cepat tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya.
- Kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan, meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, dan Kawasan Minapolitan.
- Kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuhkembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata disamping Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya.
- Kawasan peruntukan industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Di samping pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, struktur ruang kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

- pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
- pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak;
- pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan; dan
- pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa.

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang, antara lain:

- a. tanah longsor di 21 kecamatan;
- b. banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
- c. angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
- d. kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang), sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
- e. Kebakaran hutan;
- f. Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III.

Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih dalam kondisi aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam, seperti letusan gunung berapi, yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB). Kawasan Rawan Bencana adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Wilayah yang digolongkan wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III di lingkup Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel berikut.

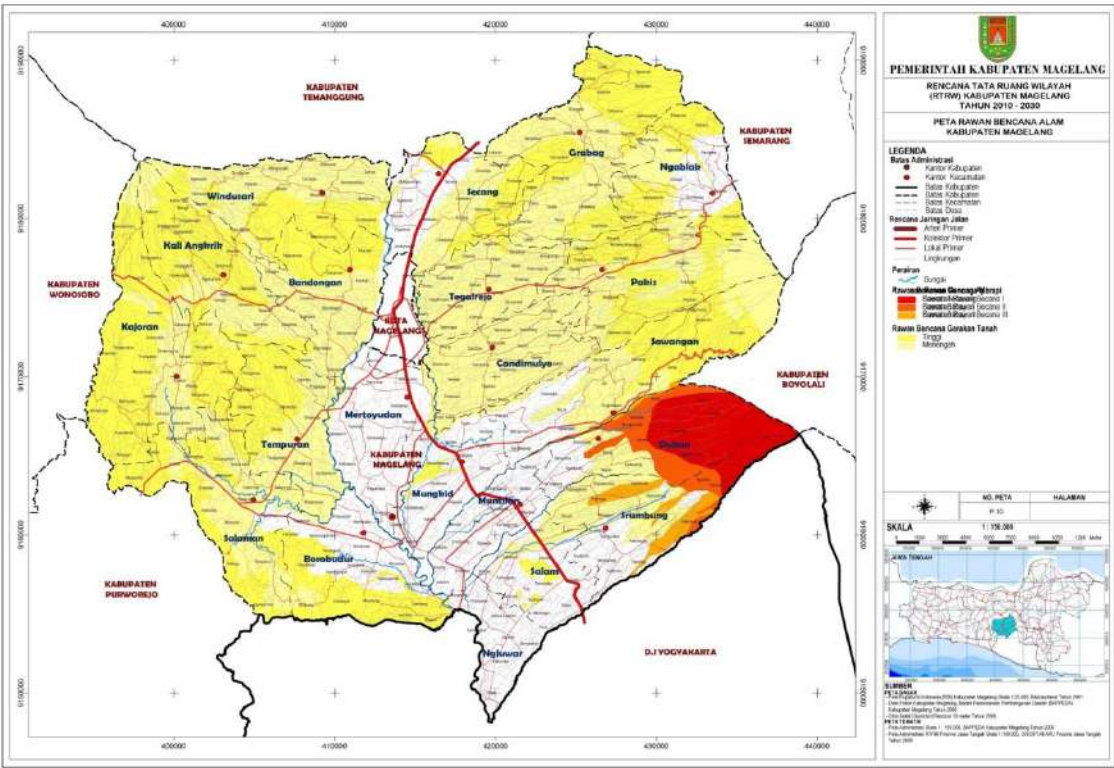
Tabel 2.10

Desa-Desa Rawan Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
1	<p>KRB III</p> <p>a. Kawasan rawan bencana III adalah kawasan yang paling rawan (letaknya paling dekat dengan sumber bahaya) dan berisiko terlanda awan panas, aliran lava pijar (guguran batu/lontaran material pijar), gas beracun, serta hujan abu lebat, meliputi 3 wilayah kecamatan dan 16 desa</p> <p>b. Jarak dari puncak Merapi 0-10 km</p>	<p>Srumbung</p> <p>Dukun</p> <p>Sawangan</p>	<p>1. Kaliurang</p> <p>2. Kemiren</p> <p>3. Ngablak</p> <p>4. Nglumut</p> <p>5. Tegalrandu</p> <p>6. Mranggen</p> <p>7. Ngargosoko</p> <p>8. Srumbung</p> <p>1. Sengi</p> <p>2. Sewukan</p> <p>3. Paten</p> <p>4. Krinjing</p> <p>5. Kalibening</p> <p>6. Sumber</p> <p>7. Ngargomulyo</p> <p>8. Keningar</p> <p>1. Wonolelo</p> <p>2. Kapuhan</p> <p>3. Ketep</p>
2	KRB II	Srumbung	1. Kamongan

No.	Kawasan Rawan Bencana	Kecamatan	Desa
	<p>a. Kawasan rawan bencana II, juga berpotensi terlanda aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan</p> <p>b. Jarak dari puncak Merapi 10-15 km</p>	<p>Dukun</p> <p>Sawangan</p>	<p>2. Jerukagung 3. Sudimoro 4. Pandanretno 5. Polengan 6. Bringin 7. Pucanganom</p> <p>1. Mangunsoko 2. Dukun 3. Banyudono 4. Banyubiru 5. Ngadipuro</p> <p>1. Krogowanan 2. Sawangan 3. Gondowangi 4. Mangunsari</p>
3	<p>KRB I</p> <p>a. Kawasan rawan bencana I adalah kawasan yang rawan terhadap lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava, meliputi : Sepanjang aliran sungai Krasak, Bebung, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu</p> <p>b. Jarak dari puncak Merapi 15-20 km</p>	<p>Srumbung</p> <p>Dukun</p> <p>Salam</p> <p>Muntilan</p> <p>Mungkid</p> <p>Ngluwar</p>	<p>1. Bringin</p> <p>1. Ngadipuro 2. Ketunggeng</p> <p>1. Salam 2. Jumoyo 3. Gulon 4. Seloboro 5. Sirahan</p> <p>1. Gondosuli 2. Tamanagung 3. Keji 4. Menayu 5. Adikarto 6. Sokorini 7. Muntilan 8. Pucungrejo 9. Gunungpring 10. Ngawen 11. Sriwedari</p> <p>1. Bojong 2. Pabelan 3. Ngrajek 4. Progowati</p> <p>1. Blongkeng 2. Plosogede 3. Somokaton 4. Pakunden 5. Bligo</p>

Sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2018



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030

Gambar 2.4

Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah. Adapun data kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11

Data Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angin puting beliung	60	42	32	33	105
2	Banjir	5	10	10	7	10
3	Gempa bumi	11	0	0	1	1
4	Kebakaran	56	55	40	23	71
5	Kekeringan	0	4	2	3	25
6	Tanah longsor	63	132	85	231	209
7	Bencana lainnya/KLB	11	28	23	15	14
8	Erupsi	0	0	0	0	12
JUMLAH		206	271	222	352	477

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bencana setiap tahunnya semakin bertambah. Hal ini perlu menjadi prioritas dalam upaya

penanggulangan ke depan, sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban jiwa terutama dalam perencanaan mitigasi bencananya yang harus direncanakan dengan sangat baik dalam berbagai bentuk.

2.1.1.9. Kondisi Demografi

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana, seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mencapai 1.290.115 jiwa atau sekitar 3,76% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (109.652 jiwa) kemudian Kecamatan Grabag (92.212 jiwa) dan Secang (80.291 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.710 jiwa).

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Salaman	72.674	76.856	73.833	73.372	73.913	-0.62
2	Borobudur	59.945	61.330	61.232	61.305	62.517	0.12
3	Ngluwar	31.991	32.530	32.415	32.319	32.710	-0.30
4	Salam	46.472	47.871	47.605	47.631	48.257	0.05
5	Srumbung	46.905	48.265	48.339	48.080	48.847	-0.54
6	Dukun	45.921	47.025	46.730	46.900	47.187	0.36
7	Muntilan	79.854	78.857	78.871	79.136	79.372	0.34
8	Mungkid	75.669	73.960	73.426	74.295	74.602	1.18

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
9	Sawangan	56.642	59.812	57.118	57.287	57.986	0.30
10	Candimulyo	48.708	50.068	49.714	50.091	50.424	0.76
11	Mertoyudan	109.688	108.655	108.558	109.233	109.652	0.62
12	Tempuran	50.070	51.095	51.011	51.041	51.585	0.06
13	Kajoran	58.055	59.616	59.552	59.929	59.776	0.63
14	Kaliangkrik	58.796	60.178	59.161	59.575	59.405	0.70
15	Bandongan	59.681	61.074	60.858	60.916	60.481	0.10
16	Windusari	50.520	45.937	51.763	52.156	50.894	0.76
17	Secang	79.523	74.230	80.996	80.914	80.291	-0.10
18	Tegalrejo	52.031	49.860	52.829	52.981	53.369	0.29
19	Pakis	49.607	51.803	52.237	52.819	53.988	1.11
20	Grabag	89.304	85.861	90.807	91.559	92.212	0.83
21	Ngablak	40.444	42.207	41.569	41.866	42.647	0.71
	Jumlah	1.262.500	1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115	0.37

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

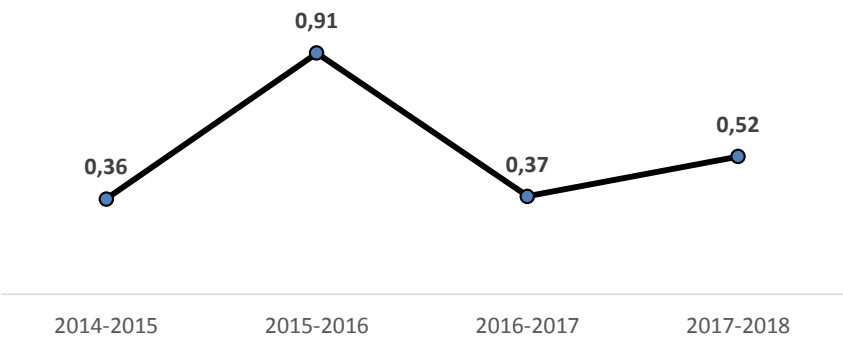
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Jika dilihat secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Magelang dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang per tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang
 Tahun 2014-2018

No	Tahun	Pertumbuhan Penduduk (%)
2	2014-2015	0,36
3	2015-2016	0,91
4	2016-2017	0,37
5	2017-2018	0,52

Sumber : Hasil Olahan, 2019

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2014-2018 cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pakis, yaitu sebesar 17,62%, sedangkan kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang pesat adalah Kecamatan Ngablak (4,77%). Berdasarkan data, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2012-2016 diketahui bahwa hanya Kecamatan Pakis saja yang memiliki tren mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecamatan lainnya cenderung fluktuatif, bahkan hal sebaliknya terjadi pada Kecamatan Mungkid, yakni selama kurun waktu tersebut jumlah penduduknya mengalami penurunan setiap tahun.

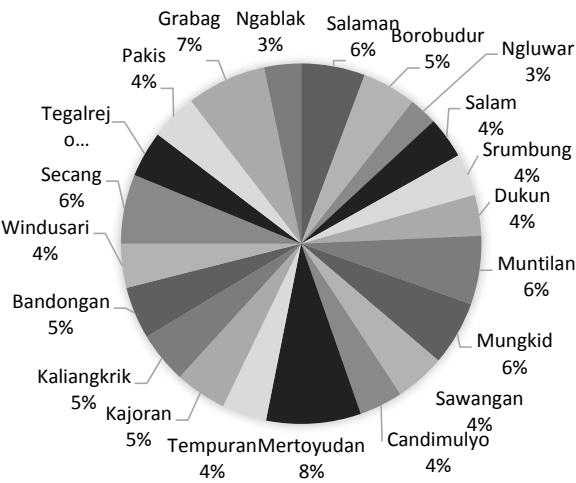


Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.5
 Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang
 Tahun 2014-2018

b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Dilihat dari sisi persebaran penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan, pada tahun 2018, terlihat bahwa penduduk hampir tersebar merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (8,51%) disusul dengan Kecamatan Grabag (7,15%), sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (2,54%). Data distribusi penduduk di Kabupaten Magelang selengkapnya disajikan dalam grafik di bawah ini.



Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.6
 Grafik Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang
 Tahun 2018

Penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya. Berikut tabel yang menyajikan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan

Tabel 2.14
 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang
 per Kecamatan Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Salaman	68,87	1.055,23	1.115,96	1.072,06	1.065,37	1.073,22
2	Borobudur	54,55	1.098,90	1.124,29	1.122,49	1.123,83	1.146,05
3	Ngluwar	22,44	1.425,62	1.449,64	1.444,52	1.440,24	1.457,66
4	Salam	31,63	1.469,24	1.513,47	1.505,06	1.505,88	1.525,67
5	Srumbung	53,18	882,00	907,58	908,97	904,10	918,52
6	Dukun	53,40	859,94	880,62	875,09	878,28	883,65
7	Muntilan	28,61	2.791,12	2.756,27	2.756,76	2.766,03	2.774,27
8	Mungkid	37,40	2.023,24	1.977,54	1.963,26	1.986,50	1.994,71
9	Sawangan	72,37	782,67	826,48	789,25	791,58	801,24
10	Candimulyo	46,95	1.037,44	1.066,41	1.058,87	1.066,90	1.073,99
11	Mertoyudan	45,35	2.418,70	2.395,92	2.393,78	2.408,67	2.417,91
12	Tempuran	49,04	1.021,00	1.041,90	1.040,19	1.040,80	1.051,90
13	Kajoran	83,41	696,02	714,73	713,97	718,49	716,65
14	Kaliangkrik	57,34	1.025,39	1.049,49	1.031,76	1.038,98	1.036,01
15	Bandongan	45,79	1.303,36	1.333,78	1.329,07	1.330,33	1.320,83
16	Windusari	61,65	819,46	745,13	839,63	846,00	825,53
17	Secang	47,34	1.679,83	1.568,02	1.710,94	1.709,21	1.696,05
18	Tegalrejo	35,89	1.449,74	1.389,24	1.471,97	1.476,21	1.487,02
19	Pakis	69,56	713,15	744,72	750,96	759,33	776,14
20	Grabag	77,16	1.157,39	1.112,77	1.176,87	1.186,61	1.195,08
21	Ngablak	43,80	923,38	963,63	949,06	955,84	973,68
	Jumlah	1.085,73	1.162,81	1.167,04	1.177,66	1.182,07	1.188,25

Sumber:

1. Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018
2. Hasil Olahan, 2019

Terdapat kesenjangan persebaran penduduk di masing-masing kecamatan terutama dengan kecamatan yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Magelang. Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya terletak di wilayah perkotaan atau yang dilintasi oleh Jalan Nasional Yogyakarta-Semarang dan merupakan kawasan strategis cepat tumbuh (Kecamatan Muntilan, Secang, dan Mertoyudan). Hal ini memudahkan penduduk untuk mengakses sarana prasarana yang relatif lebih lengkap dan menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk tinggal disana. Selain itu, faktor geografis berupa kondisi topografi bergunung atau berbukit turut mempengaruhi persebaran penduduk karena cukup sulit untuk pengembangan permukiman.

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muntilan yang mencapai 2.774 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kajoran yaitu 716 km/jiwa².

c. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Magelang secara umum memiliki angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang besar. Angka rasio jenis kelamin yang cukup besar ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka rasio jenis kelaminnya, secara umum selama kurun waktu tahun 2014-2016, angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang relatif tetap, yakni 101. Pada tahun 2017 dan 2018 angka *sex ratio* 102 yang dapat diartikan bahwa terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2014	619.125	614.570	1.233.695	101
2	2015	624.973	620.523	1.245.496	101
3	2016	630.821	626.302	1.257.123	101
4	2017	648.458	634.947	1.283.405	102
5	2018	650.382	639.733	1.290.115	102

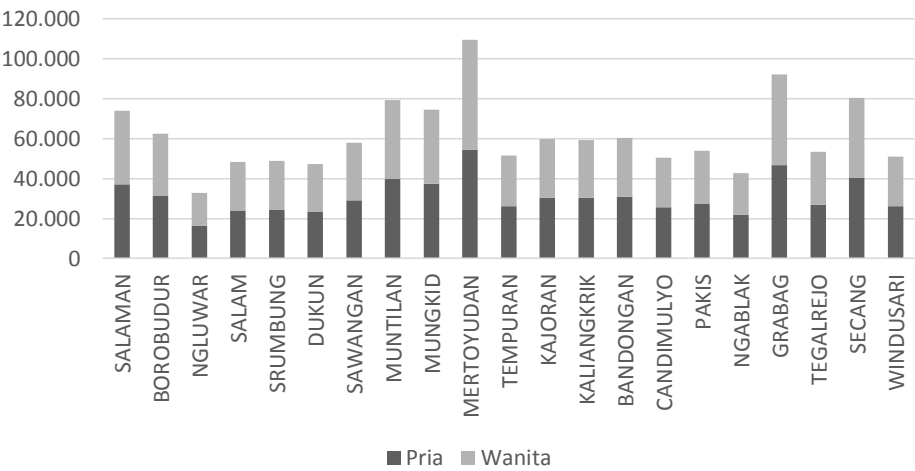
Sumber :

- 1. Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- 2. Hasil Olahan, 2019

Berdasarkan data tahun 2018, angka *sex rasio* tertinggi berada di Kecamatan Windusari, yakni 106 artinya terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang memiliki angka rasio terendah adalah Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Ngluwar, yakni dengan angka rasio 99, artinya hanya terdapat 99 jiwa penduduk laki-laki

untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Hal tersebut mengindikasikan jumlah penduduk laki-laknya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Terdapat dua kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang yang penduduk laki-laknya lebih sedikit daripada penduduk perempuannya, yaitu Kecamatan Ngluwar dan Mertoyudan sehingga di kecamatan tersebut angka *sex ratio*-nya berada di bawah angka 100, sebagaimana digambarkan pada grafik berikut.

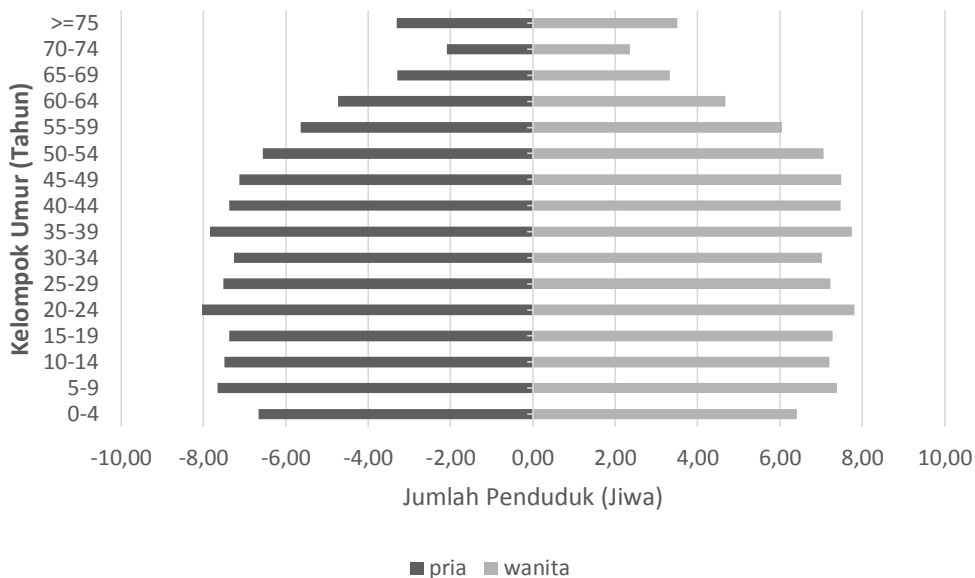


Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.7
Grafik Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Magelang Tahun 2018

d. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Penduduk dengan kelompok usia 5-9, 10-14, dan 15-19 tahun memiliki jumlah paling tinggi, terlihat pada piramida penduduk yang mengembang di bagian bawah. Artinya, penduduk usia muda cukup dominan di Kabupaten Magelang. komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Struktur penduduk menurut umur di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada piramida penduduk berikut ini.



Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.8

Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2018

Pada tahun 2018, Kabupaten Magelang didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 898.473 jiwa. Adapun penduduk usia nonproduktif (<15 + >65 tahun) Kabupaten Magelang adalah sebesar 391.642 jiwa. Dengan demikian, dapat diukur bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 0,44 menunjukkan rata-rata 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Magelang masih harus menanggung kurang lebih 44 penduduk usia non produktif.

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Magelang mengalami bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Di dalam rentang masa bonus demografi, terdapat waktu yang rasio ketergantungannya pada titik terendah, hal ini yang disebut jendela kesempatan (*window of opportunity*). Kabupaten Magelang mulai menikmati bonus demografi sejak tahun 2011 dan berdasarkan proyeksi penduduk akan memiliki jendela kesempatan antara tahun 2017 sampai 2020.

- e. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan

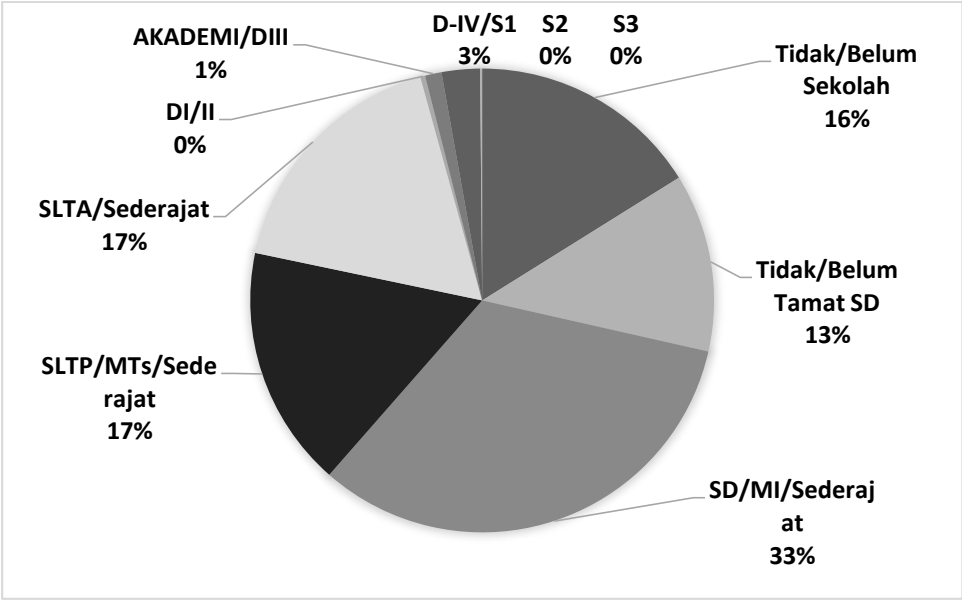
Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut status pendidikan. Data pada tahun 2014 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa struktur penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/MI/ sederajat. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.16
 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
 di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Tidak/Belum Sekolah	179.681	191.559	198.444	195.188	207.959
2	Tidak/Belum Tamat SD	192.725	181.101	167.929	167.215	160.204
3	SD/MI/Sederajat	428.824	433.149	432.473	432.488	424.710
4	SLTP/MTs/Sederajat	208.004	206.408	212.419	215.060	217.129
5	SLTA/Sederajat	204.506	205.823	216.346	220.622	224.694
6	DI/II	5.076	4.682	4.527	4.421	4.324
7	AKADEMI/DIII	13.993	13.958	14.187	14.432	14.802
8	PT	29.691	30.410	32.299	33.979	36.293
	D-IV/S1					34.449
	S2					1.648
	S3					196
	Jumlah	1.262.500	1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

Grafik berikut menunjukkan penduduk dengan pendidikan SD/MI/ sederajat mendominasi di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magelang.



Sumber : Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.9
 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
 di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

- f. Struktur Penduduk Menurut Agama

Struktur penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan

umat beragama. Mayoritas penduduk di Kabupaten Magelang memeluk agama Islam, yaitu hingga mencapai 97%, selanjutnya penduduk beragama Katolik yakni sebesar 2%. Selain itu terdapat penduduk beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Keberagaman agama di kabupaten ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan dan dipertahankan agar dapat hidup dengan harmonis.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Islam	1.225.568	1.230.979	1.243.565	1.248.402	1.255.556
2	Kristen	10.609	10.657	10.544	10.532	10.562
3	Katolik	24.601	24.052	23.284	23.302	22.907
4	Hindu	206	207	212	197	188
5	Budha	323	309	294	291	290
6	Konghucu	10	11	11	11	9
7	Lainnya	1.183	875	714	670	603
Jumlah		1.262.500	1.267.090	1.278.624	1.283.405	1.290.115

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

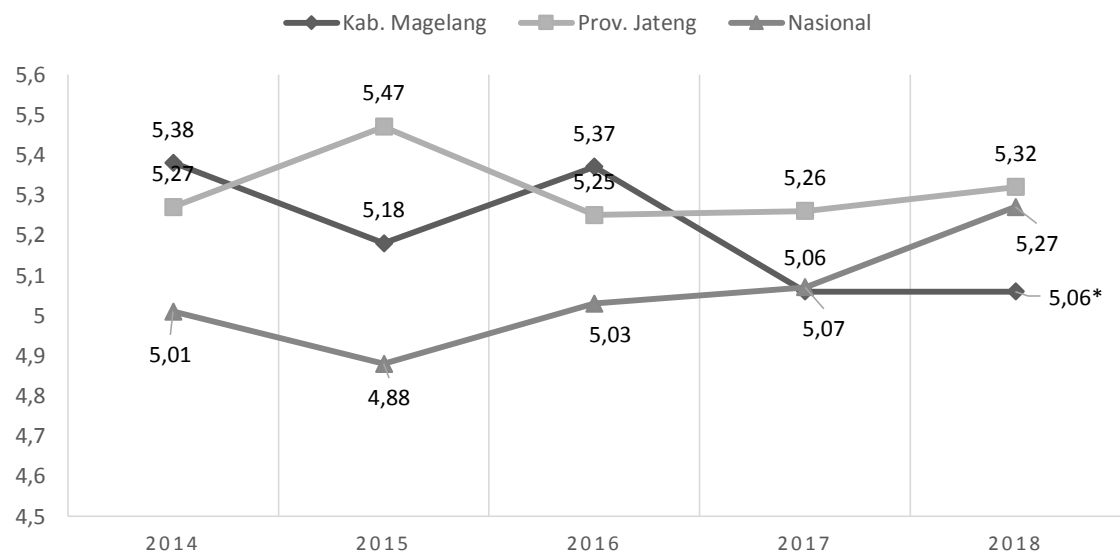
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang relatif stabil pada kisaran 5,38% - 5,06% dengan rata-rata 5,26%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (rata-rata 5,05), namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (rata-rata). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 5,06% setara dengan tahun 2017 (5,06%) dan lebih baik dibandingkan nasional (5,17%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 5,32% dan dibandingkan nasional (5,27%).

Terdapat tiga penjelasan, mengapa pertumbuhan ekonomi melambat. Pertama, karena terjadi perlambatan pertumbuhan dua sektor pemberi kontributor terbesar, yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan. Sektor industri sebagai kontributor pertama (21,25%) mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,26%. Pada tahun 2016, sektor industri tumbuh 5,79% dan pada tahun 2017 tumbuh lebih lambat, yaitu sebesar 4,53%. Sektor pertanian sebagai kontributor terbesar kedua (20,71%) mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,46%. Pada tahun 2016 sektor industri tumbuh 3.32% dan pada tahun 2017 tumbuh lebih lambat menjadi 1.86%. Kedua, melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 juga disebabkan penurunan investasi yang ditunjukkan dalam angka PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Pada tahun 2013 PMTB sebesar 26,45%, terus menurun menjadi 25,78 pada tahun 2016. Ketiga, melambatnya

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 juga disebabkan penurunan *incremental capital output ratio* (ICOR). Pada tahun 2013 ICOR Kab. Magelang sebesar 4,47 menurun menjadi 5,45 pada tahun 2017.



*angka sementara

Gambar 2.10
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2013-2017 secara sektoral didukung dengan pertumbuhan positif seluruh lapangan usaha, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah jasa perusahaan, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Pertumbuhan tiap lapangan usaha di Kabupaten Magelang selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018 (%)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.89%	1,75%	3,54%	3.32%	1.86%	2.44%
B. Pertambangan dan Penggalian	5.90%	4,52%	1,71%	2.94%	4.20%	4.05%
C. Industri Pengolahan	10.93%	7,44%	5,52%	5.79%	4.53%	6.98%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.65%	3,32%	1,50%	4.83%	4.91%	4.96%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.29%	1,81%	1,33%	2.17%	6.51%	2.49%
F. Konstruksi	5.42%	5,08%	5,93%	6.32%	6.23%	5.91%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.13%	3,52%	3,99%	5.28%	6.09%	4.83%
H. Transportasi dan Pergudangan	8.56%	8,55%	8,54%	6.61%	6.13%	7.55%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	5.40%	7,50%	6,60%	6.02%	6.35%	6.27%

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Minum						
J. Informasi dan Komunikasi	7.95%	13,04%	9,45%	8.09%	11.27%	9.79%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.39%	5,23%	8,44%	9.06%	5.89%	6.60%
L. Real Estate	7.70%	7,18%	7,35%	6.56%	6.49%	7.07%
M,N. Jasa Perusahaan	12.06%	8,36%	9,74%	10.18%	8.72%	10.10%
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2.73%	1,67%	4,24%	2.22%	2.57%	2.63%
P. Jasa Pendidikan	9.41%	10,17%	7,10%	6.45%	7.15%	8.00%
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.10%	11,17%	6,92%	9.78%	8.60%	8.81%
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9.22%	8,51%	3,29%	8.64%	8.79%	8.17%
PDRB	5.91%	5,38%	5,18%	5.37%	5.06%	5.44%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp 17.020.755,61 juta (2013) menjadi Rp 20.882.801 juta (2017). Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada periode yang sama meningkat dari Rp. 19.602.844,86 juta (2013) menjadi Rp. 28.045.174 trilyun (2017). Peningkatan nilai PDRB baik ADHK Tahun 2010 dan ADHB didukung dengan peningkatan nilai PDRB pada seluruh lapangan usaha. Rincian nilai PDRB tiap lapangan usaha baik ADHK 2010 maupun ADHB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
 Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.900.103	3.968.480	4.109.141	4.245.740	4.324.893
B. Pertambangan dan Penggalian	706.372	738.286	750.943	772.990	805.456
C. Industri Pengolahan	3.539.294	3.802.680	4.012.571	4.244.932	4.437.345
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.907	11.269	11.439	11.992	12.581
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.080	18.407	18.652	19.057	20.297
F. Konstruksi	1.609.322	1.691.118	1.791.406	1.904.581	2.023.236

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2013	2014	2015	2016	2017
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.500.051	2.588.142	2.691.442	2.833.603	3.006.270
H. Transportasi dan Pergudangan	619.318	672.277	729.692	777.889	825.559
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	677.721	728.538	776.587	823.333	875.649
J. Informasi dan Komunikasi	667.692	754.788	826.096	892.927	993.559
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	435.101	457.848	496.492	541.480	573.355
L. Real Estate	346.974	371.874	399.216	425.387	452.994
M,N. Jasa Perusahaan	38.334	41.537	45.583	50.225	54.604
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	645.104	655.888	683.672	698.849	716.810
P. Jasa Pendidikan	818.858	902.153	966.240	1.028.593	1.102.138
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121.845	136.202	145.634	159.884	173.634
R,S,T,U. Jasa Lainnya	365.678	396.801	409.849	445.280	484.420
PDRB	17.020.756	17.936.288	18.864.652	19.876.744	20.882.801

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.20
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang
 Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.698.034	5.180.516	5.672.624	6.001.891	6.109.389
B. Pertambangan dan Penggalan	758.101	925.847	1.081.439	1.140.800	1.235.485
C. Industri Pengolahan	4.163.188	4.739.300	5.269.654	5.715.498	6.083.683
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.330	10.703	11.433	12.564	14.278
E. Pengadaan Air,					

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2013	2014	2015	2016	2017
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.843	19.527	20.486	21.341	22.962
F. Konstruksi	1.804.903	2.032.068	2.240.639	2.421.237	2.653.667
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.792.601	2.980.680	3.223.591	3.516.599	3.855.484
H. Transportasi dan Pergudangan	627.824	729.827	820.656	879.968	997.903
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	776.872	882.266	980.916	1.096.807	1.201.523
J. Informasi dan Komunikasi	638.366	704.278	756.341	818.843	949.119
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	513.793	563.839	634.887	714.606	788.352
L. Real Estate	356.116	401.249	445.879	482.445	526.299
M,N. Jasa Perusahaan	42.711	47.921	55.349	63.090	71.045
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	755.468	805.662	873.406	941.578	997.561
P. Jasa Pendidikan	1.108.648	1.276.873	1.388.111	1.524.253	1.699.000
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144.741	168.512	188.190	208.452	231.882
R,S,T,U. Jasa Lainnya	392.304	454.346	485.043	548.977	607.541
PDRB	19.602.845.00	21.923.411.00	24.148.644.00	26.108.949.00	28.045.174.00

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Sektor yang dominan menunjang perekonomian daerah di Kabupaten Magelang adalah sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kontribusi sebesar 20,71% serta industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 21,25% pada tahun 2017. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan trend meningkat. Pertumbuhan sektor primer terus menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung naik.

Tabel 2.21
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
di Kabupaten Magelang

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,97	22,91	23,63	22,13	23,97	22,91	23,63	23,40	21,78	20,71
2	Pertambangan dan Penggalian	3,87	4,15	4,22	4,12	3,87	4,15	4,22	4,44	4,41	3,86
3	Industri Pengolahan	21,24	20,79	21,62	21,20	21,24	20,79	21,62	21,80	21,69	21,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,09	0,10	0,10	0,11	0,09	0,08	0,08	0,10
6	Konstruksi	9,21	9,46	9,27	9,43	9,21	9,46	9,27	9,29	9,46	9,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	14,69	13,60	14,43	14,25	14,69	13,60	13,39	13,75	14,40
8	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,64	3,33	3,75	3,20	3,64	3,33	3,40	3,56	3,95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	3,98	4,02	4,06	3,96	3,98	4,02	4,06	4,28	4,19
10	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,92	3,21	4,21	3,26	3,92	3,21	3,13	3,38	4,76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,56	2,57	2,55	2,62	2,56	2,57	2,66	2,81	2,75
12	Real Estate	1,82	2,04	1,83	2,07	1,82	2,04	1,83	1,85	1,88	2,17
13	Jasa Perusahaan	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23	0,25	0,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	3,79	3,67	3,66	3,85	3,79	3,67	3,66	3,56	3,43
15	Jasa Pendidikan	5,66	4,81	5,82	5,03	5,66	4,81	5,82	5,77	6,06	5,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,72	0,77	0,76	0,74	0,72	0,77	0,78	0,83	0,83
17	Jasa Lainnya	2,00	2,15	2,07	2,21	2,00	2,15	2,07	2,01	2,17	2,32
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari Rp.19,602,844.00 juta (2013) menjadi Rp 26,108,949.00 juta (2016).

Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama meningkat dari Rp 17.020.756 juta (2013) menjadi Rp. 20.882.801 juta (2017).

Tabel 2.22
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.203.515.00	16.525.058.00	17.824.181.00	19.068.541.00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	361.325.00	416.122.00	449.990.00	485.222.00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.730.237.00	1.916.932.00	2.127.326.00	2.208.562.00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.147.306.00	5.909.839.00	6.568.277.00	7.049.221.00
Perubahan Inventori	985.074.00	1.152.563.00	799.000.00	207.342.00
Ekspor	7.054.331.00	7.483.485.00	8.093.797.00	9.200.203.00
Impor	10.878.944.00	11.480.588.00	11.713.927.00	12.110.142.00
Net Ekspor	(3,824,613.00)	(3,997,103.00)	(3,620,130.00)	(2,909,940.00)
	19,602,844.00	21,923,411.00	24,148,644.00	26,108,949.00

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2017

Tabel 2.23
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.716.030	13.170.151	13.707.303	14.317.885	14.967.593
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	304.619	323.926	319.783	337.020	351.286
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.394.414	1.429.358	1.464.116	1.472.425	1.513.353
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.501.616	4.679.504	4.889.693	5.124.684	5.481.955
Perubahan Inventori	544.883	561.287	157.169	142.566	151.535
Ekspor	7.297.928	7.276.740	7.844.697	8.292.527	8.641.789
Impor	9.738.734	9.504.677	9.518.108	9.810.362	10.224.710
Net Ekspor	(2.440.806)	(2.227.937)	(1.673.412)	(1.517.835)	(1.582.920)
PDRB Pengeluaran	17.020.756	17.936.288	18.864.652	19.876.744	20.882.801

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2013 Konsumsi RT sebesar 77,56%, maka pada tahun 2017 Konsumsi RT menjadi sebesar 72,77%. Demikian juga komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2013 komponen net export sebesar -19,51%, pada tahun 2017 komponen net export menjadi sebesar -19,51 %. Perkembangan positif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB). Jika pada tahun 2013 komponen PMTB sebesar 26,26%, pada tahun 2017 komponen PMTB menjadi sebesar 27.45%.

Tabel 2.24
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	77.56	75.38	73.81	73.03	72.77
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.84	1.9	1.86	1.86	1.85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.83	8.74	8.81	8.46	8.36
Pembentukan Modal Tetap Bruto	26.26	26.96	27.2	27	27.45
Perubahan Inventori	5.03	5.26	3.31	0.79	1.36
Ekspor	35.99	34.13	33.52	35.24	33.19
Impor	55.5	52.37	48.51	46.38	44.98
Net Ekspor	-19.51	-18.23	-14.99	-11.15	-11.79
PDRB Pengeluaran	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2013 Konsumsi RT sebesar 74.71%, maka pada tahun 2017 Konsumsi RT menjadi sebesar 71.67%. Demikian juga komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun mengalami penurunan, jika pada tahun 2013 komponen *net export* sebesar -14.34%, pada tahun 2017 komponen *net export* menjadi sebesar -7.58%.

Perkembangan stagnan terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika pada tahun 2013 komponen PMTB sebesar 26.45%, pada tahun 2017 komponen PMTB menjadi sebesar 26.25%.

Tabel 2.25
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74.71%	73.43%	72.66%	72.03%	71.67%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.79%	1.81%	1.70%	1.70%	1.68%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.19%	7.97%	7.76%	7.41%	7.25%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	26.45%	26.09%	25.92%	25.78%	26.25%
Perubahan Inventori	3.20%	3.13%	0.83%	0.72%	0.73%
Ekspor	42.88%	40.57%	41.58%	41.72%	41.38%

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Impor	57.22%	52.99%	50.45%	49.36%	48.96%
Net Ekspor	-14.34%	-12.42%	-8.87%	-7.64%	-7.58%
PDRB Pengeluaran	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun tumbuh 5,38%, namun mengalami pelambatan. Jika pada tahun 2013 tumbuh sebesar 5,91%, maka pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,06%.

Kontribusi ekspor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun mengalami pertumbuhan paling cepat sebesar 4,95%. Namun juga mengalami pelambatan, jika dibanding dengan komponen ekspor pada tahun 2013 yang tumbuh sebesar 7,33%, maka pada tahun 2017 komponen ekspor tumbuh sebesar 4,21%.

Demikian juga komponen *net export* (ekspor – import) selama lima tahun mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2013 komponen *net export* sebesar – 19,22%, pada tahun 2017 komponen *net export* menjadi sebesar 4,29%.

Perkembangan pertumbuhan terjadi pada komonen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika pada tahun 2013 komponen PMTB tumbuh sebesar 2,97%, pada tahun 2017 komponen PMTB tumbuh sebesar 6,97%.

Tabel 2.26
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Sektor PDRB Pengeluaran Seri 2010	Tahun					RATA-RATA
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.32	3.57	4.08	4.45	4.54	4.19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.73	6.34	-1.28	5.39	4.23	4.48
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.83	2.51	2.43	0.57	2.78	2.42
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.97	3.95	4.49	4.81	6.97	4.64
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	
Ekspor	7.33	-0.29	7.81	5.71	4.21	4.95
Impor	-0.84	-2.4	0.14	3.07	4.22	0.84
Net Ekspor	-19.22	-8.72	-24.89	-9.3	4.29	-11.57
PDRB Pengeluaran	5.91	5.38	5.18	5.37	5.06	5.38

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.2.2. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Magelang mengalami penurunan, jika pada tahun 2014 sebesar 7,91 menjadi lebih lambat pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,66. Pada tahun 2018 laju inflasi Kabupaten Magelang lebih lambat dari laju

inflasi Provinsi Jawa Tengah (2,83) maupun Nasional (3,13). Inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

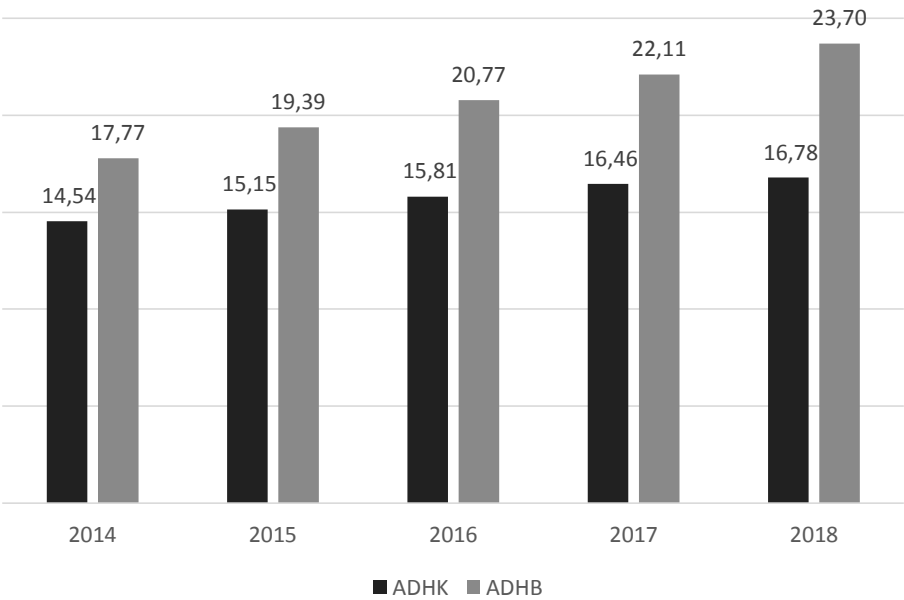
Tabel 2.27
Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2014-2018

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bahan Makanan	%	13,02	3,80	6,25	2,15	3.39
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	%	5,23	6,40	5,23	2,47	2.99
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	%	7,83	5,34	1,21	5,67	1.68
4	Sandang	%	3,44	2,23	2,53	2,77	2.06
5	Kesehatan	%	3,30	3,45	2,42	2,21	2
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	%	2,36	2,67	0,80	2,64	1.45
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	%	10,48	-1,86	2,14	5,01	3.57
Inflasi Kabupaten Magelang		%	7,91	3,60	2,86	3,47	2,66
Inflasi Provinsi Jawa Tengah		%	8,22	2,73	2,36	3,71	2,83
Inflasi Nasional		%	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2019

2.1.2.3. PDRB Per Kapita

Pada tahun 2014 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.14.538.602/tahun dan meningkat menjadi Rp.17.005.825/tahun pada tahun 2018. Sementara itu, pada tahun 2014 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.17.770.441/tahun dan meningkat menjadi Rp.23.922.080/tahun pada tahun 2018. Data PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2019

Gambar 2.11
PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

2.1.2.4. Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya, kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Tabel 2.28
Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indeks Gini	0,34	0,36	0,37	n/a	0,344
2	Kriteria Ketimpangan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
3	Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah	0,38	0,38	0,37	0,37	n/a

Sumber: Laporan Akhir Evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

Koefisien gini Kabupaten Magelang pada periode tahun 2014-2016 relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,34-0,37. Koefisien gini Kabupaten Magelang masih lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kondisi distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Magelang masih dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan penduduk tidak hanya dapat dilihat dari angka koefisien gini, tetapi dapat diamati dengan pendekatan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia merupakan pemerataan pendapatan yang diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Pendekatan ini mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut.

1. Ketimpangan pendapatan tinggi
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.
2. Ketimpangan pendapatan sedang/menengah
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen.
3. Ketimpangan pendapatan rendah
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

Tabel 2.29
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Kelompok Penduduk					
		2014	2015	2016	2017	2018
1	40 % Penduduk Berpendapatan Terendah	19,46	19,18	n/a	n/a	18,61
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	36,22	33,72	n/a	n/a	36,15
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	44,32	47,10	n/a	n/a	45,42
Kriteria Ketimpangan		Rendah	Rendah	n/a	n/a	rendah

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2019

Berdasarkan pendekatan ini, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang masuk ke dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah. Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada periode 2014-2015 cenderung tetap, sedangkan untuk proporsi penduduk berpendapatan tinggi mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2014-2015. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di dalam Kabupaten Magelang cenderung tetap.

2.1.2.6. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Indeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Hasil pengukuran Indeks Williamson kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. $IW < 0,4$ artinya tingkat ketimpangan rendah;
- b. $0,4 < IW < 0,5$ artinya tingkat ketimpangan moderat;
- c. $IW > 0,5$ artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya apabila Indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin besar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Indeks Williamson Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori moderat. Tercatat besar indeks williamson Kabupaten Magelang pada tahun

2014 sebesar 0,40 dan cenderung stagnan hingga tahun 2016. Besar nilai Indeks Williamson yang masih masuk dalam kategori moderat menunjukkan bahwa masih perlunya pemerataan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Magelang.

2.1.2.7. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Magelang.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs*, sesuai tujuan pertama, Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun, pada tahun 2030 menargetkan angka kemiskinan menjadi nol (*zero poverty*).

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Berbicara kemiskinan tidak hanya terkait capaian persentase kemiskinan, namun ada beberapa indikator lain yang perlu dilihat, yaitu jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan konsumsi tahun 2014-2019 bisa dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Kemiskinan Berdasarkan Tingkat Konsumsi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator Kabupaten Magelang	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	246.292	253.866	271.800	281.237	296.327
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	160,48	162,38	158,86	157,15	143.44
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	12,98	13,07	12,67	12,42	11,23
Persentase Jumlah Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	87,02	86,93	87,33	87,58	88,77
Indek keparahan kemiskinan	%	0,47	0,32	0,44	0,34	0,31
Indek Kedalaman Kemiskinan	%	2,07	1,60	1,84	1,67	1,55

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2019

Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang mencapai 12,98% atau setara dengan 160 ribu jiwa dari total penduduk. Angka ini terus mengalami penurunan secara perlahan hingga mencapai angka 11,23% atau 143 ribu jiwa di tahun 2018. Jika dilihat perbandingan dengan provinsi dan nasional, secara umum menunjukkan kecenderungan

menurun. Pada periode Maret tahun 2018, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (11,32%), namun lebih tinggi dari Nasional (9,82 %). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2014-2018

No	Wilayah	Tahun				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Kabupaten Magelang	12,98	13,07	12,67	12,42	11,23
2	Prov. Jawa Tengah	14,46	13,58	13,27	13,01	11,32
3	Nasional	11,25	11,22	10,86	10,64	9,82

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2019

Persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi, tetapi menunjukkan tren penurunan. Adapun penurunan angka kemiskinan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1.19%. Demikian juga capaian provinsi dan nasional, jika dilihat di grafik di atas penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2018.

Penurunan angka kemiskinan tersebut secara umum dipengaruhi beberapa faktor. Adapun tiga faktor dominan tersebut adalah:1) bantuan sosial dari pemerintah turun tepat waktu, 2) nilai inflasi bisa dikendalikan, dan 3) naiknya nilai tukar petani.

Walaupun angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 dan Target SDGs sebesar 9% pada tahun 2018.

Tabel 2.32
Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang dengan Kota/ Kabupaten se Eks. Keresidenan Kedu 2014-2018

No	Wilayah	Tahun				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Kabupaten Magelang	12,98	13,07	12,67	12,42	11,23
2	Kota Magelang	9,14	9,05	8,79	8,00	7,87
3	Kabupaten Purworejo	14,41	14,27	13,91	13,00	11,67
4	Kabupaten Temanggung	11,55	11,76	11,60	11,00	9,87
5	Kabupaten Wonosobo	21,42	21,45	20,53	20,00	17,58
6	Kabupaten Kebumen	20,50	20,44	19,86	19,00	17,47

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2019

Dibandingkan 6 (enam) kab/ kota se eks. Keresidenan Kedu, capaian angka kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2018 berada pada posisi ke 3 (tiga), diatas Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, tetapi dibawah Kabupaten Wonosobo, Kabupeten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Penurunan angka kemiskinan tersebut secara umum dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:1) bantuan sosial dari pemerintah turun tepat waktu, 2) nilai inflasi bisa dikendalikan, dan 3) naiknya nilai tukar petani.

Penduduk miskin di Kabupaten Magelang memiliki ciri-ciri antara lain rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian, rendahnya akses terhadap tanah dan modal, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya keamanan individu. Adapun faktor yang mempengaruhi kemiskinan, antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Dalam rangka mengoptimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah melakukan upaya yang komperehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa, dan kebijakan Pemerintah Daerah. Bahkan pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang secara kelembagaan telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Magelang.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi politik yang disebabkan oleh struktur ekonomi politik yang timpang, sehingga pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilakukan dengan memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang inklusif, memperluas perumbuhan sector ekonomi kerakyatan dan kesempatan kerja, serta melakukan evaluasi efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2.1.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Pada 2017 IPM Kabupaten Magelang mencapai 6,39 mengalami kenaikan sebesar 2,04 dari tahun 2014 yang sebesar 66,35 dengan rata-rata keaikan per tahun 0,68. Semua komponen pembentuk indikator IPM mengalami peningkatan. Meski terus mengalami perkembangan positif, namun nilai indikator IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang,
Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017

Indikator IPM	Satuan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,25	73,27	73,33	73,39
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00	12,14	12,15	12,47
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,02	7,19	7,40	7,41
Pengeluaran Riil Per Kapita	Ribu Rp	7.877	8.182	8.501	8.627
IPM Kabupaten Magelang		66,35	67,13	67,85	68,39
Provisi Jawa Tengah		68,78	69,49	69,98	70,52
Nasional		68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2019

1. Umur Harapan Hidup

Pada 2017 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang mencapai 73,39 mengalami kenaikan sebesar 0,14 dari tahun 2014 yang sebesar 73,25. Namun UHH Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai dan pertumbuhan nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

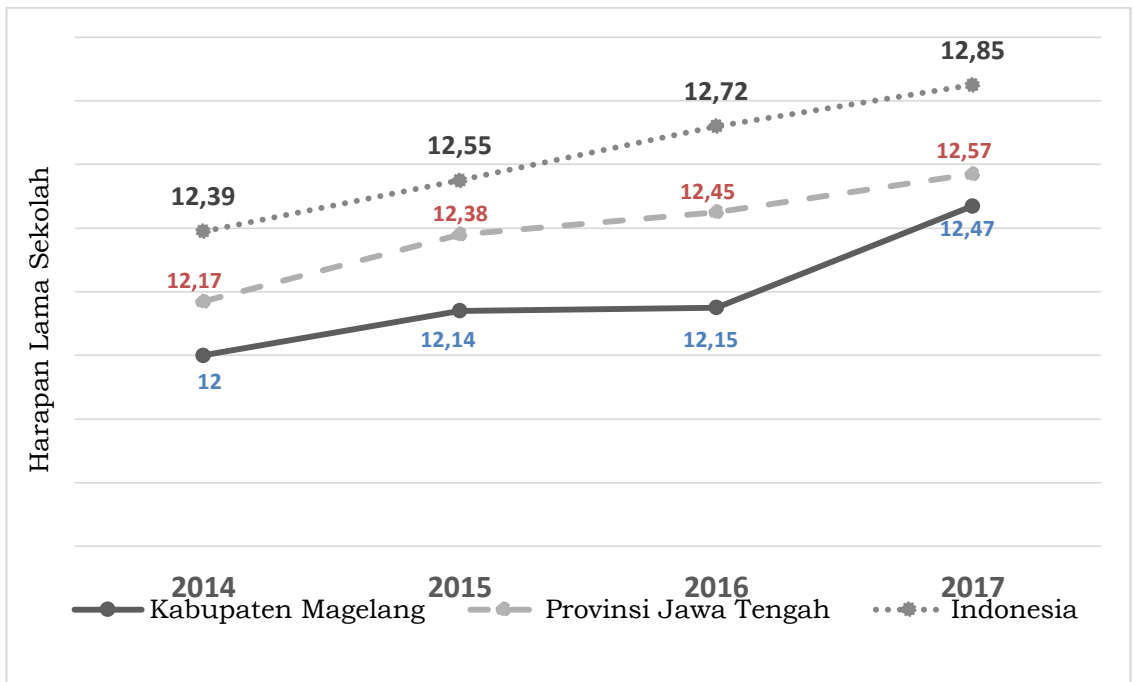
Tabel 2.33
Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Magelang	73,25	73,27	73,33	73,39
Provisi Jawa Tengah	73,88	73,96	74,02	74,08
Nasional	70,59	70,78	70,90	71,06

Sumber : Hasil Olahan 2019

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

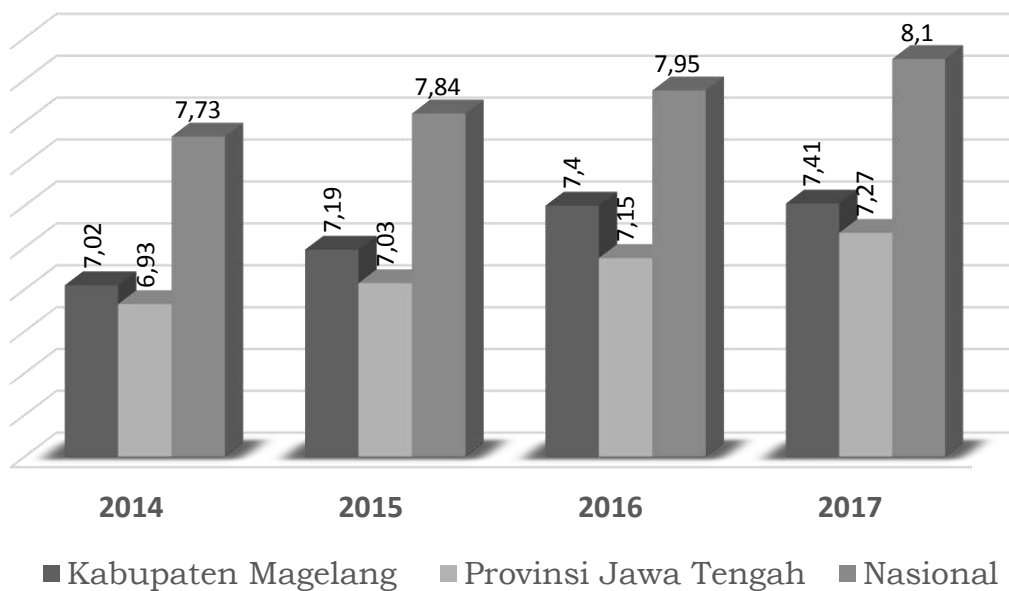
Perkembangan HLS di Kabupaten Magelang cenderung meningkat dari sebesar 12 (2014) menjadi 12,47 (2017). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2014-2017 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut



Gambar 2.12
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
Tahun 2014-2017

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada 2017 RLS Kabupaten Magelang mencapai 7,41 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,39 tahun dari tahun 2014 yang sebesar 7,02. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa tengah dan nasional, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2014-2017 lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari Rata-rata lama sekolah nasional. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.



Gambar 2.13
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
Tahun 2014-2017

4. Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan

Besar pengeluaran riil per kapita Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2014 hingga tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,38% selama empat tahun terakhir. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional nilai pengeluaran riil per kapita Kabupaten lebih rendah. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.34
Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Magelang	7.877	8.182	8.501	8.627
Provinsi Jawa Tengah	9.640	9.930	10.153	10.377
Nasional	9.903	10.150	10.420	10.664

Sumber : Bappeda dan litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2019

2.1.2.9. Angka Partisipasi Kasar

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Indeks Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Kasar PAUD	52,66	55,57	60,27	62,64	62,64
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101,33	99,87	103,69	105,87	110,75
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	83,52	84,49	82,40	88,38	88,91
Angka Partisipasi Kasar	82,73	87,51	87,70	88,55	87,43

Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang, 2019

APK jenjang SD tahun 2014-2018 telah mencapai 100%, bahkan melampaui. Namun untuk jenjang SMP sederajat APK belum mencapai 100%. Besaran APK tidak sampai 100 menunjukkan masih ada anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak sekolah. Hal ini secara umum menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan

2.1.2.10. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai ideal APM adalah 100%.`

Tabel 2.36
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	87,02	86,74	89,70	92,66	98,86
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	62,40	64,86	62,78	67,76	76,42
Angka Partisipasi Murni	74,71	75,8	76,24	80,21	87,64

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

APM jenjang SD dan SMP di Kabupaten Magelang selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan, namun belum mencapai angka 100%, bahkan untuk jenjang SMP masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah bahwa di kabupaten Magelang belum optimal.

2.1.2.11. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah angka yang memperlihatkan penduduk yang telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini mampu memperlihatkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.37
Angka Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	APT	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Sederajat	%	34,48	33,97	34,18	33,82	33,70
2	SLTP/MTs/Sederajat	%	16,82	16,48	16,29	16,61	16,76
3	SLTA/Sederajat	%	16,34	16,20	16,24	16,92	17,19
4	Perguruan Tinggi	%	4,01	4,65	3,87	3,99	4,12

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2018

Persentase tertinggi pada indikator angka pendidikan yang ditamatkan (APT) di Kabupaten Magelang terdapat pada jenjang pendidikan SD. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk Magelang hanya tamat pada jenjang pendidikan SD. Untuk perkembangan APT SD secara umum mengalami sedikit penurunan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2016 APT SD sebesar 33, 82%, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 33,70%. APT SMP pada tahun 2016 sebesar 16,61%, sedangkan pada tahun 2017 mencapai angka 16,76%. Dengan berkurangnya APT SD/MI/ sederajat dan naiknya angka APT SMP/MTs/sederajat, SLTA /sederajat serta perguruan tinggi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Magelang mengalami kenaikan.

2.1.2.12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender (BPS).

Pembangunan gender atau pembangunan yang berhubungan dengan gender (*Gender Development atau Gender Related Development*), ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam suatu angka atau indeks. Semakin besar ketimpangan di antara keduanya dalam pembangunan manusia, semakin rendah nilai indeks tersebut. Variabel yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan gender (*GDI atau IPG*) adalah:

- 1. Proporsi jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan.
- 2. Usia harapan idup (laki-laki dan perempuan).
- 3. Persentase melek huruf (laki-laki dan perempuan).
- 4. Rata-rata lama sekolah (laki-laki dan perempuan).
- 5. Persentase penduduk aktif secara ekonomi (TPAK) laki-laki dan perempuan.
- 6. Upah di luar sektor pertanian (laki-laki dan perempuan).
- 7. Paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*).
- 8. Setiap variabel, kecuali proporsi penduduk dan paritas daya beli (*PPP*) dihitung indeks. Akhirnya didapatkan:
 - 1. indeks usia harapan hidup
 - 2. indeks pendidikan
 - 3. indeks distribusi pendapatan.

Berikut ini adalah capaian pembangunan gender (IPG) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018:

Tabel 2.38
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Magelang	92,79	92,91	n/a	91,95	92,23
Provinsi Jawa Tengah	91,89	92,21	92,22	91,94	91,95
Nasional	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

Secara umum IPG di Kabupaten Magelang pada Tahun 2014-2018 mengalami penurunan walaupun hanya sedikit. Pada tahun 2014 capaian IPG Kabupaten Magelang sebesar 92,79%, sempat turun di angka 91,95% pada tahun 2017 tetapi berhasil naik kembali menjadi 92,23% pada Tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sedikit melebar di Kabupaten Magelang. Jika dibandingkan capaian IPG Provinsi dan Nasional, sampai dengan tahun 2018 capaian Kabupaten Magelang masih lebih baik (di atas Povinsi dan Nasional).

2.1.2.13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi, dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi berpartisipasi politik diwakili dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dimensi ekonomi dan pengambilan keputusan diwakili oleh perempuan sebagai tenaga profesional teknisi, kepemimpinan, dan ketatalaksanaan. Dimensi terakhir berupa dimensi penguasaan sumber daya ekonomi, yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Berdasarkan data tahun 2014-2017, angka IDG di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Angka IDG dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2017, IDG di Kabupaten Magelang sebesar 62,43, menurun drastis jika dibandingkan dengan angka tahun 2015 serta lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Magelang	65,54	68,53	n/a	62,43
Provinsi Jawa Tengah	74,46	74,80	74,89	75,10
Nasional	70,68	70,83	71,39	71,74

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

2.1.2.14. Kebudayaan

Pencapaian pembangunan seni budaya dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi, serta jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2013- 2017) menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah sarana penyelenggaraan seni di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2013- 2017) menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013 sebanyak 18 buah meningkat menjadi 27 buah di tahun 2017. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2013- 2017) menunjukkan kecenderungan meningkat, pada tahun 2013 sebanyak 600 buah meningkat menjadi 683 buah di tahun 2017.

Tabel 2.40
Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	54	44	81	38	n/a
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	25	25	25	27	n/a
3.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diinventarisasi	n/a	698	698	922	949
4.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	n/a	n/a	10	10	10

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2019

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Magelang selama tahun 2014 sampai 2017 berada pada kondisi yang baik, hampir mendekati 100%. Capaian terbaik angka kelulusan SD/MI/Paket A diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Sementara itu, angka kelulusan SMP/MTs/Paket B mencapai 100% pada tahun 2015. Data angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99,98	99,98	100,00	99,99	100,00
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99,49	100,00	99,98	99,77	99,91

Sumber Data : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan data tahun 2018, angka kelulusan SD/MI di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Artinya proses belajar mengajar di dalam kelas untuk mencetak murid yang sesuai kemampuan pada jenjang pendidikan tertentu yang dilakukan guru telah berhasil.

2) Rerata Nilai Ujian Nasional

Rerata nilai ujian nasional SD/MI/Paket A di Kabupaten Magelang selama tahun 2014 sampai 2018 cenderung menurun. Berbeda dengan rerata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B yang cenderung naik walaupun angka kenaikannya belum signifikan. Data rerata nilai ujian nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42
 Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang
 Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rerata Nilai UN SD/MI/ Paket A	7,77	7,25	7,03	7,59	7,03
Rerata Nilai UN SMP/MTs/Paket B	5,81	6,19	5,86	5,78	5,98
Rerata Nilai UN	6,79	6,72	6,445	6,685	6,505

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Tren untuk rerata nilai UN SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Penurunan nilai rata-rata tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas pada lulusan peserta didik.

3) Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Akreditasi sekolah/madrasah merupakan kegiatan penilaian sekolah/madrasah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai 85 < nilai ≤ 100; B (Baik) dengan nilai 70 < nilai ≤ 85 dan C (Cukup) dengan nilai 56 ≤ nilai ≤ 70. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.43
 Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B
 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase SD berakreditasi minimal B.	Persen	98,01	98,51	98,18	98,68	99,34
2	Persentase SMP berakreditasi minimal B.	Persen	90,98	89.60	88,19	86,82	88,37

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2019

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 98,01%, naik menjadi 99,34% pada tahun 2018. Persentase SMP berakreditasi minimal B sebesar 90,98% pada tahun 2014, mengalami penurunan menjadi 88,37% pada tahun 2018.

Walaupun belum mencapai 100%, kenaikan persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mutu pendidikan SD/MI.

4) Kompetensi Pendidik

Pelaksanaan urusan pendidikan dilihat dari kompetensi guru meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan guru yang bersertifikat pendidik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.44
Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1.	Guru memenuhi kualifikasi S1/DIV					
	1.1 Guru SD/MI	%	64.44	74.69	79.66	83.75
	1.2 Guru SMP/MTs	%	85.22	87.92	87.97	90.48
2.	Guru bersertifikasi					
	2.1. Guru SD/MI	%	-	43,68	49,08	51,49
	2.2. Guru SMP/MTs	%	-	55,57	55,89	56,31

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2018

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada tahun 2014 sebesar 64,44%, tahun 2015 sebanyak 74,69%, tahun 2016 sebanyak 79,66% dan tahun 2017 sebanyak 83,75%. Terlihat bahwa jumlah guru SD/MI yang memiliki kualifikasi SI/DIV menunjukkan trend yang naik. Tahun 2017 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV sebanyak 83,75% berarti masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi DIV/S1 sebesar 16,25%. Selain itu, pada tahun 2017 masih terdapat permasalahan terhadap banyaknya guru non PNS (33%), yang pengangkatannya tanpa seleksi yang terstandar dan belum dipayungi regulasi yang jelas. Hal tersebut sebagai akibat tidak seimbangnya guru PNS SD/MI yang pensiun dengan guru PNS SD/MI yang direkrut pemerintah. Jumlah guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, dari tahun 2014-2018 juga mengalami peningkatan. Guru yang bersertifikasi di SD/MI maupun di SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2014-2018. Namun jumlah guru yang bersertifikasi masih perlu ditingkatkan karena tahun 2017 baru mencapai 51,49% pada jenjang SD dan 56,31% pada jenjang SMP.

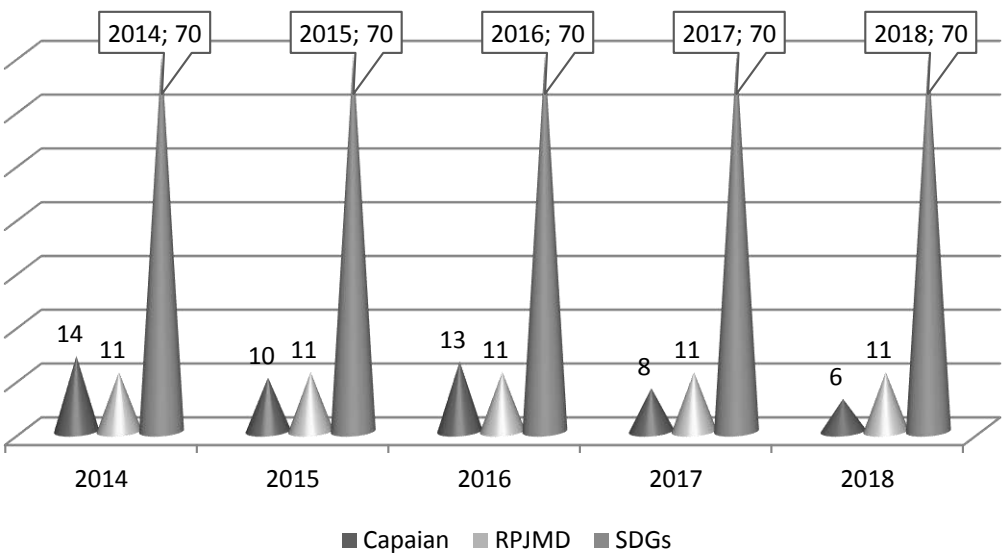
Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pada generasi muda. Salah satu langkah agar bonus demografi menjadi berkah bagi negara yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase pengangguran terbuka masih tergolong besar. Jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh, lulusan SD, SMP, SMA, SMK, menyumbang banyak angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu,

dalam memanfaatkan bonus demografi dilakukan pemerataan pendidikan yang meluas dan berkeadilan. Pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik merupakan strategi persiapan guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030.

b. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu

Angka kematian menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang. Angka kematian merupakan komposit dari empat komponen yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABa), dan Angka Kematian Neonatal (AKN). AKI, AKB, AKABa dari tahun 2014-2018 sebagaimana gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.14
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2019 kejadian angka kematian ibu tahun 2014 sebesar 14 kasus, tahun 2015 sebesar 10 kasus, tahun 2016 sebesar 13 kasus, tahun 2017 sebesar 8 kasus dan pada tahun 2018 sebesar 6 kasus. Secara umum angka kematian ibu di Kabupaten Magelang mengalami trend penurunan dari 14 kasus pada tahun 2014 menjadi 6 kasus pada tahun 2018.

2) Angka Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Tabel 2.45
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	149	131	147	114	55
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	18.663	17.956	17.984	17.192	17.424
3	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	Permil	7,98	7,30	8,17	6,13	5,68

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang sebesar 7,98 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tersebut justru mengalami tren naik turun hingga tahun 2016 yang kemudian menurun mencapai 5,68 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2018. Dalam gambar berikut dapat dibandingkan AKB di Kabupaten Magelang dengan target SDGs. Dalam goal SDGs 2030, AKB ditargetkan agar dapat ditekan hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. Pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, AKB ditargetkan pada tahun 2019 menjadi 6,5 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan standar SDGs tersebut, AKB di Kabupaten Magelang berada di posisi yang sudah baik yaitu di bawah 12 sejak tahun 2014 atau 7,98 per 1000 kelahiran hidup menurut RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

- 3) Angka Kematian Balita
- Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 1 hingga tepat sebelum 5 tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak usia di bawah 5 tahun. Data angka kematian balita di Kabupaten Magelang dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kematian	Balita	20	70	63	47	116

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Balita						
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	18.663	17.956	17.984	17.192	17.424
3.	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	permil	1,07	3,90	3,50	2,73	6,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian balita di Kabupaten Magelang dalam periode 2014-2018 mengalami tren parabola dengan pola naik kemudian turun. Puncak AKB terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 6,66 kematian per 1000 kelahiran hidup, sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 1,07 kematian per 1000 kelahiran hidup. Ada penurunan drastis kematian balita di tahun 2016 yaitu dari 63 kasus menjadi hanya 47 kasus pada tahun 2017 dan naik kembali pada tahun 2018.

4) Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Stunting

a) Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama. Data prevalensi balita gizi buruk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Anak	36	30	36	18	15
2.	Jumlah Balita	Anak	99.882	99.291	98.231	97.249	89.890
3.	Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,04	0,03	0,04	0,02	0,02
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi, meskipun pernah terjadi penurunan pada tahun 2015 yaitu dari 0,04% ke 0,03%, akan tetapi jika dilihat perkembangannya sejak tahun 2014 yang hanya sebesar 0,04% (36 kasus) menjadi 0,02% (18 kasus) pada 2017.

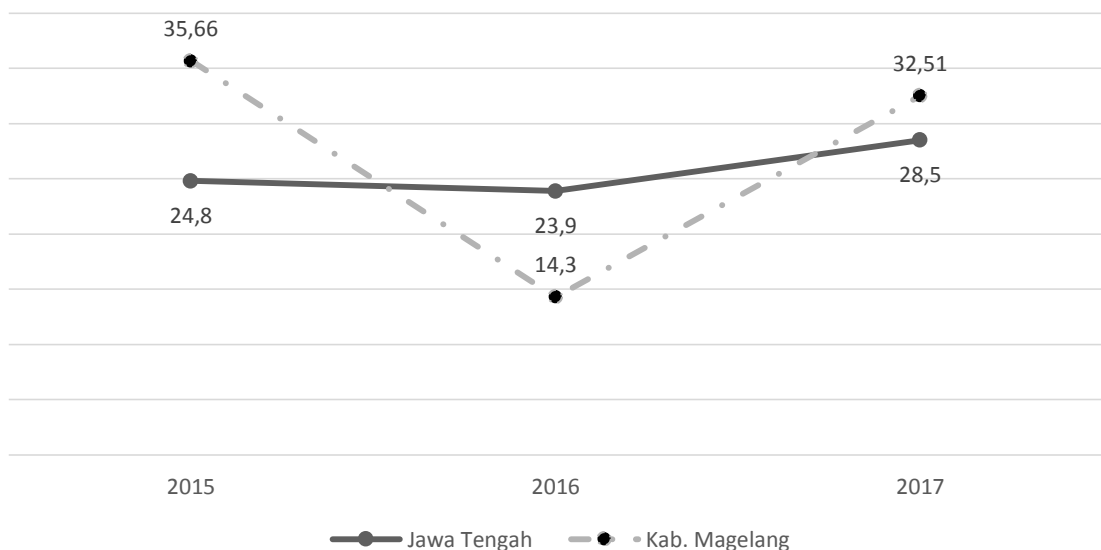
b) Stunting

Masih adanya kasus stunting disebabkan oleh beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

Banyaknya anak yang menderita stunting ini tidak lepas dari banyaknya masalah kekurangan gizi yang terjadi pada ibu yang hamil, sehingga anak yang ada dalam kandungan mengalami kekurangan gizi untuk berkembang, sehingga terlahir dengan kondisi kurang normal.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah akses pangan dan gizi di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang yang masih minim. Seperti di daerah pegunungan yang jauh dari cakupan pangan bergizi. Daerah endemik gondok seperti di pegunungan juga mempengaruhi. Kebanyakan stunting terjadi di daerah sana. Selain karena kurang cakupan pangan bergizi, bisa jadi akibat kekurangan yodium.

Pada tahun 2018 sesuai laporan dari puskesmas, prevalensi stunting sebesar 5,7. Sementara prevalensi Kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2015-2017, disajikan dalam grafis berikut.



Sumber data : Dinas Kesehatan Prov, Jateng dan Kab. Magelang

Gambar 2.15

Prevalensi Kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2015-2017

5) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur cakupan pelayanan dokter di masyarakat. Berdasarkan jenis profesinya, dokter dikelompokkan menjadi tiga yaitu

dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang bisa disebut dengan tenaga medis, yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dokter Umum	Orang	88	88	71	123	57
2	Dokter Gigi	Orang	37	38	37	44	29
3	Dokter Spesialis	Orang	52	51	51	52	15
4	Jumlah tenaga medis	Orang	177	177	159	219	101
5	Jumlah penduduk	Orang	1,262,500	1,267,090	1,278,624	1,283,405	1,290,115
6	Rasio dokter Umum per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	6.97	6.95	5.55	9.58	4.42
7	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	2.93	3.00	2.89	3.43	2.25
8	Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	4.12	4.02	3.99	4.05	1.16
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	14.02	13.97	12.44	17.06	7.83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Menurut data yang ada pada tabel di atas, secara jumlah, dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Magelang mengalami penurunan kuantitas. Dokter umum tahun 2014 ada 88 orang, sedangkan dokter spesialis ada 52 orang. Di tahun 2018 jumlah dokter umum 57 orang dan dokter spesialis 15 orang. Penurunan juga terjadi pada jumlah dokter gigi yang mengalami kenaikan jumlah dari 37 tahun 2014 menjadi 29 di tahun 2018.

Rasio dokter umum yang berada pada angka 4 memiliki gap yang sangat besar dengan standar idealnya yang mencapai 43 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter spesialis yang idealnya adalah 11 per 100.000 penduduk hanya mampu dipenuhi sebanyak 1,16 per 100.000 penduduk. Tidak jauh berbeda dengan rasio dokter gigi yang rasionya baru mampu dicapai sebanyak 2,25 per 100.000 penduduk dibandingkan standar idealnya yang sebesar 10.

6) Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit

Kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas layanan publik. Dengan kualitas layanan kesehatan yang baik maka akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari jumlah puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	29	29	29	29	29
2.	Jumlah Puskesmas yang ada	Unit	0	0	10	22	29
3.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	0	0	34,48	75,86	100,00
4.	Jumlah RSUD	Unit	1	1	1	1	1
5.	Jenjang RSUD berakreditasi	tingkat	dasar	dasar	dasar	madya	madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B 4 kali, polio 4 kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standar Pelayanan Minimal Nasional menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap kabupaten. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

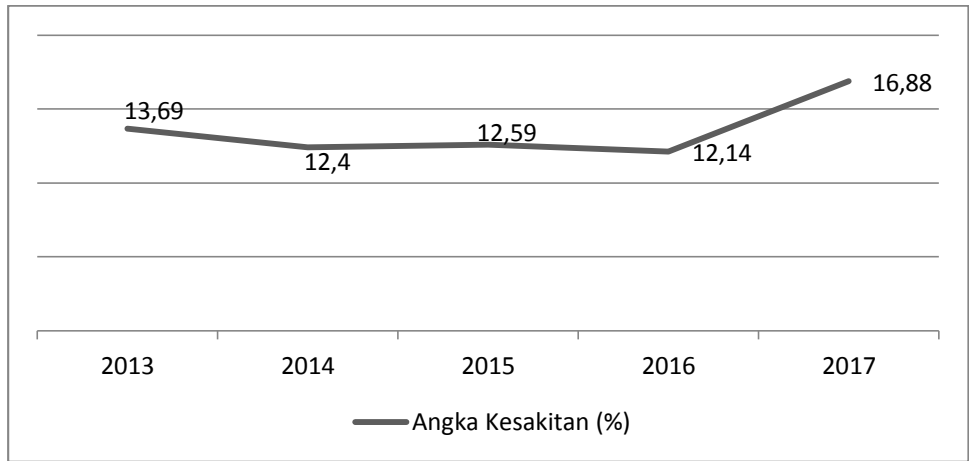
No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah desa / kelurahan UCI	Unit	372	372	372	372	372
2.	Jumlah Seluruh desa/ kelurahan	Unit	372	372	372	372	372
3.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Magelang berdasarkan tabel di atas telah mencapai 100% di setiap tahun (tahun 2014-2018). Dapat dilihat bahwa jumlah desa atau kelurahan UCI bersifat statis atau tidak berubah sejak tahun 2014 hingga 2018 yaitu sebanyak 372 unit.

8) Angka Kesakitan

Angka kesakitan Kabupaten Magelang pada tahun 2013 sebesar 13,69. Sementara pada tahun 2017 angka kesakitan meningkat menjadi 16,88. Data angka kesakitan di Kabupaten Magelang sebagai berikut.



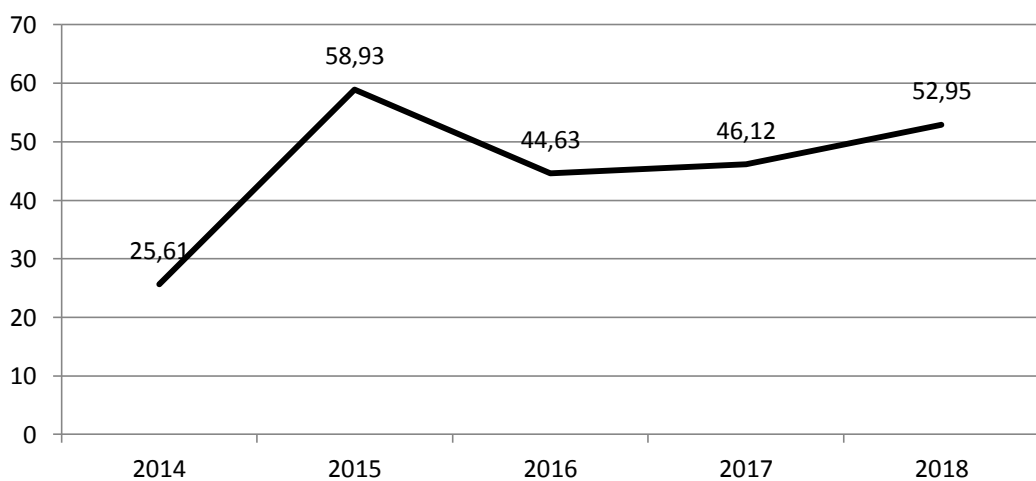
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.16
Angka Kesakitan Kab. Magelang Tahun 2013-2017

9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

a) Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di seluruh Kabupaten Magelang disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.17
Cakupan CNR TBC BTA di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Selama kurun waktu 5 tahun dari 2014-2018, terjadi fluktuasi jumlah penemuan dan penanganan kasus TBC BTA di Kabupaten Magelang. Tercatat, tahun 2014 CNR penderita TBC mengalami peningkatan di tahun 2015 dan menurun kembali pada tahun 2016 dan kembali meningkat di tahun 2017.

b) Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF).

Tabel 2.51
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penemuan penderita baru DBD	Jiwa	288	408	463	123	107
2	Jumlah penderita baru DBD yang diobati	Jiwa	288	408	463	123	107
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel cakupan di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2014-2018 telah mencapai 100%. Cakupan 100% ini telah mampu dicapai sejak tahun 2014 dan dipertahankan hingga 2018. Bila dilihat dari data dasarnya, maka tidak ada perubahan pada jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

c) Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDG"s). Di Kabupaten Magelang, pada tahun 2015 penderita malaria dengan pemeriksaan sediaan darah (positif) sebanyak 166 jiwa. Tahun 2015 ini, merupakan jumlah kasus ini tertinggi selama kurun waktu 2014-2018. Semua kasus malaria tersebut tidak ada kematian sehingga Case Fatality Rate (CFR) adalah 0. Tahun 2016, terjadi penurunan drastis menjadi 21 jiwa, dan penderita malaria meninggal adalah 0 sehingga Case Fatality Rate-nya 0. Pada tahun 2018, jumlah penderita malaria kembali turun menjadi 4 jiwa. Penderita malaria di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif)
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penderita malaria dengan pemeriksaan darah (positif)	Jiwa	6	166	21	14	4
2.	Jumlah penderita malaria meninggal	Jiwa	0	0	0	0	0
3.	Case Fatality Rate (CFR)	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

d) HIV/AIDS

HIV dan AIDS merupakan permasalahan global yang juga dirasakan oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Penderita HIV/AIDS menyebar diseluruh wilayah dan berbagai kalangan. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53
Prevalensi HIV/AIDS
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penderita HIV/AIDS	Jiwa	26	12	62	60	29
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.233.695	1.245.496	1.275.123	1.268.396	1.274.881
3.	Prevelensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0021	0.0010	0.0049	0.0047	0.0023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang angkanya pada tahun 2014 sebesar 26 jiwa dan tahun 2018 menjadi 29 jiwa.

- 10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular
Penyakit menular yang dimaksud dalam narasi ini adalah penyakit hipertensi, Diabetes Melitus (DM), dan gangguan jiwa, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Penyakit Tidak Menular Tahun 2014-2018 di Kab. Magelang

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Hipertensi	Jiwa	22.411	8.486	n/a	41.099	50.438
2.	Diabetes Melitus (DM)	Jiwa	3.873	1.346	n/a	2.812	7.077
3.	Gangguan Jiwa	Jiwa	695	575	n/a	889	1.434

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2019; data diolah

Data di atas terlihat bahwa penyakit tidak menular tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penyakit hipertensi pada tahun 2014 penderitanya 22.411 jiwa dan pada tahun 2018 menjadi 50.438 jiwa atau naik 44,43%. Penyakit diabetes melitus pada tahun 2014

penderitanya 3.673 jiwa dan pada tahun 2018 menjadi 7.077 jiwa atau naik 54,73%. Penyakit gangguan jiwa pada tahun 2014 penderitanya 695 jiwa dan pada tahun 2018 menjadi 1.434 jiwa atau naik 48,47%. Kenaikan penyakit tidak menular ini salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Untuk meminimalkan kenaikan penyakit tidak menular perlu perhatian dan penanganan yang lebih intensif. Bonus demografi penduduk di usia produktif ini bisa menjadi sumber daya manusia yang baik, mendorong kemajuan bangsa karena tersedianya tenaga kerja dan penerus tenaga kerja tersedia. Khususnya di Kabupaten Magelang bonus demografi merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, jika pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan penduduk yang hidup sehat, tidak sakit-sakitan, tidak stunting, tidak mengalami gizi buruk dan berotak cerdas, itu akan menjadi peluang bagus untuk pembangunan bangsa. Sehingga derajat kesehatan meningkat.

- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum yang harus ditangani sesuai kewenangan kabupaten meliputi jalan, bangunan pelengkap jalan, irigasi, cakupan layanan air minum, dan cakupan layanan air limbah domestik. Sedangkan urusan terkait dengan penataan ruang adalah kesesuaian tata ruang.

1) Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/180/KEP/25/2015 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebesar 1.000,83 km yang meliputi 249 ruas jalan. Data dan kondisi jalan di Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 2.55
 Data Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan
 di Kabupaten Magelang

No	Uraian	Satuan	2017	2018
	JALAN			
1	Jalan Nasional	Km	36,40	36,40
2	Jalan Provinsi	Km	118,68	118,68
3	Jalan Kabupaten	Km	1000,83	1000,83
4	Jalan Lingkungan	Km	2123, 31	2123, 31
5	Jumlah ruas jalan kab	ruas	249	249
	BANGUNAN PELENGKAP JALAN			
1	Jembatan kabupaten	Buah	337	339
2	Panjang jalan kab yang berdrainase	Km	357,5	360
3	Panjang jalan kab yang bertrotoar	Km	50,59	52,62
4	Panjang jalan kab yang bertalud (memiliki dinding penahan tanah)	Km	95,55	96,55

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Kondisi jalan kabupaten pada tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan
Tahun 2014 - 2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Baik	Km	579,94	608,34	619,80	736,88	742,30
			65,32	68,52	61,93	73,63	74,17
2	Sedang	Km	195,66	170,27	227,94	156,65	143,83
			22,04	19,18	22,78	15,65	14,37
3	Rusak	Km	91,02	88,02	120,96	96,27	95,98
			10,25	9,91	12,09	9,62	9,59
4	Rusak Berat	Km	21,21	21,20	32,13	11,03	18,72
			2,39	2,39	3,21	1,10	1,87
	Total Panjang jalan	Km	887,83	887,83	1000,83	1000,83	1000,83

Sedangkan kondisi jalan kewenangan kabupaten sesuai dengan standar yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.57
Kondisi Standar Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangannya
Tahun 2017 – 2018

No	Uraian	Satuan	2017	2018
	JALAN			
1	Jalan kabupaten lebar standar \geq 5,5 m (PP 34/2006)	Km	207,74	227,74
		%	20,76	22,76
	BANGUNAN PELENGKAP JALAN			
1	Jembatan kabupaten kondisi baik	Unit	332	336
		%	80,78	81,75
2	Jembatan kabupaten yang memiliki lebar standar 5,5 m	Buah	183	183
		%	44,53	44,53
3	Panjang jalan yang memiliki drainase kondisi baik	Km	268,13	270,63
		%	26,79	27,04
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar kondisi baik	Km	50,59	52,62
		%	5,06	5,26
5	Panjang jalan bertalud (memiliki dinding penahan tanah) kondisi baik	Km	71,66	72,66
		%	7,16	7,26

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, kondisi pembangunan jalan di Kabupaten Magelang belum diselenggarakan secara holistik dan terintegrasi dengan bagian-bagian jalan. Hal ini dapat dilihat, pembangunan jalan tidak diimbangi dengan penyediaan bangunan pelengkap jalan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan fungsi jalan bagi pengguna

jalan. Persentase bangunan pelengkap jalan terhadap panjang jalan kabupaten masih rendah :

- a) Persentase panjang jalan kabupaten yang memiliki trotoar terhadap panjang jalan kabupaten masih sebesar 5,26%.
- b) Persentase panjang jalan kabupaten terhadap panjang jalan kabupaten yang memiliki drainase sebesar 27,04%; dan
- c) Persentase panjang jalan kabupaten terhadap panjang jalan kabupaten yang bertalud (memiliki dinding penahan tanah) sebesar 7,26%.

2) Irigasi

Kondisi fisik jaringan irigasi di Kabupaten Magelang dijelaskan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten

No	Jaringan Irigasi	Satuan	2017	2018
1	Jumlah Daerah Irigasi	DI	993	993
2	Luas Daerah Irigasi (DI)	Ha	35.662	35.662
3	Luas DI yang teraliri/terakses air irigasi	Ha	20.995,94	21.247
4	Panjang saluran irigasi	Km	887,12	887,12
5	Panjang saluran irigasi kondisi baik	Km	572,63	578,58
6	Jumlah bangunan irigasi	Unit	827	827
7	Jumlah Bangunan Irigasi kondisi baik	Unit	533	563

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Luas Daerah Irigasi yang teraliri/terakses air irigasi dengan baik, baru mencapai 59,58% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan 34,78% saluran irigasi dan 31,92% bangunan irigasi dalam kondisi rusak, serta terjadinya penurunan debit air yang cukup signifikan pada musim kemarau.

Dalam rangka mendukung meningkatnya produktivitas pertanian dan tercapainya ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Magelang, maka perlu menjamin ketersediaan air untuk keperluan irigasi melalui pengelolaan sumber-sumber daya air yang baik.

Pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Magelang menghadapi tantangan yang cukup besar. Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, baik penyediaan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, pemukiman, dan sektor lainnya. Kebutuhan air untuk sawah irigasi di Kabupaten Magelang rata-rata sebesar 904.718.323 m³/tahun.

Tabel 2.59
Kebutuhan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2017

Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Kebutuhan	Satuan	Kebutuhan air (m3/tahun)
Penduduk	1.268.396	Jiwa	100,00	ltr/hr/kapita	46.296.454
Kota Magelang*					12.738.084
Sawah Irigasi	28.688,43	(Ha)	1,00	liter/detik/hektar	904.718.323
Lahan Kering	11.310,22	(Ha)	0,30	liter/detik/hektar	107.003.743
Pekerja Industri & Perdagangan	278.055	(Jiwa)	500,00	liter/hari/karyawan	50.745.038
Total					1.121.501.642

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang, 2018

*Berdasarkan Debit eksisting yang diambil PDAM Kota Magelang,

Sedangkan total potensi ketersediaan air di Kabupaten Magelang mencapai 1.436.627.538 m3/tahun. Rincian ketersediaan air di Kabupaten Magelang sebagaimana disajikan didalam tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Ketersediaan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2017

No	Ketersediaan	Satuan	Jumlah
1.	Air Limpasan	m3/tahun	1.180.874.936
2.	Potensi Mata Air	m3/tahun	257.752.602
	Total	m3/tahun	1.436.627.538

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang, 2018

Pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan irigasi di Kabupaten Magelang, diperoleh melalui pemanfaatan air sungai dan mata air. Namun ketersediaan air untuk keperluan irigasi sering mengalami penurunan pada musim kemarau. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan mata air yang digunakan untuk irigasi dan air bersih. Sehingga perlu mencari solusi lain untuk pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka pemenuhan ketersediaan air untuk keperluan irigasi antara lain melalui pembangunan embung dan pembinaan kelembagaan petani pengelola air.

Tabel 2.61
Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	2017	2018
1.	Jumlah embung	Buah	1	3
2.	jumlah kelembagaan petani pengelola air	Kelompok	283	283

No	Uraian	Satuan	2017	2018
3.	jumlah kelembagaan petani pengelola air, yang berfungsi dengan baik	Kelompok	83	103

Sumber: Perhitungan Tim KLHS RPJMD Kabupaten Magelang, 2018

3) Bangunan Gedung

Pembangunan bangunan gedung di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Pada tahun 2017 terdapat 1451 bangunan kantor pemerintah yang telah dibangun dan bertambah menjadi 1454 unit pada tahun 2018. Sedangkan pembangunan bangunan berupa landmark di kawasan perbatasan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 7 unit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan gedung, maka mulai pada periode RPJMD yang selanjutnya, setiap bangunan gedung wajib memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang dimulai dengan bangunan gedung pemerintah. Direncanakan pada akhir periode RPJMD 2019-2024, bangunan gedung pemerintah yang telah memiliki SLF sebanyak 40 unit

4) Cakupan Layanan Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Kondisi cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No .	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tangga terlayani air minum	RT	249.645	255.553	257.724	279.671	353.485
2.	Jumlah rumah tangga	RT	320.605	324.075	325.475	336.608	407.301
3.	Cakupan Layanan Air Minum	%	77,87	78,86	79,18	83,09	86,79

Sumber: Bidang AMPL Cipta Karya, Dinas DPUPR Kabupaten Magelang Tahun 2019; sata diolah

Jumlah rumah tangga terlayani air minum di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 memiliki kecenderungan meningkat sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas. Namun demikian, capaian ini masih jauh dari target *Universal Access* yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu 100% akses masyarakat terhadap layanan air minum pada akhir tahun 2019. Sampai dengan akhir tahun 2018, masih terdapat 13,21% rumah tangga yang belum mendapat pelayanan air minum.

5) Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik

Seperti halnya layanan air minum, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan yang wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Jumlah rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi	Rumah tangga	257.703	258.862	263.081	274.057	351.460
2	Jumlah rumah tangga	Rumah tangga	320.605	324.075	325.475	336.608	407.301
3	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	80,38	79,88	80,83	81,42	86,29

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang ,2019;Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang , 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, setiap rumah tangga minimal mempunyai satu akses pengolahan air limbah domestik. Berdasarkan data yang tertuang pada tabel di atas, masih terdapat *gap* sebesar 14,36% antara capaian dengan target ideal yaitu 100% akses masyarakat terhadap layanan sanitasi air limbah domestik pada akhir tahun 2019.

6) Sarana Prasarana ke-Puan

Peningkatan sarana prasarana ke-Puan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi pembangunan di Kabupaten Magelang. Peningkatan sarana prasarana ke-Puan yang dimaksud meliputi peningkatan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana ke-PUan dan peningkatan layanan jasa konstruksi.

Jumlah sarana dan prasarana ke-Puan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebanyak 122 buah, dengan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik adalah sejumlah 122 buah. Pada tahun 2024 direncanakan terdapat penambahan kebutuhan sarana prasarana ke-Puan menjadi 150 buah.

Layanan jasa konstruksi yang sesuai SOP pada tahun 2017 sebanyak 225 buah dan pada tahun 2018 sebanyak 180 buah

7) Penataan Ruang

Pengaturan penataan ruang di Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang 2010-2030. Belum adanya rencana rinci selain ketiga

dokumen tata ruang tersebut menjadikan perangkat perizinan menjadi belum memadai, sehingga kesesuaian tata ruang antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang masih belum optimal. Hal ini bisa dilihat pada nilai kesesuaian tata ruang pada tahun 2018 sebesar 76,31%, yang berarti bahwa penggunaan dokumen rencana tata ruang dalam pemanfaatan ruang masih belum optimal sehingga dibutuhkan upaya peningkatan kesesuaian tata ruang.

Tabel 2.64
Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)	20.6	4.11	4.11	31	39,59
Jumlah IMB yang dikeluarkan (buah)	429	594	384	577	346

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2019

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Di dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penyediaan rumah layak huni dengan lingkungan yang sehat dan aman merupakan salah satu prioritas nasional yang ingin dicapai. Dalam rangka mengakomodir prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun sasaran daerah, salah satunya yaitu meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Data *backlog* kepemilikan rumah yaitu selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Magelang adalah 76.602.

Upaya mewujudkan sasaran daerah bidang perumahan tersebut diantaranya melalui fasilitasi penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.

Peningkatan rumah layak huni diarahkan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada pemutakhiran Basis Data Terpadu yang dilakukan 2 kali setiap tahun.
- 2) Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/2018) tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

Tabel 2.65
Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Penanganan RTLH	KK	15.279	23.356

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
2.	Jumlah PBDT	Unit	66.273	65.830
3.	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Unit	13	9

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2019

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, baik melalui dana APBN maupun APBD. Sampai dengan tahun 2018, upaya pengurangan kawasan kumuh mengalami kenaikan yang signifikan. Simulasi perhitungan pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang yang berdasarkan pada PermenPU 2/PRT/M/2016 dan Surat Edaran DJCK Nomor 40/SE/DC/2016, baru dilakukan sejak tahun 2018. Hasil pengurangan atau penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.66
Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2018

No	Indikator	Satuan	2015-2017	2018
1.	Luas Kawasan kumuh	Ha	97,20	97,20
2.	Luas Kawasan kumuh yg sudah tertangani	Ha	13.91	66.53
3.	Persentase kawasan kumuh tertangani	%	14.31	68.45

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2019

Upaya lain dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan mencegah munculnya permukiman kumuh yang baru adalah dengan penyediaan sarana prasarana perumahan dan permukiman melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU).

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Penegakan Perda

Jumlah penegakan perda merupakan persentase penyelesaian penegakan perda dibandingkan jumlah pelanggaran perda. Semakin tinggi persentase penegakan perda, maka semakin tinggi jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Hal tersebut menggambarkan kemampuan penyelesaian pelanggaran perda oleh petugas terkait. Tabel berikut menggambarkan data penegakan perda di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.67
Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	171	190	174	251	81
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	172	193	175	312	155

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3	Penegakan PERDA	Persen	99,42	98,45	99,43	80,45	95,29

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah pelanggaran dan penegakan perda di Kabupaten Magelang fluktuatif. Namun, sebagian besar pelanggaran yang terjadi sudah mampu diselesaikan. Tingkat penyelesaian pelanggaran yang terjadi tersebut sudah jauh melebihi target setiap tahunnya yaitu 75%. Hal tersebut mengindikasikan penyelesaian masalah yang terjadi di Kabupaten Magelang sudah optimal.

- 2) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- Bencana kebakaran merupakan bencana yang memerlukan penanganan yang cepat. Penanganan yang cepat adalah penanganan yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap adalah ≤15 menit. Berikut adalah persentase tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.68
 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)
 Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
 di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 menit	Kejadian	23	75	54	35	81
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	46	94	72	55	155
3.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	50,00	79,79	75,00	63,64	52,60

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) mengalami trend penurunan, sempat berada pada angka 79,79% pada tahun 2015, turun menjadi 52,60% pada tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat 81 kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ≤ 15 menit dari 155 kejadian kebakaran atau mencapai 52,60%. Jumlah tersebut masih di bawah target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu 75%. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan tingkat kesigapan pemadam kebakaran dapat ditingkatkan

sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih cepat (response time rate) dan risiko kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir..

3) Cakupan Masyarakat yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan

Sebagai kabupaten yang terletak di kawasan rawan bencana, Kabupaten Magelang diwajibkan untuk memberi pengetahuan kepada penduduknya terkait kebencanaan, baik itu kerentanan, kapasitas, dan ancaman yang terdapat di kabupaten. Pengetahuan tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam menghadapi bencana yang dapat sewaktu-waktu terjadi.

Apabila belajar dari sejarah, Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang rentan terkena bencana, terutama bencana gunung api Merapi. Selain itu, Kabupaten Magelang juga dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, dan Sumbing yang mengakibatkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana tanah longsor. Oleh karena itu pengetahuan terhadap bencana menjadi penting. Di bawah ini disajikan data kebencanaan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.69
Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten
Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	15	13	21	23	8
2	Jumlah Desa Rawan Bencana	Desa	372	372	372	372	372
3	Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang Dilakukan	Kejadian	168	178	195	337	433
4	Jumlah Sasaran Dampak Bencana yang harus Dilakukan Tanggap Bencana	Kali	168	178	195	337	433
5	Jumlah Kejadian Bencana yang Direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kejadian	15	20	25	20	25
6	Jumlah Kejadian Bencana yang harus Dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kali	5	5	5	5	5
7	Cakupan Ketahanan masyarakat menghadapi bencana	%	20,00	20,00	47,00	66,67	74,10

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang, BPBD Kabupaten Magelang telah melaksanakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Magelang. selama kurun 2013-2018 di Kabupaten Magelang telah terbentuk 79 Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana.

Pembentukan desa tangguh bencana difokuskan pada desa-desa rawan bencana. Pembentukan destana penting karena sebagai bagian mitigasi

bencana kepada masyarakat. Selain dianggarkan dari APBD Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Magelang mendorong desa agar bisa mengalokasikan penganggaran kebencanaan melalui APBDes.

Desa-desa yang menjadi sasaran Program Desa Tangguh Bencana Tahun 2018 sejumlah 8 desa meliputi Desa Bigaran, Sidosari, Kalirejo, Genito, Salamkanci, Srumbung, Wonolelo, Ketep. Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahap (8 kali pertemuan).

Adapun target yang ingin dicapai dari kegiatan desa/ kelurahan tangguh bencana antara lain:

1. Terbentuknya Tim Siaga Bencana Desa.
2. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Desa.
3. Penentuan jalur evakuasi apabila terjadi bencana.
4. Peningkatan kapasitas tim siaga bencana khususnya dalam hal Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD).
5. Terselenggaranya Simulasi Penanganan Darurat Bencana.

BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan pemasangan alat *EWS (Early Warning System)* Longsor sebagai system peringatan dini bahaya tanah longsor. EWS tersebut merupakan salah satu upaya mitigasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Magelang untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor. Sampai dengan saat ini telah dipasang sampai dengan tahun 2018, EWS di titik-titik rawan longsor yang mengancam beberapa desa di wilayah Kabupaten Magelang, antara lain di :

1. Dusun Citran Desa Ngepanrejo Kec. Bandongan yang mengancam warga di RW 04 sejumlah 180 KK 700 jiwa
2. Dusun Karang Wetan, Desa Kalirejo, Kec. Salaman, terdapat rekahan dengan panjang rekahan ± 100 m yang mengancam 13 KK/40 jiwa, jarak rekahan dg Permukiman paling atas ± 5 m
3. Dusun Kudusan, Desa Tirto, Kec. Grabag, terdapat rekahan dengan panjang rekahan ± 50 m yang mengancam 5 KK/20 jiwa, jarak rekahan dengan permukiman 100 m
4. Dusun Miriombo Wetan, Desa Giripuro, Kec. Borobudur terdapat rekahan dengan panjang rekahan ± 50 m yang mengancam 14 Rumah/36 jiwa, jarak rekahan dg permukiman ± 40 m
5. Dusun Ngadisono Ds. Windusari Kec. Windusari

Diharapkan dengan adanya *EWS (Early Warning System)* Longsor tersebut masyarakat khususnya di wilayah terancam dapat lebih waspada akan terjadinya tanah longsor terutama di musim hujan.

f. Sosial

1) Sarana Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang mengalami kesulitan dalam menjalani fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Data historis kinerja makro urusan sosial disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.70
Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Sarana sosial seperti panti asuhan*, Panti jompo dan panti rehabilitasi	Buah	39	39	39	39	39
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	890	3.080	40.016	38.001	79.069
PMKS yang tertangani	Orang	890	3.290	40.253	38.001	79.069
PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	-	28,96	46,29
Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	-	-	-	-	1,25
Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	100
Penduduk miskin yang memperoleh Jaminan kesehatan (JKN-PBI dan Jamkesda)	jiwa	-	-	-	752.478	759.599

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2019

Data di atas menunjukkan perkembangan PMKS dan penduduk miskin yang memperoleh bantuan pada tahun 2014-2018 meningkat. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh penganggaran dana untuk PMKS. Mulai tahun 2016 terjadi peningkatan PMKS yang sangat drastis sampai tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan bantuan sosial yang disalurkan untuk PMKS.

Guna peningkatan pelayanan terhadap sarpras layak lansia dan difabel dilakukan sosialisasi terhadap lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk menyediakan sarana prasarana yang ramah terhadap anak, lansia maupun penyandang disabilitas. Untuk penanganan dan pemberdayaan lansia, di Kabupaten Magelang telah dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/69/Kep/24/2013 Tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Magelang Masa Bakti Tahun 2013 – 2015. Tindak lanjut dari pembentukan Komda Lansia tersebut, maka telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komda Lansia Kab. Magelang yang melibatkan seluruh anggota Tim Komda Lansia Kab. Magelang. Pada kesempatan

tersebut disepakati bahwa masing-masing SKPD anggota Tim Komda Lansia akan melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung terhadap penanganan lanjut usia, selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Komisi Lansia Tingkat Kecamatan di masing-masing kecamatan yang melibatkan seluruh anggota Tim.

2) PMKS yang tertangani

Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kenaikan secara signifikan yaitu dari 890 orang pada tahun 2014 menjadi 79.069 pada tahun 2018. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui dari jumlah persentase yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada. Berdasarkan data tahun 2014-2018, jumlah PMKS yang tertangani mengalami tren yang meningkat tetapi menurun pada tahun 2017.

Tabel 2.71
 Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	PMKS yang tertangani	Orang	890	3.290	40.016	38.001	79.069
2.	PMKS yang ada	Orang	141.266	112.203	131.222	131.222	170.684
3.	Penanganan PMKS	%	6,3	29,32	30,49	28,95	46,32
4.	Persentase penurunan PMKS	%	7,83	-20,57	16,95	0,00	30,07

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2013-2016 dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2019

Perkembangan PMKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2014-2018 fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial bersifat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adanya kemajauan teknologi dan perbaikan kesejahteraan tidak secara signifikan akan mengurangi masalah sosial, karena kemajuna teknologi dan peningkatan kesejahteraan bisa menyebabkan permasalahan sosial baru.

Penanganan PMKS diluar panti yang dilakukan berupa bantuan sosial bagi PMKS baik untuk fakir miskin, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar. Melalui bansos tidak terencana, membantu fakir miskin dalam bidang kesehatan (biaya perawatan bagi fakir miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan), biaya pendidikan (biaya sekolah bagi yang tidak mampu membayar biaya sekolah).

Selain itu Pemkab Magelang saat ini sedang dalam proses pembentukan Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Rumah Singgah. Bangunan yang telah ada menempati Gedung TEA Tanjung Muntilan. Guna mendukung kegiatan Rumah Singgah pada tahun 2020 telah diusulkan anggaran untuk Kegiatan Fasilitasi PMKS di Rumah Singgah sebesar Rp. 125.000.000,- (. Seratus dua puluh lima juta rupiah). Cakupan penanganan PMKS di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Cakupan Penanganan PMKS
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	PMKS yang tertangani	Orang	890	3.080	40.016	38.001	79.069
2	PSKS yang berperan dalam penangan PMKS	%	-	-	-	23,39	23,39
3	Cakupan Penanganan PMKS	%	0,63	2,93	30,49	28,96	46,29

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan penanganan PMKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 semakin baik.

- 3) Jumlah disabilitas dan bantuan yang diberikan
- Perhatian khusus diberikan Pemerintah Kabupaten Magelang kepada kaum disabilitas dengan melibatkan kelompok tersebut dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Selain bantuan modal dan pelatihan, Pemerintah Kabupaten melibatkan penyandang difabel dalam penyusunan setiap kebijakan pembangunan. Melalui keterlibatan penyandang difabel dalam setiap kegiatan pembangunan, diharapkan akan menunjang lahirnya kemandirian, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi difabel. Adapun jumlah penyandang difabel, jumlah penyandang difabel yang memperoleh bantuan dan jumlah bantuan yang diberikan bisa dilihat dalam tabel dibawah

Tabel 2.73
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penyandang Disabilitas	n/a	10.508	9.009	9.578
2	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh Bantuan	343	412	417	406
3	Jumlah Bantuan	620.300.000	741.600.000	797.200.000	1.158.600.000

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2019

Dari tabel di atas bisa dilihat jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan cenderung meningkat setiap tahunnya, dimana data terakhir pada tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sebanyak 406 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 1.158.600.000.

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka TPAK mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.74
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	668.142	657.666	677.609	722.295	699.907
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)	Orang	931.057	944.483	899.809	969.654	981.963
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,76	69,63	75,34	74,49	71,28
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Tengah	%	69,68	67,85	67,15	69,11	68,56

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2018, Disperinaker Kabupaten Magelang 2018

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 cukup fluktuatif, namun pada tahun 2017 meningkat signifikan. Tingkat partisipasi angkatan Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah.

2) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari Indeks Produktifitas Tenaga Kerja. Indeks ini diukur dari total PDRB dibandingkan dengan total angkatan kerja yang bekerja. Pada tahun 2014 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp 32,81 juta per pekerja meningkat menjadi Rp 43,36 juta per pekerja pada tahun 2018. Peningkatan produktivitas tenaga kerja Kab. Magelang lebih tinggi dari peningkatan produktivitas tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah, rata-rata sebesar 7,32%. Namun, jika dilihat nilai absolutnya, produktivitas tenaga kerja Kabupaten Magelang jika dibandingkan produktivitas

tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 79,46%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75
Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	PDRB	Rp. (juta)	21.923.411	24.148.644	26.108.949	28.045.174	29.464.259,80
2	Total Angkatan Kerja yang Bekerja	Orang	668.142	657.666	704.651	722.295	679.506
3.	Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. (juta)	32,81	36,72	37,05	38,83	43,36
4.	Produktivitas Tenaga Kerja Prov. Jateng	Rp. (juta)	46,30	49,16	51,44	52,01	54,57

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun meskipun mengalami peningkatan di tahun 2018. Angka ini juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.76
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	49.777	33.936	n/a	17.644	20.401
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	668.142	657.666	n/a	722.295	699.907
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang	%	7,45	5,16	n/a	2,44	2,91
4	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah	%	5,68	4,99	5,63	4,57	4,51

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

4) Pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Menempatkan pencari kerja yang mendaftar merupakan salah satu program pemerintah daerah. Oleh karena itu, indikator ini dapat

mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran. Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.77
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

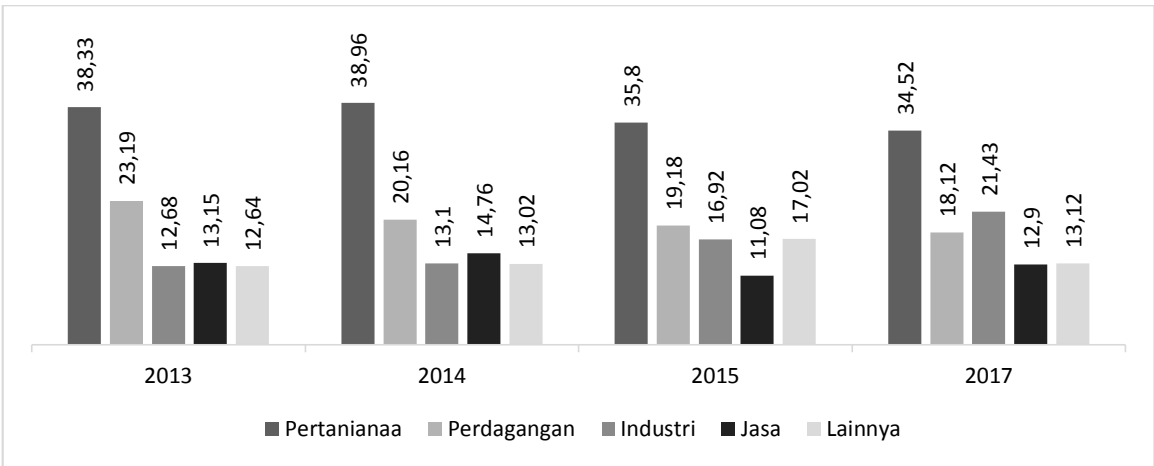
No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	672	632	1.442	1,749	1.797
2	Pencari kerja yang terdaftar	Orang	4.141	5.996	3.573	4.038	4.193
3	Pencari kerja yang ditempatkan	%	16,23	10,54	40,36	43,31	42,86

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan program penempatan tenaga kerja yang mendaftar. Pada tahun 2014 jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah sebanyak 4.141 orang dan hanya 16,23% dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan atau sekitar 672 pekerja saja. Persentase pencari kerja yang ditempatkan meningkat pada tahun 2014 sampai tahun 2018 dari 16,23% menjadi 42,86%, kecuali pada tahun 2015 hanya mencapai 10,54%. Perbedaan persentase pekerja yang ditempatkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

5). Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha

Lapangan usaha penyerapa angkatan kerja terbesar adalah lapangan usaha pertanian. Namun penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian cenderung menurun. Penurunan penyerapan tenaga kerja juga terjadi pada lapangan usaha perdagangan. Sementara itu, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada lapangan usaha industri.

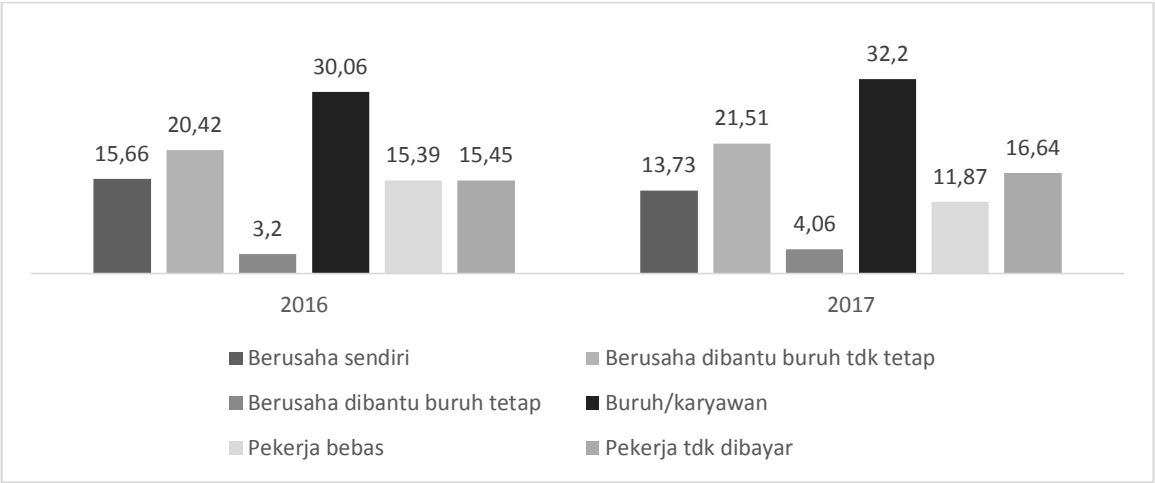


Gambar 2.18

Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013-2017

6) Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha

Pada tahun 2017, menurut status pekerjaan, 39,30 persen sebagai pengusaha di pekerjaan utamanya. Sedangkan 32,20 persen sebagai buruh/ karyawan/ pegawai. Akan tetapi masih ada 16,64 persen yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga pada pekerjaan utamanya.



Gambar 2.19
Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Tahun 2013-2017

5) Jumlah Peserta Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Di Kabupaten Magelang masih banyak potensi tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Adapun tenaga kerja yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.78
Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)

NO	TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA	JUMLAH PESERTA JAMSOSTEK	%
1	2014	404	24,131.00	n/a	-
2	2015	341	27,041.00	11,801.00	43,64
3	2016	372	25,653.00	13,143.00	51,23
4	2017	372	25,653.00	13,143.00	51,23

NO	TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA	JUMLAH PESERTA JAMSOSTEK	%
5	2018	370	25,457.00	13,351.00	52,45

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat tenaga kerja yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) setiap tahun meningkat. Di sisi lain hampir separuh jumlah tenaga kerja di Kabupaten Magelang masih belum tercover jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini disebabkan masih banyaknya tenaga kerja, khususnya sektor informal yang tidak mendaftarkan kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dihitung dari persentase perempuan di lembaga legislatif, persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi dan persentase PD yang melaksanakan perencanaan penganggaran resposif berbasis gender. Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari presentase perempuan di lembaga legislatif sebesar 14 % selama tahun 2014-2018.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Secara umum jumlah pekerja perempuan yang berada di lembaga pemerintah mengalami penurunan. Pada tahun 2017 hanya terdapat 1,88% perempuan yang terdapat di lembaga pemerintahan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besarnya jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah.

Tabel 2.79
 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
 di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jiwa	5.753	5.926	5.415	5.304	5.008
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	Jiwa	275.073	276.997	279.504	281.958	253.317
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	2,44	2,14	1,94	1,88	1,98

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2018.

2) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan ini dapat diketahui dari jumlah pengaduan yang terselesaikan dan jumlah pengaduan secara keseluruhan. Berdasarkan data tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, jumlah penyelesaian

pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang mengalami stagnasi yaitu pada persentase 100%. Dengan kata lain, setiap aduan yang dilaporkan dapat diselesaikan di tiap tahunnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.80

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	Kasus	82	99	113	115	75
Jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Kasus	82	99	113	115	98
Penyelesaian pengaduan	Persen	100	100	100	100	76,53

Sumber : Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2018

3) Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan ana

Dukungan pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang dengan penguatan gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa, serta meningkatkan pencapaian hasil kegiatan dari klaster-klaster KLA sesuai dengan Perda nomor 20 tahun 2016 Tentang KLA, meningkatkan peran dan dukungan dunia usaha yang tergabung dlm Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Magelang, serta meningkatkan peran dan dukungan media. Jumlah desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.81

Desa dan kecamatan Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Urian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Pratama	Desa	10	12	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Desa	0	0	11	14	92
3.	Tingkat Nindya	Desa	0	0	0	0	0
4	Tingkat Utama	Desa	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kecamatan	0	0	0	0	0

No	Urian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
2.	Tingkat Madya	Kecamatan	0	0	3	5	13
3.	Tingkat Nindya	Kecamatan	0	0	0	0	0
4	Tingkat Utama	Kecamatan	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang selalu meningkat.

c. Pangan

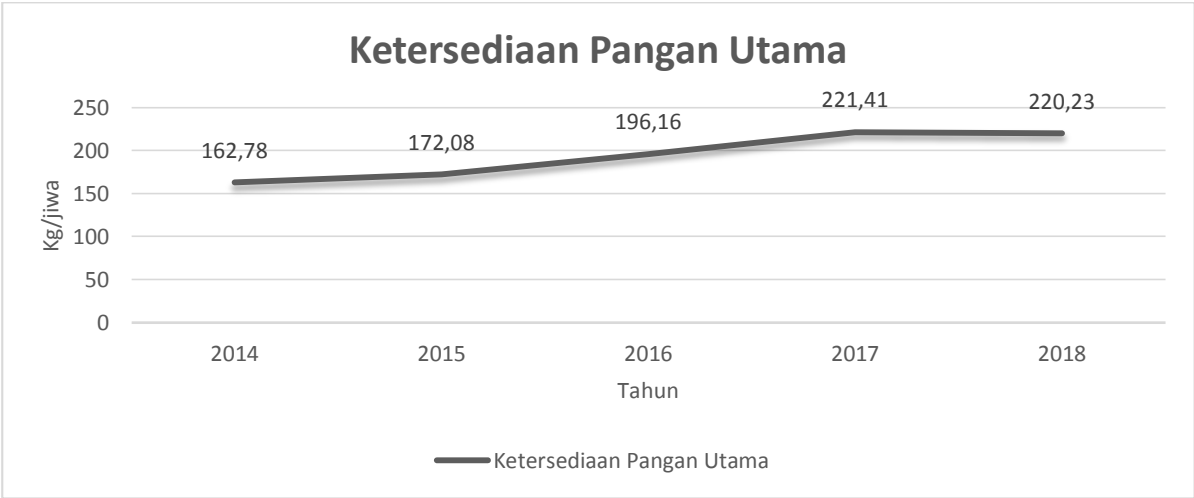
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tergambar dalam beberapa hal berikut.

1) Regulasi Ketahanan Pangan

Untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun regulasi terkait ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati yang untuk pertama kalinya diundangkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK baru, peraturan bupati tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.

2) Ketersediaan Pangan Utama

Gambaran ketersediaan pangan utama di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 disajikan pada tabel dibawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.20
Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Ketersediaan pangan utama beras selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. Maka secara ketersediaan, Kabupaten Magelang sudah mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, jika dibandingkan dengan kebutuhan beras perkapita per tahun.

3) Pola Pangan Harapan (PPH)

Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Terdapat dua pola pangan harapan, yaitu PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut.

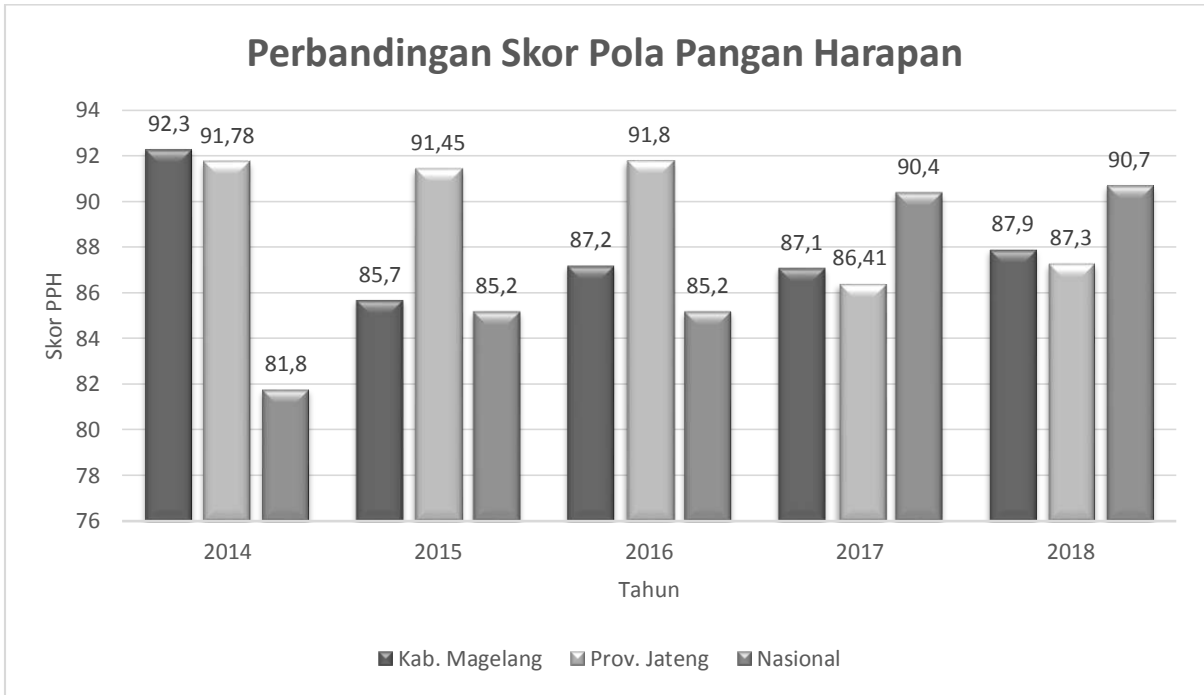
Tabel 2.82
Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2018

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018
1	PPH Ketersediaan Kab. Magelang	%	85,42	72,85	70,60	73,59*
2	PPH Ketersediaan Prov. Jawa Tengah	%	-	-	85,3	85,3

*Angka sementara

Sumber: Distan Pangan Kabupaten Magelang diolah, 2019

Pola pangan ketersediaan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 72,85% menjadi 70,60% pada tahun 2017. Namun angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya, yaitu 73,59% pada tahun 2018. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dibawah angka ketersediaan Provinsi Jawa tengah, yaitu sebesar 85,3%.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

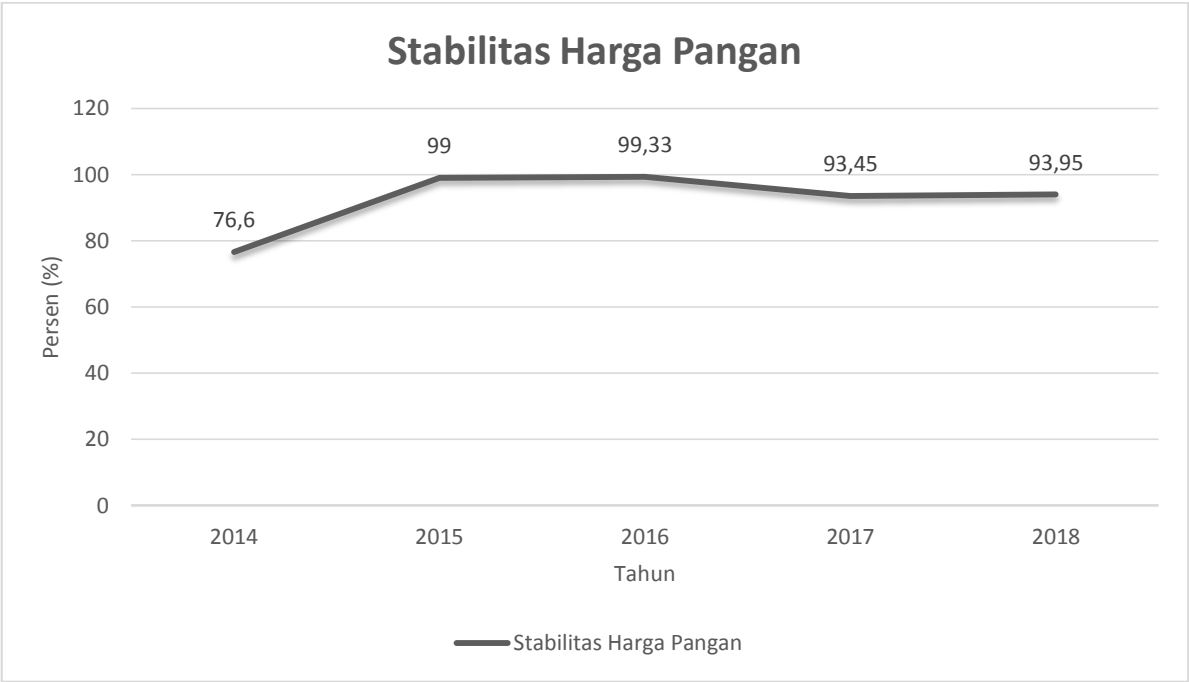
Gambar 2.21
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Selama kurun waktu 2015-2018, skor PPH terus meningkat, kecuali tahun 2017 yang turun dari capaian tahun sebelumnya. Dibandingkan

dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2018 capaian Kabupaten Magelang lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan nasional, capaian Kabupaten Magelang lebih rendah.

4) Stabilitas Harga Pangan

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Perkembangan stabilitas harga pangan di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.22
Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

5) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Magelang. Konsumsi beras mulai tahun 2016 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124,89 kg/orang/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL)¹. Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.83
Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2017

Uraian	Jumlah
Jumlah produksi padi (ton)	366.981
Konversi Gabah Giling/GKG ke beras (62,74%)	230.244

¹ Perhitungan yang digunakan SUSENAS - BPS

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.268.396
Angka konsumsi beras (kg/tahun/tahun)	124,89
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	124.303
DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	1,85
Surplus beras (Ton/Tahun)	105.941

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024, 2018

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Magelang sebesar 1,85 dengan kondisi surplus sebesar 105.941 ton.

- 6) Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (JEP 1)
- Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) merupakan hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan. Berikut kategori Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang.

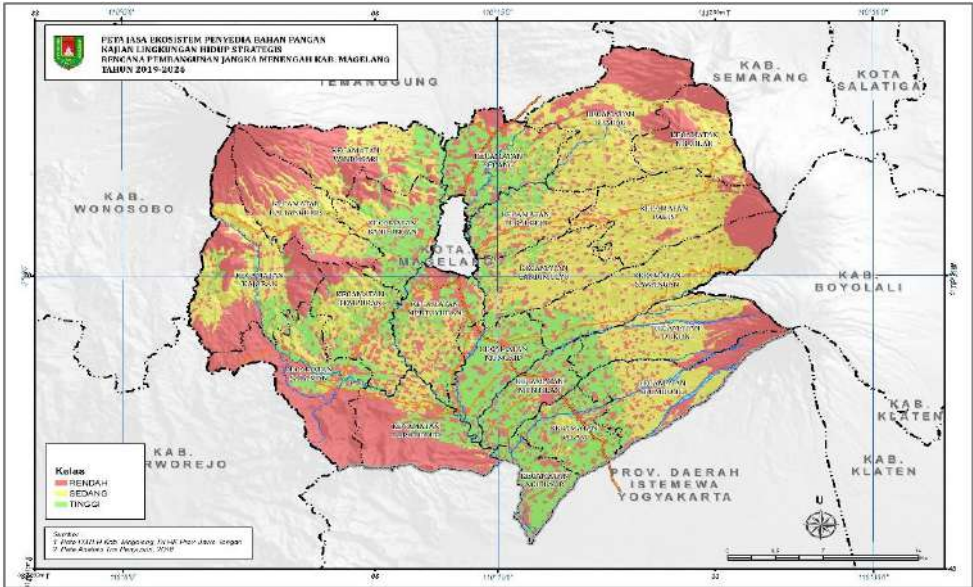
Tabel 2.84

Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)

Kabupaten Magelang

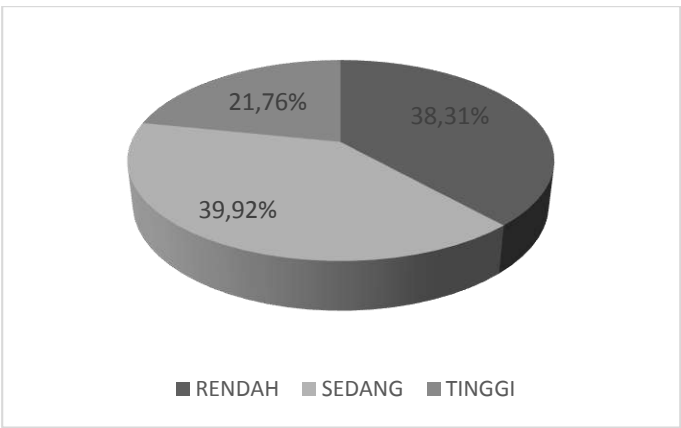
KELAS	LUAS (Ha)	PERSEN
RENDAH	43.306,03	38,31%
SEDANG	45.128,48	39,92%
TINGGI	24.600,33	21,76%
TOTAL	113.034,84	100,00%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2014



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024, 2018

Gambar 2.23
Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)



Sumber: KLHS RPJMD Kab. Magelang 2019-2024, 2018

Gambar 2.24
Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)

Berdasarkan diagram dan peta di atas dapat dilihat bahwa Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang lebih dominan berada pada kategori sedang dengan luas lahan 45.128,48 ha atau sebesar 39,92%, kemudian diikuti dengan kategori rendah dengan luas 43.306,03 ha atau sebesar 38,31% dan kategori dengan persentase paling kecil adalah kategori tinggi dengan luas lahan 24.600,33 ha atau sebesar 21,76%.

d. Pertanian

Urusan pertanahan menjadi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa urusan pertanahan memiliki tiga indikator, yaitu (1) persentase luas lahan bersertifikat, (2) penyelesaian kasus tanah negara dan (3) penyelesaian izin lokasi.

Hingga tahun 2017, terdapat 416.154 unit tanah yang telah bersertifikat dimana pembagian terbesarnya adalah merupakan tanah hak milik yakni sebesar 97,30%, sedangkan yang terkecil adalah hak guna usaha. Kinerja persentase luas lahan bersertifikat sampai dengan tahun 2017 adalah 53,41%.

Sedangkan untuk penyelesaian kasus tanah negara dari tahun 2013-2017 sebesar 100% dimana semua permasalahan terkait dengan kasus tanah negara dapat diselesaikan seluruhnya.

Indikator penyelesaian izin lokasi dikaitkan dengan investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Magelang khususnya. Masalah yang sering dihadapi investor dalam mencari izin lokasi adalah birokrasi. Birokrasi yang panjang dan adanya pungutan liar membuat penyelesaian izin menjadi lama. Semakin lama izin dikeluarkan, maka

investor akan kehilangan waktu untuk memulai usahanya sehingga diharapkan izin lokasi dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Tabel 2.85
Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Persertifikatan tanah					
	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	33,55	51,38	51,80	52,10	53,41
	Hak Milik	352.365	367.807	375.586	380.322	404.921
	Hak Guna Bangunan	4.925	5.566	6.438	7.829	8.996
	Hak Guna Usaha	1	1	1	1	1
	Hak Pakai	1.689	1.758	1.861	1.934	2.226
	Hak Pengelola	9	9	9	10	10
2.	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	100	100	100
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	80	90,57	122,73	N/A	100

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, 2018; Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang

e. Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan adanya keterbatasan sumberdaya alam kaitannya dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Terjadinya pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan beban terhadap daya dukung lingkungan menjadi semakin besar. Perubahan kegiatan dan pola hidup masyarakat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran lingkungan baik pencemaran air, tanah, maupun udara. Hal ini mempengaruhi pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup.

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan, apakah pada posisi kondisi yang baik, buruk atau pada kisaran keduanya.

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang pada tahun 2017 mencapai 70,95 dan meningkat menjadi 71,93 pada tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	2017	2018
1.	Indeks Kualitas Air	59,09	54,62

No.	Indikator	2017	2018
2.	Indeks Kualitas Udara	82,39	82,82
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,27	76,74
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,95	71,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Sesuai klasifikasi angka indeks, capaian IKLH Kabupaten Magelang berada dalam kategori cukup. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu 60,60 pada tahun 2017.

Indeks kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Sementara (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, penyebab terjadinya emisi GRK dikelompokkan menjadi tiga sektor yaitu penggunaan energi untuk kegiatan transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah. Emisi GRK pada tahun 2017 di Kabupaten Magelang tertinggi berasal dari kegiatan pengadaan dan penggunaan energi untuk kegiatan transportasi sebesar 531.600 ton CO₂e (61%) dan emisi terendah adalah dari pengelolaan limbah yaitu sebesar 71.040 ton CO₂e (8%).

- 2) Jumlah Usaha Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru
- Indikator jumlah usaha peserta Proper yang mencapai minimal ranking biru merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur ketercapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Penilaian ini penting dilaksanakan sebagai wujud penerapan mekanisme insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan yang dapat mendorong perusahaan untuk dapat berperan dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat Proper Biru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
 Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru
 Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Jumlah perusahaan mencapai ranking emas	perusahaan	0	0
2.	Jumlah perusahaan mencapai ranking hijau	perusahaan	7	7
3.	Jumlah perusahaan peserta Proper	perusahaan	115	115
4.	Persentase perusahaan minimal berpredikat Proper Biru	%	6,09	6,09

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

3) Persentase Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga disebutkan bahwa target pengelolaan sampah adalah 100% pada akhir tahun 2025. Target pengelolaan sampah tersebut meliputi target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dengan lingkup pelayanan seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Indikator program berkaitan dengan pengurangan sampah dalam RPJMD yang digunakan adalah persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R. Sedangkan indikator program berkaitan dengan penanganan sampah dalam RPJMD yang digunakan adalah persentase jumlah sampah yang tertangani. Data capaian pengelolaan sampah tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Persentase Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Jumlah timbunan sampah	ton/hari	231.482,27	233.797,09
2.	Jumlah pengurangan sampah melalui 3R	ton/hari	34.238,17	44.472,43
3.	Jumlah sampah tertangani	ton/hari	28.390,66	31.336,77
4.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	14,79	19,02
5.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	12,26	13,40
6.	Persentase pengelolaa sampah	%	27,05	32,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Persentase pengelolaan sampah pada tahun 2017 mencapai 27,05% dan meningkat menjadi 32,42% pada tahun 2018. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampai dengan tahun 2018, pengurangan sampah di Kabupaten Magelang sebesar 19,02% dan penanganan sampah sebesar 13,40%. Capaian ini jauh apabila dibandingkan dengan target yang diamanahkan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 yaitu 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Oleh karena itu, untuk mendukung ketercapaian target nasional pengelolaan sampah, maka dalam RPJMD Kabupaten Magelang program persampahan menjadi program prioritas dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Penanganan sampah di Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2018 mencakup 10 (sepuluh) kecamatan dari total 21 (dua puluh satu) kecamatan yang ada. Lingkup pelayanan sampah belum menjangkau seluruh desa di sepuluh kecamatan tersebut namun hanya sebagian kecil desa yang pada umumnya merupakan wilayah perkotaan. Kecamatan yang telah mendapatkan pelayanan penanganan sampah

meliputi: (a) Mungkid; (b) Muntilan; (c) Borobudur; (d) Salaman; (e) Mertoyudan; (f) Secang; (g) Grabag; (h) Tegalrejo; (i) Bandongan; dan (j) Salam. Dalam lima tahun ke depan, cakupan ini akan ditingkatkan sehingga penanganan sampah dapat menjangkau seluruh kecamatan.

4) Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam membentuk struktur ruang wilayah perkotaan dan memiliki berbagai fungsi strategis. Secara ekologis, RTH berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara, menjaga kelestarian air dan tanah sedangkan secara sosiologis RTH diperlukan sebagai ruang untuk berinteraksi dan rekreasi bagi penduduk di wilayah perkotaan. Di luar kedua hal tersebut, ketersediaan RTH di wilayah perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Luas wilayah perkotaan	Ha	16.069,09	16.069,09
2.	Luas RTH publik di wilayah perkotaan	Ha	302,85	302,85
3.	Luas RTH privat di wilayah perkotaan	Ha	6.059,65	6.008,23
4.	Persentase ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan	%	1,88	1,88
5.	Persentase ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan	%	37,71	37,39
6.	Persentase ketersediaan RTH terhadap luas wilayah wilayah perkotaan	%	39,59	39,27

Sumber : DLH Kabupaten Magelang, Tahun 2018

Capaian ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 39,59% dan menurun menjadi 39,27% pada tahun 2018. Penurunan capaian tersebut terjadi karena adanya alih fungsi lahan sawah di perkotaan sehingga menyebabkan penurunan RTH privat. Secara akumulasi, capaian ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan sudah melampaui persentase luas RTH yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30%. Namun apabila dilihat per komponen indikator maka RTH publik di wilayah perkotaan belum memenuhi target yang dipersyaratkan yaitu 20%. Sedangkan ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan telah memenuhi syarat minimal yaitu 10%. Berdasarkan tabel di atas, capaian persentase ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan pada tahun 2017 adalah sebesar 1,88%. Capaian ini tidak ada peningkatan di

tahun 2018 disebabkan tidak adanya penyediaan RTH publik baru tapi hanya peningkatan fungsi RTH publik yang sudah ada. Melihat kondisi tersebut, maka dalam lima tahun ke depan perlu adanya peningkatan penyediaan RTH publik di wilayah perkotaan sebesar 18,12%.

5) Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam

Kinerja urusan lingkungan hidup berkaitan dengan konservasi sumber daya alam meliputi konservasi daerah resapan air, rawan bencana dan mata air. Upaya pelaksanaan konservasi di Kabupaten Magelang juga dilakukan melalui program kampung iklim dan sekolah adiwiyata. Adapun capaian kinerja konservasi sumber daya alam tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	%	0,82	1,34
2	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	%	0,34	0,44
3	Persentase mata air yang dikonservasi	%	4,94	5,38
4	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	%	1,34	1,88
5	Persentase sekolah adiwiyata	%	0,49	1,06
6	Cakupan konservasi sumber daya alam	%	1,59	2,02

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2018

Konservasi sumber daya alam erat kaitannya dengan upaya menjaga dan meningkatkan daya dukung daya tampung lingkungan. Berdasarkan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, daya dukung air permukaan Kabupaten Magelang tahun 2017 sebesar 1,28 masuk dalam kategori sedang. Daya dukung ini cenderung menurun seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, maupun industri. Berdasarkan tabel di atas, kinerja pelaksanaan konservasi sumber daya alam di Kabupaten Magelang masih sangat kecil. Pelaksanaan konservasi di daerah resapan air dan rawan bencana masih di bawah 1%. Berkaitan dengan upaya konservasi, perlu diperhatikan pula untuk kawasan-kawasan rawan bencana mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan rawan bencana. Sebagaimana hasil analisis KLHS RPJMD 2018-2024, 73,83% wilayah Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana kelas

sedang. Melihat masih rendahnya kinerja pelaksanaan konservasi di Kabupaten Magelang, maka dibutuhkan upaya kolaborasi pelaksanaan konservasi dengan berbasis masyarakat sehingga tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah.

- 6) Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani
- Penegakan hukum lingkungan sangat diperlukan, melihat banyaknya kasus yang terkait dengan lingkungan. Tidak optimalnya penegakan hukum lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengawasi pelaksanaan izin lingkungan oleh pemilik perusahaan membutuhkan peran serta masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada pemerintah terkait izin lingkungan yang selanjutnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menanganinya. Data capaian kinerja penanganan kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91

Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kasus lingkungan dan pengaduan terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Kasus	10	10	9	10	12
2	Jumlah pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan yang teregistrasi	Kasus	10	11	10	10	15
3	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan terkait ijin lingkungan	%	100	90,91	90	100	80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat lingkungan di Kabupaten Magelang dapat dikatakan sangat baik. Terlihat dari persentase jumlah kasus yang diselesaikan tidak kurang dari angka 80% dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018. Hal ini menjadi prestasi yang baik tetapi harus terus ditingkatkan dan dipertahankan demi menjaga kelangsungan lingkungan hidup ke depannya. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan selalu ditindaklanjuti dengan baik oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. Hampir seluruh pengaduan ditangani pada tahun yang bersangkutan. Khusus pada tahun 2015, 2016, dan 2018 mengalami penurunan capaian karena aduan dari masyarakat teregistrasi mendekati akhir tahun anggaran sehingga baru dapat ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

Hal yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Magelang bahwa meskipun penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan sudah sangat baik, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan banyaknya usaha atau kegiatan yang berjalan secara ilegal tanpa melalui prosedur izin lingkungan. Selanjutnya, harus ada tindakan yang dapat menjadi solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengembalikan lingkungan yang telah terlanjur rusak.

- f. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Pelayanan publik yang baik diantaranya diukur dari pelayanan administrasi kependudukan. Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK
Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	%	93,91	88,62	94,90	96,62	96,13
2	Penerbitan KK	%	92,81	n/a	94,89	95,46	96,05
3	Rasio Perekaman KTP – elektronik dan Keluarga yang Ber KK	%	93,36	n/a	94,90	96,04	96,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan semakin baik. Disamping itu, pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Magelang semakin baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	%	18,14	22,98	30,80	32,37	34,85
2	Persentase Penerbitan Akta perkawinan	%	62,17	36,76	38,75	33,27	42,40

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	0	0	0	0	0
4	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	%				72,17	77,64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2008

Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pengelolaan informasi	%	0	0	0	0	0
2	Persentase pemanfaatan data	%	0	0	0	0	0
3	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2018

g. Keluarga Sejahtera dan KB

1) Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Data mengenai cakupan KB aktif di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	IUD	Jiwa	22.190	30.936	32.494	33.894	25.110
	MOW/MOP	Jiwa	8.897	10.452	10.400	10.687	8.800
	Kondom	Jiwa	1.436	3.725	4.025	4.150	4.931
	Implant	Jiwa	14.827	21.564	23.147	24.818	16.515

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Suntik	Jiwa	20.895	86.082	88.271	87.381	79.113
	Pil	Jiwa	13.696	20.990	21.050	20.612	14.924
	Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	81.941	173.749	179.050	181.542	149.393
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jiwa	219.754	222.973	225.057	227.752	204.431
3	Cakupan peserta KB aktif	%	80,64	80,69	80,79	79,71	73,08
4	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi	%	11,08	9,93	8,97	9,32	13,36
5	Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	%	77,27	77,93	79,77	79,31	73,08
6	Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	36,07	36,23	36,86	38,23	33,75
7	Usia Kawin Pertama (UKP) /Rata-rata usia kawin pertama wanita	%		20,62			
8	Prosentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera	%	59,20	57,90	56,09	55,03	55,11

Sumber : Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2018.

Berdasarkan tabel cakupan peserta KB aktif di atas, secara umum selama 5 tahun perkembangannya bisa dikatakan tidak terlalu berubah. Dalam lima tahun tersebut, rentang cakupan indikator ini berada pada posisi 80,64-80,79%. Berdasarkan SPM Nasional, Kementerian Kesehatan menargetkan rasio KB aktif sebesar 70% pada tahun 2008, sedangkan Peraturan Kepala BKKBN No 55/HK-010/B5/2010 target SPM untuk indikator cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 65% pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target SPM dari Kemenkes maupun dari BKKBN tersebut, rasio KB Aktif Kabupaten Magelang telah mencapai target karena sejak tahun 2012 cakupannya sudah lebih dari 65% bahkan lebih dari 70%.

Dalam upaya meningkatkan kepesertaan KB, Pemkab Magelang mendukung melalui penyediaan biaya penyelenggaraan pelayanan KB bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera. Selain itu bantuan makan minum, dana pembuatan backdrop, dan biaya penggandaan sangat membantu kegiatan pelayanan KB terutama pada saat kegiatan safari pelayanan KB bersama mitra kerja (pemangku kepentingan di luar pemda).

2) Total Fertility Rate

TFR (*Total Fertility Rate*) bisa didefinisikan sebagai jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya

jika ia melampau masa-masa melahirkan anak. Capaian TFR di Kabupaten Magelang tahun 2015-2018 relatif turun. Pada tahun 2015 berada pada angka 2,26, tahun 2016 naik menjadi 2,28, tahun 2017 naik lagi menjadi 2,30 dan turun menjadi 2,17 pada tahun 2018. Salah satu faktor turunnya angka TFR adalah semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang.

3) Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai Keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera Tahap I (KSI) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti yang telah disebutkan.

Tabel 2.96

Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	92.743	91.815	91.106	90.389	86.283
2.	Jumlah Keluarga*	Keluarga	354.120	375.160	390.618	404.777	406.420
3.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	26,19	24,47	23,32	22,33	21,23

Sumber : Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun dari 2014 hingga 2018 mengalami tren parabola naik kemudian turun. Persentase tertinggi atau puncak parabola terjadi pada tahun 2014 yaitu 26,19% dengan 92.743 keluarga pra sejahtera, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 21,23% dengan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 86.283 keluarga.

Sejenis dengan persentase keluarga pra-sejahtera, persentase keluarga sejahtera I juga memiliki tren parabola yaitu dengan pola naik kemudian turun. Puncak parabola yaitu persentase tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 18,01%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2018 dengan persentase 15,24%. Secara persentase, indikator ini memiliki tren yang semakin membaik karena semakin menurun, akan tetapi bila dilihat dari jumlah keluarga sejahtera I, ternyata jumlahnya keluarga yang tergolong sejahtera I memiliki tren yang meningkat terus. Persentase semakin kecil karena jumlah keluarga semakin bertambah banyak, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.97
 Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Keluarga Sejahtera I	KK	63.778	64.327	66.341	66.340	62.141
2.	Jumlah Keluarga	Keluarga	354.120	375.160	390.618	404.777	406.420
3.	Persentase Keluarga Sejahtera I	Persen	18,01	17,15	16,98	16,39	15,24

Sumber : Dinas Sosial. *Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2018.*

h. Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang pembangunan terutama mendukung perekonomian dan perkembangan wilayah. Kinerja urusan perhubungan sebagaimana tersebut antara lain dapat dilihat dari data yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan pagar pengaman jalan, jumlah uji kendaraan bermotor dan pembangunan terminal angkutan umum. Untuk realisasi pemasangan rambu rambu lalu lintas yang sangat tinggi, yaitu 111,7% dikarenakan pada tahun 2018 jumlah rambu yang terpasang (2.574 buah) lebih tinggi dari pada target rambu yang akan dipasang 2.304 buah).

Tabel 2.98
 Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas (%)	64,80	32,84	61,24	106,38	111,7
Persentase Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (%)	28,22	20,51	78,39	78,39	84,27
Jumlah Terminal Bus (buah)	6	6	7	6	6
Persentase Uji Kendaraan Bermotor (%)	96,01	97,50	97,32	98,39	88,10

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2019.

i. Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, urusan komunikasi dan informatika terdiri atas lima indikator, yaitu cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan, cakupan layanan komunikasi, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, proporsi rumah tangga dengan akses internet, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi. Beberapa indikator dalam urusan komunikasi dan informatika ini akan mengalami penyesuaian dengan kondisi wilayah Kabupaten Magelang dan ketersediaan data yang dimiliki oleh OPD, misalnya persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, proporsi rumah tangga dengan akses

internet dan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi ditiadakan.

Kabupaten Magelang mulai tahun 2017 sedang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas (*Smart Regency*). Dalam rangka mendukung terwujudnya hal tersebut maka perlu disusun indikator-indikator kinerja tambahan sebagai tolok ukur dalam ketercapaian perwujudan *smart regency*. Indikator-indikator berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut.

1) Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berdasarkan penilaian mandiri Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 lalu, indeks SPBE Kabupaten Magelang 1,85 atau masuk dalam kategori cukup.

2) Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi.

Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar komunikasi informasi pada tahun 2018 terhitung 32,14% meningkat dari tahun 2017 sebesar 28,14%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya PD yang terfasilitasi jaringan komunikasi data dan peningkatan cakupan layanan komunikasi yang secara teknis mengurangi *blankspot* di area Kabupaten Magelang.

Tabel 2.99
Cakupan Ketersediaan Prasaranan dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi Informasi di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	%	11,71	23,41
2	Cakupan Layanan Komunikasi	%	72,72	73,00
3	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi Informasi	%	28,14	32,14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2019

3) Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan Perangkat Daerah

Persentase cakupan layanan informasi bagi desa dan Perangkat Daerah (PD) tahun 2018 sebesar 12,7% didapatkan dari persentase urusan yang terintegrasi dengan *big data*, persentase layanan domain dan sub domain pemerintah yang secara teknis memerlukan kuantitas dan kualitas jaringan TIK serta sarana lainnya. Persentase urusan yang terintegrasi dengan *big data* tahun 2017 sebesar 20,93% dan meningkat menjadi 21% pada tahun 2018.

Tabel 2.100
Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan PD
di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Indikator	Satuan	2018
1	Persentase urusan yang terintegrasi dalam <i>big data</i>	%	21
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	%	17
3	Persentase layanan domain dan sub domain pemerintah	%	0,2
4	Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan PD	%	12,7

Sumber : Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2019

Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK mulai fokus dilaksanakan dengan disusunnya *masterplan smartcity* serta Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TIK.

4) Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik

Persentase layanan *website* PD dan Desa yang memenuhi kriteria diarahkan untuk menampilkan informasi kinerja, data, layanan serta kegiatan yang dilaksanakan. Saat ini belum ada kriteria yang diberlakukan untuk mengarahkan isi dari *website* yang dimiliki PD maupun desa.

Tabel 2.101
Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik
di Kabupaten Magelang tahun 2017-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase layanan website PD dan desa yang memenuhi kriteria	%	0	0	0	0	0
2	Persentase diseminasi informasi melalui media massa	%	66,67	66,67	66,67	66,67	70
3	Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	%	41,67	41,67	41,67	41,67	25
4	Cakupan diseminasi melalui media interpersonal	%	0	175	41,67	75	0
5	Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	%	58,33	41,67	41,67	58,33	25
6	Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	%	0	0	0	128,22	100
7	Cakupan layanan dan diseminasi	%	27,78	54,17	31,95	61,65	36,67

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	informasi publik						

Sumber : Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2019

Diseminasi informasi melalui berbagai media yang dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun 2014 sampai dengan 2016 bergantung dengan kegiatan langsung yang belum memanfaatkan teknologi informasi, hal ini dapat dilihat dari variansi angka cakupan layanan diseminasi informasi publik antara tahun 2016 sebesar 31.95% dengan tahun 2017 sebesar 61.65%.

- 5) Persentase layanan *website* PD dan desa yang memenuhi kriteria
- Keterbukaan informasi publik telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan menggunakan media baru berupa layanan *website* PD dan *website* desa. Tolok ukur dari layanan *website* ini adalah persentase layanan *website* PD yang memenuhi kriteria informatif dan layanan *website* desa yang memenuhi kriteria cukup informatif. Kriteria ini didasarkan pada pemeringkatan dari Badan Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi melalui penilaian kuesioner secara mandiri yang dilanjutkan dengan visitasi verifikasi. Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Magelang belum berpartisipasi dalam pemeringkatan layanan *website* PD sehingga belum ada data yang dapat ditampilkan.
- 6) Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI
- Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI diindikasikan dengan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar. Tingginya cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM dipengaruhi oleh aktifitas KIM di tiap kecamatan. Sedangkan konten literasi TIK diarahkan agar informasi yang disampaikan ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar.

Tabel 2.102
Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	119,05	119,05	119,05	119,05	100
2	Cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	%	0	0	0	16,67	25
3	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	%	61,9	61,9	61,9	67,86	62,5

Sumber : Diskominfo Kab. Magelang Tahun 2019

j. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi menjadi salah satu penggerak perekonomian terutama di tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah. Semakin besar jumlah persentase koperasi yang aktif, maka semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dengan menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Pengaruh koperasi terhadap perekonomian wilayah ditunjukkan dari perannya dalam membantu menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai lapangan pekerjaan informal alternatif ketika pekerjaan formal tidak lagi dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan.

Tabel 2.103
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	446	480	472	394	405
2	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	570	580	587	421	430
3	Persentase Koperasi Aktif	%	78,25	82,75	80,41	93,59	94,18

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cenderung fluktuatif. Tahun 2014, tercatat 446 koperasi aktif atau 78,25% dari jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebesar 480 unit. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan hingga tahun 2017 menjadi 394 unit. Peningkatan jumlah koperasi aktif kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi 405 unit. Walaupun jumlahnya menurun, namun persentase koperasi aktif meningkat pesat pada tahun 2017, yaitu menjadi 93,59%. Perkembangan positif ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi di Kabupaten Magelang menjadi salah satu media penggerak perekonomian skala kecil menengah.

2) Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha besar (bukan merupakan cabang). Jumlah UKM menjadi aspek yang diperhitungkan dalam menganalisis kondisi perekonomian wilayah karena perannya dalam perekonomian rakyat yang mandiri.

Tabel 2.104

Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah UMKM non BPR/LKM UKM	Unit	106.403	106.650	106.200	106.200	106.200

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah UKM di Kabupaten Magelang selama periode tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Jumlah UKM dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan signifikan, yang semula 106.403 unit menjadi 106.650 UKM. Namun jumlah ini kembali menurun pada tahun 2016 sampai 2018 menjadi 106.200 unit.

3) Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Jenis BPR dan LKM yang ada di Kabupaten Magelang adalah Usaha Simpan Pinjam yang perkembangannya cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, jumlah BPR/LKM hanya 7 unit dan kini telah mencapai 20 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang. Jumlah BPR/LKM akan menunjukkan seberapa besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah khususnya untuk masyarakat ekonomi rendah dan pengusaha kecil. Meski demikian, tidak banyak usaha mikro yang menggunakan BPR/LKM sebagai lembaga bantuan modal. Sebagian besar usaha ekonomi kecil masyarakat masih mendapatkan bantuan modal dari bank komersial dan modal pribadi.

4) Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perekonomian masyarakat, maka pemerintah daerah memiliki peran penting terutama untuk memberikan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan ekonomi lokal. Pembinaan dari pemerintah dapat berbentuk fisik maupun nonfisik, seperti bantuan alat modal dan pelatihan teknis dan manajerial serta pendampingan dan fasilitasi pameran dan promosi produk. Keberhasilan dari program ini diindikasikan dengan meningkatnya omzet penjualan dan kapasitas produksi.

Persentase usaha mikro dan kecil yang telah menerima pembinaan dari seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Magelang masih

sangat kecil. Meski demikian, persentasenya cenderung meningkat. Pada tahun 2014, persentase usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan pembinaan mencapai 0,39% dari jumlah keseluruhan unit usaha mikro yang ada. Persentase tersebut mengalami peningkatan mencapai 1,6% pada tahun 2016 dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 0,96. Pada tahun 2018, persentase usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan pembinaan kembali mengalami peningkatan mencapai 1,15%.

Tabel 2.105
 Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina di Kabupaten Magelang
 Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	Unit	416	1.280	1.706	1.024	1.225
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	106.637	106.637	106.637	106.637	106.637
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	0,39	1,2	1,6	0,96	1.15

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018

k. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar.

Tabel 2.106
 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Magelang
 Tahun 2014-2018

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Investor PMDN	Unit	820	594	517	730	1.186
2	Investor PMA	Unit	1	-	1	0	8

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2018

Penanaman modal di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri, yaitu hampir seluruhnya PMDN dan hanya 1 PMA. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi di Kabupaten Magelang untuk pihak asing masih sangat kurang.

Pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah dan target baru untuk memanfaatkan potensi Kabupaten Magelang sebagai daya tarik investor asing.

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat menjadi tolak ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap perekonomian daerah. Jumlah dan nilai realisasi proyeklah yang menjadi ukuran fisik keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 2.107

Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Investasi PMA	Milyar Rp	13.000	-	6.000	-	68.858
2	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rp	374.769	476.232	484.941	1.030.690	1.907.516
3	Total Nilai Investasi	Milyar Rp	374.769	476.232	490.490	1.030.690	1.976.374

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2018

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah keseluruhan PMDN/PMA. Dengan melihat rasio daya serap tenaga kerja, dapat diketahui pengaruh adanya investasi dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA akan mencerminkan besarnya daya tampung di perusahaan PMDN/PMA untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.108

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Variabel	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	Unit	821	594	518	730	424
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	Orang	9.890	4.455	7.583	8.297	9.205
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		8,3	13,3	6,83	11,37	21,71

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Tahun 2018

Besar jumlah tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan PMDN dan PMA sangat dipengaruhi jumlah perusahaan itu sendiri. Penyerapan tenaga kerja terbanyak terjadi pada tahun 2014, dimana jumlah perusahaan PMDN/PMA juga dalam jumlah terbanyak pada kurun waktu 2014-2015. Penyerapan tenaga kerja ini menurun di tahun selanjutnya seiring dengan menurunnya jumlah PMDN/PMA. Pada tahun 2016-2018 tenaga kerja yang terserap kembali meningkat.

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA akan menunjukkan besar pertumbuhan nilai realisasi proyek di suatu daerah. Angka pertumbuhan ini selanjutnya dapat menjadi salah satu aspek yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu mempertahankan tren investasi dan daya tarik/potensi daerahnya. Selama periode 2014 hingga 2018 kecuali tahun 2016, Kabupaten Magelang mengalami kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA, meski nilai kenaikannya berbeda-beda. Kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA terbesar terjadi dari tahun 2016 menuju 2017, yakni sebesar 525.490 miliar rupiah, dari tahun 2014 menuju 2015 yang mampu mencapai 2.605 miliar rupiah, serta dari tahun 2015 ke tahun 2016 mencapai 5.863 miliar rupiah, serta dari tahun 2017 ke tahun 2018 dengan jumlah yang tetap. Kenaikan nilai investasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah perusahaan PMDN dan PMA yang berinvestasi pada tahun terkait, tetapi juga skala perusahaan atau proyek kegiatan yang dilakukan juga sangat mempengaruhi besar nilai investasi yang ditanamkan.

1. Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia seutuhnya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menunjukkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Secara umum jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah organisasi pemuda dari 2 tahun sebelumnya yang stagnan. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 26 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya partisipasi penduduk terhadap pembangunan daerah. Berikut ini adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018.

Jumlah kegiatan kepemudaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dapat diketahui dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Tingginya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan data tahun 2013-2017, jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mulai nampak peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan yang signifikan yaitu menjadi sebesar 21 kegiatan dari sebelumnya 17 kegiatan. Peningkatan tersebut menunjukkan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah dan menunjukkan keefektifan organisasi pemuda dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2.109
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	21	24	26	26	27
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	17	21	21	17	20

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

Generasi muda yang dapat memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan suatu wilayah adalah generasi muda yang berprestasi. Prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang cenderung meningkat sebagaimana tabel cakupan prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.110
Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah atlet berprestasi	orang	95	100	110	130	150
2	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	orang	520	540	560	570	570
3.	Cakupan Prestasi Generasi Muda	%	12,96	13,09	13,65	15,23	16,99
4.	Cakupan pembinaan pemuda	%	15,73	16,33	19,21	33	37

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Organisasi olahraga pada bahasan ini adalah induk organisasi cabang olahraga. Menurut Undang undang Nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional induk organisasi cabang olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Jumlah organisasi olahraga dapat dihitung dari jumlah olahraga yang aktif pada saat tahun pengukuran. Banyaknya organisasi olahraga di suatu wilayah menggambarkan peran aktif masyarakat dalam bidang pengembangan olahraga. Berdasarkan data tahun 2014-

2018, secara umum jumlah organisasi di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya bidang olahraga.

Kegiatan olahraga merupakan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat. Jenis kegiatan olahraga ini dapat berbentuk pertandingan dan perlombaan ataupun peristiwa sejenis. Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga menunjukkan meningkatnya peran dan efektifitas organisasi pemuda dan/atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya bidang olahraga. Berdasarkan data tahun 2014-2018 perkembangan jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 30 jumlah kegiatan olahraga, meningkat dari 3 tahun sebelumnya yang stagnan berjumlah 23 kegiatan. Namun pada tahun 2017 jumlah kegiatan menurun menjadi 24. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah organisasi dan kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018.

Tabel 2.111
Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	28	34	30	31	35
2.	Jumlah klub olah raga	Unit	28	34	34	40	40
3.	Jumlah kegiatan olahraga	keg	23	23	30	24	24

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

3) Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga dapat dilihat dari jumlah lapangan dibagi dengan jumlah penduduk per 1000 jiwa. Angka ini mampu menunjukkan ketersediaan sarana fisik untuk olahraga khususnya lapangan olahraga. Lapangan olahraga dalam hal ini dapat berbentuk lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket atau lapangan lainnya yang peruntukannya sebagai sarana olahraga. Secara umum jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Akan tetapi, seiring meningkatnya jumlah penduduk maka perkembangan lapangan olahraga per 1000 penduduk tersebut mengalami penurunan. Jumlah lapangan olahraga mengalami peningkatan, sebagaimana data perkembangan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Magelang dari tahun 2014-2018.

Tabel 2.112
Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah lapangan olahraga	Unit	253	255	265	265	265
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	1.262.500	1.267.090	1.278.624	1.280.679	1.283.405

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3.	Lapangan olah raga per 1.000 penduduk	Unit	0,2	0,2	0,2	0,21	0,21
4	Cakupan Pembinaan olah raga	Persen	40,38	44,55	42,32	43,22	44,97

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

m. Statistik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun terdapat 3 (tiga) indikator yang perlu diukur pada urusan statistik yaitu tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka, dan Buku PDRB. Indikator tersebut diperlukan untuk mengetahui ketersediaan data dan statistik sebagai dasar dalam proses perencanaan pembangunan.

1) Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Mulai tahun 2017, urusan statistik menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Magelang belum mempunyai satu sistem data dan statistik yang terintegrasi. Pada tahun 2019 mulai dirilis sistem data statistik yang terintegrasi dengan alamat: <http://opendata.magelangkab.go.id/>. Sistem data statistik ini melingkupi semua data sektoral PD maupun Statistik Dasar dari Badan Pusat Statistik.

2) Buku Kabupaten Dalam Angka

Buku Kabupaten Dalam Angka memuat dua jenis data statistik yaitu data statistik dasar dan data statistik sektoral yang dihimpun dari instansi/dinas/lembaga pemerintah maupun swasta (data sekunder). Kontinuitas publikasi diindikasikan dengan terbitnya publikasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Ketersediaan publikasi buku Kabupaten Dalam Angka diperlukan bagi pemerintah dan masyarakat untuk analisis pembangunan.

3) Buku PDRB Kabupaten

Ketersediaan publikasi Buku PDRB Kabupaten bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan data yang diperlukan guna analisis pembangunan terutama yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian kabupaten seperti pertumbuhan ekonomi dan analisis sektor unggulan. Selain itu, PDRB Kabupaten diperlukan untuk mengukur kondisi perekonomian kabupaten dibandingkan dengan wilayah regional dan provinsi. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi daya saing kabupaten ditinjau dari sisi ekonomi. Buku PDRB Kabupaten Magelang ada/tersedia tahun 2013-2017.

n. Persandian

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era

keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka. Urusan persandian di Kabupaten Magelang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun program yang telah dilaksanakan untuk mendukung urusan tersebut adalah program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan satu kegiatan yaitu pengelolaan dan pengembangan persandian yang masih terbatas pada pelayanan komunikasi yakni distribusi informasi berdasarkan klasifikasi di internal Pemerintah Kabupaten Magelang.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan persandian antara lain belum tersedianya sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai dengan standar, belum optimalnya pengamanan jaringan informasi, dan pengamanan ruang penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Untuk mengukur kinerja urusan persandian adalah persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Data kinerja ini untuk Kabupaten Magelang belum tersedia, namun selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur kinerja urusan persandian.

o. Perpustakaan

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan merupakan indikator untuk menggambarkan seberapa besar minat masyarakat untuk membaca. Semakin banyak pengunjung maka minat membaca di masyarakat cukup tinggi. Selain itu, dengan melihat peningkatan jumlah pengunjung, dapat terlihat bahwa apakah pemerintah daerah sudah mampu menstimulasi penduduknya untuk lebih rajin membaca dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah fluktuatif dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.113
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jiwa	36.595	33.726	55.854	39.967	76.548
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.262.500	1.267.090	1.278.628	1.283.405	1.290.115
3	Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun	Persen	2,9	2,66	4,37	3,11	5,93
4	Persentase Peningkatan Pemustaka per tahun	%	-9.10	-7.84	65.61	-28.44	91.52

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase pengunjung perpustakaan per tahun masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Magelang masih rendah.

2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jenis koleksi buku yang tersedia menggambarkan seberapa beragamnya bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ilmu dalam tiap bidangnya. Semakin banyak judul koleksi buku, maka semakin beragam bacaan yang dapat dimanfaatkan. Jumlah koleksi judul buku tersebut kemudian diwujudkan ke dalam sebuah rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah koleksi judul buku dengan jumlah buku secara keseluruhan di perpustakaan daerah tersebut.

Tabel 2.114
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	23.984	24.512	24.955	26.179	27.230
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	47.345	49.990	52.683	56.724	61.030
3	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten	persen	1,97	2,04	2,11	2,16	2,24
4	Target		2,01	2,06	2,11	2,15	2,20

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah koleksi judul buku dan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Magelang terus meningkat dan beragam. Angka rasio yang dihasilkan juga meningkat setiap tahunnya dikarenakan jumlah koleksi yang tersedia semakin banyak dan judul buku yang dikoleksi juga terus bertambah. Dengan semakin beragamnya judul serta jumlahnya, diharapkan semakin banyak ragam dan jenis ilmu yang dapat diperoleh oleh masyarakat pengunjung perpustakaan.

p. Kearsipan

1) Pengelolaan Arsip Secara Baku

Tujuan penyelenggaraan kearsipan diantaranya adalah menjaga kelestarian arsip, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip secara baku, yang dikelola sesuai kaidah arsip yang tertib sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat dibutuhkan.

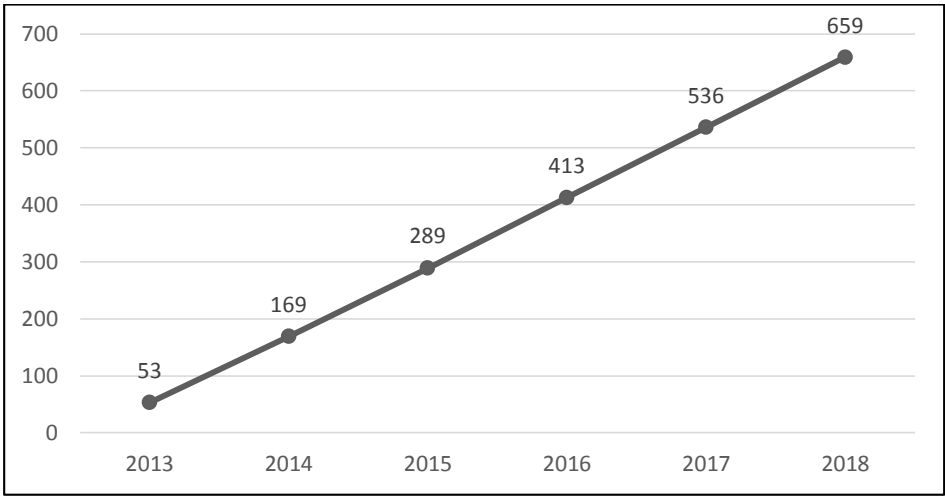
Dibawah ini data pengelolaan arsip secara baku atau tertib di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.115
Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	Unit	53	169	289	413	536	659
2	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip	Unit	734	734	734	734	734	734
3	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku/Tertib	%	7,22	38,47	39,37	56,27	73,02	89,77

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Magelang belum menyentuh ke seluruh pengolah arsip/pencipta arsip, meskipun dari tahun 2013 hingga 2017 jumlahnya terus mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan diperlukannya sosialisasi dan pendampingan kepada pengolah arsip/pencipta untuk melaksanakan pengelolaan arsip secara baku.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.25
Grafik Perkembangan Pengolah Arsip yang menerapkan Pengelolaan Arsip

II - 109

secara Baku Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018

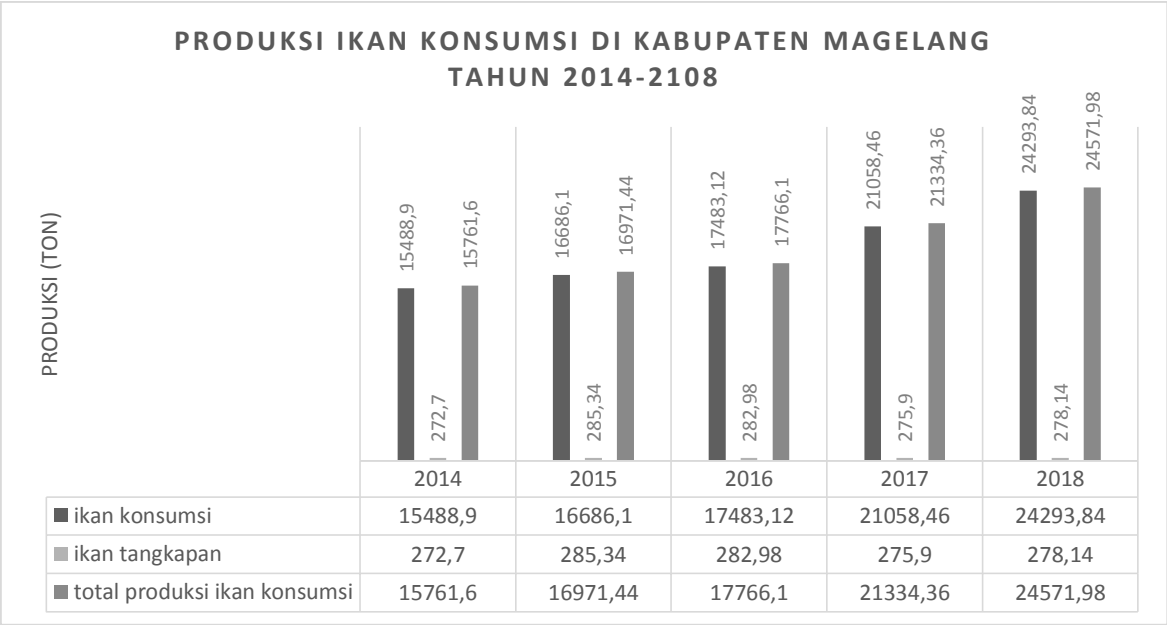
2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Magelang adalah sektor perikanan darat, mengingat Kabupaten Magelang bukanlah daerah pesisir.

Perikanan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Magelang mayoritas adalah jenis ikan tawar konsumsi. Jumlah produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Begitu juga pada produksi perikanan benih, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Selain perikanan budidaya, sektor perikanan di Kabupaten Magelang juga bersumber dari perikanan tangkap sungai. Jumlah produksi perikanan tangkap memang tidak sebanyak perikanan budidaya, namun banyaknya sungai di wilayah Kabupaten Magelang berpengaruh terhadap besarnya produksi perikanan tangkap yang cenderung meningkat. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 272,70 ton sampai tahun 2018 sebesar 278,14 ton. Produksi perikanan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

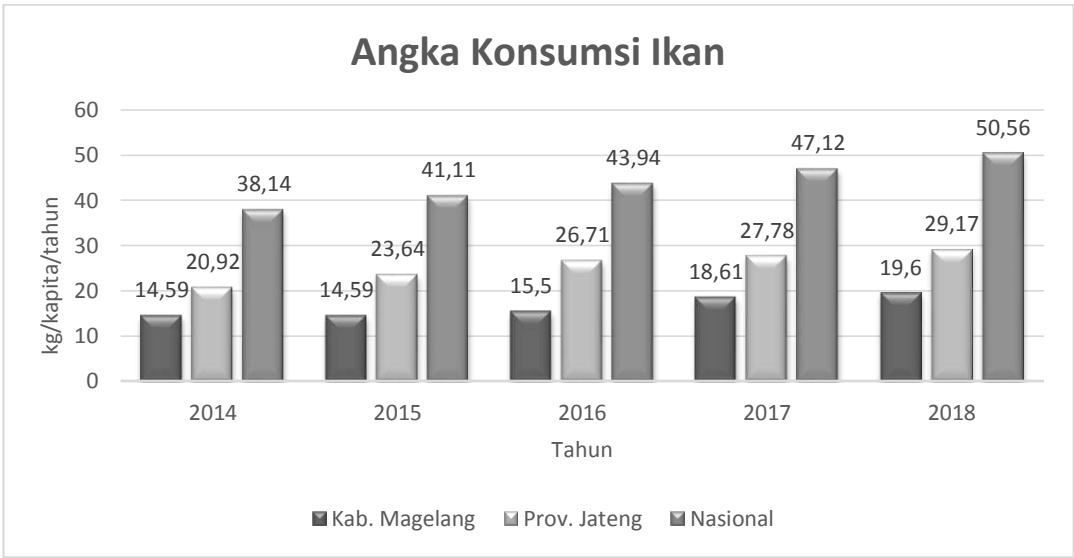
Gambar 2.26
Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.27
Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Besar konsumsi ikan menjadi salah satu indikator kesejahteraan karena berhubungan dengan variasi pangan yang dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi kualitas gizi dan kesehatan. Ikan mengandung vitamin dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Ikan mengandung omega 3 yang berfungsi baik bagi perkembangan otak manusia, selain itu protein yang ada juga penting perannya dalam mensuplai kebutuhan dan perkembangan organ tubuh manusia.



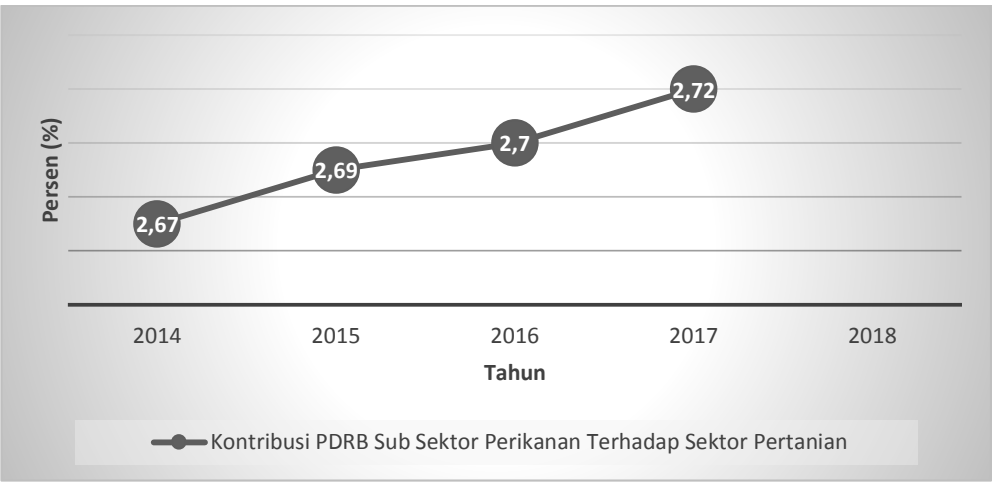
Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.28
Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Jumlah konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Magelang meningkat secara signifikan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Namun hal ini masih jauh dari angka konsumsi ikan di tingkat provinsi Jawa Tengah

maupun nasional. Sehingga masih diperlukan kampanye memasyarakatkan makan ikan di Kabupaten Magelang.

Perikanan sebagai bagian dari sektor pertanian dalam arti luas, juga memberi kontribusi dalam pendapatan Kabupaten Magelang melalui produk domestik regional bruto. Sebagai kabupaten yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan dataran membuat sektor perikanan yang berkembang masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kontribusi perikanan di dalam PDRB yakni berada di kisaran 2,6% sejak tahun 2014 hingga tahun 2015. Namun pada tahun 2016 dan 2017 kontribusinya naik menjadi 2,7%.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.29
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

b. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui jumlah kunjungan atau jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu destinasi wisata populer berkat adanya daya tarik wisata budaya dan alam, salah satunya Candi Borobudur, yang tidak hanya menarik wisatawan domestik saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Kunjungan wisata ke berbagai daya tarik wisata di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan.

Tabel 2.116
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kunjungan Wisata manca	301.909	253.358	413.306	337.515	358.673
2	Kunjungan Wisata nusantara	3.619.554	3.902.502	4.753.255	5.064.569	5.977.422
Jumlah		3.921.463	4.155.760	5.166.561	5.402.084	6.336.095
Peningkatan Jumlah Kunjungan		11.870	480.270	764.828	235.523	934.011

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

Pada tahun 2014 kunjungan wisata hanya mencapai 3.921.463 selama setahun dan meningkat hingga 6.336.095 pada tahun 2018. Selisih jumlah kunjungan mancanegara dengan kunjungan domestik masih terpaut cukup besar. Sejak tahun 2014 hingga 2018, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara rata rata kurang 10%.

2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata hingga saat ini belum secara tersurat masuk ke dalam salah satu kategori lapangan usaha PDRB. Oleh karena itu digunakan kategori lapangan usaha lain yang merepresentasikan kontribusi pariwisata, yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minum. Sektor ini kemudian dibagi menjadi dua subsektor, yaitu penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan. Sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk dikonsumsi segera seperti restoran, baik restoran tradisional, *self service*, maupun *take away*.

Tabel 2.117
Kontribusi PDRB Kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHK Kabupaten Magelang	17.936.288,38	18.838.351,97	19.855.844,24	20.882.801,00
PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (juta Rp)	728.538,27	776.587,13	823.333,08	875.649,00
Kontribusi terhadap PDRB (%)	4,06%	4,12%	4,15%	4,19%
Pertumbuhan (%)	7,50%	6,60%	6,02%	6,35%

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang diolah, Tahun 2018

Besar PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang cenderung meningkat positif. Pada tahun 2014, sektor penyedia akomodasi dan makan minum menyumbangkan 4,06% dari total PDRB ADHK

Kabupaten Magelang. Besar kontribusi sektor ini terhadap PDRB terus meningkat seiring dengan peningkatan nilai riil PDRB. Hingga tahun 2018, besar PDRB sektor penyedia akomodasi dan makan minum Kabupaten Magelang berhasil mencapai 875.649,00 juta rupiah atau 4,19% dari PDRB Kabupaten dengan laju pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 6,18%.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pariwisata secara langsung dan tidak langsung memberikan *multiplier effect* lewat sektor ekonomi lain mulai dari skala besar hingga mikro atau rumah tangga. Selain berkontribusi terhadap PDRB, sektor pariwisata yang apabila dikelola dengan tepat dan bijak dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah yang cukup besar. Kebijakan pengelolaan yang terkadang dipegang oleh pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan daerah untuk mengembangkan daya tarik wisata yang sebenarnya berada di wilayah otonomi mereka.

3) Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan menjadi salah satu indikator utama sektor pariwisata. Lama tinggal wisatawan mempengaruhi besarnya belanja wisatawan di suatu wilayah sehingga menggerakkan sektor ekonomi riil. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang cenderung meningkat dengan nilai yang tidak begitu signifikan. Mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan, setelah itu mengalami penurunan pada tahun 2017 dan kembali naik pada tahun 2018 dengan nilai rata-rata yang hampir sama dengan tahun 2016. Lambatnya tingkat kenaikan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang disebabkan masih lemahnya dukungan atraksi malam hari, tempat penginapan, terbatasnya daya tarik wisata dan paket wisata yang cenderung menjadikan DTW di wilayah Kabupaten Magelang bukan sebagai tujuan utama wisata.

Tabel 2.118

Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Wisman	Hari	1,30	1,64	1,14	1,004	1,65
2	Wisnu	Hari	1,41	1,31	1,01	1,006	1,31
Rata-rata		Hari	1,33	1,35	1,47	1,075	1,48
Peningkatan Lama Tinggal							0,475

Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

4) Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)

Magelang memiliki beragam jenis DTW yang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi yaitu DTW alam, budaya, buatan, dan minat khusus, dan lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi empat tersebut. Daya tarik wisata yang paling dominan di Kabupaten Magelang adalah daya

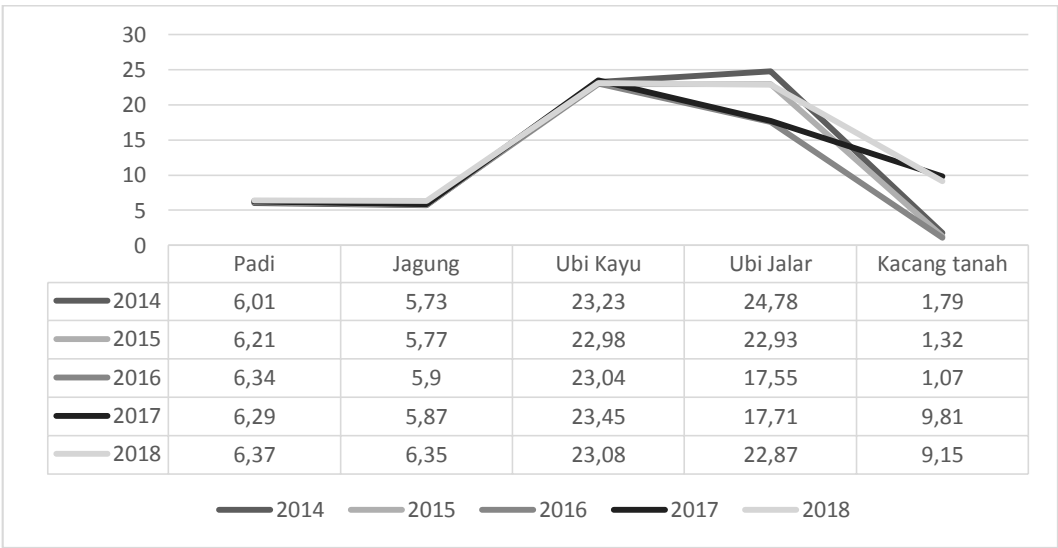
tarik wisata alam yaitu sejumlah 82. Kemudian disusul dengan daya tarik wisata berbentuk *event*.

Tabel 2.119
Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	DTW Alam	4	4	4	5	82
2	DTW Budaya	4	4	4	5	18
3	DTW Buatan	3	3	3	4	29
4	DTW Minat Khusus	N/a	N/a	N/a	N/a	29
5	Lain-lain (event)	N/a	N/a	N/a	N/a	53

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2018

- c. Pertanian
- Gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar
- a) Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama
- Tanaman bahan makanan utama di Kabupaten Magelang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Perkembangan produktivitas dari tanaman tersebut selama lima tahun terakhir dapat diketahui melalui gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.30
Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

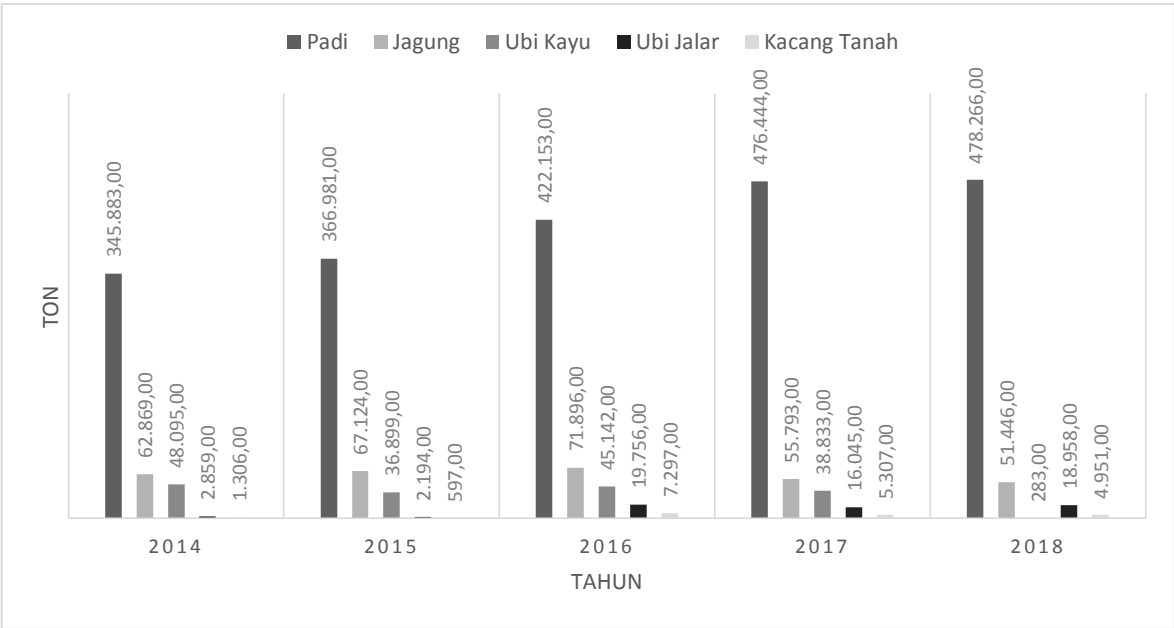
Produktivitas padi, jagung, ubi kayu cenderung tetap, meskipun ada kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Produktivitas tertinggi diantara komoditas tersebut adalah golongan ubi-ubian. Produktivitas ubi kayu adalah yang tertinggi pada tahun 2017 yakni mencapai

23,45 Ha dengan tren perkembangan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Ubi jalar menyusul dengan 22,87 ton/ha pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 17,71 ton/ha.

Berbeda dengan ubi jalar dan ubi kayu, produktivitas padi di Kabupaten Magelang meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2018 hingga mencapai 6,37 ton/ha. Perkembangan produktivitas padi menunjukkan perkembangan yang terus meningkat perlahan dibanding produktivitas jagung yang cenderung stagnan selama lima tahun terakhir.

b) Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama

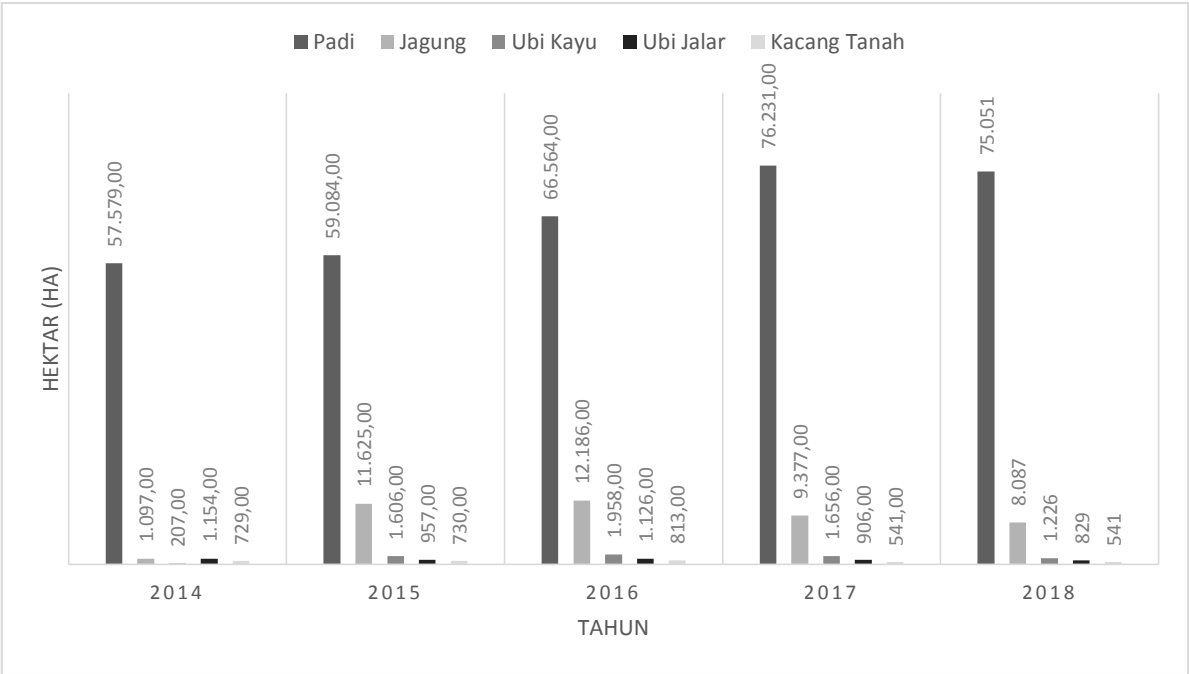
Apabila dilihat dari besar jumlah produksi tanaman bahan makanan utama, padi merupakan tanaman pangan dengan jumlah terbesar dibandingkan jenis tanaman pangan utama lainnya. Padi sebagai bahan pangan utama yang mentah sebelum menjadi beras, memiliki peran penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Total produksi komoditas tanaman pangan penting di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.31
Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018 (Ton)

Total produksi padi mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sementara komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah mengalami penurunan produksi karena lahan bergiliran untuk peningkatan produksi padi (Pajale). Hal ini dapat dilihat dari luas panen tanaman bahan makanan di Kabupaten Magelang pada tabel di bawah ini.

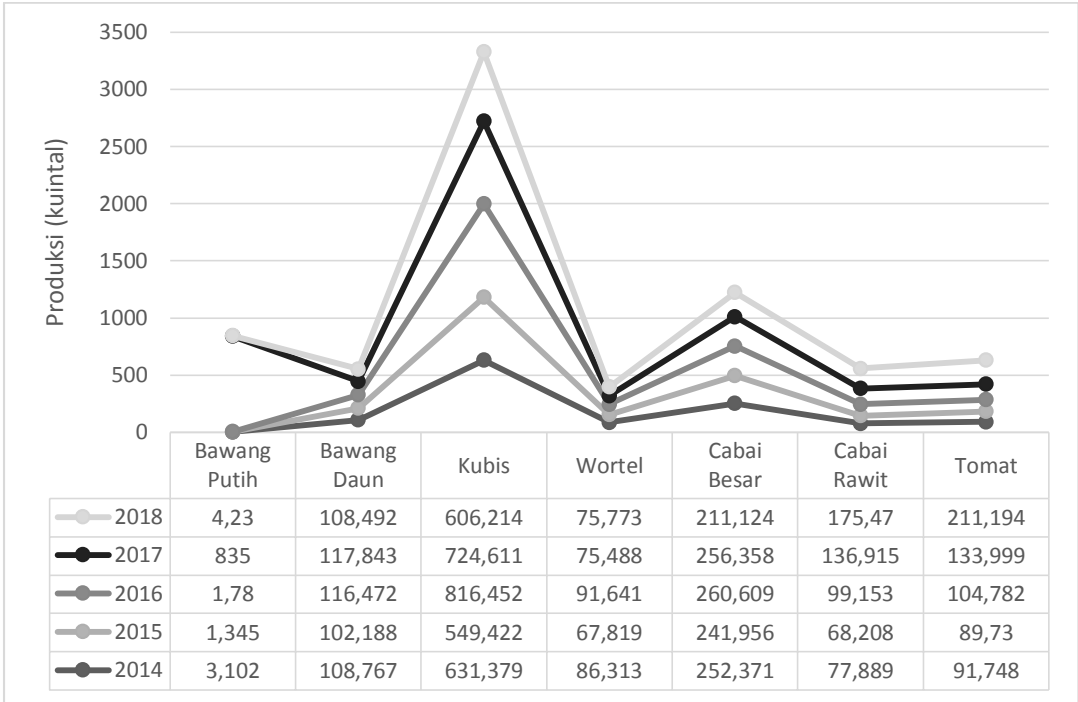


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.32
Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

c) Total Produksi Komoditas Sayur-sayuran

Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang potensial dengan iklim yang sesuai, Kabupaten Magelang tidak hanya menghasilkan padi tetapi juga komoditas sayur-sayuran. Komoditas sayuran merupakan komoditas yang penting setelah komoditas tanaman pangan. Jenis dan karakteristik tanah serta kondisi geografis Kabupaten Magelang yang sebagian besar adalah wilayah tangkapan air membuat kabupaten ini sangat potensial untuk ditanami komoditas sayur-sayuran. Produksi beberapa jenis sayuran yang dihasilkan Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



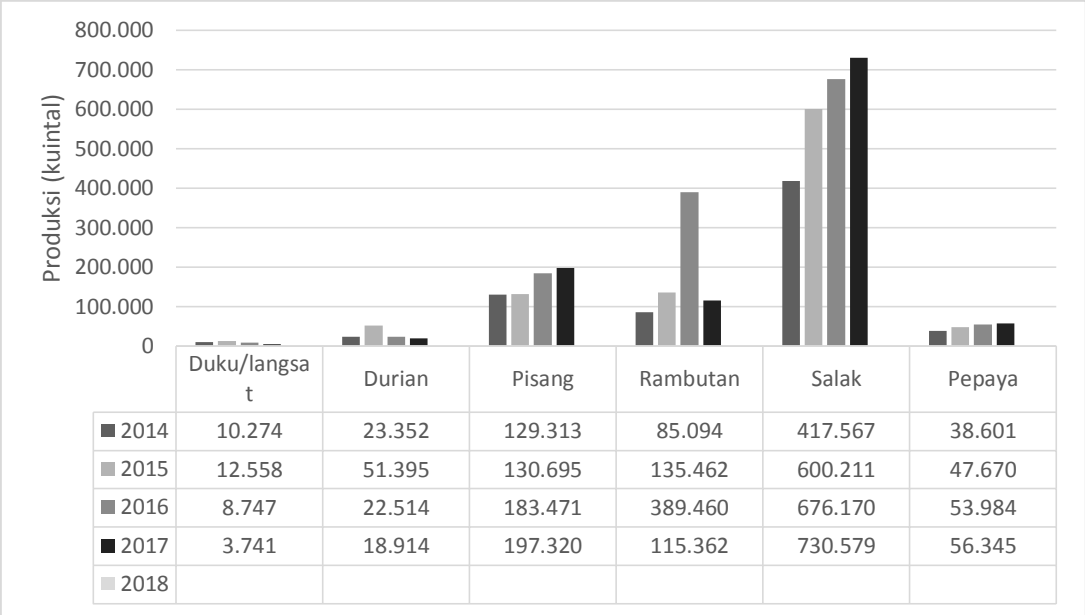
Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.33
Total Produksi Sayur-sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Komoditas sayuran penting di Kabupaten Magelang antara lain kubis, bawang daun, wortel, tomat, cabai rawit, cabai besar dan bawang putih (sedang dikembangkan). Perkembangan produksi hampir seluruh komoditas sayuran fluktuatif namun relatif stabil dari tahun 2014-2018, dengan kecenderungan positif.

d) Total Produksi Komoditas Buah-Buahan

Komoditas buah-buahan merupakan komoditas pertanian lainnya yang penting setelah tanaman pangan dan sayuran, yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat tani. Komoditas buah-buahan umumnya rata-rata memproduksi setahun sekali. Komoditas buah buahan pada umumnya bisa diproduksi di semua kabupaten dan kota. Beberapa jenis buah dengan produksi tertinggi antara lain salak, pisang, pepaya, dan rambutan. Unggulnya buah-buahan tersebut tidak lepas dari kondisi lingkungan yang subur untuk menanam buah jenis tertentu.

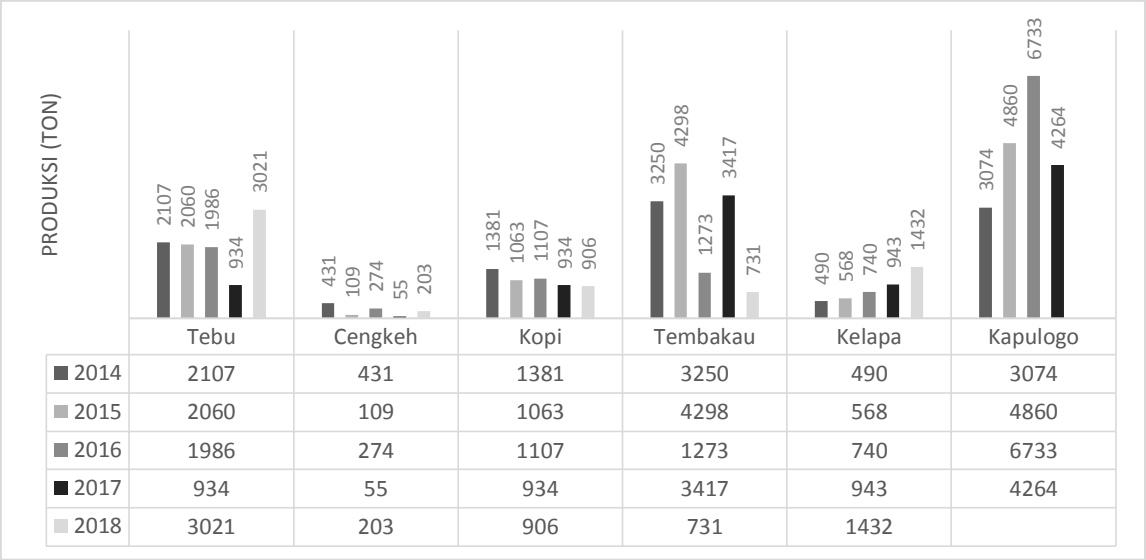


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.34
Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Komoditas buah salak merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang produksinya mencapai 730.579 kwintal pada tahun 2017 dengan tren perkembangan yang selalu meningkat sebesar 8,05% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Produksi buah terbesar selanjutnya adalah pisang yang mencapai 197.320 kwintal atau meningkat 7,55% dari produksi tahun sebelumnya. Sama halnya dengan pisang, komoditas jambu biji juga mengalami peningkatan produksi hingga 39,22% dari tahun sebelumnya.

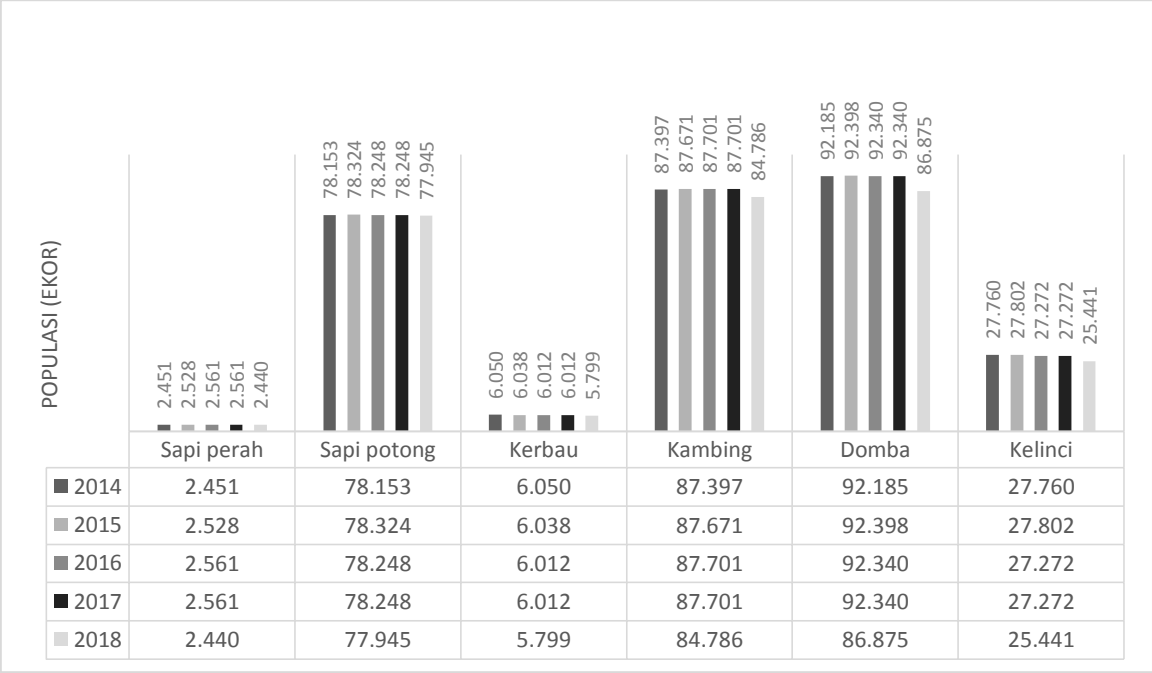
- e) Total Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan
- Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Magelang fluktuatif, didominasi oleh tanaman perkebunan tembakau dan kapulaga, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.35
Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

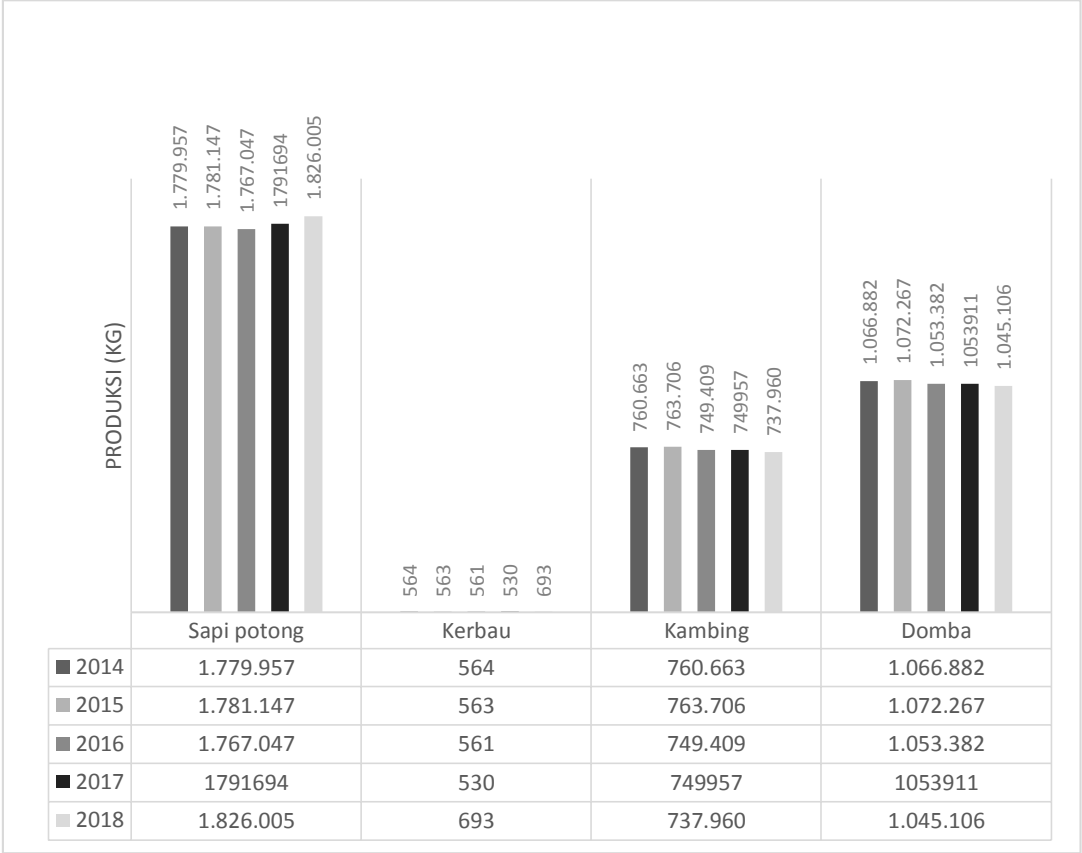
Peternakan sebagai bagian dari kegiatan pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian wilayah. Selain sebagai sumber protein hewani bagi kebutuhan manusia, ternak juga seringkali digunakan sebagai tenaga pengolah lahan persawahan. Teknologi mutakhir saat ini juga telah mampu mengubah kotoran sapi menjadi pupuk organik dan alternatif sumber energi atau dikenal dengan biogas bagi rumah tangga. Banyaknya manfaat dari sektor perekonomian berbasis peternakan, membuat sektor yang bersumber dari *livestock* ini perlu diperhatikan.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.36
Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan populasi masing-masing ternak berbeda, namun cenderung meningkat positif. Kenaikan jumlah populasi paling signifikan terjadi pada kambing dan domba. Populasi domba pada tahun 2017 mencapai 92.340 ekor dan disusul kambing sebanyak 87.701 ekor. Sedangkan populasi sapi potong, kerbau, dan kelinci mengalami penurunan.

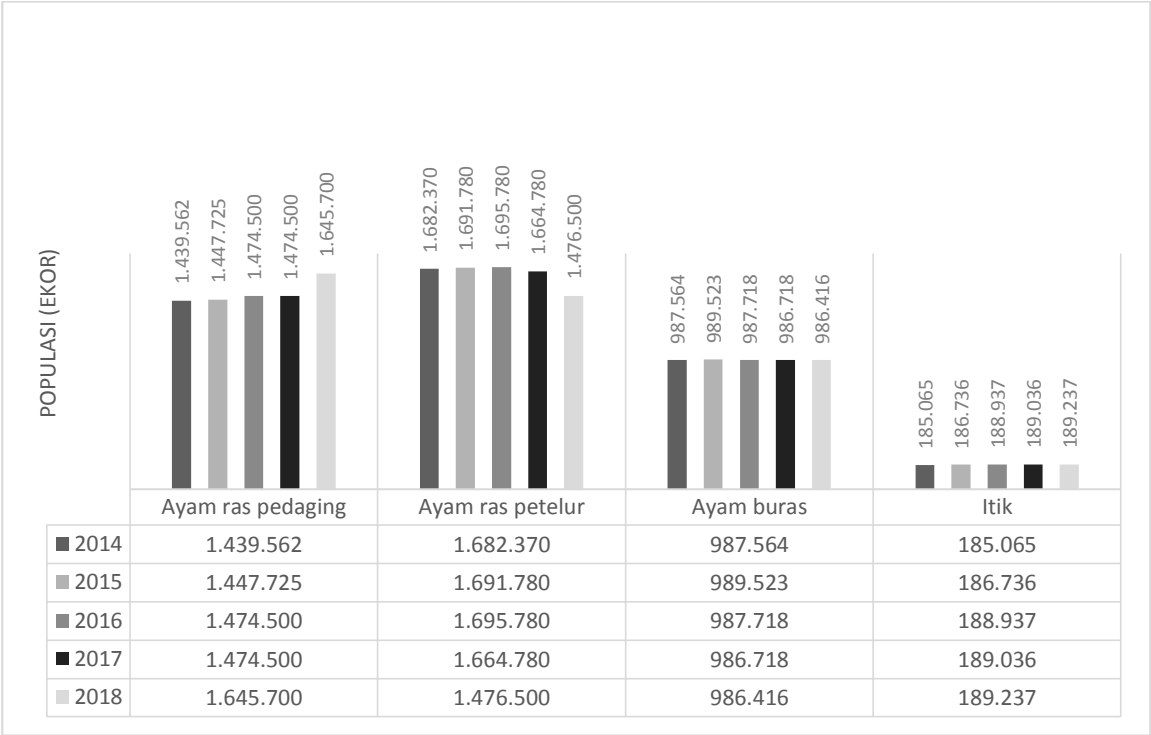


Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.37
Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

Perkembangan jumlah produksi hewan ternak di Kabupaten Magelang cenderung meningkat untuk daging sapi dan kerbau, sedangkan untuk daging kambing dan domba, cenderung menurun. Produksi daging sapi meningkat dari 1.779,957 kg pada tahun 2014 menjadi 1.826.005 kg pada tahun 2018. Sedangkan produksi daging kerbau juga meningkat dari 564 kg pada tahun 2014 menjadi 693 kg pada tahun 2018. Sementara itu, produksi daging kambing mengalami penurunan dari 760.663 kg pada tahun 2014 menjadi 737.960 pada tahun 2018. Sama halnya yang terjadi pada produksi daging domba, menurun dari 1.006.882 pada tahun 2014 menjadi 1.045.106 pada tahun 2018.

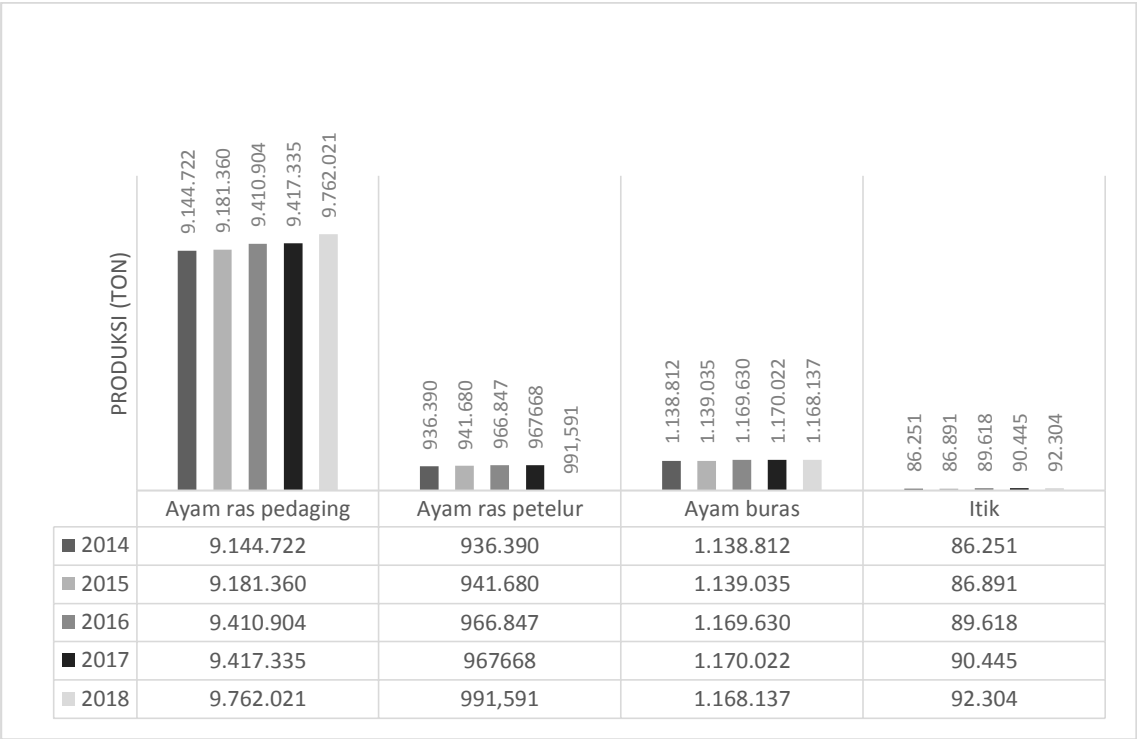
Tidak hanya memiliki potensi peternakan ruminansia, Kabupaten Magelang juga memiliki aktivitas pertanian disektor peternakan unggas. Perkembangan populasi ternak unggas dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein nasional. Perkembangan ternak unggas selama lima tahun terakhir relatif meningkat positif di semua jenis unggas.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.38
Grafik Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

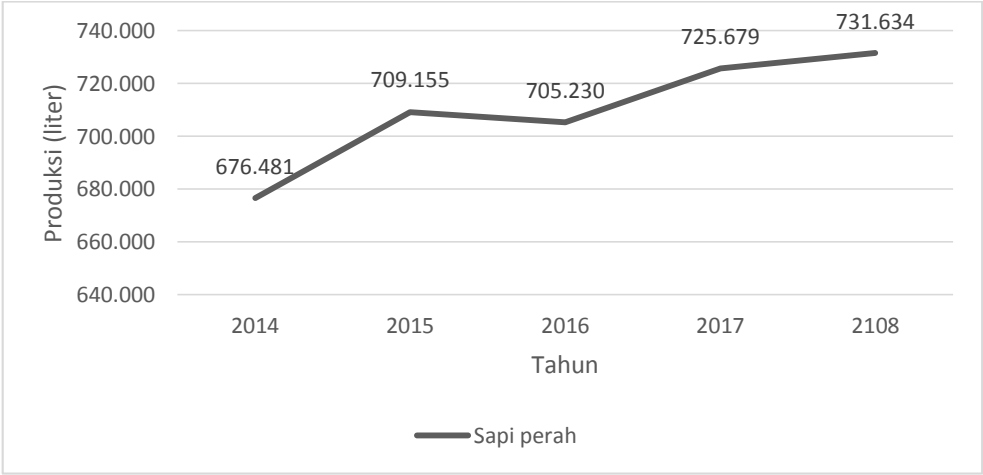
Populasi ternak unggas yang terbesar di Kabupaten Magelang adalah ayam petelur. Populasi ayam petelur mencapai 1.695.700 ekor pada tahun 2016. Angka ini disusul oleh ayam pedaging sebesar 1.474.500 ekor dan ayam kampung 987.718 ekor. Kenaikan populasi terbesar adalah ayam pedaging, sedangkan populasi burung puyuh dan angsa menurun pada tahun terakhir.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.39
Grafik Perkembangan Produksi Daging Ternak
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Selain daging, manfaat yang diperoleh dari ternak ruminansia adalah produksi susu segar dari sapi perah untuk melengkapi pemenuhan gizi penduduk. Selama lima tahun terakhir produksi susu segar di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 produksi susu sapi segar mencapai 487.743 liter dan meningkat tajam di tahun 2013 hingga mencapai 662.567 liter. Angka ini terus meningkat perlahan dan kini produksi susu sapi segar telah mencapai 705.231 liter pada tahun 2016.



Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 2.40
Grafik Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

f) Sumber Daya Manusia Pertanian

Kualitas sumber daya manusia pertanian dapat dilihat dari perkembangan kelas kelompok tani. Berikut disajikan perkembangan kelas kelompok tani di Kabupaten Magelang. Semakin berhasil penyuluhan yang dilaksanakan, maka semakin banyak kelompok tani dengan kelas madya dan utama.

Tabel 2.120
Perkembangan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Kelas Kelompok	2014	2015	2016	2017	2018
Pemula	1337	1615	1772	1534	1599
Lanjut	766	776	872	1125	1149
Madya	103	111	132	99	101
Utama	10	12	17	9	9
Jumlah Total	2216	2514	2793	2767	2858

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2019

Kelompok tani yang menempati kelas madya dan utama masih sangat kecil dibandingkan dengan total kelompok tani yang ada. Pada tahun 2018, 55% kelompok tani masih berada pada kelas pemula, 40% pada kelas lanjut, dan hanya 3,5% yang berada pada kelas madya serta 0,3% yang sudah berada pada kelas utama.

Keberlangsungan pembinaan kelompok tani sangat erat hubungannya dengan keberadaan tenaga penyuluh pertanian yang ada baik tenaga penyuluh ASN maupun tenaga penyuluh THL. Terdistribusinya pembinaan juga tidak lepas dari adanya penyuluh pertanian yang diterjunkan ke lapangan. Berikut ini adalah jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Magelang. Jumlah penyuluh swadaya lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyuluh dari pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.121
Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kabupaten	Orang	9	8	8	6	6
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kecamatan	Orang					
1	Penyuluh PNS	Orang	126	120	118	125	117
2	Penyuluh THL-TBPP	Orang	162	155	150	102	102
	Penyuluh Swadaya	Orang	525	525	525	540	540
	Penyuluh Swasta	Orang	40	42	42	42	42

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2019

Selama lima tahun terakhir, keberadaan tenaga penyuluhan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan terus berkurang. Hal ini disebabkan banyaknya penyuluh ASN yang memasuki masa

pensiun. Berlawanan dengan hal tersebut, jumlah penyuluh swadaya dan penyuluh swasta justru semakin meningkat.

d. Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 turut mengubah klasifikasi subsektor perdagangan. Semula, subsektor perdagangan termasuk di dalam kategori sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun kini berubah menjadi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan skala besar maupun eceran atau perdagangan skala masyarakat umum untuk konsumsi perorangan dan rumah tangga. Jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini antara lain semua yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, hingga suku cadang dan aksesoris mobil dan motor.

Tabel 2.122
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
PDRB Kabupaten Magelang	18.838.351,97	19.855.844,24	20.882.801	20.882.801
PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Juta Rp)	2.691.442,36	2.833.603,46	3.006.270	3.006.270
Kontribusi (%)	14,43%	14,29%	14,27%	14,40%
Pertumbuhan PDRB sektor (%)	3,52%	3,99%	5,28%	6,09%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Sektor perdagangan dalam PDRB merupakan sektor sekunder kedua paling besar yang berkontribusi untuk PDRB Kabupaten Magelang setelah sektor industri pengolahan. Kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Magelang relatif menurun secara perlahan selama lima tahun terakhir. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten pada tahun 2014 mencapai 14,43% dan terus menurun hingga hanya 14,27% pada tahun 2016. Meski persentase kontribusinya terhadap total PDRB kabupaten, nilai riil PDRB sektor perdagangan tetap mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2015 ke 2016, yakni dari 2.691.442,36 juta rupiah menjadi 2.833.603,46, atau sebesar 5,28%.

2) Pasar Tertib Ukur

Untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen perlu diciptakan pasar tertib ukur. Di Kabupaten Magelang telah dilakukan

penilaian terhadap pasar yang tertib ukur. Jumlah pasar yang telah menerima penghargaan tertib ukur di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.123
Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Unit	-	1	2	4	6
2	Jumlah Pasar	Unit	17	17	17	17	17
	Persentase	%	0	0	6	24	35

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2018

Dari sejumlah 20 unit pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magelang yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang. Sampai Tahun 2018 telah memiliki 6 pasar yang telah menerima penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Koperasi yaitu Pasar Salaman, Mungkid, Bandongan, Secang, Grabag, dan Talun. Hal ini perlu dilanjutkan karena selain untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap keakuratan timbangan dan alat ukur dalam perdagangan, juga bisa meningkatkan pemanfaatan pasar rakyat oleh masyarakat lokal.

3) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi terkait produksi barang dan perdagangan. Jika nilai ekspor bersih perdagangan positif, maka neraca perdagangan dikatakan positif atau surplus dan sebaliknya defisit.

Tabel 2.124
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Ekspor	US \$	90.672.195,97	102.372.685,5	94.310.307,20	102.981.326,5	87.180.566,41
2	Nilai Impor	US \$	2.367.953,18	1.843.877,79	1.233.499,55	1.149.602,58	1.098.663,30
3	Ekspor Bersih Perdagangan	000 US \$	76.027.306,86	88.304.242,79	100.528.807,7	101.831.724	86.081.903,11

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019

Selama lima tahun terakhir, nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Magelang positif atau surplus dengan trend fluktuatif, meski kenaikan ataupun penurunannya tidak signifikan. Hal ini menunjukan Kabupaten Magelang berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan nilai ekspor nasional.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hingga saat ini nilai ekspor masih lebih besar dibandingkan nilai impor, meski keduanya sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang tahun 2014 hingga 2018. Nilai ekspor bersih secara bertahap meningkat mulai tahun 2014 dan mencapai puncaknya pada tahun 2017, yaitu sebesar US\$101.831.723,96, namun kemudian menurun kembali pada tahun 2018 dengan penurunan yang signifikan. Kenaikan dan penurunan nilai ekspor sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan moneter. Saat ekonomi dunia melemah maka nilai ekspor Kabupaten Magelang menurun meskipun masih positif atau surplus.

e. Perindustrian

1) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor sekunder penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Magelang dan sektor terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan dapat berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian yang selanjutnya diolah menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Kabupaten Magelang yang memiliki potensi alam melimpah merupakan salah satu faktor pesatnya perkembangan industri pengolahan baik pengolahan produk pertanian, kehutanan, perikanan hingga pertambangan penggalian.

Tabel 2.125
Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHK Kabupaten Magelang	17.936.288,38	18.838.351,97	19.855.844,24	20.882.801
PDRB Kategori Industri Pengolahan (juta Rp)	3.802.680,12	3.997.570,79	4.230.032,32	4.437.345
Kontribusi terhadap PDRB (%)	21,20%	21,22%	21,30%	21,25%
Pertumbuhan (%)	7,44%	5,13%	5,82%	4,53%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun, 2018

Apabila dilihat dari segi perkembangan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun, persentase kontribusi sektor ini memiliki kecenderungan naik, meski tidak signifikan, seiring dengan kenaikan nilai riilnya. Pada tahun 2014, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 21,20% dan terus naik dengan pertumbuhan rata-rata 5,73% hingga tahun 2017. Pada tahun 2016 besar nilai riil sektor industri pengolahan telah mampu mencapai 4.230.032,32 juta rupiah dan berkontribusi sebesar 21,30% terhadap total PDRB kabupaten.

2) Pertumbuhan Industri

Sama halnya dengan sektor perdagangan, sektor industri juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkatan perkembangan ekonomi suatu wilayah dilihat dari kemampuannya mengolah bahan baku dan tidak lagi bergantung pada kegiatan primer. Pada tahun 2014 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang mencapai 38.427 unit. Angka ini terus meningkat dengan pertumbuhan terbesar pada tahun 2015, yakni naik 7,8% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang sudah mampu mencapai 39.712 unit. Sedangkan industri besar di Kabupaten Magelang didominasi oleh industri di sektor energi. Industri ini paling banyak berkembang di Kecamatan Tempuran, Mungkid, dan Mertoyudan. Perkembangan industri besar dan sedang selama periode tahun 2014 hingga 2016 cenderung menurun.

Tabel 2.126
 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	Industri Besar	Unit	20	20	18	6
2	Industri Sedang*	Unit	43	52	39	*
3	Industri kecil	Unit	38.427	39.548	39.580	39,602
4	Industri menengah	Unit	113	123	132	132
5	Total usaha industri kecil dan menengah	Unit	38.540	39.671	39.712	39,734
6	Pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah	%	6,03	7,8	3,7	0,05

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018
 Ket: * Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2017, kategori Industri terdiri dari : Industri Kecil, Menengah dan besar.

Apabila dilihat dari skala industri, hampir 99% merupakan jenis industri kecil. Pada tahun 2016, jumlah industri kecil mencapai 39.580 dari total unit usaha sebanyak 39.712 unit. Sedangkan jumlah industri menengah hanya sebesar 132 unit atau 0,3% dari total jumlah unit usaha. Perkembangan industri yang tengah berlangsung di Kabupaten Magelang menandakan sudah adanya usaha mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan industri juga terbukti mampu melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sejak tiga tahun terakhir.

2.1.3.4. **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

- a. Perencanaan

Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, berupa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD), Sistem Informasi Usulan Masyarakat (SiUma), Sistem Informasi Daftar Usulan RKP Desa (Sidudes), Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan (SIPPD) Versi 2, Sistem Informasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (SiPokir), Sistem Informasi Pengendalian dan Pelaopran (Sidalap). Untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan telah digunakan data album kemiskinan yang berbasis aplikasi sistem penanggulangan kemiskinan (Sinangkis). Aplikasi tersebut diterapkan untuk menentukan proporsi wilayah sasaran dan besaran kuota rumah tangga sasaran penerima program secara berkeadilan dan lebih akurat. Akurat artinya dibuat secara terperinci dan mendetail dan dirumuskan segala aspek organisasi, tata kerja, metode kerja, penggunaan tenaga kerja, pembiayaan, jadwal waktu, target hasil dari sistem pengawasan. Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana/indikator dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.127
Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Program RKPD	182	184	176	165	174
2	Jumlah Program RPJMD	182	184	176	185	184
3	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	89,19	94,57
5	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magelang, 2019

Rasio penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD pada kurun waktu 5 tahun terakhir seluruh program RPJMD telah dijabarkan dalam RKPD. Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas perlu didukung oleh sumberdaya yang memadai, salah satunya sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai, jumlah SDM Perencana di perangkat daerah sejumlah 10 orang, atau baru terpenuhi 45,45% dari total kebutuhan SDM perencana yang sejumlah 22 orang. Hal ini menunjukkan kurangnya SDM perencana di Kabupaten Magelang yang berdampak pada kualitas perencanaan.

b. Keuangan

1) Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate*

disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.128
Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2.	Target	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Magelang sejak tahun 2014 hingga 2016 selalu memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yaitu opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu dinilai tidak wajar. Namun, ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pada tahun 2017-2018 Kabupaten Magelang akhirnya bisa memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh hasil WTP.

2) Persentase Peningkatan PAD

Salah satu sumber pendapatan dan belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dimasukkan kedalam sumber APBD untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi/potongan/bentuk lain sebagai akibat dari penjualan da/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tabel 2.129
Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018 *)
Pajak daerah	79.395.385.267	88.960.021.815	97.101.522.117	112.344.030.430	124.444.072.963
Retribusi daerah	34.075.776.969	15.939.015.341	15.587.692.390	20.445.297.126	18.186.191.392

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018 *)
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	12.540.994.826	15.264.432.303	17.643.064.538	20.805.304.738	28.634.358.666
Lain-lain PAD yang sah	116.436.520.205	141.405.622.324	158.153.399.083	249.966.606.016	153.833.704.215
Total Pendapatan Asli Daerah	242.448.677.267	261.569.091.783	288.485.678.128	403.561.238.310	325.098.327.236
Persentase Kenaikan PAD	-	7,89	10,29	39,89	(19,44)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2018
Ket: *) Belum diaudit BPK (unaudited)

Sumber PAD terbesar Kabupaten Magelang adalah dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, yakni menyumbang masing-masing 27,84% dan 61,94% terhadap PAD kabupaten pada tahun 2017. Sedangkan PAD yang bersumber dari retribusi daerah pada tahun 2016 cenderung menurun karena adanya perubahan peraturan tentang pengalihan kewenangan pengelolaan beberapa aset daerah sehingga retribusi yang dihasilkan tidak masuk ke dalam PAD kabupaten, akan tetapi pada tahun 2017 naik kembali hingga tahun 2018 yang mencapai 5,07%.

Tabel 2.130
Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Proporsi					Rata-rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak daerah	32,75	34,01	33,66	27,84	38,28	11,92
Retribusi daerah	14,05	6,09	5,40	5,07	5,59	-8,83
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5,17	5,84	6,12	5,16	8,81	23,21
Lain-lain PAD yang sah	48,03	54,06	54,82	61,94	47,32	13,22

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2019

Pertumbuhan rata-rata PAD selama tahun 2014 hingga 2018 sudah mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PAD tidak terlepas dari meningkatnya nilai realisasi masing-masing sumber PAD. Hampir seluruh sumber PAD juga mengalami pertumbuhan positif kecuali retribusi daerah. Sumber PAD dari hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan mengalami perkembangan paling signifikan, yakni 23,21% selama lima tahun terakhir, sedangkan besar realisasi retribusi justru menurun 8,83%.

Salah satu indikator *good governance* adalah adalah APBD yang ditetapkan tepat waktu, oleh karena itu di bawah ini disajikan penetapan APBD yang tepat waktu.

Tabel 2.131
 Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Penetapan tahapan APBD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : BKKPAD Kabupaten Magelang, 2019

- 3) Peningkatan Pengelolaan BUMD
- Saat ini Pemkab Magelang mengelola 6 BUMD, dengan kepemilikan saham, sebagai berikut.

Tabel 2.132
 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Nama BUMD	Kepemilikan Saham
1	PT Bank Pembangunan Daerah	0,48 %
2	PD BPR BKK Muntilan	49 %
3	PD BKK Tempuran	49 %
4	PD BPR Bapas 69	100 %
5	PDAM Tirta Gemilang	100 %
6	PD Aneka Usaha	100 %

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2019

Secara akumulasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2018 dan penerimaan deviden sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.133
 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Nama BUMD	Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Deviden (juta)
1	PT Bank Pembangunan Daerah	27.888,00	27.705,07
2	PD BPR BKK Muntilan	9.800,00	5.762,22
3	PD BKK Tempuran	4.900,00	1.048,67
4	PD BPR Bapas 69	50.000,00	101.108,81
5	PDAM Tirta Gemilang	28.250,00	24.476,72
6	PD Aneka Usaha	3.100,00	382,35

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan *audited* BUMD Kabupaten Magelang periode tahun 2014-2018. Beberapa kinerja keuangan BUMD

yang mendukung peningkatan kontribusi kepada pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.134
Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2014-2018
(Dalam Juta Rupiah)

NO	BUMD	URAIAN	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	BPR Bank Bapas 69	Pendapatan	81.010,05	93.094,50	107.971,61	116.601,79	123.319,86
		Laba bersih	17.294,70	20.413,68	25.207,03	26.217,62	29.094,64
2	BPR BKK Muntilan	Pendapatan	16.746,51	18.452,24	19.639,25	22.000,77	23.360,44
		Laba bersih	3.007,71	3.203,87	3.343,65	3.390,77	3.749,36
3	BKK Tempuran	Pendapatan	6.144,64	6.226,50	6.908,99	8.221,36	9.640,14
		Laba bersih	586,94	39,13	756,89	841,15	955,87
4	PDAM Tirta Gemilang	Pendapatan	26.040,80	34.460,95	35.646,13	38.135,56	42.136,82
		Laba bersih	4.590,38	4.970,96	5.052,85	5.637,93	6.185,39
5	Aneka Usaha	Pendapatan	2.945,75	3.512,31	3.735,68	4.740,17	5.115,75
		Laba bersih	107,49	158,67	168,86	329,60	250,12

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang Tahun 2018

Secara kinerja keuangan, BUMD Pemkab Magelang menunjukkan kecenderungan membaik. Hal ini ditunjukkan semakin meningkatnya beberapa aspek, yaitu aset, pendapatan dan laba. Namun untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, terdapat beberapa permasalahan, antara lain manajemen/pengelolaan, regulasi, SDM, modal, sinergi antar BUMD dan inovasi bisnis serta daya saing.

4) Alternatif pembiayaan non-APBD

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Ada beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya skema pinjaman dan hibah, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan obligasi daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud.

Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Magelang, sehingga perlu dilakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dan berasal dari komunitas/masyarakat itu sendiri. Selama ini, pola pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktivitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Untuk lebih menggerakkan potensi swa-pendanaan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi yang ada di mereka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Di samping itu, masih terdapat peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif khususnya dari instrumen pemanfaatan ruang, seperti kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai salah satu bentuk disinsentif dalam proses pemanfaatan ruang. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian instrumen tersebut di atas dalam konteks sebagai alternatif pembiayaan pembangunan adalah pengintegrasian program dan pengadministrasian ke dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

c. Penelitian dan Pengembangan

Kelitbangan meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan. Keluaran kelitbangan sebagai berikut.

- 1) Penelitian dan pengkajian baik yang strategis, aktual dan kompetitif yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi.
- 2) Pengembangan berupa Naskah Akademik, Rancangan Regulasi, pemodelan kebijakan/program.
- 3) Perekayasa berupa Pedoman umum/teknis pelaksanaan model kebijakan/program.

- 4) Penerapan berupa uji coba model program pada daerah percontohan.
- 5) Pengoperasionalan berupa Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas/ menyeluruh dan pendampingan.
- 6) Evaluasi Kebijakan berupa rekomendasi lanjut dengan perbaikan/dicabut/dihentikan.

Terdapat empat tahap pemanfaatan keluaran kelitbangan/proses inovasi yaitu inisiasi, internalisasi (adopsi, adaptasi, replikasi), institusionalisasi dan keberlanjutan. Sasaran inovasi berupa peningkatan layanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.135
Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penelitian/pengkajian/evaluasi kebijakan yang dibiayai APBD Kabupaten	Buah	-	-	-	1	3
2.	Naskah akademik yang disusun	Buah	-	-	-	8	1
3.	inovasi yang didampingi	Buah	-	-	-	6	6
4	Jumlah Penelitian diluar APBD Kabupaten	Buah	390	411	430	450	461
5	Kerja sama kelitbangan	Buah	-	-	-	1	11
6	Deseminasi/penerapan	Buah	-	-	-	1	0
7	HAKI	Buah	-	-	-	0	2
8	Pameran Inovasi	Buah	-	-	-	2	2
9	Jurnal/publikasi yang diterbitkan	Edisi	-	-	-	2	1
10	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	-	-	-	-	66,7
11	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	-	-	-	-	0

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019

Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan diharapkan dapat mendorong implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Magelang. Implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Magelang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.136
Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	buah	-	-	-	1	3
2	Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD	Buah	-	-	-	1	3

3	Implementasi Rencana Kelitbangan	Buah	-	-	-	1	3
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Hal ini diharapkan dapat mendorong hasil kegiatan kelitbangan dalam memberikan pertimbangan perencanaan pembangunan daerah serta penerapan teknologi dan inovasi daerah.

d. Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Magelang sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 disajikan.

Trend adanya temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi baik itu pada pemeriksaan reguler untuk PD, kasus, desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemeriksaan reguler karena jumlah obyek pemeriksaan yang paling banyak yaitu desa dan PD. Capaian peningkatan Sistem Pengawasan Internal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.137
Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2018

No	Jenis Obrik	Hasil (LHP,LHE, LHR)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pemeriksaan Berkala/Reguler	216	216	216	216	216	216
2	Pemeriksaan Khusus/Kasus	3	6	14	62	4	7
3	Pemeriksaan Penyelenggara Pemerintahan Desa	106	96	110	150	160	172
4	Review Laporan Keuangan PD	1 LHR	1 LHR	1 LHR	2 LHR	2 LHR	8 LHR
6	Implementasi SPIP	NA	NA	1	1	10	12
7	Evaluasi LKJIP	21 LHE	15 LHE	15 LHE	27 LHE	24 LHE	23 LHE

Sumber : Inspektorat Kabupaten Magelang, 2019

Untuk Evaluasi LKjIP pada tahun 2017 dilaksanakan pada 49 PD, yang nilainya meningkat sebanyak 22 PD atau sebesar 56,41% dari total PD. Jika dibandingkan dengan evaluasi tahun sebelumnya terdapat kenaikan jumlah PD yang nilainya meningkat sebesar 46,67%. Hal ini berarti kualitas kinerja pelaporan kinerja PD semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dapat kita lihat bahwa penilaian BPKP terhadap perangkat daerah dapat dilihat posisi nilai maturitas SPIP Kabupaten Magelang tahun 2017 kategori terdefinisi. Sementara itu hasil penilaian Inspektorat Daerah yang dilakukan terhadap semua Perangkat Daerah pada tahun 2017 menunjukkan nilai 3,15. Nilai maturitas ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Efektifitas pengendalian ini belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP. Nilai kapabilitas APIP semakin meningkat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.138
Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2017	2018
1	Level Kapabilitas APIP	level	2	3
2	Nilai Maturitas SPIP		2	3

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Magelang, 2018

- e. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- Aspek peningkatan kapasitas SDM Aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui: Pengadaan CPNS, Pengangkatan CPNS dan PNS, serta Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Penjurangan yang terdiri dari : Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan; Diklat Teknis dan Diklat Fungsional; Pengembangan Karir yaitu Promosi dan Uji Kompetensi; Kesejahteraan Pegawai yaitu Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala. Penggajian dan Pensiun.

Tabel 2.139
Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018

No	Golongan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017*	2018
1	I	236	211	213	185	170	145
2	II	1.904	1.544	1.697	1.487	1.380	1.226
3	III	4.360	4.534	4.811	4.511	4.469	4.450
4	IV	4.505	4.313	4.051	3.446	3.209	2.798
Jumlah		11.677	11.005	10.605	9.629	9.229	8.619

* Pengambilan data Tahun 2017 diambil per 1 Januari 2019
 Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2013 sampai dengan 2017 dengan rata-rata penurunan tiap tahun sejumlah 612. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sejumlah 976 Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, PNS meninggal dunia, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, pengalihan PNS guru SLB dan SMA/SMK menjadi PNS Provinsi, dan adanya mutasi keluar daerah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.140
Komposisi Pendidikan PNS (orang)
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2018

No	Pendidikan	Tahun											
		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	S2	250	128	297	163	313	199	281	181	291	192	277	196
3	S1 /D	2.368	3.247	2.307	3.344	2.312	3.514	1.970	3.214	1.885	3.176	1.730	3.042
4	D – III	323	638	303	688	302	734	270	713	232	773	222	779
5	D – II	544	888	424	693	344	583	269	483	203	405	175	370
6	D – I	60	193	51	126	42	116	32	104	30	91	23	82
7	SMA	1.119	795	1.065	712	1.077	752	977	695	912	644	795	579
8	SMP	272	28	265	25	317	24	293	21	263	19	235	17
9	SD	150	2	138	2	139	4	122	4	108	4	91	5
Jumlah		6.182	5.086	5.919	4850	5753	4.846	4.214	5.415	3.924	5.304	3.549	5.070
		11.677		11.005		10.603		9.629		9.228		8619	

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2019

Pada tahun 2017 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 54,84%; kemudian lulusan SMA sebesar 16,86%. lulusan D-III sebesar 10,24%; lulusan D-II sebesar 6,59%; lulusan S2 sebesar 5,23%; lulusan SMP sebesar 3,06%; lulusan D-I sebesar 1,31%; serta lulusan SD sebesar 1,21%.

Tabel 2.141
Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural
Kabupaten Magelang Tahun 2013–2018 (Orang)

No	Uraian	Jumlah					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Adum (Diklat Pim IV)	14	41	33	30	27	22
2	Spama (Diklat Pim III)	9	43	14	9	7	6
3	Spamen (Diklat Pim II)	2	3	3	6	-	-

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2019

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pada Tahun 2018, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas makanan sebesar 62,40% pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah; 56,51% pada kelompok pengeluaran 40% tengah; dan 38,19% pada kelompok 20 % atas.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas bukan makanan sebesar 37,67% pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, 43,49% pada kelompok pengeluaran 40% tengah dan 61,81% pada kelompok 20% atas.

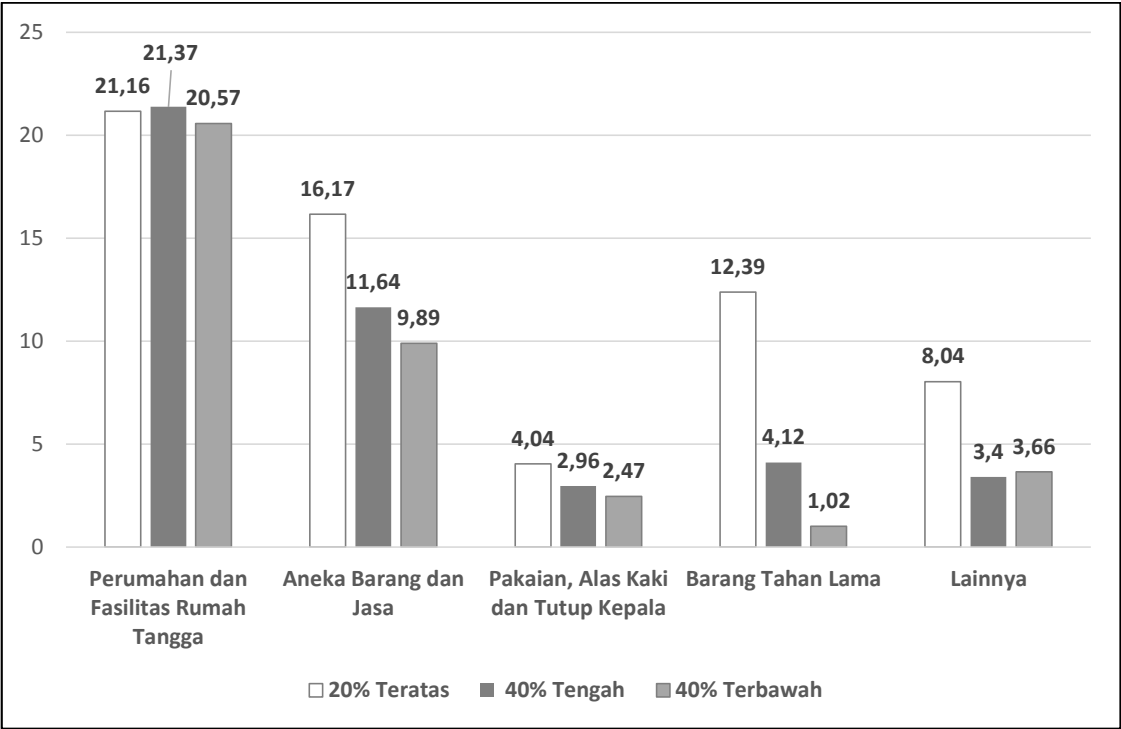
Tabel 2.142
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Magelang Tahun 2018

Jenis Pengeluaran	Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan					
	Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
	40%	40%	20%	40%	40%	20%
	Terbawah	Tengah	Teratas	Terbawah	Tengah	Teratas
Makanan	230.884	408.387	693.563	62,40	56,51	38,19
Bukan Makanan	139.152	314.316	1.122.312	37,60	43,49	61,81

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.39 terlihat bahwa pengeluaran non makanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan pendekatan pengeluaran). Dari gambar terlihat bahwa semua komoditas pengeluaran non makanan mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya pengeluaran penduduk, untuk komoditas perumahan cenderung persentasenya sama untuk semua kelompok pengeluaran, sedangkan untuk komoditas lainnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

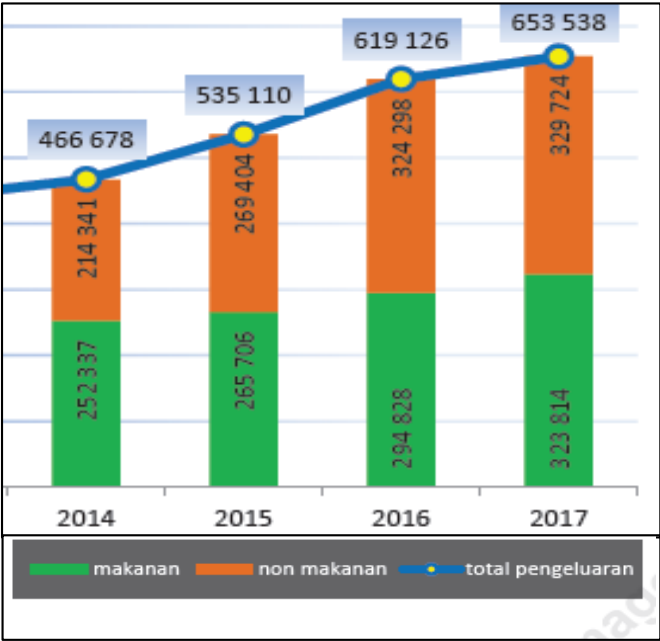
Dari Gambar 2.40 juga terlihat bahwa pengeluaran bukan makanan komoditas barang dan jasa pada tahun 2018 sebesar 9,89% untuk penduduk dengan pengeluaran 40% bawah, meningkat menjadi 11,64 persen pada penduduk dengan pengeluaran 40% tengah dan semakin meningkat menjadi sebesar 16,17% untuk penduduk dengan pengeluaran atas. Komoditas yang mengalami peningkatan yang tinggi adalah komoditas barang tahan lama, di mana untuk penduduk dengan pengeluaran 40% bawah hanya 1,02% sedangkan untuk penduduk dengan 20 % pengeluaran atas sebesar 12,39%.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.41
Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/kapita)

Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar Rp 466.678 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 653.538 dengan proporsi bukan makanan sebesar 50,45%, lebih besar dibandingkan konsumsi makanan (49,55%).



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.42
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

b. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan perbandingan PDRB sektor tertentu dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Produktivitas total daerah digunakan untuk melihat produktivitas tiap sektor dengan melihat produktivitas tenaga kerja di sektor tersebut. Besarnya produktivitas tiap sektor dapat menjadi salah satu indikator daya saing antar daerah. Lapangan usaha utama yang digunakan untuk mengukur produktivitas total daerah terdiri dari lima macam, yaitu (1) pertanian, (2) industri pengolahan, (3) perdagangan, (4) jasa kemasyarakatan, dan (5) lain-lainnya. Masing-masing lapangan usaha utama merupakan gabungan dari beberapa sektor lapangan usaha dalam PDRB. Berikut ini klasifikasi lapangan usaha PDRB ke dalam lapangan usaha utama.

1. Pertanian, terdiri dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Industri pengolahan, terdiri dari sektor industri pengolahan
3. Perdagangan, terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.
4. Jasa kemasyarakatan, terdiri dari jasa yang berhubungan dengan pelayanan sosial meliputi sektor administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.
5. Lainnya, terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air, sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan, dan sektor real estate.

Produktivitas total daerah Kabupaten Magelang masing-masing sektor lapangan usaha utama berkembang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat selama periode tahun 2014 hingga tahun 2018. Perkembangan produktivitas sektor yang paling signifikan adalah sektor industri pengolahan dan perdagangan, yakni tumbuh hingga lebih dari 30% dari besar produktivitas di tahun awal. Lapangan usaha sektor lain-lain memiliki nilai produktivitas paling besar lebih karena banyaknya jenis sektor yang masuk kategori lapangan usaha lain-lain.

Tabel 2.143
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Produktivitas Total Daerah (Juta Rp)	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,38	14,17	24,09	25,12	30,08
Industri Pengolahan	24,47	27,26	64,43	47,64	46,14
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	16,71	18,27	41,28	25,64	32,35
Jasa Kemasyarakatan	23,85	25,80	28,65	42,68	51,85
Lain-lain	314,17	342,04	455,38	87,02	93,34

Sumber: BAPPEDA dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019

c. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Magelang rata-rata selama lima tahun terakhir berkisar 105,42. Hal ini berarti bahwa kondisi petani di Kabupaten Magelang sudah cukup sejahtera karena sudah mencapai lebih dari 100. Pada kondisi ini harga produksi pertanian lebih besar daripada kenaikan harga konsumsi, atau dengan kata lain pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Tabel 2.144
Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2014-2016

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	Indeks yang diterima petani (lt)	%	145,98	157,99	137,21	145,98
2	Indeks yang dibayar petani (lb)	%	137,72	150,38	131,65	137,72
3	NTP	%	105,99	105,11	104,58	105,99

Sumber : Distan dan Pangan Kabupaten Magelang, 2019

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan

Cakupan pembangunan wilayah berkelanjutan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja beberapa urusan dalam satu komposit. Komponennya terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan cakupan pembangunan wilayah. IKLH digunakan untuk mengukur kinerja urusan lingkungan hidup. Cakupan pembangunan wilayah menjadi tolak ukur kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perhubungan.

Nilai IKLH Kabupaten Magelang tahun 2017 sebesar 70,95% dan nilai cakupan pembangunan wilayah 43,06%. Dengan demikian, dapat dihitung cakupan pembangunan wilayah berkelanjutan Kabupaten Magelang tahun 2017 adalah sebesar 57%. Adapun untuk cakupan pembangunan wilayah berkelanjutan tahun 2018 mencapai 60,07% dengan komponen penyusun IKLH sebesar 71,93% dan nilai cakupan pembangunan wilayah sebesar 48,21%.

b. Cakupan Pembangunan Wilayah

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dapat dilihat dari cakupan pembangunan wilayah. Cakupan Pembangunan Wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Di bawah ini, cakupan pembangunan wilayah Kabupaten Magelang tahun 2017-2018.

Tabel 2.145
Cakupan Pembangunan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2018

No.	Indikator	Satuan	2017	2018
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	52,94	57,69
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	33,17	38,72
3.	Cakupan Pembangunan Wilayah	%	43,06	48,21

Sumber: DPUPR, 2019; Dinas Perhubungan, 2019; Data Diolah

- Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka mengembangkan wilayah adalah sebagai berikut.
1. Pembangunan jalan dan jembatan berupa pembangunan jalan yang semula panjang jalan kabupaten meliputi 887 km menjadi 1000 km pada tahun 2016; pembangunan bangunan pelengkap jalan meliputi jembatan, trotoar, drainase, dan tanggul penahan jalan; serta peningkatan jalan sesuai standar jalan kabupaten;
 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 mampu meningkatkan proporsi jalan kabupaten kondisi baik dari 65,32% menjadi 74,17% pada tahun 2018;
 3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dilaksanakan melalui pengembangan jaringan irigasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah meningkatkan prosentase luas irigasi kabupaten kondisi baik dari 51,96% menjadi 59,58%; pembangunan 3 (tiga) embung guna mendukung ketersediaan air irigasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 di Desa Wanurejo, Losari, dan Sambak; dan pembinaan terhadap 103 kelompok petani pengelola air irigasi;
 4. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, meliputi pembangunan 6 terminal bus, pembangunan 11 halte bus, penyediaan 175 titik parkir, pemasangan 2.574 rambu-rambu jalan (pelengkap jalan), pembangunan 11.660 marka jalan, pembuatan 20 zebra cross, pemasangan 2.610 PJU, dan pemasangan guardrail 5.104 m.
- c. Ketaatan terhadap RTRW
- Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Indikator ketaatan terhadap RTRW merupakan hasil perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukannya, namun indikator ini belum didukung oleh ketersediaan data, sehingga digantikan dengan pembahasan mengenai luas wilayah lindung dan budidaya di Kabupaten Magelang.
- Ketaatan terhadap rencana tata ruang secara makro terindikasi dengan masih tetapnya luasan yang dialokasikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030. Adapun kawasan lindung dialokasikan seluas kurang lebih 41.770,57 ha dan kawasan budidaya dialokasikan seluas kurang lebih 66.802, 43 ha.

Tabel 2.146
Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Lindung (Ha)		
		Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	Kaw. Perlindungan Setempat
1	Salaman	-	0,02	2.557,87
2	Borobudur	-	-	4.132,94
3	Ngluwar	-		1.810,98
4	Salam	-		2.336,49
5	Srumbung	-	17,13	3.012,54
6	Dukun	-	-	3.231,89
7	Muntilan	-	-	4.828,23
8	Mungkid	-	-	3.546,00
9	Sawangan	-	-	3.579,05
10	Candimulyo	-	0,04	4.338,49
11	Mertoyudan	35,59	-	4.011,89
12	Tempuran	-	-	3.435,01
13	Kajoran	516,30	-	2.867,77
14	Kaliangkrik	501,15	-	3.609,85
15	Bandongan	-	-	1.024,87
16	Windusari	461,25	-	2.854,02
17	Secang	-	-	4.523,48
18	Tegalrejo	-	-	3.105,16
19	Pakis	-	-	5.180,82
20	Grabag	100,24	-	3.500,57
21	Ngablak	232,49	0,01	1.930,10

Sumber: *Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, Data Diolah.*

Luasan kawasan lindung tersebar di 21 kecamatan, berupa hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat. Kecamatan Pakis mempunyai kawasan lindung terluas dengan luasan 5.180 hektar. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sekitar mata air dan sempadan sungai. Kawasan lindung di wilayah kecamatan yang terlewati sungai-sungai berhulu di Gunung Merapi didominasi sempadan sungai yang dalam Perda 5 Tahun 2011 ditetapkan sejauh 300 meter di kanan kiri sungai. Hutan Lindung terdapat di 6 Kecamatan dan terluas di wilayah Kecamatan Kajoran dengan luas kurang lebih 516,30 hektar. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya berupa kawasan resapan air yang terluas terdapat di Kecamatan Srumbung dengan luas lebih kurang 17,13 Hektar.

Tabel 2.147
Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukk an Industri	Kawasan Peruntukkan Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Permukiman	Kawasan Peruntukk an Pertanian
1	Bandongan	178,38	32,40	197,90	-	659,07	834,16	1.965,25
2	Borobudur	-	-	466,00	-	2.435,19	1.274,41	1.674,93
3	Candimulyo	-	-	3,82	-	2.484,93	802,38	1.168,33
4	Dukun	-	-		-	2.961,78	708,29	3.001,85
5	Grabag	176,69	765,78	74,29	-	3.168,95	1.327,19	3.037,54
6	Kajoran	981,41	550,05	471,64	-	3.017,04	1.108,36	3.241,75
7	Kaliangkrik	618,81	51,59	250,86	-	1.001,69	697,78	2.889,37
8	Mertoyudan	-	-	-	-	690,09	2.434,70	1.567,28
9	Mungkid	-	-	-	-	172,37	2.534,46	3.293,45
10	Muntilan	-	-	-	-	29,73	1.007,87	1.866,71
11	Ngablak	118,75	525,20	73,10	-	1.374,57	505,99	3.437,10
12	Ngluwar	-	-	0,22	-	194,64	622,66	2.660,26
13	Pakis	-	-	4,74	-	4.639,87	618,83	3.304,03
14	Salam	-	-	186,24	-	347,25	1.006,67	3.466,14
15	Salaman	186,58	3,26	496,62	170,26	4.420,84	1.259,36	2.708,62
16	Sawangan	-	-	396,77	-	2.706,82	698,46	3.958,24
17	Secang	-	-	28,36	-	1.239,42	1.450,16	3.546,14
18	Srumbung	-	-	-	-	3.331,54	819,81	3.477,53
19	Tegalrejo	-	-	3,68	-	971,14	985,79	1.782,13
20	Tempuran	661,49		244,29	167,60	1.547,02	1.033,71	1.914,18
21	Windusari	333,98	256,42	249,43	-	1.287,31	769,94	2.194,53

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030, Data Diolah.

Kawasan budidaya di Kabupaten Magelang terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 3.083 hektar, hutan rakyat seluas kurang lebih 2.919 hektar, kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 79.416 hektar, kawasan peruntukkan industri seluas kurang lebih 337,09 hektar, kawasan perkebunan seluas kurang lebih 25.667 hektar, kawasan peruntukkan permukiman seluas kurang lebih 19.751 hektar, serta kawasan peruntukkan pertanian seluas kurang lebih 40.587 hektar.

Kecamatan dengan luas kawasan budidaya terluas terdapat di Kecamatan Kajoran dengan luasan kurang lebih 9.370 hektar dengan dominasi kawasan peruntukkan perkebunan dan pertanian. Apabila dikaitkan dengan fungsinya, kecamatan yang sudah bertransfomasi menjadi kota dengan dominasi wilayah berupa kawasan peruntukkan permukiman, yaitu Kecamatan Mertoyudan dan Mungkid. Luas kawasan permukiman di Kecamatan Mertoyudan kurang lebih 51% dan Kecamatan Mungkid 42% dari luas wilayah budidaya yang ada di Kecamatan tersebut.

Kawasan peruntukkan perkebunan, kawasan peruntukkan permukiman dan kawasan peruntukkan pertanian tersebar di 21 kecamatan. Kawasan

peruntukkan industri hanya terdapat di Kecamatan Tempuran seluas kurang lebih 167,60 hektar dan Kecamatan Salaman seluas kurang lebih 170,26 hektar. Hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan rakyat terdapat di 16 kecamatan dengan luas hutan produksi terluas di Kecamatan Kajoran, hutan rakyat terluas terdapat di Kecamatan Salaman, dan hutan produksi terbatas terluas terdapat di Kecamatan Grabag.

d. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan Lampiran Permendagri 86/2017, indikator luas wilayah produktif merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah produktif di Kabupaten Magelang diartikan sebagai luas wilayah pertanian produktif.

Tabel 2.148
Luas Wilayah Pertanian Produktif di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah luas wilayah kawasan pertanian produktif	Ha	79.416	79.416	79.416	79.416	79.416
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Ha	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52
3.	Persentase luas wilayah pertanian produktif	%	85,902	85,902	85,902	85,902	85,902

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018, jumlah luas wilayah kawasan pertanian produktif dan jumlah luas seluruh wilayah budidaya di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan yang sama. Oleh karena itu, dalam kurun waktu yang sama persentase luas wilayah pertanian produktif juga menunjukkan nilai yang konstan, yakni sebesar 85,902%. Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Magelang meliputi kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 36.848 (tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun kawasan pertanian lahan kering memiliki luas kurang lebih 42.568 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar yang juga tersebar di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Magelang. Lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang direncanakan seluas kurang lebih 42.070 (empat puluh dua ribu tujuh puluh) hektar.

Tabel 2.149
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Peruntukan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Lahan Pertanian						
1. Lahan sawah	Ha	36.892	36.882	36.855	36.855	36.861
2. Lahan bukan sawah	Ha	49.518	49.523	49.550	49.550	49.494
Lahan Bukan Pertanian	Ha	22.163	22.168	22.168	22.168	22.398
Jumlah		108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Pada tahun 2018, luas wilayah Kabupaten Magelang didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah, yakni sebesar 45,494% dari keseluruhan wilayah kabupaten. Lahan pertanian bukan sawah menunjukkan luasan yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,544 % per tahun. Luas lahan sawah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan penurunan dari 36.892 hektar menjadi 36.855. Adapun untuk tahun 2018 meningkat menjadi 36.861 hektar. Lahan bukan pertanian di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2018 semakin meningkat.

- e. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri didapatkan dari perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan luas seluruh wilayah budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018, luas wilayah peruntukan industri di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan yang sama, yakni sebesar 337,091 hektar.

Tabel 2.150
Luas Wilayah Peruntukan Industri di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah luas wilayah peruntukan industri	Ha	337,091	337,091	337,091	337,091	337,091
2.	Jumlah luas seluruh wilayah budidaya	Ha	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52
3.	Persentase luas wilayah peruntukan industri dengan wilayah budidaya	%	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Luas wilayah peruntukan industri sangat berkaitan dengan luas wilayah budidaya. Luasan 337,091 hektar tersebut (yang merupakan kawasan peruntukan industri besar) menimbulkan adanya kebutuhan ruang-ruang untuk mendukung kegiatan dalam kawasan peruntukan industri, misalnya kebutuhan perumahan serta kebutuhan perdagangan dan jasa.

f. Luas Wilayah Perkotaan

Indikator luas wilayah perkotaan merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah perkotaan dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah perkotaan di Kabupaten Magelang dituliskan sebagai luas wilayah permukiman perkotaan. Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2018, luas wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan yang sama yakni sebesar 8.875,48 hektar.

Tabel 2.151
Luas Wilayah Permukiman Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah luas wilayah permukiman perkotaan	Ha	8.875,48	8.875,48	8.875,48	8.875,48	8.875,48
2.	Jumlah luas seluruh wilayah kawasan budidaya	Ha	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52	92.449,52
3.	Persentase luas wilayah permukiman perkotaan	%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030, kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:

- a. perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b. perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK); dan
- c. ibukota-ibukota kecamatan, meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan dan Candimulyo.

g. Luas Wilayah Rawan Bencana

Indikator luas wilayah rawan bencana merupakan salah satu indikator yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan data di Kabupaten Magelang. Indikator ini dapat dikatakan menggantikan indikator luas wilayah banjir dan indikator luas wilayah kekeringan dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010. Indikator luas wilayah rawan bencana terdiri atas wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin

gunung api, serta wilayah rawan bencana gerakan tanah tinggi di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.152
Wilayah Rawan Bencana Erupsi dan Banjir Lahar Dingin Gunung Api
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah luas wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api	Kecamatan	10	10	10	10	10
2.	Jumlah kecamatan di Kabupaten Magelang	Kecamatan	21	21	21	21	21
3.	Persentase wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api	%	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api di Kabupaten Magelang, meliputi (1) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi terletak di Kecamatan Srumbung, Dukun, Muntilan, Salam, Sawangan, Ngluwar dan Mungkid dan (2) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan Windusari. Secara umum, 47,62% wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api. Kawasan-kawasan yang sering mengalami bencana alam, seperti erupsi dan banjir lahar dingin gunung api dapat ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana I, Kawasan Rawan Bencana II dan Kawasan Rawan Bencana III.

Tabel 2.153
Wilayah Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Gerakan tanah (tinggi)	Kecamatan	12	12	12	12	12
2.	Jumlah kecamatan di Kabupaten Magelang	Kecamatan	21	21	21	21	21
3.	Persentase wilayah rawan bencana gerakan tanah tinggi	%	57,14	57,14	57,14	57,14	57,14

Sumber: Bappeda Dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019; Data Diolah

Sebanyak 57,14% wilayah Kabupaten Magelang merupakan kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi

terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Bandongan dan Secang. Selain gerakan tanah tinggi, Kabupaten Magelang memiliki wilayah rawan gerakan tanah menengah yang terletak di Kecamatan Kajoran, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, Srumbung, Bandongan, Tegalrejo, Candimulyo dan Secang; rawan gerakan tanah rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Ngablak, Sawangan, Dukun, Srumbung, Mungkid, Muntilan, Salam dan Ngluwar; dan rawan gerakan tanah sangat rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan dan Secang.

h. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan, dan bank pengkreditan rakyat. Berikut ini jumlah bank dan perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.154
Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	KC Bank Umum	Unit	7	7	7	7	7
2.	KCP Bank Umum	Unit	49	50	48	48	48
3.	KK Bank Umum	Unit	41	43	43	43	43
4.	KP BPR	Unit	12	12	12	12	12
5.	KC BPR	Unit	17	19	21	21	21
6.	KK BPR	Unit	35	38	39	39	39
	Jumlah	Unit	161	169	170	170	170

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2019

Perkembangan jumlah bank di Kabupaten Magelang cenderung tetap, serta mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat sedikit. Jumlah bank yang beroperasi di suatu wilayah menunjukkan adanya pergerakan ekonomi dan perputaran uang yang telah berjalan di wilayah tersebut karena bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan, tetapi juga menyalurkan bantuan modal terutama bagi pemilik usaha.

i. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang

menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Magelang ada dua jenis, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa berasal dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan BNI Life Insurance, PT. Sedangkan perusahaan asuransi umum adalah PT Asuransi Sinar Mas.

Tabel 2.155
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Asuransi Jiwa	Unit	n/a	1	2	2	2
2.	Asuransi Umum	Unit	n/a	1	1	1	1
3.	Asuransi Kerugian	Unit	n/a	0	0	0	0
4.	Asuransi Lainnya	Unit	n/a	0	0	0	0
	Jumlah	Unit	n/a	2	3	3	3

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2018

j. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan daya tarik investasi suatu daerah terutama di bidang kuliner. Restoran juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi di bidang perdagangan yang juga dapat mendukung sektor pariwisata. Oleh karena itu, banyaknya restoran dan rumah makan dapat menjadi salah satu indikator perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Ada bermacam-macam jenis dan istilah restoran, antara lain restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sementara itu, pengusaha restoran dan rumah makan adalah penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu usaha pokok, seperti restoran di dalam hotel. Tabel di bawah ini menjelaskan jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.156
Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenis Restoran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Usaha restoran golongan tertinggi	Unit	3	3	3	3	3
2	Usaha restoran golongan menengah	Unit	0	0	0	0	0
3	Usaha restoran golongan terendah	Unit	0	0	0	0	0
4	Usaha rumah makan kelas A	Unit	6	6	6	6	6
5	Usaha rumah makan kelas B	Unit	33	28	28	28	28
6	Usaha rumah makan	Unit	3	2	2	2	2

No	Jenis Restoran	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	kelas C						
7	Usaha rumah makan kelas D	Unit	35	25	25	25	25

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2019

Jumlah usaha restoran rumah makan kelas B sejumlah 33 unit pada tahun 2014 dan mengalami penurunan menjadi 28 unit dari tahun 2015 s.d 2018, sedangkan rumah makan kelas D sejumlah 35 unit pada tahun 2014 dan mengalami penurunan cukup drastis menjadi 25 unit pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Secara umum jumlah semua kelas rumah makan juga menurun dari tahun awal. Sementara itu, jumlah restoran semua kelas cenderung tetap selama lima tahun terakhir. Hal tersebut terjadi dikarenakan belum dilakukannya *updating* data.

k. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel merupakan salah satu fasilitas penunjang pariwisata pada suatu wilayah. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut dan kebutuhan akomodasi penginapan/hotel.

Tabel 2.157
Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Hotel Bintang	Unit					
	Hotel Bintang 5	Unit	1	1	1	1	1
	Hotel Bintang 4	Unit	1	1	1	1	1
	Hotel Bintang 3	Unit	3	3	3	3	3
	Hotel Bintang 2	Unit	-	-	-	-	-
	Hotel Bintang 1	Unit	-	-	-	-	-
2	Hotel Non Bintang/Melati	Unit	32	32	32	32	32
3	Homestay	Unit	153	243	243	243	243
Jumlah		Unit	185	189	190	280	280

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2019

Kabupaten Magelang yang memiliki daya tarik pariwisata yang cukup besar, mampu menarik investasi berupa penyediaan akomodasi hotel. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah hotel di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 hingga 2018 belum mengalami peningkatan terutama hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5. Jumlah terbanyak adalah hotel jenis *homestay* yang hingga tahun 2018 mencapai 243 unit. Sedangkan

jumlah hotel nonbintang/melati hanya mengalami peningkatan 1 unit selama lima tahun terakhir. Perkembangan jumlah *homestay* dapat menjadi salah satu indikasi adanya peningkatan permintaan penyedia akomodasi tersebut dari wisatawan dan menjadi peluang untuk mengembangkan perekonomian lokal.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Pertumbuhan Investasi

Realisasi investasi PMDN dan PMA pada periode tahun 2014-2018 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar Rp 374.769 juta pada tahun 2014 dan pada tahun 2018 meningkat tajam menjadi Rp 1.907.516 juta. Peningkatan jumlah proyek dan realisasi investasi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang memiliki prospek dan daya tarik bagi para investor seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, penetapan upah tenaga kerja yang kompetitif, peningkatan pelayanan melalui penyelenggaraan PTSP, dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan pro investasi. Arah kebijakan investasi adalah untuk meningkatkan investasi pada jenis usaha padat modal untuk memanfaatkan bonus demografi. Pertumbuhan investasi (PMA dan PMDN) Kabupaten Magelang Tahun 2014 -2017 sebagai berikut.

Tabel 2.158
 Pertumbuhan investasi Kabupaten Magelang
 Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Total Nilai Investasi	Juta Rp	374.769	476.281	490.490	1.030.689	1.907.516
2	Pertumbuhan Investasi	%	27.09	2.98	110.13	91.75	21,71

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2019

b. Angka Kriminalitas

Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan kondisi ini dengan baik, agar dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi. Angka kriminalitas ini merupakan nilai yang menunjukkan perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Magelang pada 5 tahun terakhir.

Tabel 2.159
 Angka Kriminalitas tertangani
 di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Selesai	Kasus	181	332	186	248	259
3	Lapor	laporan	252	434	252	339	392
4.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1,262,500	1,267,090	1,278,624	1,283,405	1,290,115
5.	Rasio	%	71.81	76.49	73.30	73.16	66.10

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
6.	Angka Kriminalitas		2.04	3.48	2.02	2.65	2.60

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah tindak kriminal di Kabupaten Magelang memiliki angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan yang terjadi secara drastis terjadi pada tahun 2014-2015. Angka kriminalitas yang terjadi meningkat sebanyak >100%. Pada tahun 2018, terjadi 2,60 tindak kriminal pada setiap 10.000 penduduk setiap tahunnya. Kriminalitas yang semakin tinggi menjadi indikator belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan preventif dalam menanggulangi angka kriminalitas yang semakin tinggi. Selain itu, kegiatan kriminalitas erat kaitannya dengan kurang terserapnya tenaga kerja di dalam lapangan kerja. Tenaga kerja yang ada belum memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja, sehingga mengakibatkan penduduk yang belum memiliki pekerjaan untuk berusaha mencari penghasilan dengan cara instan. Pemerintah diharuskan untuk berperan aktif dalam mengurangi angka kriminalitas, salah satunya dengan peningkatan kualitas penduduknya.

c. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan sebuah instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Indikator lama proses perizinan dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan dalam satuan hari. Kabupaten Magelang memiliki kurang lebih 40 jenis perizinan, namun hanya beberapa perizinan saja yang memiliki banyak permintaan.

Tabel 2.160
 Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendaftaran penanaman Modal		1	1	1	1	1
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3	3
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Hari	5	5	5	5	5
5	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Hari	3	3	3	3	3
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Hari	3	3	3	3	3
7	Izin Usaha Industri (IUI)		14	14	14	14	14
8	Izin Perluasan Industri	Hari	7	7	7	7	7
9	Tanda Daftar Industri (TDI)	Hari	14	14	14	14	14

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
10	Izin Usaha Pariwisata	Hari	3	3	3	3	3
11	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Hari	15	15	15	15	15
12	Izin Usaha Penggilingan Padi	Hari	4	4	4	4	4
13	Izin Usaha Angkutan Jalan	Hari	14	14	14	14	14
14	Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet	Hari	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Izin Usaha Peternakan	Hari	14	14	4	14	14
16	Izin Usaha Perikanan	Hari	14	14			
17	Izin Usaha Pertambangan	Hari					
18	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Hari					
19	Izin Perluasan	Hari	7	7	7	7	
20	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	Hari	7	7	7	7	
21	Izin Usaha Perubahan	Hari	5	5	5	5	
22	Izin Lokasi	Hari	18	18	18	18	
23	Izin Pemanfaatan Tanah	Hari	18	18	18	18	
24	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	Hari	18	18	18	18	
25	Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO)	Hari	14	14	14	14	
26	Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan (IMB)	Hari	14	14	14	14	
28	Izin Pemasangan Reklame	Hari	2	2			
29	Izin Trayek	Hari				1086	976
30	Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL	Hari					
	UKL-UPL	Hari	14	14			
	SPL	Hari	1	1			
31	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan	Hari					
32	Izin Riset/ Penelitian	Hari	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2019

Waktu penyelesaian perizinan terlama adalah 18 hari, yaitu perizinan untuk jenis izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, dan perubahan penggunaan tanah. Selain itu, izin usaha industri, tanda daftar industri dan izin mendirikan bangunan memakan waktu paling lama, yaitu 14 (empat belas) hari kerja. Target yang diharapkan dari lamanya proses perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah paling lama 9 hari. Beberapa jenis perizinan sudah dapat diusahakan kurang dari 9 hari kerja, namun beberapa lainnya masih lebih dari 9 hari. Perbedaan lamanya proses perizinan dapat disebabkan banyak sedikitnya jumlah berkas atau persyaratan yang perlu dinilai kelayakannya.

- d. Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis Pajak Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Sedangkan jenis retribusi yang ada di Kabupaten Magelang, antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang meliputi jasa pelayanan umum, jasa komersil yang biasanya disediakan oleh pihak swasta, dan perizinan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Dari sumber pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut realisasi Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018.

Tabel 2.161
Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Daerah	Rupiah	79.395.385.267	88.960.021.815	97.101.522.117	112.344.030.430	114.115.398.812
Retribusi Daerah	Rupiah	34.075.776.969	15.9939.015.341	15.587.692.390	20.445.297.133	21.190.318.088

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2019

- e. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *good will* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. peraturan daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Tabel 2.162
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Buah	9	10	11	11	11

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2019

Jenis Peraturan Daerah terkait perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain:

1. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang;
3. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan;
5. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PST Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang;
8. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan;

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Pemberdayaan masyarakat dan desa ini merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan. Hal tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kemandirian desa ini diukur berdasarkan status desa.

Pada tahun 2015 jumlah desa yang berstatus maju, mandiri dan berkembang di Kabupaten Magelang sebanyak 251 desa dari 367 Desa (68%) dan pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 292 Desa (80%). Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak desa dengan status tertinggal yang berarti bahwa kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Magelang perlu ditingkatkan. Status desa ini untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Dari data tersebut diketahui jumlah desa maju mandiri dan berkembang semakin meningkat.

Kapasitas masyarakat di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.163
Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah PKK Aktif	394	394	394	394	394
2.	Jumlah LPMD Aktif	367	367	367	367	367
3.	Jumlah PKK	394	394	394	394	394
4.	Jumlah LPMD	367	367	367	367	367

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magelang, 2019

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Masyarakat merupakan obyek dan subyek pembangunan. Dalam pembahasan indikator rasio lulusan S1/S2/S3, masyarakat ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Semakin tinggi rasio lulusan perguruan tinggi menunjukkan daerah tersebut mempunyai potensi sumberdaya manusia yang berkualitas untuk menggerakkan roda pembangunan. Ketersediaan kualitas SDM yang tinggi membuat daerah mempunyai daya saing di sektor SDM. Rasio lulusan S1/S2/S3 ini dihitung dengan rumus formula jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan 10.000.

Tabel 2.164
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3	Jiwa	29.691	30.410	32.299	33.979	36,293
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.262.500	1.267.090	1.272.624	1.283.405	1,290,115
3	Rasio Lulusan S1, S2, dan S3		235,18	240,00	253,80	264,76	281.32

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
4	Persentase Lulusan S1, S2, dan S3 terhadap jumlah penduduk	%	2,35	2,40	2,54	2,65	2.81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase jumlah lulusan S1/S2/S3 selalu meningkat setiap tahunnya. Sebanyak 33.979 jiwa penduduk pada tahun 2017 sudah menamatkan perguruan tinggi atau 2,65% dari total jumlah penduduk. Persentase jumlah lulusan perguruan tinggi yang selalu meningkat memang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah lulusan. Pada tahun 2014, jumlah lulusan S1/S2/S3 sempat mengalami penurunan sebelum akhirnya kembali meningkat hingga tahun 2017.

Ketersediaan SDM yang berkualitas mutlak diperlukan oleh Kabupaten Magelang untuk mengolah potensi sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah daerah harus mempunyai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti salah satunya dengan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi ataupun bentuk subsidi lainnya sehingga memudahkan anak sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk diharapkan mampu menjadi gerbang perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten magelang, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita.

b. Rasio Ketergantungan

Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2018 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan komposisi 895.609 penduduk usia produktif (69.44%) dan 394.068 jiwa penduduk usia nonproduktif (30.56%). Dengan demikian, angka rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 44,00 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang telah mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan yang di antaranya untuk menciptakan kesempatan kerja dan atau menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Magelang sebesar 2,91 dan lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa tengah sebesar 4,51.

Tabel 2.165
Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	Jiwa	376.001	409.703	391.874	384.921	394.068
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	886.499	835.779	886.750	898.484	895.609
3	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang	%	42,41	49,02	44,19	42,84	44,00
4	Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah	%	48,74	48,10	48,81	47,51	47,63
5	Rasio Ketergantungan Nasional	%	48,9	48,60	48,30	48,10	47,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, 2019

2.1.4.5. Fokus Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu indikator tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

a. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 60,23 atau baik.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Salah satu syarat *good governance* adalah akuntabilitas, di samping transparansi dan partisipasi. Dalam 8 (delapan) area perubahan birokrasi, yaitu mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu bagian pencapaian reformasi birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 51,06 sedangkan di tahun 2018 berada di angka 59,05 atau nilai CC.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indek Kepuasan Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan semakin meningkat. Pada Tahun 2014, IKM Kabupaten sebesar 75,93 atau cukup dan tahun 2018 sebesar 82,01 atau baik. Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Magelang semakin baik.

d. Indeks Merit Sistem

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Menejemen ASN, merit sistem didefinisikan sistem adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, gaji/tunjangan, dan pelanggaran disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29.

e. Cakupan Penegakan hukum

Cakupan penegakan hukum merupakan penilaian yang mendasarkan pada jumlah penindakan, jumlah pelanggaran, jumlah penertiban, jumlah target perencanaan penertiban, dan jumlah aduan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.166
Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda	Kasus	171	190	174	251	81
2	Jumlah Pelanggaran perda	Kasus	172	193	175	312	85
3	Jumlah Penertiban	kali	200	3.141	216	312	288
4	Jumlah Target perencanaan Penertiban	kali	200	3.141	216	312	288
5	Jumlah aduan	kali	0	0	0	0	0
6	Cakupan penegakan hukum	%	99,71	99,23	99,72	90,23	97,65

Sumber : Kantor Kebangpol Kabupaten Magelang, 2019

Dari data di atas, dapat dilihat cakupan penegakan hukum di Kabupaten Magelang tahun 2014-2018 menunjukkan fluktuasi. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 90,23% dan naik kembali menjadi 97,65% pada tahun 2018.

Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat terdiri dari jumlah organisasi yang aktif dan yang tercatat, serta jumlah konflik sosial, sebagaimana yang disajikan tabel di bawah ini.

Tabel 2.167
Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif	unit	79	83	93	95	97
2	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang tercatat	unit	82	87	97	99	101
3	Jumlah Konflik Sosial Tertangani	unit	0	0	0	1	0
4	Jumlah Konflik Sosial	unit	0	0	0	1	0
5	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	80.50	85.00	95.00	97.00	99.00

Sumber : Kantor Kebangpol Kabupaten Magelang, 2019

Dari data di atas dapat dilihat cakupan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat selama tahun 2014-2018 menunjukkan peningkatan. Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif dan tercatat menunjukkan tren yang

meningkat. Disamping itu data di atas juga menggambarkan kejadian konflik sosial relatif kecil bahkan tidak ada.

- f. Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban
- Kondusivitas wilayah dapat dilihat dari frekuensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain demonstrasi atau unjuk rasa dan tindak pidana. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Kegiatan demonstrasi terkadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Kegiatan perusakan terhadap benda-benda itulah yang terkadang menimbulkan gangguan kecil atau besar bagi rutinitas masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, meskipun sebenarnya demonstrasi merupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakat untuk berpolitik.

Tabel 2.168
Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan Penegakan Hukum	%	99,71	99,23	99,72	90,23	90,55
2.	Cakupan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	%	20,00	20,00	47,00	66,67	74,10
3.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	80.50	85.00	95.00	97.00	99.00
4.	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%	66.74	68.08	80.57	84.63	87.88

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2019











2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019




2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 10 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai , 4 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.169

Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Sta-tus*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisai	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Usia Harapan Hidup	70,56	Tahun	70,50	73,39	73,25	73,39	104.01	
2	Indeks Gini**	0,295	Indeks	0,295	0,316	0,31	0,316	92.88	
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4046	Indeks	0,4046	0,4057	0,42	0,4057	99.73	
4	Persentase penduduk miskin**	8,00	Persen	9,00	11,23	12,42	11,23	59.63	
5	IPM	75,94	Indeks	75,94	74,17	74,74	74,17	97.67	
6	Pertumbuhan PDRB	6,4 – 7,1	Persen	6,20 – 6,70	5,06	5,43	5,06	79.06	
7	PDRB per kapita	15,06	Juta Rp,	13,75	25,92	22,35	25,92	172.18	
8	Laju inflasi	4±1	Persen	4±1	2,66	3,47	2,66	111.33	
9	Rasio penduduk yang bekerja	97,97	-	73,66	96,79	96,79	96,79	98.80	
10	Angka kriminalitas per sepuluh ribu penduduk	1,45	Indek	1,82	0,26	2,65	0,26	182.07	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Indikator berstatus Perlu Kerja Keras, yaitu pertumbuhan PDRB dan prosentase penduduk miskin. Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- Data base kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
- Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal
- Kenaikan biaya hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya kaum petani.

2.2.2 Aspek Daya Saing

Kinerja pembangunan aspek daya saing ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja. Pada tahun 2018 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 9 indikator kinerja program pada aspek daya saing, 7 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.170
Capaian Kinerja Aspek Daya Saing

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisai	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	38.38	Rp. (juta)	35,30	44,72	51,74	44,72	116.52	
2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	37.03	Persen	36,56	47,03	55,80	47,03	127.01	
3	Nilai tukar petani	106.99	-	106,85	103,31	106.70	103,31	96.56	
4	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.0017	-	0,0019	0,0029	0.0029	0,0029	170.59	
5	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	76,80	persen	76,60	84,61	83,09	86,79	113.01	
6	Luas Wilayah Industri	0.37	Persen	0,37	0,37	0,34	0,37	100.00	
7	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	Hari	9	9	9	9	100.00	
8	Opini BPK 'WTP'	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	
9	Nilai AKIP	B	-	B	CC	CC	CC	99.42	

Status* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Kerja Keras

Pada tahun 2018, dari 9 indikator kinerja program pada aspek daya saing, 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus belum tercapai, dan 4 indikator melampaui target, serta 1 indikator berstatus belum tersedia data. Data yang belum tersedia adalah NTP (nilai tukar petani), dimana penghitungan NTP dilakukan oleh BPS. Kendalanya adalah, tidak setiap tahun BPS Kab. Magelang melakukan penghitungan NTP.

2.2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar




2.2.3.1.1 Pendidikan

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 23 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 23 indikator tersebut sebanyak 8 indikator berstatus tercapai, 6

indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu kerja keras. Sementara 5 indikator lainnya belum tersedia data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.171
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	APK PAUD	54,54	persen	54,54	62,64	62,64	62,64	114.85	
2	Angka melek huruf	93,95	persen	93,85	NA	94,63	NA	NA	
3	Angka rata-rata lama sekolah	10,00	tahun	9	7,57	7,40	7,57	75,70	
4	Angka Parti-sipasiMurni (APM) SD/ MI/Paket A	97,09	persen	96,79	92,66	92,66	92,66	95.44	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,65	persen	81,96	67,76	67,76	67,76	81.98	
6	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	66,56	persen	64,06	NA	46,88	NA	NA	
7	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	101,84	persen	101,94	105,87	105,77	105,87	103.96	
8	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	97,56	persen	97,06	88,38	88,36	88,38	90.59	
9	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	80,00	persen	75,10	NA	64,23	NA	NA	
10	Angka Putus Sekolah SD/MI **	0,14	persen	0,14	0,65	0,05	0,65	164.29	
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs **	0,57	persen	0,59	0,24	0,24	0,24	157.89	
12	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA **	0,81	persen	0,81	NA	0,13	NA	NA	
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen	99,98	100	99,99	100	100.02	
14	Angka Kel-ulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen	99,99	99,91	99,77	99,91	99.92	
15	Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/MA	99,98	persen	99,98	NA	99,90	NA	NA	
16	Rerata Nilai UN SD/MI	7,75	persen	7,72	7,03	7,59	7,03	90.71	
17	Rerata Nilai UN SMP/ MTs	6,49	persen	6,48	5,98	5,78	5,98	92.14	
18	Rerata Nilai UN SMA/ MA/SMK	7,18	persen	7,16	NA	5,77	NA	NA	
19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,00	persen	86,00	87,42	87,42	87,42	99.34	
20	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen	89,62	90,72	91,78	90,72	101.23	
21	Angka melanjutkan kan (AM) SMP/MTs ke SMU/ MK/MA	71,55	persen	70,70	79,18	79,18	79,18	110.66	
22	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB /MI	86,74	persen	84,68	73,20	85,58	73,20	84.39	
23	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	91,43	persen	90,00	78,28	90,70	78,28	85.62	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pendidikan adalah:

- a. Keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung urusan pendidikan
- b. Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
- c. Adanya regulasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga DAK dan Silpa DAK dapat dimanfaatkan dan dialokasikan dengan baik
- d. Kerjasama dan peran aktif berbagai stakeholder pendidikan dalam menangani pendidikan di Kabupaten Magelang
- e. Semangat dan etos kerja yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja program, khususnya tidak tercapainya target APM dan APK adalah :

- a. Anak yang berusia diluar usia sekolah jenjang tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu
- b. Belum meratanya kualitas pendidikan di kecamatan-kecamatan
- c. Pembiayaan melalui BOSDA relatif masih rendah
- d. Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
- e. Anak usia sekolah Kabupaten Magelang yang bersekolah di luar Kabupaten Magelang cukup banyak.
- f. Regulasi yang membatasi penghitungan APK dengan sekat kewilayahan

Faktor penghambat belum tercapainya indikator program terkait nilai UN adalah

- a. Belum optimalnya proses belajar mengajar di Sekolah
- b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan
- d. Partisipasi orangtua dan masyarakat kurang optimal

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan mempertahankan faktor pendorong adalah :

- a. Peningkatan mutu pendidikan di semua komponen (8 standar nasional pendidikan)
- b. Penyediaan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Peningkatan partisipasi stake holders lain dan masyarakat untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Magelang

2.2.3.1.2 Kesehatan

Kinerja pembangunan urusan kesehatan ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 10 indikator tersebut sebanyak 8 indikator berstatus tercapai, 0 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.172
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	11	kasus	11	6	8	6	145.45	●
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,50	kasus	6,50	5,72	6,63	5,72	112.00	●
3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,15	Persen	0,15	0,02	0,02	0,02	186.67	●
4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	8,00	Permil	8,00	6,70	7,5	6,70	116.25	●
5	Cakupan Penemuan Dan Penangan-an Penderita Penyakit DBD	100	Persen	100	100	100	100	100.00	●
6	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immuni-zation (UCI)	100	Persen	100	100	100	100	100.00	●
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	Persen	100	100	100	100	100.00	●
8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	Persen	90	41,00	90	41,00	45.56	▼
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	Persen	100	88,30	100	88,30	88.30	▼
10	Cakupan Kunjungan Bayi	95,00	Persen	95,00	98,89	95,56	98,89	104.09	●

Status* : ● : Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Dalam hal menekan angka kematian ibu melahirkan, Kabupaten Magelang sudah berhasil mencapai target SDGs. Hal ini ditunjukkan dengan AKI Kabupaten Magelang sebesar 11, jauh dibawah target SDGs yaitu sebesar 70. Beberapa indikator lain juga menunjukan tren yang semakin baik, antara lain: angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk, Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup dan cakupan kunjungan bayi.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan kesehatan adalah:

- Komitmen dari pemerintah kabupaten untuk memajukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Magelang
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- Ketersediaan anggaran yang cukup, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun anggaran DAK.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan kesehatan adalah:




- a. Belum optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan lain dalam pembangunan sector kesehatan, khususnya masyarakat sendiri.
- b. Pemerataan sarana dan prasarana kesehatan belum optimal.
- c. Masih kurangnya SDM sector kesehatan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, khususnya yang berada di daerah pelosok.
- e. Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan.




2.2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Kinerja urusan pekerjaan umum ditunjukkan dalam 3 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.173
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,73	persen	69,49	74,17	73,63	74,17	106.37	
2	Luas Jaringan Irigasi	30,57	persen	30,57	43,68	41,31	43,68	142.89	
3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	67,40	Persen	64,60	65,93	64,55	65,93	97.82	








Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pekerjaan umum adalah urusan pekerjaan umum merupakan salah satu program prioritas Bupati periode tahun 2014-2019, sehingga banyak dana, tenaga dan upaya diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja. Selain itu, SKPD teknis yang menangani urusan pekerjaan umum melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, peralatan dan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga hasil kinerja melampaui target.

2.2.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kinerja urusan penataan ruang ditunjukkan dalam 7 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 7 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.174
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen	>30	39,27	31	39,27	103.33	
2	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	4.00	persen	3,85	3,6	3,6	3,6	90.00	
3	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	Persen	0	0	0	0	100.00	
4	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	Ha	25.886	25. 886	25. 886	25. 886	100.00	
5	Luas Kawasan Budidaya (ha)	82.687	Ha	82.687	82.687	82.687	82.687	100.00	
6	Jumlah IMB Yang Dikeluarkan	676	-	645	346	577	346	51.18	
7	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38	Persen	38	35	35	35	84.21	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan penataan ruang adalah konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan regulasi penataan ruang.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan penataan ruang sebagai berikut:




1. Belum optimalnya sosialisasi fungsi IMB kepada masyarakat.
2. Belum selesainya revisi perda 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.

2.2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kinerja urusan perumahan ditunjukkan dalam 3 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 0 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.175
Capaian Kinerja Urusan Perumahan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d . 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	84,20	Persen	83,00	85,64	81,42	85,64	98.34	
2	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,45	Persen	2,50	2,22	2,24	2,22	197.96	
3	Rumah Layak Huni (%)	85,00	Persen	80,00	57,8	56,7	57,8	94.12	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor yang mendukung indikator kinerja prosentase Lingkungan Pemukiman Kumuh melampaui target, adalah telah tersusunnya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Perkotaan (RP2KPKP) serta adanya bantuan fisik penanganan permukiman kumuh melalui APBN dan APBD Provinsi.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja persentase rumah tangga Rumah Tangga Ber-Sanitasi adalah telah tersusunnya dokumen Masterplan Air Limbah Domestik dan adanya dukungan dana untuk pembangunan IPAL Komunal.







Adapun faktor penghambat belum tercapainya indikator Rumah Layak Huni (%) adalah karena jumlah penanganan rumah layak huni di Kabupaten Magelang tiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sebanding dengan kenaikan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Magelang. Walaupun belum tercapai, namun adanya bantuan penanganan rumah tidak layak huni dari provinsi, BSPS dari pusat dan program penanganan RTLH APBD Kabupaten Magelang sangat membantu penanganan rumah tidak layak huni.




2.2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kinerja pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat daerah ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 6 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.176
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0.44	-	0,44	0,69	0,39	0,69	100.00	
2	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	100.87	-	99,64	88,13	91,32	88,13	100.00	
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Dan Adiministrasi Pemerintah	4	-	4	4	2	4	100.00	
4	Penegakan PERDA	75	Persen	75	95,29	80,45	95,29	100.00	
5	Persentase Peningkatan PAD	12.02	Persen	12,02	17,89	7,42	17,89	86.25	
6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada		ada	Ada	Ada	Ada	96.66	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator adalah adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat, khususnya SKPD teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi urusan ketertiban dan keamanan.



Faktor penghambat tidak tercapainya indikator cakupan petugas Linmas per sepuluh ribu jumlah 10.000 penduduk adalah karena selama ini menjadi Anggota Linmas merupakan satu pilihan untuk kegiatan sosial yang secara ekonomi belum dapat dijadikan sebagai pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan rumah tangga. Rekrutment anggota baru tidak sebanding dengan jumlah Anggota Linmas yang pensiun maupun meninggal dunia sehingga pertumbuhan jumlah anggota Linmas tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Dari aspek kelembagaan Pengorganisasian Linmas, berdasarkan sejarahnya kelembagaan Linmas pernah berdiri sendiri menjadi Mawil Hansip sejajar dengan Kantor eselon III, namun seiring dengan perubahan SKPD di Kabupaten Magelang kelembagaan Linmas mulai menurun hanya ditangani oleh Kasi/ Kasubid Linmas (eselon IV). Penggabungan Linmas ke Satpol PP di Kabupaten Magelang, diawali dari Penggabungan Mawil Hansip dan Kantor Sospol Menjadi Kantor Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) sehingga Lembaga Linmas dibawah Kasi Linmas (eselon IV.a). Pada Tahun 2009, Kelembagaan Linmas masuk di Badan Kesbangpol dan PB. Kelembagaan Linmas dibawah Bidang Penanggulangan Bencana melalui Kasubid Bina Linmas (eselon IV.a). Setelah terbitnya PP 6 Tahun 2010 bahwa fungsi Linmas berada di Satpol PP maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kelembagaan Linmas masuk dalam Satpol PP Kabupaten Magelang di bawah Seksi Pengamanan dan Bina Linmas (eselon IV.a).

2.2.3.1.6 Sosial

Kinerja pembangunan urusan sosial ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 2 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.177
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	Unit	34	39	39	39	114,71	
2	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20.00	Persen	18,50	46,32	28,95	46,32	231,60	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kenaikan secara signifikan, dimana sampai dengan tahun 2018 capaian kerja sebesar 46,32 persen, jauh melampaui target sebesar 28,95 persen.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui dari jumlah persentase yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan Sosial adalah :






- a. Perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Magelang
- b. Adanya ketersediaan dana untuk pembinaan panti sehingga partisipasi panti untuk tumbuh kembang bertambah
- c. Adanya program Keluarga Harapan dari Pusat yang sasarannya di Kabupaten Magelang sehingga menambah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan.
- d. Adanya peran serta stake holders serta masyarakat dalam penanganan masalah-masalah sosial di Kabupaten Magelang.
- e. Pendataan PMKS yang dilakukan secara periodik.




2.2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 6 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Sementara 1 indikator belum dapat dianalisis karena belum ada data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.178
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan


No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	76,65	Persen	75,65	71,28	75,46	71,28	92.99	
2	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	Persen	1,28	2,70	1,34	2,70	-10.94	
3	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	54,27	Persen	48,32	42,86	43,31	42,86	78.98	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka **	3,02	Persen	3,10	2,91	3,21	2,91	103.64	
5	Keselamatan dan Perlindungan	79,00	Persen	77,00	NA	75	NA	0.00	
6	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	100	100	100	100.00	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.2 Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan ditunjukkan dalam 7 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 7 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.179
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Arus Penumpang	3.705.271	orang	3.705.271	3.121.745	2.794.562	3.121.745	84.25	

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
	Angkutan Umum								
2	Jumlah Ijin Trayek	1.069	-	1.057	976	1.089	976	91.30	▶
3	Rasio Uji Kir Kendaraan	96.7	Persen	96,30	88,10	98,39	88,10	91.11	▶
4	Jumlah Terminal Bis	8	terminal	8	6	6	6	75.00	▼
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit	32	32	32	32	100.00	●
6	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Wajib Uji	ada		ada	Ada	Ada	Ada	100.00	●
7	Pemasangan Rambu-Rambu	94,00	persen	79,00	111,72	106,36	111,72	118.85	●

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan perhubungan adalah:

- Perencanaan kegiatan/program yang baik
- Dukungan ketersediaan dana
- Pelaksanaan kegiatan/program yang baik
- Sarana dan prasarana mendukung.

Sedangkan faktor yang menyebabkan beberapa indikator kinerja program urusan perhubungan belum tercapai, yaitu:

- Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum.

Indikator ini belum tercapai karena:

- Adanya Kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum
- Kurang nyamannya fasilitas Angkutan umum dan fasilitas di terminal
- Waktu tunggu angkutan Umum yang relatif lama
- Banyak agen bus/angkutan umum yang melakukan jemput bola pada penumpang sehingga minat masyarakat masuk terminal menurun.

- Jumlah ijin trayek

Indikator ini belum tercapai dikarenakan saat ini banyak kendaraan yang sudah habis masa ijin trayek, namun ijin trayeknya tidak diperpanjang lagi karena sepi penumpang. Masyarakat lebih sering memanfaatkan jasa angkutan online.

- Rasio Uji KIR Kendaraan

Indikator ini belum tercapai karena adanya keterlambatan pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji kendaraan bermotor.






4. Jumlah Terminal Bis.


Faktor penghambat tidak tercapainya indikator jumlah terminal bis adalah karena keberadaan Terminal Muntilan yang sudah menjadi kewenangan Provinsi; dan rencana pembangunan Terminal Sawangan yang belum terealisasi karena gagalnya proses pengadaan tanahnya.

2.2.3.1.3 Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup ditunjukkan dalam 5 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 5 indikator tersebut sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.180
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Persentase Penanganan Sampah	31,00	Persen	29,00	33,60	28,14	33,60	108.37	
2	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor Dan Sumber Mata Air	2,10	Persen	1,90	4,10	2,85	4,10	195.39	
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	Persen	30	38,84	33,06	38,84	129.48	
4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,76		1,78	2,32	0,99	2,32	214.94	
5	Jumlah Daya Tampung TPS (M³)	2.300.000	m³	2.300.000	297.475	186.585	297.475	12.93	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Secara Umum, faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Sinergitas antar stakeholder baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat.
- b. Adanya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui pembentukan kelompok peduli lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif.
- d. Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sedangkan indikator Jumlah Daya Tampung TPS masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya dikarenakan belum terealisasinya pengadaan TPA di Kabupaten Magelang, sehingga daya tampung TPS yang ditargetkan tidak tercapai. Kendala yang dihadapi adalah adanya regulasi yang

mensyaratkan bahwa lokasi TPA minimal berjarak 1.000 meter dari permukiman. Hal ini menyebabkan lokasi yang disediakan untuk TPA tidak memenuhi syarat.

2.2.3.1.4 Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan ditunjukkan dalam 2 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 2 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.181
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33.83	Persen	33,80	53,41	53,41	53,41	157.88	
2	Penyelesaian Izin Lokasi	100	Persen	100	100	100	100	100	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pertanahan adalah:

1. Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya cukup tinggi;
2. Pelayanan pengurusan pensertifikatan lahan dan ijin lokasi tidak berbelit-belit;
3. Biaya sertifikat dan ijin lokasi relatif terjangkau;
4. Tingginya program pemerintah terkait pelayanan sertifikasi tanah.

2.2.3.1.5 Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan dengan 4 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.182
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,87	Persen	91,81	96,13	88,66	96,13	104.64	
2	Bayi Berakte Kelahiran	100	persen	98,77	94,29	86,44	94,29	94.29	
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1.80	persen	1,80	34,26	39,37	34,26	1,903.33	

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	100	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: (1) Disdukcapil sudah mulai melakukan upaya jemput bola pelayanan pencatatan sipil (2). Kegiatan Sosialisasi Administrasi kependudukan kepada masyarakat semakin diintensifkan (3). Pembebasan biaya untuk beberapa pelayanan pengurusan administrasi kependudukan.

Indikator kinerja program yang belum tercapai adalah prosentase bayi berakte kelahiran dan rasio pasangan berakte nikah, hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat, yaitu:



- Faktor geografis, yaitu domisili pemohon akte kelahiran jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kendala jaringan internet yang kurang lancar di beberapa wilayah, sehingga berpengaruh pada jangka waktu pembuatan dokumen kependudukan
- Keterbatasan blangko E-KTP dari pusat sehingga pencetakan E-KTP tidak sesuai standar waktu.
- Kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan masih rendah, dimana masyarakat biasanya membuat dokumen kependudukan manakala dibutuhkan.

2.2.3.1.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 3 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.183

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	2.56	Persen	2,54	1,98	1,88	2.56	77.34	
2	Rasio KDRT	0.024	Persen	0,025	0,023	0,017	0.024	104.17	
3	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan	100	Persen	100	75,51	75	100	75.51	

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
	Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan								

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras






Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: (1) semakin mantapnya pola pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak melalui P2T2A semantah dan jaringan PTT Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan (2). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan KDRT cukup tinggi.




Salah satu indikator kinerja program yang belum tercapai adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah adanya ASN perempuan yang pensiun dan adanya kebijakan moratorium ASN sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dapat menambah ASN perempuan.

2.2.3.1.7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan dalam 5 indikator. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 5 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.184
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.57	Anak	1,60	1,14	1,13	1,14	127.39	
2	Rasio Akseptor KB	81.50	Persen	81,45	73,08	79,71	73,08	89.67	
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	80.89	Persen	80,84	73,08	79,71	73,08	90.34	
4	Keluarga Pra Sejahtera(%)	20.18	Persen	21,28	21,23	22,33	21,23	94.80	
5	Keluarga Sejahtera I (%)	14.38	Persen	14,88	15,29	16,39	15,29	93.67	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

- Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:
- Norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) sudah melembaga di lapisan masyarakat

- b. Fasilitas dan akses pelayanan KB semakin mudah
- c. Sarana komunikasi informasi dan edukasi lebih bervariasi dan tersebar baik melalui media luar ruang maupun media dalam ruang.
- d. Semakin efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang
- e. Membaiknya kesejahteraan masyarakat.





Sementara itu indikator yang belum mencapai target ada 3 yaitu : Rasio Akseptor KB, Cakupan Peserta KB Aktif (%) dan Keluarga Sejahtera (%). Adapun Faktor penghambat dari ketiga indikator diatas adalah :




- a. Kenaikan jumlah pasangan usia subur tidak langsung diikuti dengan kenaikan kesertaan ber KB. Penambahan jumlah PUS tersebut berasal dari dari pengantin baru yang tidak langsung ikut KB karena menginginkan untuk segera mempunyai anak.
- b. Adanya PUS yang drop out KB karena ingin punya anak lagi, ada pula yang usianya telah melebihi 45 tahun dan merasa aman tidak berKB padahal masih termasuk subur.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan KB, khususnya Laki-laki masih belum optimal.
- d. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

2.2.3.1.8 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.185
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPd 2018	Realisasi Tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6		8		9
1	Persentase Koperasi Aktif	78.18	Persen	77,95	94	94	94	120.24	
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.384	-	106.387	106.600	106.200	106.600	100.20	
3	Jumlah BPR/LKM	382	-	379	297	297	297	77.75	
4	Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	0.38	Persen	0,37	1,15	20,56	1,15	302.63	





Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




Pada tahun 2018, dari 4 indikator kinerja program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 1 indikator berstatus belum tercapai, dan 3 indikator melampaui target.

2.2.3.1.9 Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, Pada tahun 2018, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut semua indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.186
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.164	-	1.085	1.194	730	1.194	102.58	
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	724.647	Juta rupiah	665.163	1.976.374	1.030.689	1.976.374	272.74	
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	31.19	-	28,19	31,43	11,37	31,43	100.77	
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	359	Milyar rupiah	164	945,69	539.750	945,69	263.42	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.10 Kebudayaan

Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan kebudayaan, semuanya berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.187
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali	38	38	38	38	100,00	

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
2	Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	18	Unit	18	18	27	18	100,00	●
3	Benda. Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	70,00	persen	66,95	100	66,85	100	149,37	●

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya adalah Karena Kabupaten Magelang kaya akan sumber daya Budaya yang oleh pemerintah daerah di dukung dengan pendanaan untuk penyelenggaraan festival. Sedangkan untuk indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mampu melampaui target disebabkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Kabupaten Magelang sejak tahun 2015, sehingga upaya-upaya pendaftaran, pelestarian dan pemanfaatan benda/ bangunan cagar budaya bisa berjalan secara optimal.

2.2.3.1.11 Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga ditunjukan dengan 5 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 5 indikator kinerja program urusan Pemuda dan Olahraga, 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.188
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga







No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Organisasi Pemuda	27	organisasi	26	27	26	27	103,85	●
2	Jumlah Organisasi Olahraga	36	organisasi	35	35	29	35	100,00	●
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	19	kegiatan	18	20	17	20	111,11	●
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	24	kegiatan	24	24	24	24	100,00	●
5	Lapangan Olahraga	2.00	permil	1,50	1,25	0,02	1,25	83,33	▼




Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.12 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 6 indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, 4 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai. Dibandingkan capaian tahun 2017, ada peningkatan capaian di Tahun 2018. Pada tahun 2017, dari 6 indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, 3 indikator berstatus tercapai dan 3 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.189
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM. Ormas Dan OKP	12	-	12	12	12	12	100	
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	-	12	12	7	12	100	
3	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	Persen	100	100	70	100	100	
4	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	Persen	100	100	100	100	100	
5	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	Persen	90	86,25	70	86,25	95,83	
6	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	Persen	100	96,66	100	96,66	96,66	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

- a. Adanya Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebencanaan.
- b. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholders.
- c. Ketersediaan SDM yang kompeten.
- d. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

e. Merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang mempunyai standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah.




Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya indikator Kegiatan Pembinaan Politik Daerah adalah adanya ketidaktepatan perumusan target indikator kinerja pada level perencanaan SKPD.

2.2.3.1.13 Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 2 indikator kinerja program urusan Ketahanan Pangan, 1 indikator berstatus tercapai, dan 1 indikator akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.190
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188.1	Ton	188,06	220,23	287.172	220,23	117,11	
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	93.1	-	93,1	87,90	87,10	87,90	94,41	




Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.14 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2 indikator kinerja berstatus tercapai dan 1 indikator kinerja perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.191
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Cakupan Pembi-naan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	19.00	persen	17,00	20	20	20	117,65	
2	Cakupan Kelompok Binaan PKK	39.52	persen	33,87	24,82	28,24	24,82	73,28	
3	Jumlah LSM	6	buah	6	4	4	4	100,00	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor penghambat atas ketidak capaian 1 indikator diatas adalah:




1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan khususnya pemerintah desa untuk memberdayakan kelompok PKK.
2. Peran organisasi PKK masih dipandang sebelah mata.
3. Dukungan anggaran untuk PKK dan LSM relative masih rendah.
4. Masih rendahnya kesadaran untuk membentuk lembaga swadaya yang non profit.

2.2.3.1.15 Statistik

Kinerja pembangunan urusan statistik ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 2 indikator kinerja program urusan Statistik, semua indikator kinerja berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.192
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	Ada/tidak	ada	Ada	ada	Ada	100	
2	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	Ada/tidak	ada	Ada	ada	Ada	100	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




Faktor pendorong tercapainya urusan statistik adalah: (1). Hubungan dan kerjasama yang baik dengan Stakeholder pengampu data; (3). Ketersediaan Dana

2.2.3.3.1.16 Kearsipan

Kinerja pembangunan urusan kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. Semua indikator kinerja program urusan kearsipan pada tahun 2018 telah tercapai. Capaian ini merupakan capaian akumulasi dari tahun 2014. Realisasi capaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya tambahan kegiatan monitoring evaluasi diluar jadwal dan adanya permintaan dari desa-desa. Indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan juga realisasinya melampaui target karena didukung oleh kegiatan sosialisasi dan kegiatan workshop. Capaian ini masih relative sama dengan capaian tahun 2017. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.193
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	persen	89,61	89,77	73,02	89,77	100,18	
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	329	orang	282	901	791	901	319,50	




Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program komunikasi semuanya telah tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.194
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	-	6	8	8/0	8	133,33	
2	Web Site Milik Pemerintah Daerah	ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	100	
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3	-	9/3	9/3	9/3	9/3	100	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika adalah:

- (1). Partisipasi masyarakat yang tinggi
- (2). Komitmen Pemda dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tinggi

2.2.3.1.26. Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut. Dari 3 indikator kinerja program urusan perpustakaan, pada tahun 2018 dua indikator berstatus

tercapai dan satu indikator akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.195
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Jumlah Perpustakaan	815	Unit	794	797	793	797	97,79	▶
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	45.335	orang	44.447	76.548	39.967	76.548	168,85	●
3	Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	2.24	persen	2,20	2,24	2,16	2,24	100,00	●






Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan perpustakaan adalah: (1). Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan; (2). Meningkatnya mutu dan jenis layanan perpustakaan; (3). Meningkatnya jam kunjung pemustaka; (4). Ketersediaan dana dan (5). Dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu perpustakaan.

2.2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.2.3.3.1 Pertanian

Kinerja pembangunan urusan pertanian ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 21 indikator kinerja program urusan Pertanian, 8 indikator berstatus tercapai, 9 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.196
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar								
1	Produktivitas Padi	60.10	Kw/ha	60,09	62,24	62,90	62,24	103,56	
2	Produksi Padi	355.676	Ton/Th	355.617	478.266	483.331	478.266	134,47	
3	Produktivitas Jagung	59.30	Kw/ha	59,28	63,53	58,73	63,53	107,13	
4	Produksi Jagung	74.337	Ton/Th	74.307	51.446	55.083	51.446	69,21	
5	Kontribusi	20.03	Persen	20,89	21,78	22,78	21,78	108,74	

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
	Sektor Pertanian Terhadap PDRB **								
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%) sektor pertanian	71.84	Persen	72,22	72,11	72,83	72,11	100,38	●
7	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB sektor pertanian	7.73	Persen	7,60	5,68	5,25	5,68	73,48	▼
8	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB sektor pertanian	13.09	Persen	12,86	17,65	17,65	17,65	134,84	●
9	Cakupan Bina Kelompok Petani	14,9	Persen	2,5	14,00	2.6	14,00	518,52	●
	Produksi Hewan ternak								
10	Sapi potong	1.862.169	Kg	1.825.656	1.826.011	1.791.694	1.826.011	98,06	▶
11	Kerbau	541	kg	530	693,20	520	693,20	128,13	●
12	Kambing	793.265	Kg	777.711	737.749	749.957	737.749	93,00	▶
13	Domba	1.115.626	Kg	1.093.751	1.043.219	1.053.911	1.043.219	93,51	▶
	Produksi Hewan Unggas								
14	Ayam Pedaging	9.957,1	ton	9.761,90	9.762,02	9.417.335	9.762,02	98,04	▶
15	Ayam Ras Petelur	1.019.5	ton	999,59	991,59	967.668	991,59	97,26	▶
16	Ayam Buras	1.239.98	ton	1.215,67	1.168,78	1.170.022	1.168,78	94,26	▶
17	Itik	94.106	ton	92.260	92,30	90.445	92,30	98,09	▶
18	Sapi Perah	746.158	liter	731.528	731.634	725.679	731.634	98,05	▶
	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hr)								
19	a. daging	6.20	Gr/kap/hr	5,95	5,96	5,87	5,96	96,13	▶
20	b. telur	4.65		4,35	4,00	3,97	4,00	86,02	▼
21	c. susu	0.11		0,08	0,04	0,02	0,04	36,36	▼




Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.2.3.3.2 Kehutanan

Kinerja pembangunan urusan kehutanan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Indikator tersebut tidak bisa dievaluasi karena saat ini indikator kehutanan sudah menjadi kewenangan Provinsi. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.197
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis	2.822	ha	2.680	NA	NA	NA	NA	NA
2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4.66	Persen	4,70	NA	3,92	NA	NA	NA




Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.3.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kinerja pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Indikator tersebut tidak bisa dievaluasi karena saat ini indikator pertambangan sudah menjadi kewenangan Provinsi. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.198
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral




No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018				
1	Persentase Pertambangan Berijin	50	Persen	40	NA	NA	NA	50	NA
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2.64	Persen	2,64	NA	4,35	NA	2.64	NA

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.3.4 Pariwisata

Kinerja pembangunan urusan pariwisata ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan Pariwisata, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.199
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Kunjungan Wisata: Manca Negara	860.549	Orang	723.151	358.673	337.515	358.673	41,68	
2	Kunjungan Wisata: Nusantara	6.594.051	Orang	5.963.149	5.977.422	4.510.363	5.977.422	90,65	
3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6.89	persen	6,63	5,10	4,30	5,10	74,02	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.2.5 Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 4 indikator kinerja program urusan Peternakan dan Perikanan, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.200
Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan



No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Produksi Perikanan (Benih)	2 .000	Juta ekor	1.750	2,01	1.717.550	2,01	100,40	
2	Produksi Perikanan Budidaya	18.000	Ton	16.800	23.097,01	21.058.460	23.097,01	128,32	
3	Produksi Perikanan Tangkap	263.57	Ton	253,43	278,14	275,90	278,14	105,53	
4	Konsumsi Ikan	15.75	Kg/ka p/ tahun	15,30	19,60	18,61	19,60	124,44	
5	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sector Pertanian	2.68	Persen	2,62	2,29	2,82	2,29	85,45	




Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.2.6 Perdagangan

Kinerja pembangunan urusan perdagangan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan Perdagangan, 2 indikator berstatus Tercapai, dan 1 indikator Perlu Kerja Keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.201
Capaian kinerja Urusan Perdagangan



No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	9.98	Persen	10,01	10,85	13,41	10,85	108,72	
2	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	89	Juta US\$	88,80	50,87	88,5	50,87	57,16	
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	13,55	Persen	1,79	3,90	20,56	3,90	224,14	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.2.3.2.7 Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada tahun 2018, dari 3 indikator kinerja program urusan Perindustrian, 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.202
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	16.83	Persen	2,81	2,95	0,72	2,95	17,53	
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	17.95	Persen	18,03	19,55	22,66	19,55	108,91	
3	Pertumbuhan Sektor Industri.	3.76	Persen	3,76	3,70	2,88	3,70	98,40	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras





2.2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan




2.2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan dalam 4 indikator dengan 3 Indikator berstatus Tercapai dan 1 Indikator berstatus akan tercapai, Selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.203

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yg Telah Ditetapkan Dgn PERDA	ada	Dokumen	Ada	Ada	ada	Ada	100	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	Dokumen	Ada	Ada	ada	Ada	100	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	Dokumen	Ada	Ada	ada	Ada	100	
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	Persen	100	94,57	87,03	94,57	94,57	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




2.2.3.4.2 Keuangan

Kinerja pembangunan urusan keuangan diukur dengan satu indikator, yaitu persentase peningkatan PAD. Dari target peningkatan PAD 12,02 per tahun, pada tahun 2018 tercapai 17,89 atau 148,84 persen.

Tabel 2.204

Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s.d. 2017	Kinerja RPJMD Sampai dengan 2018		Status
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018		Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan PAD	12.02	Persen	12,02	17,89	7,42	17,89	148,84	

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Magelang dirumuskan berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah masa yang lalu, khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan juga diidentifikasi dari seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta yang ingin dicapai di masa datang yang didasarkan pada kondisi riil saat ini.

1. Kinerja Pembangunan Pendidikan
2. Kinerja Pembangunan Kesehatan
3. Masih Tingginya Jumlah PMKS
4. Ketahanan Pangan Daerah
5. Tingkat Pengangguran Terbuka
6. Layanan Hunian yang Layak dan Berkualitas
7. Keberdayaan Berbasis Gender
8. Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik
9. Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur
10. Daya Saing Daerah
11. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
12. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
13. Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
14. Kualitas Pelayanan Publik
15. Pelayanan Kearsipan
16. Sistem Manajemen Kepegawaian

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Pendidikan
Pembangunan Pendidikan memberikan sumbangan yang besar dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Permasalahan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan yang memerlukan penanganan adalah:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan;
 - 2) daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah
 - 3) mutu pendidikan.
2. Kesehatan
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dalam upaya

pencapaian peningkatan derajat kesehatan tersebut masih terdapat permasalahan kualitas kesehatan masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut:

- 1) akses dan kualitas infrastruktur jalan;
- 2) layanan infrastruktur sumberdaya air;
- 3) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- 4) layanan air minum dan sanitasi;
- 5) kualitas konstruksi dan sarana prasarana pekerjaan umum; dan
- 6) kesesuaian tata ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki tiga hal krusial yang menuntut penyelesaian di setiap periode RPJMD, yakni terkait dengan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman. Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah layanan hunian yang layak dan sehat. Penjabaran dari permasalahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah penyediaan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas. Hal ini disebabkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pengembangan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau.
- 2) Penanganan PSU perumahan.
- 3) Pengembangan kawasan permukiman layak.
- 4) Penyediaan dan penanganan PSU permukiman.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan Perda merupakan persoalan yang krusial, terutama berkaitan dengan pembentukan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, demikian juga dengan antisipasi dan penanganan bencana kebakaran, sehingga permasalahannya adalah belum optimalnya:

- 1) cakupan penegakan hukum;
- 2) kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; dan
- 3) wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

7. Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang

sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global dan revolusi industri 4.0, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian ke depan yaitu upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan implementasi dari pembangunan berbasis gender. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu diperhatikan adalah kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga

9. Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Pangan yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan daerah diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan yang merupakan indeks komposit yang terbentuk dari komponen ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah adalah:

- 1) ketersediaan bahan pangan utama;
- 2) akses dan distribusi bahan pangan;
- 3) pola konsumsi pangan masyarakat.

10. Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat dari berbagai aktivitas manusia perlu diimbangi dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi di Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kelestarian lingkungan. Beberapa penyebab munculnya masalah tersebut adalah belum optimalnya:

- 1) pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca;
- 2) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup;
- 3) pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
- 4) kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
- 5) konservasi sumberdaya alam.

11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Oleh karena itu, layanan dan data kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Permasalahan pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah kualitas pelayanan serta pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah kemajuan dan kemandirian desa.

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, keluarga berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah menurunnya kualitas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

14. Perhubungan

Transportasi atau perhubungan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan manusia tidak lepas dari proses transportasi. Di Kabupaten Magelang permasalahan utama di urusan perhubungan adalah belum optimalnya cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Hal ini disebabkan oleh permasalahan sebagai berikut.

- 1) ketersediaan prasarana angkutan jalan.
- 2) keamanan dan keselamatan lalu lintas.
- 3) layanan angkutan.

15. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Namun demikian, amanah ini belum dapat dilakukan secara optimal di Kabupaten Magelang. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya pelaksanaan *e-Government* yang disebabkan oleh adanya berbagai masalah sebagai berikut.

- 1) prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi standar komunikasi informasi.
- 2) integrasi sistem informasi pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat.
- 3) diseminasi informasi publik.
- 4) pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi tingkat masyarakat.

16. Koperasi dan UKM

Pemberdayaan koperasi dan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian,

mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan pada kinerja koperasi dan UKM.

17. Penanaman Modal

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu belum terciptannya Iklim Usaha yang Kondusif dan meminimalkan hambatan-hambatan Investasi.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun, serta meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Magelang, masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan.

19. Statistik

Permasalahan urusan statistik adalah belum dilaksanakannya satu data terintegrasi yg dapat digunakan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.

20. Persandian

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan persandian, antara lain belum tersedianya sistem persandian dan keamanan informasi yang sesuai dengan standar, belum optimalnya pengamanan jaringan informasi, dan pengamanan ruang penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

21. Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan yang muncul adalah pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan.

22. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Hal ini untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Permasalahan perangkat daerah terkait urusan Perpustakaan adalah minat baca masyarakat masih rendah.

23. Kearsipan

Permasalahan terkait pembangunan kearsipan di Kabupaten Magelang adalah terbatasnya pelayanan kearsipan.

24. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan perikanan adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diarahkan pada berkembangnya perikanan yang maju, efisien, dan tangguh. Tujuan pembangunan perikanan adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ikan, memperluas lapangan kerja dan

kesempatan berusaha, menunjang pembangunan agroindustri serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Perikanan merupakan salah satu sektor yang diunggulkan di Kabupaten Magelang. Hal tersebut karena sampai dengan saat ini, sektor perikanan masih menjadi penyumbang PDRB. Selain itu, perikanan juga mampu menampung tenaga kerja perikanan cukup banyak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Magelang saat ini adalah:

- 1) produksi dan produktivitas produk perikanan; dan
- 2) pemberdayaan SDM perikanan.

25. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penyediaan lapangan kerja. Selain itu, pariwisata juga mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif. Sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Namun demikian, dalam pengembangannya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu jumlah kunjungan dan terbatasnya lama tinggal wisatawan.

26. Pertanian

Pembangunan pertanian adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan agroindustri serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang diunggulkan di Kabupaten Magelang, bersama dengan sektor pariwisata dan sektor UKM. Hal tersebut karena sampai dengan saat ini, sektor pertanian masih menjadi penyumbang PDRB dengan persentase terbesar. Selain itu, pertanian juga mampu menampung tenaga kerja pertanian paling banyak.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang saat ini adalah:

- 3) produksi dan produktivitas produk pertanian; dan
- 4) pemberdayaan SDM Pertanian.

27. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan

dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu perkembangan sektor perdagangan dalam peningkatan PDRB.

28. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian, yaitu lambatnya pertumbuhan dan rendahnya daya saing IKM.

29. Perencanaan

Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang adalah kualitas perencanaan pembangunan daerah

30. Keuangan

Pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah adalah belum optimalnya:

- 1) pengelolaan pendapatan daerah;
- 2) pengelolaan keuangan daerah;
- 3) pengelolaan aset daerah;
- 4) pengembangan BUMD; dan
- 5) pengelolaan sumber-sumber pendanaan daerah non APBD melalui CSR dan kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

31. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi atau institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah institusi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan institusi tersebut. Saat ini, karyawan bukan dianggap sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset utama bagi institusi. Permasalahan terkait sistem manajemen kepegawaian antara lain kualitas aparatur

32. Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu belum optimalnya penelitian dan pengembangan

yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, serta penerapan pengembangan teknologi dan inovasi daerah.

33. Pengawasan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Inspektorat yang mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan internal di Kabupaten Magelang adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

34. Fungsi lain

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif. Permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.3.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Magelang didasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan, dan potensi pembangunan yang belum terkelola dan dapat menjadi peluang untuk dikembangkan di masa datang. Isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan selama kurun waktu 5 tahun mendatang di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Secara umum, nilai IPM di Kabupaten Magelang memiliki besaran yang meningkat. IPM adalah suatu indeks untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Riil Per Kapita. Hampir semua komponen pembentuk indikator IPM mengalami peningkatan. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Magelang pada tahun 2013 hingga 2018 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,95% per tahun. Meski terus mengalami perkembangan positif, nilai indikator IPM Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2017 masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal di bandingkan provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Magelang cenderung meningkat dari sebesar 12 (2014) menjadi 12,47 (2017). Data menunjukkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2014-2017 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Hal ini berarti

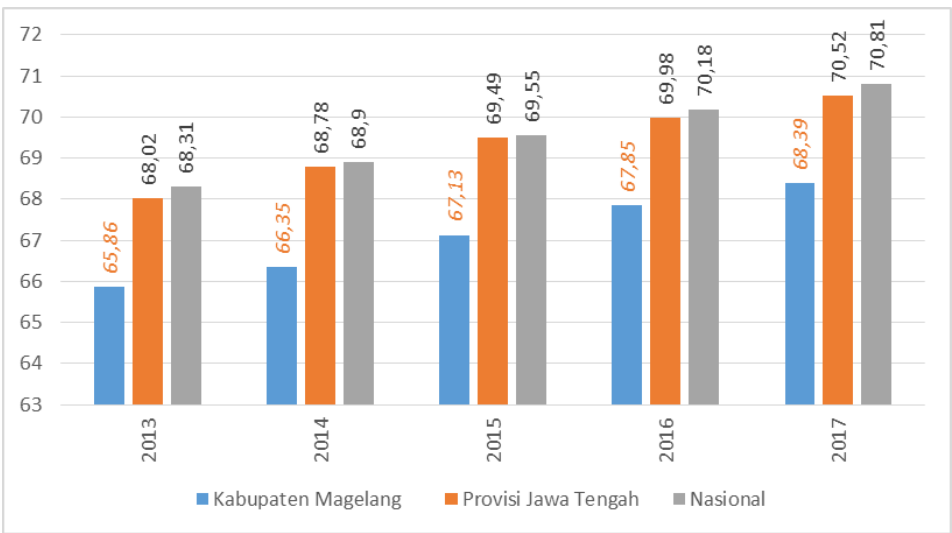
keberhasilan pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada provinsi dan nasional.

Nilai rata-rata lama sekolah tahun 2017 di Kabupaten Magelang sebesar 7,41 tahun. Hal ini berarti pendidikan yang ditamatkan penduduk hanya sampai tamat SD atau dapat mengenyam pendidikan SMP. Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah belum tuntas. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah tingkat nasional, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2013-2017 lebih rendah dari Rata-rata lama sekolah nasional.

Umur harapan hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2014 adalah 73,25. dan cenderung meningkat mulai tahun 2014 di kisaran 73 tahun, sehingga pada tahun 2017 angka harapan hidup dapat mencapai 73,39 tahun. Artinya, secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 73 – 74 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Secara series dari tahun 2014 sampai 2018, umur harapan hidup di Kabupaten Magelang di bawah Provinsi Jawa Tengah, namun di atas angka nasional.

Besarnya pengeluaran riil per kapita Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2014 hingga tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,38% selama lima tahun terakhir. Namun, apabila dibandingkan dengan nilai Kabupaten lain disekitar dan Provinsi Jawa Tengah, kondisi Kabupaten Magelang masih cukup jauh berada di bawah. Sejak tahun 2014 hingga kini, pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Besarnya pengeluaran riil per kapita dapat menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap komoditi pokok. Dalam hal ini, daya beli masyarakat di Kabupaten Magelang masih tergolong rendah.

Adapun IPM di Kabupaten Magelang apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019

Gambar 2.43.

IPM Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2017

Kualitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari capaian kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.205
Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2018		Kinerja 2013 s/d 2017	Target RKPD 2019	Sta-tus*
				Target RKPD 2018	Realisasi tahun 2018			
1	Angka Usia Harapan Hidup	70,56	Tahun	70,50	73,47	73,25	70,56	>
2	Indeks Gini**	0,295	Indeks	0,295	0,344	0,31	0,295	<
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4046	Indeks	0,4046	-	0,42	0,4046	
4	Persentase penduduk miskin**	8,00	Persen	9,00	11,23	12,42	8,00	<
5	IPM	75,94	Indeks	75,94	69,11	74,74	75,94	<
6	Pertumbuhan PDRB	6,4 – 7,1	Persen	6,20 – 6,70	n/a	5,43	6,4 – 7,1	
7	PDRB per kapita	15,06	Juta Rp,	13,75	n/a	22,35	15,06	
8	Laju inflasi	4±1	Persen	4±1	2,66	3,47	4±1	>
9	Rasio penduduk yang bekerja	97,97	-	73,66	71,28	96,79	97,97	<
10	Angka kriminalitas per sepuluh ribu penduduk **	1,45	Indek	1,82	2,60	2,65	1,45	<

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019, Diolah
 Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Indikator kinerja program aspek kesejahteraan sosial pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 terdiri dari 10 indikator. Pada tahun 2018 sebanyak 5 indikator belum mencapai target dan 2 indikator melampaui target. Sedangkan 3 indikator belum dapat diukur kinerjanya karena belum terdapat data. Indikator-indikator yang belum tercapai, yaitu indek gini, persentase penduduk miskin, IPM, rasio penduduk yang bekerja dan angka kriminalitas.

Selain itu perkembangan teknologi, kemajuan zaman serta interaksi dengan berbagai budaya akan memberikan pengaruh positif atau negatif. Pengaruh negatif menyebabkan prilaku yang bertentangan dengan norma dan budaya, kejahatan dan rusaknya moral terutama pada generasi muda.

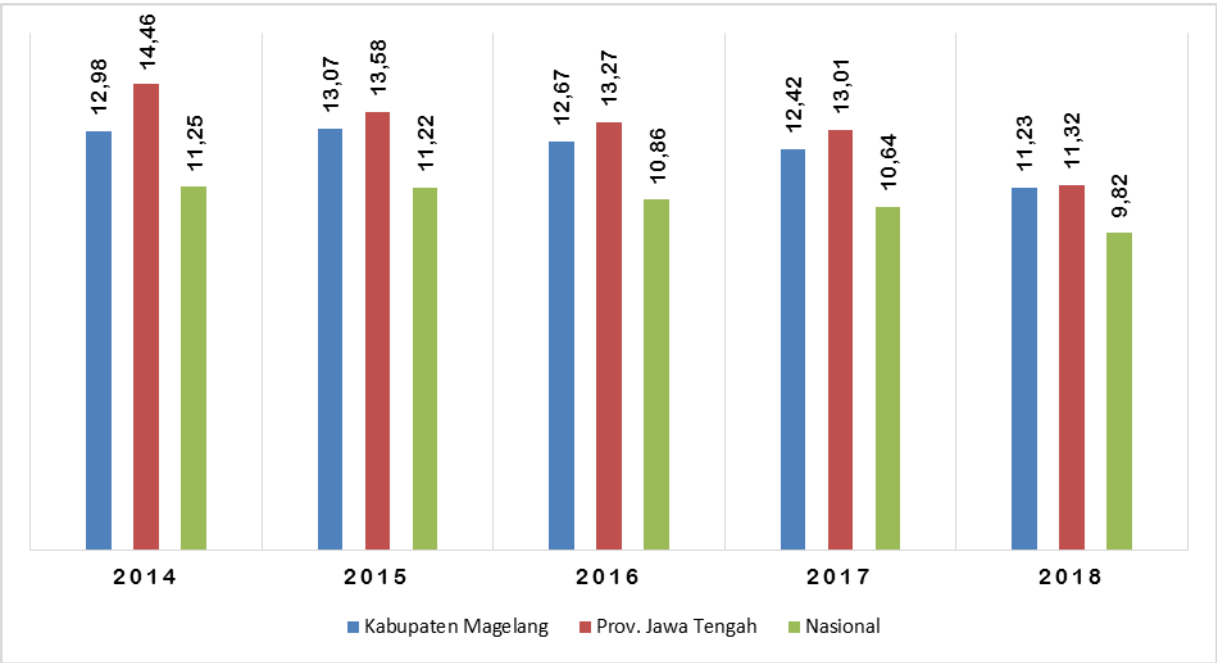
Kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan oleh IPM di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh 3 hal utama :

a. Kemiskinan

Sesuai data terakhir BPS yang dirilis pada Tahun 2018, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang sebesar 11,23%, turun 1,19% dibanding

tahun 2017, sebesar 12,42. Hal ini menunjukkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten hingga desa sudah mulai dirasakan hasilnya, mengingat selama rentang 5 (lima) tahun terakhir baru pada tahun 2018 angka kemiskinan turun lebih dari 1 (satu) digit.

Jika dilihat dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir, walaupun angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Target di RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebesar 9,00% masih belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan pada sampai dengan tahun 2018 belum berjalan dengan baik. Perbandingan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar di bawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019, Diolah

Gambar 2.44.
Perbandingan angka kemiskinan
di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, Kabupaten Magelang berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, posisi Kabupaten Magelang masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional.

Belum optimalnya pelaksanaan program-program daerah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Magelang disebabkan salah satunya oleh ketersediaan basis data kemiskinan yang belum lengkap dan akurat. Terbatasnya ketersediaan data menyebabkan penetapan sasaran program tidak tepat dan tidak mampu memenuhi target yang diharapkan. Sementara itu, inovasi dan integrasi program pengentasan kemiskinan juga masih kurang dan cenderung hanya melanjutkan program sebelumnya.

Pengentasan kemiskinan hingga kini tidak hanya menjadi isu di daerah saja, melainkan juga menjadi salah satu agenda pembangunan dunia, salah

satunya menjadi tujuan pertama dalam *Sustainable Development Goals* yang diharapkan tercapai hingga tahun 2030. Kabupaten Magelang hingga tahun 2018 juga masih berada di peringkat ke-18 tertinggi untuk angka kemiskinan Kabupaten/kota se-Jawa Tengah, yakni 11,23%.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, Kabupaten Magelang telah melakukan beberapa upaya, salah satunya menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan daerah. Meski kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan telah disusun, hal tersebut masih belum mampu menurunkan angka kemiskinan dengan optimal. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang selama periode lima tahun rata-rata kurang dari 1 persen per tahun.

Belum optimalnya pelaksanaan program-program daerah untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Magelang disebabkan salah satunya oleh ketersediaan basis data kemiskinan yang belum lengkap dan akurat. Terbatasnya ketersediaan data menyebabkan penetapan sasaran program tidak tepat dan tidak mampu memenuhi target yang diharapkan. Sementara itu, inovasi dan integrasi program pengentasan kemiskinan juga masih kurang dan cenderung hanya melanjutkan program sebelumnya. Salah satu upaya untuk penanggulangan kemiskinan adalah melalui pengurangan pengeluaran, terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar di antaranya kebutuhan rumah tinggal. Penyediaan Rumah Tinggal Layak Huni diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan tujuan akhir menurunkan angka kemiskinan.

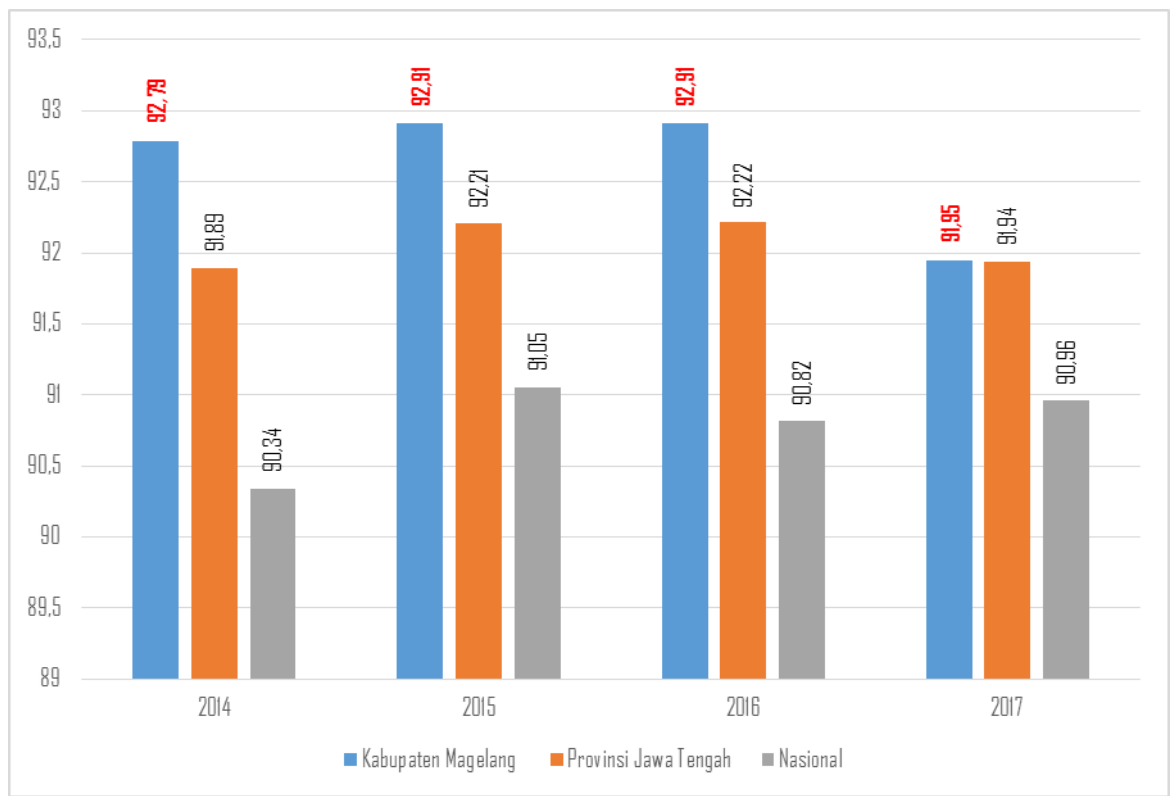
Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- a. kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal;
- b. penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal; dan
- c. kenaikan biaya hidup masyarakat, seperti kenaikan BBM, listrik, pajak, tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, khususnya kaum petani yang merupakan masyarakat penyumbang penduduk miskin terbesar di Kabupaten Magelang.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender (BPS). Indeks pembangunan gender ini diukur berdasarkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Secara umum IPG di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Magelang karena secara tidak langsung angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar (umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak) dapat dipenuhi. Adapun perbandingan capaian IPG Kabupaten

Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional disajikan dalam gambar berikut.



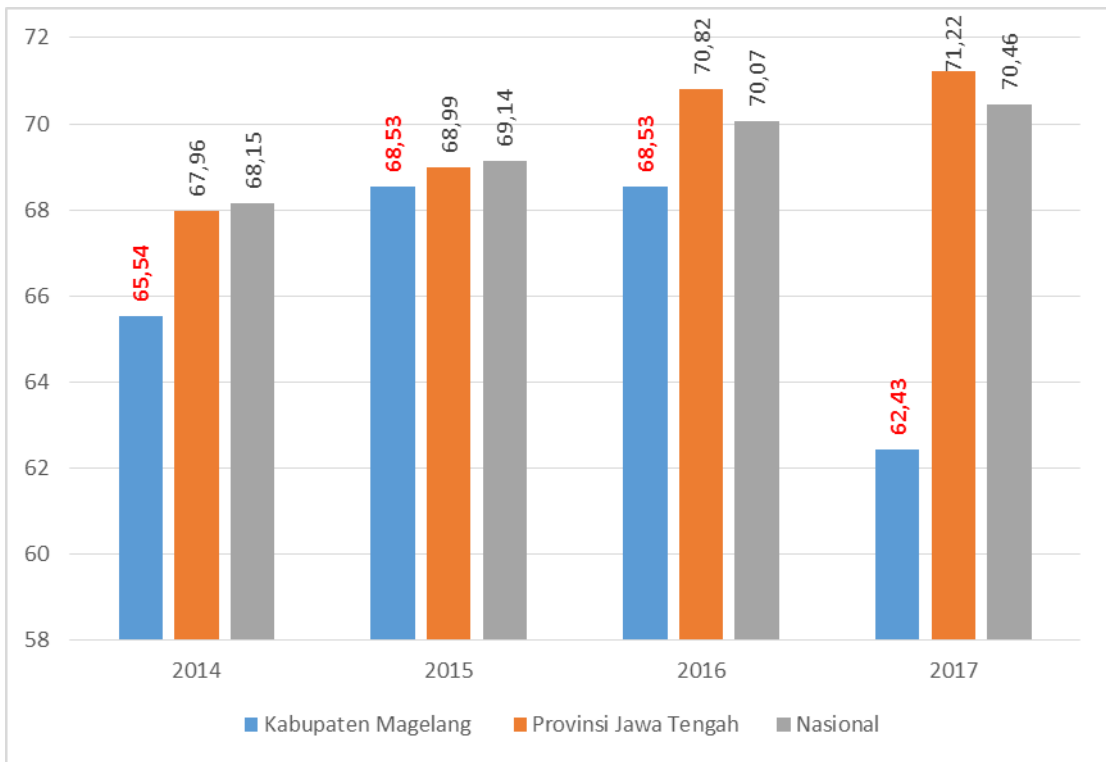
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019; Diolah

Gambar 2.45.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2014 -2017

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dimensi berpartisipasi politik diwakili dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dimensi ekonomi dan pengambilan keputusan diwakili oleh perempuan sebagai tenaga profesional teknisi, kepemimpinan, dan ketatalaksanaan. Dimensi terakhir adalah dimensi penguasaan sumber daya ekonomi, yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Berdasarkan data tahun 2013-2017 angka IDG di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Angka IDG dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2016, IPG di Kabupaten Magelang sebesar 68,53. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2019; Diolah

Gambar 2.46.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang
Tahun 2014-2017

2. Daya Saing Daerah

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah dengan laju pertumbuhan cenderung melambat mengindikasikan belum optimalnya daya saing ekonomi Kabupaten Magelang. Di sisi lain, sebenarnya Kabupaten Magelang memiliki potensi yang cukup banyak tercermin dari 3 (tiga) sektor unggulan, yaitu pariwisata, pertanian, dan industri kecil menengah.

Dalam era globalisasi dan bisnis modern di mana banyak wilayah yang memiliki produk hampir sama, maka merek atau *brand* menjadi suatu keharusan. Sampai saat ini, Kabupaten Magelang belum memiliki *branding* yang diharapkan menjadi diferensiasi, memperkuat identitas, serta meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan. Oleh karena itu, perlu dibangun *branding* Kabupaten Magelang yang akan menjadi salah satu cara efektif meningkatkan daya saing dan mampu mencakup aspek-aspek potensial Kabupaten Magelang secara menyeluruh, walaupun tetap ada penekanan pada aspek yang paling “menjual”.

Selain hal yang dikemukakan di atas, daya saing daerah juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur. Isu strategis di Kabupaten Magelang berkaitan dengan hal tersebut adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur. Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, dan persampahan, di mana semua dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah-swasta. Kerja sama pemerintah

dan swasta ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas dan mobilitasnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Magelang dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Dalam rangka mewujudkan daya saing daerah, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi hal sangat penting untuk diperhatikan, dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, mengurangi laju pemanasan global, serta meningkatkan kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis sumber daya alam sebagai modal pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang meliputi daya dukung air, daya dukung pangan, daya dukung lahan terbangun, dan daya dukung fungsi lindung. Adapun berkaitan dengan bencana dan kerentanan iklim, Kabupaten Magelang berada pada kategori risiko bencana tinggi untuk seluruh jenis bencana meliputi risiko terhadap bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan tanah longsor. Melihat kondisi tersebut, maka sudah menjadi keharusan bahwa tujuan akhir dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang serta mengurangi risiko bencana alam.

3. Kualitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif.

Regulasi yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang yang mengatur etika penyelenggara negara, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan sejarahnya, *good governance* diterapkan sejak dimulainya era reformasi di mana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam sistem pemerintahan, termasuk di Kabupaten Magelang.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Magelang. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu arah kebijakan RPJP Kabupaten Magelang, yaitu terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Dalam mencapai arah kebijakan itu, maka ditandai oleh hal-hal sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didukung oleh aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- 2) Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, ditunjang dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat dan meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- 3) Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat yang mandiri, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat berbagai kendala yang perlu untuk dihadapi dan diselesaikan. Kendala yang pertama adalah membenahi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal. Akuntabilitas kinerja menunjukkan seberapa kinerja pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Magelang menjadi persoalan tersendiri, mengingat terdapat beberapa hal yang masih belum mencapai standar atau target yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang belum berjalan dengan optimal. Sistem tersebut dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, pelaporan implementasi, monitoring dan evaluasi (monev). Kendala utama yang dihadapi dalam membentuk suatu sistem

akuntabilitas kinerja yang optimal terletak pada indikator-indikator perencanaan yang belum sinkron dan terukur. Indikator yang sinkron dan terukur menjadi penting dalam tahapan-tahapan sistem pemerintahan karena indikator tersebut menunjukkan keterkaitan antar tahapan dan keterukuran proses perencanaan hingga pengawasan program atau kegiatan. Apabila indikator suatu program dapat tersinkronisasi dan terukur, maka dapat tercipta pelayanan publik yang baik karena tujuan dari program tersebut menjadi lebih jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya indikator yang baik, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magelang akan menjadi belum optimal yang dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Magelang.

Sistem manajemen pemerintahan merupakan suatu bentuk inovasi birokrasi yaitu dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengorganisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut, maka proses pengelolaan SDM akan menjadi lebih mudah. Pengelolaan SDM dengan memanfaatkan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dalam rangka pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mendorong kualitas pelayanan publik tersebut adalah melalui pelaksanaan pembangunan berbasis *Smart City*.

Konsep *Smart City* merupakan tuntutan masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah dan layanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat, solusi bagi permasalahan masyarakat, publikasi potensi daerah, dan percepatan pembangunan.

Lemahnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Magelang juga mengindikasikan belum optimalnya pelayanan publik sebagai bentuk supremasi hukum. Suatu perda disusun sebagai sebuah regulasi yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di suatu wilayah. Penegakan perda harus didukung oleh komitmen pemerintah daerah yang kuat dan kerja sama lintas sektoral. Komitmen pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan terus memfasilitasi pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas penegakan perda. Sedangkan kerjasama lintas sektoral dan stakeholder bertujuan untuk terbentuknya kesepahaman terkait peraturan-peraturan yang sudah disepakati, sehingga pelanggaran perda dapat diminimalisasi. Saat ini, komitmen pemerintah Kabupaten Magelang dalam penegakan perda masih belum optimal, mengingat masih adanya otoritas penegak perda yang belum difasilitasi dengan baik dan komunikasi pihak-pihak terkait penegakan perda masih belum optimal. Apabila penegakan perda dapat berjalan dengan baik, maka pelayanan publik di Kabupaten Magelang menjadi lebih optimal karena ketenteraman dan ketertiban umum menjadi lebih kondusif.

Fungsi penelitian dan pengembangan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan pemerintahan melalui penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu,

dan berkesinambungan. Penguatan fungsi penelitian dan pengembangan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Magelang menjadi penting karena pada zaman modern ini, diperlukan berbagai inovasi dan terobosan baru agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Fungsi penelitian dan pengembangan yang belum berjalan dengan optimal dapat menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang tingkat efektifitas dan efisiensinya. Produk dari penelitian dan pengembangan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Magelang.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang esensial. Hampir seluruh aspek membutuhkan izin dalam pelaksanaannya, yang berarti hampir seluruh elemen masyarakat berurusan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perizinan. Kabupaten Magelang memiliki permasalahan tersendiri terkait perizinan, yaitu belum optimalnya pelayanan perizinan terpadu. Pelayanan perizinan terpadu adalah proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan. Dengan pelayanan perizinan terpadu yang optimal dapat meningkatkan nilai investasi karena iklim investasi yang lebih terjaga.

Kendala yang kedua adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya kendala dalam menciptakan aparatur yang profesional, maka kualitas dan kuantitas ASN mutlak untuk ditingkatkan. Hal tersebut berkaitan dengan manajemen ASN. Manajemen ASN terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu *recruitment*, *promotion*, dan *utilization* (pemanfaatan). Apabila ketiga aspek tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka kuantitas dan kualitas ASN dapat meningkat. Saat ini, Kabupaten Magelang mengalami masalah terkait dengan kualitas dan kuantitas ASN. Dari segi kualitas, masih ada pegawai yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Adapun dari segi kuantitas, Pemerintah Kabupaten Magelang masih mengalami kekurangan jumlah ASN. Kurangnya kualitas dan kuantitas ASN tersebut menjadi tantangan tersendiri yang wajib diselesaikan, selain pembenahan kelembagaan dan sistem demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal.

Smart City di era industri 4.0 sudah merupakan tuntutan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat, publikasi potensi daerah, dan percepatan pembangunan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada misi kedua Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun sasarannya meliputi meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai, antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.19,602 triliun. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 11,84% menjadi Rp.21,923 triliun dan meningkat menjadi Rp.24,148 triliun pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 10,15 %. Pada tahun 2016 naik sebesar 8,12% menjadi Rp.26,108 triliun, sedangkan tahun 2017 naik sebesar 7,42 % menjadi Rp.28,045 triliun.

PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar Rp.17,020 triliun dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.17,936 triliun atau mengalami kenaikan 5,38 %. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,18% menjadi Rp.18,864 triliun dan tahun 2016 naik sebesar 5,37% menjadi Rp.19,876 triliun, sedangkan tahun 2017 naik sebesar 5,06% menjadi 20,882 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2013	19.602.844,86	17.020.755,61
2	2014	21.923.411,31	17.936.288,38
3	2015	24.148.644,16	18.864.651,97
4	2016	26.108.949,06	19.876.744,24
5	2017	28.045.174,00	20.882.801,03

Sumber : BPS, 2018.

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Kontribusi PDRB yang terbesar pada tahun 2017 adalah sektor pertanian sebesar 21,78%, disusul sektor industri pengolahan sebesar 21,69%, dan sektor perdagangan sebesar 13,75%.

Apabila dikelompokkan terdapat 3 (tiga) sektor PDRB, yaitu primer, sekunder, dan tersier, di mana pada tahun 2017 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,53%, disusul sektor sekunder sebesar 31,28%, dan sektor primer sebesar 26,19%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2013-2017, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 sebesar 27,84% menjadi 26,19% pada tahun 2017.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2013–2017 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor sekunder sebesar 30,6% dan meningkat menjadi 31,29% pada tahun 2016. Adapun untuk tahun 2017, kontribusi sektor sekunder turun menjadi 31,28%.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sampai 2014 kontribusi sektor tersier menurun dari sebesar 41,58% menjadi 41,12%. Sementara itu, tahun 2015 sampai 2017 kontribusi sektor tersier cenderung meningkat, yaitu 40,80% pada tahun 2015, sebesar 41,35 % pada tahun 2016 dan 42,53% pada tahun 2017.

Tabel 3.2
Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Primer	27,84	27,85	27,97	27,36	26,19
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,97	23,63	23,49	22,99	21,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,87	4,22	4,48	4,37	4,41
2	Sekunder	30,6	31,03	31,23	31,29	31,28
C	Industri Pengolahan	21,24	21,62	21,82	21,89	21,69

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,21	9,27	9,28	9,27	9,46
3	Tersier	41,58	41,12	40,80	41,35	42,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	13,60	13,35	13,47	13,75
H	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,33	3,40	3,37	3,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	4,02	4,06	4,20	4,28
J	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,21	3,13	3,14	3,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,57	2,63	2,74	2,81
L	Real Estate	1,82	1,83	1,85	1,85	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,85	3,67	3,62	3,61	3,56
P	Jasa Pendidikan	5,66	5,82	5,74	5,83	6,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,77	0,78	0,80	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,00	2,07	2,01	2,10	2,17

Sumber : BPS, 2018.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2013 sebesar Rp.16,05 juta, meningkat menjadi Rp.17,77 juta pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi Rp.19,39 juta pada tahun 2015. Adapun tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp.20,77 juta dan naik menjadi Rp.22,11 juta pada tahun 2017. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
 Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

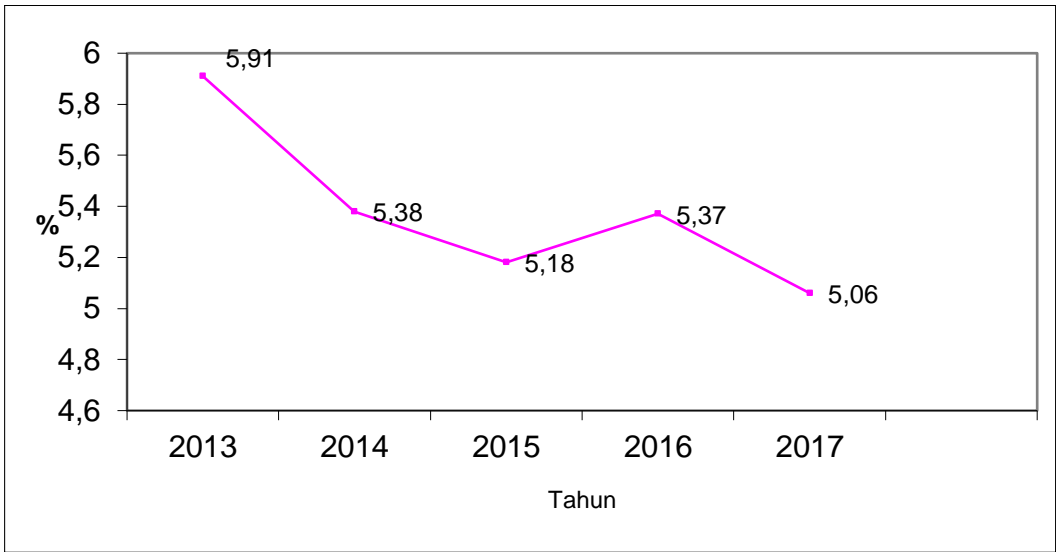
No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)
1	2013	16,05
2	2014	17,77
3	2015	19,39
4	2016	20,77
5	2017	22,11

Sumber : BPS, 2018.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2013 – 2017 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbarui, mengalami fluktuasi dari 5,91 % pada tahun 2013, lalu 5,38 % pada tahun 2014,

kemudian melambat menjadi 5,18 % pada tahun 2015, naik menjadi 5,37% pada tahun 2016 dan tahun 2017 turun menjadi 5,06%.



Sumber : BPS, 2018.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang 2013-2017

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2013 – 2017

NO	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,89	1,75	3,54	3,32	1,86
2	Pertambangan dan Penggalian	5,90	4,52	1,71	2,94	4,20
3	Industri Pengolahan	10,93	7,44	5,52	5,79	4,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,65	3,32	1,50	4,84	4,91
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,29	1,81	1,33	2,17	6,51
6	Konstruksi	5,42	5,08	5,93	6,32	6,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,13	3,52	3,99	5,28	6,09
8	Transportasi dan Pergudangan	8,56	8,55	8,54	6,61	6,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	7,5	6,60	6,02	6,35
10	Informasi dan Komunikasi	7,95	13,04	9,45	8,09	11,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	5,23	8,44	9,06	5,89
12	Real Estate	7,7	7,18	7,35	6,56	6,49
13	Jasa Perusahaan	12,06	8,36	9,74	10,18	8,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,73	1,67	4,24	2,22	2,57
15	Jasa Pendidikan	9,41	10,17	7,10	6,45	7,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	7,10	11,78	6,92	9,78	8,60

NO	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
	Sosial					
17	Jasa lainnya	9,22	8,51	3,29	8,64	8,79
	PDRB	5,91	5,38	5,03	5,40	5,06

Sumber : BPS, 2018.

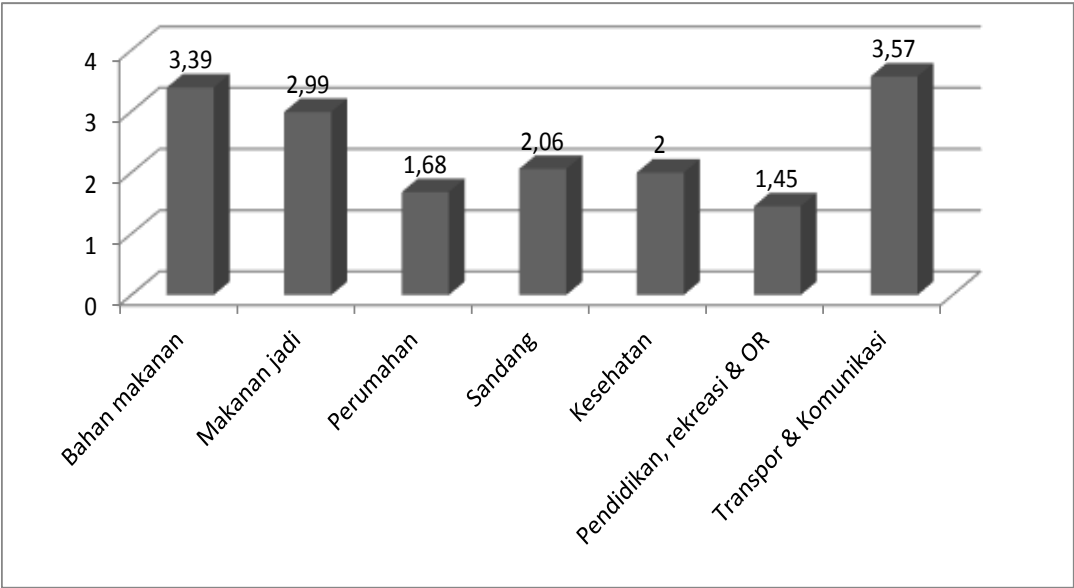
e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi dan distribusi barang juga jasa, serta peredaran uang di suatu daerah.

Selama tahun 2018, laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 2,66 persen, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang laju inflasinya sebesar 3,6 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,82 persen dan lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional sebesar 3,13 persen.

Selama periode Januari-Desember 2018 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2018 sebesar 0,95 persen. Inflasi terendah terjadi pada Agustus 2018 sebesar minus 0,22 persen (terjadi deflasi).

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2018 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2018 tertinggi pada kelompok transportasi sebesar 3,57%, Kelompok bahan makanan 3,39%, kelompok makanan jadi sebesar 2,99%, kemudian kelompok sandang sebesar 2,06%, diikuti kelompok kesehatan 2,00%, kelompok perumahan sebesar 1,68%, dan terakhir kelompok pendidikan sebesar 1,45%.



Sumber : BPS, 2018.

Gambar 3.2

Grafik Laju Inflasi Tahun 2018 Menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang

pada tahun 2018 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Meskipun diharapkan perekonomian tahun 2020 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.

Melihat kondisi ini maka tantangan ke depan dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan.

Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Target indikator ekonomi makro tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2020

No.	Indikator Ekonomi	Target
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	5,1 – 5,6 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 26,70 Juta
3	Inflasi	3,5 ± 1 %

Sumber : Bappeda dan Litbangda, 2018.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi, dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun.

Untuk meningkatkan kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, pemungutan pajak MBLB dengan teknologi informasi atau komputerisasi);
- d. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah;
- e. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti tarif, NJOP dsb;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- g. Peningkatan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- h. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah.

Realisasi pendapatan tahun 2017-2018 dan target pendapatan daerah tahun 2019-2020 yang meliputi PAD, perimbangan dan lain-lain pendapatan yang Sah, dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2018 dan Target 2019
serta Proyeksi Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	403.561.238.310	325.098.327.236	427.614.179.270	399.230.445.000	427.176.576.150
1	Pajak Daerah	112.344.030.430	124.444.072.963,00	139.331.510.000	153.812.696.000	171.160.239.150
2	Retribusi Daerah	20.445.297.126	18.186.191.392,00	33.972.851.270	45.249.771.000	37.940.604.000
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.805.304.738	28.634.358.666,00	25.560.305.000	24.774.158.000	29.044.666.000
4	Lain-lain PAD Yang Sah	249.966.606.016	153.833.704.215,00	228.749.513.000	175.393.820.000	189.031.067.000
II	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	1.407.243.138.226	1.398.132.841.570	1.538.049.441.000	1.570.286.969.800	1.576.048.341.818
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	45.499.673.539	36.431.591.975,00	36.150.173.000	37.750.315.832	37.865.526.116
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.091.002.259.000	1.169.421.171.968	1.175.067.333.702
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	257.495.109.687	301.160.637.595	363.115.482.000	363.115.482.000	363.115.482.000
4	Dana Insentif Daerah (DID)	44.220.622.000		47.781.527.000		
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	460.531.639.322	581.273.629.232	644.163.935.000	653.267.944.000	663.878.308.000
1	Hibah	3.801.511.675	91.762.241.127	109.619.800.000	109.619.800.000	109.619.800.000
2	Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov. Dan Pemerintah Daerah Lainnya	151.472.357.647	154.791.322.105	151.472.358.000	160.576.367.000	171.186.731.000
3	Dana penyesuaian dan otsus	-		-	-	-
4	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.643.871.000	9.359.234.000	-	-	-
	Dana Desa	289.613.899.000	325.360.832.000	383.071.777.000	383.071.777.000	383.071.777.000
	J U M L A H	2.271.336.015.858	2.304.504.798.038	2.609.827.555.270	2.622.785.358.800	2.667.103.225.968

Sumber : BPPKAD, 2019

Kenaikan PAD Tahun 2018 dibandingkan dengan PAD Tahun 2017 tersebut berasal dari :

1. Pajak daerah mengalami peningkatan dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah atau pendataan wajib pajak baru dan pemutakhiran subjek dan objek pajak serta dilaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak untuk peningkatan kesadaran dalam melaporkan omzet dan pembayaran pajak;
2. Retribusi Daerah mengalami penurunan dikarenakan pengaruh yang signifikan dari retribusi pelayanan pasar karena pada Tahun 2017 ada realisasi peningkatan yang sangat besar dari retribusi penempatan kios pertama di Pasar Secang, sedangkan pada Tahun 2018 tidak ada kontribusi dari izin penempatan kios pertama di Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan disebabkan meningkatnya bagi hasil laba BUMD terutama di

- Sektor Perbankan seperti Bapas, Bank Jateng dan BPR/BKK ini menunjukkan semakin membaiknya manajemen pengelolaan perbankan.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor, antara lain penerimaan bunga deposito yang mengalami penurunan sangat signifikan ini menggambarkan bahwa perencanaan penganggaran belanja Tahun 2018 lebih baik dari Tahun 2017 dengan kata lain menurunnya SILPA Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun 2017.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud, ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerjanya.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Penggunaan dana belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, partai politik, serta belanja tidak terduga.

Kebijakan belanja pegawai diasumsikan pada tahun 2020 sesuai dengan pidato presiden pada Bulan Agustus 2018 pada penyampaian Nota Keuangan diasumsikan kenaikan gaji pegawai sebesar 5 % dan dianggarkan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji 13 untuk PNS dan CPNS, dialokasikan juga gaji CPNS sebanyak 259 beserta gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya bagi CPNS. Asumsi ini belum menganggarkan biaya pegawai yang bersumber dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Surat Kementerian PAN & BR Nomor B/212/FP3K/M.SM.01.00/2019, bahwa penganggaran gaji dan tunjangan P3K dibiayai oleh APBD.

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa guna percepatan pembangunan di desa sesuai kewenangannya.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang.

Rincian perkembangan alokasi belanja dari tahun 2017 s.d. 2019 dan proyeksi tahun 2020-2021 disajikan dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Tahun 2017 - 2018, Target Tahun 2019
dan Proyeksi Tahun 2020 - 2021

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
2	BELANJA DAERAH					
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.440.436.939.257	1.469.755.920.226	1.618.062.669.100	1.646.019.388.290	1.648.886.034.690
	1 Belanja Pegawai	862.787.039.594	843.116.457.075	900.637.044.000	880.097.036.420	880.097.036.420
	2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	3 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	4 Belanja Hibah	38.032.365.000	55.322.664.784	65.877.835.000	71.312.070.000	73.224.960.000
	5 Belanja Bantuan Sosial	41.991.275.000	40.944.365.000	25.804.725.000	43.343.750.000	43.343.750.000
	6 Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota/Desa	13.864.123.170	15.546.920.254	19.200.797.000	21.852.832.770	22.806.589.170
	7 Belanja Bantuan Keuangan	479.610.746.506	513.879.513.113	601.542.268.100	624.413.699.100	624.413.699.100
	8 Belanja Tidak Terduga	4.151.389.987	946.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	1.011.004.215.484	1.018.093.312.487	1.052.828.042.000	1.078.844.532.498	1.074.028.757.505
	Belanja pegawai	82.845.345.123	82.099.898.924	113.682.955.595		
	Belanja barang dan jasa	424.757.302.457	434.066.204.801	541.337.529.859		
	Belanja modal	503.401.567.904	501.927.208.762	397.807.556.546		
	Jumlah Belanja	2.451.441.154.741	2.487.849.232.713	2.670.890.711.100	2.724.863.920.788	2.722.914.792.195

Sumber : BPPKAD, 2019.

Pada prinsipnya, kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas serta efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA),

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan. Pada Tahun 2020, penyertaan modal belum mengakomodir penyertaan modal untuk Bapas dan PDAM.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2017 s.d. 2021 dapat dilihat dalam tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi Pembiayaan Tahun 2017-2018, Target Tahun 2019,
dan Proyeksi Tahun 2020-2021

No	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	521.583.993.264	434.704.300.294	71.223.715.830	117.782.561.988	71.515.566.227
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	457.569.190.778	303.453.312.294	71.223.715.830	117.782.561.988	71.515.566.227
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	63.994.404.086	131.250.988.000	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0		0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	20.398.400		0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0		0	0	0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan	0		0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	521.583.993.264	434.704.300.294	71.223.715.830	117.782.561.988	71.515.566.227
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	38.025.542.086	25.755.000.000	10.204.000.000	15.704.000.000	15.704.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	24.723.542.086	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	13.302.000.000	25.755.000.000	10.204.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0		0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.025.542.086	25.755.000.000	10.204.000.000	15.704.000.000	15.704.000.000
	Pembiayaan neto	483.558.451.178	408.949.300.294	61.019.715.830	102.078.561.988	55.811.566.227
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)					

Sumber : BPPKAD, 2019.

Secara keseluruhan, postur APBD Tahun 2017 – 2018, target tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020-2021 dapat dilihat dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi APBD Tahun 2017-2018, Target Tahun 2019, dan Proyeksi Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018 *)	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	403.561.238.310	325.098.327.236	427.614.179.270	399.230.445.000	427.176.576.150
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	112.344.030.430	124.444.072.963	139.331.510.000	153.812.696.000	171.160.239.150
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.445.297.126	18.186.191.392	33.972.851.270	45.249.771.000	37.940.604.000
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.805.304.738	28.634.358.666	25.560.305.000	24.774.158.000	29.044.666.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	249.966.606.016	153.833.704.215	228.749.513.000	175.393.820.000	189.031.067.000
1.2	Bagian Dana Perimbangan	1.407.243.138.226	1.398.132.841.570	1.538.049.441.000	1.570.286.969.800	1.576.048.341.818
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	45.499.673.539	36.431.591.975	36.150.173.000	37.750.315.832	37.865.526.116
1.2.2	D A U	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.091.002.259.000	1.169.421.171.968	1.175.067.333.702
1.2.3	D A K	257.495.109.687	301.160.637.595	363.115.482.000	363.115.482.000	363.115.482.000
1.2.4	DID	44.220.622.000		47.781.527.000		
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	460.531.639.322	581.273.629.232	644.163.935.000	653.267.944.000	663.878.308.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.801.511.675	91.762.241.127	109.619.800.000	109.619.800.000	109.619.800.000
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lain	151.472.357.647	154.791.322.105	151.472.358.000	160.576.367.000	171.186.731.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lain	15.643.871.000	9.359.234.000			
1.3.6	Dana Desa	289.613.899.000	325.360.832.000	383.071.777.000	383.071.777.000	383.071.777.000
A	JUMLAH PENDAPATAN	2.271.336.015.858	2.304.504.798.038	2.609.827.555.270	2.622.785.358.800	2.667.103.225.968

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018 *)	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.440.436.939.257	1.469.755.920.226	1.618.193.073.200	1.646.019.388.290	1.648.886.034.690
2.1.1	Belanja Pegawai	862.787.039.594	843.116.457.075	900.637.044.000	880.097.036.420	880.097.036.420
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	38.032.365.000	55.322.664.784	65.877.835.000	71.312.070.000	73.224.960.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	41.991.275.000	40.944.365.000	25.804.725.000	43.343.750.000	43.343.750.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov. Kab. Kota dan Desa	13.864.123.170	15.546.920.254	19.329.767.100	21.852.832.770	22.806.589.170
2.1.7	Belanja Bant. Keuangan kepada Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	479.610.746.506	513.879.513.113	601.543.702.100	624.413.699.100	624.413.699.100
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.151.389.987	946.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.618.062.669.100	1.646.019.388.290	1.648.886.034.690
2.2	Belanja Langsung	1.011.004.215.485	1.018.093.312.487	1.052.828.042.000	1.078.844.532.498	1.074.028.757.505
2.2.1	Belanja Pegawai	82.845.345.123	82.099.898.924	113.682.955.595		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	424.757.302.457	434.066.204.801	541.337.529.859		
2.2.3	Belanja Modal	503.401.567.905	501.927.208.762	397.807.556.546		
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.011.004.215.485	1.018.093.312.487	1.052.828.042.000	1.078.844.532.498	1.074.028.757.505
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.451.441.154.742	2.487.849.232.713	2.671.021.115.200	2.724.863.920.788	2.722.914.792.195
	SURPLUS/(DEFISIT)	(180.105.138.884)	(183.344.434.675)	(61.193.559.930)	(102.078.561.988)	(55.811.566.227)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	521.583.993.264	434.704.300.294	71.397.559.930	117.782.561.988	71.515.566.227
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	457.569.190.778	303.453.312.294	71.397.559.930	117.782.561.988	71.515.566.227

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018 *)	Target 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	63.994.404.086	131.250.988.000	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	20.398.400				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah					
3.1.7	Penerimaan Hasil Penarikan					
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	521.583.993.264	434.704.300.294	71.397.559.930	117.782.561.988	71.515.566.227
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	38.025.542.086	25.755.000.000	10.204.000.000	15.704.000.000	15.704.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	24.723.542.086			10.000.000.000	10.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	13.302.000.000	25.755.000.000	10.204.000.000	5.704.000.000	5.704.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.025.542.086	25.755.000.000	10.204.000.000	15.704.000.000	15.704.000.000
	Pembiayaan Netto	483.558.451.178	408.949.300.294	61.193.559.930	102.078.561.988	55.811.566.227
G	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	303.453.312.294	225.604.865.619			

*) Belum diaudit

Sumber : BPPKAD, Bappeda dan Litbangda, 2019.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Tahun 2020 adalah tahun perencanaan pertama RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2020 berpedoman mengacu kepada (1) permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, (2) hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2018, (3) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024, serta (4) arah dan prioritas kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Visi Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Maju dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”. Adapun Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata, dalam terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Berdaya Saing, yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan ditengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Amanah, yang dimaksud adalah keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan *transparansi, partisipasi, inovasi* dan *akuntabel*, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahteradan Berakhlak Mulia

2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pencapaian perwujudan visi dan misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dijabarkan dalam Tujuan dan sasaran pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran daerah sebagaimana uraian berikut :

1. Tujuan pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
 - a) meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan;
 - b) meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan.
2. Tujuan kedua adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat, dengan sasaran:
 - a) menurunnya jumlah PMKS;
 - b) meningkatnya ketahanan pangan daerah;
 - c) menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
 - d) meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas.
3. Tujuan ketiga adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender, dengan sasaran meningkatnya keberdayaan gender.
4. Tujuan keempat adalah meningkatnya daya saing daerah, dengan sasaran :
 - a) tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik;
 - b) meningkatnya cakupan layanan infrastruktur;
 - c) meningkatnya daya saing ekonomi daerah.
5. Tujuan kelima meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan *akuntable*, dengan sasaran:
 - a) meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - b) meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c) meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
 - d) meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - e) meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian.

Selengkapnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang
 Tahun 2020

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH					
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja tujuan dan sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0-100)	69,34
		Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan;	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,86
			Harapan Lama Sekolah	tahun	12,76
			Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	94,41
		Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan.	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52
	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat		. Inflasi	persen	2,5-4,5
			Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.400,64
			.Angka Kemiskinan	persen	9,93
		Menurunnya jumlah PMKS;	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah;	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	78,42
		Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	63,87
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	2,4-3,0
	Meningkatnya pem-bangunan berbasis gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	93,21
		Meningkatnya	Indeks	Angka (0-	69,33

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH					
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja tujuan dan sasaran	Satuan	Target
		keberdayaan gender	Pemberdayaan Gender (IDG	100)	
			Kabupaten Layak Anak		Nindya
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah		Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	persen	66,95
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,1-5,6
			PDRB Perkapita	juta rupiah	26,70
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik;	IKLH	angka (0-100)	72,12
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur;	Cakupan Pembangunan Wilayah	persen	61,79
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	255,56
			Peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	milyar rupiah	150,89
			Peningkatan nilai PDRB sektor perindustrian pengolahan	milyar rupiah	372,47
			Peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	52,32
			Pertumbuhan Investasi	persen	5,00
			Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	persen	82,97
			Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,68
Meningkatkan	Meningkatnya		Indeks Reformasi	persen	63,82

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH					
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja tujuan dan sasaran	Satuan	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	tata kelola pemerintah-an yang bersih dan <i>akuntabel</i>		Birokrasi (IRB)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan ;	Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	63,03 (B)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;	Indeks SPBE	angka (0-5)	2
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;	Opini BPK	-	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik;	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	84,23
		Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian.	Indeks Merit System	angka (0-1)	0,55

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah secara sinergis, berkesinambungan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian misi adalah sebagai berikut.

- a. Memperhatikan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu :
 - 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
 - 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
 - 3. Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;
 5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
- b. Mendasarkan arah dan prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 yang diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas sebagai berikut:
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
 3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional tahun 2020 dan arah dan prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2020, maka prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2020 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan akses layanan Pendidikan
- b. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Meningkatkan kualitas Puskesmas dan Rumah sakit dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan
- e. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau
- f. Meningkatkan Ketersediaan Pangan
- g. Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan
- h. Meningkatkan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan
- i. Meningkatkan layanan terhadap masyarakat
- j. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memenuhi standar keamanan informasi

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 diarahkan untuk “Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung Peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi”, dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan :

- a. Pemenuhan akses layanan Pendidikan, difokuskan kepada :
 1. pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi;
 2. meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;
 3. penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal;
 4. pencapaian wajib belajar 9 tahun;
 5. pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi;
 6. penguatan basis data pendidikan; dan
 7. penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan.
 8. Bantuan Pembangunan tempat ibadah

- b. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, difokuskan pada :
 - 1. meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri;
 - 2. peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - 3. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji
- c. Meningkatkan kualitas Puskesmas dan Rumah sakit dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan difokuskan pada :
 - 1. mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap;
 - 2. peningkatan pelayanan rumah sakit umum daerah;
 - 3. peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan
 - 1. bantuan ambulan desa;
 - 2. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan;
 - 3. peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
 - 4. pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
 - 5. peningkatan upaya kesehatan masyarakat;
 - 6. optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes “Semesta
- e. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau
 - 1. RTLH *Plus* untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin
 - 2. pemenuhan akses air bersih melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan/pedesaan;
 - 3. pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat
 - 4. penataan hunian kumuh
- f. Meningkatkan Ketersediaan Pangan, difokuskan pada :
 - 1. pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik;
 - 2. bantuan modal dan alat bagi warga miskin (Petani)
- g. Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan, difokuskan pada :
 - 1. peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana ekonomi);
 - 2. peningkatan aksesibilitas dan konektifitas di seluruh wilayah kabupaten magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- h. Meningkatkan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, difokuskan pada :
 - 1. pengelolaan sampah mandiri (3R) dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
 - 2. penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
- i. Meningkatkan layanan terhadap masyarakat
 - 1. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel

2. sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan
 3. peningkatan layanan publik;
- j. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memenuhi standar keamanan informasi melalui Pengembangan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi serta pengelolaan sarana informatika.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2020 yaitu:

- a. Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,34
- b. Inflasi sebesar 2,5 – 4,5
- c. Pengeluaran Perkapita Riil yang disesuaikan sebesar 9400,64 ribu rupiah
- d. Angka Kemiskinan turun menjadi sebesar 9,93%
- e. Indek Pembangunan Gender sebesar 93,21
- f. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,1-5,6 %
- g. PDRB Per Kapita sebesar 26,70 juta rupiah
- h. Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan sebesar 66,95%
- i. Indek Reformasi Birokrasi sebesar 65,53

Rencana pembangunan daerah tahun 2020 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Kabupate Magelang yaitu:

- a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan akhlak mulia
- b. Peningkatan pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya dan peningkatan mutu pendidikan
- c. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan terjangkau
- d. Penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi
- e. Pemanfaatan sektor unggulan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana public
- g. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat
- h. Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel
- i. Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
- j. Peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi

Selain itu, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Magelang juga dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2020.

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2020 tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten

Magelang telah selaras. Keselarasan tersebut tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional

	Uraian		Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Magelang
	Tema/fokus Pembangunan		Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas		Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manus		Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas SDM, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
	Prioritas Pembangunan	1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;	1	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;	1	Pemenuhan akses layanan Pendidikan
				2	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;	2	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
						3	Meningkatkan kualitas Puskesmas dan Rumah sakit dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
						4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan

	Uraian		Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Magelang
						5	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau
		2	Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;	3	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;	6	Meningkatkan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan
		3	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;			7	Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan
		4	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;			8	Meningkatkan Ketersediaan Pangan
		5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	4	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	9	Meningkatkan layanan terhadap masyarakat

	Uraian		Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Magelang
						10	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memenuhi standar keamanan informasi
	Sasaran Pembangunan						
a.	Pertumbuhan ekonomi		5,3-5,6%		5,4 – 5,7%		5,1 - 5,6
b.	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,8-5,1%		4,33%		2,4 – 3,0
c.	Angka kemiskinan		8,5-9,0%		9,81-8,8%		9,93
d.	Rasio gini		0,375-0,380		0,34		‘-
e.	Indeks Pembangunan Manusia		72,51		72,00		69,34

4.3 Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD memuat kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan/ prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD tersebut yaitu

1. Penyusunan APBD harus tepat waktu.
 - a. APBD Kabupaten Magelang tahun 2018 dan 2019 telah ditetapkan tepat waktu. Diharapkan APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan tepat waktu juga. Berkaca dari keterlambatan penetapan APBD tahun anggaran 2017 sehingga Pemkab Magelang terkena sanksi dan kehilangan potensi penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan (pada tahun 2016 Pemkab mendapat DID sebesar 40 Milyar Rupiah dan tahun 2018 menerima DID sebesar 47 Milyar Rupiah)
 - b. Keterlambatan penetapan APBD akan berpengaruh pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - c. Saran DPRD : penyerahan KUA PPAS tahun anggaran 2020 agar tidak terlambat dan diserahkan kepada DPRD paling lambat bulan Juli 2019
2. Pengelolaan Anggaran Belum Maksimal
 - a. APBD tahun anggaran 2018 sebesar 2,7 Triyun Rupiah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 374 Milyar Rupiah
 - b. APBD tahun anggaran 2019 sebesar 2,8 Trilyun Rupiah dan PAD sebesar 426 Milyar Rupiah (proporsi PAD kurang lebih 15%). Proporsi PAD masih rendah untuk itu perlu ditingkatkan.
 - c. Untuk tahun anggaran 2020 PAD harus naik signifikan utamanya yang bersumber dari PBB Perkotaan, PPJU, BPHTB, Retribusi Pasar dan Metrologi, RSUD, BUMD, Menara Telekomunikasi, Parkir dan sebagainya.

- d. Komponen Belanja Modal didalam APBD Tahun Anggran 2019 baru sekitar 20% dari APBD, idealnya 30%
 - e. Penyerapan anggaran APBD tahun anggaran 2018 sebesar 86,35%
 - f. Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu (SILPA):
 - tahun 2013 sebesar 417 Milyar Rupiah,
 - tahun 2014 sebesar 373 Milyar Rupiah,
 - tahun 2015 sebesar 492 Milyar Rupiah,
 - tahun 2016 sebesar 457 Milyar Rupiah,
 - tahun 2017 sebesar 303 Milyar Rupiah,
 - tahun 2018 kurang lebih 300 Milyar Rupiah
 - g. Besarnya SILPA cerminan APBD kurang sehat, hal ini menggambarkan perencanaan dan kinerja yang kurang baik.
 - h. APBD tahun anggaran 2020 agar dirancang Belanja Modal menjadi 25%. Proporsi belanja modal yang semakin besar menggambarkan keberpihakan APBD kepada masyarakat. Belanja ini digunakan untuk mebiayai program kerja yang tertunda dan progam kerja strategis bagi public.
3. Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 - a. WTP sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah oleh BPK
 - b. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, BPK telah memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemkab Magelang. Untuk itu tahun 2019 dan tahun 2020 penghargaan tersebut harus dipertahankan.
 4. Reformasi Birokrasi
 - a. Masih banyaknya keluhan atas kualitas pelayanan, dan lamanya perizinan perlu mendapat perhatian yang serius. Proses ini harus ditata kembali agar pemkab Magelang menjadi kabupaten yang ramah pelayanan
 - b. Banyaknya kekosongan jabatan dan dijabat oleh Pelaksanan Tugas (Plt) selama bertahun-tahun, berdampak pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
 - c. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Bupati agar memilih pejabat yang kompeten, berintegritas dan professional
 5. Prioritas Program Pendidikan, kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan
 - a. Alokasikan anggaran yang cukup untuk kesehatan dan pendidikan sebagai urusan wajib
 - b. Sinergi APBD dan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan utamanya untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan program pemberdayaan
 6. Prioritas pada bidang unggulan : pertanian, UKM dan pariwisata
 - a. Untuk peningkatan daya saing daerah, difokuskan pada penguatan sentra-sentra produk pertanian, perikanan darat dan UKM
 - b. Untuk pariwisata focus pada penataan obyek wisata unggulan

7. Pembangunan Infrastruktur
 - a. Infrastruktur jalan/jembatan/irigasi harus dalam kondisi baik
 - b. Pemeliharaan infrastruktur jalan evakuasi perlu diperhatikan, mengingat kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana
 - c. Kualitas bangunan harus baik dan diawasi dengan ketat
 - d. Manajemen proses lelang harus direncanakan dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan
8. Penguatan Pemerintah Desa
 - a. Perencanaan pemerintah desa yang dituangkan dalam RPJMDes harus selaras dengan perencanaan kabupaten yang dituangkan dalam RPJMD
 - b. Fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan anggaran desa harus diintensifkan agar program kerja pemerintah desa sinergis dengan pemerintah kabupaten, serta tercipta tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
9. Pembangunan *Islamic Centre* dan *Sport centre* tahun 2020, sebagai program prioritas Bupati agar direncanakan dengan matang dari sisi kemanfaatan, lokasi dan penganggarannya.
10. Pembangunan Pasar
 - a. Pembangunan Pasar Kaliangkrik di tahun 2019 ini merupakan proyek besar dan strategis. Pastikan program tersebut sudah direncanakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana
 - b. Untuk pembangunan program-program besar perlu penanganan matang dan pengawasan serius
 - c. Mendorong revitalisasi pasar tradisional lainnya seperti pasar Borobudur, pasar windusari dan pasar salaman

Disamping catatan penting di atas ada beberapa isu-isu menonjol yang perlu mendapat perhatian Bupati:

1. Penataan Kawasan Borobudur
 - a. Penataan tata ruang dengan menyesuaikan perencanaan kawasan oleh pemerintah pusat
 - b. Penataan pasar, terminal dan PKL yang kondisinya kumuh, hal ini tidak mendukung Borobudur sebagai destinasi pariwisata internasional
2. Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang-Yogya
 - a. Sejauh mana progres rencana pembangunan jalan tol Semarang-Yogya yang trasenya melintasi Kabupaten Magelang
 - b. Pembangunan jalan tol akan berdampak pada pertumbuhan kawasan, untuk itu perlu kajian mendalam agar pembangunan jalan tol bermanfaat bagi perekonomian daerah
3. Pemanfaatan Obyek Wisata Kalibening

Pembangunan obyek wisata kalibening sudah selesai, untuk itu segera difungsikan guna peningkatan daya tarik wisata, pemenuhan kebutuhan rekreatif masyarakat dan peningkatan PAD

4. Pasar Muntilan dan UKM Centre segera difungsikan
 - a. Hasil-hasil pembangunan agar segera difungsikan agar dapat dinikmati masyarakat
 - b. Dengan dibangunnya pasar muntilan diharapkan dapat mengatasi masalah parker, pedagang eyek dan pedagang kaki lima yang berada disekitar pasar Muntilan
 - c. Pasar-pasar yang baru selesai dibangun agar dikelola secara professional dengan menerapkan e-retribusi untuk peningkatan PAD
5. *Smart City*
 - a. Program ini sudah berjalan 2 tahun namun belum dirasakan implementasi/manfaatnya
 - b. Perlu keseriusan dalam pelaksanaannya untuk kepentingan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
6. Penegakkan aturan Perda
Belum optimalnya penegakkan perda terkait pelanggaran tata ruang dan perizinan toko modern
7. Pemilu tahun 2019
 - a. Diharapkan akan berjalan dengan baik, suasana yang kondusif, aman dan partisipasi masyarakat tinggi.
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) agar netral dan fokus pada program/kegiatan tahun anggaran 2019

DPRD juga mengusulkan agar pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat mendapat perhatian Bupati. Usulan yang diajukan oleh DPRD sebesar 70 Milyar Rupiah dengan komposisi alokasi : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 50%, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) 30% dan Hibah/Bansos 20%

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Sebagaimana tertuang dalam Bab 3 tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.2,622 trilyun yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 399,230 milyar dan Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,570 trilyun, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.653,268 milyar. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2020.

Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020

No	Uraian	Rp
A	Belanja Tidak Langsung	1.647.932.278.290
1	Belanja Pegawai	880.097.036.420
2	Belanja Bunga	-
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	73.224.960.000
5	Belanja Bantuan Sosial	43.343.750.000
6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov. Kab. Kota dan Desa	21.852.832.770
7	Belanja Bant. Keuangan kepada Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	624.413.699.100
8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
B	Belanja Langsung	1.076.931.638.598

Mendasarkan kerangka pendanaan tersebut, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program pendidikan sekolah dasar.

Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan BOS SD, Pengembangan Kurikulum SD, Penyelenggaraan MBS SD, Fasilitasi dan Pengembangan SD, Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik, Pengembangan dan Penjaminan Mutu SD, Peningkatan Mutu

Sarana Prasarana Pendidikan SD,

- b. program pendidikan sekolah menengah pertama
Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan BOS SMP, Pengembangan dan penjaminan mutu SMP, Pengembangan Kurikulum SMP, Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik SMP, Fasilitasi dan pengembangan SMP, Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMP, ;
- c. program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
Kegiatan prioritas diarahkan pada Pembelajaran PAUD, Fasilitasi dan pengembangan PAUD, Pendampingan Operasional BOP PAUD, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C, Peningkatan mutu sarana prasarana Paud dan Dikmas, Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas;
- d. program pembinaan guru dan tenaga kependidikan
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan GTK, Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidik, Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi, BOSDA untuk Sekolah Negeri, .

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pelayanan kesehatan
Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Bahan dan Pemeriksaan Laboratorium, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas, Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin, Jaminan Persalinan, Peningkatan Mutu Pelayanan FKTP, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Rumah Sakit Kelas D dan C, ;
- b. Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit
Kegiatan diarahkan pada Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah, Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit, Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit, Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit, Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan, ;
- c. program pencegahan dan pengendalian penyakit
Kegiatan diarahkan pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Penanggulangan kesehatan Jiwa Masyarakat, Bantuan Operasional Kesehatan, Pencegahan dan pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis, Penyelenggaraan Imunisasi;
- d. Program sumber daya kesehatan
Kegiatan diarahkan pada Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan, Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Pembinaan Pengelolaan BLUD;

- e. program kesehatan masyarakat
Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Gizi Keluarga, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Program yang akan dilaksanakan adalah:
- a. program peningkatan akses dan kualitas jalan
Kegiatan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan, Pembangunan dan Peningkatan Pelengkap jalan, Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Jalan dan pelengkap jalan, dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik;
 - b. program peningkatan layanan sumber daya air dan jaringan irigasi
Kegiatan diarahkan pada Pengembangan dan Penguatan Pengelola Irigasi dan SDA, Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi / Pembangunan Jaringan Irigasi, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. program peningkatan dan pengembangan bangunan gedung dan AMPL
Kegiatan diarahkan pada Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pembangunan Sarana Sanitasi, Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Minum, Peningkatan dan Pengembangan Layanan Sanitasi;
 - d. program pengembangan sarana dan prasarana ke-PU-an
Kegiatan diarahkan pada Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an, Fasilitasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengadaan / Pemeliharaan alat - alat laboratorium ke-PU-an;
 - e. program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Fasilitasi Informasi Tata Ruang, Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Penyusunan Dokumen Ketataruangan;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Program Pengembangan Kawasan Permukiman
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi dan Penataan Kawasan Permukiman, Penanganan Permukiman Kumuh, Pengendalian Kawasan Permukiman, dan Penyediaan PSU Permukiman;
 - b. program pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
Kegiatan diarahkan pada Pengendalian Perumahan, Pengembangan Perumahan Akibat Bencana, Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya, Perencanaan Perumahan, dan Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan diarahkan pada Mitigasi Bencana, Pelatihan pencegahan dan mitigasi, Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Manajemen Pusdalops PB, Manajemen penanganan Darurat Bencana, Manajemen Logistik dan peralatan bencana, Fasilitas rehabilitasi dan rekonstruksi, Pengadaan tanah, hunian dan huntap, Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana, Manajemen dan perencanaan penanggulangan Bencana,

b. program peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Politik Daerah, Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan;

c. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Kegiatan diarahkan pada Operasi Represif Non Yustisi, Deteksi Dini dan Pengendalian Massa, Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas, Pengamanan Obyek Vital dan Keramaian Daerah, Pengawasan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting dan Patroli Wilayah dan Pembinaan Masyarakat;

d. program penegakan perda

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Penanganan Perkara Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;

e. program penanggulangan kebakaran

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Penanggulangan Kebakaran, Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban;

6. Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program penanganan dan perlindungan PMKS

Kegiatan diarahkan pada Rehabilitasi Sosial, Penanganan PMKS Melalui Rumah Singgah, Perlindungan dan Jaminan Sosial;

b. program pemberdayaan sosial

Kegiatan diarahkan pada Penanganan Fakir Miskin, Pemberdayaan Sosial, Fasilitas Komda Lansia, Optimalisasi Data Kemiskinan, Fasilitas Program Bantuan Sosial Pangan.

5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. program pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan

kesempatan kerja

Kegiatan diarahkan pada Pelatihan Ketrampilan dan Sertifikasi Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan.

- b. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Hubungan Industrial, Pembinaan Pengupahan, Pembinaan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Peningkatan Kompetensi Pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan diarahkan pada Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi PUG), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak, dan Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan ketahanan pangan. Kegiatan diarahkan pada Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan, Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan, Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis.

4. Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengendalian pencemaran lingkungan dan gas rumah kaca
Kegiatan diarahkan pada Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca, Pengendalian Pencemaran Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah, Pengelolaan Laboratorium Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan, dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran;
- b. program peningkatan kapasitas dan tata lingkungan hidup
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup, Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup;
- c. program peningkatan kinerja pengelolaan sampah
Kegiatan diarahkan pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah, Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah, Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah;
- d. program peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim, Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana, Konservasi Kawasan Resapan Air, Konservasi Keanekaragaman Hayati.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pelayanan administrasi kependudukan
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk dan Fasilitasi Penerbitan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
- b. program pelayanan pencatatan sipil
Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran, serta Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
- c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data
Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan Fasilitasi & evaluasi Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Dokumen.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pemberdayaan masyarakat dan desa
Kegiatan diarahkan pada Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS), Penguatan kapasitas pengelola pasar desa, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pemerintah Desa dan Masyarakat, Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Pengembangan Swadaya Masyarakat, TNI Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya;
- b. program pembinaan pemerintahan dan kelembagaan desa
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penegasan Batas Desa, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Fasilitasi Pengisian Data Informasi Desa;
- c. program perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa
Kegiatan diarahkan pada Penguatan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada desa, Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aset desa.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program keluarga berencana
Kegiatan diarahkan pada Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana,

Integrasi Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja Melalui Momentum, Optimalisasi KIE dan Konseling KKBPK, Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

- b. program pembangunan ketahanan keluarga
Kegiatan diarahkan pada Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Advokasi dan KIE Kampung KB Bagi SKPD, Sosialisasi bagi Pokja Tingkat Kabupaten Pencanaan dan Evaluasi Kampung KB.

8. Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan diarahkan pada Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang dan Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor.
- b. program pengembangan jaringan prasarana angkutan jalan
Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Perhubungan, Pengelolaan Parkir, Survey Potensi Parkir, Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat;
- c. program peningkatan pengamanan dan keselamatan lalu lintas
Kegiatan diarahkan pada Pengamanan Lalu Lintas, Pengembangan Pelayanan Angkutan, Pembayaran Rekening LPJU, Pengelolaan LPJU, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan, Peningkatan Keselamatan LLAJ dan Fasilitasi Koordinasi LLAJ.

9. Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi
Kegiatan diarahkan pada Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK, Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK center, Pengelolaan penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;
- b. program pengelolaan aplikasi informatika
Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD, dan Penyelenggaraan ekosistem TIK;
- c. program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Kegiatan diarahkan pada Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau, Pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa, Diseminasi informasi melalui media publik, Fasilitasi pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Kegiatan diarahkan pada pengawasan koperasi, Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan daya saing Koperasi, dan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi;

b. peningkatan pemberdayaan usaha mikro

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Fasilitas promosi dan pameran produk usaha mikro, Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana bagi Usaha Mikro, Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Legalitas Usaha dan Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan.

11. Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pelayanan investasi

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Profil Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Magelang, Fasilitas Promosi dan Pemasaran Potensi Investasi dan Fasilitas dan koordinasi Kerjasama bidang Investasi (CJIBF);

b. program pemantauan dan pengendalian investasi

Kegiatan diarahkan pada Pengendalian, monitoring, evaluasi pelayanan perizinan dan penanganan, Pengaduan, Pengelolaan bahan dan data informasi perizinan;

c. program pelayanan perizinan

Kegiatan diarahkan pada Fasilitas Operasional Pelayanan Pendaftaran Perijinan dan Fasilitas Operasional Pelayanan Penerbitan Perijinan.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dan Implementasi IPTEK dalam Pembinaan Olah Raga.

b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Kelembagaan Pemuda dan Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pemuda.

13. Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan dan pengembangan statistik. Kegiatan diarahkan pada Penyusunan dokumen statistik sektoral dan Koordinasi pengintegrasian data tingkat Kabupaten.

14. Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program persandian dengan kegiatan diarahkan pada Pengelolaan persandian dan telekomunikasi.

15. Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan nilai budaya
Kegiatan diarahkan pada Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, Pertunjukan Seni Budaya, Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah, Pendataan Kesenian dan Pengadaan Tanah Gedung Kesenian;
- b. Program pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya
Kegiatan diarahkan pada Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Edukasi Berbasis Kebudayaan, Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya.

16. Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dengan kegiatan yang diarahkan pada Pelayanan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan, Promosi Perpustakaan dan Penyediaan Bahan Pustaka.

17. Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan dan Pengawasan Kearsipan;
- b. program pengelolaan dan pelestarian arsip
Kegiatan diarahkan pada Pengolahan Arsip Dinamis dan Statis dan Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan.

5.2.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan
Kegiatan diarahkan pada Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan, Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal, Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan, Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan;
- b. program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan sistem penyuluhan
Kegiatan diarahkan pada Gerakan Makan Ikan (Gemarikan), Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP);

2. Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program Peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata
Kegiatan diarahkan pada Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pelayanan Kepariwisata, Penataan Kawasan Pariwisata Daya Tarik Wisata, Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha

Pariwisata dan Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ketep Pass;

- b. program pengembangan kelembagaan, pemasaran, dan ekonomi kreatif

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan Kelembagaan Pariwisata, Pemasaran dan promosi Pariwisata, dan Pembinaan Komunitas/ Pelaku Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan diarahkan pada Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian, Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat, Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan, Pengembangan Benih Tanaman Unggulan, Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek, Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT), Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT), Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT);

- b. program peningkatan produksi hasil peternakan

Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Agribisnis Peternakan, Pembinaan Kelompok ternak, Pengembangan itik Magelang, Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan, Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan, Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan, dan Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan;

- c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan, Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura, Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat, Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan, Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT), Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT), Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar, dan Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah;

- d. Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian

Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif, Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian, Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian, Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman, Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk, Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT) dan Pembiayaan Pertanian;

- e. Program pemberdayaan sumber daya manusia pertanian

Kegiatan diarahkan pada Penumbuhan, Pengembangan dan

- Penguatan Kapasitas Lembaga Petani, Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan, Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian, Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian, Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT);
- f. program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
Kegiatan diarahkan pada Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban, Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik, Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan, Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan, dan Peningkatan Pelayanan Puskesmas.
4. Perdagangan
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
- a. program peningkatan dan pengembangan perdagangan
Kegiatan diarahkan pada Pengawasan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan, Pengembangan kerjasama dan promosi perdagangan, dan Pengawasan Pita Cukai Legal dan Ilegal (DBCHT);
- b. program pembinaan dan penataan pasar
Kegiatan diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana pasar, Pengelolaan Pendapatan Pasar, dan Pemberdayaan Pasar;
- c. program Peningkatan dan pengembangan pelayanan kemetrolagian
Kegiatan diarahkan pada Pendataan UTTP Metrologi, Peningkatan Pelayanan Metrologi, Peningkatan Pengawasan Metrologi, dan Fasilitasi Penilaian Metrologi.
5. Perindustrian
Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan industri, dengan kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Industri Makanan Minuman, Peningkatan Kapasitas Industri Logam Kimia Elektronika, Peningkatan Kapasitas Industri Kerajinan dan Aneka, Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Fasilitasi Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil.

5.2.4 Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan

1. Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan diarahkan pada Perencanaan Umum Pembangunan Daerah, Pengelolaan Data dan Laporan Pembangunan Daerah, Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. program perencanaan pembangunan bidang tata ruang, prasarana wilayah dan infrastruktur
Kegiatan diarahkan pada Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Infrastruktur Daerah;
- c. program perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan;

- d. program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya

Kegiatan diarahkan pada Perencanaan Sektor Pemerintahan Umum, Perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial dan Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan serta Perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan.

2. Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan pendapatan daerah

Kegiatan diarahkan pada Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak, Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Penerbitan SPPT dan DHKP, Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah, Pemungutan dan Intensifikasi PAD dan PBB, Pengelolaan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, dan Penyelesaian Pajak dan Retribusi Daerah;

- b. program pengelolaan keuangan daerah

Kegiatan diarahkan pada Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penilaian RKA dan Pergeseran Anggaran, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Penelitian DPA/DPPA-SKPD, Pengelolaan Kas Daerah, Pengendalian Perbendaharaan, Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam rangka SAKD, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan KUA dan PPAS;

- c. program pengelolaan aset daerah

Kegiatan diarahkan pada Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Penyusunan Peraturan Barang Milik Daerah dan Penyusunan RKBMD, Manajemen Pengelolaan BMD, Penyusunan Kajian Investasi, Pengolahan Data Barang Milik Daerah, dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program informasi dan pengadaan pegawai

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Kebutuhan Formasi, Validasi Database Kepegawaian ASN, Pengelolaan Manajemen Pengadaan dan Pelayanan ASN, Pengangkatan CPNS menjadi PNS;

- b. program pengembangan sumber daya aparatur

Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Diklat Dasar dan Penjenjangan, Pengembangan kompetensi kualifikasi pendidikan ASN dan Sertifikasi, Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional, Penataan ASN, Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN, Fasilitasi Kepangkatan, Pengembangan Jabatan fungsional, dan Penyelenggaraan Bintek;

- c. program kesejahteraan dan pembinaan pegawai
 Kegiatan diarahkan pada Fasilitasi Pemberhentian ASN, Fasilitasi Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan ASN, Penegakan Disiplin ASN dan Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian.
4. Penelitian dan Pengembangan
 Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengkajian daerah, dengan kegiatan diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Sosial dan Budaya, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah.
5. Pengawasan
 Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan diarahkan pada Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan Internal, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi, Implementasi SPIP, Pelaksanaan Review, Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, Peningkatan Kapabilitas APIP, Evaluasi SAKIP SKPD, dan Penilaian Integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Fungsi Lainnya
 Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. program penataan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
 Kegiatan diarahkan pada Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan JDIH, Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama dan Penyuluhan Hukum dan HAM;
 - b. program perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan
 Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum, Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah, Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa;
 - c. program perumusan dan pengendalian kebijakan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
 Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Koordinasi dan

Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya, dan Pengembangan dan Pengelolaan Islamic Center;

- d. program perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian
Kegiatan diarahkan pada Pembinaan BUMD, Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD, Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT, dan Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi;
- e. program perumusan dan pengendalian kebijakan pembangunan
Kegiatan diarahkan pada Administrasi Perencanaan Pembangunan, Penyusunan LKPJ, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan;
- f. program pengembangan kelembangan, tata laksana dan peningkatan kinerja organisasi
Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Kesesuaian Kelembagaan OPD terhadap Peraturan Perundangan, Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan SKPD, Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi;
- g. program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
Kegiatan diarahkan pada Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Fasilitas Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu;
- h. program peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa
Kegiatan diarahkan pada Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- i. program kehumasan dan layanan keprotokolan
Kegiatan diarahkan pada Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi, Peliputan, Editorial, dan Publikasi, serta Layanan Keprotokolan;
- j. program peningkatan pelayanan kedinasan DPRD
Kegiatan diarahkan pada Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD, Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum, Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Reses DPRD, Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD, dan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- k. program pelayanan publik kecamatan dengan kegiatan diarahkan

pada Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN);

1. program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Kegiatan diarahkan pada Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan dan Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan, serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

5.3 Rencana Implementasi Program Unggulan

Rencana Implementasi Program Unggulan di Kabupaten Magelang Tahun 2020 tertuang dalam Tabel 5.2. Sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rencana Implementasi Program Unggulan Tahun 2020

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kehidupan beragama dan Akhlak Mulia									
	a. Pembangunan <i>Islamic center</i>	Rencananya Pem Kab Magelang merencanakan pembangunan masjid agung sebagai pusat ibadah, edukasi, dan rekreasi religi. Dalam perkembangannya, Pemprov juga mempunyai program unggulan yang sama. Sehingga pemprov dan pemkab akan bersinergi dalam pembangunannya.	Pengadaan Tanah	Pengadaan tanah untuk menambah luasan tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan <i>islamic centre</i> (Kebutuhan ideal 5 ha, kondisi existing 1,6 ha)	2500	m2	Sawitan, Kota Mungkid (kompleks masjid An-Nur)	APBD	BPPKAD	Tahun 2019 telah dianggarkan untuk pengadaan tanah sebesar Rp. 3,025 Milaya untuk pengadaan tanah seluas 3.000 m2

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Bantuan Pembanguan tempat ibadah	Diberikan melalui hibah uang, sebagai bentuk tali asih atas keterlibatannya dalam penguatan karakter masyarakat. Hibah diberikan untuk tempat ibadah: gereja, kapel, vihara, klenteng, masjid dan mushala diutamakan yang berlokasi di pelosok desa	Hibah (Belanja Tidak Langsung)	Setiap tempat ibadah mengajukan proposal	786	Unit	Kabupaten Magelang	APBD	Bag Admin Bangda dan Kesra Setda, serta BPPKAD	Setiap lembaga akan diberikan bantuan dengan kisaran sebesar Rp. 5 juta sd Rp. 10 juta
	c. Bantuan Kepada ormas Keagamaan, Pesantren, Madrasah Diniyah, TPA, TPQ, Majelis taklim sebagai	Diberikan melalui hibah uang, sebagai tali asih dalam rangka partisipasinya dalam penguatan karakter masyarakat		Setiap tempat ibadah mengajukan proposal	463	Unit	Kabupaten Magelang	APBD	Bag Admin Bangda dan Kesra Setda, serta BPPKAD	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	penguatan pendidikan karakter.									
	Peningkatan kesejahteraan guru ngaji	Diberikan melalui hibah uang, untuk guru rohani di: gereja, kapel, vihara, klenteng, masjid dan mushala diutamakan untuk guru rohani di pelosok desa. Tali asih ini diberikan dalam rangka partisipasinya dalam penguatan karakter masyarakat	Hibah (Belanja Tidak Langsung)	Setiap tempat ibadah mengajukan proposal	3932	orang	Kabupaten Magelang	APBD	Bag Admin Bangda dan Kesra Setda, serta BPPKAD	Setiap orang akan diberikan tali asih sebesar Rp. 600.000,00/ tahun
2.	Pendidikan	Belanja bantuan sosial untuk beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD dan SMP.	Pendampingan BSM dan Gulkin SD	Belanja bantuan sosial untuk beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD	210	Siswa	SD di 21 Kecamatan	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 825.000,- x 210 Siswa = Rp. 173.250.000,-
				Penyaluran beasiswa siswa miskin/ PIP SD	42.000	Siswa	SD di 21 Kecamatan	APBN	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 450.000 x 42.000 siswa = Rp.

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										18.900.000.000,-
			Pendampingan BSM dan Gulkin SMP	bantuan transport untuk bagi siswa miskin pada jenjang SMP	996	Siswa	SMP Pinggiran di Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 5.500,- x 996 siswa x 100 hari = Rp. 547.800.000,-
				Belanja bantuan sosial untuk beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SMP	1.250	Siswa	SMP di 21 Kecamatan	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 850.000,- x 1250 siswa = Rp. 1.062.500.000,-
				Penyaluran beasiswa siswa miskin/ PIP SMP	12,000	Siswa	SMP di 21 Kecamatan	APBN	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 750.000,- x 12.000 siswa = Rp. 9.000.000.000,-
		Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan	Peningkatan mutu sarana dan sarana PAUD dan dikmas	Pengadaan sarana prasarana PAUD (sarana belajar, APE, mebelair)	100	lembaga PAUD	100 lembaga PAUD di 21 Kecamatan	APBD	Disdikbud	
			Peningkatan mutu sarana dan prasarana SKB	pengadaan komputer, rehab gedung, pembangunan toilet, pengadaan media pendidikan	1	lembaga SKB	SKB Salaman	DAK	Disdikbud	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peningkatan mutu sarana prasana pendidikan SD Negeri dan Swasta	Pembangunan talud dan pengadaan mebelair	65	Sekolah	65 SD di 21 Kec. Kabupaten Magelang	APBD	Disdikbud	
			Peningkatan mutu sarana prasarana SD negeri, Swasta (DAK)	Pengadaan alat praktek sekolah, pembangunan dan rehab gedung dan pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	136	Sekolah	136 SD di 21 Kec. Kabupaten Magelang	DAK	Disdikbud	
			Peningkatan mutu sarana prasarana SMP	Pengadaan genset, pembangunan talud, pengadaan komputer jaringan, pengadaan komputer personal	3,12,10,333	unit, paket, paket, unit	59 SMP di 21 Kec. Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	
			Peningkatan mutu sarana prasarana SMP negeri, Swasta (DAK)	Belanja alat peraga/ praktek sekolah, pembangunan gedung dan rehab gedung	26	Paket	21 Kec. Kab. Magelang	DAK	Disdikbud	
		Meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru	BOSDA sekolah Negeri	Pemberian insentif bagi GTT dan PTT di Sekolah Negeri	1.662	Orang	Kab. Magelang	APBD	Disdikbud	Anggaran GTT lulus uji kompetensi @ 1.882.000,-, PTT lulus UK @ Rp. 1.000.000,-, GTT dan PTT tdk lulus UK (

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PAUD/ TK.								BOSDA @ Rp. 400.000,-, Satap Rp. 500.000,-, K2 @ Rp. 800.000,-) Total Rp. 37.265.472.000,-
			Belanja hibah untuk sekolah Swasta	Belanja hibah untuk insentif bagi GTT dan PTT di Sekolah Swasta	1.858	Orang	Kabupaten Magelang	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 4.800.000,- x 1.858 orang = Rp. 8.910.000.000,-
		Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut.	Peningkatan guru dan tenaga kependidikan	Pemberian beasiswa sekolah lanjut berupa biaya SPP bagi pendidik dan tenaga kependidikan	5	orang	Kabupaten Magelang	APBD	Disdikbud	Anggaran @ Rp. 3.500.000,- x 5 orang = Rp. 17.500.000,-
		Peningkatan dan pengembangan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.	-	-	-	-	-	-	-	Fasilitasi peningkatan dan pengembangan SMA dan SMK ke pemerintah Provinsi
3.	Kesehatan									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin sesuai dengan regulasi yang ada	Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Miskin secara menyeluruh	166,168	jiwa	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Pelayanan persalinan	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Pelayanan persalinan secara menyeluruh mulai dari pendataan sampai persalinan	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Pelayanan kesehatan masyarakat	Pelayanan RS Merah Putih	Pelayanan kesehatan di RS Merah Putih	1	unit	RS Blondo	APBD	DINKES	
		Pelayanan kesehatan masyarakat	Pelayanan RS Candi Umbul	Pelayanan kesehatan di RS Candi Umbul	1	unit	RS Grabag	APBD	DINKES	
		Pelayanan kesehatan masyarakat	Pelayanan RS Bukit Menoreh	Pelayanan kesehatan di RS Bukit Menoreh	1	unit	RS Salaman	APBD	DINKES	
	Program Peningkatan kualitas Puskesmas dan RS	Pembangunan puskesmas	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan puskesmas	2	unit	Pusk. Salaman 2 dan Secang 2	APBD	DINKES	
		Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	unit	Kota Mungkid	APBD	DINKES	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan	Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan	Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan	1	unit	Kota Mungkid	APBD	DINKES	
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penyelenggaraan Surveilans	Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Menular dan Keracunan Makanan yang berpotensi KLB serta Penanganan Krisis Kesehatan	Melakukan surveilans	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Pencegahan dan pengobatan penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	Pencegahan dan pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	Pelaksanaan pemeriksaan, pengobatan dan pemantauan penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Pencegahan dan pengobatan Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	Pelaksanaan pemeriksaan, pengobatan dan pemantauan Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program sumber daya kesehatan	Pembelian obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	Pembelian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyebarluasan informasi tentang kesehatan	Upaya Promosi Kesehatan	Penyebarluasan informasi tentang kesehatan melalui mediomasa da promosi langsung	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Kesehatan Masyarakat	1	paket	Kab. Magelang	APBD	DINKES	
4.	Penanggula ngan Kemiskinan									
	RTLH Plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin.	Meningkatkan kualitas RTLH menjadi RLH	Pengembang an Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya	Tercapainya fasilitasi pembangunan RTLH baik melalui hibah bansos ataupun swadaya	3.000	unit	RTLH di Kabupat en Magelang	APBD, APBD Prov dan APBN	DPRKP	Prioritas sasaran adalah RTLH yang masuk dalam Verval BDT
		Pengembangan perumahan akibat bencana	Fasilitasi/pe mbangunan rumah korban bencana	Terbangunnya / terehabilitasinya hunian korban bencana	5	unit	Wilayah yg terkena bencana	APBD	DPRKP	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun)	Peningkatan kapasitas Tim Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Sosialisasi dan bimtek anggota TPK dan pelaksanaan TPK Award	1	paket	21 kecamatan	APBD	Bappeda dan Litbangda	
		Peningkatan pelaksanaan verifikasi dan validasi Basic Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS	Optimalisasi Data Kemiskinan	Pelaksanaan verifikasi dan validasi Basic Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS	1	paket	Kab. Magelang	APBD	Dinsos PPKBPPPA	
5.	Pemanfaatan sektor unggulan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Mengembangkan beberapa komoditas terpilih melalui SL, dan sebagainya.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan,	SL dan Bimtek GAP tanaman pangan	2	paket		APBD	Distanpan gan	
				pemberian sarana produksi tanaman pangan	30	paket		APBD	Distanpan gan	
			Pengembangan tanaman penyegar (DBHCHT)	pemberian bibit tanaman kopi, cengkeh, the	42,900	batang		APBD	Distanpan gan	
	Peningkatan daya saing produk pertanian	Mengembangkan sistem budidaya pertanian organik, ramah lingkungan, tanpa bahan kimia.	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan,	SL dan Bimtek GHP tanaman pangan	2	paket		APBD	Distanpan gan	
				pemberian sarana prasarana pasca panen tanaman pangan	20	unit				
			Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar,	pemberian alsin pasca panen kopi	3	paket		APBD	Distanpan gan	
				sertifikasi organik kopi	20	ha		APBD	Distanpan gan	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	peningkatan sarana dan prasarana pertanian	membangun berbagai infrastruktur pertanian yang dibutuhkan (pembangunan irigasi, dam parit, jalan pertanian, embung) serta pemberian bantuan alsintan	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian,	pembangunan dam parit	4	unit		APBD	Distanpan gan	
				pembangunan embung	1	unit		APBD	Distanpan gan	
				pembangunan jalan usaha tani	6	unit		APBD	Distanpan gan	
				pembangunan irigasi tersier dan sumur tanah dangkal	10	unit		APBD	Distanpan gan	
			Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastrukturu Pertanian	pembangunan infrastruktur pertanian	26	paket		DAK	Distanpan gan	
			Modernisasi dan mekanisasi pertanian	pemberian alsin	1	paket		APBD	Distanpan gan	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pemberdayaan sumber daya manusia pertanian	penguatan SDM penyuluhan, baik pelaku utama, pelaku usaha, kelembagaan, maupun SDM penyuluh pertanian	Penumbuhan , Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani,	penumbuhan dan pengembangan serta penguatan kelembagaan tani, kelembagaan penyuluhan	37	lembaga		APBD	Distanpan gan	
			Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha,	peningkatan kapasitas pelaku usaha, pelaku utama (pengetahuan, sikap, ketrampilan)	700	orang		APBD	Distanpan gan	
			Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian,	pelatihan penyuluh, training, bimtek untuk penyuluh pertanian PNS, swadaya dan swasta	260	orang		APBD	Distanpan gan	
	pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui puskesmas dan pembinaan penyedia bahan PAH yang ASUH, serta peningkatan konsumsi PAH	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner,	pembinaan penyedia Pah yang ASUH	100	orang		APBD	Dispeterik an	
				Gerimis lur	2750	orang		APBD	Dispeterik an	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	program peningkatan produksi hasil peternakan	peningkatan produksi daging, telur dan susu serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung peternakan	Pengembangan Agribisnis Peternakan,	pemberian indukan sapi perah	60	ekor		APBD	Dispeterikan	
				bantuan ayam buras untuk KK miskin dan non miskin	10	kelompok		APBD	Dispeterikan	
				bantuan untuk pengembangan kelinci	4	kelompok		APBD	Dispeterikan	
			Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan,	peningkatan sarpras peternakan sapi perah, sapi potong, kambing/domba, itik, kelinci dan peningkatan Pasar Hewan Grabag	32	lokasi/paket/unit		APBD	Dispeterikan	
	peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan	Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan,	fasilitasi dan pengembangan desa mandiri pangan, fasilitasi dewan ketahanan pangan	5	desa		APBD	Distanpangan	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		untuk budidaya pertanian, mendorong diversifikasi pangan olahan lokal. Serta	Peningkatan Penganekara gaman Konsumsi Pangan,	pembinaan pemanfaatan pekarangan, pengukuran skor PPH	10	kelompok		APBD	Distanpan gan	
		memasyarakatkan pola pangan B2SA.	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis	pelatihan pengolahan pangan bahan lokal	21	kelompok		APBD	Distanpan gan	
	GERAKAN SERIBU KOLAM	mengembalikan kejayaan kabupaten magelang sebagai daerah perikanan, dengan meningkatkan produksi dan konsumsi serta meningkatkan kualitas SDM perikanan								

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pengembangan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan	peningkatan produksi, dan sarana dan prasarana produksi perikanan	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan,	demplot UPR	2	lokasi		APBD	Dispeterikan	
				fasilitasi sertifikasi CPIB dan CBIB	10	kelompok		APBD	Dispeterikan	
				bantuan pokdaka pembudidaya ikan kolam pekarangan (KK miskin)	6	kelompok		APBD	Dispeterikan	
				pengembangan minapadi	5	kelompok		APBD	Dispeterikan	
				fasilitasi pertemuan pelaku kawasan minapolitan	80	orang		APBD	Dispeterikan	
			Rehabilitasi/ Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan,	pembangunan/rehab BBI	1	paket		APBD	Dispeterikan	
				pembangunan sentra kuliner perikanan	1	paket		APBD	Dispeterikan	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pembangunan/rehab sarpras pokdakan	1	paket		APBD	Dispeterikan	
	optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan sistem penyuluhan	meningkatkan mutu olahan hasil perikanan dan promosi pemasaran hasil perikanan	Gerakan Makan Ikan (Gemarikan),	melakukan kampanye gerakan makan ikan	3.000	orang		APBD	Dispeterikan	
			Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	promosi perikanan	4	event		APBD	Dispeterikan	
				edukasi perikanan	10.000	orang		APBD	Dispeterikan	
6.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana publik									
	Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung,									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	embung, irigasi, dan sarana ekonomi)									
		Membangun / meningkatkan jalan	Pembangunan dan Peningkatan jalan	Pembangunan Jalan	67	paket	Ruas Jalan Kabupaten, di 67 ruas jalan	APBD	DPUPR	Jalan
		Merehabilitasi/memelihara kualitas jalan dan pelengkap jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	26	paket	3 paket Pemeliharaan Rutin dan pemeliharaan di 6 UPT, 17 paket pelengkap jalan dan 6 paket jembatan	APBD	DPUPR	Jalan dan Jembatan
		Membangun pelengkap jalan	Pembangunan pelengkap jalan	Pembangunan jembatan, drainase, trotoar, groundsil dan senderan/talud jalan	32	paket	di 32 ruas jalan kabupaten di seluruh wilayah kabupaten Magelang	APBD	DPUPR	Jembatan dan pelengkap jalan

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							g			
		Merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Merehabilitasi jaringan irigasi yang kondisi tidak baik menjadi baik	28	paket	di 28 DI di wilayah Kabupaten Magelang	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi
			Pembangunan jaringan irigasi	Membangun jaringan irigasi / meningkatkan jaringan irigasi	13	paket	di 13 DI di wilayah Kabupaten Magelang	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi
		Merehabilitasi bangunan irigasi	Operasi Jaringan Irigasi	pemeliharaan bangunan irigasi seperti pintu air, bangunan debit air	2	paket	DI Kabupaten Magelang	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Memelihara Jaringan irigasi tetap baik	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi sehingga tetap dalam kondisi baik	43	Paket	43 DI di wilayah Kabupaten Magelang	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi
		Memelihara bangunan irigasi tetap berfungsi baik	Pemeliharaan bangunan irigasi	Pemeliharaan bangunan irigasi sehingga tetap berfungsi baik	2	Paket	2 paket di 2 DI	APBD	DPUPR	Jaringan Irigasi
		Membangun bangunan penampung /saluran air irigasi	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air	Membangun bangunan air untuk meningkatkan debit air layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air	3	paket	Grabag, Tempuran, Ngluwar	APBD	DPUPR	Embung/Bendungan/Penampung air
		Membangun sarana ekonomi dan kesehatan	Pembangunan Rumah Sakit	Penyempurnaan Pembangunan fasilitas kesehatan di RSUD Blondo	1	paket	Blondo Mertoyudan	APBD	DPUPR	
			Pembangunan Kantor Pemerintah	Pembangunan fasilitas layanan masyarakat pada kantor pemerintah	4	paket	Kec. Borobudur, DPRKP, Pertanian, Dishub	APBD	DPUPR	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah	Membangun / meningkatkan jalan	Pembangunan dan Peningkatan jalan	Pembangunan Jalan untuk peningkatan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Mageang	67	paket	Ruas Jalan Kabupaten, di 67 ruas jalan	APBD	DPUPR	
		Menyediakan dan memelihara sarana perlengkapan jalan	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Perlengkapan Jalan (ITS, Rambu, Zebra Cross, Guard Rail)	1	paket	Kec. Muntilan , Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ngluwar, Bandongan, Salam , Srumbung, Tegalrejo ,	APBD	Dinas Perhubungan	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Candimulyo, Kaliangkrik, Mungkid			
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal sesuai dengan standart teknis dan kebutuhan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkatan Darat	Rehabilitasi Bangunan Fisik Terminal Borobudur	1	paket	Kecamatan Borobudur	APBD	Dinas Perhubungan	Mendukung Program KSPN Borobudur dan Program Aglomerasi Transportasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat									
	a. Pengelolaan Borobudur, Merapi dan Sumbin	Menyediakan data berdasarkan daya dukung lingkungan dan kemampuan daya tampung aktifitas	Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup	Perhitungan IKLH, Penyusunan SILH dan penyusunan dokumen kinerja lingkungan hidup	2	paket	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	g berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat									
	b. Pengelolaan Sampah Mandiri (3R) dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Melakukan pembentukan bank sampah dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan bank sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	Fasilitasi Sarana Bank sampah, Lomba bank sampah	100	Unit bank Sampah	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	c. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan Fasilitas Penanganan Sampah yang optimal	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	pembelian tanah untuk TPST dan Pembangunan TPST	1	paket lahan	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	d. Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air.	Kegiatan ini ditujukan untuk memelihara lingkungan hidup terutama mata air	Konservasi Kawasan Resapan Air	Optimasi konservasi di kawasan resapan air (pembentukan komunitas, penanaman pohon, pembuatan sumur resapan dan biopori)	60	Ha	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	e. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Hunian Kumuh	Mengelola taman-taman yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Publik	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	Pengelolaan dan peningkatan kinerja RTH Publik (taman-taman)	1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
8.	Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. E-Government/ Smart Regency	Menyediakan Layanan Komunikasi Data yang lebih Optimal dan Stabil sebagai pendukung Smart Regency	Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK	peningkatan kualitas transver data internet	257	SKPD	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kominfo	
					670	Mbps				
		Penyediaan Layanan pembangunan dan pemeliharaan aplikasi	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Menyediaan tenaga ahli untuk menyusun aplikasi yang dibutuhkan SKPD atau Pemerintah Desa	6	Aplikasi	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kominfo	Kegiatan ini ditujukan untuk mempermudah integrasi antar layanan dan efisiensi anggaran. SKPD atau Pemerintah Desa menyusun Kerangka Acuan dan dikordinasikan dengan Dinas Kominfo

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian dan Pengawasan	Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal	Pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kasus	144	LHP	21 Kec. Kabupaten Magelang	APBD	Inspektora t	
			Tindaklanjut hasil temuan	Penanganan tindaklanjut LHP	420	LHP	21 Kec. Kabupaten Magelang	APBD	Inspektora t	
	c.Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (data kependudukan) Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Sistem pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan)	Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk	peningkatan kualitas pelayanan	80000	lembar	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Fasilitasi Penerbitan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk		1	paket		APBD		
			DAK (Pelayanan Adminduk)					APBD		
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran		30,000	lembar	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
			Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan		400	lembar		APBD		
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)		1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kegiatan ini ditujukan untuk mempermudah penyediaan data kependudukan

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Pemanfaatan Data									
			Fasilitasi & evaluasi Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Dokumen		1	paket		APBD		
9.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA									
	Penguatan Sistem Penanggulangan Bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan)	Pengembangan sister village, desa tangguh bencana, TEA dan sistem informasi kebencanaan	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Pembentukan sister village, desa tangguh bencana, TEA dan sistem informasi kebencanaan	1	paket	Kab. Magelang	APBD	BPBD	
10.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Peningkatan peran serta Kepemudaaan	Peningkatan kapasitas pemuda dalam kepemimpinan, kemampuan manajerial organisasi dan pembangunan karakter melalui pelatihan	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	pembinaan pemuda melalui kegiatan pelatihan diklat, pramuka dan paskibraka	1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	DISPARPO RA	
			Pembinaan Kelembagaan Pemuda	penguatan kelembagaan pemuda dalam manajerial dan administrasi	1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	DISPARPO RA	
	b. Pembangunan Sport Centre dan pengembangan pembinaan olah raga berprestasi	Pengembangan Stadion Olah raga sepakbola "Gemilang" menjadi pusat olah raga dengan multi cabang olah raga	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (DED), peningkatan sarana prasarana Stadion dan pengadaan alat olah raga serta pemeliharaan stadion	5	paket	Kabupaten Magelang	APBD	DISPARPO RA	

No	Program Kerja (Program Unggulan)	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi Program Unggulan Pada Tahun 2020							Keterangan
			Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan	Volume	Satuan	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Perangkat daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c. Peningkatan pengembangan olahraga sepak bola dengan mengoptimalkan peran serta swasta	Pelibatan swasta dalam memfasilitasi pembinaan Klub olah raga sepakbola Daerah	peningkatan swasta sebagai sponsor dalam pembinaan klub sepakbola Daerah	Mendorong pengusaha dalam ikut berpartisipasi dalam pembinaan klub sepak bola melalui sponsorship	1	paket	Kabupaten Magelang	CSR	KONI	
	d. Penghargaan atlet berprestasi	meningkatkan semangat dan motivasi atlet daerah untuk lebih mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam cabang olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	pemberian tali asih bagi atlet berprestasi	1	paket	Kabupaten Magelang	APBD	DISPARPO RA	

Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020, yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan tahun 2020. Uraian program dan kegiatan tahun 2020 secara rinci tertuang dalam tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				197.656.609.000,00			219.495.838.000,00
1.1	Pendidikan				197.656.609.000,00			219.495.838.000,00
1.1.1.1.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	6.975.000.000,00			5.560.000.000,00
1.1.1.1.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000 surat	340.000.000,00	Rutin	100.000 surat	340.000.000,00
		Jumlah Kecamatan yang terlayani		21 Kecamatan			21 Kecamatan	
1.1.1.1.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah rapat kooordinasi luar daerah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	300 kali	1.405.000.000,00	Rutin	300 kali	1.470.000.000,00
		jumlah yang melaksanakan perjalanan luar daerah		101 orang			101 orang	
		jumlah rapat koordinasi dalam daerah		50 kali			50 kali	
		jumlah perjalanan Dinas dalam daerah		500 SPPD			500 SPPD	
		jumlah kecamatan yang terlayani		21 kecamatan			21 kecamatan	
		jumlah laporan hibah bansos		1 dokumen			1 dokumen	
1.1.1.1.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan/peralatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5 paket	2.070.000.000,00	Rutin	3 paket	400.000.000,00
1.1.1.1.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 gedung kantor	1.100.000.000,00	Rutin	1 gedung kantor	1.100.000.000,00
		Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air, listrik dan surat kabar		60 rekening bulan			60 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah perlengkapan yang dipelihara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 komplek Gedung Kantor	1.410.000.000,00	Rutin	1 komplek Gedung Kantor	1.450.000.000,00
		jumlah peralatan yang dipelihara		40 unit komputer/laptop			40 unit komputer/laptop	
		jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara		7 unit			7 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara		125 unit			125 unit	
1.1.1.1.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedng/berat gedung kantor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 paket	400.000.000,00	Rutin	4 paket	400.000.000,00
1.1.1.1.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	jumlah ASN yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150 orang	250.000.000,00	Rutin	150 orang	400.000.000,00
		Jumlah seragam dan Atribut ASN yang disediakan		300 stel			- stel	
		volume rapat kerja dinas		1 kali			1 kali	
1.1.1.1.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	2.130.000.000,00			2.325.000.000,00
		Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %				
1.1.1.1.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah bulan pelayanan jasa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12 bulan	335.000.000,00	Rutin	12 bulan	375.000.000,00
		Jumlah RKAS, RAPBS yang diteliti		59 Sekolah			59 Sekolah	
1.1.1.1.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra yang tersusun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	- Dokumen	Rutin	- Dokumen	275.000.000,00
		Dokumenn Renja yang tersusun		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Dokumen Profil Pendidikan yang tersusun		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Dokumen		1 Dokumen	
1.1.1.1.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Bulanan dan Tahunan (LKJIP, LKPJ, LPPD, PK dan RFK)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17 Laporan	1.560.000.000,00	Rutin	17 Laporan	1.575.000.000,00
		Tersedianya data pokok pendidikan online		1 data online			1 data online	
1.1.1.1.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Laporan SPM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Dokumen	100.000.000,00	Rutin	1 Dokumen	100.000.000,00
		Jumlah SOP yg disahkan		5 SOP			5 SOP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.23	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Putus Sekolah SD			0,12 %	89.844.526.000,00			95.703.465.000,00
		Angka Melanjutkan SD ke SMP			91,95 %				
		Persentase SD Negeri Dengan Siswa Ideal			55 %				
		Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter			25,04 %				
		Persentase Sarpras SDN sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)			50,18 %				
1.1.1.1.1.1.23.1	Penyelenggaraan US-USBN SD/MI	Jumlah sekolah penyelenggara US-USBN SD/MI yang difasilitasi		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	905 Sekolah	735.741.000,00	Prioritas	907 Sekolah	760.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salaman	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30 SD	3.512.000.000,00	Prioritas	30 SD	3.516.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Borobudur	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27 SD	2.903.200.000,00	Prioritas	27 SD	2.907.200.000,00
1.1.1.1.1.1.23.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngluwar	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19 SD	1.524.800.000,00	Prioritas	19 SD	1.528.800.000,00
1.1.1.1.1.1.23.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Salam	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19 SD	2.004.000.000,00	Prioritas	19 SD	2.008.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Srumbung	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27 SD	2.015.200.000,00	Prioritas	27 SD	2.019.200.000,00
1.1.1.1.1.1.23.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Dukun	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25 SD	2.082.400.000,00	Prioritas	25 SD	2.086.400.000,00
1.1.1.1.1.1.23.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Sawangan	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28 SD	2.813.600.000,00	Prioritas	28 SD	2.817.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.23.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	30 SD	3.840.000.000,00	Prioritas	30 SD	3.844.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mungkid	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24 SD	2.842.400.000,00	Prioritas	24 SD	2.846.400.000,00
1.1.1.1.1.1.23.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Mertoyudan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	36 SD	4.432.000.000,00	Prioritas	36 SD	4.436.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tempuran	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23 SD	2.841.600.000,00	Prioritas	23 SD	2.845.600.000,00
1.1.1.1.1.1.23.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kajoran	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29 SD	2.760.800.000,00	Prioritas	29 SD	2.764.800.000,00
1.1.1.1.1.1.23.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Kaliangkrik	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23 SD	2.438.400.000,00	Prioritas	23 SD	2.442.400.000,00
1.1.1.1.1.1.23.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Bandongan	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27 SD	2.537.600.000,00	Prioritas	27 SD	2.541.600.000,00
1.1.1.1.1.1.23.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Candimulyo	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26 SD	2.616.800.000,00	Prioritas	26 SD	2.620.800.000,00
1.1.1.1.1.1.23.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Pakis	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	31 SD	3.080.000.000,00	Prioritas	31 SD	3.084.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Ngablak	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23 SD	2.345.600.000,00	Prioritas	23 SD	2.345.600.000,00
1.1.1.1.1.1.23.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Grabag	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27 SD	4.817.600.000,00	Prioritas	27 SD	4.821.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.23.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Tegalrejo	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26 SD	2.886.400.000,00	Prioritas	26 SD	2.870.400.000,00
1.1.1.1.1.1.23.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Secang	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23 SD	3.232.800.000,00	Prioritas	23 SD	3.236.800.000,00
1.1.1.1.1.1.23.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Kec. Windusari	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 SD	2.404.000.000,00	Prioritas	21 SD	2.408.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.25	Pengembangan Kurikulum SD	Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan kurikulumnya		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	263 Sekolah	720.000.000,00	Prioritas	342 Sekolah	850.000.000,00
		Jumlah guru yang mengikuti workshop kurikulum baru		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.036 Guru			1.036 Guru	
1.1.1.1.1.1.23.26	Pendampingan BSM dan Gulkin SD	Jumlah penerima bantuan BSM SD yang didampingi		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	42.000 Siswa	90.000.000,00	Prioritas	45.000 Siswa	176.500.000,00
		Jumlah penerima Gulkin SD yang didampingi		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	210 Siswa			210 Siswa	
1.1.1.1.1.1.23.27	Penyelenggaraan MBS SD	Jumlah sekolah yang mengembangkan MBS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 Sekolah	344.740.000,00	Prioritas	42 Sekolah	365.740.000,00
		Jumlah komite sekolah yang dilibatkan dalam MBS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	105 Komite sekolah			105 Komite sekolah	
1.1.1.1.1.1.23.28	Pendampingan Operasional BOS SD	Jumlah SD penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	603 Sekolah	3.753.680.000,00	Prioritas	604 Sekolah	4.735.100.000,00
		Jumlah sekolah penerima BOSDA SDS/MIS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	360 Sekolah			361 Sekolah	
		Jumlah penerima BOSDA SDN		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	86.342 Siswa			86.342 Siswa	
1.1.1.1.1.1.23.29	Fasilitasi dan Pengembangan SD	Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19 Sekolah	820.000.000,00	Prioritas	21 Sekolah	1.495.000.000,00
		Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan			30 Sekolah			35 Sekolah	
		Jumlah sekolah Adiwiyata yang mendapat pendampingan			42 Sekolah			42 Sekolah	
		Jumlah sekolah aman bencana yang memiliki SOP			120 Sekolah			120 Sekolah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.23.30	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SD	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kelembagaan SD	Kab Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Dokumen laporan	20.000.000,00	Prioritas	1 Dokumen laporan	20.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.31	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik	Jumlah lomba yang terselenggara		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	52 Kegiatan	1.435.715.000,00	Prioritas	52 Kegiatan	192.000.000,00
		Jumlah penerima beasiswa prestasi			3.936 Siswa			3.936 Siswa	
		Jumlah sekolah yang didampingi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter			120 Sekolah			120 Sekolah	
		Jumlah juknis pendidikan karakter			1 Juknis			1 Juknis	
1.1.1.1.1.1.23.33	Pengembangan dan Penjaminan Mutu SD	Jumlah penyelenggara lomba perpustakaan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 Sekolah	289.450.000,00	Prioritas	21 Sekolah	345.000.000,00
		Jumlah sekolah yang didampingi pelaksanaan akreditasinya			100 Sekolah			125 Sekolah	
		Jumlah sekolah peserta lomba gugus (SD Inti)			93 SD Inti			93 SD Inti	
1.1.1.1.1.1.23.34	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SD (Ban Gub)	jumlah paket bantuan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5 paket	30.000.000,00	Prioritas	5 paket	500.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.36	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah penerima bantuan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	136 Sekolah	15.834.000.000,00	Prioritas	350 Sekolah	16.682.000.000,00
1.1.1.1.1.1.23.37	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta	Jumlah penerima bantuan	SDN di Kab Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	65 Sekolah	5.790.000.000,00	Prioritas	100 Sekolah	9.535.925.000,00
1.1.1.1.1.1.23.38	Fasilitasi PPDB SD	Jumah SDN yang terfasilitasi PPDBnya	Kabupaten Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	551 SD	50.000.000,00	Prioritas	551 SD	55.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Putus Sekolah SMP			0,23 %	48.738.245.000,00			63.384.035.000,00
		Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK/MA			79,95 %				
		Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter			38,46 indeks				
		Persentase SMP Negeri dengan Jumlah Siswa Ideal			58 %				
		Persentase Sarpras SMP Negeri Sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)			50,85 %				
1.1.1.1.1.1.24.1	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Muntilan	Jumlah siswa penerima BOS	SMPN 1 Muntilan	KECAMATAN MUNTILAN	556 Siswa	556.000.000,00	Prioritas	587 Siswa	587.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.2	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.3	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MUNTILAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	664 Siswa	664.000.000,00	Prioritas	668 Siswa	668.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	586 Siswa	586.000.000,00	Prioritas	588 Siswa	588.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	354 Siswa	354.000.000,00	Prioritas	384 Siswa	384.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	686 Siswa	697.000.000,00	Prioritas	697 Siswa	697.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261 Siswa	261.000.000,00	Prioritas	286 Siswa	286.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	650 Siswa	650.000.000,00	Prioritas	657 Siswa	657.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SRUMBUNG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	449 Siswa	431.000.000,00	Prioritas	477 Siswa	431.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	508 Siswa	508.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 DUKUN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	261 Siswa	261.000.000,00	Prioritas	265 Siswa	265.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	768 Siswa	768.000.000,00	Prioritas	768 Siswa	768.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	160 Siswa	160.000.000,00	Prioritas	160 Siswa	160.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KOTAMUNGKID	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	571 Siswa	571.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	608 Siswa	608.000.000,00	Prioritas	640 Siswa	640.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MERTOYUDAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	475 Siswa	475.000.000,00	Prioritas	480 Siswa	480.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	638 Siswa	638.000.000,00	Prioritas	608 Siswa	608.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEGALREJO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	260 Siswa	260.000.000,00	Prioritas	280 Siswa	280.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BANDONGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	503 Siswa	503.000.000,00	Prioritas	544 Siswa	544.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	567 Siswa	567.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	559 Siswa	559.000.000,00	Prioritas	574 Siswa	574.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.25	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 GRABAG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	446 Siswa	446.000.000,00	Prioritas	448 Siswa	448.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.26	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GLUWAR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	663 Siswa	663.000.000,00	Prioritas	671 Siswa	671.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.27	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	667 Siswa	667.000.000,00	Prioritas	670 Siswa	670.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.28	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	529 Siswa	529.000.000,00	Prioritas	540 Siswa	540.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.29	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 TEMPURAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	138 Siswa	138.000.000,00	Prioritas	141 Siswa	141.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.30	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	566 Siswa	566.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.31	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	744 Siswa	744.000.000,00	Prioritas	750 Siswa	750.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.32	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SECANG	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	269 Siswa	269.000.000,00	Prioritas	288 Siswa	288.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.33	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.34	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	392 Siswa	392.000.000,00	Prioritas	480 Siswa	480.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.35	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	361 Siswa	361.000.000,00	Prioritas	381 Siswa	381.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.36	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	574 Siswa	574.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.37	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	567 Siswa	567.000.000,00	Prioritas	572 Siswa	572.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.38	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 CANDIMULYO	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	245 Siswa	245.000.000,00	Prioritas	277 Siswa	277.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.39	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	576 Siswa	576.000.000,00	Prioritas	576 Siswa	576.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.40	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	563 Siswa	563.000.000,00	Prioritas	569 Siswa	569.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.41	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAM	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	535 Siswa	535.000.000,00	Prioritas	545 Siswa	545.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.42	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	776 Siswa	776.000.000,00	Prioritas	776 Siswa	776.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.43	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KAJORAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	359 Siswa	359.000.000,00	Prioritas	379 Siswa	379.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.44	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	294 Siswa	294.000.000,00	Prioritas	352 Siswa	352.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.45	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	272 Siswa	272.000.000,00	Prioritas	287 Siswa	287.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.46	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	384 Siswa	384.000.000,00	Prioritas	384 Siswa	384.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.47	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	384 Siswa	384.000.000,00	Prioritas	384 Siswa	384.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.48	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	341 Siswa	341.000.000,00	Prioritas	349 Siswa	349.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.49	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGABLAH	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	162 Siswa	162.000.000,00	Prioritas	162 Siswa	162.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.50	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 NGABLAH	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	96 Siswa	96.000.000,00	Prioritas	96 Siswa	96.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.51	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	364 Siswa	364.000.000,00	Prioritas	404 Siswa	404.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.52	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 WINDUSARI	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	380 Siswa	380.000.000,00	Prioritas	384 Siswa	384.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.53	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	82 Siswa	82.000.000,00	Prioritas	83 Siswa	83.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.54	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	196 Siswa	196.000.000,00	Prioritas	200 Siswa	200.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.55	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	51 Siswa	51.000.000,00	Prioritas	49 Siswa	49.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.56	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100 Siswa	100.000.000,00	Prioritas	105 Siswa	105.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.57	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	115 Siswa	115.000.000,00	Prioritas	110 Siswa	110.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.58	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	288 Siswa	288.000.000,00	Prioritas	288 Siswa	288.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.59	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP SALAMAN	Jumlah siswa penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	72 Siswa	72.000.000,00	Prioritas	77 Siswa	77.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.60	Penyelenggaraan UN	Jumlah SMP/MTs yang terfasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	213 sekolah/madrasah	525.000.000,00	Prioritas	213 sekolah/madrasah	540.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.61	Pendampingan Operasional BOS SMP	Jumlah penerima BOS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	130 sekolah	1.737.300.000,00	Prioritas	130 sekolah	2.463.450.000,00
		Jumlah SMP Swasta penerima BOSDA		68 sekolah			68 sekolah	
		Jumlah M.Ts penerima BOSDA		71 madrasah			71 madrasah	
		Jumlah laporan BOS		130 sekolah			130 sekolah	
		Jumlah laporan BOSDA SMP Swasta dan M.Ts		139 sekolah/madrasah			139 sekolah/madrasah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.62	Pengembangan dan penjaminan mutu SMP	Jumlah mapel yang ditekankan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 mapel	1.030.000.000,00	Prioritas	4 mapel	1.625.000.000,00
		Jumlah sekolah yang mengikuti lomba perpustakaan		21 sekolah			21 sekolah	
		Jumlah sekolah yang disurveil akreditasi		26 sekolah			26 sekolah	
		Jumlah SMP Terbuka yang difasilitasi		15 sekolah			15 sekolah	
		Jumlah SMP Terbuka yang mengikuti lomojari		15 sekolah			15 sekolah	
1.1.1.1.1.1.24.63	Pendampingan BSM dan GULKIN SMP	Jumlah siswa yang menerima BSM/Gulkin	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.250 anak	655.000.000,00	Prioritas	1.200 anak	1.260.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.64	Pengembangan Kurikulum	Jumlah sekolah yang difasilitasi penguatan kurikulum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	130 sekolah	200.000.000,00	Prioritas	130 sekolah	1.200.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.65	Fasilitasi PPDB	Jumlah sekolah dengan PPDB Online	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	59 SMPN	273.585.000,00	Prioritas	59 SMPN	273.585.000,00
1.1.1.1.1.1.24.66	Fasilitasi dan Pengembangan Peserta Didik SMP	Jumlah lomba yang terselenggara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	57 Kegiatan	1.300.000.000,00	Prioritas	57 Kegiatan	1.750.000.000,00
		Jumlah penerima beasiswa prestasi		1.300 anak			1.300 anak	
		Jumlah sekolah yang didampingi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter		16 sekolah			16 sekolah	
		Jmlah juknis pendidikan karakter		1 Juknis			1 Juknis	
1.1.1.1.1.1.24.67	Fasilitasi dan pengembangan SMP	Jumlah sekolah model dan rujukan yang mendapat pendampingan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12 sekolah	350.000.000,00	Prioritas	12 sekolah	350.000.000,00
		Jumlah sekolah inklusi yang mendapat pendampingan		4 sekolah			4 sekolah	
		Jumlah sekolah adiwiyata yang mendapat pendampingan		8 sekolah			8 sekolah	
		Jumlah sekolah yang mendapat bantuan pendampingan program ramah anak		16 Sekolah			16 Sekolah	
1.1.1.1.1.1.24.68	Bantuan Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (Ban Gub)	Jumlah paket bantuan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 Paket	10.000.000,00	Prioritas	4 Paket	600.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.24.70	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan SMP	Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam penataan kelembagaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26 sekolah	130.000.000,00	Prioritas	52 sekolah	200.000.000,00
1.1.1.1.1.1.24.71	Pengadaan Tanah Pengembangan SMP	Bidang tanah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 bidang	0,00	Prioritas	- bidang	0,00
		Dokumen FS		1 dok			- dok	
1.1.1.1.1.1.24.72	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMP	Jumlah Paket Talud & Pagar Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12 paket	9.767.360.000,00	Prioritas	12 paket	19.716.000.000,00
		Jumlah Pengadaan Personal Komputer		333 unit			333 unit	
		Jumlah Pengadaan Genset		3 unit			26 unit	
		Jumlah Paket Pengadaan Komputer Jaringan		10 paket			10 paket	
1.1.1.1.1.1.24.73	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah paket sarpras sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	26 paket	7.252.000.000,00	Prioritas	52 paket	7.252.000.000,00
1.1.1.1.1.1.25	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase PNF Terakreditaasi (LKP, PKBM)		60,87 %	7.860.866.000,00			9.365.866.000,00
		Persentase PAUD Terakreditasi		48,99 %				
1.1.1.1.1.1.25.1	Pembelajaran PAUD	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti workshop	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200 orang	600.000.000,00	Prioritas	200 orang	900.000.000,00
		Jumlah Pendidik yang mengikuti bintek		400 orang			400 orang	
1.1.1.1.1.1.25.2	Fasilitasi dan pengembangan PAUD	Jumlah Kecamatan yang di fasilitasi GOPTKI dan BUNDA PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 Kecamatan	294.000.000,00	Prioritas	21 Kecamatan	294.000.000,00
		Jumlah Gugus PAUD yang difasilitasi		21 Gugus			21 Gugus	
		Jumlah kegiatan Semarak PAUD		1 kegiatan			1 kegiatan	
		Jumlah PAUD yang difasilitasi menjadi PAUD HI		46 Lembaga			100 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.25.3	Pendampingan Operasional BOP PAUD	Jumlah lembaga yang terfasilitasi BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	760 Lembaga	1.420.866.000,00	Prioritas	760 lembaga	1.520.866.000,00
		Jumlah Pendidik PAUD yang menerima Bantuan transport		500 Pendidik PAUD			500 Pendidik PAUD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.25.4	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	Jumlah Kelompok/Lembaga Paket A yang difasilitasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 Lembaga	1.695.000.000,00	Prioritas	4 Lembaga	1.830.000.000,00
		Jumlah Kelompok/Lembaga Paket B yang difasilitasi		30 Lembaga			30 Lembaga	
		Jumlah Kelompok/Lembaga Paket C yang difasilitasi		60 Lembaga			58 Lembaga	
		Jumlah tutor yang mengikuti Pelatihan E-Learning		20 orang			40 Persen	
1.1.1.1.1.1.25.5	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Keluarga	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi Bindikel	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	440 Lembaga	250.000.000,00	Prioritas	440 Lembaga	350.000.000,00
		Jumlah TBM penerima bantuan		25 Lembaga			30 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.25.6	Penyelenggaraan UNPK Paket A,B dan C	Jumlah siswa Paket ABC yang difasilitasi USBN dan UN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.000 orang	350.000.000,00	Prioritas	850 orang	385.000.000,00
1.1.1.1.1.1.25.7	Peningkatan mutu sarana prasarana Paud dan Dikmas	Jumlah PAUD yang menerima APE	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100 PAUD	685.000.000,00	Prioritas	88 PAUD	1.255.000.000,00
		Jumlah lembaga PAUD yang menerima Bantuan Sarpras		100 PAUD			88 PAUD	
		Jumlah Lembaga LKP/PKBM yang menerima bantuan Sarpras		5 Lembaga			5 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.25.8	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD dan Dikmas	Jumlah Lembaga Paud dan Dikmas yang difasilitasi proses akreditasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	180 Lembaga	230.000.000,00	Prioritas	180 Lembaga	495.000.000,00
		Jumlah lembaga PAUD dan Dikmas yang di bina sesuai dengan tupoksi		120 orang			150 Lembaga	
		Jumlah peserta lomba apresiasi PAud dan Dikmas yang di fasilitasi		10 orang			15 Lembaga	
1.1.1.1.1.1.25.9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	Jumlah Penerima BOP Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24 Lembaga	836.000.000,00	Prioritas	21 Lembaga	836.000.000,00
1.1.1.1.1.1.25.10	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB (DAK)	Jumlah bantuan yang diterima	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	1.500.000.000,00	Prioritas	1 Paket	1.500.000.000,00
1.1.1.1.1.1.26	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PNS Bersertifikat		91 %	39.752.972.000,00			43.157.472.000,00
		Persentase Guru Yang Lulus uji Kompetensi Guru		65,40 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.26.1	Pembinaan GTK	Jumlah guru yang mengikuti peningkatan integritas		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	750 Orang	400.000.000,00	Prioritas	750 Orang	400.000.000,00
		Jumlah laporan hasil kegiatan penataan guru			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah laporan penanganan kasus			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian			1 dokumen			1 Dokumen	
1.1.1.1.1.1.26.2	Fasilitasi Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)	Jumlah kegiatan fasilitasi PKB		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3 Kegiatan	300.000.000,00	Prioritas	3 Kegiatan	300.000.000,00
1.1.1.1.1.1.26.3	Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Pendidian	Jumlah peserta bintek peningkatan kompetensi GTK		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	160 Orang	700.000.000,00	Prioritas	160 Orang	1.000.000.000,00
		Jumlah peserta bintek Tim PAK			40 Orang			40 Orang	
		Jumlah peserta bintek asesor PKG			40 Orang			40 Orang	
		Jumlah peserta bintek guru sekolah inklusi			40 Orang			40 Orang	
		Jumlah peserta bintek pendidikan karakter			40 Orang			40 Orang	
1.1.1.1.1.1.26.4	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah guru yang difasilitasi angka kredit		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.800 Orang	177.500.000,00	Prioritas	3.800 Orang	177.500.000,00
1.1.1.1.1.1.26.5	Pelaksanaan Sertifikasi guru dan Pengawas	Jumlah guru dan pengawas yang difasilitasi sertifikasinya	-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.000 Orang	75.000.000,00	Prioritas	4.000 Orang	129.500.000,00
1.1.1.1.1.1.26.6	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Jumlah kegiatan seleksi pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3 Kegiatan	385.000.000,00	Prioritas	3 Kegiatan	385.000.000,00
1.1.1.1.1.1.26.7	BOSDA (Sekolah Negeri)	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan Bosda		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.662 Orang	37.265.472.000,00	Prioritas	1.662 Orang	40.115.472.000,00
1.1.1.1.1.1.26.8	Peningkatan Kreativitas Pegawai	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kreatifitas pegawai	DISDIKBUD kab Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50 Orang	50.000.000,00	Prioritas	50 Orang	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.1.1.1.26.9	Pengembangan Karir	Jumlah Kepala Sekolah yang dinilai kinerjanya/PKKS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	78 Orang	400.000.000,00	Prioritas	78 Orang	600.000.000,00
		Jumlah peserta penyiapan dan pembekalan calon KS dan Pengawas		60 Orang			60 Orang	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3.895.766.000,00			35.923.733.000,00
2.16	Kebudayaan				3.895.766.000,00			35.923.733.000,00
2.16.1.1.1.1.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Karya Budaya Yang di Inventarisasi		25 Karya Budaya	2.645.000.000,00			34.268.000.000,00
		Jumlah Karya Budaya yang di Revitalisasi		1 Karya Budaya				
2.16.1.1.1.1.15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kelompok adat yang dibina	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	21 kelompok	740.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	21 kelompok	1.130.000.000,00
		Jenis permainan tradisional yang dilestarikan		15 jenis			15 jenis	
		Jumlah naskah jawa dan gegguritan yang dihasilkan		20 naskah			20 naskah	
		jumlah tosan aji yang dijamah dan dipamerkan		152 tosan aji			152 tosan aji	
		jumlah upacara tradisi yang difasilitasi		21 upacara tradisi			30 upacara tradisi	
		Jumlah pendokumentasian upacara tradisi		2 upacara tradisi			2 upacara tradisi	
2.16.1.1.1.1.15.22	Fasilitasi Pembuatan Film dan Festival	Film dokumenter yang dihasilkan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3 film	80.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	3 film	264.000.000,00
2.16.1.1.1.1.15.26	Pertunjukan Seni Budaya	jumlah festival	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 festival	1.290.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	4 festival	2.095.500.000,00
		jumlah pertunjukan		10 pertunjukan			10 pertunjukan	
2.16.1.1.1.1.15.28	Pengiriman Kesenian ke Luar Daerah	Kelompok kesenian yang dikirim	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6 kelompok	435.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	6 kelompok	478.500.000,00
		Jumlah kesenian yang dikirim ke luar negeri		- kelompok			- kelompok	
2.16.1.1.1.1.15.29	Pendataan Kesenian	Jumlah kesenian yang didata	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100 ikesenian	100.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	100 ikesenian	300.000.000,00
		Jumlah kesenian yang didokumentasikan		10 dokumentasi			10 dokumentasi	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.16.1.1.1.1.15.31	Pengadaan Tanah Gedung Kesenian	Luas tanah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	- m2	0,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	20.000 m2	30.000.000.000,00
		Dokumen FS		1 dokumen	- dokumen				
2.16.1.1.1.1.20	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Persentase Karya Budaya yang dikelola Secara Tuntas			17,33 %	1.250.766.000,00			1.655.733.000,00
		Persentasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yag Dilestarikan			10,34 indeks				
2.16.1.1.1.1.20.1	Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda	jumlah OPK WBTB		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3 orang/kelompok	30.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	5 orang/kelompok	50.000.000,00
2.16.1.1.1.1.20.2	Pemeliharaan Benda Cagar Budaya	Jumlah BCB yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	949 BCB	360.554.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	949 BCB	489.859.000,00
		Jumlah BCB yang masuk dalam penetapan bupati/jumlah BCB yang dibukukan			949 BCB			949 BCB	
		Jumlah juru pelihara yang mendapatkan pembinaan			90 orang			90 orang	
2.16.1.1.1.1.20.3	Edukasi Berbasis Kebudayaan	jumlah peserta kemah budaya		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	250 orang	360.212.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	250 orang	605.874.000,00
		Jumlah peserta lawatan sejarah			90 orang			90 orang	
		Jumlah peserta lomba karya ilmiah			80 orang			80 orang	
2.16.1.1.1.1.20.5	Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Jumlah peserta penghayat kepercayaan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11 organisasi	50.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	11 organisasi	60.000.000,00
2.16.1.1.1.1.20.6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (DAK NON FISIK)	Operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1 paket	450.000.000,00	Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan	1 paket	450.000.000,00
TOTAL						201.552.375.000,00	TOTAL		255.419.571.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					288.279.068.414,00			482.104.068.967,00
1.2	Kesehatan					288.279.068.414,00			482.104.068.967,00
1.2.1.2.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen	8.655.000.000,00			26.416.500.000,00
1.2.1.2.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola		DINAS KESEHATAN	8.000 surat	90.000.000,00	Rutin	8.100 surat	121.000.000,00
1.2.1.2.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	60 OH	200.000.000,00	Rutin	65 OH	440.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			30 OK			35 OK	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 OH			35 OH	
1.2.1.2.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		DINAS KESEHATAN	4 paket	2.000.000.000,00	Rutin	4 paket	5.830.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			4 paket			4 paket	
1.2.1.2.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket gedung yang dipelihara		DINAS KESEHATAN	3 paket	350.000.000,00	Rutin	3 paket	275.000.000,00
1.2.1.2.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan peralatan gedung kantor		DINAS KESEHATAN	1 paket	605.000.000,00	Rutin	1 paket	665.500.000,00
		Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			1 paket			1 paket	
1.2.1.2.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehab gedung	Wilayah Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	1 paket	5.000.000.000,00	Rutin	1 paket	13.750.000.000,00
		Terselenggaranya pembangunan Gedung Puskesmas Windusari			1 Unit			-	
1.2.1.2.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	12 kali	10.000.000,00	Rutin	12 kali	55.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.7.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket pengadaan kendaraan dinas		DINAS KESEHATAN	1 paket	400.000.000,00	Pembelian Ambulance PSC	1 paket	880.000.000,00
1.2.1.2.1.1.7.9	Pengadaan Tanah	Jumlah paket pengadaan tanah		DINAS KESEHATAN	2 paket	0,00	Mendukung Peningkatan Mutu Pelayanan dan Puskesmas Rawat Inap	2 paket	4.400.000.000,00
1.2.1.2.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	180.000.000,00			1.144.000.000,00
1.2.1.2.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	6 dokumen	150.000.000,00	Rutin	6 dokumen	181.500.000,00
		Jumlah Laporan yang tersusun			6 dokumen			-	
1.2.1.2.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun		DINAS KESEHATAN	2 dokumen	10.000.000,00	Rutin	2 dokumen	82.500.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan			8 dokumen			8 dokumen	
1.2.1.2.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		DINAS KESEHATAN	15 dokumen	10.000.000,00	Upaya peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan kesehatan	15 dokumen	275.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			20 dokumen			20 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			15 dokumen			15 dokumen	
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja			50 kali			50 kali	
1.2.1.2.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		DINAS KESEHATAN	1 paket	10.000.000,00	Peningkatan perencanaan kesehatan serta e-government bidang kesehatan	1 paket	605.000.000,00
		Cakupan pengembangan e-government			100 %			100 %	
1.2.1.2.1.1.34	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP			30 persen	211.666.164.419,00			334.349.177.967,00
		Cakupan Mutu Pelayanan RS			30 persen				
		Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium			30 persen				
1.2.1.2.1.1.34.1	Pengadaan Bahan dan Pemeriksaan Laboratorium	Jumlah bahan pemeriksaan laboratorium sesuai jumlah parameter pemeriksaan		DINAS KESEHATAN	3 bahan	200.000.000,00	Mendukung pemeriksaan laboratorium	3 bahan	343.365.000,00
1.2.1.2.1.1.34.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Umum	Jumlah parameter yang diperiksa dan jasa medis		DINAS KESEHATAN	142 parameter	100.000.000,00	Pengembalian jasa pelayanan	142 parameter	203.373.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.2.1.2.1.1.34.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terlaksana pelayanan kesehatan BLUD		DINAS KESEHATAN	100 persen	0,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 persen
1.2.1.2.1.1.34.4	Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Persentase pelayanan klaim maskin		DINAS KESEHATAN	100 %	33.186.280.000,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	100 %
1.2.1.2.1.1.34.5	Pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	Persentase klaim pelayanan kesehatan khusus		DINAS KESEHATAN	100 %	50.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %
		Persentase pelayanan kesehatan tradisional			100 %			100 %
1.2.1.2.1.1.34.6	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Persentase pelayanan jampersal		DINAS KESEHATAN	100 %	5.431.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	100 %
1.2.1.2.1.1.34.7	Peningkatan Mutu Pelayanan FKTP	Persentase terlaksananya peningkatan mutu FKTP		DINAS KESEHATAN	100 %	1.000.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %
1.2.1.2.1.1.34.8	Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah puskesmas terakreditasi		DINAS KESEHATAN	29 puskesmas	1.819.617.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	29 puskesmas
1.2.1.2.1.1.34.9	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase terlaksananya peningkatan mutu Pelayanan Rujukan		DINAS KESEHATAN	100 %	1.000.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %
1.2.1.2.1.1.34.10	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan Pelayanan Rujukan		DINAS KESEHATAN	100 %	100.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %
1.2.1.2.1.1.34.11	Pelayanan RS Merah Putih	Persentase terlaksananya pelayanan RS		DINAS KESEHATAN	100 %	71.200.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %
1.2.1.2.1.1.34.12	Pelayanan RS Candi Umbul	Persentase terlaksananya pelayanan RS		DINAS KESEHATAN	100 %	6.100.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.2.1.2.1.1.34.13	Pelayanan RS Bukit Menoreh	Persentase terlaksananya pelayanan RS	RSUD Bukit Menoreh Salaman Kab Magelang	DINAS KESEHATAN	100 %	6.100.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	44.000.000.000,00
1.2.1.2.1.2.34.14	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salaman 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SALAMAN I	100 %	6.821.476.300,00		7.521.219.300,00
1.2.1.2.1.3.34.17	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salaman 2	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SALAMAN II	100 %	1.816.518.400,00		1.818.023.500,00
1.2.1.2.1.4.34.18	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Borobudur	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD	Jl. Sentanu no.9 (Jl. Raya Borobudur - Tempuran) Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur	PUSKESMAS BOROBUDUR	100 %	5.901.744.260,00	-	6.291.281.300,00
1.2.1.2.1.5.34.19	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Ngluwar	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD	Puskesmas Ngluwar	PUSKESMAS NGLUWAR	100 %	1.730.966.100,00	-	1.740.765.500,00
1.2.1.2.1.6.34.20	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Salam	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD	PUSKESMAS SALAM	PUSKESMAS SALAM	100 %	2.265.112.600,00	BLUD PUSKESMAS	2.296.494.200,00
1.2.1.2.1.7.34.21	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Srumbung	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SRUMBUNG	100 %	2.572.965.700,00		2.600.778.900,00
1.2.1.2.1.8.34.22	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Dukun	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS DUKUN	100 %	2.679.785.600,00		2.698.189.600,00
1.2.1.2.1.9.34.23	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Sawangan 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SAWANGAN I	100 %	2.041.178.500,00		2.040.628.300,00
1.2.1.2.1.10.34.24	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Sawangan 2	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS SAWANGAN II	100 %	1.572.845.900,00		1.583.505.800,00
1.2.1.2.1.11.34.25	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Muntilan 1	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS MUNTILAN I	100 %	1.836.704.600,00		1.837.095.700,00
1.2.1.2.1.12.34.26	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Muntilan 2	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS MUNTILAN II	100 %	2.520.531.700,00		2.559.959.500,00
1.2.1.2.1.13.34.27	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mungkid	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD	PUSKESMAS MUNGKID	PUSKESMAS MUNGKID	100 %	3.970.536.300,00	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	4.005.143.300,00
1.2.1.2.1.14.34.28	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mertoyudan 1	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS MERTOYUDAN I	30 %	2.481.280.200,00		2.519.487.300,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.2.1.2.1.15.34.29	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Mertoyudan 2	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS MERTOYUDAN II	30 %	2.218.407.000,00		35 %
1.2.1.2.1.16.34.30	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD	PUSKESMAS TEMPURAN	PUSKESMAS TEMPURAN	100 %	3.410.989.500,00	BLUD	100 %
1.2.1.2.1.17.34.31	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kajoran 1	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS KAJORAN I	30 %	2.488.290.800,00		35 %
1.2.1.2.1.18.34.32	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kajoran 2	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS KAJORAN II	100 %	1.611.234.200,00		100 %
1.2.1.2.1.19.34.33	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kaliangkrik	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS KALIANGKRIK	100 %	4.533.964.900,00		100 %
1.2.1.2.1.20.34.34	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Bandongan	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS BANDONGAN	100 %	4.690.603.800,00		100 %
1.2.1.2.1.21.34.35	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Candimulyo	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS CANDIMULYO	100 %	3.335.021.600,00		100 %
1.2.1.2.1.22.34.36	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Pakis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS PAKIS	100 %	3.344.230.100,00		100 %
1.2.1.2.1.23.34.37	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Ngablak	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD		PUSKESMAS NGABLAH	100 %	2.438.380.900,00		100 %
1.2.1.2.1.24.34.38	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag 1	Terlaksannnya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS GRABAG I	100 %	6.828.062.500,00		100 %
1.2.1.2.1.25.34.39	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag 2	Terlaksannnya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS GRABAG II	100 %	1.349.115.500,00		100 %
1.2.1.2.1.26.34.40	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Tegalrejo	Terlaksannnya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS TEGALREJO	100 %	2.140.885.200,00		100 %
1.2.1.2.1.27.34.41	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Secang 1	Terlaksannnya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS SECANG I	100 %	3.100.282.259,00		100 %
1.2.1.2.1.28.34.42	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Secang 2	Terlaksannnya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS SECANG II	100 %	1.726.695.000,00		100 %
1.2.1.2.1.29.34.43	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Windusari	Terlaksannnya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS WINDUSARI	100 %	2.934.301.500,00		100 %
1.2.1.2.1.30.34.44	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Mungkid	Terlaksannnya Pelayanan Kesehatan BLUD		PUSKESMAS KOTAMUNGKID	100 %	1.017.156.500,00		100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.2.1.2.1.1.35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik			30 persen	20.125.794.000,00		14.400.000.000,00
		Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik			30 persen			
1.2.1.2.1.1.35.7	Pembangunan Puskesmas	Persentase terlaksananya pembangunan gedung puskesmas	Salaman dan Secang Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	100 %	9.125.794.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %
		Jumlah Puskesmas yang dibangun			2 Unit			-
1.2.1.2.1.1.35.8	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Persentase terlaksananya pembangunan gedung labkesmas	Kota Mungkid Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	100 %	5.000.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %
		Terselenggaranya pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat			1 Unit			-
1.2.1.2.1.1.35.9	Pembangunan Instalasi Farmasi Kesehatan	Persentase terlaksananya pembangunan gedung IFK		DINAS KESEHATAN	100 %	2.000.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %
1.2.1.2.1.1.35.10	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana		DINAS KESEHATAN	100 %	4.000.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	100 %
1.2.1.2.1.1.36	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			70 Persen	30.432.686.995,00		62.395.955.700,00
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular			100 persen			
		Cakupan Surveilans dan Imunisasi			60 persen			
1.2.1.2.1.1.36.1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase desa dengan Posbindu Aktif		DINAS KESEHATAN	50 %	1.000.000.000,00	Prioritas SPM	70 %
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu PTM			40 %			50 %
		Skrining kesehatan Penduduk Usia Produktif			100 %			100 %
		Penanganan Penderita Hipertensi			100 %			100 %
		penanganan Penderita Diabetes melitus			100 %			100 %
		Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker dengan Metode IVA dan Sadanis			30 %			50 %
1.2.1.2.1.1.36.2	Penanggulangan kesehatan Jiwa Masyarakat	Persentase Desa Siaga Sehat Jiwa yang terbentuk		DINAS KESEHATAN	30 %	1.000.000.000,00	Prioritas SPM	50 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.36.4	Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Menular dan Keracunan Makanan yang berpotensi KLB serta Penanganan Krisis Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan yang mengalami KLB mendapatkan respons <24 jam	DINAS KESEHATAN	100 %	250.000.000,00	Prioritas SPM	100 %	1.000.000.000,00
		Cakupan Puskesmas melakukan surveilans penyakit menular dan keracunan makanan berpotensi KLB serta penanganan krisis kesehatan		100 %			100 %	
		Cakupan Puskesmas melakukan penanganan krisis kesehatan		100 %			100 %	
		Cakupan Puskesmas melakukan surveilans penyakit menular dan keracunan makanan berpotensi KLB		100 %			100 %	
1.2.1.2.1.1.36.5	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	85 %	0,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui preventif dan promotif	90 %	25.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.36.6	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan rujukan UKM mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	85 %	1.396.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui preventif dan promotif	90 %	1.535.600.000,00
1.2.1.2.1.1.36.7	Dukungan Manajemen (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan dukungan manajemen mendukung preventif dan promotif kesehatan	DINAS KESEHATAN	85 %	1.155.000.000,00	Pendukung Dana Bantuan Operasional Kesehatan	90 %	1.270.500.000,00
1.2.1.2.1.1.36.8	Pencegahan dan pengendalian penyakit TB, HIV/AIDS dan penyakit menular terabaikan	Cakupan pemeriksaan terduga TB	DINAS KESEHATAN	100 %	1.000.000.000,00	Prioritas SPM	100 %	8.965.000.000,00
		Cakupan pemeriksaan HIV		100 %			100 %	
		Cakupan penanganan kasus penyakit menular langsung terabaikan sesuai standar		60 %			70 %	
1.2.1.2.1.1.36.9	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD, Malaria dan Penyakit Zoonosis	Cakupan penanganan kasus DBD	DINAS KESEHATAN	80 %	1.000.000.000,00	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	90 %	1.100.000.000,00
		Cakupan penangan kasus malaria		80 %			90 %	
		Cakupan penanganan kasus zoonosis		80 %			90 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.2.1.2.1.1.36.10	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (DAK Penugasan)	Persentase terlaksananya pengadaan dan kegiatan p2p		DINAS KESEHATAN	100 %	5.381.687.000,00	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	5.919.855.700,00
1.2.1.2.1.2.36.11	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salaman 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SALAMAN I	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.3.36.12	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salaman 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SALAMAN II	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.4.36.13	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Borobudur (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS BOROBUDUR	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.5.36.14	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngluwar (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan	Puskesmas Ngluwar	PUSKESMAS NGLUWAR	100 %	620.689.655,00	-	0,00
1.2.1.2.1.6.36.15	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Salam (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan	PUSKESMAS SALAM	PUSKESMAS SALAM	100 %	620.689.655,00	BOK Puskesmas	0,00
1.2.1.2.1.7.36.16	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Srumbung (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SRUMBUNG	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.8.36.17	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dukun (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS DUKUN	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.9.36.18	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sawangan 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SAWANGAN I	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.10.36.19	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sawangan 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS SAWANGAN II	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.11.36.20	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muntilan 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS MUNTILAN I	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.12.36.21	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muntilan 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS MUNTILAN II	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.13.36.22	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungkid (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS MUNGKID	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.14.36.23	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mertoyudan 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS MERTOYUDAN I	100 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.15.36.24	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mertoyudan 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS MERTOYUDAN II	70 %	620.689.655,00		0,00
1.2.1.2.1.16.36.25	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tempuran (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS TEMPURAN	70 %	620.689.655,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.2.1.2.1.17.36.26	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kajoran 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS KAJORAN I	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.18.36.27	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kajoran 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS KAJORAN II	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.19.36.28	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kaliangkrik (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS KALIANGKRIK	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.20.36.29	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bandongan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS BANDONGAN	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.21.36.30	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Candimulyo (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS CANDIMULYO	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.22.36.31	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pakis (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promosi kesehatan		PUSKESMAS PAKIS	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.23.36.32	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngablak (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif & promosi kesehatan		PUSKESMAS NGABLAH	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.24.36.33	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan		PUSKESMAS GRABAG I	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.25.36.34	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan		PUSKESMAS GRABAG II	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.26.36.35	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tegalrejo (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan		PUSKESMAS TEGALREJO	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.27.36.36	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Secang 1 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan		PUSKESMAS SECANG I	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.28.36.37	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Secang 2 (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan		PUSKESMAS SECANG II	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.29.36.38	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Windusari (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan		PUSKESMAS WINDUSARI	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.30.36.39	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Mungkid (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan mendukung preventif dan promotif kesehatan		PUSKESMAS KOTAMUNGKID	100 %	620.689.655,00	100 %	0,00
1.2.1.2.1.1.36.40	Penyelenggaraan Imunisasi	Cakupan imunisasi dasar lengkap		DINAS KESEHATAN	95 %	250.000.000,00	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	95 %
1.2.1.2.1.1.37	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan			82 persen	13.110.923.000,00		14.961.015.300,00
		Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan			84 persen			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.2.1.2.1.1.37.1	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	120 alat	150.000.000,00	Peningkatan kualitas alat kesehatan	120 alat
1.2.1.2.1.1.37.2	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	Jumlah ketersediaan Perbekalan kesehatan dan reagensia di Puskesmas	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	29 Puskesmas	1.700.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan dan derajat kesehatan	29 Puskesmas
1.2.1.2.1.1.37.3	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Janin dan Kehamilan Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat kesehatan	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	1 paket	1.500.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	1 paket
1.2.1.2.1.1.37.4	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Kecukupan dan obat di Puskesmas		DINAS KESEHATAN	29 Puskesmas	2.100.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	29 Puskesmas
1.2.1.2.1.1.37.5	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock		DINAS KESEHATAN	100 %	6.033.744.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %
1.2.1.2.1.1.37.6	Pengadaan Obat Gizi (DAK Penugasan)	Persentase ketersediaan obat dan buffer stock		DINAS KESEHATAN	100 %	1.178.419.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	100 %
1.2.1.2.1.1.37.7	Kursus Penjamah Makanan-Minuman	Persentase penjamah makanan yang meningkat pengetahuannya		DINAS KESEHATAN	100 %	23.000.000,00	Peningkatan kapasitas SDM	100 %
1.2.1.2.1.1.37.8	Pengawasan dan Peninjauan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan dan Alat Kesehatan	Persentase lokasi pembinaan pengawasan obat dan makanan		DINAS KESEHATAN	100 %	75.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan	100 %
1.2.1.2.1.1.37.9	Pembinaan Pengelolaan BLUD	Jumlah pembinaan UPT BLUD		DINAS KESEHATAN	29 UPT	70.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	29 UPT
1.2.1.2.1.1.37.10	Perencanaan, Peningkatan Kapasitas, Penilaian, Pembinaan Sarana dan Tenaga Kesehatan	Persentase terlatihnya karyawan di Dinas Kesehatan serta pembinaan perijinan nakes di fasyankes	DINAS KESEHATAN	75 %	50.000.000,00	Peningkatan mutu pelayanan	80 %	275.000.000,00
		Persentase tenaga kesehatan berijin		100 %			100 %	
		Persentase pelaksanaan penilaian angka kredit dan ukom jabfung nakes		100 %			100 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.2.1.2.1.1.37.11	Pengelolaan obat (pemantauan,penyimpanan,distribusi dan pemusnahan)	Terlaksananya manajemen pengelolaan obat		DINAS KESEHATAN	100 %	50.000.000,00	Peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan	93.500.000,00
1.2.1.2.1.1.37.12	Perencanaan, pengusulan, monev, pembinaan obat	Terpenuhinya perencanaan , pengusulan,monev dan pembinaan obat		DINAS KESEHATAN	100 %	95.000.000,00	Peningkatan pengelolaan obat	104.500.000,00
1.2.1.2.1.1.37.13	Distribusi Obat dan E-Logistik	Persentase disribusi obat dan E logistik		DINAS KESEHATAN	100 %	85.760.000,00	Peningkatan pengelolaan obat	94.336.000,00
1.2.1.2.1.1.38	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia, Gizi			62 persen	4.108.500.000,00		28.437.420.000,00
		Cakupan Kesehatan Lingkungan, Kesjaor			74 persen			
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan			59 persen			
1.2.1.2.1.1.38.1	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa ODF/ Stop buang Air Besar Sembarangan		DINAS KESEHATAN	146 Desa	200.000.000,00	Peningkatan kesehatan lingkungan	372 Desa
		Jumlah desa melaksanakan STBM			17 Desa			12 Desa
		Persentase penduduk dengan akses air bersih			80 %			85 %
		Persentase pengelolaan sampah rumah tangga memenuhi syarat			80 %			85 %
		Persentase TTU memenuhi syarat			75 %			80 %
		Persentase Rumah Tangga sehat			80 %			85 %
		Jumlah TPA dan TPS yang diintervensi			80 TPA & TPS			85 TPA & TPS
		Persentase pengelolaan limbah cair rumah tangga memenuhi syarat			80 %			85 %
		Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan			74 TPM			75 TPM
								605.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.38.2	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Kelompok/Klub olahraga yang dibina		DINAS KESEHATAN	30 Kelompok/Klub	60.000.000,00	Peningkatan K3 dan Kesehatan Olahraga	40 Kelompok/Klub	110.000.000,00
		Pengukuran Kebugaran calon jamaah haji			50 calon			60 calon	
		Pengukuran kebugaran jasmani pada anak sekolah			60 anak			65 anak	
		Pekerja formal mendapatkan konseling			50 pekerja			50 pekerja	
		Pekerja informal mendapatkan konseling			50 pekerja			50 pekerja	
		Promotif dan preventif yang dilakukan pada kelompok kesehatan kerja			50 kelompok			50 kelompok	
1.2.1.2.1.1.38.4	Upaya Promosi Kesehatan	Persentase ketersediaan media dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan		DINAS KESEHATAN	73 %	75.000.000,00	Peningkatan upaya promosi kesehatan	74 %	165.000.000,00
1.2.1.2.1.1.38.5	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang terbentuk		DINAS KESEHATAN	45 %	75.000.000,00	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	50 %	165.000.000,00
1.2.1.2.1.1.38.6	Pelayanan Gizi Keluarga	Jumlah obat penanggulangan kekurangan gizi dan bahan percontohan	Kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	2 paket	698.500.000,00	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 paket	768.350.000,00
		Jumlah keluarga disurvei kadarzi			200 keluarga			-	
		Jumlah pelaksana gizi yang ditingkatkan kapasitasnya tentang SKPG dan dietetik klinik			29 orang			29 orang	
		Jumlah balita gizi kurang-buruk, ibu hamil KEK dilayani			600 balita			700 ibu hamil	
		Jumlah rakor GAKI, monitoring garam beryodium			2 kali			21 Kecamatan	
		jumlah ibu hamil / WUS-Ratri diperiksa hb			1.000 ibu hamil			3.000 WUS - Ratri	
		Jumlah pemeriksaan TSH Ibu Hamil / Bayi			1.300 ibu hamil			300 bayi	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.38.7	Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia	jumlah pembahasan risti/kematian ibu dan anak (FGD) di tingkat desa	kabupaten Magelang	DINAS KESEHATAN	6 kasus	3.000.000.000,00	Prioritas SPM	- kasus	26.624.070.000,00
		Jumlah pembahasan rakor kesga gizi			12 kali			12 kali	
		Jumlah rekomendasi hasil pembahasan kematian ibu dan anak tk kabupaten			6 kali			6 kali	
		Jumlah pertemuan pemanfaatan PWS KIA dan kohort ibu hamil, optimalisasi P4K serta pencatatan pelaporan KB			4 kali			4 kali	
		Jumlah kasus KDRT dan KTPA yang dilayani			13 kasus			13 kasus	
		Jumlah pembahasan program lansia tk kabupaten, jumlah refreshing puskesmas santun lansia			12 kali			12 kali	
		Terlaksananya FGD			10 Desa			-	
		Penanganan kelainan tumbang balita gakin			3 anak			-	
		Refreshing puskesmas santun lansia			29 Puskesmas			-	
		TOTAL						288.279.068.414,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : RSUD MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					66.332.871.228,00			136.565.349.528,00
1.2	Kesehatan					66.332.871.228,00			136.565.349.528,00
1.2.1.2.2.1.35	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi			67 %	66.332.871.228,00			136.565.349.528,00
		Nilai Kepuasan Masyarakat			79 %				
1.2.1.2.2.1.35.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (Belanja BLUD)	Terpenuhinya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Selama 1 Tahun	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD MUNTILAN	100 %	63.803.944.728,00	-	100 %	65.615.349.528,00
1.2.1.2.2.1.35.2	Akreditasi Rumah Sakit	Survei Akreditasi RS Oleh KARS	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD MUNTILAN	1 Kali	200.000.000,00	-	1 Kali	200.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.3	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras Yang Diadakan	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD MUNTILAN	1 Paket	0,00	-	1 Paket	15.000.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.4	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Alkes Yang Diadakan		RSUD MUNTILAN	1 Paket	0,00		1 Paket	10.000.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.5	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarpras dan Alkes Dipelihara		RSUD MUNTILAN	2 Paket	0,00		2 Paket	750.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.6	Pengadaan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Alkes Yang Diadakan	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD MUNTILAN	1 Paket	2.328.926.500,00	-	1 Paket	15.000.000.000,00
1.2.1.2.2.1.35.11	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Sarpras Yang Diadakan		RSUD MUNTILAN	1 Paket	0,00		1 Paket	30.000.000.000,00
TOTAL						66.332.871.228,00	TOTAL		136.565.349.528,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					169.671.306.896,00		190.853.228.882,00
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					169.671.306.896,00		190.853.228.882,00
1.3.1.3.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.792.634.960,00		2.004.255.307,00
1.3.1.3.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.000 surat	45.048.935,00	Berjalannya administrasi perkantoran	4.000 surat
1.3.1.3.1.1.7.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4000.00 Surat	46.149.653,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Benda - Benda Pos, Blanko, Buku Agenda, Amplop	50.764.618,00
1.3.1.3.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dan rapat		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	462 kali	141.658.930,00	Berjalannya administrasi perkantoran	504 kali
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah			17 PD			19 PD
1.3.1.3.1.1.7.2.1	Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Rapat - Rapat Koordinasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	420.00 kali	56.674.687,00	Aparatur Pemda	62.342.156,00
1.3.1.3.1.1.7.2.2	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.00 Kali	85.000.000,00		93.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34 unit	288.632.930,00	Mendukung penyediaan sarpras yang memadai	34 unit	300.000.000,00
		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor			113 unit			113 unit	
1.3.1.3.1.1.7.3.1	Pengadaan Peralatan Kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34.00 Unit	200.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		200.000.000,00
1.3.1.3.1.1.7.3.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.00 set meja kursi tamu	100.000.000,00			100.000.000,00
1.3.1.3.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah alat listrik dan alat kebersihan yang dipelihara		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	46 alat	296.781.300,00	Mendukung penyediaan gedung dan prasarana yang memadai	46 alat	329.394.943,00
		Jumlah rekening yang dibayarkan			5 rekening			5 rekening	
		Jumlah THL yang diberi Honor			5 THL			5 THL	
1.3.1.3.1.1.7.4.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21.00 Kebersihan	162.449.948,00	Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air dan Listrik		178.694.943,00
1.3.1.3.1.1.7.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.00 Rekening	137.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		150.700.000,00
1.3.1.3.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25 buah	993.767.865,00	Mendukung penyediaan gedung dan prasarana yang memadai	25 buah	1.137.028.427,00
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			97 unit			97 unit	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			53 buah			53 buah	
		Jumlah Jaringan LAN dan Server yang terpelihara			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.7.5.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.00 Almari	18.848.792,00	Pemeliharaan Meubelair	20.733.670,00
1.3.1.3.1.1.7.5.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	96.00 Buah	914.813.415,00	Kendaraan Dinas	1.006.294.757,00
1.3.1.3.1.1.7.5.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.00 Unit	80.000.000,00	Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	88.000.000,00
1.3.1.3.1.1.7.5.4	Pemeliharaan Jaringan LAN dan Server		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	20.000.000,00	Jaringan LAN dan Server	22.000.000,00
1.3.1.3.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang diberi honor		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Tenaga Kontrak	26.745.000,00	1 Tenaga Kontrak	31.225.163,00
1.3.1.3.1.1.7.7.1	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 TK	28.386.512,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.386.512,00
1.3.1.3.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	223.729.102,00		265.279.358,00
1.3.1.3.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10 laporan	162.379.000,00	10 laporan	196.479.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 dokumen	20.745.780,00	Perencanaan Rutin Tahunan	1 dokumen	22.820.358,00
1.3.1.3.1.1.8.2.1	Penyusunan Renja PD		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Dokumen	20.745.780,00			22.820.358,00
1.3.1.3.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15 laporan	40.604.322,00		15 laporan	45.980.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas	120 kali		120 kali				
1.3.1.3.1.1.8.3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Klnerja PD		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.00 Laporan	30.300.000,00			27.830.000,00
1.3.1.3.1.1.8.3.2	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan Pembangunan Daerah			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125.00 kali	21.500.000,00			18.150.000,00
1.3.1.3.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 dokumen	0,00	Penyusunan Dokumen SOP	- dokumen	0,00
1.3.1.3.1.1.8.4.1	Penyusunan SOP		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Dokumen	10.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan	Cakupan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan			93 %	96.718.994.244,00			54.930.550.000,00
		Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik			78 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang dilebarkan 5,5 m	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 km	16.587.667.209,00	Mewujudakan kemantapan jalan	6 km	0,00
		panjang jalan yang ditingkatkan			10 km			10 km	
		jumlah ruas jalan yang ditingkatkan kecepatannya 40 km/jam			2 paket			2 paket	
		panjang jalan kabupaten			1.000 km			1.000 km	
		Jumlah jembatan yang dilebarkan 5,5 m			10 paket			7 paket	
1.3.1.3.1.1.36.1.1	Jalan Daleman - Sumururum		Kec. Grabag/Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.93 km	1.500.000.000,00	jalan		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.2	Jalan Candimulyo - Bawang		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	1.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.3	Jalan Muntilan - Srowol		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.00 km	2.667.305.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.4	Jalan Krakitan - Jerukagung		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	2.000.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.5	Jalan Pakunden - Bligo		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.70 km	750.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.6	Jalan Kaliduluwih - Somokerto		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.1.7	Jalan Selomerah - Babrik		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.00 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.8	Jalan Ketunggeng - Pucanganom		Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.9	Jalan Ngasinan - Ngablak		Kec. Grabag/Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.00 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.10	Jalan Grabag - Pirikan		Kec. Grabag/Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.50 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.11	Jalan Krogowanan - Gondowangi		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.00 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.12	Jalan Jambu - Krambetan		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.25 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.13	Jalan Pringombo - Kemutuk		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.14	Jalan Pakis - Losari - Rejosari		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	750.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.1.15	Jalan Klopo - Japan - Rejosari		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.60 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.16	Jalan Kaliabu - Kajoran		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.50 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.17	Jalan Beseran - Balekerto - Salamkanci		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.18	Jalan Dalam Kota Mertoyudan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.19	Jalan Mejing - Punduhan		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.20	Jalan Dalam Kota Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.21	Jalan Tegalsari - Tersangede		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.22	Jalan Gabag - Bleder - Tirto		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.00 km	1.000.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.1.23	Jalan Pucang - Banyusari		Kec. Secang/Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.50 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.24	Jalan Batikan - Mangunrejo		Kec. Tegalrejo/Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.90 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.25	Jalan Pirikan - Pucungsari		Kec. Secang/Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.50 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.26	Jalan Citroso - Seworan		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.45 km	684.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.27	Jalan Permitan - Krombangan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.28	Jalan Karangtalun - Kalibawang		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.29	Jalan Bangsri - Kajoran		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.30	Jalan Balerejo - Mangli		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	750.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.1.31	Jalan Grogol - Genito		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.32	Jalan Banaran - Ngemplak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.33	Jalan Losari - Banjarsari		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.75 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.34	Jalan Tempuran - Salamkanci		Kec. Tempuran/Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.45 km	1.500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.35	Jalan Pancar - Bangsri		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.36	Jalan Krambetan - Bangsri		Kec. Tempuran/Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.37	Jalan Sumberarum - Tempuran		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.00 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.38	Jalan Kembaran - Trenten - Ngrangkah		Kec. Candimulyo/Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.00 km	1.000.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.1.39	Jalan Margowangsan - Banyuurip		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.40	Jalan Podosoko - Soronalan		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.41	Jalan Wulunggunung - Gantang		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.42	Jalan Treko - Mangunsari		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.43	Jalan Muntilan - Keningar		Kec. Muntilan/Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	2.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.44	Jalan Punduhan - Surodadi		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.30 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.45	Jalan Sonorejo - Trenten		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.60 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.46	Jalan Sindas - Klopo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.00 km	1.000.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.1.47	Jalan Polengan - Pandanretno		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.48	Jalan Ngablak - Banyuadem		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.49	Jalan Tegalancar - Cawakan		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.50	Jalan Japunan - Dudan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.51	Jalan Danurejo - Bondowoso		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.52	Jalan Ketangi - Giritengah		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.53	Jalan Blondo - Ambartawang		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	750.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.54	Jalan Ngablak - Jagonayan - Genikan		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.1.55	Jalan Munengwarangan - Jambewangi		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.56	Jalan Wuwuharjo - Pandansari - Pandanretno			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.57	Jalan Wuwuharjo - Bambusari		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.00 km	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.58	Jalan Plikon - Sidorejo - Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	300.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.59	Jalan Adipuro - Munggangsari - Ngargosoko		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	300.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.60	Jalan Gondangrejo - Kandren		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.61	Jalan Tanjungsari - Ngemplak		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.62	Jalan Bumirejo - Paremono		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 km	500.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.1.63	Jalan Pakis - Petung		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.64	Jalan Daleman Kidul - Sabrang Kidul - Ngrangkah		Kec. Pakis/Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.65	Jalan Ketundan - Banyusidi - Posong		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.50 km	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.66	Jalan Sumberarum - Sidoagung		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.50 km	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.1.67	Biaya umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	332.695.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap Jalan	panjang jalan yang dipelihara	Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	215 km	23.187.892.258,00	Mewujudkan kemantapan jalan	215 km
		Jumlah Jembatan yang dipelihara			120 jembatan			120 jembatan
		Panjang Trotoar jalan kabupaten yang terpelihara			2 km			2 km
		panjang drainase jalan kabupaten yang terpelihara			2 km			2 km
		panjang talud atau turap jalan kabupaten yang terpelihara			1 km			1 km
1.3.1.3.1.1.36.3.1	Pemeliharaan Rutin Jalan		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	215.00 km	29.304.684.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.3.2	Pengaman Jalan Kembaran - Trenten (BERKALA JALAN)		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	600.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.3	Pengaman Jalan Balerejo - Maduretno (BERKALA JALAN)		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	400.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.4	Pengaman Jalan Kalegen - Balerejo (BERKALA JALAN)		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.5	Pengaman Jalan Windusari - Ngemplak (BERKALA JALAN)		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.6	Pengaman Jalan Banaran - Ngemplak (BERKALA JALAN)		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	600.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.7	Pengaman Jalan Japunan - Banjarnegoro (BERKALA JALAN)		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.8	Pengaman Jalan Kentengsari - Umbulsari (BERKALA JALAN)		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.9	Pengaman Jalan Girirejo - Ngasem (BERKALA JALAN)		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	500.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.3.10	Drainase Dalam Kota Mertoyudan (BERKALA JALAN)		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.11	Pengaman Jalan Pandean - Merapisari (BERKALA JALAN)		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	400.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.12	Pengaman Jalan Kalirejo - Kalipucung (BERKALA JALAN)		Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	400.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.13	Saluran Daleman - Sumurarum (Pesidi) (BERKALA JALAN)		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.14	Pengaman Jalan Gondowangi - Krogowanan (BERKALA JALAN)		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.15	Pengaman Jalan Windusari - Semen (BERKALA JALAN)		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.16	Senderan Jalan Kalirejo - Ngargoretno (Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Akibat Bencana Alam)		Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	1.500.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.17	Jalan Tegalsari - Druju - Baturobo (Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Akibat Bencana Alam)		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	4.000.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.3.18	Jalan Salam - Kaligesik (Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Akibat Bencana Alam)		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	5.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan 6 UPT		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120.00 unit	2.600.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.20	Pemeliharaan Jembatan Nepen di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	400.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.21	Pemeliharaan Jembatan Batang 1 di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	1.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.22	Pemeliharaan Jembatan Batang 2 di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	650.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.23	Pemeliharaan Jembatan Belik di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	350.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.24	Pemeliharaan Jembatan Sadegan di Ruas Jalan Sumberarum - Sidoangung (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	700.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.25	Pemeliharaan Jembatan Kali Putot di Ruas Jalan Pakis - Petung (Pemeliharaan Berkala Jembatan)		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	400.000.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.3.26	Pemeliharaan Drainase dan Trotoar (6 UPT)		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.00 km	2.000.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.3.27	Biaya umum			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	695.316.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4	Pembangunan dan Peningkatan Pelengkap jalan	Jumlah jembatan kabupaten	Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	485 jembatan	23.626.544.777,00	Mewujudakan kelengkapan jalan	485 jembatan
		Panjang drainase jalan yang dibangun/ditingkatkan			2 km			2 km
		Panjang trotoar yang dibangun/ditingkatkan			2 km			2 km
		Panjang talud atau turap yang dibangun/ditingkatkan			1 km			1 km
1.3.1.3.1.1.36.4.1	Peningkatan Jembatan Bangos Ruas Jalan Kleteran-Pagergunung		Ruas Jalan Kleteran - Pagergunung Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.800.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.2	Peningkatan Jembatan Cibuk Ruas Jalan Payaman-Windusari		Ruas Jalan Payaman-Windusari Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.200.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.3	Peningkatan Jembatan Beran Ruas Jalan Bandongan-Windusari		Ruas Jalan Bandongan-Windusari Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.100.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.4	Peningkatan Jembatan Biru Ruas Jalan Bandongan-Salamkanci		Ruas Jalan Bandongan-Salamkanci Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	2.000.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.4.5	Peningkatan Jembatan No.289 Ruas Jalan Dalam Kota Bandongan		Ruas Jalan Dalam Kota Bandongan Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.000.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.6	Peningkatan Jembatan Bendo Ruas Jalan Tempuran-Salamkanci		Ruas Jalan Tempuran-Salamkanci Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	2.400.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.7	Peningkatan Jembatan Sinan Ruas Jalan Mendut-Paremono		Ruas Jalan Mendut-Paremono Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	2.520.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.8	Pelebaran Jembatan Gung Ruas Jalan Blabak-Paremono		Ruas Jalan Blabak-Paremono Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.9	Peningkatan Jembatan Saratan Ruas Jalan Japunan-Banjarnegoro		Ruas Jalan Japunan-Banjarnegoro Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.575.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.10	Pelebaran Jembatan Kedungsapi Ruas Jalan Mertoyudan-Tampir		Ruas Jalan Mertoyudan-Tampir Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	2.100.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.11	Peningkatan Jembatan Katang I Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo		Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	900.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.12	Peningkatan Jembatan Bigaran Ruas Jalan Bigaran-Suroloyo		Ruas Jalan Bigaran-Suroloyo Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	2.205.000.000,00	Jembatan	54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.13	Pelebaran Jembatan Sewukan Ruas Jalan Tlatar-Dukun		Ruas Jalan Tlatar-Talun Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	800.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.14	Pelebaran Jembatan Katang II Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo		Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	750.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.15	Peningkatan Jembatan Geretan Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo		Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	3.500.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.16	Penggantian Jembatan Brangkal Ruas Jalan Krincing-Grabag		Ruas Jalan Krincing-Grabag Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	7.500.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.17	Pembangunan Groundsill Pengaman Jembatan Kedungbuntung Ruas Jalan Bandongan-Windusari		Ruas Jalan Bandongan-Windusari Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	500.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.18	Pembangunan Drainase Jalan Ruas Jalan Secang-Pucang		Ruas Jalan Secang-Pucang Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	4.320.000.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.19	Penggantian Jembatan Giritengah Ruas Jalan Giritengah-Ngargoretno		Ruas Jalan Giritengah-Ngargoretno Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.800.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.20	Penggantian Jembatan Warong Ruas Jalan Giritengah-Ngargoretno		Ruas Jalan Giritengah-Ngargoretno Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.200.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.4.21	Pembangunan Drainase Jalan di Ruas Jalan Krincing-Grabag		Ruas Jalan Krincing-Grabag Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	2.000.000.000,00	Drainase	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.22	Pembangunan Talud Jalan Temanggal-Pringombo 350 m Ruas Jalan Kemutuk-Pringombo-Growong		Ruas Jalan Kemutuk-Pringombo-Growong Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	350.000.000,00	Talud	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.23	Pembangunan Talud Jalan Mbulu Ruas Jalan Muntilan-Keningar		Ruas Jalan Muntilan-Keningar Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.000.000.000,00	Talud	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.24	Pembangunan Trotoar dan Gorong-gorong Jalan Kr. Santri Gunungpring Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan		Ruas Jalan Dalam Kota Muntilan Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 p	0,00	Trotoar	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.25	Pembangunan Trotoar 1100 m Klumpit-Barisan (SMPN 1 Candimulyo) Ruas Jalan Tegalrejo-Candimulyo		Ruas Jalan Tegalrejo-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	475.000.000,00	Trotoar	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.26	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten 600 m Klumpit Desa Surojoyo Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo		Ruas Jalan Elo Surobayan-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Drainase	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.27	Pembangunan Trotoar 300 m Barisan Desa Candimulyo Ruas Jalan Tegalrejo-Candimulyo		Ruas Jalan Tegalrejo-Candimulyo Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	0,00	Trotoar	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.28	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten (Trenten Utara) 1 km Ruas Jalan Sonorejo-Trenten		Ruas Jalan Sonorejo-Trenten Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	0,00	Drainase	54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.4.29	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten 300 m Kembaran (Pertigaan Kembaran) Ruas Jalan Kembaran-Trenten-Ngrangkah		Ruas Jalan Kembaran-Trenten-Ngrangkah Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	0,00	Drainase	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.30	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten 1 km Giyanti-Bojong Ruas Jalan Candimulyo-Pogalan		Ruas Jalan Candimulyo-Pogalan Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	0,00	Drainase	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.31	Pembangunan Drainase Jalan Tampir-Bateh 400 m Ruas Jalan Tampir Wetan-Bateh		Ruas Jalan Tampir Wetan - Bateh Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	0,00	Drainase	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.32	Pembangunan Senderan Jalan Kabupaten (Tampir Kulon-Mertoyudan) 50 m Ruas Jalan Podosoko-Tampir Kulon		Ruas Jalan Podosoko-Tampir Kulon Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	0,00	Talud	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.33	Pembangunan Selokan Jalan Kabupaten 1 Unit 1800 m Sidorejo Ruas Jalan Soroyudan, Sidorejo-Tegalrejo		Ruas Jalan Soroyudan, Sidorejo-Tegalrejo Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	550.000.000,00	Drainase	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.34	Pembangunan Talud 150 m Dusun Geger II-Pending (Jalan Kabupaten) Ruas Jalan Girirejo-Ngasem-Surobayan		Ruas Jalan Girirejo-Ngasem-Surobayan Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	0,00	Talud	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.35	Pembangunan Drainase Jalan Evakuasi Ruas Jalan Ngablak-Banyuadem-Kradenan		Ruas Jalan Ngablak-Banyuadem-Kradenan Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	0,00	Drainase	54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.36	Pembangunan Drainase Gulon-Soko Desa Polengan Ruas Jalan Polengan-Pandanretno		Ruas Jalan Polengan-Pandanretno Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Drainase	54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.37	Pembangunan Jembatan Watuanten Ruas Jalan Kaliaji-Pagergunung		Ruas Jalan Kaliaji-Pagergunung Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	300.000.000,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.38	Pembangunan Drainase Jalan Kalirejo-Purworejo 2 km Desa Ngargoretno-Giripurno Ruas Jalan Beteng-Tunggangan		Ruas Jalan Beteng-Tunggangan Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	900.000.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.39	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten dari SMA Kota Mungkid-Batas Kota (Cangkol Nglerep) Ruas Jalan Mungkid-Tanjunganom		Ruas Jalan Mungkid -Tanjunganom Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	476.300.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.40	Pembangunan Talud Drainase Jalan 2 km Jalan Raya Maduretno Ruas Jalan Maduretno-Prampelan		Ruas Jalan Maduretno-Prampelan Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	1.266.200.000,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.41	Pembangunan Senderan Jalan Kabupaten 1250 m Desa Mangli Ruas Jalan Balerejo-Mangli		Ruas Jalan Balerejo-Mangli Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	600.000.000,00	Talud		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.42	Pembangunan Drainase Selomoyo-Balerejo Ruas Jalan Maduretno-Balerejo		Ruas Jalan Maduretno-Balerejo Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Drainase		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.43	Pembangunan Jembatan ANtar Desa Girirejo-Ketangi Ruas Jalan Ketangi-Girirejo		Ruas Jalan Ketangi-Girirejo Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	0,00	Jembatan		54.690.550.000,00
1.3.1.3.1.1.36.4.44	Biaya Umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	900.000.000,00	Bangunan Pelengkap Jalan		54.690.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.4.45	Drainase Jalan Muntilan - Srowol		Kec. Muntilan/Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.46	Drainase Jalan Payaman - Windusari		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.47	Drainase Jalan Tempuran - Salamkanci		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.48	Trotoar Depan Kec. Candimulyo di Ruas Jalan Tegalrejo - Candimulyo - Blabak		Kec. Tegalrejo/Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.49	Trotoar Depan SMPN Mertoyudan 3 Sraten di Ruas Jalan Kota Mungkid - Tanjunganom		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.50	Jembatan Krasak di Ruas Jalan Kaliurang - Balerante		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.51	Jembatan Wanadri - Donomulyo		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.52	Pembangunan Jembatan Muntilan - Sawangan		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.4.53	Pembangunan Drainase Jalan M. Yusuf Adikarto / RSPD - Srowol		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.54	Pembangunan Jembatan Klopo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.55	Pelebaran Jembatan Kalibolong		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.56	Trotoar Pertigaan Terminal Tegalrejo - Kecamatan Tegalrejo			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.57	Pelebaran Jembatan Kanci Desa Balekerto di Ruas Jalan Beseran - Balekerto		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.58	Pelebaran Jembatan Ketangi - Girirejo		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.59	Pembangunan trotoar di wilayah Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.4.60	Drainase Banjarsari di Jalan Payaman - Windusari dan Jalan Bandonan - Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.4.61	Senderan Tanjungsari di Jalan Balerejo - Kaliangkrik		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0.00	0,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.5	Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Jalan	Jumlah Dokumen Tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3 Paket	200.000.000,00	perencanaan dan informasi jalan	1 Paket	0,00
1.3.1.3.1.1.36.5.1	Update aplikasi e jalan		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	100.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.5.2	Survei jalan di 3 UPT		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	95.200.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.5.3	Survei jalan di 3 UPT		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	95.300.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.5.4	Biaya umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	9.500.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.36.6	Penyediaan dan Pengelolaan Data / Informasi Pelengkap Jalan	Jumlah Dokumen Tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 Paket	360.000.000,00	perencanaan dan informasi pelengkap jalan	- Paket	0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.36.6.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Muntilan		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan		0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.3	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Salaman		Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan		0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.4	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan		0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.5	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan		0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.6	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan di UPT DPUPR Wilayah Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	58.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan		0,00
1.3.1.3.1.1.36.6.7	Biaya Umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	12.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Data Informasi Bangunan Pelengkap Jalan		0,00
1.3.1.3.1.1.36.7	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10 km	20.636.318.000,00	Mewujudkan kemantapan jalan	10 km	120.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.36.7.1	Biaya umum		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	115.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.10	Peningkatan Jembatan Kabupaten (Bangub)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 jembatan	0,00	Mewujudkan kemantapan jalan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.10.1	Penggantian Jembatan No. 66 Ruas Jalan Salaman-Kajoran		Ruas Jalan Karasak-Kajoran Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Jembatan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.11	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10 km	12.120.572.000,00	mendukung kemantapan jalan	120.000.000,00
1.3.1.3.1.1.36.11.1	Biaya umum			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	115.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.36.13	Peningkatan Jembatan Kabupaten (DAK)	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 jembatan	0,00	Mewujudkan kemantapan jalan	0,00
1.3.1.3.1.1.36.13.1	Penggantian Jembatan Sileng Ruas Jalan Borobudur-Pakem		Ruas Jalan Borobudur-Bigaran Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Jembatan	0,00
1.3.1.3.1.1.37	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi	Cakupan layanan jaringan irigasi			83 %	17.668.604.255,00		37.681.100.007,00
		Cakupan layanan Sumber Daya Air			81 %			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.1	Pengembangan dan Penguatan Pengelola Irigasi dan SDA	Jumlah sosialisasi peningkatan pengelola irigasi dan SDA	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15 kali	1.074.160.000,00	Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Pengelola Irigasi dan SDA	15 kali	1.956.600.000,00
		Jumlah rapat koordinasi forum koordinasi daerah irigasi			6 rapat			6 rapat	
		Jumlah Daerah Irigasi yang disosialisasi sertifikasi tanah			5 D.I			5 D.I	
		Jumlah Daerah Irigasi yang disertifikat tanah irigasinya			5 D.I.			5 D.I.	
		Jumlah tanggul percontohan saluran terbangun			10 D.I.			10 D.I.	
1.3.1.3.1.1.37.1.1	Forum Koordinasi Daerah Irigasi		DPUPR Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.00 Rapat	100.000.000,00	GP3A dan Komisi Irigasi		110.000.000,00
1.3.1.3.1.1.37.1.2	Peningkatan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan SDA		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.00 Rapat	150.000.000,00	P3A dan Staf Dinas		170.000.000,00
1.3.1.3.1.1.37.1.3	Sosialisasi Sertifikasi tanah irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.00 D.I	32.760.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten		36.100.000,00
1.3.1.3.1.1.37.1.4	Sertifikasi tanah irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.00 D.I	1.000.000.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten		1.100.000.000,00
1.3.1.3.1.1.37.1.5	Pembuatan Tanggul Percontohan		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10.00 D.I	491.400.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten		540.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.2	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah dokumen AKNPI dan Penyediaan Air yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30 Dokumen	1.793.353.000,00	Mendukung irigasi pertanian	30 Dokumen	4.299.800.000,00
		Luas daerah irigasi yang terpelihara dan D.I yang direncanakan konstruksi			2.652 Ha			1.873 Ha	
		Jumlah data Informasi Wilayah Konservasi Air Tanah yang tersedia			50 buah			50 buah	
		Jumlah data pemetaan Daerah Irigasi yang akurat tentang Jaringan Irigasi			178 D.I.			178 D.I.	
		Jumlah data studi potensi pengembangan Jaringan irigasi Air Tanah (JIAT) yang tersedia			6 lokasi			8 lokasi	
		Jumlah Jaringan irigasi Air Tanah (JIAT) yang terbangun			- Titik			4 Titik	
		Jumlah data Daerah Irigasi yang di laksanakan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)			11 D.I			11 D.I	
		Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang terpelihara			- Titik			- Titik	
		Jumlah Dokumen perencanaan Daerah Irigasi			61 Dokumen			64 Dokumen	
		1.3.1.3.1.1.37.2.1			Pelaksanaan Desain Partisipatif D.I. Aji (233 Ha)				
1.3.1.3.1.1.37.2.2	Pelaksanaan Desain Partisipatif D.I. Aji Sidowangi (150 Ha)		Ds. Sidowangi Kec Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	50.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.2.3	Pelaksanaan Desain Partisipatif D.I. Ngepeh (414,91 Ha)		Ds. Gandusari Kec Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	100.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.2.4	Pelaksanaan Rehabilitasi Partisipatif D.I. Aji Semagung (335 Ha)		Ds. Pandansari Cs Kec Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	450.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.2.5	Pelaksanaan Rehabilitasi Partisipatif D.I. Banyu Sumurup (175 Ha)		Ds. Banyudono Kec Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	499.347.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.37.2.6	Pelaksanaan O & P Partisipatif D.I. Balegede (363 Ha)		Ds. Kalegen Kec Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.37.2.7	Biaya Administrasi Umum Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif		DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 ls	40.653.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.37.2.8	AKNPI dan Rencana Penyediaan Air		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	30.00 D.I	115.000.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten	120.000.000,00
1.3.1.3.1.1.37.2.9	Penyediaan dan Pengolahan Data Informasi Wilayah Konservasi Air Tanah		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.00 Buah	150.000.000,00	Sungai, mata air dan air tanah	200.000.000,00
1.3.1.3.1.1.37.2.10	DED Pembangunan Jaringan irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.00 Buah	450.000.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten	454.500.000,00
1.3.1.3.1.1.37.2.11	Pendataan Aset Pengairan dan Pemetaan Daerah Irigasi (GIS)		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	178.00 D.I	134.200.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten	147.700.000,00
1.3.1.3.1.1.37.2.12	Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.00 D.I	116.000.000,00	D.I Kewenangan Kabupaten	127.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.2.13	Studi Potensi Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.00 lokasi	315.000.000,00	Jaringan Irigasi Air Tanah	420.000.000,00
1.3.1.3.1.1.37.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhab		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	328 Ha	3.958.402.000,00	Mendukung kemantapan jaringan irigasi	2.375,89 Ha
		Jumlah D.I yang direncanakan pembangunan			9 Daerah Irigasi			25 Daerah Irigasi
1.3.1.3.1.1.37.3.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Dawung A Ka		Desa Pirikan Kecamatan Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	850.000.000,00	Areal 91,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kesaran		Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	840.000.000,00	Areal 56,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jombor		Desa Rejosari Kecamatan Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	585.000.000,00	Areal 39,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Curug 4		Desa Sidosari Kecamatan Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	450.000.000,00	Areal 30,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipalung		Desa Sidosari Kecamatan Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	450.000.000,00	Areal 30,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gayam III		Desa Tirta Kecamatan Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.3.7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mlobo		Desa Karangjajen Kecamatan Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Watu Sigar		Desa Balesari Kecamatan Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tuk Songo III		Desa Pagergunung Kecamatan Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	345.000.000,00	Areal 23,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mangun		Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	300.000.000,00	Areal 20,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cebong 2		Desa Jebengsari Kecamatan Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	303.900.000,00	Areal 20,26 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Curug 3		Desa Ketangi Kecamatan Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	285.000.000,00	Areal 19,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gayam V		Desa Kebonrejo Kecamatan Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	285.000.000,00	Areal 19,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jingkong		Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	285.000.000,00	Areal 19,00 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.3.15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Grebek II		Desa Banyubiru Kecamatan Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	255.000.000,00	Areal 17,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidodadi		Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	225.000.000,00	Areal 15,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Rejosari		Desa Soronalan Kecamatan Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.500.000,00	Areal 12,50 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sijaran		Desa Pagergunung Kecamatan Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	150.000.000,00	Areal 10,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Grigak I		Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	507.000.000,00	Areal 33,80 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidondong		Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	409.800.000,00	Areal 27,32 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kricakan		Desa Salam Kecamatan Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	450.000.000,00	Areal 30,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngelo I		Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	600.000.000,00	Areal 40,00 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.3.23	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngaglik I		Desa Kradenan Kecamatan Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	650.000.000,00	Areal 59,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngempon		Desa Ngawonggo Kecamatan Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	750.000.000,00	Areal 60,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.25	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krisik		Desa Kebonagung Kecamatan Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	465.000.000,00	Areal 31,00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.26	Biaya Penunjang DAK (Konsultan, Honorarium Fasilitator, SPPD dalam daerah, biaya rapat)			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	251.575.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.3.27	Biaya Umum APBD			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	286.125.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4	Operasi Jaringan Irigasi	Jumlah Pintu Airnya yang terpelihara	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 Pintu Air	498.942.255,00	Mendukung irigasi pertanian	7 Pintu Air	637.100.000,00
		Jumlah D.I. yang dibangun bangunan ukur			13 D.I.			13 D.I.	
		Jumlah Dokumen Pedoman Pola Tanam			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah data debit daerah irigasi			100 D.I			100 D.I	
		Jumlah rapat dan perjalanan dinas			6 kali			6 kali	
1.3.1.3.1.1.37.4.1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.4.2	Pembuatan Bangunan Ukur Debit Air		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.00 Paket	230.500.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4.3	Penyusunan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Dokumen	30.635.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4.4	Penyediaan Data Debit Daerah Irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.00 D.I.	44.100.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4.5	Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang PU (PPKD-PU) dan OP Pengairan		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.00 Rapat	82.500.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.4.6	Biaya Administrasi Umum		DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Ls	35.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.37.5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas layanan daerah irigasi yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.594 ha	6.353.518.000,00	Mendukung irigasi pertanian	2.137 ha	9.827.800.000,00
		Jumlah Daerah Irigasi yang terpelihara secara rutin			2 D.I			2 D.I	
		Jumlah THL yang diberi honor			30 THL			33 THL	
1.3.1.3.1.1.37.5.1	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Salam Kanci		Ds. Salam Kanci Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 135.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Singo Bangun		Ds. Banyuwangi Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	190.000.000,00	Areal = 20.00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.5.3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sinongko		Ds. Sukodadi Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 19.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.4	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pencar		Ds. Mejing Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	225.000.000,00	Areal = 106.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.5	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Selosari		Ds. Wates Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 23.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.6	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pojok		Ds. Mangunsuko Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 26.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.7	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Cumprit		Ds. Ketunggeng Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 20.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.8	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Musuk		Ds. Dukun Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	255.000.000,00	Areal = 39.00 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.9	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kalinongko		Ds. Klegen Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 50.50 Ha		0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.10	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pendem		Ds. Banaran Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 18.00 Ha		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.5.11	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sepampung		Ds. Sumurarum Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	185.000.000,00	Areal = 40.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.12	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Beringin		Ds. Salam Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 26.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.13	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sesuno		Ds. Banyusari Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	160.000.000,00	Areal = 25.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.14	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pucung II		Ds. Sidorejo Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 18.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.15	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Warangan		Ds. Mangunrejo Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 35.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.16	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sipodang		Ds. Wuwuharjo Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	230.000.000,00	Areal = 30.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.17	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Si Iwil iwil		Ds. Beseran Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 125.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.18	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Junjungan I, II, III & IV		Ds. Giriwarno Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	275.000.000,00	Areal = 212.00 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.5.19	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Gondang Treko		Ds. Gondang Cs Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	195.000.000,00	Areal = 365.25 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.20	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jayan		Ds. Sukorini Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 28.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.21	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kedung Gupit		Ds. Menayu Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 35.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.22	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Semali B		Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	225.000.000,00	Areal = 28.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.23	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Prigi		Ds. Karang Talun Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 30.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.24	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Ngipik/ Ploso		Ds. Pakunden Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	160.000.000,00	Areal = 47.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.25	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Ngabean		Ds. Warangan Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 27.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.26	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Nabin		Ds. Gulon Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	180.900.000,00	Areal = 25.00 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.5.27	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jati II		Ds. Plosogede Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 54.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.28	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Bakalan		Ds. Bligo Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 25.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.29	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Duwet		Ds. Mantingan Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	250.000.000,00	Areal = 60.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.30	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kaliloro		Ds. Sawangargo Cs Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 330.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.31	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Balong I		Ds. Sidosari Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	185.000.000,00	Areal = 29.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.32	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Seringin I		Ds. Banyusari Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	165.000.000,00	Areal = 25.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.33	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sumberan Kanan		Ds. Krincing Cs Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 567.40 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.34	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pari		Ds. Jeruk Agung Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 15.00 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.5.35	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Krobyokan		Ds. Kaliurang Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 40.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.36	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pandaran		Ds. Tegalrandu Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	175.000.000,00	Areal = 18.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.37	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pucang		Ds. Pucanganom Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	176.000.000,00	Areal = 29.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.38	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Dawung A Kiri		Ds. Dawung Cs Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	250.000.000,00	Areal = 202.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.39	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Loning		Ds. Balekerto Cs Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 658.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.40	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Dawang		Ds. Gondangrejo Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	150.000.000,00	Areal = 10.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.41	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Mangir		Ds. Balesari Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	180.000.000,00	Areal = 11.00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.42	Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sidandang I		Ds. Semen Cs Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Areal = 316.00 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.5.43	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Akibat Bencana Alam		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Kegiatan	250.000.000,00	Areal = 652.26 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.44	Belanja Alat-alat Operasi dan Pemeliharaan		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	40.000.000,00	Alat-alat Operasi dan Pemeliharaan	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.45	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	10.000.000,00	3 Potong Rumput	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.46	Pemeliharaan Rutin Bangunan Jaringan Irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Kegiatan	363.000.000,00	2 Daerah Irigasi	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.47	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Kegiatan	736.560.000,00	30 THL	0,00
1.3.1.3.1.1.37.5.48	Biaya Administrasi Umum		DPUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Ls	294.940.000,00		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.1.3.1.1.37.6	Rehabilitasi / Pembangunan Jaringan Irigasi	Luas cakupan pelayanan daerah irigasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	221,59 Ha	3.416.141.000,00	Mendukung irigasi pertanian	212 Ha	0,00
		Jumlah D.I yang direncanakan pembangunan			4 Daerah Irigasi			7 Daerah Irigasi	
		Penanggulungan, perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi akibat bencana alam			3 Daerah Irigasi			3 Daerah Irigasi	
		Inventarisasi potensi embung			2 UPTD			2 UPTD	
		Studi kelayakan (FS) untuk irigasi pada embung			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Sosialisasi dan pembebasan tanah pada pembangunan embung			- Lokasi			- Lokasi	
		DED pembangunan embung			- Dokumen			1 Dokumen	
		Pembangunan embung			- Embung			- Embung	
1.3.1.3.1.1.37.6.1	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Taruman		Desa Balesari Kecamatan Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	300.000.000,00	Areal 20,00 Ha	0,00	
1.3.1.3.1.1.37.6.2	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Kwayuhan A		Desa Wates Kecamatan Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	420.000.000,00	Areal 28,00 Ha	0,00	
1.3.1.3.1.1.37.6.3	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Gembyang		Desa Sutopati Kecamatan Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	315.000.000,00	Areal 18,60 Ha	0,00	
1.3.1.3.1.1.37.6.4	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Kreo II		Desa Banjarsari Kecamatan Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha	0,00	
1.3.1.3.1.1.37.6.5	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Banaran A		Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	270.000.000,00	Areal 18,00 Ha	0,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.6.6	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Juwono		Desa Wates Kecamatan Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	375.000.000,00	Areal 25,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.7	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Baturan		Desa Temanggung Kecamatan Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	270.000.000,00	Areal 18,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.8	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Plalangan		Desa Bringin Kecamatan Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	405.000.000,00	Areal 27,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.9	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Bendo III		Desa Mranggen Kecamatan Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	378.600.000,00	Areal 20,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.10	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Bojong I		Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	330.000.000,00	Areal 22,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.11	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Tampilan		Desa Tampilan Kecamatan Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	536.700.000,00	Areal 18,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.12	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Ngimbang		Desa Klegen Kecamatan Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	400.000.000,00	Areal 4,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.13	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Mrawu		Desa Sidosari Kecamatan Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	550.120.000,00	Areal 107,99 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.37.6.14	Jasa Konsultan Inventarisasi Potensi Embung UPT DPUPR Wilayah Grabag			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	70.000.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.15	Jasa Konsultan Inventarisasi Potensi Embung UPT DPUPR Wilayah Tegalrejo			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	68.380.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.16	Jasa Konsultan Studi Kelayakan (FS) Embung Dusun Kayupuring Desa Banyusari		Desa Banyusari Kecamatan Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	184.500.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.37.6.17	Biaya Umum			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	179.700.000,00		0,00
1.3.1.3.1.1.37.7	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya debit air layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2 Mata Air	574.088.000,00	Penyediaan dan konservasi sumber daya air	2 Mata Air
		Perencanaan konservasi mata air			- Mata Air			- Mata Air
1.3.1.3.1.1.37.7.1	Bangunan Penampung dan Saluran Irigasi M.A. Tuk Catak		Desa Ngasinan Kecamatan Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Areal 60,00 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.7.2	Bangunan Penampung dan Saluran Irigasi M.A. Mrawu		Desa Jogomulyo Kecamatan Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	550.000.000,00	Areal 10,84 Ha	0,00
1.3.1.3.1.1.37.7.3	Bangunan Penampung dan Saluran Irigasi M.A. Kalisari		Desa Ngluwar Kecamatan Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	485.000.000,00	Areal 5,85 Ha	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.37.7.4	Biaya Umum			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	65.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.38	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik			99 %	46.329.309.475,00			85.731.000.000,00
		Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik			12 %				
		Cakupan layanan air minum			89 %				
		Cakupan layanan sanitasi			48 %				
		Prosentase terbangunnya Landmark			64 %				
1.3.1.3.1.1.38.2	Pengawasan dan Fasilitasi Bangunan Gedung	Jumlah rekomendasi laik fungsi yang dikeluarkan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5 rekomendasi	150.000.000,00	regulasi bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi gedung	5 rekomendasi	300.000.000,00
		Jumlah Perda tersusun			- Perda			1 Perda	
1.3.1.3.1.1.38.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	Jumlah DED tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3 Dokumen	31.650.000.000,00	Prioritas pembangunan untuk penyediaan gedung pemerintah yang layak	3 Dokumen	55.200.000.000,00
		Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun			5 gedung			3 gedung	
		Jumlah Gedung yang direhabilitasi			10 Gedung			10 Gedung	
1.3.1.3.1.1.38.3.1	Pembangunan Rumah Sakit		Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	49.015.000.000,00	Masyarakat Umum		55.000.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.3.2	Pembangunan Kantor Kecamatan Borobudur Tahap II		Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 gedung	3.900.000.000,00	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Umum		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.3	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan		Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 gedung	10.850.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.3.4	Pembangunan Gedung Kantor DPRKP		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 gedung	7.900.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.5	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pertanian		Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 gedung	19.500.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.6	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Bappeda dan Litbangda		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 DED	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.7	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Inspektorat		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 DED	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.8	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Muntilan		Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 DED	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.9	Rehab Gedung Setda		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 gedung	200.000.000,00	Aparatur Pemerintah		200.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.3.10	Pembuatan Tempat Parkir DPUPR		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	2.000.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.11	Rehab Kantor UPT DPUPR Wilayah Grabag		Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.3.12	Rehab Kantor UPT DPUPR Wilayah Muntilan		Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.13	Rehab Kantor Bapermaspuan dan KB		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.14	Rehab Kantor Kecamatan Secang		Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.15	Rehab Kantor Dispermades		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	100.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.16	Rehab Gedung Sanggar Pramuka		Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Umum		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.17	Rehab Kantor Dinas Lingkungan Hidup		Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	70.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.18	Pembuatan Talud Kantor Kecamatan Kaliangkrik		Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 paket	200.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00
1.3.1.3.1.1.38.3.19	Belanja Jasa Konsultan		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.00 paket	1.475.000.000,00	Aparatur Pemerintah		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.3.20	Belanja Operasional		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 paket	560.000.000,00	Aparatur Pemerintah	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK REGULER	Jumlah Desa terbangun SPAM	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2 Desa	1.738.812.000,00	Standar Pelayanan Minimal layanan air minum	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.1	Pembangunan SPAM Desa Ketawang Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.600.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.2	Pembangunan SPAM Desa Losari Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.015.195.854,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.3	Pembangunan SPAM Desa Sukosari Kec. Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	400.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.4	Perencanaan Pembangunan SPAM Desa Ketawang Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	65.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.5	Review Desain Pembangunan SPAM Desa Losari Kec. Grabag dan Desa Sukosari Kec. Bandongan		Kec. Grabag dan Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	69.180.262,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.6	Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Ketawang Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	45.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.6.7	Pengawasan Pembangunan SPAM Desa Losari Kec. Grabag dan Desa Sukosari Kec. Bandongan		Kec. Grabag dan Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	49.225.842,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.6.8	Biaya Operasional		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	85.933.082,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DAK PENUGASAN	Jumlah Desa terbangun SPAM	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7 lokasi	2.719.110.000,00	Standar Pelayanan Minimal layanan air minum	7 lokasi	3.750.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.7.1	Pembangunan SPAM Desa Banyusidi Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 p	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.2	Pembangunan SPAM Desa Kalibening Kec. Dukun		Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.3	Pembangunan SPAM Desa Gunungsari Kec. Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.4	Pembangunan SPAM Desa Kebonrejo Kec. Candimulyo		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.5	Pembangunan SPAM Desa Jogomulyo Kec. Tempuran		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.7.6	Pembangunan SPAM Desa Adipuro Kec. Kaliangkrik		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.7	Pembangunan SPAM Desa Pandean Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.8	Pembangunan SPAM Desa Baleagung Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.9	Pembangunan SPAM Desa Banaran Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.10	Pembangunan SPAM Desa Sugihmas Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.11	Pembangunan SPAM Desa Petung Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.12	Pembangunan SPAM Desa Banyusari Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.13	Pembangunan SPAM Desa Ngepanrejo Kec. Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.7.14	Pembangunan SPAM Desa Gondosuli Kec. Muntilan		Kec. Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.15	Pembangunan SPAM Desa Bligo Kec. Ngluwar		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.070.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.16	Pembangunan SPAM Desa Ngargosoko Kec. Kaliangkrik		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	325.127.625,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.17	Fasilitator Pemberdayaan		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.00 orang/bulan	300.000.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.7.18	Biaya Operasional		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	98.822.375,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.8	Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK REGULER)	Jumlah Desa terbangun sarpras pengolahan limbah	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6 Desa	3.142.435.000,00	Standar Pelayanan Minimal layanan sanitasi	6 Desa
1.3.1.3.1.1.38.8.1	Pembangunan IPAL Komunal Desa Ketangi Kec. Kaliangkrik		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.2	Pembangunan IPAL Komunal Desa Pabelan Kec. Mungkid		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.8.3	Pembangunan IPAL Komunal Desa Donorojo Kec. Mertoyudan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.4	Pembangunan IPAL Komunal Desa Losari Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.5	Pembangunan IPAL Komunal Desa Kalijoso Kec. Secang		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.6	Pembangunan IPAL Komunal Desa Wonokerto Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.8.7	Biaya Operasional		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	300.000.000,00	Desa Rawan Layanan Akses Sanitasi Layak	330.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.9	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Air Minum	Jumlah BP SPAM terbina	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40 BP SPAM	369.395.000,00	Standar Pelayanan Minimal layanan air minum	10.032.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.9.1	Pembangunan SPAM Desa Sukorejo Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.2	Pembangunan SPAM Desa Sriwedari Kec. Muntilan		Kec Muntilan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	244.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.9.3	Pembangunan SPAM Desa Banjarharjo Kec. Salaman		Kec. Salaman	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	244.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.4	Pembangunan SPAM Desa Wringinputih Kec. Borobudur		Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	244.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.5	Pembangunan SPAM Desa Giritengah Kec. Borobudur		Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.6	Pembangunan SPAM Desa Ketawang Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.7	Pembangunan SPAM Desa Banjarsari Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.8	Pembangunan SPAM Desa Losari Kec. Grabag		Kec. Grabag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.9	Pembangunan SPAM Desa Krumpukan Kec. Kajoran		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.10	Pembangunan SPAM Desa Gejakan Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.9.11	Pembangunan SPAM Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.12	Pembangunan SPAM Desa Windusari Kec. Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.13	Pembangunan SPAM Desa Kenalan Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.14	Pembangunan SPAM Desa Ngablak Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.15	Pembangunan SPAM Desa Soronalan Kec. Sawangan		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.16	Pembangunan SPAM Desa Kentengsari Kec. Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.17	Pembangunan SPAM Desa Kalijoso Kec. Windsari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.18	Pembangunan SPAM Desa Tersangede Kec. Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.9.19	Pembangunan SPAM Desa Mantingan Kec. Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.20	Pembangunan SPAM Desa Tirta Kec. Salam		Kec.Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.21	Pembangunan SPAM Desa Purworejo Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.22	Pembangunan SPAM Desa Baturono Kec. Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.23	Pembangunan SPAM Desa Dukun Kec. Dukun		Kec. Dukun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.24	Pembangunan SPAM Desa Sidorejo Kec. Bandongan		Kec. Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.25	Pembangunan SPAM Desa Jagonayan Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	229.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.26	Pembangunan SPAM Desa Sonorejo Kec. Candimulyo		Kec. Candimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	224.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.9.27	Pembangunan SPAM Desa Kalisari Kec. Tempuran		Kec. Tempuran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	224.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.28	Pembangunan SPAM Desa Sukodadi Kec. Bandongan		Kec Bandongan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	264.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.29	Pembangunan SPAM Desa Bandungrejo Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	224.428.000,00	Desa Rawan Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.30	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Mranggen Kec. Srumbung		Kec. Srumbung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.31	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Soroyudan Kec. Tegalrejo		Kec. Tegalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.32	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Salam Kec. Salam		Kec. Salam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.33	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Balesari Kec. Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.34	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Sidorejo Kec. Kajoran		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.9.35	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Karangtalun Kec. Ngluwar		Kec. Ngluwar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.36	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Balekerto Kec. Kaliangkrik		Kec. Kaliangkrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.37	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Kebonsari Kec. Borobudur		Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.760.000,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.38	Pengembangan layanan SPAM (SR) Desa Pirikan Kec. Secang		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	187.751.400,00	Desa Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.39	Tenaga Fasiitator		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	144.00 orang/bulan	432.000.000,00	Desa Rawan dan Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.40	Biaya Operasional		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	159.756.600,00	Desa Rawan dan Minim Layanan Air Minum Layak	0,00
1.3.1.3.1.1.38.9.41	Penguatan Kapasitas Kelembagaan BP SPAM		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	120.000.000,00	40 BP SPAM	132.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.10	Fasilitasi Keciaptakaryaan	Jumlah dokumen RPI2JM tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	- dokumen	1.600.105.000,00	RPIJM	- dokumen
		Jumlah Desa terfasilitasi hibah bansos			1.000 lokasi			1.000 lokasi
		Jumlah Landmark terbangun			2 lokasi			2 lokasi

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.10.1	Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	200.000.000,00	Masyarakat Penerima Hibah Bantuan Sosial	220.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.10.2	Pembangunan Landmark Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Temanggung		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.224.328.215,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan	0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.3	Pembangunan Landmark Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Wonosobo		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.000.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan	0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.4	Perencanaan Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Temanggung		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	53.500.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan	0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.5	Perencanaan Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Wonosobo		Kab. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	53.500.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan	0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.6	Pengawasan Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Temanggung		Kec. Secang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	37.625.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.10.7	Pengawasan Penataan Kawasan Perbatasan Kab. Magelang - Kab. Wonosobo		Kec. Kajoran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	37.625.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan	0,00
1.3.1.3.1.1.38.10.8	Biaya Operasional Penataan Kawasan Perbatasan		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	100.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di kawasan perbatasan	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11	Peningkatan dan Pengembangan Layanan Sanitasi	Jumlah BP SLBM terbina	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50 BP SLBM	4.959.452.475,00	Standar Pelayanan Minimal layanan sanitasi	50 BP SLBM
		Jumlah Desa terbangun Sarana dan Prasarana Air Limbah			2 Desa			3 Desa
1.3.1.3.1.1.38.11.1	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Kec. Mertoyudan		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	2.000.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di Kota Kecamatan	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.2	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Dusun Nepak - Kedungingas		Kec. Mertoyudan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.420.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.3	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Desa Ngablak Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.000.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan / pertumbuhan rawan genangan di Kota Kecamatan	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.11.4	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong SMA Kota Mungkid - Congol Nglerep Kec. Mungkid		Kec. Mungkid	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	1.000.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.5	Jasa Konsultansi DED Pembangunan Jaringan Drainase dan Gorong - gorong		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.00 Paket	200.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kota Kecamatan, dan Kawasan Permukiman	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.6	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jaringan Drainase dan Gorong - gorong		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.00 Paket	200.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kota Kecamatan dan Kawasan Permukiman	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.7	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Gandon Ruas Jalan Payaman Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	490.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.8	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Kembangkuning Ruas Jalan Bandongan - Windusari		Kec. Windusari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	150.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.9	Pembangunan Drainase Penanganan Banjir Borobudur		Kec. Borobudur	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	500.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.3.1.3.1.1.38.11.10	Pembangunan Drainase Desa Ketundan Kec. Pakis		Kec. Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	300.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.11	Biaya Operasional Sal. Drainase dan Gorong-gorong		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	180.000.000,00	Daerah pusat kegiatan / pelayanan /pertumbuhan rawan genangan di Kawasan Permukiman	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.12	Penguatan Kapasitas Kelembagaan BP SLBM		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.00 BP	150.000.000,00	Badan Pengelola Masyarakat Pengguna Sanitasi Desa	165.000.000,00
1.3.1.3.1.1.38.11.13	Pembangunan IPAL Komunal Desa Pagergunung Kec. Ngablak		Kec. Ngablak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	427.500.000,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.14	Pembangunan IPAL Komunal Desa Ketep Kec. Sawangan		Kec. Sawangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	427.500.000,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.15	Perencanaan Pemb. IPAL Komunal		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	51.700.000,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi	0,00
1.3.1.3.1.1.38.11.16	Pengawasan Pembangunan IPAL Komunal		Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	35.600.000,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.38.11.17	Biaya Operasional Pembangunan IPAL Komunal		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 Paket	57.711.719,00	Masyarakat desa miskin dan minim akses sanitasi		0,00
1.3.1.3.1.1.39	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an	Cakupan sarana prasarana ke PU-an			89 %	2.040.340.000,00			2.550.800.000,00
		Cakupan layanan Jasa konstruksi			100 %				
1.3.1.3.1.1.39.1	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ke PU - an	Sarana Prasarana Ke-PU-an yang terpelihara	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45 unit	1.605.000.000,00	Mendukung penyediaan sarpras ke PUAN yang memadai	47 unit	2.016.500.000,00
		Jumlah Sarana Prasarana ke PU an yang diadakan			2 unit			2 unit	
1.3.1.3.1.1.39.1.1	Tanggap Darurat Ke-PU-an		Seluruh Wilayah diKabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.00 unit	55.000.000,00	Penanganan bencana alam		60.500.000,00
1.3.1.3.1.1.39.1.2	Pengadaan Alat-alat Berat - Pengadaan Mobil Crane		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	900.000.000,00	Alat-alat Berat		650.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.1.3	Pengadaan Alat-alat Berat - Pengadaan Mobil Double Cabin		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.00 unit	500.000.000,00	Alat-alat Berat		650.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.1.4	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.00 unit	650.000.000,00	Alat-alat Berat		656.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.2	Fasilitasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah buku standar satuan harga	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45 buku	185.340.000,00	Terbinanya penyedia jasa	45 buku	360.000.000,00
		Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang terbina			100 orang			100 orang	
		Jumlah permohonan IUJK			50 pemohon			130 pemohon	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.39.2.1	Pembuatan Buku Standar Satuan Harga		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45.00 Buku	65.000.000,00	Masyarakat Konstruksi		75.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.2.2	Pembinaan Jasa Konstruksi		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.00 orang	175.000.000,00	Masyarakat Konstruksi		200.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.2.3	Penerbitan IUJK		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120.00 Lembar	75.000.000,00	Masyarakat Konstruksi		85.000.000,00
1.3.1.3.1.1.39.3	Pengadaan / Pemeliharaan alat - alat laboratorium ke PU - an	Jumlah alat laboratorium yang diadakan	Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5 unit	250.000.000,00	Mendukung penyediaan sarpras ke PUAN yang memadai	5 unit	174.300.000,00
		Jumlah alat laboratorium yang terpeihsara			15 unit			14 unit	
1.3.1.3.1.1.39.3.1	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium ke PU an		Kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.00 Unit	531.220.000,00	Masyarakat Konstruksi		116.550.000,00
1.3.1.3.1.1.39.3.2	Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium ke PU an		kabupaten Magelang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27.00 buah	89.250.000,00	Masyarakat Konstruksi		57.750.000,00
1.3.1.3.1.1.40	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan			64 %	4.897.694.860,00			7.690.244.210,00
		Persentase kesesuaian tata ruang			76 %				
		Cakupan kinerja pertanahan			33 %				
1.3.1.3.1.1.40.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2 Dokumen	249.821.000,00	Mendukung penataan ruang kabupaten	2 Dokumen	605.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.40.2	Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Laporan yang disusun,		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Dokumen	154.778.800,00	Mendukung penataan ruang kabupaten	1 Dokumen	170.256.680,00
		Jumlah Peserta Pelatihan			15 Orang			15 Orang	
1.3.1.3.1.1.40.3	Fasilitasi Informasi Tata Ruang	Jumlah Bangunan Yang Diawasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350 Bangunan	335.498.460,00	Mendukung penataan ruang kabupaten	350 Bangunan	1.001.547.580,00
1.3.1.3.1.1.40.6	Fasilitasi Pengadaan Tanah	Jumlah Tanah Aset Daerah yang dilakukan sertipikasi		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40 Bidang	100.000.000,00	Mendukung terwujudnya kegiatan infrastuktur lain	40 Bidang	786.500.000,00
1.3.1.3.1.1.40.7	Penyusunan Dokumen Ketataruangan	Jumlah Dokumen Tersusun		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Dokumen	275.001.100,00	Mendukung penataan ruang kabupaten	1 Dokumen	550.000.000,00
1.3.1.3.1.1.40.8	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ke PU an	Jumlah Bidang tanah yang diadakan		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40 Bidang	3.782.595.500,00	Mendukung terwujudnya kegiatan infrastuktur lain	40 Bidang	4.576.939.950,00
TOTAL						169.671.306.896,00	TOTAL	190.853.228.882,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				8.496.000.000,00			14.002.725.000,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				8.496.000.000,00			14.002.725.000,00
1.4.1.4.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan administrasi pelayanan umum dan kepegawaian		100 100	489.000.000,00			682.000.000,00
1.4.1.4.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.000 surat	9.000.000,00	Berjalannya administrasi perkantoran	4.000 surat	22.000.000,00
1.4.1.4.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	48 kali	70.000.000,00	Mendukung kelancaran kinerja	48 kali	170.500.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		240 kali			240 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		12 kali			12 kali	
1.4.1.4.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2 paket	20.000.000,00	Mendukung penyediaan sarpras yang memadai	- paket	22.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		3 unit			4 unit	
1.4.1.4.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5 rekening	50.000.000,00	Mendukung penyediaan gedung dan prasarana yang memadai	5 rekening	66.000.000,00
		Luas gedung kantor yang dipelihara		1 unit			1 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17 unit	250.000.000,00	Mendukung penyediaan sarana yang memadai	17 unit	302.500.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		- buah			6 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		5 unit			5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		11 unit			11 unit	
1.4.1.4.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga honorer / kontrak	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4 orang	90.000.000,00	Mendukung peningkatan kapasitas ASN	4 orang	99.000.000,00
1.4.1.4.1.1.7.9	Pengadaan Tanah	Terwujudnya area TPU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KECAMATAN MERTOYUDAN, KECAMATAN CANDIMULYO	1 lokasi	0,00	Program penyediaan tanah untuk TPU	- lokasi	0,00
1.4.1.4.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah		100 persen	61.000.000,00			105.600.000,00
1.4.1.4.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10 laporan	45.000.000,00	Memperlancar kegiatan	10 laporan	82.500.000,00
1.4.1.4.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	- dokumen	7.000.000,00	penyusunan dokumen2 perencanaan skpd	- dokumen	7.700.000,00
		Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
1.4.1.4.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15 laporan	9.000.000,00	Dokumen laporan tersusun	15 laporan	9.900.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
1.4.1.4.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah standar operasional yang tersusun	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 dokumen	0,00	Medukung kebijakan program perkim	1 dokumen	5.500.000,00
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.23	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh		78 persen	4.850.000.000,00			6.644.000.000,00
		Persentase pengendalian kawasan permukiman		100 persen				
		Persentase penyediaan TPU		- persen				
		Persentase penanganan PSU Permukiman		100 persen				
1.4.1.4.1.1.23.1	Fasilitasi dan Penataan Kawasan Permukiman	Jumlah cakupan kawasan permukiman yang tertata	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3 lokasi	800.000.000,00	Fasilitasi kegiatan diluar APBD	3 lokasi	1.650.000.000,00
1.4.1.4.1.1.23.2	Penanganan Permukiman Kumuh	jumlah permukiman kawasan kumuh yang ditangani	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KECAMATAN MUNTILAN, KECAMATAN MERTOYUDAN, KECAMATAN BOROBUDUR, KECAMATAN SECANG	76,75 hektar	3.000.000.000,00	Penuntasan kawasan kumuh menjadi 0%	81,87 hektar	3.300.000.000,00
1.4.1.4.1.1.23.3	Pengendalian Kawasan Permukiman	Ketersediaan perangkat pengendalian kawasan permukiman	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 dokumen	350.000.000,00	Pengendalian kawasan kumuh	1 dokumen	506.000.000,00
1.4.1.4.1.1.23.4	Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang ditangani	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3 lokasi	700.000.000,00	Peningkatan kualitas permukiman melalui PSU	3 lokasi	1.188.000.000,00
		Tersedianya lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah		- lokasi			- lokasi	
1.4.1.4.1.1.25	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase peningkatan rumah layak huni		33 persen	3.096.000.000,00			6.571.125.000,00
		Persentase Fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR		33 persen				
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana*		100 persen				
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah*		100 persen				
		Persentase penanganan PSU Perumahan		8 persen				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.25.2	Pengendalian Perumahan	Jumlah dokumen laporan pengendalian	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3 dokumen	100.000.000,00	Pengendalian kawasan kuwuh	3 dokumen	110.000.000,00
1.4.1.4.1.1.25.3	Pengembangan Perumahan Akibat Bencana	Terbangunnya / terehabilitasinya hunian korban bencana	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100 %	1.000.000.000,00	Standar Pelayanan Minimal Perumahan	100 %	1.100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.25.4	Pengembangan Perumahan Umum, Khusus dan Swadaya	Tercapainya fasilitas, pengembangan perumahan umum oleh pengembang	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KECAMATAN NGLUWAR, KECAMATAN SALAM, KECAMATAN MUNTILAN, KECAMATAN MUNGKID, KECAMATAN MERTOYUDAN, KECAMATAN TEMPURAN, KECAMATAN KAJORAN, KECAMATAN KALIANGKRIK, KECAMATAN BANDONGAN, KECAMATAN WINDUSARI, KECAMATAN BOROBUDUR, KECAMATAN SALAMAN, KECAMATAN SRUMBUNG, KECAMATAN DUKUN, KECAMATAN SAWANGAN, KECAMATAN CANDIMULYO, KECAMATAN PAKIS, KECAMATAN NGABLAK, KECAMATAN SECANG, KECAMATAN GRABAG, KECAMATAN TEGALREJO	2 lokasi	1.600.000.000,00	Prioritas penanganan kemiskinan melalui RTLH	2 lokasi	1.760.000.000,00
		Tercapainya fasilitas penyediaan rumah MBR melalui perumahan subsidi		50 unit			50 unit	
		Tercapainya fasilitas pembangunan/rehabilitasi rumah swadaya		3.000 unit			3.000 unit	
1.4.1.4.1.1.25.6	Perencanaan Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4 dokumen	150.000.000,00	penanganan backlog perumahan	4 dokumen	165.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.25.7	Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Tercapainya fasilitasi pembangunan / rehabilitasi perumahan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100 unit	246.000.000,00	Program RTLH dari APBN	100 unit	3.436.125.000,00
TOTAL					8.496.000.000,00	TOTAL	14.002.725.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				13.425.517.000,00			49.604.427.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				13.425.517.000,00			49.604.427.000,00
1.5.1.5.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	1.262.603.000,00			1.635.000.000,00
1.5.1.5.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	1.000 surat	9.000.000,00	Menunjang tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat, kersipan dan bahan pustaka	1.000 surat	30.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		- arsip			- arsip	
1.5.1.5.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Satpol PP dan PK, wilayah Kabupaten Magelang, dan luar wilayah Kabupaten Magelang (Jateng/DIY, DKI/Banten/Jabar/Jatim, dan luar Jawa)	78 kali	140.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	40 kali	170.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		10 kali			12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		50 kali			20 kali	
1.5.1.5.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	1 paket	76.843.000,00	Sarana dan prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	1 paket	150.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		- paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola		- unit			- unit	
1.5.1.5.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	1.004 m2	150.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	1.004 m2	160.000.000,00
		Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar		48 rekening bulan			48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.5.1.5.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	20 unit	570.000.000,00	Terjaganya kondisi perlengkapan dan peralatan kantor serta kendaraan dinas/operasional yang layak	20 unit	590.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			18 unit			18 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat atau lebih yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			14 unit			14 unit	
1.5.1.5.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- paket	0,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 paket	195.000.000,00
1.5.1.5.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	22 kali	316.760.000,00	Meningkatkan kapasitas dan disiplin aparatur	10 kali	340.000.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			49 orang			60 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			2 orang			2 orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			65 stel			88 stel	
		Jumlah JFT yang terealisasi penilaian angka kreditnya			9 orang			- orang	
1.5.1.5.1.1.8	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah, dan keuangan perangkat daerah			100 %	80.000.000,00			133.500.000,00
1.5.1.5.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	21 kegiatan	50.000.000,00	Menunjang tertib administrasi keuangan perangkat daerah	23 kegiatan	80.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			3 laporan			3 laporan	
1.5.1.5.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- dokumen	10.000.000,00	Menunjang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	- dokumen	11.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
1.5.1.5.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	3 laporan	10.000.000,00	Menunjang tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	27.500.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			2 laporan			2 laporan	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 laporan			1 laporan	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.5.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- SOP	10.000.000,00	Menunjang peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah	- SOP	15.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			- SP			- SP	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			- dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
1.5.1.5.1.1.25	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penertiban yang dilaksanakan			100 %	3.404.419.000,00			5.469.000.000,00
		Persentase satlinmas yang aktif			75 %				
1.5.1.5.1.1.25.1	Operasi Represif Non Yustisi	Frekuensi pelaksanaan operasi represif non yustisi	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	60 kali	100.000.000,00	Menunjang meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta pemberantasan penyakit masyakat	60 kali	110.000.000,00
1.5.1.5.1.1.25.2	Deteksi Dini dan Pengendalian Massa	Frekuensi pelaksanaan deteksi dini lokasi rawan gangguan tibum tranmas	Wilayah Kabupaten Magelang dan perbatasan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	21 kali	55.100.000,00	Mendeteksi wilayah rawan perbatasan dan penanganan unjuk rasa/kerusuhan massa	21 kali	60.000.000,00
		Frekuensi pengendalian massa			12 kali			12 kali	
1.5.1.5.1.1.25.3	Pengelolaan Data Berbasis SIG	Jumlah laporan data trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	12 laporan	80.000.000,00	Menunjang meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	12 laporan	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.5.1.1.25.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Frekuensi pembinaan/pemberdayaan satlinmas inti kabupaten	Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1 kali	257.723.000,00	Menunjang meningkatnya kapasitas anggota satlinmas	4 kali	165.000.000,00
		Jumlah anggota satlinmas inti kabupaten yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			105 orang			105 orang	
		Jumlah anggota satlinmas kecamatan yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan			315 orang			315 orang	
		Frekuensi pengerahan satlinmas pada upacara dan pengamanan hari besar nasional/kegiatan daerah			4 kali			4 kali	
		Frekuensi pembinaan/pemberdayaan anggota satlinmas kecamatan			1 kali			2 kali	
1.5.1.5.1.1.25.5	Pengamanan Obyek Vital dan Keramaian Daerah	Jumlah tenaga bantu polisi pamong praja yang tersedia	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	40 orang	2.427.972.000,00	Menunjang meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	40 orang	3.964.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pengamnan			- paket			- paket	
		Frekuensi pembinaan tenaga pengamanan/security			4 kali			4 kali	
		Frekuensi pembinaan tenaga bantu polisi pamong praja			4 kali			4 kali	
		Frekuensi pelaksanaan pengamanan			123 kali			160 kali	
		Jumlah tenaga pengamanan/security yang tersedia			42 orang			42 orang	
		Jumlah seragam dan atribut tenaga pengamanan/security yang disediakan			- stel			42 stel	
		Jumlah seragam dan atribut tenaga bantu polisi pamong prajayang disediakan			40 stel			40 stel	
1.5.1.5.1.1.25.6	Pengawalan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pengawalan	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengamanan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- paket	132.000.000,00	Menunjang pengamanan dan pengawalan bupati, pejabat dan tamu penting	- paket	150.000.000,00
		Frekuensi pelaksanaan pengawalan			60 kali			60 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.5.1.1.25.7	Patroli Wilayah dan Pembinaan Masyarakat	Frekuensi pelaksanaan patroli wilayah	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	252 kali	351.624.000,00	Menunjang terdeteksinya gangguan tibum tranmas dan pelanggaran perda	365 kali	920.000.000,00
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan			336 orang			336 orang	
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana patroli			1 paket			1 paket	
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentrman masyarakat (SPM)			0,02 kali/hari			0,02 kali/hari	
1.5.1.5.1.1.26	Program Penegakan Perda	Persentase penegakan perda			77 %	598.900.000,00			842.165.000,00
1.5.1.5.1.1.26.1	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- paket	400.000.000,00	Menunjang meningkatnya penegakan perda	- paket	595.000.000,00
		Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang tersusun			- laporan			1 laporan	
		Frekuensi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah			250 kali			313 kali	
		Jumlah raperda yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah paket pengadaan Sistem Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah (SAP4-Perda)			- paket			- paket	
1.5.1.5.1.1.26.2	Penanganan Perkara Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penanganan perkara	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	- paket	198.900.000,00	Menunjang penanganan perkara pelanggaran perda	- paket	247.165.000,00
		Jumlah penanganan perkara			12 kasus			12 kasus	
		Jumlah PPNS yang terfasilitasi			10 orang			10 orang	
1.5.1.5.1.1.27	Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase kebakaran yang tertangani			52 %	8.079.595.000,00			41.524.762.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.1.1.27.1	Pembinaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah sasaran sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	6 lokasi	194.595.000,00	Menunjang meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, pengetahuan dalam menghadapi kebakaran	6 lokasi	250.000.000,00
		Jumlah sasaran pelatihan simulasi dan penyuluhan masyarakat melawan kebakaran		2 lokasi			3 lokasi	
		Jumlah SKKL yang tersusun		1 SKKL			1 SKKL	
		Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Kebakaran yang terbentuk		1 desa/kelurahan			1 desa/kelurahan	
		Frekuensi penerimaan kunjungan PAUD/TK, SD, SLTP dan SLTA		60 kali			60 kali	
1.5.1.5.1.1.27.2	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah WMK terbangun	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	11 WMK	7.500.000.000,00	Menunjang meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	13 WMK	40.204.762.000,00
		Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran		1 paket			1 paket	
		Jumlah paket pengadaan APD		- paket			1 paket	
		Jumlah pemadam kebakaran yang mendapatkan diklat/bintek		40 orang			40 orang	
		Jumlah THL pemadam kebakaran yang tersedia		247 orang			287 orang	
		Jumlah penyusunan dokumen RISPK		- dokumen			- dokumen	
		Jumlah paket pengadaan mobil pemadam kebakaran		- paket			1 paket	
		Jumlah paket pembangunan sistem hydrant kota		- paket			- paket	
		Jumlah seragam dan atribut pemadam kebakaran yang disediakan		50 set			100 set	
		Frekuensi pembinaan fisik personil damkar		48 kali			48 kali	
		Jumlah paket pendataan ancaman kebakaran		1 paket			1 paket	
		Jumlah paket pelaksanaan pelayanan inspeksi kebakaran		1 paket			1 paket	
		Jumlah personil damkar yang mengikuti bimtek kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran		- orang			50 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.5.1.1.27.3	Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Korban	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana penyelamatan	Wilayah Kabupaten Magelang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1 paket	385.000.000,00	Menunjang layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran serta penyelamatan korban dan evakuasi	1 paket	1.070.000.000,00
		Frekuensi pelaksanaan pemadaman kebakaran			100 kali			100 kali	
		Frekuensi pelaksanaan penyelamatan			100 kali			100 kali	
		Jumlah paket pengadaan mobil rescue/ambulance			- paket			1 paket	
		Jumlah paket pengadaan APD penyelamatan			- paket			1 paket	
		Jumlah paket pelaksanaan investigasi pasca kebakaran			1 paket			1 paket	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			400 orang			400 orang	
		Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)			100 kali			100 kali	
		TOTAL						13.425.517.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.120.000.000,00			2.198.172.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.120.000.000,00			2.198.172.000,00
1.5.1.5.2.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	260.000.000,00			271.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikelola	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.800 surat	6.000.000,00	Jasa Surat Menyurat	1.800 surat	6.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30 perjalanan dinas	92.000.000,00	Rakondal dan Rakonlu	30 perjalanan dinas	155.000.000,00
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah		60 perjalanan dinas			60 perjalanan dinas	
1.5.1.5.2.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dibeli	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3 peralatan	50.000.000,00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	3 peralatan	55.000.000,00
		jumlah perlengkapan yang dibeli		3 buah			3 buah	
1.5.1.5.2.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung yang dipelihara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.000 m2	40.000.000,00	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1.000 m2	45.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dipelihara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12 peralatan	72.000.000,00	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 peralatan	10.000.000,00
1.5.1.5.2.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 paket	0,00	Rehabilitasi toilet	- paket	0,00
1.5.1.5.2.1.8	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	40.000.000,00			50.000.000,00
1.5.1.5.2.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15 kegiatan	40.000.000,00		15 kegiatan	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.2.1.24	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	Presentase jumlah ormas yang aktif		80 %	820.000.000,00			1.877.172.000,00
		Persentase jumlah konflik sosial tertangani		100 %				
		Persentase jumlah kegiatan pembinaan politik		40 %				
1.5.1.5.2.1.24.1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6 kegiatan	150.000.000,00	Bintek Pengurus Parpol, Verifikasi Banpol, Sosialisasi Budaya Politik (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK)	6 kegiatan	230.000.000,00
1.5.1.5.2.1.24.2	Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	jumlah angka kriminalitas	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	250.000.000,00	Tim Kewaspadaan Dini Daerah , Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (dasar: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah)	2 kejadian kriminal / 10.000 penduduk	616.172.000,00
1.5.1.5.2.1.24.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah kegiatan pembinaan ormas	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6 kegiatan	0,00	Pembinaan Ormas (UU No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)	6 kegiatan	140.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.2.1.24.4	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	300 orang	316.000.000,00	Bela negara, PPWK (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN)	300 orang	426.000.000,00
1.5.1.5.2.1.24.5	Kegiatan Ketahanan Seni, Budaya dan Ekonomi	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.300 orang	80.000.000,00	FPK (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH)	1.500 orang	400.000.000,00
1.5.1.5.2.1.24.6	Kegiatan Ketahanan Agama dan Kemasyarakatan	jumlah peserta	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200 orang	24.000.000,00	FKUB (PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006/NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERA	200 orang	65.000.000,00
TOTAL					1.120.000.000,00	TOTAL	2.198.172.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				7.742.095.100,00			11.024.393.000,00
1.6	Sosial				7.742.095.100,00			11.024.393.000,00
1.6.1.6.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	2.978.459.000,00			6.920.456.900,00
1.6.1.6.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.000 Surat	48.959.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	4.000 Surat	51.406.900,00
1.6.1.6.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	80 Kali	170.500.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 Kali	188.050.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana		137 Kali			145 Kali	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		32 Kali			35 Kali	
1.6.1.6.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINSOS PPKB PPPA	102 Paket	1.030.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	- Paket	150.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		64 Paket			10 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.6.1.6.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung kantor yang dipelihara	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.616 M2	349.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	12.616 M2	349.000.000,00
1.6.1.6.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30 Peralatan Kantor	1.032.000.000,00		40 Peralatan Kantor	1.034.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			20 Set			20 Set	
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang dipelihara			139 Unit			139 Unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang dipelihara			13 Unit			13 Unit	
1.6.1.6.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Unit Gedung	200.000.000,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 Unit Gedung	5.000.000.000,00
1.6.1.6.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	66 Orang	148.000.000,00	Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan pembangunan	60 Orang	148.000.000,00
		Jumlah tenaga honorer/ kontrak			4 Orang			4 Orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian anka kreditnya			55 Orang			64 Orang	
1.6.1.6.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	97.900.000,00			93.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1.6.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50 Kegiatan	52.900.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50 Kegiatan 58.200.000,00
1.6.1.6.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Dokumen	10.000.000,00		- Dokumen
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen 10.000.000,00
1.6.1.6.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan yang tersusun	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5 Dokumen	25.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	5 Dokumen
		Laporan Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 Dokumen			8 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- Dokumen			1 Dokumen 25.000.000,00
1.6.1.6.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	- Dokumen
		Jumlah standar Pelayanan yang tersusun			1 Dokumen			- Dokumen 0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.6.1.6.1.1.23	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			33,95 persen	2.150.332.000,00			2.195.332.000,00
		Persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial			45,25 persen				
		Presentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			2,57 persen				
		Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten **			100 persen				
		Perentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **			100 Persen				
1.6.1.6.1.1.23.1	Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak yang bermasalah sosial yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	120 Orang	1.290.000.000,00	Memenuhi SPM	120 Orang	1.290.000.000,00
		Jumlah gelandangan, pengemis dan tuna sosial lainnya yang mendapatkan penanganan sosial di luar panti			100 Orang			100 Orang	
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan penanganan sosial			150 Orang			240 Orang	
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan penanganan sosial			120 Orang			120 Orang	
1.6.1.6.1.1.23.2	Penanganan PMKS Melalui Rumah Singgah	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan PMKS lainnya di luar panti yang mendapatkan penanganan dalam Rumah Singgah	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50 Orang	125.000.000,00	Memenuhi SPM	60 Orang	150.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.6.1.6.1.1.23.3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Call Center yang terbentuk	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Unit	735.332.000,00	Memenuhi SPM	1 Unit	755.332.000,00
		Jumlah KPM PKH yang terfasilitasi dalam Program Keluarga Harapan			55.303 Keluarga			55.303 Keluarga	
		Jumlah PMKS yang terfasilitasi dalam pengajuan bantuan sosial terencana			1.500 Proposal			1.500 Proposal	
		Jumlah proposal yang terverifikasi			1.000 Proposal			1.000 Proposal	
		Jumlah Korban bencana yang terfasilitasi penanganan korban bencana			80 KK			80 KK	
1.6.1.6.1.1.24	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)			8 persen	2.515.404.100,00		1.815.404.100,00	
		Prosentase Fakir Miskin yang diberdayakan			- persen				
		Prosentase fakir miskin yang divalidasi			100 persen				
1.6.1.6.1.1.24.1	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang diberdayakan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150 Orang	231.638.700,00	Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	150 Orang	231.638.700,00
1.6.1.6.1.1.24.2	Pemberdayaan Sosial	Jumlah Pendamping dan Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	171 Orang	375.000.000,00	Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	171 Orang	375.000.000,00
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan diklat Tagana Muda			30 Orang			30 Orang	
1.6.1.6.1.1.24.3	Fasilitasi Komda Lansia	Frekuensi Fasilitasi yang dilaksanakan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6 Kali	70.000.000,00	Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	6 Kali	70.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
1.6.1.6.1.1.24.4	Optimalisasi Data Kemiskinan	Jumlah verifikasi dan validasi data Basic Data Terpadu (BDT) dan Data PMKS	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	180.400 KK	1.000.000.000,00	Verifikasi Dan Validasi Data kemiskinan	12.000 KK
1.6.1.6.1.1.24.5	Fasilitasi Program Bantuan Sosial Pangan	Jumlah KPM penerima Bantuan Sosial Pangan yang terfasilitasi	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	76.495 KPM	838.765.400,00	Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	76.495 KPM
		Jumlah Kelompok Penerima Manfaat Bansos			6 Kelompok			6 Kelompok
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					9.716.916.000,00		9.817.933.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					913.201.000,00		933.433.000,00
2.2.1.6.1.1.20	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya			44 %	913.201.000,00		933.433.000,00
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar			57 %			
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar			100 %			
		Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar			66 %			
2.2.1.6.1.1.20.1	Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi PUG)	Jml SKPD penyusun PPRG	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7 SKPD	140.000.000,00	Menerapkan dan memfasilitasi PPRG tingkat Kabupaten	7 SKPD
		Jml perangkat desa yg mewakili PUG			120 Orang			120 Orang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.2.1.6.1.1.20.2	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	Organisasi perempuan yg ditangani dan aktif	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15 Organisasi	180.000.000,00	Membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas peran perempuan dalam pembangunan	17 Organisasi	195.000.000,00
		Jumlah perempuan yang aktif di KPPI		50 Orang	50 Orang				
2.2.1.6.1.1.20.3	Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak	Jumlah Kampung Anak Sejahtera yang terbentuk	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KECAMATAN TEMPURAN, KECAMATAN DUKUN	5 Desa	400.000.000,00	Mendukung sasaran daerah dalam pencapaian Kabupaten Layak Anak	5 Desa	370.911.000,00
		Jml Desa layak anak		10 Desa	10 Desa				
		Jumlah anak menjadi peserta forum anak tingkat desa dan kecamatan		150 Anak	150 Anak				
2.2.1.6.1.1.20.4	Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pengarahan oleh petugas terlatih	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	90 Kasus	193.201.000,00	Menurunkan rasio kekerasan berbasis gender	80 Kasus	212.522.000,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					8.803.715.000,00			8.884.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.8.1.6.1.1.15	Program Keluarga Berencana	Presentase Peningkatan partisipasi ber-KB			2 %	8.116.215.000,00			8.154.500.000,00
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat			90 %				
		Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi			12 %				
		Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)			74 %				
		Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)			34 %				
2.8.1.6.1.1.15.21	Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Motivator KB yang mendapatkan Pembinaan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	842 Orang	618.396.000,00	Meningkatkan mutu pelayanan dan jaminan perlindungan KB kepada masyarakat	842 Orang	650.000.000,00
		Jumlah Peserta KB MO yang terlayani		130 Akseptor	130 Akseptor				
		Jumlah peserta KB MKJP yang terlayani		4.000 Akseptor	4.500 Akseptor				
2.8.1.6.1.1.15.22	Integrasi Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja Melalui Momentum	Jumlah momentum penyelenggaraan kegiatan	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7 Momentum	50.319.000,00	Meningkatkan mutu pelayanan dan jaminan perlindungan KB kepada masyarakat melalui jejaring dan lintas sektor	7 Momentum	55.000.000,00
2.8.1.6.1.1.15.23	Optimalisasi KIE dan Konseling KKBPK	Frekuensi KIE Program KKBPK	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	60 Kali	78.000.000,00	KIE sebagai rohnya keberhasilan KKBPK	60 Kali	80.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.8.1.6.1.1.15.24	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang tersedia	DINSOS PPKB PPPA	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4 Jenis	985.410.000,00	DAK	4 Jenis	985.410.000,00
2.8.1.6.1.1.15.25	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Balai KB yang terfasilitasi	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	21 Balai KB	6.384.090.000,00	DAK	21 Balai KB	6.384.090.000,00
2.8.1.6.1.1.26	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga	Usia Kawin Pertama (UKP)			21 tahun	687.500.000,00			730.000.000,00
		Persentase pembangunan ketahanan keluarga			54 %				
		Prosentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera			55 %				
		Presentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB			39 %				
2.8.1.6.1.1.26.1	Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Jumlah Data Kepala Keluarga Tervalidasi	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	407.130 KK	362.000.000,00	Verifikasi Dan Validasi Data keluarga dan pengendalian penduduk	407.130 KK	375.000.000,00
		Jumlah IMP dan PLKB yang mendapatkan sosialisasi UKP			422 Orang			422 Orang	
		Jumlah IMP yang melaksanakan program KKBPK di desa			372 Desa			372 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.1.6.1.1.26.2	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anggota BKB yang menjadi peserta KB	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.754 Orang	250.000.000,00	Mendukung KKBPK	12.054 Orang
		Jumlah Anggota BKR yang menjadi peserta KB						
		Jumlah Anggota BKL yang menjadi peserta KB						
		Jumlah anggota UPPKS dari Keluarga Prasejahtera yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan ketrampilan ketahanan ekonomi						
		Jumlah Poktan yang dievaluasi program pembangunan ketahanan keluarga						
		Jumlah Anggota Kelompok PIK Remaja Masyarakat di Kampung KB yang menjadi sasaran Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja						
2.8.1.6.1.1.26.3	Advokasi dan KIE Kampung KB Bagi SKPD, Sosialisasi bagi Pokja Tingkat Kabupaten Pencanaan dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah Kampung KB terbentuk dan terevaluasi	KABUPATEN MAGELANG	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10 Lokasi	75.500.000,00	Mendukung KKBPK	10 Lokasi
TOTAL					17.459.011.100,00	TOTAL	20.842.326.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					6.639.462.600,00			11.079.800.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					6.639.462.600,00			11.079.800.000,00
1.5.1.6.2.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.900.000.000,00			2.581.000.000,00
1.5.1.6.2.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2.500 surat	40.000.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	3.000 surat	49.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			26 arsip			26 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			100 bahan pustaka			100 bahan pustaka	
1.5.1.6.2.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	23 kali perjalanan	200.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	23 kali perjalanan	297.000.000,00
		Jumlah layanan hubungan Masyarakat dan keprotokolan			15 kali layanan			12 kali layanan	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			32 kali perjalanan			32 kali perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			25 kali rapat			40 kali rapat	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	300.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	2 Almari besi	350.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor					2 Filling kabinet	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor					2 rak arsip	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor					3 rak logistik	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor					1 kursi eselon 2	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor					4 kursi eselon 3	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor					9 kursi eselon 4	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor					1 set kursi tamu	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					1 unit mesin pemotong rumput	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					2 unit komputer PC	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					2 unit notebook	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					2 unit printer	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					1 unit handycame	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					1 Tripot screen	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					1 unit wereless	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					2 unit UPS	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor					- unit genset silent	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2.046 meter persegi	200.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	2.046 meter persegi	330.000.000,00
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			3 surat kabar			3 surat kabar	
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			2 rekening telepon			1 rekening telepon	
		Jumlah kebutuhan Jasa komunikasi,			1 rekening faximile			1 rekening faximile	
		Jumlah kebutuhan Jasa SDA,			1 rekening air			1 rekening air	
		Jumlah kebutuhan Jasa Listrik			3 rekening listrik			3 rekening listrik	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	600.000.000,00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	2 unit truk	880.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara					2 unit tangki	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara					7 unit mobil	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara					12 unit sepeda motor	
		Jumlah peralatan yang dipelihara					6 unit komputer PC	
		jumlah peralatan yang dipelihara					4 unit mesin ketik	
		jumlah peralatan yang dipelihara					4 unit notebook	
		jumlah peralatan yang dipelihara					4 unit LCD	
		jumlah peralatan yang dipelihara					20 unit HT	
		jumlah peralatan yang dipelihara					10 unit RIG	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 unit RPU	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 mesin fax	
		jumlah peralatan yang dipelihara					2 unit camera digital	
		jumlah peralatan yang dipelihara					4 unit UPS	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 paket jaringan internet	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 unit pesawat telepon	
		jumlah peralatan yang dipelihara					6 unit printer	
		jumlah peralatan yang dipelihara					1 unit drone	
		jumlah peralatan yang dipelihara					10 unit AC	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					10 unit kursi staf	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					3 unit filling kabinet	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					2 unit almari kayu	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					10 unit meja 1/2 biro	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara					5 unit meja 1 biro	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1 paket	500.000.000,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 paket	500.000.000,00
1.5.1.6.2.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN dan jumlah ASN yang dibina	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	55 orang, 1 kali	60.000.000,00	Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur penanggulangan bencana	55 orang, 1 kali	175.000.000,00
		jumlah seragam dan atribut ASN			55 55 stel pakaian olahraga PDH/PDL/Olahraga			55 55 stel pakaian olahraga PDH/PDL/Olahraga	
1.5.1.6.2.1.8	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	90.000.000,00			170.000.000,00
1.5.1.6.2.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	22 kegiatan	60.000.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23 kegiatan	65.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK			5 laporan SPJ Fungsional, Realisasi dan Prognosis Akuntansi, LRA, Neraca, CaLK	
1.5.1.6.2.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	- Dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	- Dokumen	15.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
1.5.1.6.2.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	4 Dokumen LKPj, LKjIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	10.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 Dokumen LKPj, LKjIP, LPPD, dan pelaporan tahunan lainnya yang sejenis	25.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen Monitoring PK dan Evaluasi RKPd			2 dokumen Monitoring PK dan Evaluasi RKPd	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana			3 dokumen Simoneva, laporan di luar APBD dan Laporan bencana	
1.5.1.6.2.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1 dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	1 dokumen	65.000.000,00
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.23	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			30,40 %	4.649.462.600,00			8.328.800.000,00
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi			100 %				
		Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi			100 %				
		Prosentase pelayanan informasi bencana			100 %				
1.5.1.6.2.1.23.1	Mitigasi Bencana	Jml peserta apel	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	400 peserta	544.050.000,00	Penunjang peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	500 peserta	938.000.000,00
		Jumlah Rakor PRB			2 kali			5 kali	
		Jumlah penyebarluasan informasi			5 sosialisasi			6 sosialisasi	
		Jumlah rakor Kasi Kesra dan kasi Trantib			2 kali			4 kali	
		Jumlah Pemantauan daerah rawan bencana,			25 kali			40 kali	
		Jumlah LEWS			4 Unit EWS			5 Unit EWS	
		Jumlah Kegiatan lomba			1 Kali			2 Kali	
1.5.1.6.2.1.23.2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Jumlah peserta Pelatihan PB	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	50 orang	684.444.000,00	Peningkatan kapasitas masyarakat penunjang penanggulangan bencana	100 orang	1.260.000.000,00
		Jumlah Pembentukan Destana			2 desa			5 desa	
		jumlah peserta simulasi PRB untuk warga huntap			50 orang			50 orang	
		Jumlah peserta simulasi darurat pelajar			250 orang			250 orang	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi			50 orang pelatihan			50 orang pelatihan	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi			80 orang gladi posko			80 orang gladi posko	
		Jumlah peserta latihan dan Gladi evakuasi			300 orang gladi lapang			300 orang gladi lapang	
		Jumlah pembentukan desa bersaudara			1 pasang desa pembentukan			3 pasang desa pembentukan	
		Jumlah pengembangan desa bersaudara			2 pasang desa pengembangan			3 pasang desa pengembangan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.23.3	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan PB	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1 set repeater portable	350.000.000,00	Penunjang PB amanat SPM	1 set repeater portable	713.300.000,00
		Jumlah peralatan PB			1 set antena repeater			1 set antena repeater	
		Jumlah peralatan PB			1 set kabel repeater			1 set kabel repeater	
		Jumlah peralatan PB			2 unit timbangan digital			- unit timbangan digital	
		Jumlah peralatan PB			4 unit gergaji mesin			2 unit gergaji mesin	
		Jumlah peralatan PB			4 set peralatan perbengkelan			- set peralatan perbengkelan	
		Jumlah peralatan PB			1 set vertical rescue			- set vertical rescue	
		Jumlah APD			60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)			60 set APD (sepatu, helm, pakaian, celana, kacamata, sarung tangan, jas hujan)	
1.5.1.6.2.1.23.4	Manajemen Pusdalops PB	jml media sosial	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	5 buah	655.000.000,00	Penunjang informasi dan penanganan bencana (amanat SPM)	5 buah	885.000.000,00
		jml hari piket			240 hari			365 hari	
		jml sistem informasi kebencanaan			1 sistem			1 sistem	
1.5.1.6.2.1.23.5	Manajemen penanganan Darurat Bencana	Jumlah Fasilitas DSP dan DTT	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2 kegiatan	254.142.000,00	Penunjang penanganan bencana	2 kegiatan	505.000.000,00
		Jml pengerahan TRC dan Relawan			80 kali TRC			80 kali TRC	
		Jml pengerahan TRC dan Relawan			600 kali relawan			3.000 Orang	
		Jumlah hari piket TRC			365 hari			365 hari	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.23.6	Manajemen Logistik dan peralatan bencana	jumlah paket logistik	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2 paket	645.000.000,00	penunjang penanganan kebencanaan	2 paket	1.262.500.000,00
		jumlah pengambilan logistik			5 kali			5 kali	
		jml proposal			20 proposal			20 proposal	
		Jml dropping air			200 tangki			200 tangki	
		jumlah distribusi logistik			75 kali			75 kali	
		jumlah rapat koordinasi			2 kali			2 kali	
		Jumlah peralatan kebencanaan			10 unit genset			10 unit genset	
		Jumlah peralatan kebencanaan			4 unit pompa air			4 unit pompa air	
		Jumlah peralatan kebencanaan			8 unit Chainsaw			8 unit Chainsaw	
		Jumlah peralatan kebencanaan			4 unit lampu sorot			4 unit lampu sorot	
		Jumlah peralatan kebencanaan			1 Perahu Karet			1 Perahu Karet	
		Jumlah peralatan kebencanaan			1 unit water treatment			1 unit water treatment	
		Jumlah peralatan kebencanaan			1 Unit peralatan dapur umum			1 Unit peralatan dapur umum	
		Jumlah peralatan kebencanaan			6 Unit gas apar			6 Unit gas apar	
1.5.1.6.2.1.23.8	Fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi	Jml lokasi rehabilitasi daerah rawan bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	6 lokasi	415.481.000,00	Penunjang pelaksanaan rehab dan rekon pascabencana	10 lokasi	1.000.000.000,00
1.5.1.6.2.1.23.9	Pengadaan tanah, huntara dan huntap	jumlah bidang tanah	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	3 bidang	650.000.000,00	Pendukung penanganan pasca bencana	10 bidang	1.100.000.000,00
1.5.1.6.2.1.23.10	Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen PB (KRB, RPB, PDRP, RENKON, Amanat perda)	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	1 Dokumen	125.000.000,00	Dokumen pendukung kebijakan Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.23.11	Manajemen dan perencanaan penanggulangan Bencana	jumlah Tim Pengarah	Sekretariat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	22 orang	150.000.000,00	Penunjang perencanaan dan penentuan kebijakan Penanggulangan Bencana	22 orang	190.000.000,00
		jumlah rakor perencanaan dan manajemen PB			8 kali			8 kali	
		jumlah kegiatan Penilaian Indikator Ketahanan Daerah			1 Kegiatan			1 Kegiatan	
		jumlah kegiatan monev pelaksanaan Perbup 18 th 2016			1 kali			1 kali	
		jumlah kegiatan tindak lanjut Rencana Aksi Daerah RPB			1 kali			1 kali	
1.5.1.6.2.1.23.12	Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Post Disasster Need Assestment (PDNA) dan JITU PASNA	Jumlah personil	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	40 orang	100.000.000,00	Penunjang penyusunan Renaksi Pascabencana	40 orang	175.000.000,00
		jumlah Dokumen			1 dokumen			1 dokumen	
1.5.1.6.2.1.23.14	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	Jumlah rambu evakuasi	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	- buah	76.345.600,00	Mengakomodir SPM	50 buah	100.000.000,00
		Jumlah penyebarluasan informasi penangulangan bencana			10 kali			10 kali	
		Jumlah sosialisasi			6 desa			6 desa	
TOTAL						6.639.462.600,00	TOTAL		11.079.800.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.393.733.600,00			6.944.885.100,00
2.1	Tenaga Kerja				4.393.733.600,00			6.944.885.100,00
2.1.2.1.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	990.752.500,00			2.124.286.820,00
2.1.2.1.1.1.7.10	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang Dikelola	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	6.100 berkas	27.925.700,00		6.100 berkas	30.718.270,00
2.1.2.1.1.1.7.11	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	123 kali perjalanan	150.000.000,00	belum teranggarkan	123 kali perjalanan	150.000.000,00
		Jumlah rapat Koordinasi Yang Diselenggarakan		15 kali			15 kali	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana		364 kali perjalanan			364 kali perjalanan	
2.1.2.1.1.1.7.12	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1 paket	100.000.000,00		1 paket	548.278.830,00
		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		1 paket			1 paket	
2.1.2.1.1.1.7.13	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	7.170 m2	299.068.000,00		7.170 m2	328.974.800,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		108 kali			108 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1.1.1.7.14	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	92 unit	400.000.000,00		92 unit	493.494.870,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara		113 unit			113 unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 yang dipelihara		10 unit			10 unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara		22 unit			22 unit	
2.1.2.1.1.1.7.15	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	- paket	0,00		3 paket	557.685.370,00
2.1.2.1.1.1.7.16	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang Terfasilitasi Angka Kreditnya	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	37 orang	13.758.800,00		37 orang	15.134.680,00
2.1.2.1.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 persen	100.929.100,00			234.768.280,00
2.1.2.1.1.1.8.6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan Yang dikelola	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	22 kegiatan	70.929.100,00		22 kegiatan	78.022.010,00
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun		75 laporan			75 laporan	
2.1.2.1.1.1.8.7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang disusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	- dokumen	10.000.000,00		- dokumen	45.615.790,00
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah Yang disusun		4 dokumen			4 dokumen	
2.1.2.1.1.1.8.8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan Yang Tersusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4 dokumen	10.000.000,00		4 dokumen	29.630.480,00
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tahunan yang tersusun		12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Bulanan Yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- dokumen			- dokumen	
2.1.2.1.1.1.8.9	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	25 dokumen	10.000.000,00	anggaran tidak sesuai dengan output yang dihasilkan	25 dokumen	81.500.000,00
		Jumlah dokumen pengendalian yang disusun		1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1.1.1.18	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	-		-	2.420.000.000,00		-	2.544.886.700,00
2.1.2.1.1.1.18.1	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Sertifikasi Tenaga Kerja	Persentase kelulusan peserta pelatihan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	90 persen	700.000.000,00	Kegiatan di BLK	90 persen	824.886.700,00
		persentase peserta memperoleh sertifikasi		90 persen			90 persen	
		jumlah pencaker miskin yang mengikuti seleksi magang		- orang			50 orang	
2.1.2.1.1.1.18.2	Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencaker dan catrans yang ditempatkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1.843 orang	570.000.000,00	pencaker dan catrans yang ditempatkan	1.880 orang	570.000.000,00
		Jumlah pelayanan ketenagakerjaan yang terstandar ISO		- unit pelayanan			1 unit pelayanan	
2.1.2.1.1.1.18.3	Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	jumlah pencaker yang bekerja	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	100 orang	400.000.000,00	Pengembangan kewirausahaan	100 orang	400.000.000,00
		Jumlah Peserta Padat Karya		88 orang			88 orang	
2.1.2.1.1.1.18.4	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)	Kios Three in one yang terbentuk	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	- persen	750.000.000,00	Kegiatan DBHCHT	60 persen	750.000.000,00
		Jumlah sarana peralatan pelatihan yang tersedia		- paket			1 paket	
		jumlah prasarana gedung yang terehabilitasi		1 paket			1 paket	
2.1.2.1.1.1.20	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja		82 %	882.052.000,00			2.040.943.300,00
2.1.2.1.1.1.20.1	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama yang diterbitkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	100 unit	215.464.700,00		100 unit	237.011.170,00
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama		80 %			80 %	
		Jumlah Lembaga Kerja Sama Bipartit yang diterbitkan		10 unit			10 unit	
2.1.2.1.1.1.20.2	Kegiatan Pembinaan Pengupahan	Persentase Perusahaan Menerapkan Upah Minimum Kabupaten	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	80 %	166.587.300,00		80 %	183.246.030,00
		Persentase perusahaan yang mempunyai struktur dan skala upah		40 %			48 %	
2.1.2.1.1.1.20.3	Kegiatan Pembinaan Kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Izin LPKS yang diterbitkan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	100 %	50.000.000,00		100 %	1.015.686.100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1.1.1.20.4	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pekerja	Prosentase pekerja yang lulus pelatihan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	75 %	450.000.000,00		75 %	605.000.000,00
3	Urusan Pilihan				1.242.410.000,00			2.025.962.770,00
3.7	Perindustrian				1.242.410.000,00			2.025.962.770,00
3.7.2.1.1.1.20	Program Pengembangan industri	Cakupan Bina Industri Kecil		1 %	1.242.410.000,00			2.025.962.770,00
3.7.2.1.1.1.20.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Makanan Minuman	Jumlah Industri Makanan Minuman yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	190 unit IKM	300.000.000,00		200 unit IKM	530.403.500,00
3.7.2.1.1.1.20.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Logam Kimia Elektronika	Jumlah Industri Logam Kimia Elektronika yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	50 unit IKM	150.000.000,00		50 unit IKM	198.908.270,00
3.7.2.1.1.1.20.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Industri Kerajinan dan Aneka	Jumlah industri Kerajinan dan Aneka yang terbina	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	85 unit IKM	442.410.000,00		85 unit IKM	596.651.000,00
3.7.2.1.1.1.20.4	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Industri Kecil	Aplikasi database IKM yang ter update	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	- unit aplikasi	200.000.000,00	belum teranggarkan	1 Unit aplikasi	550.000.000,00
		Jumlah sentra Industri kecil yang terbina		3 sentra			3 sentra	
3.7.2.1.1.1.20.5	Fasilitasi Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi Industri Kecil (DBHCHT)	Jumlah IKM yang terfasilitasi pendaftaran HKI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	60 Ikm	150.000.000,00	Perlindungan Hak atas kekayaan intelektual	60 ikm	150.000.000,00
TOTAL					5.636.143.600,00	TOTAL		8.970.847.870,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.334.271.850,00			1.432.000.000,00
2.3	Pangan				1.334.271.850,00			1.432.000.000,00
2.3.2.3.1.1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi per kapita		2.000 Kkal	1.334.271.850,00			1.432.000.000,00
		Ketersediaan protein per kapita		53 gram				
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		90 %				
		Ketersediaan pangan utama beras		289,38 ton				
2.3.2.3.1.1.15.50	Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah laporan analisa data Neraca Bahan Makanan (NBM)		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	85.000.000,00		1 dokumen laporan	65.000.000,00
		Jumlah laporan analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			1 dokumen laporan	
		Jumlah peta daerah rawan pangan yang disusun		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			- dokumen	
2.3.2.3.1.1.15.51	Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan	Jumlah pengembangan desa mandiri pangan		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	250.000.000,00		5 desa	315.000.000,00
		Jumlah dokumen Forum Dewan Ketahanan Pangan		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			1 dokumen	
2.3.2.3.1.1.15.52	Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah pengelolaan cadangan pangan daerah		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	200.000.000,00		30 ton	265.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.2.3.1.1.15.53	Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan	Jumlah hasil pemantuan lembaga distribusi pangan masyarakat yang terdampingi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 dokumen	75.000.000,00		1 dokumen	80.000.000,00
		Jumlah laporan analisis data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis		1 dokumen laporan			1 dokumen laporan	
		Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang produktif		15 lembaga			15 lembaga	
2.3.2.3.1.1.15.54	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan menu B2SA	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	25 orang	400.000.000,00	-	25 orang	400.000.000,00
		Jumlah fasilitasi lomba/ festival pangan		3 jenis			3 jenis	
		Jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH)		1 dokumen laporan			1 dokumen laporan	
		Jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan		10 kelompok			10 kelompok	
2.3.2.3.1.1.15.55	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	jumlah dokumen hasil laporan uji kewanaran pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 dokumen laporan	150.000.000,00	-	1 dokumen laporan	150.000.000,00
		Jumlah peserta pembinaan mutu dan keamanan pangan		50 orang			50 orang	
2.3.2.3.1.1.15.56	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah Kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	21 kelompok	174.271.850,00		21 kelompok	157.000.000,00
3	Urusan Pilihan				16.757.452.150,00			23.677.899.250,00
3.3	Pertanian				16.757.452.150,00			23.677.899.250,00
3.3.2.3.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	1.417.750.000,00			1.768.700.000,00
3.3.2.3.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3.700 surat	58.500.000,00		3.900 surat	64.000.000,00
		jumlah judul buku yang tersedia		30 judul			35 judul	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	35 kali	150.000.000,00	Musrenbang kab	40 kali	200.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			30 kali			34 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			264 kali			460 kali	
3.3.2.3.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	36 paket	59.250.000,00		50 paket	118.500.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			8 paket			15 paket	
3.3.2.3.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14 unit	200.000.000,00	-	16 unit	375.200.000,00
		Jumlah rekening/tagihan yang dibayar			60 rekening bulan			60 rekening bulan	
		jumlah tenaga kebersihan yang terbayar			3 orang			3 orang	
3.3.2.3.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	55 unit	900.000.000,00		65 unit	951.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			110 unit			110 unit	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			10 unit			10 unit	
3.3.2.3.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 tahun	50.000.000,00	-	1 tahun	60.000.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			297 orang			300 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			75 orang			75 orang	
3.3.2.3.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	102.576.000,00			144.000.000,00
3.3.2.3.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Dinas Pertanian dan Pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	62 kegiatan	72.576.000,00	-	62 kegiatan	85.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.3.2.3.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	- dokumen	10.000.000,00		- dokumen	17.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		1 dokumen	1 dokumen				
3.3.2.3.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5 dokumen	10.000.000,00	-	5 dokumen	26.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
3.3.2.3.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 dokumen	10.000.000,00		1 dokumen	16.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
3.3.2.3.1.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			60 kw/ha	3.310.609.000,00			4.502.609.000,00
3.3.2.3.1.1.19.20	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	35 Orang	20.000.000,00		35 Orang	22.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.3.2.3.1.1.19.75	Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura	Jumlah sarana produksi tanaman buah dan florikultura	kecamatan pakis kecamatan candimulyo kecamatan tempuran kecamatan ngablak kecamatan borobudur kecamatan grabag kecamatan srumbung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	7.200 pohon	500.000.000,00	usulan sesuai proposal	7.200 pohon	600.000.000,00
		jumlah sarana produksi yang tersalurkan		1 paket	1 paket				
3.3.2.3.1.1.19.76	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah SL GAP/SOP tanaman pangan	Kabupaten Magelang	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 paket	350.000.000,00	mendukung pajale	6 paket	800.000.000,00
		Jumlah sarana produksi tanaman pangan			30 paket			50 paket	
3.3.2.3.1.1.19.77	Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Jumlah sarana produksi tanaman sayuran dan tanaman obat		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	15 paket	350.000.000,00		15 paket	720.000.000,00
		jumlah bimtek SL GAP/SOP tanaman sayuran dan tanaman obat			15 lokasi			15 lokasi	
3.3.2.3.1.1.19.78	Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan	Jumlah pengembangan tanaman vanili		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 kelompok tani	200.000.000,00		2 kelompok tani	275.000.000,00
		Jumlah pembinaan asosiasi petani tebu			1 asosiasi			1 asosiasi	
3.3.2.3.1.1.19.81	Pengembangan Benih Tanaman Unggulan	Jumlah kebun dinas yang dikelola		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 kebun	200.000.000,00		1 kebun	335.000.000,00
		Jumlah pembinaan penangkar benih tanaman unggulan			2 penangkar benih			3 penangkar benih	
		Jumlah penumbuhan penangkar benih tanaman unggulan			2 penangkar benih			2 penangkar benih	
3.3.2.3.1.1.19.82	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	Jumlah sarana dan prasarana produksi anggrek		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	30 unit	150.000.000,00		30 unit	210.000.000,00
		Jumlah bibit tanaman anggrek spesies yang dibudidayakan			1.000 batang			1.000 batang	
		Jumlah bibit tanaman anggrek kultur in vitro yang dibudidayakan			700 botol			700 botol	
		Jumlah bibit tanaman hias yang dibudidayakan			100 batang			100 batang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.19.83	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pemuliaan varietas tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 varietas	500.000.000,00	-	1 varietas	500.000.000,00
		Jumlah bantuan pupuk yang disalurkan ke kelompok tani		10 kelompok tani			10 kelompok tani	
3.3.2.3.1.1.19.84	Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT)	Jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	9.400 batang	740.609.000,00	-	10.000 batang	740.609.000,00
		Jumlah bibit kopi yang tersalurkan		26.500 batang			30.000 batang	
		Jumlah bibit teh yang tersalurkan		7.000 batang			15.000 batang	
3.3.2.3.1.1.19.85	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)	Jumlah bibit lada yang tersalurkan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	10.000 batang	300.000.000,00	-	10.000 batang	300.000.000,00
		Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan		10.000 batang			10.000 batang	
3.3.2.3.1.1.27	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin		20 %	2.470.000.000,00			3.380.000.000,00
		Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik		0,30 %				
3.3.2.3.1.1.27.1	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP) tanaman pangan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 paket	400.000.000,00		4 paket	1.100.000.000,00
		jumlah pembinaan kelompok tani organik tanaman pangan		1 kelompok			1 kelompok	
		jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan		20 unit			30 unit	
3.3.2.3.1.1.27.2	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura	jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen buah dan flori	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 paket	200.000.000,00		1 paket	240.000.000,00
		Jumlah sosialisasi /Bimtek GHP buah dan Florikultura		2 paket			2 paket	
3.3.2.3.1.1.27.3	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP) tanaman sayuran dan tanaman obat	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6 unit	250.000.000,00		6 unit	475.000.000,00
		Jumlah sertifikasi organik tanaman obat		1 kelompok			1 kelompok	
		Jumlah sertifikasi organik tanaman sayuran		1 kelompok			1 kelompok	
		jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat		6 unit			6 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.27.4	Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (D BHCHT)	Jumlah pengadaan alat pasca panen tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14 kelompok	495.000.000,00	-	10 kelompok	495.000.000,00
3.3.2.3.1.1.27.5	Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan	Jumlah fasilitasi pemasaran hasil lewat online shop	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 kali	250.000.000,00		1 kali	425.000.000,00
		jumlah kerjasama lembaga pemasaran dan dengan lembaga tani		1 kerjasama			1 kerjasama	
		Jumlah lembaga ekonomi petani yang ditumbuhkan		1 lembaga			1 lembaga	
		Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan, temu usaha dan pameran hasil penyuluhan pertanian		7 kali			7 kali	
3.3.2.3.1.1.27.6	Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3 kelompok tani	25.000.000,00	-	3 kelompok tani	25.000.000,00
3.3.2.3.1.1.27.7	Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT)	jumlah penumbuhan sentra buah lokal	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 lokasi	450.000.000,00		4 lokasi	60.000.000,00
3.3.2.3.1.1.27.8	Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar	Jumlah pengadaan alat pasca panen kopi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3 paket	200.000.000,00		4 paket	330.000.000,00
		Jumlah luas lahan sertifikasi organik kopi		20 Ha			20 Ha	
3.3.2.3.1.1.27.9	Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah	Jumlah pengadaan alat pasca panen kelapa	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 paket	200.000.000,00		2 paket	230.000.000,00
		Jumlah luas sertifikasi tanaman kelapa		20 Ha			20 Ha	
3.3.2.3.1.1.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan		3 %	8.055.267.150,00			11.729.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.1	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah pembinaan kelompok P3A	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	135 kelompok	65.000.000,00		135 kelompok	65.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.28.2	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian	Jumlah dam parit yang dibangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 unit	1.643.000.000,00		4 unit	4.710.000.000,00
		Jumlah embung yang dibangun		1 unit			1 unit	
		Jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos		372 desa			372 desa	
		Jumlah jalan usaha tani yang dibangun		6 unit			8 unit	
		Jumlah jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan dan irigasi sumur tanah dangkal yang dibangun		10 unit			12 unit	
3.3.2.3.1.1.28.3	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktural Pertanian (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang dibangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	25 paket	4.875.999.816,00		25 paket	5.000.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.4	Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian	Jumlah bimbingan pengelolaan alsin/UPJA	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4 kali	645.267.334,00		4 kali	1.020.000.000,00
		Jumlah operasional brigade alsin		1 kali			1 kali	
		Jumlah pengadaan alat mesin pertanian		1 paket			1 paket	
3.3.2.3.1.1.28.5	Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama penyakit	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1 paket	150.000.000,00		1 paket	200.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.6	Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk	Jumlah distributor dan penyalur pupuk yang dibina	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6 distributor	50.000.000,00		6 distributor	50.000.000,00
		Jumlah pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan pupuk		20 kelompok tani			20 kelompok tani	
3.3.2.3.1.1.28.7	Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	jumlah pengadaan alat mesin perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	20 unit	500.000.000,00		20 unit	500.000.000,00
3.3.2.3.1.1.28.8	Pembiayaan Pertanian	Jumlah asuransi usaha tani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.000 Ha	126.000.000,00		1.500 Ha	184.000.000,00
		Jumlah permodalan usaha tani		2 LKM			3 LKM	
3.3.2.3.1.1.29	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Cakupan Pembinaan Kelompok Petani		36 %	1.401.250.000,00			2.153.590.250,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.29.1	Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	Jumlah penumbuhan, pengembangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan tani (LKM, P4S, KTNA, Kelompok Tani, Gapoktan dan KTNA)	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	34 lembaga	300.000.000,00		34 lembaga	495.000.000,00
		Jumlah penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan (Posluhdes, BPP)		3 lembaga			3 lembaga	
		Jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang pertanian		2 kerjasama			2 kerjasama	
		Jumlah penilaian kelas kelompok tani (Pemula, Lanjut, Madya, Utama)		4 kelas			4 kelas	
		Jumlah penyusunan, pengumpulan dan updating data kelembagaan tani		1 dokumen			1 dokumen	
3.3.2.3.1.1.29.3	Penyusunan Program dan Program Penyuluhan	jumlah dokumen program penyuluhan yang disusun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	22 dokumen	150.000.000,00		22 dokumen	165.000.000,00
3.3.2.3.1.1.29.4	Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi dan siaran radio	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	22 paket	200.000.000,00		22 paket	245.000.000,00
		Jumlah demplot BPP yang difasilitasi		21 BPP			21 BPP	
3.3.2.3.1.1.29.5	Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilannya	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	700 orang	151.250.000,00		800 orang	166.375.000,00
3.3.2.3.1.1.29.6	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian pemerintah, swasta dan swadaya yang meningkat kapasitasnya	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	260 orang	500.000.000,00		270 orang	982.215.250,00
		Jumlah penyuluh yang kompeten sesuai standar LSP		48 orang			102 orang	
		jumlah laporan survey tingkat kepuasan petani thd layanan penyuluhan		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah pelatihan penyuluh di BPP		210 orang			240 orang	
3.3.2.3.1.1.29.7	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga petani tembakau	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2 kelompok	100.000.000,00		2 kelompok	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL					18.091.724.000,00	TOTAL		25.109.899.250,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					27.004.805.000,00			56.297.876.000,00
2.5	Lingkungan Hidup					27.004.805.000,00			56.297.876.000,00
2.5.2.5.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.030.000.000,00			1.277.000.000,00
2.5.2.5.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.000 Surat	30.000.000,00	Untuk pelayanan administrasi Perkantoran	6.000 Surat	50.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			4 Jenis Arsip			4 Jenis Arsip	
2.5.2.5.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40 Orang Hari	200.000.000,00	Pelaksanaan administrasi kepegawaian: mutasi, pensiun, kenaikan pangkat, Penilaian Angka Kredit dll	40 Orang Hari	225.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			30 Rapat			30 Rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			50 Orang Hari			50 Orang Hari	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			25 Kali			25 Kali	
2.5.2.5.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	200.000.000,00	Melengkapi dan Meningkatkan Peralatan Kantor (komputer serta sarana lainnya)	1 Paket	300.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			1 Paket			1 Paket	
2.5.2.5.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.945 m2	200.000.000,00	Untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	22.500 m2	222.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	45 Unit	250.000.000,00	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kantor (komputer serta sarana lainnya)	50 Unit	230.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			30 Unit			30 Unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			8 Unit			8 Unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			14 Unit			14 Unit	
2.5.2.5.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6 Paket	100.000.000,00	Rehab gedung gedung di Dinas Lingkungan Hidup	9 Paket	200.000.000,00
2.5.2.5.1.1.7.15	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 Kali	50.000.000,00	Untuk mendukung peningkatan disiplin ASN	3 Kali	50.000.000,00
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			230 Orang			250 Orang	
		Jumlah ASN yang dibina			110 Orang			110 Orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan			- Paket			- Paket	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			5 Orang			6 Orang	
2.5.2.5.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	270.000.000,00			170.000.000,00
2.5.2.5.1.1.8.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13 Dokumen	120.000.000,00	Penyelenggaraan Pelayanan Keuangan	13 Dokumen	120.000.000,00
		Jumlah Kegiatan Yang dikelola			42 Kegiatan			42 Kegiatan	
2.5.2.5.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- Dokumen	50.000.000,00	Peyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan	- Dokumen	20.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.1.1.8.2.1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah		Dinas Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.00 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup		20.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4 Dokumen	50.000.000,00	Penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan Kinerja Dinas Kominfo	4 Dokumen	20.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan NSPK Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	10.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
2.5.2.5.1.1.29	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara			31 %	1.932.125.000,00			5.390.000.000,00
		Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)			67 %				
		Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air			38 %				
		Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi			24 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.29.1	Pengendalian Pencemaran Udara dan Gas Rumah Kaca.	Jumlah pengujian kualitas air hujan yang dilaksanakan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	300.000.000,00	Pelaksanaan Uji Kualitas Udara dan mendorong pengurangan efek gas rumah kaca (GRK)	1 Paket	360.000.000,00
		Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau PPU			10 Usaha/Kegiatan			10 Usaha/Kegiatan	
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi			40 usaha/kegiatan			40 usaha/kegiatan	
		Jumlah peserta sosialisasi			100 orang			100 orang	
		Jumlah dokumen yang dibuat			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah lokasi pengujian kualitas udara ambien			10 lokasi			10 lokasi	
		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina			30 usaha/kegiatan			30 usaha/kegiatan	
2.5.2.5.1.1.29.2	Pengendalian Pencemaran Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50 usaha/kegiatan	150.000.000,00	Mendorong pengelolaan limbah B3 secara benar	50 usaha/kegiatan	300.000.000,00
		Jumlah Rekomendasi/ijin TPS Limbah B3 yang dikeluarkan			5 Rekomendasi/ijin			5 Rekomendasi/ijin	
		Jumlah dokumen yang dibuat			1 dokumen			1 dokumen	
2.5.2.5.1.1.29.3	Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	Jumlah embung/waduk yang diuji	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	200.000.000,00	Mendorong pencegahan dan pengurangan pencemaran air dan tanah	1 Paket	320.000.000,00
		Jumlah dokumen yang dibuat			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau			20 usaha/kegiatan			20 usaha/kegiatan	
		Jumlah sungai yang diuji			15 Sungai			15 Sungai	
		Jumlah usaha/kegiatan yang disosialisasi			30 usaha/kegiatan			30 usaha/kegiatan	
		Jumlah rekomendasi/ijin IPLC yang dikeluarkan			5 rekomendasi/ijin			5 rekomendasi/ijin	
		Jumlah sarpras pemeliharaan sungai			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.29.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah.	Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	150 orang	300.000.000,00	Mendorong masyarakat untuk peduli terhadap pencegahan pencemaran air dan tanah (pembentukan dan optimasi komunias peduli sungai)	150 orang	250.000.000,00
		Jumlah kelompok peduli sungai yang terbentuk			3 kelompok			3 kelompok	
		Jumlah titik lokasi bersih kali			5 Sungai			5 Sungai	
		Jumlah sarpras PPA yang diadakan			1 paket			1 paket	
		Jumlah dokumen yang dibuat			1 dokumen			1 dokumen	
2.5.2.5.1.1.29.5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Sampel yang diperiksa	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200 Sampel	500.000.000,00	Optimasi penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan	250 Sampel	1.210.000.000,00
		Jumlah Peralatan Laboratorium yang dibeli			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Bahan Kimia/ Reagen yang dibeli			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Limbah yang dikelola			800 Kg			850 Kg	
		Jumlah Peralatan Laboratorium yang dipelihara			1 Paket			1 Paket	
2.5.2.5.1.1.29.6	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan.	Jumlah Personel yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3 Pelatihan	300.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Laboratorium (SDM, Kelembagaan, Sertifikasi)	5 Pelatihan	450.000.000,00
		Jumlah Sistem yang dikelola			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah Parameter yang Terakreditasi			16 Parameter			20 Parameter	
2.5.2.5.1.1.29.7	Penyediaan Sarana dan Prasaran Pengendalian Pencemaran Air (DAK)	Jumlah sarpras PPA yang diadakan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- paket	0,00	Penyediaan peralatan yang mendorong Pengendalian Pencemaran Air	- paket	500.000.000,00
2.5.2.5.1.1.29.8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Udara dan Limbah B3 (DAK)	Jumlah sarpras PPU dan LB3 yang diadakan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	- paket	0,00	Penyediaan peralatan yang mendorong Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca	- paket	500.000.000,00
2.5.2.5.1.1.29.9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan (DAK).	Jumlah Sarana Prasarana yang dibeli	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	182.125.000,00	Penyediaan peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup	1 Paket	1.500.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.30	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan			60 %	750.000.000,00			1.905.000.000,00
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah			100 %				
		Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani			100 %				
		Persentase kelompok/individu yang mendapat penghargaan di bidang LH			48 %				
2.5.2.5.1.1.30.1	Fasilitasi Pelayanan dan Pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan DLH	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 paket	200.000.000,00	Pelayanan dan monitoring ijin lingkungan	1 paket	600.000.000,00
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi			1.437 Usaha dan/atau Kegiatan			1.627 Usaha dan/atau Kegiatan	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan di bidang pemanfaatan sumber daya alam yang diawasi			6 Usaha dan/atau Kegiatan			8 Usaha dan/atau Kegiatan	
		Jumlah peserta sosialisasi			180 peserta			180 peserta	
		Jumlah peserta bimtek di bidang Lingkungan Hidup			50 Peserta			50 Peserta	
		Sarana dan prasarana pengawasan usaha dan/atau kegiatan			1 paket			1 paket	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan non tambang yang diawasi			15 Usaha dan/atau Kegiatan			20 Usaha dan/atau Kegiatan	
		Jumlah kendaraan teknis pengawasan yang dibeli dan pemeliharaan			1 paket			1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.30.2	Pengkajian dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.	Jumlah dokumen IKLH	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 dokumen	Perhitungan IKLH, Penyusunan SILH dan penyusunan dokumen kinerja lingkungan hidup	2 dokumen	480.000.000,00
		Jumlah dokumen Menuju Indonesia Hijau			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup			1 paket		- paket	
		Jumlah dokumen IKPLHD			1 dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup			- dokumen		1 dokumen	
		Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi lingkungan hidup			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah peserta bimtek Sistem Informasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup			20 peserta		20 peserta	
		Jumlah dokumen penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup			1 paket		1 paket	
2.5.2.5.1.1.30.3	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6 penghargaan	Fasilitasi penyusunan peraturan tentang lingkungan hidup, pemberian penghargaan lingkungan hidup	6 penghargaan	375.000.000,00
		Jumlah penyusunan peraturan bidang lingkungan hidup			2 rancangan		2 rancangan	
		Jumlah peserta bimtek penguatan tim penanganan kasus lingkungan hidup			20 orang		20 orang	
		Jumlah kendaraan teknis yang dibeli dan pemeliharaan			1 paket		1 paket	
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup			50 orang		50 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi adipura			160 orang		160 orang	
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan adipura			6 kali		6 kali	
		Jumlah Peserta Lomba Bersih Sehat			21 peserta		21 peserta	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.30.4	Penanganan Kasus dan Penaatan Lingkungan Hidup.	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ditangani	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000,00	penanganan kasus lingkungan hidup	25 kasus	450.000.000,00
		Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan					35 laporan	
		Jumlah surat teguran dan sanksi yang diterbitkan					15 surat	
		Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan					75 orang	
		Jumlah pengujian laboratorium kualitas lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa lingkungan					20 titik	
2.5.2.5.1.1.31	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani			15.450.000.000,00			23.235.000.000,00
		Persentase cakupan area pelayanan sampah						
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R						
2.5.2.5.1.1.31.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah.	Lahan TPS3R yang dibeli	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.000.000.000,00	pembelian tanah untuk TPST dan Pembangunan TPST	1 Paket	20.700.000.000,00
		Jumlah TPSS yang direvitalisasi					1 Paket	
		Jumlah Kendaraan yang dibeli					1 Paket	
		Jumlah Kemandoran dibangun					1 Paket	
		Jumlah UPT dibangun					1 Paket	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kelayakan yang disusun					2 Paket	
		Jumlah Alat Pengolah sampah yang dibeli					2 Paket	
		Jumlah Alat GPS Kendaraan dan Kelengkapan instalasinya yang dibeli					1 Paket	
		Sistem Informasi Penanganan Sampah					1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.31.2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Penanganan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97 Unit	pemeliharaan fasilitas penanganan sampah (kendaraan, TPA)	100 Unit	10.000.000,00
		Jumlah kendaraan yang dikelola			38 Unit		40 Unit	
		Jumlah Pengelola Penanganan Sampah yang dikelola			215 Orang		230 Orang	
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pemeliharaan Sarpras			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Bahan Pengolah Sampah dan Lindi			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Laporan Penanganan Sampah			1 Dokumen		1 Dokumen	
2.5.2.5.1.1.31.3	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah.	Jumlah Alat yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4 Unit	pemeliharaan fasilitas pengurangan sampah (kendaraan, TPS3R)	4 Unit	600.000.000,00
		Jumlah kendaraan yang dikelola			4 Unit		5 Unit	
		Jumlah Pengelola Pengurangan Sampah yang dikelola			35 Orang		35 Orang	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli			1 Paket		1 Paket	
		Jumlah Bahan Pengolah Sampah yang dibeli			1 Paket		1 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.31.4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah.	Pembangunan TPS 3R	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	750.000.000,00	Optimasi kinerja bank sampah	1 Paket	1.425.000.000,00
		Jumlah publikasi pengurangan sampah yang dibuat			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah sosialisasi			21 Kali			21 Kali	
		Jumlah Bank sampah Yang dibina			100 Unit			100 Unit	
		Jumlah Lomba Bank Sampah yang dilaksanakan			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah lomba TPS 3R yang dilaksanakan			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah bantuan pengelolaan sarana dan prasarana untuk Bank Sampah			1 Paket			1 Paket	
		Jumlah bantuan sarana dan prasarana pengelolaan TPS 3R			- Paket			- Paket	
		Fasilitasi Gerakan Pungut Sampah			6 Kali			6 Kali	
		Pembentukan Bank Sampah Kantor dan Sekolah			10 Unit			20 Unit	
		Jumlah Laporan Pengurangan Sampah			1 Dokumen			1 Dokumen	
		2.5.2.5.1.1.31.10			Pengelolaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah (DAK)			Jumlah sarana dan prasarana pengurangan sampah yang dibeli	
2.5.2.5.1.1.32	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan			4 %	5.000.000.000,00			15.220.876.000,00
		Persentase RTH Publik yang terkelola			25 %				
		Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan			38 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.32.1	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.	Jumlah kendaraan yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.050.000.000,00	Pengelolaan dan peningkatan kinerja RTH Publik (taman-taman)	14 Unit	10.420.876.000,00
		Jumlah alat yang dikelola					65 unit	
		Jumlah kendaraan yang dibeli					1 unit	
		Jumlah alat yang dibeli					6 Unit	
		Jumlah Pengelola RTH publik yang dikelola					70 Orang	
		Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH					1 Paket	
		Jumlah Bangunan Konstruksi Pengelolaan RTH					1 Paket	
		Jumlah Bahan Konstruksi Pengelolaan RTH Yang Dibeli					1 Paket	
		Jumlah mechanical electrical yang dibeli					35 Unit	
		Jumlah Bibit Tanaman yang dibeli					2 Paket	
		Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Pengelolaan RTH Publik.					- Paket	
		Penyusunan DED					10 paket	
		Pembebasan lahan					1 paket	
		Pembangunan RTH					6 paket	
		identifikasi sempadan (kepemilikan,kewenangan)					- paket	
2.5.2.5.1.1.32.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.	Jumlah bantuan hibah yang diterima masyarakat	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	950.000.000,00	Sosialisasi RTH, Optimasi peran masyarakat dalam RTH	1 paket	4.800.000.000,00
		Pendataan dan identifikasi sekolah					- paket	
		Penyusunan DED RTH sekolah sekolah					2 paket	
		Pembangunan RTH sekolah					1 paket	
		Fasilitasi pembangunan RTH di wilayah pedesaan					1 paket	
		Sosialisasi RTH					1 paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.33	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim	Persentase luasan daerah resapan air dan rawan longsor yang dikonservasi		2 %	2.572.680.000,00			9.100.000.000,00
		Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi		- %				
		Persentase mata air yang dikonservasi		14 %				
		Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim		4 %				
		Persentase sekolah Adiwiyata		15 %				
2.5.2.5.1.1.33.1	Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang dibina	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000,00	Optimasi peran sekolah adiwiyata dan Desa Pro Iklim	50 sekolah	850.000.000,00
		jumlah fasilitasi sapras sekolah Negeri Adiwiyata					- paket	
		Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata					1 paket	
		Jumlah Peserta sosialisasi Sekolah Adiwiyata					300 orang	
		Jumlah peserta Bimtek Sekolah Adiwiyata					200 orang	
		Jumlah penerima penghargaan Kalpataru					1 orang/kelompok	
		Jumlah Pramuka saka kalpataru yang dibina					1 kelompok	
		Jumlah Desa Proklam yang dibina					35 Desa	
		Jumlah fasilitasi sapras Desa proklam					1 paket	
		Jumlah peserta Bimtek Proklam					150 orang	
		Fasilitasi Hari LH yang dilaksanakan					1 Kali	
2.5.2.5.1.1.33.2	Konservasi Lahan Kritis dan Rawan Bencana.	RAD Konservasi dan Review dokumen kajian status kerusakan lahan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	750.000.000,00	Penyusunan RAD, Penanaman Pohon di lahan rawan longsor, bimtek bagi masyarakat sekitar rawan longsor	- Dokumen	2.500.000.000,00
		Penghijauan untuk konservasi rawan bencana					50 Ha	
		Penyusunan Dokumen Status Kerusakan					1 paket	
		Jumlah peserta sosialisasi					500 orang	
		Jumlah Peserta Bimtek					200 orang	
		Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Penanaman					500 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.5.2.5.1.1.33.3	Konservasi Kawasan Resapan Air..	Jumlah pohon aren yang diselamatkan	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 paket	750.000.000,00	Optimasi konservasi di kawasan resapan air (pembentukan komunitas, penanaman pohon, pembuatan sumur resapan dan biopori)	1 paket	2.000.000.000,00
		Jumlah alat biopori yang dibeli			1 paket			1 paket	
		Jumlah sumur resapan yang dibuat			2 paket			2 paket	
		Jumlah dokumen kajian yang dibuat			3 dokumen			2 dokumen	
		luas lahan yang dikonservasi			60 ha			60 ha	
		jumlah orang yang disosialisai			200 orang			200 orang	
		Jumlah komunitas mata air yang dibentuk			10 kelompok			10 kelompok	
		Paket tanah yang dibeli di sekitar mata air			- Paket			5 Paket	
		Pembuatan senderan pengaman mata air			1 Paket			1 Paket	
2.5.2.5.1.1.33.4	Konervasi Keanekaragaman Hayati.	jumlah dokumen yang dibuat	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2 dokumen	150.000.000,00	Perlindungan terhadap ke aneka ragam hayati (flora dan fauna endemik)	1 dokumen	600.000.000,00
		Jumlah tanaman langka yang ditanam			1 Paket			1 Paket	
2.5.2.5.1.1.33.5	Koservasi lahan kritis dan daerah rawan bencana (DBHCHT)	Penghijauan untuk Konservasi rawan bencana	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30 Ha	422.680.000,00	Konservasi di kawasan rawan bencana	25 Ha	2.500.000.000,00
2.5.2.5.1.1.33.6	Pengendalian dan Adaptasi Perubahan Iklim (DBHCHT)	jumlah fasilitasi sapras sekolah Negeri Adiwiyata	Kabupaten Magelang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 paket	0,00	Optimasi peran sekolah adiwiyata dan Desa Pro Iklim	1 paket	650.000.000,00
		Jumlah fasilitasi sapras sekolah swasta Adiwiyata			1 paket			1 paket	
		Jumlah fasilitasi sapras Desa proklim			1 paket			1 paket	
TOTAL						27.004.805.000,00	TOTAL	56.297.876.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				7.467.500.000,00			9.577.500.000,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				7.467.500.000,00			9.577.500.000,00
2.6.2.6.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	1.018.500.000,00			1.298.000.000,00
2.6.2.6.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.000 surat	22.500.000,00		3.000 surat	35.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		90 arsip spj			90 arsip spj	
2.6.2.6.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	40 Perjalanan	110.000.000,00		40 Perjalanan	133.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		16 rapat			16 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		215 perjalanan dalam daerah			215 perjalanan dalam daerah	
2.6.2.6.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2 paket	120.000.000,00		2 paket	100.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		3 paket			3 paket	
2.6.2.6.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	757 meter persegi	233.000.000,00		757 meter persegi	292.000.000,00
		Jumlah rekening tagihan yang dibayar		48 rekening bulan			48 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.2.6.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	38 unit	310.000.000,00		38 unit	540.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		50 unit			50 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		6 unit			6 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		10 unit			10 unit	
2.6.2.6.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2 paket	148.000.000,00		2 paket	198.000.000,00
2.6.2.6.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Rapat Kerja	75.000.000,00		1 Rapat Kerja	0,00
		Jumlah ASN yang dibina		40 personil			40 personil	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak		43 personil			43 personil	
2.6.2.6.1.1.8	Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	119.000.000,00			138.500.000,00
2.6.2.6.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16 laporan	85.000.000,00		16 laporan	102.500.000,00
		Jumlah kegiatan yang dikelola		20 kegiatan			20 kegiatan	
2.6.2.6.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	- Dokumen Renstra	10.000.000,00		- Dokumen Renstra	5.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		2 Dokumen Renja			2 Dokumen Renja	
2.6.2.6.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3 Dokumen Pelaporan	14.000.000,00		3 Dokumen Pelaporan	16.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun		12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.2.6.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	25 Dokumen	10.000.000,00		25 Dokumen	15.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		25 Dokumen			25 Dokumen	
2.6.2.6.1.1.16	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP		97 %	4.570.000.000,00			5.605.000.000,00
		Persentase penerbitan KK		97 %				
2.6.2.6.1.1.16.1	Fasilitasi Penerbitan Perubahan Identitas Penduduk	Jumlah Dokumen Perubahan Identitas Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.000 lembar	1.700.000.000,00		82.000 lembar	2.090.000.000,00
2.6.2.6.1.1.16.2	Fasilitasi Penerbitan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Jumlah Penerbitan Surat Pindah Datang Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.000 lembar	70.000.000,00		17.000 lembar	220.000.000,00
		Pendataan Penduduk rentan dan orang asing		300 orang			330 orang	
2.6.2.6.1.1.16.3	DAK (Pelayanan Adminduk)	Kualitas pelayanan cepat dan tertib administrasi kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100 %	2.800.000.000,00		100 %	3.295.000.000,00
2.6.2.6.1.1.17	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran		90 %	800.000.000,00			1.320.000.000,00
		Persentase Penerbitan Akta perkawinan		50 %				
		Persentase Penerbitan Akta Kematian		60 %				
2.6.2.6.1.1.17.1	Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dan Kelahiran	Jumlah Dokumen Akta Kematian dan Kelahiran yang diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	30.000 lembar	700.000.000,00		31.000 lembar	770.000.000,00
2.6.2.6.1.1.17.2	Pelayanan Penerbitan Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Jumlah Dokumen Akte Perceraian, Perkawinan, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan yg diterbitkan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	400 lembar	100.000.000,00		430 lembar	550.000.000,00
2.6.2.6.1.1.18	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data	Persentase Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan		70 %	960.000.000,00			1.216.000.000,00
		Persentase Pemanfaatan Data		80 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.6.2.6.1.1.18.1	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Lancarnya Pelayanan Adminduk dan Tertib Adminduk		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21 kecamatan	810.000.000,00		21 kecamatan	887.000.000,00
		Jenis buku yang diterbitkan			4 buku			4 buku	
2.6.2.6.1.1.18.2	Fasilitasi & evaluasi Pemanfaatan Data dan Pengelolaan Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10 Perjanjian Kerja Sama	150.000.000,00		16 Perjanjian Kerja Sama	329.000.000,00
		Jumlah Dokumen yang dipelihara			30.300 dokumen			31.400 dokumen	
		JUmlah dokumen yang didigitalisasi			12.000 dokumen			13.200 dokumen	
TOTAL						7.467.500.000,00		TOTAL	9.577.500.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.534.600.000,00			7.046.700.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.534.600.000,00			7.046.700.000,00
2.7.2.7.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	896.000.000,00			1.085.000.000,00
2.7.2.7.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.000 surat	45.000.000,00		3.000 surat	50.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		820 buah			820 buah	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		10 buah			15 buah	
2.7.2.7.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	78 kali	124.000.000,00		80 kali	135.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		15 kali			15 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		100 kali			100 kali	
2.7.2.7.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 paket	150.000.000,00		1 paket	270.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola		152 buah			152 buah	
2.7.2.7.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	741 m2	112.000.000,00		741 m2	130.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25 buah	305.000.000,00		25 buah	325.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 buah			10 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			4 buah			4 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			13 buah			13 buah	
2.7.2.7.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 paket	60.000.000,00		1 paket	70.000.000,00
2.7.2.7.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 kali	100.000.000,00	-	4 kali	105.000.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			40 orang			40 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			4 orang			4 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			3 orang			3 orang	
2.7.2.7.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	118.000.000,00			179.000.000,00
2.7.2.7.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25 kegiatan	50.000.000,00		25 kegiatan	52.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			1 laporan			1 laporan	
2.7.2.7.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	- dokumen	30.000.000,00		- dokumen	40.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.7.2.7.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3 dokumen	38.000.000,00		3 dokumen	42.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 buah	0,00	-	1 buah	45.000.000,00
		Jumlah SP yang tersusun			1 buah			- buah	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			- buah			- buah	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 buah			1 buah	
2.7.2.7.1.1.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pasar desa dengan pengelolaan baik			32 %	1.515.600.000,00			3.036.700.000,00
		Persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh			32 %				
		Persentase TTG yang difasilitasi			28 %				
		Persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri			38 %				
		Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat			1 %				
		Persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa			100 %				
2.7.2.7.1.1.21.1	Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS)	Jumlah KP SPAMS berstatus mandiri		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	65 buah	70.000.000,00		108 buah	75.000.000,00
2.7.2.7.1.1.21.2	Penguatan kapasitas pengelola pasar desa	Jumlah pengelola pasar desa yang dibina		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10 kelompok	60.000.000,00		10 kelompok	65.000.000,00
2.7.2.7.1.1.21.3	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pemerintah Desa dan Masyarakat	Jumlah BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	136 BUMDES	150.000.000,00		154 BUMDES	450.000.000,00
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi Lembaga ekonomi masyarakat-nya			21 kecamatan			21 kecamatan	
2.7.2.7.1.1.21.4	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelembagaan TTG yang difasilitasi		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	110 buah	200.000.000,00		173 buah	330.000.000,00
2.7.2.7.1.1.21.5	Fasilitasi Pengembangan Swadaya Masyarakat	Jumlah desa dalam strata berkembang dan cepat berkembang		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	95 desa	190.000.000,00	-	100 desa	167.900.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.21.6	TNI Manunggal Membangun Desa	Jumlah desa yang difasilitasi kegiatan TMMD		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3 desa	505.600.000,00	-	3 desa	1.464.800.000,00
2.7.2.7.1.1.21.7	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya	Jumlah Posyandu yang berprestasi	Jalan Soekarno Hatta No. 59	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6 buah	340.000.000,00	.	6 buah	484.000.000,00
		Jumlah masyarakat mitra P2MBG			50 orang			50 orang	
		Jumlah satgas adat istiadat yang terbentuk			5 buah			5 buah	
2.7.2.7.1.1.22	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa			100 %	1.510.000.000,00			2.096.000.000,00
		Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya			23,80 %				
		Persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi			0,15 %				
		Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan			21 %				
2.7.2.7.1.1.22.1	Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan pengisian Kepala Desa, perangkat desa dan BPD serta penanganan kasus-nya		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	367 desa	400.000.000,00		367 desa	880.000.000,00
2.7.2.7.1.1.22.2	Fasilitasi Penegasan Batas Desa	Jumlah kecamatan yang selesai dipetakan batas desa-nya		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 kecamatan	60.000.000,00		1 kecamatan	66.000.000,00
2.7.2.7.1.1.22.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah LKD (LPM, Karang taruna, RT, RW) yang berprestasi		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6 buah	750.000.000,00		6 buah	880.000.000,00
		Jumlah PKK aktif yang dibina			394 buah			394 buah	
2.7.2.7.1.1.22.4	Fasilitasi Pengisian Data Informasi Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM)	Kabupaten Magelang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 kali	300.000.000,00	Pemutakhiran data-data desa dan kelurahan	4 kali	270.000.000,00
		Jumlah data informasi desa yang dimutakhirkan			70 buah			70 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.23	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu			100 %	495.000.000,00			650.000.000,00
		Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya			100 %				
		Persentase desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa nya			10,89 %				
2.7.2.7.1.1.23.1	Penguatan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	367 desa	150.000.000,00		367 desa	200.000.000,00
		Jumlah fasilitasi kawasan pedesaan			1 kawasan pedesaan			1 kawasan pedesaan	
		Jumlah desa yang menyusun RPJMDesa tepat waktu			294 desa			- desa	
2.7.2.7.1.1.23.2	Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan-nya		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	367 desa	225.000.000,00		367 desa	310.000.000,00
2.7.2.7.1.1.23.3	Fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aset desa	Jumlah desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa-nya		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40 desa	120.000.000,00		75 desa	140.000.000,00
TOTAL						4.534.600.000,00	TOTAL		7.046.700.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					44.252.128.000,00		59.819.902.000,00
2.9	Perhubungan					44.252.128.000,00		59.819.902.000,00
2.9.2.9.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			33,33 %	2.743.438.000,00		2.481.900.000,00
2.9.2.9.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	6.400 Surat	89.055.000,00	Untuk pelayanan administrasi Perkantoran	6.400 Surat
		Jumlah arsip yang dikelola			2 Arsip yang dikelola			2 Arsip yang dikelola
2.9.2.9.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	278 kali	250.000.000,00	Penyelenggaraan Koordinasi	302 kali
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			27 kali			27 kali
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			337 kali			337 kali

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	Kec. Mungkid	4 Komputer (PC)	302.216.000,00	Pembelian dan Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	8 Komputer (PC)	432.437.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		4 UPS			8 UPS	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		3 Laptop			1 Laptop	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		6 Printer standar			9 Printer standar	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Printer Laserjet			- 0	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 LCD			- 0	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		- AC			1 AC	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Wirreless, TOA			- Wirreless, TOA	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Standmix			- Standmix	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		10 Jam dinding			7 Jam dinding	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Mesin penyedot debu			- Mesin penyedot debu	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Mesin potong rumput			- Mesin potong rumput	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		- Kipas angin			1 Kipas angin	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 TV LED			2 TV LED	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		- mesin faximale			1 mesin faximale	
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		- paket Mesin Runningtext			1 paket Mesin Runningtext	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		3 Troly pemadam			- Troly pemadam	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		- Kursi Tamu			1 Kursi Tamu	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 Kursi eselon II			- Kursi eselon II	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		9 Kursi eselon IV			- Kursi eselon IV	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		25 Kursi staff			16 Kursi staff	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		- meja 1/2 biro			11 meja 1/2 biro	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 meja telfon			5 meja telfon	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		- almari kayu			1 almari kayu	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		- almari besi			5 almari besi	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		- filling cabinet			5 filling kabinet	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		12 rak besi bertingkat			5 rak besi bertingkat	
		Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		4 Kotak P3K			1 Kotak P3K	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	593.427.000,00	Untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	57.633 m2	632.942.000,00
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1 paket	
		Jumlah tenaga harlep					7 Harlep	
		Jumlah alat listrik dan kebersihan					1 paket	
		Jumlah rekening jasa telfon yang terbayar					3 rekening	
		Jumlah rekening jasa listrik yang terbayar					9 rekening	
		Jumlah rekening jasa air yang terbayar					6 rekening	
		Jumlah surat kabar yang terbayar					2 surat kabar	
		Jumlah rekening jasa internet yang terbayar					1 rekening	
2.9.2.9.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	394.153.000,00	Untuk Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor; Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 paket	419.261.000,00
		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara					1 paket	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara					25 kendaraan	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara					9 kendaraan	
2.9.2.9.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	601.210.000,00	Rehab gedung kantor Dinas Perhubungan	1 paket	401.410.000,00
		Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat Terminal					1 paket	
2.9.2.9.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	513.377.000,00	Untuk mendukung peningatan disiplin ASN	6 kali	156.102.000,00
		Jumlah ASN yang dibina					85 pegawai	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak					39 Harlep/SS	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan					- 0	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya					7 JFT	
2.9.2.9.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			267.779.000,00			301.675.000,00
2.9.2.9.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	147.779.000,00	Penyelenggaraan Pelayanan Keuangan	25 kegiatan	162.151.000,00
2.9.2.9.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	50.000.000,00	Sebagai dokumen perencanaan	2 dokumen	23.742.000,00
2.9.2.9.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan bulanan dan tahunan yang tersusun	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	50.000.000,00	Pelaporan kinerja perangkat daerah	13 dokumen	93.519.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun					12 dokumen	
2.9.2.9.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian internal yang tersusun	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	20.000.000,00	Pedoman NSPK Perangkat Daerah	1 dokumen	22.263.000,00
2.9.2.9.1.1.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan			1.075.000.000,00			1.336.216.000,00
2.9.2.9.1.1.17.26	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah bukti lulus uji	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	1.000.000.000,00	Pelayanan keselamatan penumpang	15.000 set	1.256.816.000,00
		Jumlah dokumen FS dan Appraisal harga tanah lokasi gedung uji					2 dokumen	
2.9.2.9.1.1.17.27	Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah pemeliharaan alat uji	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	75.000.000,00	Pelayanan uji kendaraan bermotor	12 alat uji	79.400.000,00
2.9.2.9.1.1.22	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan			2.050.000.000,00			11.799.865.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.9.2.9.1.1.22.1	Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Perhubungan	Jumlah halte yang terbangun	Kec. Mungkid, Kec. Tempuran	DINAS PERHUBUNGAN	2 halte	200.000.000,00	Peningkatan pelayanan prasarana sarana perhubungan	2 halte	242.800.000,00
		Jumlah halte yang dipelihara		2 halte	2 halte				
2.9.2.9.1.1.22.2	Pengelolaan Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS PERHUBUNGAN	235 titik	300.000.000,00	Penyelenggaraan tertib parkir	250 titik	328.215.000,00
		Jumlah pakaian kerja petugas parkir			235 set			250 set	
		Jumlah pengadaan papan informasi tarif retribusi			8 buah			8 buah	
2.9.2.9.1.1.22.3	Survey Potensi Parkir	Jumlah dokumen survey potensi parkir	Kabupaten Magelang	DINAS PERHUBUNGAN	79,66 %	50.000.000,00	Pendataan Potensi Parkir	84,75 %	50.000.000,00
2.9.2.9.1.1.22.4	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang dikelola	Kec. Borobudur, Salaman, Bandongan, Tegalrejo, Secang, Grabag	DINAS PERHUBUNGAN	6 unit	500.000.000,00	Pelayanan terminal angkutan darat	6 unit	966.350.000,00
2.9.2.9.1.1.22.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat	Jumlah terminal yang dibangun / dikembangkan	Kec. Borobudur	DINAS PERHUBUNGAN	2 lokasi	1.000.000.000,00	Peningkatan pelayanan sarana prasarana terminal angkutan darat	1 lokasi	10.212.500.000,00
2.9.2.9.1.1.23	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas			59,97 %	38.115.911.000,00			43.900.246.000,00
		Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas			33,33 %				
2.9.2.9.1.1.23.1	Pengamanan Lalu Lintas untuk Acara Tertentu	Jumlah Pengamanan Tamu Pemda dan CFD	Kec. Mungkid, Kec. Muntilan	DINAS PERHUBUNGAN	76 kali	190.000.000,00	Pelayanan keamanan lalu lintas pada acara tertentu	76 kali	190.000.000,00
		Jumlah pelaksanaan penilaian wahana tata nugraha			1 kali			1 kali	
2.9.2.9.1.1.23.2	Pengembangan Pelayanan Angkutan	Jumlah trayek yang ditata	Kabupaten Magelang	DINAS PERHUBUNGAN	4 trayek	225.000.000,00	Peningkatan pelayanan angkutan	4 trayek	238.300.000,00
		Jumlah pembinaan angkutan orang			2 kali			2 kali	
		Jumlah dokumen profil perhubungan			1 dokumen			1 dokumen	
2.9.2.9.1.1.23.3	Pembayaran Rekening LPJU	Jumlah rekening PJU yang terbayarkan	UPT. Borobudur, Tegalrejo, Magelang Kota	DINAS PERHUBUNGAN	3 rayon	19.000.800.000,00	Pembayaran rekening LPJU yang tertib administrasi	3 rayon	20.000.760.000,00
2.9.2.9.1.1.23.4	Pengelolaan LPJU	Jumlah PJU yang terbangun	Kec. Muntilan, Mungkid, Salam, Salaman, Borobudur, Tegalrejo	DINAS PERHUBUNGAN	755 titik	14.043.900.000,00	Pemeliharaan LPJU	755 titik	17.925.000.000,00
		Jumlah meterisasi			3 rayon			3 rayon	
		Jumlah pemeliharaan LPJU			3.000 titik			3.000 titik	
2.9.2.9.1.1.23.5	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan	Jumlah ITS yang terbangun	Kec. Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ngluwar, Bandongan, Salam , Srumbung, Tegalrejo, Candimulyo, Kaliangkrik, Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	5 unit	3.500.000.000,00	Terpeliharanya sarana pelengkap jalan	5 unit	4.589.975.000,00
		Jumlah Rambu yang terbangun			75 unit			75 unit	
		Jumlah Traffic cone yang terbeli			50 unit			50 unit	
		Jumlah cermin tikungan yang terbangun			8 unit			8 unit	
		Jumlah RPPJ yang terbangun			3 unit			3 unit	
		Jumlah water barrier yang terbeli			20 unit			20 unit	
		Jumlah zebra cross yang terbangun			10 lokasi			10 lokasi	
		Jumlah marka jalan yang terbangun			40.000 meter			40.000 meter	
		Jumlah pita kejut yang terbangun			8 titik			8 titik	
		Jumlah pagar pengaman jalan yang terbangun			600 meter			600 meter	
		Jumlah APILL yang terbelihara			19 titik			20 titik	
		Jumlah flassing yang terpelihara			25 titik			25 titik	
		Jumlah CCTV yang dipelihara			11 titik			11 titik	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.23.6	Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk angkutan umum	Kec. Mungkid, Bandongan, Secang, Tegalrejo, Salaman, Borobudur, Grabag	DINAS PERHUBUNGAN	40 peserta	1.106.211.000,00	Pelayanan keselamatan LLAJ	40 peserta	906.211.000,00
		Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk pelajar			70 siswa			70 siswa	
		Jumlah operasi laik jalan			48 kali			48 kali	
		Jumlah posko angkutan lebaran, natal & tahun baru			2 kali			2 kali	
		Jumlah bus angkutan mudik gratis			3 unit			3 unit	
		Jumlah timbangan portable yang terbeli			1 unit			- 0	
2.9.2.9.1.1.23.7	Fasilitasi Koordinasi LLAJ	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan Forum LLAJ	Kec. Mungkid	DINAS PERHUBUNGAN	2 kali	50.000.000,00	Terselenggaranya koordinasi LLAJ	2 kali	50.000.000,00
TOTAL					44.252.128.000,00	TOTAL		59.819.902.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					12.210.000.000,00			12.565.300.000,00
2.10	Komunikasi dan Informatika					10.510.000.000,00			10.605.300.000,00
2.10.2.10.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.207.000.000,00			1.055.000.000,00
2.10.2.10.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.500 surat	37.000.000,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	1.600 surat	40.000.000,00
2.10.2.10.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kabupaten Magelang dan Kabupaten/ Kota lainnya	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	70 kali	170.000.000,00	Penyelenggaraan Koordinas'	75 kali	195.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			320 kali			320 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			35 kali			35 kali	
2.10.2.10.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 paket	250.000.000,00	Melengkapi dan Meningkatkan Peralatan Kantor (komputer serta sarana lainnya)	- paket	250.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
2.10.2.10.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rekening air, listrik, telepon, dan surat kabar	Gedung Dinas Kominfo, Radio Gemilang (Muntilan)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48 rekening bulan	240.000.000,00	Untuk Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	48 rekening bulan	255.000.000,00
		Luas gedung kantor yang dipelihara			2.500 M2			2.500 M2	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.10.2.10.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 paket alat	310.000.000,00	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Kantor (komputer serta sarana lainnya)	1 paket alat	315.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 jenis			5 jenis	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			4 buah			4 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			12 buah			12 buah	
2.10.2.10.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2 paket	200.000.000,00	Rehab Ringan gedung kantor Dinas Kominfo	- paket	0,00
2.10.2.10.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	130.000.000,00			136.000.000,00
2.10.2.10.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35 kegiatan	70.000.000,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	35 kegiatan	70.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
2.10.2.10.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 dokumen	10.000.000,00	Peyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 dokumen	16.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.10.2.10.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4 dokumen	10.000.000,00	Penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan Kinerja Dinas Kominfo	4 dokumen	20.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.10.2.10.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4 SOP	40.000.000,00	Penyusuan NSPK Dinas Kominfo	4 SOP	30.000.000,00
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			- dokumen	
2.10.2.10.1.1.19	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan SKPD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil			48,48 %	5.113.000.000,00			5.139.300.000,00
		Cakupan Layanan Komunikasi			75 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.10.2.10.1.1.19.1	Layanan pengelolaan akses internet, intranet dan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK	OPD, unit kerja OPD, dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	207 SKPD dan Desa	3.763.000.000,00	Langganan Bandwidth Pemerintah Kabupaten Magelang	257 SKPD dan Desa	4.139.300.000,00
		Jumlah bandwith internet yang disalurkan		670 Mbps	700 Mbps				
2.10.2.10.1.1.19.2	Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK center	Jumlah Layanan Data Center, Disaster Recovery Center dan Infrastruktur TIK	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3 paket layanan	1.150.000.000,00	Penyelenggaraan Operasional data center, disaster recovery center dan TIK center	3 paket layanan	800.000.000,00
2.10.2.10.1.1.19.3	Pengelolaan penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Jumlah layanan komunikasi dan pengelolaan menara telekomunikasi	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	223 menara telekomunikasi	200.000.000,00	Penyelenggaraan Optimasi Penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi	223 menara telekomunikasi	200.000.000,00
		Jumlah provider menara yang retribusinya terpungut		15 provider	15 provider				
2.10.2.10.1.1.21	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA			34,21 %	395.000.000,00			425.000.000,00
		Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah			10,27 %				
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK			100 %				
2.10.2.10.1.1.21.1	Fasilitasi pengelolaan aplikasi SKPD	Jumlah aplikasi SKPD dan desa yang terfasilitasi	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6 Aplikasi	330.000.000,00	Optimasi pengelolaan aplikasi SKPD	8 Aplikasi	330.000.000,00
		Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK		2 dokumen	2 dokumen				
2.10.2.10.1.1.21.2	Penyelenggaraan ekosistem TIK	Jumlah SKPD dan desa yang menggunakan domain dan sub domain	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12 (%)	65.000.000,00	Mendorong optimasi penggunaan TIK di Kabupaten Magelang	21 (%)	95.000.000,00
		Jumlah desa yang potensinya terupdate dalam aplikasi Jelajah Magelang		75 Desa	165 Desa				
		Pengelolaan penilaian indeks SPBE		2,20 indeks	2,25 indeks				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.10.2.10.1.1.23	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan website SKPD dan Desa yang memenuhi kriteria			13,63 %	3.665.000.000,00			3.850.000.000,00
		Persentase diseminasi informasi melalui media massa			90 %				
		Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat			100 %				
		Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal			100 %				
		Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang			100 %				
		Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah			100 %				
		Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan			100 %				
		Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar			50 %				
2.10.2.10.1.1.23.1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai tembakau	Jumlah Diseminasi dan Distribusi Informasi Ketentuan Dibidang Cukai Tembakau	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4 kali	100.000.000,00	Mendorong tersosialisasikannya ketentuan dibidang cukai tembakau	4 kali	100.000.000,00
2.10.2.10.1.1.23.2	Pengelolaan diseminasi informasi melalui media masa	Pengelolaan siaran LPPL Radio Gemilang	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19 jam/hari	2.065.000.000,00	Diseminasi melalui: penyelenggaraan operasional Radio LPP Gemilang, Majalah Suara Gemilang, Portal beritamagelang.id, Siaran Televisi	19 jam/hari	2.250.000.000,00
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media radio			6 kegiatan			6 kegiatan	
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media cetak Majalah Suara Gemilang			18.000 eksemplar			18.000 eksemplar	
		Jumlah diseminasi informasi melalui media televisi			10 siaran			10 siaran	
		Jumlah portal berita daerah beritamagelang.id			2.190 berita			2.190 berita	
		Jumlah layanan pengaduan Pemerintah Kabupaten Magelang			9 siaran			10 siaran	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.10.2.10.1.1.23.3	Diseminasi informasi melalui media publik	Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media luar ruang	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12 kali	900.000.000,00	Diseminasi Informasi melalui kesenian rakyat seperti wayang kulit dll	12 kali	900.000.000,00
		Jumlah diseminasi dan distribusi informasi melalui media pertunjukan rakyat			12 kali			12 kali	
		Jumlah penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan melalui media interpersonal atau Wahana Komunikasi Masyarakat			12 kali			12 kali	
2.10.2.10.1.1.23.4	Fasilitasi pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik	Jumlah website SKPD dan desa /kelurahan yang mendapat kriteria cukup informatif	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000,00	Untuk mendorong website SKPD/ Pemerintah Desa agar lebih informatif dan terwujudnya monografi desa terpadu	72 SKPD dan desa/kelurahan	600.000.000,00
		Jumlah pengembangan aplikasi monografii kelurahan dan desa, dan website portal informasi			2 aplikasi			2 aplikasi	
		Jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM			18 KIM			22 KIM	
2.14	Statistik					950.000.000,00			1.010.000.000,00
2.14.2.10.1.1.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik	Persentase ketersediaan data statistik sektoral			100 %	950.000.000,00			1.010.000.000,00
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi			100 %				
2.14.2.10.1.1.17.1	Penyusunan dokumen statistik sektoral	Jumlah buku statistik daerah yang tersusun	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9 jenis buku	600.000.000,00	Mendorong terwujudnya data sektoral tiap urusan secara terpadu dan terbuka	9 jenis buku	660.000.000,00
2.14.2.10.1.1.17.2	Koordinasi pengintegrasian data tingkat Kabupaten	Jumlah data yang terintegrasi	Kabupaten Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60 data SKPD	350.000.000,00	Mendorong pengintegrasian data antar SKPD	60 data SKPD	350.000.000,00
2.15	Persandian					750.000.000,00			950.000.000,00
2.15.2.10.1.1.15	Program Persandian	Persentase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			10 %	750.000.000,00			950.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.15.2.10.1.1.15.1	Pengelolaan persandian dan telekomunikasi	Jumlah sarana dan prasarana persandian dan telekomunikasi	Kab Magelang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2 paket	750.000.000,00	Untuk mendukung peningkatan keamanan data di Kabupaten Magelang	2 paket	950.000.000,00
		Jumlah peralatan sandi, berita sandi dan berita telekomunikasi kedinasan yang terkelola			31.800 berita dan telepon			31.800 berita dan telepon	
		Jumlah pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jaringan telepon pemda kabupaten Magelang			1 paket			1 paket	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			60 SKPD			60 SKPD	
		Jumlah peraturan tentang tata kelola keamanan informasi			1 Peraturan			1 Peraturan	
		Prosentase sistem elektronik yang sudah diidentifikasi kerentanan dan resikonya sesuai SOP			100 %			100 %	
		Prosentase pengguna layanan Command Center Kabupaten Magelang			100 %			100 %	
		TOTAL						12.210.000.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					7.559.693.400,00			5.145.743.900,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					7.559.693.400,00			5.145.743.900,00
2.11.2.11.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	2.735.302.000,00			2.739.652.000,00
		Cakupan pelayanan umum			100 %				
2.11.2.11.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang terkelola	DISDAGKOP UKM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.700 surat	40.252.000,00	Mencukupi kebutuhan administrasi perkantoran dalam 1 (satu) tahun dalam surat menyurat dan percetakan	2.800 surat	40.252.000,00
2.11.2.11.1.1.7.1.1	Jumlah surat yang terkelola		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2700.00 surat	41.710.500,00			44.710.500,00
2.11.2.11.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksananya		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	76 kali	220.000.000,00		76 kali	290.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang di selenggarakan			36 kali			36 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah			150 kali			155 kali	
2.11.2.11.1.1.7.2.1	Rapat koordinasi luar daerah		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	85.00 kali	200.000.000,00			210.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
2.11.2.11.1.1.7.2.2	Rapat koordinasi dalam daerah		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	150.00 kali	50.000.000,00		55.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.2.3	Rapat koordinasi yang diselenggarakan		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	148.00 kali	40.000.000,00		45.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2 Paket	578.650.000,00	2 Paket	988.500.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 Paket		3 Paket	
		Pengelolaan aset			5 dokumen aset		5 dokumen aset	
2.11.2.11.1.1.7.3.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 Paket	400.000.000,00		420.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.3.2	Pengadaan peralatan gedung kantor		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.00 Paket	388.500.000,00		400.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.3.3	Pengelolaan aset		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 gedung	200.000.000,00		210.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4 Gedung Kantor dan 14 Pasar	622.000.000,00	4 Gedung Kantor dan 14 Pasar	622.000.000,00
		Jumlah rekening atau tagihan yang dibayar			12 bulan		12 bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DISDAGKOP - UKM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2 aplikasi siHati	585.000.000,00	Mencukupi Kebutuhan pemeliharaan 2 gedung dan 14 pasar, 19 Kendaraan dinas, Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor serta kebutuhan jasa komunikasi dan Sumber Daya	2 aplikasi siHati	59.500.000,00
		Pmeliharaan kendaraan dinas/operasional			19 kendaraan			19 kendaraan	
2.11.2.11.1.1.7.5.1	Pemeliharaan peralatan gedung kantor		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 aplikasi	58.500.000,00			59.500.000,00
2.11.2.11.1.1.7.5.2	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20.00 kendaraan	400.000.000,00			450.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.5.3	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.00 bulan	350.000.000,00			350.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 gedung	630.000.000,00		1 gedung	680.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.6.1	Rehabilitasi pasar		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 gedung	630.000.000,00			630.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga kontrak		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 orang	59.400.000,00	kekurangan anggaran untuk gaji kontrak	1 orang	59.400.000,00
		Jumlah Sporting Staff Program			1 Orang			1 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
2.11.2.11.1.1.7.7.1	Pembayaran tenaga kontrak		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.00 bulan	33.000.000,00		35.000.000,00
2.11.2.11.1.1.7.7.2	Pengadaan sporting staff program		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.00 bulan	24.500.000,00		25.000.000,00
2.11.2.11.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah			100 %	129.190.000,00		138.000.000,00
2.11.2.11.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 kegiatan	99.190.000,00	1 kegiatan	108.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 Laporan		12 Laporan	
2.11.2.11.1.1.8.1.1	Kegiatan yang dikelola		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 kegiatan	49.190.000,00		45.000.000,00
2.11.2.11.1.1.8.1.2	Laporan keuangan		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.00 laporan	50.000.000,00		51.000.000,00
2.11.2.11.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja Perangkat Daerah Yang tersusun	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	15.000.000,00
		Jumlah Dokumen tahunan yang tersusun			2 Dokumen		2 Dokumen	
		Penyusunan SOP			- dokumen		1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- Dokumen		- dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2.11.2.11.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Tahunan yang tersusun	Dinas Perdagangan Koperasi da UKM Ka, Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12 laporan	15.000.000,00	laporan capaian kinerja	12 laporan	15.000.000,00	
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi tribulanan yang tersusun						4 laporan		4 laporan
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun						1 laporan		1 laporan
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun						- Dokumen		1 Dokumen
2.11.2.11.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Indek kualitas kelembagaan koperasi			78 %	455.800.800,00			461.200.800,00	
		Jumlah data anggota koperasi aktif yang tersusun			1 Dokumen					
		Prosentase koperasi aktif			78 %					
2.11.2.11.1.1.18.19	Pengawasan Koperasi	koperasi dengan kategori sehat		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	55 koperasi	122.000.000,00		60 koperasi	124.000.000,00	
2.11.2.11.1.1.18.19.1	Koperasi dengan kategori sehat		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	55.00 koperasi	122.000.000,00			124.000.000,00	
2.11.2.11.1.1.18.20	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan daya saing Koperasi	koperasi yang dibina		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	125 koperasi	251.200.300,00		130 koperasi	253.600.300,00	
2.11.2.11.1.1.18.20.1	Koperasi yang dibina		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	125.00 koperasi	251.200.300,00			253.200.300,00	
2.11.2.11.1.1.18.21	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah koperasi aktif yang berbadan hukum		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	30 koperasi	82.600.500,00		35 koperasi	83.600.500,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.18.21.1	Koperasi aktif yang berbadan hukum		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 30.00 koperasi	82.600.500,00			83.600.500,00
2.11.2.11.1.1.19	Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro dan kecil		- %	4.239.400.600,00			1.806.891.100,00
2.11.2.11.1.1.19.1	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pengadaan tanah untuk Lokasi PKL dan Asongan baru		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 lokasi	3.116.000.000,00		2 lokasi	44.710.500,00
		Jumlah Pedagang Kaki Lima yang terbina		140 orang			150 orang	
		Area Pedagang Kaki Lima yang terbangun		3 lokasi			4 lokasi	
2.11.2.11.1.1.19.1.1	Jumlah pengadaan tanah untuk lokasi PKL dan Asongan baru		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.00 lokasi	5.000.000.000,00	PKL dan Asongan Kabupaten Magelang		5.500.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.1.2	Jumlah PKL dan Asongan yang tertata		Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 140.00 Orang	80.000.000,00			85.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.1.3	Jumlah area PKL dan Asongan yang terbangun		Kabupaten Magelang (Kecamatan Bandongan , Kecamatan Tegalrejo, kecamatan Mertoyudan)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.00 lokasi	50.000.000,00			55.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.2	Fasilitasi promosi dan pameran produk usaha mikro	Jumlah Kemitraan yang terjalin		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 200 UMKM	350.000.000,00		205 UMKM	755.000.000,00
		Jumlah penyelenggaraan mengikuti Jawa Tengah Fair		1 kali			1 kali	
		Jumlah Penyelenggaraan Pasar Murah		5 Lokasi			5 Lokasi	
2.11.2.11.1.1.19.2.1	kemitraan yang terjalin		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 245.00 UMKM	245.000.000,00			250.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.19.2.2	Pameran produk mengikuti Jawa Tengah Fair		SEMARANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.00 kali	250.000.000,00			255.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.2.3	penyelenggaraan Pasar Murah		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.00 lokasi	200.000.000,00			250.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.3	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana bagi Usaha Mikro	Jumlah UMKM/IKM yang emndapatkan peningkatan kemampuan manajemen UMKM		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 200 UMKM	465.800.600,00	Peningkatan kapasitas manajerial dan bantuan peralatan	200 UMKM	579.580.600,00
2.11.2.11.1.1.19.3.1	pelatihan teknis AMT WIBA Managerial		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 200.00 UMKM	300.000.000,00			310.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.3.2	Fasilitasi Hibah Bansos		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 200.00 UMKM	165.000.000,00			170.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.4	Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Legalitas Usaha	Jumlah UMKM/IKM yang mendapatkan Fasilitas		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 27 UMKM	50.000.000,00	penguatan kelembagaan dan fasilitasi perijinan	- -	170.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.4.1	Impoting data UMKM		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 430.00 UMKM	250.000.000,00			230.000.000,00
2.11.2.11.1.1.19.4.2	Fasilitasi perijinan		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 430.00 UMKM	165.000.000,00			170.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.19.5	Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Masyarakat yang melakukan usaha produktif		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	160 umkm	257.600.000,00	dukungan kegiatan penanggulangan kemiskinan	160 umkm	257.600.000,00
3	Urusan Pilihan					5.029.423.000,00			76.321.238.000,00
3.6	Perdagangan					5.029.423.000,00			76.321.238.000,00
3.6.2.11.1.1.21	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Peningkatan nilai ekspor bersih perdagangan			2 %	898.020.000,00			862.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3	Pengawasan dan Pengembangan Distribusi Perdagangan	Jumlah Frekwensi pengawasan toko modern dan waralaba		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20 kali	550.000.000,00		20 kali	355.000.000,00
		Jumlah frekwensi pengawasan tertib usaha dibidang perdagangan			24 kali			24 kali	
		Jumlah penyusunan kajian distribusi perdagangan			2 dokumen			1 dokumen	
		jumlah laporan informasi harga bapokting			260 Dokumen			260 Dokumen	
		Jumlah peserta sosialisasi pasar aman			160 orang			200 orang	
		Jumlah Peserta FGD Distribusi			150 orang			200 orang	
		Jumlah frekuensi pelaksanaan fasilitasi pasar murah dan operasi pasar			26 kali			26 kali	
		jumlah KPL terverifikasi distribusi pupuk bersubsidi			106 KPL			106 KPL	
3.6.2.11.1.1.21.3.1	Pengawasan toko modern dan waralaba		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	20.00 kali	50.000.000,00			51.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.2	Pengawasan tertib usaha di bidang perdagangan		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	24.00 kali	60.000.000,00			61.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.21.3.3	pengawasan barang kena cukai yang dikendalikan peredarannya (minol dan rokok)		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	36.00 kali	40.000.000,00		41.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.4	Penyusunan profil perdagangan		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 dokumen	80.000.000,00		81.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.5	Informasi harga bapakting		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	260.00 dokumen	120.000.000,00		121.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.6	Sosialisasi pasar aman		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.00 orang	60.000.000,00		61.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.7	Sosialisasi cukai (DBHCHT)		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.00 orang	150.000.000,00		152.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.8	Fasilitasi pasar murah dan operasi pasar			DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	26.00 kali	380.000.000,00		385.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.3.9	Ferivikasi KPL distribusi pupuk bersubsidi		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	106.00 KPL	60.000.000,00		61.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.21.4	Pengembangan kerjasama dan promosi perdagangan	Prosentase peningkatan kontribusi PDRB bidang perdagangan terhadap PDRB Kabupaten		11 US\$	228.020.000,00		11 US\$	387.000.000,00
		Jumlah promosi skala Internasional yang diikuti		1 kali			1 kali	
		Jumlah promosi skala Nasional yang diikuti		2 kali			2 kali	
		Frekuensi monitoring realisasi ekspor		24 kali			24 kali	
		Jumlah Fasilitasi pendampingan Design produk ekspor		10 Pelaku usaha			10 Pelaku usaha	
		Jumlah Fasilitasi Eksportir tangguh		3 Pelaku usaha			3 Pelaku usaha	
		Jumlah Fasilitasi Pasar Lelang		12 Pelaku usaha			12 Pelaku usaha	
3.6.2.11.1.1.21.4.1	Promosi Skala Internasional		Jakarta	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.00 kali	145.000.000,00			150.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.2	Promosi Skala Nasional		Jakarta dan Yogyakarta	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 200.00 kali	140.000.000,00			143.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.3	Monitoring Realisasi Ekspor		Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 24.00 pelaku usaha	35.000.000,00			36.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.4	Fasilitasi pendampingan Design Produk Ekspor		Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 10.00 Pelaku Usaha	30.000.000,00			32.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.5	Fasilitasi Eksportir Tangguh		Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.00 Pelaku Usaha	25.000.000,00			26.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
3.6.2.11.1.1.21.4.6	Fasilitasi Pasar Lelang		kab Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.00 Pelaku Usaha	60.000.000,00		62.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.4.7	Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Perdagangan (DBHCHT)		kab, Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 Perusahaan Mitra	150.000.000,00		155.000.000,00
3.6.2.11.1.1.21.5	Pengawasan Pita Cukai Legal dan Ilegal (DBCHT)	Jumlah Peserta sosialisasi cukai (DBHCHT)		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200 orang	120.000.000,00	Kegiatan DBHCHT	200 200
		frekuensi kampanye			2 kali			2 kali
3.6.2.11.1.1.22	Program Pembinaan dan Penataan Pasar	Persentase pasar rakyat dengan sarana dan prasarana dalam kondisi baik			85 %	3.481.403.000,00		74.809.238.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1	Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang direhab		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7 Pasar	2.450.000.000,00		3 Pasar
		Jumlah dokumen DED pasar yang tersusun			3 Dokumen			1 Dokumen
		Jumlah Pemulihan lokasi pasar sementara			1 lokasi			1 lokasi
		Jumlah Pembangunan pasar DAK			1 Pasar			1 Pasar
		Jumlah dokumen Penyusunan UKL URL			1 Dokumen			3 Dokumen
		Jumlah dokumen study kelayakan pasar yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen
		Jumlah dokumen Study amdal yang tersusun			7 Dokumen			4 Dokumen
		Jumlah dokumen Pembangunan sarana perdagangan			2 dokumen			3 dokumen
		Jumlah dokumen studi Andalalin yang tersusun			7 Dokumen			5 Dokumen
		Prosentase pasar kategori baik			85 %			88 %
3.6.2.11.1.1.22.1.1	Rehabilitasi pasar		kABUPATEN mAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.00 pasar	2.000.000.000,00		3.000.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.22.1.2	pENYUSUNAN DED Pasar		kab.Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3.00 dokumen	300.000.000,00		310.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.3	Pemulihan lokasi pasar sementara		kab.Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 lokasi	1.000.000.000,00		110.000.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.4	Pembangunan Pasar DAK		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 Pasar	900.000.000,00		910.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.5	Penyusunan UKL URL		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 dokumen	110.000.000,00		120.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.6	Penyusunan study kelayakan pasar		kab Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 dokumen	48.000.000,00		50.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.7	Penyusunan Study Amdal		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.00 dokumen	580.000.000,00		585.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.8	Pembangunan Sarana Perdagangan		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.00 Pasar	1.644.749.000,00		1.644.749.000,00
3.6.2.11.1.1.22.1.9	Penyusunan Study Andalalin		kab. Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.00 dokumen	195.000.000,00		200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.22.2	Pengelolaan Pendapatan Pasar	Jumlah pasar yang dikelola pendapatannya		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 14 pasar	190.748.000,00	operasional pendapatan pasar dan percetakan	14 pasar	190.748.000,00
3.6.2.11.1.1.22.2.1	Monitoring evaluasi pendapatan pasar		KAB MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 14.00 pasar	187.000.000,00			197.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.3	Pemberdayaan Pasar	Penataan Pedagang pasar		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	840.655.000,00		3 Pasar	1.285.000.000,00
		Penertiban terpadu lingkungan pasar					14 Pasar	
		Sewa tanah pasar penampungan					4 Pasar	
		Pemberdayaan para pihak terkait pasar					3 pasar	
		Pendataan Pasar					7 Pasar	
		Jumlah Prosentase pasarr dengan kategori baik					85 %	
3.6.2.11.1.1.22.3.1	Penataan pedagang pasar		KABUPATEN MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.00 pasar	150.000.000,00			155.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.3.2	Penertiban terpadu lingkungan pasar		kab,Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 14.00 pasar	137.000.000,00			150.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.3.3	Sewa tanah pasar penampungan		kab.Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.00 pasar	500.000.000,00			550.000.000,00
3.6.2.11.1.1.22.3.4	Pemberdayaan para pihak terkait pasar		kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.00 pasar	200.000.000,00			210.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.22.3.5	Pendataan Pasar		Kab.Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.00 pasar	200.000.000,00			220.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian	Persentase peningkatan jumlah UTTP bertanda tera sah		58 %	650.000.000,00			650.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1	Pendataan UTTP Metrologi	jumlah UTTP yang terdata	Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.470 -UTTP	150.000.000,00	pendataan bagi pemilik UTTP	1.475 -UTTP	150.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1.1	Pendataan UTTP		KAB.MAGELANG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1470.00 UTTP	150.000.000,00			152.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1.2	Pelayanan Metrologi		Kab. Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 135.00 kali	450.000.000,00			455.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1.3	Pengawasan Metrologi		kab Magelang.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1500.00 UTTP	80.000.000,00			82.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.1.4	Fasilitasi Penilaian Metrologi		Kab.Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.00 APLIKASI	100.000.000,00			105.000.000,00
3.6.2.11.1.1.23.2	Peningkatan Pelayanan Metrologi	Jumlah pelayanan metrologi	kabupaten magelang dan luar daerah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 135 -kali	300.000.000,00	target 117 hari pendataan	135 -kali	300.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
3.6.2.11.1.1.23.3	Peningkatan Pengawasan Metrologi	Jumlah UTTP yang diawasi		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.470 UTTP	100.000.000,00	target 1500 UTTP	1.500 UTTP
3.6.2.11.1.1.23.4	Fasilitasi Penilaian Metrologi	Ketersediaan sistem Informasi Metrologi legal	Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 Aplikasi	100.000.000,00	penilaian pelayanan metrologi dan tera alat kemetrolgian	1 Aplikasi
TOTAL						12.589.116.400,00	TOTAL	81.466.981.900,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					2.304.067.750,00			2.896.894.525,00
2.12	Penanaman Modal					2.304.067.750,00			2.896.894.525,00
2.12.2.12.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.119.067.750,00			1.292.894.525,00
2.12.2.12.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	jumlah surat yang dikelola	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jl. Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.700 surat	90.584.000,00	Kegiatan Rutin Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	2.800 surat	110.000.000,00
		jumlah arsip yang dikelola			10.000 arsip			11.000 arsip	
		Bahan Pustaka			150 Buku			200 Buku	
2.12.2.12.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah perjalanan luar daerah yang terlaksana	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	50 perjalanan dinas	150.000.000,00	Pendukung Kegiatan Tahunan	60 perjalanan dinas	160.000.000,00
		jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			8 rapat			12 rapat	
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 perjalanan dinas			35 perjalanan dinas	
		jumlah layanan humas protokol yang dilaksanakan			6 layanan			12 layanan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jl. Soekarno - Hatta No. 20 Kota Mungkid	- paket	179.000.000,00	Kebutuhan yang harus dipenuhi terkait dengan pelayanan perizinan di gedung baru dan pemindahan rekening pengadaan teralis	1 paket	180.000.000,00
		jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
		jumlah aset yang dikelola		531 aset			531 aset	
2.12.2.12.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jalan Soekarno Hatta Nomor 20 Kota Mungkid	1.304 m2	199.416.000,00	Kegiatan Rutin Pemeliharaan Gedung kantor	1.304 m2	199.420.000,00
2.12.2.12.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	71 alat	279.067.750,00		71 alat	310.974.525,00
		jumlah perlengkapan yang dipelihara		131 perlengkapan			131 perlengkapan	
		jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		3 unit			3 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		11 unit			11 unit	
2.12.2.12.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3 paket	221.000.000,00	Penambahan pemasangan teralis	- paket	250.000.000,00
2.12.2.12.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	frekuensi pembinaan ASN	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jl. Soekarno - Hatta No. 20 kota Mungkid	1 kali	0,00	Kegiatan baru untuk pembelian seragam khusus DPMPTSP Kabupaten Magelang	1 kali	82.500.000,00
		jumlah ASN yang dibina		40 orang			40 orang	
		jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan		40 stel			40 stel	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Kueangan perangkat daerah			100 %	105.000.000,00			175.000.000,00
2.12.2.12.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18 kegiatan	75.000.000,00	Dukungan Kegiatan SKPD	20 kegiatan	80.000.000,00
		jumlah laporan keuangan yang disusun			17 laporan			17 laporan	
2.12.2.12.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang disusun	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 dokumen	10.000.000,00	Kegiatan Rutin Tahunan	1 dokumen	25.000.000,00
		jumlah dokumen Renja perangkat daerahyang disusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.12.2.12.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen tahunan yang tersusun	DPMPTSP Kabupaten Magelang Jl. Soekarno - Hatta No 20 Kota Mungkid	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5 jenis	10.000.000,00	Kegiatan rutin penyusunan laporan kinerja dan keuangan	5 jenis	30.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			3 jenis dokumen			3 jenis dokumen	
		jumlah dokumen evaluasi jangka menenngah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.12.2.12.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	jumlah standar operasional yang disusun		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4 dokumen	10.000.000,00		4 dokumen	40.000.000,00
		jumlah standar pelayanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		jumlah daftar informasi publik			2 dokumen			2 dokumen	
		jumlah dokumen pengendalian intern yang disusun			4 dokumen			4 dokumen	
		jumlah dokumen data perangkat daerah yang disusun			4 dokumen			4 dokumen	
2.12.2.12.1.1.18	Program Pelayanan Investasi	indeks realisasi investasi			65,20 %	450.000.000,00			899.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.18.1	Penyusunan Profil Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Magelang	Studi Potensi	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 paket	100.000.000,00	Hasil kegiatan digunakan sebagai bahan informasi bagi calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magelang.	1 paket	109.000.000,00
		Jumlah profil direktori yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.12.2.12.1.1.18.2	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Potensi Investasi	frekuensi promosi		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2 kali	300.000.000,00		2 kali	715.000.000,00
		jumlah bahan sarpras promosi yang dibuat			- paket			- paket	
2.12.2.12.1.1.18.3	Fasilitasi dan koordinasi Kerjasama bidang Investasi (CJIBF)	Frekuensi fasilitasi		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 kali	50.000.000,00		1 kali	75.000.000,00
2.12.2.12.1.1.19	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi	indeks pemantauan dan pengendalian investasi			0,01 %	130.000.000,00			130.000.000,00
2.12.2.12.1.1.19.1	Pengendalian, monitoring, evaluasi pelayanan perizinan dan penanganan Pengaduan	jumlah perusahaan yang dimonitor		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	25 perusahaan	50.000.000,00	Fasilitasi pengaduan investasi	25 perusahaan	50.000.000,00
		jumlah pengaduan yang ditangani			6 pengaduan			6 pengaduan	
2.12.2.12.1.1.19.2	Pengelolaan bahan dan data informasi perizinan	jumlah bahan dan data informasi perijinan yang dikelola		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	65 data	80.000.000,00	Penyebaran informasi kepada masyarakat	65 data	80.000.000,00
		jumlah kecamatan yang disosialisasi			3 Kecamatan			3 Kecamatan	
2.12.2.12.1.1.20	Program Pelayanan perijinan	indeks pelayanan perijinan			1 %	500.000.000,00			400.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.20.1	Fasilitasi Operasional Pelayanan Pendaftaran Perijinan	Jumlah permohonan perijinan yang diterima		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.000 pemohon	300.000.000,00	pecahan kegiatan pelayanan perijinan	4.000 pemohon	200.000.000,00
2.12.2.12.1.1.20.2	Fasilitasi Operasional Pelayanan Penerbitan Perijinan	jumlah perizinan yang diterbitkan / ditolak		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.000 izin	200.000.000,00	fasilitasi pelayanan perijinan	4.000 izin	200.000.000,00
		jumlah perizinan Online non OSS			10 perizinan online non OSS			10 perizinan Online Non OSS	
TOTAL						2.304.067.750,00	TOTAL		2.896.894.525,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					23.226.500.000,00			25.675.038.000,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga					23.226.500.000,00			25.675.038.000,00
2.13.2.13.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	965.023.000,00			992.023.000,00
2.13.2.13.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.500 buah	30.000.000,00	kegiatan surat menyurat	7.600 buah	32.000.000,00
2.13.2.13.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	30 kali	210.000.000,00	Rakor dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	35 kali	220.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			16 kali			18 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			230 kali			240 kali	
2.13.2.13.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 paket	50.000.000,00	Pengadaan	1 paket	50.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			2 paket	
2.13.2.13.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Rekening Yang Dibayar tiap bulan	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8 rekening	260.000.000,00	Pemeliharaan Gedung	8 rekening	270.000.000,00
		Jumlah gedung yang dipelihara			2 gedung			2 gedung	
2.13.2.13.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	38 buah	220.000.000,00	Pemeliharaan	40 buah	225.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 buah			10 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			5 buah			5 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 buah			11 buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.13.2.13.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 paket	50.000.000,00	REhab	1 paket	50.000.000,00
2.13.2.13.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12 kali	145.023.000,00	kenaikan indeks honor	12 kali	145.023.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			50 orang			50 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak			4 orang			4 orang	
2.13.2.13.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	102.000.000,00			132.000.000,00
2.13.2.13.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	25 kegiatan	62.000.000,00	keuangan	25 kegiatan	65.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 laporan			12 laporan	
2.13.2.13.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	- dokumen	20.000.000,00	Renja OPD	- dokumen	20.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.13.2.13.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4 dokumen	20.000.000,00	Perencanaan	4 dokumen	20.000.000,00
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			10 dokumen			10 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
2.13.2.13.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3 SOP	0,00		3 SOP	27.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 SP			1 SP	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
2.13.2.13.1.1.20	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga			41 %	21.324.977.000,00			22.880.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.13.2.13.1.1.20.28	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Olahraga		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	15 kegiatan	4.840.000.000,00		16 kegiatan	6.600.000.000,00
		Jumlah Atlet yang dikirim			590 orang			595 orang	
		Jumlah Atlet berprestasi			190 orang			200 orang	
2.13.2.13.1.1.20.29	Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah DED yang tersusun		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 Dokumen DED GOR	15.934.977.000,00	pengadaan lampu penerangan stadion	- Dokumen DED GOR	15.200.000.000,00
		Jumlah Pengadaan lampu Stadion			1 Paket			- Paket	
		Jumlah Stadion yang dipelihara			1 buah			1 buah	
		Jumlah Pengadaan Alat Olahraga			160 buah			180 buah	
		Jumlah Atlet berprestasi			590 orang			595 orang	
2.13.2.13.1.1.20.30	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Olahraga Rekreasi		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.500 orang	150.000.000,00		2.000 orang	180.000.000,00
2.13.2.13.1.1.20.31	Implementasi IPTEK dalam Pembinaan Olahraga	Jumlah atlit yang dikembangkan sesuai dengan potensinya		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	600 orang	400.000.000,00		675 orang	900.000.000,00
2.13.2.13.1.1.22	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	cakupan pembinaan pemuda			41 %	834.500.000,00			1.671.015.000,00
2.13.2.13.1.1.22.1	Pembinaan Kelembagaan Pemuda	Jumlah Peserta yang memahami Manajemen Organisasi Masyarakat Pemuda		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	60 orang	309.500.000,00		60 orang	807.515.000,00
		JUmlah Peserta Penyuluhan Bahaya Narkoba			300 orang			300 orang	
		Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan			- orang			- orang	
		Jumlah Peserta Rakor Kepemudaan			42 orang			42 orang	
		JUmlah Peserta Upacara Hari Besar Nasional			200 orang			200 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.13.2.13.1.1.22.2	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pemuda	Jumlah Peserta yang lolos Seleksi Pemuda berprestasi		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12 orang	525.000.000,00		12 orang	863.500.000,00
		Jumlah Peserta Fasilitasi Kegiatan Pramuka			50 orang			50 orang	
		Jumlah Peserta: Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris			126 orang			126 orang	
		Jumlah Peserta Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA			150 orang			150 orang	
		JUmlah Peserta Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Provinsi			42 orang			42 orang	
		Jumlah peserta yang meningkat kemampuan atau ketrampilan dalam wirausaha			35 orang			35 orang	
3	Urusan Pilihan					14.701.715.000,00			33.079.243.666,00
3.2	Pariwisata					14.701.715.000,00			33.079.243.666,00
3.2.2.13.1.1.18	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata	Cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dlm kondisi baik			36 %	12.896.715.000,00			27.620.000.000,00
3.2.2.13.1.1.18.1	Penataaan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Jumlah dokumen FS/ DED/ UKL/UPL tersusun		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 dokumen amdal	7.500.000.000,00		2 dokumen	20.000.000.000,00
		Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan			3 buah			4 buah	
		Jumlah DTW yang di kelola			6 DTW			6 DTW	
3.2.2.13.1.1.18.2	Pelayanan Kepariwisataan (DAK)	Jumlah Pelatihan SDM Bidang Pariwisata	Kabupaten Magelang	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7 kali	1.020.000.000,00	Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Magelang sehingga memiliki keahlian yang handal dan kompeten dan selanjutnya diperlukan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana amanat dalam UU No. 10	7 kali	1.020.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.2.2.13.1.1.18.3	Penataan Kawasan Pariwisata Daya Tarik Wisata (DAK)	Jumlah DTW Yang ditata		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 buah	1.226.715.000,00		1 buah	2.000.000.000,00
3.2.2.13.1.1.18.4	Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang terfasilitasi	Kabupaten Magelang Kab./ Kota di Provinsi Jawa Tengah	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	25 kelompok	150.000.000,00	Pelaku Usaha Pariwisata berbeda dengan Kelompok Sadar Wisata. Tahun 2020,rencana Kelompok Sadar Wisata akan bertambah sejumlah 5 Pokdarwis setelah dibina	25 kelompok	600.000.000,00
		Jumlah Usaha Pariwisata yang terbina			50 orang			50 kelompok	
3.2.2.13.1.1.18.5	Penataan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Ketep Pass	Jumlah DTW yang dikembangkan		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 DTW	3.000.000.000,00		1 DTW	4.000.000.000,00
		Jumlah DTW yang di kelola			1 DTW			1 DTW	
3.2.2.13.1.1.19	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif			44 %	1.805.000.000,00			5.459.243.666,00
3.2.2.13.1.1.19.1	Pembinaan Kelembagaan Pariwisata	Cakupan fasilitasi lembaga pariwisata		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	41 %	105.000.000,00		50 %	377.000.000,00
3.2.2.13.1.1.19.2	Pemasaran dan promosi Pariwisata	Jumlah Aplikasi Wisata yang diupdate/ dikembangkan		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 aplikasi	1.300.000.000,00		- aplikasi	3.082.000.000,00
		Jumlah Branding pariwisata yang tersusun dan tersosialisasi			1 branding			- branding	
		Cakupan bauran promosi pariwisata (jml event, jml sarana pemasaran, jml jaringan promosi pariwisata)			62 %			73 %	
3.2.2.13.1.1.19.3	Pembinaan Komunitas/ Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Komunitas Ekonomi kreatif yang terfasilitasi		DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	50 komunitas	400.000.000,00		50 komunitas	2.000.243.666,00
TOTAL						37.928.215.000,00	TOTAL	58.754.281.666,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3.716.075.000,00			5.244.250.000,00
2.17	Perpustakaan				3.051.075.000,00			4.574.250.000,00
2.17.2.17.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat Daerah		100 %	1.618.542.000,00			2.219.950.000,00
2.17.2.17.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.000 surat	56.328.000,00		3.200 surat	57.728.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		3.000 Dokumen			3.200 Dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		30 Jenis bahan pustaka			30 Jenis bahan pustaka	
2.17.2.17.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	75 OK kali perjalanan	230.072.000,00		75 OK kali perjalanan	230.072.000,00
		jumlah rapat koordinasi yang di selenggarakan		36 kali rapat			36 kali rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		400 kali perjalanan			400 kali perjalanan	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		- kali			- kali	
2.17.2.17.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 paket, 24 Jenis	500.000.000,00		1 paket, 24 Jenis	1.043.568.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		5 paket, 16 Jenis			5 paket, 16 Jenis	
		Jumlah Aset yang dikelola		20 jenis			20 jenis	
2.17.2.17.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang terpelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6 gedung, (4080 m)	470.000.000,00		6 gedung, (4080 m)	522.000.000,00
		Jenis dan Jumlah rekening		168 rekening bulan			168 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.2.17.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4 Jenis Peralatan (8 buah)	267.142.000,00		4 Jenis Peralatan (8 buah)	271.582.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		3 Jenis Alat			3 Jenis Alat	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara		6 mobil			6 mobil	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara		9 motor			9 motor	
2.17.2.17.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 paket (2 gedung)	10.000.000,00		1 paket (2 gedung)	10.000.000,00
2.17.2.17.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6 kali rapat	85.000.000,00	Meningkanya kualitas pelayanan publik	6 kali rapat	85.000.000,00
		Jumlah ASN yang dibina		24 orang			24 orang	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak		- orang			- orang	
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan		- paket seragam			- paket seragam	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya		32 Pustakawan/Arsiparis			32 Pustakawan/Arsiparis	
2.17.2.17.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah perangkat Daerah		100 %	82.533.000,00			114.300.000,00
2.17.2.17.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	19 Kegiatan	52.533.000,00		19 Kegiatan	57.700.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		16 laporan			16 laporan	
2.17.2.17.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Dearah yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	24.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Dearah yang tersusun		2 Dokumen			2 Dokumen	
2.17.2.17.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Tahunan yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4 Dokumen	10.000.000,00		4 Dokumen	17.500.000,00
		Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tribulanan yang tersusun		2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah Dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.2.17.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 Dokumen	10.000.000,00		1 Dokumen	15.100.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi publik		2 Dokumen			2 Dokumen	
2.17.2.17.1.1.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten		0,02 %	1.350.000.000,00			2.240.000.000,00
		Angka kepuasan pemustaka		79 Angka				
		Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis perpustakaan yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM		43 %				
2.17.2.17.1.1.17.1	Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	85.000 Orang	400.000.000,00		90.000 Orang	445.000.000,00
		Jumlah Perpustakaan yang menerapkan Inlistite		3 Perpustakaan			3 Perpustakaan	
2.17.2.17.1.1.17.2	Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina dan di monitoring	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	150 Perpustakaan	285.000.000,00	Meningkatnya minat baca masyarakat	150 Perpustakaan	750.000.000,00
		Jumlah pelatihan perpustakaan berbasis inklusi		6 Perpustakaan			6 Perpustakaan	
		Jumlah kerjasama		15 Kerjasama			15 Kerjasama	
		Jumlah SDM Perpustakaan yang telah bimtek, PAK, , sosialisasi dan workshop		100 Orang			100 Orang	
		Jumlah peraturan yang tersusun		2 Dokumen			2 Dokumen	
		Terbelinya sarpras dan prasarana perpustakaan		20 Jenis Sarpras (DED, pengadaan Tanah 2 lokasi, Gedung perpustakaan Cabang)			20 Jenis Sarpras (DED, pengadaan Tanah 2 lokasi, Gedung perpustakaan Cabang)	
2.17.2.17.1.1.17.3	Promosi Perpustakaan	Jumlah jenis Media Promosi (Media Sosial , Elektronik, Cetak, Baliho/Leaflet),	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4 Jenis Media promosi	265.000.000,00	-	4 Jenis Media promosi	525.000.000,00
		Jumlah jenis lomba		7 jenis lomba			7 jenis lomba	
2.17.2.17.1.1.17.4	Penyediaan Bahan Pustaka	Terbelinya jumlah judul Bahan Pustaka	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	500 Judul	400.000.000,00	-	550 Judul	520.000.000,00
		Jumlah bahan pustaka yang diolah		3.000 Exemplar			3.500 Exemplar	
		Jumlah kegiatan Pelaksanaan Stock Opname		1 kegiatan			1 kegiatan	
		Jumlah bahan pustaka yang dirawat		2.000 Exemplar			2.500 Exemplar	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2.18	Kearsipan					665.000.000,00			670.000.000,00
2.18.2.17.1.1.20	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase pencipta Arsip yang tertib arsip			38 %	255.000.000,00			270.000.000,00
2.18.2.17.1.1.20.1	Pembinaan dan Pengembangan SDM Kearsipan .	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/Workshop	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	120 Orang	130.000.000,00	terwujudnya tertib pencipta arsip	120 Orang	140.000.000,00	
		Jumlah Arsiparis yang mengikuti kompetensi		21 Orang			21 Orang		
		Jumlah pedoman yang disusun		2 pedoman			2 pedoman		
		Jumlah pengelola/pencipta arsip yang mengikuti lomba		55 Pencipta Arsip			21 Pencipta Arsip		
2.18.2.17.1.1.20.2	Pengawasan Kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang diaudit	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	55 Pencipta Arsip	125.000.000,00	terwujudnya tertib pencipta arsip	60 Pencipta Arsip	130.000.000,00	
		Jumlah pencipta arsip yang dimonitoring		75 Pencipta Arsip			75 Pencipta Arsip		
		Jumlah pencipta arsip percontohan		4 Pencipta Arsip			4 Pencipta Arsip		
2.18.2.17.1.1.21	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Persentase peningkatan Arsip yang dikelola		3 %	410.000.000,00			400.000.000,00	
2.18.2.17.1.1.21.1	Pengolahan Arsip Dinamis dan Statis	Jumlah arsip yang dikelola	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.500 berkas	210.000.000,00	meningkatnya arsip yang dikelola	15.500 berkas	220.000.000,00	
		Jumlah SKPD yang diakuisi		2 SKPD			2 SKPD		
		Jumlah arsip yang dilestarikan		500 berkas			500 berkas		
		Jumlah arsip yang diselamatkan		100 berkas			200 berkas		
		Jumlah Arsip yang dimusnahkan		800 berkas			- berkas		
2.18.2.17.1.1.21.2	Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan	Jumlah pameran yang dilaksanakan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2 kali	200.000.000,00	Meningkatnya pelayanan kearsipan	2 kali	180.000.000,00	
		Jumlah NSA yang diterbitkan		1 NSA			1 NSA		
TOTAL						3.716.075.000,00	TOTAL		5.244.250.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	Urusan Pilihan					10.279.315.000,00			20.459.000.000,10
3.1	Kelautan dan Perikanan					5.212.455.000,00			9.732.000.000,10
3.1.3.1.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.528.997.000,00			2.570.000.000,00
3.1.3.1.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah surat yang dikelola	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	6.000 surat	158.997.000,00	akan ditampilkan dalam laporan MUSRENBANG KAB.	6.000 surat	270.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			12 bulan			12 bulan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			12 kali			12 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			12 bulan			12 bulan	
3.1.3.1.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 paket	100.000.000,00		1 paket	300.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 paket			1 paket	
3.1.3.1.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	21 gedung	600.000.000,00		40 gedung	900.000.000,00
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	12 bulan			12 bulan	
3.1.3.1.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	50 unit	470.000.000,00		50 unit	600.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			1 paket			1 paket	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dipelihara			51 unit			51 unit	
3.1.3.1.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 paket	200.000.000,00		2 paket	500.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.1.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	120.000.000,00			280.000.000,00
3.1.3.1.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	27 kegiatan	100.000.000,00		27 kegiatan	180.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		5 laporan			5 laporan	
3.1.3.1.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 dokumen	10.000.000,00		1 dokumen	50.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		5 dokumen			5 dokumen	
3.1.3.1.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	4 dokumen	10.000.000,00		4 dokumen	50.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun		4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- dokumen			- dokumen	
		Jumlah data peternakan dan perikanan		- Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		- dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- dokumen			1 dokumen	
3.1.3.1.1.1.28	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Cakupan pengembangan budidaya perikanan (pembesaran ikan)		5 %	2.423.458.000,00			5.586.000.000,10
		Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan		100 %				
		Cakupan pengembangan budidaya perikanan (pembenihan ikan)		5 %				
		Cakupan pengembangan budidaya perikanan (sarana dan prasarana)		3 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.1.1.1.28.1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan	Jumlah kelompok penerima induk ikan hias (kelompok)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	2 kelompok	400.000.000,00		4 kelompok	1.540.000.000,00
		Jumlah Demplot UPR secara terpadu		2 lokasi/kelompok			5 lokasi/kelompok	
		Jumlah yang terfasilitasi sertifikat CPIB dan CBIB pada yang terfasilitasi (RTP/Kelompok)		10 kelompok			12 kelompok	
		Jumlah pokdakan pembudidaya kolam ikan pekarangan (KK miskin) yang terfasilitasi bantuan		6 kelompok			10 kelompok	
		Jumlah pokdakan minapadi yang terfasilitasi		5 kelompok			8 kelompok	
		Fasilitasi pertemuan pelaku kawasan Minapolitan		80 orang			100 orang	
3.1.3.1.1.1.28.2	Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal	Jumlah produksi benih ikan BBI	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	4.000.000 ekor	155.000.000,00		4.000.000 ekor	220.000.000,00
3.1.3.1.1.1.28.3	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan	Pembangunan/Rehab BBI	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 paket	500.000.000,00	-	1 paket	1.100.000.000,00
		Pembangunan Sentra Kuliner Perikanan		1 paket			1 paket	
		Pembangunan/Rehab sarpras pokdakan		1 paket			1 paket	
3.1.3.1.1.1.28.4	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Vitamin, obat, vaksin, kesehatan lingkungan dan budidaya perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1 paket	35.000.000,00	-	1 paket	77.000.000,00
3.1.3.1.1.1.28.5	Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan	Jumlah titik penebaran (lokasi)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10 lokasi	65.000.000,00	-	11 lokasi	99.000.000,00
		Jumlah ikan ditebar di perairan umum (ekor)		30.000 ekor			40.000 ekor	
3.1.3.1.1.1.28.6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT)	Jumlah pokdakan pembudidaya kolam pekarangan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10 kelompok	712.340.000,00	-	10 kelompok	1.550.000.000,00
		Jumlah pokdakan pembenihan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan induk ikan		12 kelompok			12 kelompok	
3.1.3.1.1.1.28.7	Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5 paket/kelompok	556.118.000,00	-	5 paket/kelompok	1.000.000.000,10

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.1.1.1.29	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		5 %	1.140.000.000,00			1.296.000.000,00
		Angka konsumsi ikan		19,70 kg perkapita pertahun				
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan		5 %				
		Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar		3 %				
3.1.3.1.1.1.29.1	Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah peserta Gemarikan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3.000 orang	415.000.000,00	-	3.150 orang	596.000.000,00
		Sosialisasi Forikan Kecamatan		3 event/kegiatan			4 event/kegiatan	
3.1.3.1.1.1.29.2	Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah peserta bintek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang)	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	200 orang	125.000.000,00	-	200 orang	150.000.000,00
		Pembinaan fasilitasi dan sertifikasi produk olahan perikanan (unit)		2 unit			2 unit	
3.1.3.1.1.1.29.3	Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	Jumlah promosi/ jaringan pemasaran produksi perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	4 event/kegiatan	400.000.000,00	-	4 event/kegiatan	250.000.000,00
		Sapras pemasaran hasil perikanan		2 kelompok			2 kelompok	
		Fasilitasi edukasi perikanan (orang)		10.000 orang			10.000 orang	
3.1.3.1.1.1.29.4	Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP)	Jumlah Fasilitasi/ Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perikanan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	21 kelompok	200.000.000,00	-	21 kelompok	300.000.000,00
		Fasilitasi ijin usaha perikanan		20 ijin usaha			20 ijin usaha	
		Pemantauan peredaran ikan konsumsi		21 lokasi/kecamatan			21 lokasi/kecamatan	
		Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dalam lembaga ekonomi keuangan		150 orang			150 orang	
3.3	Pertanian				5.066.860.000,00			10.727.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.3.1.1.1.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		2 %	3.972.660.000,00			9.298.000.000,00
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan		3 %				
		Cakupan penerapan teknologi peternakan		75 %				
		Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		3 %				
3.3.3.1.1.1.22.8	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah kelompok peternak kambing/domba terfasilitasi	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20 kelompok	750.000.000,00	-	3.040.000.000,00
		Jumlah induk ternak sapi perah/sapi potong/sapi betina produktif (ekor) terfasilitasi pakan ternak						
		Jumlah kelompok Peternak Ayam Buras KK miskin dan KK non miskin yang terfasilitasi bantuan						
		Jumlah kelompok Peternak Kelinci yang terfasilitasi bantuan						
3.3.3.1.1.1.22.10	Pembinaan Kelompok ternak	Pembinaan kelompok penerima bantuan tahun berjalan		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30 orang	450.000.000,00	-	175.000.000,00
		Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan (orang)			30 orang			
3.3.3.1.1.1.22.16	Pengembangan itik Magelang	Jumlah kelompok pembibitan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5 kelompok	200.000.000,00	-	870.000.000,00
3.3.3.1.1.1.22.23	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	Jumlah kelompok pengembangan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20 kelompok	600.000.000,00		500.000.000,00
3.3.3.1.1.1.22.26	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan	Sarana Prasarana Peternakan Sapi Perah, Sapi Potong, Kambing/Domba, Itik, Kelinci, Pasar Hewan Grabag		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	32 lokasi/paket/unit	1.382.581.816,00	-	2.850.000.000,00
3.3.3.1.1.1.22.32	Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	300 orang	50.000.000,00	-	55.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.3.3.1.1.1.22.33	Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)	Jumlah sarana prasarana peternakan (unit)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5 kelompok/unit	355.078.184,00	-	5 kelompok/unit	1.500.000.000,00
3.3.3.1.1.1.22.35	Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Pembinaan peternak dan Jumlah jejaring untuk promosi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi dan pengolahan hasil peternakan		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	100 orang	100.000.000,00	-	100 orang	220.000.000,00
		Jumlah peserta bintek (orang)	100 orang		100 orang				
3.3.3.1.1.1.22.36	Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi Buatan (ekor)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	9.000 ekor	85.000.000,00	-	9.000 ekor	88.000.000,00
3.3.3.1.1.1.30	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan			100 %	1.094.200.000,00			1.429.000.000,00
3.3.3.1.1.1.30.1	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular	Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor) dan jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/zoonosis		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	21 lokasi/kecamatan	339.200.000,00	-	21 lokasi/kecamatan	437.500.000,00
		Sosialisasi penyakit hewan (orang)	50 orang		50 orang				
3.3.3.1.1.1.30.2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan Penyedia bahan PAH yang ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) (orang)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	100 orang	350.000.000,00	-	100 orang	540.000.000,00
		Sosialisasi gerakan minum susu dan telur (orang)	2.750 orang		2.750 orang				
3.3.3.1.1.1.30.3	Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban	Jumlah lokasi pemantauan (desa)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	376 desa	85.000.000,00	-	376 desa	110.000.000,00
		Jumlah peserta pelatihan jagal yang sehat/juleha (orang)	320 orang		320 orang				
3.3.3.1.1.1.30.4	Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik	Jumlah lokasi poultry/pet shop/toko obat hewan/depo/klinik hewan yang diawasi se Kabupaten Magelang (unit)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	35 unit	75.000.000,00	-	40 unit	75.000.000,00
		Sosialisasi jasa medik, pengawasan obat (orang)	110 orang		110 orang				
3.3.3.1.1.1.30.5	Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan	Jumlah sampel pengujian penyakit	Kabupaten Magelang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1.000 sampel	85.000.000,00	perlunya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan	1.000 sampel	85.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3.3.3.1.1.1.30.6	Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	RPH Di KABUPATEN MAGELANG	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1.449 ekor	75.000.000,00	Terlaksananya kegiatan ini akan menjamin terpenuhinya daging ASUH yang beredar di masyarakat	1.449 ekor	88.000.000,00
3.3.3.1.1.1.30.7	Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1.500 ekor	85.000.000,00	-	1.500 ekor	93.500.000,00
TOTAL						10.279.315.000,00	TOTAL	20.459.000.000,10	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				23.643.569.000,00			29.639.292.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				23.643.569.000,00			29.639.292.000,00
4.1.4.1.3.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	7.981.265.000,00			9.465.946.000,00
4.1.4.1.3.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	800 surat	10.000.000,00	Menunjang pelayanan surat-menysurat dan pengelolaan kearsipan	750 surat	10.000.000,00
		Jumlah arsip yang di kelola		400 dokumen			450 dokumen	
4.1.4.1.3.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	4.750 surat	8.500.000,00	Menunjang pelayanan surat menyuran dan pengelolaan kearsipan	4.800 surat	12.500.000,00
4.1.4.1.3.3.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	1.000 Surat	15.000.000,00	Menunjang pelayanan surat menyurat	1.000 Surat	15.000.000,00
4.1.4.1.3.4.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang Dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	1.250 surat	9.000.000,00	Menunjang Pelayanan Surat Menyurat dan Pengelolaan Kearsipan	1.300 surat	11.000.000,00
		Jumlah Arsip yang Dikelola		300 Dokumen			300 Dokumen	
4.1.4.1.3.5.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Adminbandga	2.000 Surat	9.000.000,00	Menunjang pelayanan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan	2.000 Surat	9.200.000,00
4.1.4.1.3.6.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Kesra	600 Surat	10.000.000,00	Menunjang surat menyurat dan pengelolaan Arsip	600 Surat	10.000.000,00
4.1.4.1.3.6.7.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka		Bagian Kesra	600.00 surat	10.000.000,00	Layanan surat menyurat / arsip		10.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.3.7.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	700 surat	113.800.000,00	Menunjang kegiatan administrasi surat-menysurat, bahan bacaan dan himpunan klipng media	750 surat	119.200.000,00
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan			468 eksemplar			468 eksemplar	
		Jumlah buku himpunan klipng yang disusun			12 buku			12 buku	
4.1.4.1.3.8.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	5.500 surat	180.050.000,00	Menunjang pelayanan surat menyurat	6.300 surat	207.629.000,00
		Jumlah pengelolaan agenda surat menyurat Pimpinan Daerah			22 agenda			22 agenda	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi persuratan			12 buku			12 buku	
4.1.4.1.3.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	80 rapat	152.140.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	70 rapat	152.140.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			80 perjalanan dinas			90 perjalanan dinas	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 perjalanan dinas			250 perjalanan dinas	
4.1.4.1.3.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	60 Perjalanan	150.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	80 Perjalanan	225.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 Perjalanan			35 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 Rapat			20 Rapat	
4.1.4.1.3.3.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	50 kali	150.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	50 kali	165.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			50 kali			50 kali	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 kali			15 kali	
4.1.4.1.3.4.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH- Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	55 kali	130.000.000,00	Menunjang Pelaksanaan Koordinasi	55 kali	165.000.000,00
		Jumlah Rapat Koordinasi yang Diselenggarakan			12 Rapat			12 Rapat	
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana			100 Kali			100 Kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.5.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Bagian Adminbanda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Banda	45 Perjalanan	72.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	45 Perjalanan	79.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			35 Perjalanan			35 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			15 rapat			15 rapat	
4.1.4.1.3.6.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	350 Perjalanan	87.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	400 Perjalanan	87.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			60 Perjalanan			60 Perjalanan	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			9 Rapat			9 Rapat	
4.1.4.1.3.6.7.2.1	Penyelenggaraan koordinasi dan kosultasi perangkat daerah		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	410.00 Perjalanan	87.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi		87.000.000,00
4.1.4.1.3.7.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	90 Perjalanan	177.000.000,00	Menunjang pelaksanaan koordinasi	90 Perjalanan	185.500.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			5 rapat			5 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksanakan			600 perjalanan			600 perjalanan	
4.1.4.1.3.8.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	290 kali	779.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	303 kali	855.687.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			870 kali			880 kali	
4.1.4.1.3.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	1 paket	20.000.000,00	Menunjang operasional perkantoran	3 paket	25.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			4 paket	
		Jumlah aset yang di kelola			50 buah			60 buah	
4.1.4.1.3.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	3 Paket	67.000.000,00	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	3 Paket	90.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket			2 Paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.3.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	1 paket	50.000.000,00	Menunjang kebutuhan operasional perkantoran	1 paket	50.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			- paket	
4.1.4.1.3.4.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	1 Paket	54.800.000,00	Memenuhi Kebutuhan Operasional Perkantoran	1 Paket	40.500.000,00
4.1.4.1.3.5.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	2 Paket	70.000.000,00	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	2 Paket	75.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 Paket			3 Paket	
4.1.4.1.3.6.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	3 Paket	15.000.000,00	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	3 Paket	20.000.000,00
4.1.4.1.3.6.7.3.1	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	3.00 paket	15.000.000,00	Menunjang operasional kegiatan perkantoran		15.000.000,00
4.1.4.1.3.7.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	1 paket	68.000.000,00	Menunjang operasional kegiatan perkantoran	1 paket	71.400.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket			2 paket	
4.1.4.1.3.8.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	9 paket	246.090.000,00	Sarana dan prasarana yang tersedia	2 paket	652.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			12 paket			7 paket	
		Jumlah aset dikelola			6.700 buah			6.950 buah	
4.1.4.1.3.8.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	9 gedung	2.504.673.000,00	Tersedianya gedung yang memadai	9 gedung	3.050.600.000,00
		Jumlah rekening air, listrik, telepon dan surat kabar			3 rekening			3 rekening	
4.1.4.1.3.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	70 buah	10.000.000,00	Menunjang operasional pelayanan perkantoran	60 buah	10.500.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			80 buah			90 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			4 unit			4 unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	20 unit	7.820.000,00	Menunjang oprasional pelayanan perkantoran	20 unit	15.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			19 Unit			20 Unit	
4.1.4.1.3.3.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	7 peralatan	10.000.000,00	Menunjang operasional pelayanan perkantoran	7 peralatan	12.000.000,00
4.1.4.1.3.4.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	14 Unit	8.000.000,00	Menunjang Operasional Pelayanan Perkantoran	15 Unit	12.000.000,00
4.1.4.1.3.5.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	20 Unit	15.000.000,00	Memenuhi kebutuhan operasional perkantoran	20 Unit	15.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			10 Unit			10 Unit	
4.1.4.1.3.6.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang yang dikelola	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4 Paket	8.000.000,00	Menunjang operasional pelayanan perkantoran	4 Paket	8.000.000,00
4.1.4.1.3.6.7.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4.00 paket	8.000.000,00	Menunjang operasional pelayanan perkantoran		8.000.000,00
4.1.4.1.3.7.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	15 peralatan	16.500.000,00	Menunjang operasional kegiatan perkantoran	15 peralatan	17.300.000,00
4.1.4.1.3.8.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Sekretariat daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	90 buah	1.356.982.000,00	Sarana dan prasarana yang terpelihara	90 buah	1.477.740.000,00
		Jumlah peralatan yang dipelihara			8 macam			8 macam	
4.1.4.1.3.8.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	2 paket	493.624.000,00	Tersedianya gedung yang memadai	2 paket	420.000.000,00
4.1.4.1.3.2.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	4 Kali	25.000.000,00	Pengeloaan administrasi kepegawaian dan pembinaan ASN di lingkungan sekretariat Daerah	4 Kali	27.500.000,00
4.1.4.1.3.8.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	22 orang	882.286.000,00	Menunjang kesejahteraan tenaga kontrak	22 orang	1.067.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	381.416.000,00			785.915.000,00
4.1.4.1.3.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	11 kegiatan	20.000.000,00	Untuk menunjang pengelolaan keuangan di Bagian Tata Pemerintahan	11 kegiatan	200.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
4.1.4.1.3.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat Daerah - bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	13 Kegiatan	6.500.000,00	Untuk menunjang pengelolaan keuangan di Bagian organisasi	13 Kegiatan	8.500.000,00
4.1.4.1.3.3.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	11 kegiatan	15.000.000,00	Menunjang Pengelolaan Administrasi Keuangan	11 kegiatan	15.000.000,00
4.1.4.1.3.4.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan yang Dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	11 Kegiatan	10.000.000,00	Untuk Menunjang Pengelolaan Keuangan di Bagian Perekonomian	11 Kegiatan	13.000.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan Yang Tersusun			132 Laporan			132 Laporan	
4.1.4.1.3.5.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Setda - Bagian adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	12 Kegiatan	6.400.000,00	Untuk menunjang pengelolaan keuangan di bagian adminbangda	12 Kegiatan	6.800.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			144 Laporan			144 Laporan	
4.1.4.1.3.6.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat Daerah Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	12 Bulan	12.000.000,00	Menunjang pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan	12.000.000,00
4.1.4.1.3.6.8.1.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	12.00 bulan	12.000.000,00	Menunjang Pengelolaan Administrasi Keuangan Bagian Kesra		12.000.000,00
4.1.4.1.3.7.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	8 kegiatan	17.000.000,00	Menunjang pengelolaan keuangan Bagian Humas dan Protokol	8 kegiatan	17.450.000,00
4.1.4.1.3.8.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	14 kegiatan	224.516.000,00	Menunjang tertib administrasi keuangan	14 kegiatan	271.665.000,00
		Jumlah pengelolaan administrasi keuangan bagian			9 bagian			9 bagian	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.3.2.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Sekretariat daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	- Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan perencanaan sebagai dasar penganggaran kegiatan	1 Dokumen	75.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		2 Dokumen	2 Dokumen				
4.1.4.1.3.5.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	- Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan perencanaan sebagai dasar penganggaran kegiatan	1 Dokumen	75.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		2 Dokumen	2 Dokumen				
4.1.4.1.3.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	4 dokumen	10.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	19.500.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan per-tribulanan yang tersusun			4 dokumen			4 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.3.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	4 Dokumen	10.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	18.500.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulan uang tersusun			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.3.5.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Sekretariat Daerah - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	4 Dokumen	10.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen	18.500.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pertribulan uang tersusun			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah dokumen jangka menengah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.3.2.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Norma, Standart, prosedur dan kriteria perangkat daerah yang tersusun	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	15 Dokumen	20.000.000,00	Menunjang pelaksanaan kegiatan di Skretariat Daerah agar sesuai dengan norma, standart, prosedur dan kriteria	15 Dokumen	35.000.000,00
4.1.4.1.3.8.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			100 prosentase	3.962.199.000,00			4.694.876.000,00
4.1.4.1.3.8.16.10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan - kegiatan pemerintah daerah	Sekretariat Umum - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	29,49 kali, buah, meter, paket.	483.560.000,00	Menunjang kegiatan KDH WKDH	29,49 kali, buah, meter, paket.	440.440.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.8.16.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan	Jumlah/ macam pengadaan peralatan rumah jabatan	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	7 buah/set	265.512.000,00	Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan	5 buah/set	652.000.000,00
		Jumlah/ macam pengadaan perlengkapan rumah jabatan			5 set, paket, buah			5 set, paket, buah	
4.1.4.1.3.8.16.12	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	2 paket	292.031.000,00	Terjaganya kondisi rumah dinas yang layak	2 paket	460.000.000,00
		Jumlah/ macam rehabilitasi rumah jabatan			2 paket			2 paket	
4.1.4.1.3.8.16.13	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	4 buah	382.216.000,00	Terpeliharanya kendaraan dinas KDH WKDH	4 buah	400.000.000,00
4.1.4.1.3.8.16.14	Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah personil yang disediakan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	7 orang	1.086.750.000,00	Menunjang kegiatan KDH WKDH	7 orang	1.217.700.000,00
		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH/ WKDH			12 bulan			12 bulan	
		Jumlah koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan KDH/ WKDH.			60 kali			70 kali	
		Jumlah cinder mata dan karangan bunga yang tersedia selama satu tahun			326 buah/paket/set			326 buah/paket/set	
		Jumlah/ macam pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH			56 stel, buah, pasang			56 stel, buah, pasang	
		Jumlah kursus/ diklat yang diikuti KDH/ WKDH			4 kali			4 kali	
4.1.4.1.3.8.16.15	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu pemerintah daerah	Bagian Umum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Umum	24,38 dos/paket	1.452.130.000,00	Tersedianya akomodasi untuk rapat dan tamu	24,38 dos/paket	1.524.736.000,00
4.1.4.1.3.3.32	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas			100 Persen	837.808.000,00			1.731.000.000,00
		Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas			100 Persen				
		Persentase permasalahan hukum yang didampingi			100 Persen				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.3.32.1	Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Propemperda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	2 Dokumen	200.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Perencanaan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi serta Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	407.000.000,00
		Jumlah dokumen Raperda			12 Dokumen		12 Dokumen		
		Jumlah Raperda yang dibahas di tingkat DPRD			9 Dokumen		9 Dokumen		
4.1.4.1.3.3.32.2	Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah	Jumlah Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	40 Dokumen	150.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah	40 Dokumen	231.000.000,00
		Jumlah Keputusan Bupati/Keputusan Kepala SKPD yang disusun			480 Dokumen			480 Dokumen	
4.1.4.1.3.3.32.3	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian dan evaluasi Peraturan perundang-undangan yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	6 Dokumen	81.808.000,00	Menunjang pelaksanaan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	133.000.000,00
4.1.4.1.3.3.32.4	Pengelolaan JDIH	Jumlah Dokumen Hukum yang dikelola	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	60 Dokumen	100.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Pengelolaan JDIH	60 Dokumen	319.000.000,00
4.1.4.1.3.3.32.5	Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	Jumlah Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang ditangani	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	27 Permasalahan Hukum	230.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Penanganan Permasalahan Hukum dan Harmonisasi Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	27 Permasalahan Hukum	565.000.000,00
		Jumlah Konsep Kesepakatan bersama dan/ atau perjanjian kerjasama yang diharmonisasi			30 Konsep			30 Konsep	
4.1.4.1.3.3.32.6	Penyuluhan Hukum dan HAM	Jumlah Penyuluhan Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Hukum	6 Kali	76.000.000,00	Menunjang pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan HAM	6 Kali	76.000.000,00
		Jumlah Laporan Capaian Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM yang disusun			5 Dokumen			5 Dokumen	
4.1.4.1.3.1.33	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan	persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan			90 persen	1.890.000.000,00			2.682.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.1.33.1	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah kecamatan yang melaksanakan paten	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	21 kecamatan	450.000.000,00	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan	21 kecamatan	500.000.000,00
		jumlah laporan kunjungan kerja		21 laporan	21 laporan				
4.1.4.1.3.1.33.2	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	3 dokumen	50.000.000,00	Peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan	3 dokumen	55.000.000,00
4.1.4.1.3.1.33.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen LPPD	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	1 kali	1.000.000.000,00	Terwujudnya kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	1 kali	1.342.500.000,00
		Jumlah Dokumen Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			1 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah Dokumen Unsur Rupabumi yang Nama-namanya Telah Dibakukan			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Desk Pilkada			- kali			- kali	
		Jumlah Pelantikan KDH/ WKDH			- kali			- kali	
		Jumlah Desk Pemilu			- kali			- kali	
		Jumlah Laporan SPM			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan			12 kali			12 kali	
4.1.4.1.3.1.33.4	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Daerah	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	35 dokumen	80.000.000,00	Percepatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan	35 dokumen	85.000.000,00
		Jumlah dokumen Kerjasama Dengan Pihak Ketiga			35 dokumen			35 dokumen	
4.1.4.1.3.1.33.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah rumusan konsep kewenangan desa	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	- dokumen	210.000.000,00	Perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	- dokumen	450.000.000,00
		Jumlah Produk Hukum Daerah tentang Desa			5 dokumen			5 dokumen	
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi desa			- dokumen			73 dokumen	
4.1.4.1.3.1.33.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Tata Pemerintahan	367 Desa	100.000.000,00	Terwujudnya kebijakan dalam pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan desa	367 Desa	250.000.000,00
		Jumlah Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pemerintahan desa			- kali			12 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
4.1.4.1.3.6.34	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan			100 Persen	2.800.832.000,00		3.045.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang kesejahteraan sosial	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4 Dokumen	184.832.000,00	Menunjang Pemberian hibah bidang keagamaan dan sosialisasi promosi kesehatan	4 Dokumen
4.1.4.1.3.6.34.1.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4.00 dokumen	210.000.000,00	Masyarakat/kelompok	220.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.2	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang perlindungan perempuan dan anak	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4 Dokumen	31.000.000,00	Penunjang sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Dokumen
4.1.4.1.3.6.34.2.1	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	4.00 dokumen	60.000.000,00	Masyarakat/tim perlindungan perempuan dan anak	80.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.3	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya	Jumlah kebijakan kesra dan kemasyarakatan bidang agama, pendidikan dan budaya	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	9 Dokumen	2.525.000.000,00	Penunjang kegiatan	9 Dokumen
4.1.4.1.3.6.34.3.1	FASILITASI PENYELENGGARAAN BIDANG KEAGAMAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	9.00 dokumen	2.600.000.000,00	Aparatur dan masyarakat	2.700.000.000,00
4.1.4.1.3.6.34.4	Pengembangan dan Pengelolaan Islamic Center	Jumlah Dokumen kelayakan (DED, Andalalin, UKL-UPL/AMDAL)	Sekretariat Daerah-Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	- Dokumen	60.000.000,00	Struktur kelembagaan Islamic center	- Dokumen
		Pengelolaan Islamic Center			1 Paket			1 Paket
4.1.4.1.3.6.34.4.1	Pengembangan dan Pengelolaan Islamic Center		Bagian Kesra	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Kesra	1.00 paket	50.000.000,00	Aparatur dan masyarakat	60.000.000,00
4.1.4.1.3.4.35	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan			100 Persen	730.000.000,00		1.046.000.000,00
		Persentase BUMD yang Berkinerja Baik			100 Persen			
		Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD			12 Persen			
4.1.4.1.3.4.35.1	Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang Dibina	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	5 BUMD	175.000.000,00	Mendukung Kinerja Pengelolaan BUMD, Mendukung Terpenuhinya Pengurus BUMD yang Berkompeten	5 BUMD
		Jumlah Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD yang Diseleksi			3 Orang			235.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.4.35.2	Penyusunan Kajian Pengembangan BUMD	Jumlah Dokumen Peraturan yang Disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	3 Dokumen	75.000.000,00	Mendukung Kebijakan Pengembangan BUMD dan Mendukung Kebijakan Pengelolaan BUMD	3 Dokumen	280.000.000,00
4.1.4.1.3.4.35.3	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TPAKD	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	1 Dokumen	180.000.000,00	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	220.000.000,00
		Jumlah Dokumen Rekapitulasi Program Kegiatan Prioritas yang Difasilitasi Melalui Program TJSL dan PKBL			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah LKM yang Dipersiapkan Untuk Berbadan Hukum dan Berijin			10 LKM			10 LKM	
		Jumlah Database SIKP			1 Database			1 Database	
4.1.4.1.3.4.35.4	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Stabilitas Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	2 Dokumen	105.000.000,00	Mendukung Terwujudnya Situasi dan Kondisi Perekonomian yang Stabil dan Kondusif	2 Dokumen	110.000.000,00
		Jumlah Forum Penyelenggaraan Posko Terpadu			2 Forum			2 Forum	
4.1.4.1.3.4.35.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCHT	Jumlah SKPD Pelaksana Pengguna DBHCHT	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	7 SKPD	85.000.000,00	Mendukung Pengalokasian DBHCHT sesuai Permenkeu 222/PMK.07/2017	7 SKPD	87.000.000,00
4.1.4.1.3.4.35.6	Pengendalian, Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan Peredaran Pupuk dan LPG Bersubsidi	Jumlah Kios Pupuk Lengkap yang Dimonitoring	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Perekonomian	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL)	110.000.000,00	Terpenuhinya Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dari Lini III (Distributor) s.d Lini IV (Petani) dan Tercukupinya Kebutuhan LPG Bersubsidi di Masyarakat	96 Kios Pupuk Lengkap (KPL)	114.000.000,00
		Jumlah Pangkalan yang Dimonitoring			105 Pangkalan			105 Pangkalan	
4.1.4.1.3.5.36	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah			100 Persen	675.000.000,00			1.100.000.000,00
4.1.4.1.3.5.36.1	Administrasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah pedoman perencanaan pembangunan yang disusun	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	2 Dokumen	225.000.000,00	Memenuhi standar perencanaan kegiatan	2 Dokumen	375.000.000,00
		Jumlah daftar calon penerima hibah bansos			2 Daftar			2 Daftar	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.3.5.36.2	Penyusunan LKPJ	Dokumen LKPJ yang disusun	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	1 Dokumen	200.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	275.000.000,00
		Jumlah dokumen LAMJ yang tersusun		- dokumen	- dokumen				
4.1.4.1.3.5.36.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pembangunan	Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun : laporan perkembangan kegiatan APBD, Bankeu dan DAK	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	28 Laporan	250.000.000,00	Sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	28 Laporan	450.000.000,00
4.1.4.1.3.2.37	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi	Prosentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti			100 Persen	955.000.000,00			1.175.000.000,00
		Prosentase dokumen ketatalsanaan yang diterapkan			100 Persen				
		Prosentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik			100 Persen				
		Prosentase dokumen evaluasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu			100 Persen				
4.1.4.1.3.2.37.1	Peningkatan Kesesuaian Kelembagaaan OPD terhadap Peraturan Perundangan	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun	Sekretariat Daerah-Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	1 Dokumen	100.000.000,00	Evaluasi dan pengembangan kelembagaan di Lingkungan Pemda Kabupaten Magelang	1 Dokumen	120.000.000,00
4.1.4.1.3.2.37.2	Penyusunan Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan SKPD	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	1 Dokumen	250.000.000,00	Bahan penetapan kompetensi dan Nilai serta kelas jabatan masing-masing ASN	1 Dokumen	210.000.000,00
		Jumlah kamus standart kompetensi jabatan yang disusun			48 Dokumen			48 Dokumen	
4.1.4.1.3.2.37.3	Pengembangan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatalaksanaan perangkat daerah yang disusun	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	1 Dokumen	80.000.000,00	Pengelolaan kebijakan ketatalaksanaan perangkat daerah untuk menunjang pelaksanaan pelayanan dan opsional OPD	1 Dokumen	100.000.000,00
		Jumlah dokumen Proses Bisnis perangkat daerah yang disusun			10 Dokumen			24 Dokumen	
4.1.4.1.3.2.37.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah unit pelayanan publik yang melakukan survei kepuasan masyarakat	Sekretariat Daerah - Bagian Organsiasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	150 Unit	175.000.000,00	Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di OPD sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masayrakat	150 Unit	225.000.000,00
		Jumlah inovasi Pelayanan publik yang diikutsertakan dalam lomba			3 Unit			3 Unit	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.2.37.5	Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penetapan perjanjian kinerja yang disusun	Sekretariat Daerah - bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	4 Dokumen	200.000.000,00	Fungsi koordinasi dalam pengeloaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Dokumen	360.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun		2 Dokumen	2 Dokumen				
4.1.4.1.3.2.37.6	Pengembangan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah - bagian Organisasi	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Organisasi	- Dokumen	150.000.000,00	Pengembangan kebijakan pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat	- Dokumen	160.000.000,00
		Jumlah SKPD yang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi			48 Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah SKPD yang mengembangkan Zona Integritas			3 SKPD			3 SKPD	
		Jumlah SKPD yang mengembangkan Budaya Kerja			4 SKPD			4 SKPD	
4.1.4.1.3.5.39	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Kematangan UKPBJ			3 level	1.780.000.000,00			2.010.000.000,00
4.1.4.1.3.5.39.1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilayani	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	210 -Paket	900.000.000,00	Pelaksanaan kegiatan pengadaan SKPD	210 -Paket	1.100.000.000,00
4.1.4.1.3.5.39.2	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah lembaga pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	1 Unit	800.000.000,00	Menunjang pelaksanaan pengadaan	1 Unit	820.000.000,00
		Jumlah pelaku pengadaan barang/jasa yang terbina / teradvokasi			50 Orang			50 Orang	
4.1.4.1.3.5.39.3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah layanan pengadaan secara elektronik yang dikelola	Setda - Bagian Adminbangda	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Admin Bangda	5 Sistem	80.000.000,00	Menunjang pelaksanaan pengadaan	5 Sistem	90.000.000,00
4.1.4.1.3.7.40	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan			100 Persen	1.650.049.000,00			1.903.055.000,00
4.1.4.1.3.7.40.1	Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan Dokumentasi	Jumlah dokumen analisis pemberitaan, naskah pidato, dan dokumentasi yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	24 Dokumen	196.072.500,00	Merupakan kegiatan yang menghasilkan output utama pada Subbag Analisis Pemberitaan, Naskah Pidato, dan dokumentasi	24 Dokumen	326.378.000,00
4.1.4.1.3.7.40.2	Peliputan, Editorial, dan Publikasi	Jumlah dokumen peliputan, editorial, dan publikasi yang disusun	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	66 Dokumen	1.250.101.500,00	Merupakan kegiatan yang menghasilkan output utama pada Subbag Peliputan, Editorial dan Publikasi	66 Dokumen	1.352.414.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
4.1.4.1.3.7.40.3	Layanan Keprotokolan	Jumlah Layanan Keprotokolan	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH - Bagian Humas dan Protokol	120 Kali	203.875.000,00	Merupakan kegiatan yang menghasilkan output utama pada Subbag Keprotokolan	120 Kali
TOTAL						23.643.569.000,00	TOTAL	29.639.292.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				21.367.766.000,00			25.714.919.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				21.367.766.000,00			25.714.919.000,00
4.1.4.1.4.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	3.533.902.000,00			4.470.143.000,00
4.1.4.1.4.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat DPRD Kab. Magelang	2.250 surat	71.592.000,00	menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.300 surat	118.448.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		20 Jenis Dokumen arsip			20 Jenis Dokumen arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		6 Jenis			6 Jenis	
4.1.4.1.4.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kabupaten Magelang	55 Perjalanan Dinas	1.334.661.000,00	menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	55 Perjalanan Dinas	1.631.815.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		112 Perjalanan Dinas			150 Perjalanan Dinas	
		Frekuensi Jamuan dan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		12 Bulan			12 Bulan	
4.1.4.1.4.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Magelang	2 Jenis	65.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	2 Jenis	131.445.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Jenis			1 Jenis	
		Jumlah Dokumen aset yang dikelola		2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah Plaket yang dibeli		125 Buah Plaket			125 Buah Plaket	
		Jumlah paket pengadaan mebel kantor		2 Jenis			2 Jenis	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.4.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2 unit gedung	601.077.000,00	Terjaganya kondisi gedung dan rumdin DPRD yang layak	2 unit gedung	760.331.000,00
		Jumlah Rumah Dinas Yang Dipelihara		1 Unit Rumdin	1 Unit Rumdin				
		Jumlah Rekening		3 Jenis Rekening	3 Jenis Rekening				
4.1.4.1.4.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2 Jenis Peralatan	582.269.000,00	Terjaganya Kondisi layak untuk peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis Peralatan	736.996.000,00
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		18 Unit Kendaraan Dinas	18 Unit Kendaraan Dinas				
		Jumlah Mebelair yang dipelihara		3 Unit Mebel	3 Unit Mebel				
		Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara		2 Unit	2 Unit				
4.1.4.1.4.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1 paket	222.775.000,00	Tersedianya gedung kantor dan Rumdin yang memadai	1 paket	150.000.000,00
		Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat rumdin		1 Paket	1 Paket				
4.1.4.1.4.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga honorer/kontrak	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1 org	656.528.000,00	meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur Setwan	1 org	941.108.000,00
		Jumlah seragam dan atribut yang disediakan		5 jenis	5 jenis				
		Jumlah bintek yang diikuti oeh aparatur		6 Kali	6 Kali				
4.1.4.1.4.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	82.235.000,00			112.155.000,00
4.1.4.1.4.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	JumlahBulan yang mengelola kegiatan rutin	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	12 Bulan	77.129.000,00	menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	93.718.000,00
4.1.4.1.4.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	- Dokumen	3.351.000,00	meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	16.506.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		2 Dokumen	2 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.4.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan, monitoring dan evaluasi yang tersusun	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	23 Laporan	1.755.000,00	meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	23 Laporan	1.931.000,00
4.1.4.1.4.1.41	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Raperda, Propemperda dan Rekomendasi APBD			93 %	17.751.629.000,00			21.132.621.000,00
4.1.4.1.4.1.41.1	Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD	Frekuensi Rapat Paripurna yang terlaksana	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	25 Kali	682.000.000,00	Terselenggaraanya rapat rapat alat kelengkapan, Rapat Paripurna dan Rapat Fraksi dengan baik	25 Kali	753.000.000,00
		Jumlah Rapat Alat Kelengkapan yang terlaksana			385 -Kali			385 -Kali	
		Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana			12 Kali Rapat			12 Kali Rapat	
4.1.4.1.4.1.41.2	Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum	Jumlah Perda yang ditetapkan	Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	20 Perda	369.360.000,00	Terselenggaranya Pembahasan Raperda, Kajian Perumahan, Kajian Transportasi, Naskah Akademik	20 Perda	497.659.000,00
		Frekuensi Rapat Pendampingan Pembahasan LKPJ			5 Kali			5 Kali	
		Jumlah Dokumen Kajian Tunjangan Transportasi dan Perumahan			2 Dokumen			- Dokumen	
4.1.4.1.4.1.41.3	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas DPRD	Luar Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	75 Kunjungan	15.000.000.000,00	Meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD	75 Kunjungan	17.929.000.000,00
		Frekuensi Bintek DPRD			6 Kali			6 Kali	
4.1.4.1.4.1.41.4	Kegiatan Reses DPRD	Frekuensi Reses DPRD	Wilayah Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3 Kali	958.346.000,00	Terjaringnya aspirasi masyarakat	3 Kali	1.141.000.000,00
4.1.4.1.4.1.41.5	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	5 Kegiatan	632.096.000,00	Terselenggaranya pelayanan kehumasan dan publikasi DPRD	5 Kegiatan	691.152.000,00
4.1.4.1.4.1.41.6	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Kabupaten Magelang	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	50 Orang	109.827.000,00	Terselenggaranya Jasa pemeriksaan kesehatan 50 anggota DPRD	50 Orang	120.810.000,00
TOTAL						21.367.766.000,00	TOTAL	25.714.919.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN SALAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				671.000.000,00			828.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				671.000.000,00			828.000.000,00
4.1.4.1.5.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	312.000.000,00			327.000.000,00
4.1.4.1.5.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	1.200 surat	7.500.000,00		1.200 surat	9.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		1.000 arsip			1.000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		200 buku			200 buku	
4.1.4.1.5.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	- buku	40.000.000,00		- buku	38.000.000,00
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		20 Kali			20 Kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam yang dilaksanakan		115 Kali			115 Kali	
4.1.4.1.5.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SALAMAN	2 Paket	45.000.000,00		2 Paket	50.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor		2 paket			2 paket	
		Jumlah aset yang dikelola		- unit			- unit	
4.1.4.1.5.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN SALAMAN	2.400 m2	70.000.000,00		2.400 m2	70.000.000,00
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun		4 rekening bulan			4 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.5.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN SALAMAN	20 Buah	92.000.000,00		20 Buah	95.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara		60 Buah			60 Buah	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara		1 Buah			1 Buah	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara		7 Buah			7 Buah	
4.1.4.1.5.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	KECAMATAN SALAMAN	1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	50.000.000,00
4.1.4.1.5.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SALAMAN	12 Kali	7.500.000,00		12 Kali	15.000.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya		- Orang			- Orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya		- Orang			- Orang	
4.1.4.1.5.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah		8 dokumen	39.000.000,00			84.000.000,00
4.1.4.1.5.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN SALAMAN	13 kegiatan	24.000.000,00		13 kegiatan	24.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	
4.1.4.1.5.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	- Dokumen	5.000.000,00		- Dokumen	40.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun		2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.5.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	4 Dokumen	5.000.000,00		4 Dokumen	9.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun		8 Dokumen			8 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.5.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN SALAMAN	- Dokumen	5.000.000,00		- Dokumen	11.000.000,00
		Jumlah dokumen SP yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik		- Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun		- Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	
4.1.4.1.5.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP		90 %	40.000.000,00			25.000.000,00
4.1.4.1.5.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen Terlayani	KECAMATAN SALAMAN	12.000 Dokumen	40.000.000,00		12.000 Dokumen	25.000.000,00
4.1.4.1.5.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		100 Persen	280.000.000,00			392.000.000,00
4.1.4.1.5.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SALAMAN	- Desa	70.000.000,00		- Desa	125.000.000,00
		Jumlah Kepala Desa terpilih		- Kades			- Kades	
		Jumlah Perangkat Desa terisi		15 Orang			15 Orang	
		Jumlah desa lunas PBB		18 Desa			18 Desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina		- Perangkat Desa			- Perangkat Desa	
		Jumlah anggota BPD yang terbina		- Orang			- Orang	
4.1.4.1.5.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	KECAMATAN SALAMAN	- Desa	65.000.000,00		- Desa	89.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina		- Lembaga			- Lembaga	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya		- Desa			- Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		- Dokumen			- Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.5.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan		KECAMATAN SALAMAN	20 Desa	85.000.000,00		20 Desa	92.000.000,00
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			- Orang			- Orang	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			- Desa			- Desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			- Kegiatan			- Kegiatan	
4.1.4.1.5.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		KECAMATAN SALAMAN	- Kali	60.000.000,00		- Kali	86.000.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			- Desa			- Desa	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina			- Orang			- Orang	
		Jumlah peraturan perundangan-undangan yang disosialisasikan			- Peraturan			- Peraturan	
		Jumlah anggota paskibra yang terbina			- Orang			- Orang	
TOTAL						671.000.000,00		TOTAL	828.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN BOROBUDUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					582.000.000,00			1.086.500.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					582.000.000,00			1.086.500.000,00
4.1.4.1.6.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	252.000.000,00			551.500.000,00
4.1.4.1.6.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	2.400 Surat	7.500.000,00	Penyediaan Jasa surat menyurat, bahan pustaka dan arsip.	2.400 Surat	7.500.000,00
4.1.4.1.6.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	13 kali	40.000.000,00	Rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat daerah.	13 kali	100.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar yang dilaksanakan			- Kali			- Kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam yang dilaksanakan			80 Kali			80 Kali	
4.1.4.1.6.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	2 Paket	50.000.000,00	Pengadaan dan pengelolaan aset	2 Paket	70.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			- Paket			- Paket	
4.1.4.1.6.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah luas gedung yang dipelihara	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	5.201 M2.	73.500.000,00	Pemeliharaan gedung dan Upah THL	5.201 M2.	175.000.000,00
		Jumlah rekening yang dikelola dalam 1 tahun			5 Rekening			5 Rekening	
4.1.4.1.6.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		KECAMATAN BOROBUDUR	15 Buah	81.000.000,00	-	15 Buah	88.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			32 Buah			35 Buah	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara			1 Buah			1 Buah	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara			7 Buah			7 Buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.6.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	- Paket	0,00	Rehab ringan gedung kantor	- Paket	50.000.000,00
4.1.4.1.6.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah pembinaan pegawai yang dilaksanakan	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	- kali	0,00	Pembinaan pegawai dan pelatihan kalangan sendiri.	- kali	61.000.000,00
4.1.4.1.6.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			8 Dokumen	40.000.000,00			90.000.000,00
4.1.4.1.6.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	16 Kegiatan	25.000.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan.	16 Kegiatan	25.000.000,00
4.1.4.1.6.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	- Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan	- Dokumen	40.000.000,00
		Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun.			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.6.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	4 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan laporan keuangan.	4 Dokumen	15.000.000,00
4.1.4.1.6.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP dan SP yang disusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	2 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan SOP dan SP.	2 Dokumen	10.000.000,00
4.1.4.1.6.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			90 %	30.000.000,00			30.000.000,00
4.1.4.1.6.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	9.500 Dokumen	30.000.000,00	Meningkatkan Nilai IKM	9.500 Dokumen	30.000.000,00
4.1.4.1.6.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100 %	260.000.000,00			415.000.000,00
4.1.4.1.6.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa.	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	20 Desa	70.000.000,00	Penyelenggaraan tata pemerintahan desa.	20 Desa	137.500.000,00
		Jumlah Kepala Desa terpilih			- Kades			- Kades	
		Jumlah Perangkat Desa terisi			10 Orang			10 Orang	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			250 Orang			250 Orang	
		Jumlah desa lunas Pajak			10 Desa			12 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.6.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	20 Dokumen	55.000.000,00	Pemberdayaan masyarakat desa	20 Dokumen	85.000.000,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan pada desa			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Profil desa yang tersusun.			10 Desa			10 Desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			20 desa			20 desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			20 Desa			20 Desa	
4.1.4.1.6.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa yang dibina	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	20 Desa	85.000.000,00	Kesejahteraan masyarakat	20 Desa	132.500.000,00
		Jumlah Desa Terkoordinasi Penanggulangan kemiskinan			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan.			360 Orang			360 Orang	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya.			3 Group			3 Group	
		Jumlah Desa Layak Anak			- Desa			- Desa	
4.1.4.1.6.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Satlinmas Desa terbina	KECAMATAN BOROBUDUR	KECAMATAN BOROBUDUR	20 Desa	50.000.000,00	Koordinasi ke wilayah , pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.	20 Desa	60.000.000,00
		Jumlah Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan			12 Kali			12 Kali	
		Jumlah Paskibra yang terbina.			80 Orang			80 Orang	
TOTAL					582.000.000,00	TOTAL		1.086.500.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN NGLUWAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				747.000.000,00			649.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				747.000.000,00			649.000.000,00
4.1.4.1.7.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	509.000.000,00			412.000.000,00
		Jumlah surat yang dikelola		1.800 buah				
		Jumlah rekening listrik, telepon dan surat kabar		3 rekening				
4.1.4.1.7.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola		KECAMATAN NGLUWAR	1.800 surat	7.500.000,00		1.800 surat 12.000.000,00
4.1.4.1.7.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		KECAMATAN NGLUWAR	24 kali	38.000.000,00		24 kali
		jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			156 kali			312 kali
		jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana			4 kali			4 kali 54.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.7.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli		KECAMATAN NGLUWAR	3 Kursi Layanan umum	40.000.000,00		3 Kursi Layanan umum	80.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli			1 meja sirkulasi pelayanan			- meja sirkulasi pelayanan	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli			5 meja kerja kayu			5 meja kerja kayu	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli			5 kursi kerja			5 kursi kerja	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli			- Filling Cabinet dan lemari			4 Filling Cabinet dan lemari	
		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terbeli			2 AC ruangan			2 AC ruangan	
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor terbeli			2 PC / Laptop dan Printer			2 PC / Laptop dan Printer	
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor terbeli			1 LCD, TV, CCTV			1 LCD, TV, CCTV	
		Jumlah meubelair terbeli			2 set meja kursi tamu camat			2 set meja kursi tamu camat	
		Jumlah meter gorden terbeli			200 Meter			- Meter	
		jumlah alat rekam dan cetak e-KTP terbeli			- 2 unit			- 2 unit	
		Jumlah aplikasi ter[asang			- 2 aplikasi			- 2 aplikasi	
		jumlah counter pelayanan terbeli			- 1 paket			- 1 paket	
4.1.4.1.7.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Rumdin dan Gedung Kantor terpelihara		KECAMATAN NGLUWAR	6 unit gedung	86.000.000,00		6 unit gedung	86.000.000,00
		jJumlah rekening terbayar			3 rekening (Listrik, Telpo n & Surat kabar)			3 rekening (Listrik, Telpo n & Surat kabar)	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.7.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		KECAMATAN NGLUWAR	1 Mobil	90.000.000,00		1 Mobil	90.000.000,00
		Jumlah peralatan kantor terpelihara			17 Unit			17 Unit	
		Jumlah Perlengkapan Kantor terpelihara			15 meja kursi			15 meja kursi	
		Jumlah Kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 Motor			7 Motor	
4.1.4.1.7.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Rumdin terehabilitasi		KECAMATAN NGLUWAR	6 unit gedung rehab sedang	240.000.000,00		6 unit gedung rehab sedang	0,00
4.1.4.1.7.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah Frekuensi ASN terbina		KECAMATAN NGLUWAR	12 kali	7.500.000,00		12 kali	90.000.000,00
4.1.4.1.7.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	37.000.000,00			69.000.000,00
4.1.4.1.7.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Kegiatan dikelola		KECAMATAN NGLUWAR	30 kegiatan	22.000.000,00		30 kegiatan	22.000.000,00
4.1.4.1.7.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RPTK tersusun		KECAMATAN NGLUWAR	1 dokumen	5.000.000,00		1 dokumen	16.000.000,00
		Jumlah Dokumen RENSTRA SKPD tersusun			- dokumen			- dokumen	
		Jumlah Dokumen RENJA tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.7.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan tersusun		KECAMATAN NGLUWAR	4 dokumen	5.000.000,00		4 dokumen	7.000.000,00
4.1.4.1.7.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP tersusun		KECAMATAN NGLUWAR	1 dokumen	5.000.000,00		1 dokumen	24.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah daftar Informasi Publik tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.7.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	30.000.000,00			8.000.000,00
4.1.4.1.7.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani		KECAMATAN NGLUWAR	2.400 dokumen	30.000.000,00		2.400 dokumen	8.000.000,00
4.1.4.1.7.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pesentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.			100 %	171.000.000,00			160.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.7.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang lunas PBB		KECAMATAN NGLUWAR	8 desa	48.000.000,00		8 desa	48.000.000,00
		Jumlah LKPJ Kepala desa terfasilitasi			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah Raperdes APBDes terfasilitasi penyusunannya			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah Laporan ADD termonitoring			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah desa terbina administrasinya			8 desa			8 desa	
		jumlah desa terfasilitasi pemilihan kepala desa			- desa			- desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			2 orang			2 orang	
4.1.4.1.7.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah RKP Desa yang dihasilkan		KECAMATAN NGLUWAR	8 dokumen	35.000.000,00		8 dokumen	24.000.000,00
		Jumlah Proposal Bansos yang diverifikasi			80 proposal			80 proposal	
		Jumlah desa yang di evaluasi /lomba			8 desa			8 desa	
		Jumlah RPTK yang dihasilkan			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.7.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP PKK Desa terbina		KECAMATAN NGLUWAR	8 TP PKK Desa	56.000.000,00		8 TP PKK Desa	56.000.000,00
		Jumlah peserta MTQ Tingkat kecamatan yang diseleksi			40 orang peserta			40 orang peserta	
		Jumlah Grup Rebana yang dikirim			8 grup rebana			8 grup rebana	
		Jumlah kelompok UMKM yang dpamerkan produknya			80 kelompok			80 kelompok	
		Jumlah desa terkordinasi penanggulangan kemiskinannya			8 desa			8 desa	
4.1.4.1.7.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Satlinmas desa terbina	Kecamatan Ngluwar	KECAMATAN NGLUWAR	8 desa	32.000.000,00	Kegiatan Penting	8 desa	32.000.000,00
		Jumlah koordinasi Forpimcam			12 kali			12 kali	
		Jumlah peserta pentas seni budaya			80 orang peserta			80 orang peserta	
		Jumlah relawan peserta pelatihan penanggulangan bencana			40 orang peserta			40 orang peserta	
TOTAL						747.000.000,00	TOTAL	649.000.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				498.787.300,00			278.406.300,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				498.787.300,00			278.406.300,00
4.1.4.1.8.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	257.300.000,00			101.060.000,00
4.1.4.1.8.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN SALAM	2.196 buah	7.500.000,00		2.196 buah	6.000.000,00
		Jumlah arsip yg dikelola		310 buah			310 buah	
4.1.4.1.8.1.7.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat		KECAMATAN SALAM	12.00 bulan	6.000.000,00			6.000.000,00
4.1.4.1.8.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	KECAMATAN SALAM	55 kali	40.000.000,00		55 kali	21.060.000,00
		Jumlah perjalanan dinas yg dilaksanakan		282 kali			282 kali	
4.1.4.1.8.1.7.2.1	Rapat koordinasi		KECAMATAN SALAM	12.00 bulan	16.925.000,00			16.925.000,00
4.1.4.1.8.1.7.2.2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		KECAMATAN SALAM	282.00 kali	21.060.000,00			21.060.000,00
4.1.4.1.8.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	KECAMATAN SALAM	1 paket	22.000.000,00		1 paket	21.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan Peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
		Jumlah paket pengadaan mebeler kantor		1 paket			1 paket	
4.1.4.1.8.1.7.3.1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor		KECAMATAN SALAM	1.00 1 paket	26.000.000,00			20.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.8.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yg dipelihara	KECAMATAN SALAM	2.850 meter persegi	94.800.000,00	-	2.850 meter persegi	29.500.000,00
		Luas rumah dinas yg dipelihara		150 meter persegi			150 meter persegi	
		Luas taman yg dipelihara		250 meter			250 meter	
		Jumlah tenaga honorer/kontrak		2 orang			2 orang	
4.1.4.1.8.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	KECAMATAN SALAM	18 buah	65.500.000,00		18 buah	5.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		7 unit			7 unit	
4.1.4.1.8.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN SALAM	1 paket	20.000.000,00		1 paket	15.000.000,00
4.1.4.1.8.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SALAM	12 kali	7.500.000,00		12 kali	3.500.000,00
		Jumlah ASN yang dibina		14 orang			14 orang	
		Jumlah JFT yg terfasilitasi penilaian angka kreditnya		1 orang			1 orang	
4.1.4.1.8.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	34.000.000,00			32.764.000,00
4.1.4.1.8.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yg dikelola	KECAMATAN SALAM	25 kegiatan	24.000.000,00		25 kegiatan	18.764.000,00
		Jumlah laporan keuangan yg tersusun		4 dokumen			4 dokumen	
4.1.4.1.8.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra yang tersusun	KECAMATAN SALAM	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	7.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.8.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN SALAM	8 dokumen	5.000.000,00		8 dokumen	7.000.000,00
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yg tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.8.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP da SP		90 %	15.200.000,00			6.000.000,00
4.1.4.1.8.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yg terlayani	KECAMATAN SALAM	5.475 dokumen	15.200.000,00	-	6.000 dokumen	6.000.000,00
4.1.4.1.8.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		100 %	192.287.300,00			138.582.300,00
4.1.4.1.8.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN SALAM	12 desa	60.000.000,00		12 desa	25.000.000,00
		Jumlah perangkat desa terisi		2 orang			2 orang	
		Jumlah desa lunas PBB		10 desa			10 desa	
		Jumlah desa terfasilitasi penyusunan APBDes nya		12 desa			12 desa	
		Jumlah desa terfasilitasi penyusunan LPPD		12 desa			12 desa	
4.1.4.1.8.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen RPTK	KECAMATAN SALAM	12 dokumen	40.000.000,00		12 dokumen	21.295.000,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi hibah/bansos		12 desa			12 desa	
		Jumlah desa yang menyelesaikan profil desa		12 desa			12 desa	
		Jumlah lembaga desa yang terbina		12 lembaga			12 lembaga	
		Jumlah Dokumen Renja		1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.8.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan		KECAMATAN SALAM	12 desa	64.000.000,00		12 desa	64.000.000,00
		Jumlah TP PKK Desa yang terbina			12 desa			12 desa	
		Frekwensi penyelenggaraan festival seni dan budaya			1 kali			1 kali	
4.1.4.1.8.1.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Linmas Desa Yg Dibina		KECAMATAN SALAM	36 orang	28.287.300,00		36 orang	28.287.300,00
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan			36 orang			36 orang	
		Frekwensi koordinasi forum pimpinan kecamatan			12 bulan			12 bulan	
		Jumlah desa yg dipelihara/dibina Trantib dan Patroli			12 desa			12 desa	
TOTAL					498.787.300,00		TOTAL	278.406.300,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					554.000.000,00			672.500.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					554.000.000,00			672.500.000,00
4.1.4.1.9.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			80 %	257.000.000,00			335.500.000,00
4.1.4.1.9.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.500 surat	7.500.000,00	Pengelolaan surat, arsip, SJDI	1.500 surat	7.500.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			1.500 surat			1.500 surat	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			120 buku			125 buku	
4.1.4.1.9.1.7.1.1	Pengelolaan surat menyurat		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1500.00 surat	6.000.000,00	Kabupaten dan desa		6.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.1.2	Pengelolaan kearsipan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1500.00 surat	1.000.000,00	Kecamatan		1.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.1.3	Pengelolaan buku pustaka		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	120.00 buku	500.000,00	Kecamatan		500.000,00
4.1.4.1.9.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12 kali	30.000.000,00	Rakorda, Rakorlu	12 kali	30.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			102 kali			102 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			- kegiatan			- kegiatan	
4.1.4.1.9.1.7.2.1	Koordinasi ke luar daerah		Provinsi Jateng/ DIY	KECAMATAN SRUMBUNG	5.00 kali	4.000.000,00	Provinsi Jateng/ DIY		4.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.2.2	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kabupaten Magelang	KECAMATAN SRUMBUNG	60.00 kali	26.000.000,00	Kabupaten Magelang		26.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	- paket	30.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	6 paket	100.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			4 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			110 buah			113 buah	
4.1.4.1.9.1.7.3.1	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 Paket	30.000.000,00	Kecamatan		100.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	3.200 m2	70.000.000,00	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	5.000 m2	70.000.000,00
		Jumlah rekening/ bulan yang dibayar dalam 1 tahun			3 rekening			3 rekening	
4.1.4.1.9.1.7.4.1	Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah dinas		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12.00 bulan	70.000.000,00	Kecamatan		70.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	9 unit	95.000.000,00	Pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor, kendaraan dinas	10 unit	95.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			1 buah			1 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.9.1.7.5.1	Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	8.00 unit	95.000.000,00	Pemeliharaan peralatan, perlengkapan kantor, kendaraan dinas		95.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1 Paket	20.000.000,00	Rehab sedang/ berat gedung kantor/ rumah dinas	1 Paket	30.000.000,00
4.1.4.1.9.1.7.6.1	Rehab sedang/ berat gedung kantor/ rumah dinas		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 Paket	30.000.000,00	Kecamatan		30.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12 kali	4.500.000,00	Pengelolaan kepegawaian	12 kali	3.000.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			- orang			- orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			16 orang			16 orang	
4.1.4.1.9.1.7.7.1	Pengelolaan kepegawaian		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	16.00 orang	3.000.000,00	Kecamatan		3.000.000,00
4.1.4.1.9.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	35.500.000,00			67.500.000,00
4.1.4.1.9.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	14 kegiatan	17.500.000,00	Pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung, laporan keuangan	14 kegiatan	17.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 laporan			5 laporan	
4.1.4.1.9.1.8.1.1	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	14.00 kegiatan	17.500.000,00	Kecamatan		17.500.000,00
4.1.4.1.9.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	- dokumen	8.000.000,00	Penyusunan RPTK, Renja SKPD, Renja Perubahan SKPD	1 dokumen	35.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.9.1.8.2.1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 dokumen	20.000.000,00	Kecamatan dan desa		20.000.000,00
4.1.4.1.9.1.8.2.2	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	2.00 dokumen	15.000.000,00	Kecamatan		15.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	4 dokumen	5.000.000,00	Penyusunan laporan kinerja SKPD bulanan, triwulanan, tahunan	4 dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.9.1.8.3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	19.00 dokumen	10.000.000,00	Kecamatan		10.000.000,00
4.1.4.1.9.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	4 dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Standar Operasi dan Prosedur, Standar Pelayanan publik dan dokumen informasi publik di kecamatan	2 dokumen	5.000.000,00
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			4 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.9.1.8.4.1	Penyusunan SOP, SP, dokumen informasi publik		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	5.00 dokumen	5.000.000,00	Kecamatan		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	17.500.000,00			17.500.000,00
4.1.4.1.9.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	756 dokumen	17.500.000,00	Pelayanan publik terpadu Kecamatan	756 dokumen	17.500.000,00
4.1.4.1.9.1.42.1.1	Penyelenggaraan PATEN		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 Paket	17.500.000,00	Kecamatan		17.500.000,00
4.1.4.1.9.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			85 %	244.000.000,00			252.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.9.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17 desa	44.551.000,00	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Tata Pemerintahan	17 desa	25.500.000,00
		Jumlah Kepala Desa terpilih			- desa			- desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			17 desa			17 desa	
		Jumlah desa lunas PBB			17 desa			17 desa	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			17 desa			17 desa	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			17 desa			17 desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			17 desa			17 desa	
4.1.4.1.9.1.43.1.1	Pemungutan PBB		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.2	Fasilitasi penyusunan LKPJ/ LPPDesa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.3	Fasilitasi penyusunan APBDesa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.4	Pembinaan administrasi desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	3.000.000,00	Kecamatan dan desa		3.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.5	Monev bantuan keuangan kepada desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	7.500.000,00	Kecamatan dan desa		7.500.000,00
4.1.4.1.9.1.43.1.6	Fasilitasi pengisian perangkat desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		0,00
4.1.4.1.9.1.43.1.7	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17 desa	63.449.000,00	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat	17 desa	33.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			17 dokumen			17 dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			17 desa			17 desa	
		Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa			2 desa			2 desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			17 desa			17 desa	
		Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan			175 orang			175 orang	
4.1.4.1.9.1.43.2.1	Fasilitasi kelembagaan kemasyarakatan desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.2	Fasilitasi Musrenbang Desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.3	Fasilitasi proposal hibah bansos		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	10.000.000,00	Kecamatan dan desa		10.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.4	Fasilitasi bangunb		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.5	Fasilitasi penyusunan RPJMDesa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.6	Fasilitasi penyusunan profil desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.2.7	Fasilitasi kerjasama antar desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	3.000.000,00	Kecamatan dan desa		3.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17 desa	85.000.000,00	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Kesejahteraan Masyarakat	17 desa	152.500.000,00
		Jumlah TP PKK Desa yang terbina			17 lembaga			17 lembaga	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			17 desa			17 desa	
		Jumlah desa layak anak			17 desa			17 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya			2 kegiatan			2 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.43.3.1	Fasilitasi komda lansia		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	3.000.000,00	Kecamatan		3.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.2	Penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	65.000.000,00	Kecamatan dan desa		65.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.3	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	22.500.000,00	Kecamatan dan desa		22.500.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.4	Penyelenggaraan MTQ FASI kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	15.000.000,00	Kecamatan dan desa		15.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.5	Penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12.00 bulan	17.000.000,00	Kecamatan		17.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	15.000.000,00	Kecamatan		15.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.3.7	Penyelenggaraan gelar budaya kecamatan		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	15.000.000,00	Kecamatan		15.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12 kali	51.000.000,00	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Trantibum	12 kali	41.000.000,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana			17 desa			17 desa	
		Jumlah Satlinmas desa yang terbina			17 desa			17 desa	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasikan			- peraturan			- peraturan	
		Jumlah Paskibra yang terbina			1 pasukan			1 pasukan	
4.1.4.1.9.1.43.4.1	Koordinasi Forkompincam Srumbung		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	12.00 bulan	18.000.000,00	Camat, Kapolsek, Danramil		18.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.4.2	Pembinaan wawasan kebangsaan dan bela negara		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	1.00 kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan dan sekolah		15.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.4.3	Pembinaan Satlinmas Desa		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	5.000.000,00	Kecamatan dan desa		5.000.000,00
4.1.4.1.9.1.43.4.4	Penegakan Perda/ Perbup		Kecamatan Srumbung	KECAMATAN SRUMBUNG	17.00 desa	3.000.000,00	Kecamatan dan desa		3.000.000,00
TOTAL						554.000.000,00	TOTAL		672.500.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN DUKUN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				516.000.000,00			852.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				516.000.000,00			852.000.000,00
4.1.4.1.10.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 Prosen	232.000.000,00			315.000.000,00
4.1.4.1.10.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN DUKUN	1.500 surat	5.500.000,00	-	1.500 surat	17.000.000,00
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		50 buku			50 buku	
		jumlah arsip yang dikelola		1.000 arsip			1.000 arsip	
4.1.4.1.10.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan humas dan protokol yang dilaksanakan	KECAMATAN DUKUN	50 SJDI	40.000.000,00		- kali	65.000.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana		210 kali			210 kali	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		40 kali			40 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN DUKUN	2 Paket Perlengkapan gedung (Mebeler, Filling kabinet, almari arsip	40.000.000,00		2 Paket Perlengkapan gedung ()	55.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor		2 Paket Pengadaan peralatan gedung kantoosound sistem. LCD dan AC			2 Paket pengadaan peralatan gedung kantor ()	
		Jumlah Aset yang dikelola		714 barang			714 Barang	
4.1.4.1.10.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	KECAMATAN DUKUN	1.054 M2.	44.000.000,00	-	1.054 M2.	42.000.000,00
		Jumlah rekening/bulan yang dibayarkan dalam satu tahun		36 Rekening bulan			36 Rekening	
4.1.4.1.10.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN DUKUN	7 komputer,Print,	75.000.000,00		7 komputer, Print	80.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara		20 Meja, kursi,alamari			20 Meja	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara		1 mobil			1 mobil	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		7 motor			7 motor	
4.1.4.1.10.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN DUKUN	1 gedung	20.000.000,00		1 gedung	20.000.000,00
4.1.4.1.10.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekwensi Pembinaan ASN	KECAMATAN DUKUN	12 Kali	7.500.000,00		12 Kali	36.000.000,00
		Jumlah ASN yang terfasilitasi Penilaian Kinerjanya		16 org			16 org	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya		- Orang			- orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan evaluasi Kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah		100 Prosen	37.000.000,00			80.000.000,00
4.1.4.1.10.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN DUKUN	16 Kegiatan	22.000.000,00		16 Kegiatan	25.000.000,00
		jumlah laporan Keuangan yang tersusun		12 laporan			12 laporan	
4.1.4.1.10.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	10.000.000,00
		jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah RKO yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah RPTK yang tersusun		1 Dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.10.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	4 Dokumen	5.000.000,00		4 Dokumen	10.000.000,00
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tribulan yang tersusun		4 Dokumen			4 dokumen	
		Jumlah Dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 Dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		1 Dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.10.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	KECAMATAN DUKUN	1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
		Jumlah dokumen SP yang Tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Daftar Informasi Publik		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Pengendalian intern (SPIP) disusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen data perangkat daerah yang tersusun		1 Dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.10.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase Pelayanan publik sesuai SOP dan SP		100 prosen	30.000.000,00			10.000.000,00
4.1.4.1.10.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN DUKUN	500 Dokumen	30.000.000,00		500 Dokumen	10.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		100 Prosen	217.000.000,00			447.000.000,00
4.1.4.1.10.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	jumlah Kepala desa terpilih	KECAMATAN DUKUN	- Desa	60.000.000,00		- Desa	130.000.000,00
		Jumlah Perangkat desa yang terisi		15 Desa			15 Desa	
		Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		15 Desa			15 desa	
		Jumlah desa yang Terbina Adminitrasinya		15 Desa			15 Desa	
		Jumlah Desa lunas PBB		15 Desa			15 Desa	
		Jumlah Anggota BPD yang terbina		60 Orang			60 orang	
4.1.4.1.10.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi bantuan keuangan desa	KECAMATAN DUKUN	15 desa	57.000.000,00		1.500 desa	57.000.000,00
		Jumlah Prifil desa yan tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah lembaga kemasarakatan deas yang terbina		15 Desa			15 Desa	
		Jumah Desa yang terbina adminitrasinya		15 desa			15 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun		15 Dokumen			15 Dokumen	
4.1.4.1.10.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terkoordinasi Penanggulangan Kemiskinan	KECAMATAN DUKUN	13 desa	60.000.000,00		15 Desa	140.000.000,00
		Jumlah TP PKK yang dibina		15 Desa			15 Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirim dalam lomba kebudayaan		15 desa			15 Desa	
		Jumlah Desa layak anak		15 Desa			15 Desa	
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya		1 Kegiatan			1 Kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Junlah desa yang terfasilitasi Penanggulangananan Bencana		KECAMATAN DUKUN	15 lDesa	40.000.000,00		15 Desa	120.000.000,00
		Frekuensi koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan			6 kali			6 kali	
		Jumlah satlinmas desa yasng terbinai			60 orang			60 orang	
		Jumlah paskibara yang dibina			80 Orang			80 Orang	
TOTAL						516.000.000,00	TOTAL		852.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN SAWANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					515.776.000,00			687.611.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					515.776.000,00			687.611.000,00
4.1.4.1.11.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	285.776.000,00			402.776.000,00
4.1.4.1.11.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	1.600 surat	6.000.000,00	Menunjang Tertib administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.600 surat	10.000.000,00
4.1.4.1.11.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	40 kali	40.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	40 kali	58.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 kali			200 kali	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			15 kali			15 kali	
4.1.4.1.11.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	3 Paket	70.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	3 Paket	150.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 Paket			2 Paket	
4.1.4.1.11.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rekening yang terbayar dalam 1 tahun	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	36 rekening	84.000.000,00	Terpeliharaannya gedung kantor kecamatan	36 rekening	99.000.000,00
		Luas gedung kantor yang dipelihara			2.000 m2			2.000 m2	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.11.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	12 unit	78.000.000,00	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	14 unit	78.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 unit			5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.11.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	12 kali	7.776.000,00	Meningkatnya kapsitas dan kualitas aparatur kecamatan	12 kali	7.776.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			16 orang			16 orang	
4.1.4.1.11.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	30.000.000,00			69.000.000,00
4.1.4.1.11.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	14 kegiatan	15.000.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 kegiatan	17.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			1 laporan			1 laporan	
4.1.4.1.11.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	- Dokumen	5.000.000,00	Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	- Dokumen	21.500.000,00
		Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumrn Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.11.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Tahunan yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	4 Dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	15.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 Dokumen			8 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumah Dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- Dokumen			- Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.11.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Dokumen SOP yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN SAWANGAN	1 Dokumen	5.000.000,00	Meningkatnya kualitas pelayanan	1 Dokumen	15.000.000,00
		Jumlah SP yang tersusun			5 SP			5 SP	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi NSPK			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.11.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			80 %	35.000.000,00			25.500.000,00
4.1.4.1.11.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN SAWANGAN	KECAMATAN SAWANGAN	6.000 Dokumen	35.000.000,00	Meningkatnya kualitas pelayanan	6.000 Dokumen	25.500.000,00
4.1.4.1.11.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pesentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.			80 %	165.000.000,00			190.335.000,00
4.1.4.1.11.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Seksi Tata Pemerintahan	KECAMATAN SAWANGAN	15 Desa	30.000.000,00	Tefasilitasinya tata kelola pemerintahan desa	15 Desa	27.500.000,00
		Jumlah kepala desa terpilih			- orang			- orang	
		Jumlah perangkat desa yang terisi			- orang			2 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			15 Desa			15 Desa	
4.1.4.1.11.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah desa yang difasilitasi bantuan keuangan kepada desa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN SAWANGAN	15 Desa	40.000.000,00	meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	15 Desa	37.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			15 Dokumen			15 Dokumen	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			5 lembaga			5 lembaga	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			15 Desa			15 Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.11.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirim dalam lomba kebudayaan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	KECAMATAN SAWANGAN	60 orang	60.000.000,00	Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	60 orang	80.000.000,00
		Jumlah desa yang terkoordinasi penanggulangan kemiskinanannya			15 Desa			15 Desa	
		Jumlah desa layak anak			2 Desa			2 Desa	
		jumlah group yang mengikuti festival budaya			15 group			15 group	
		Jumlah TP PKK desa terbina			15 TP PKK			15 TP PKK	
4.1.4.1.11.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum pimpinan kecamatan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum	KECAMATAN SAWANGAN	12 kali	35.000.000,00	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan wasbang	12 kali	45.835.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			15 Desa			15 Desa	
		jumlah satlinmas desa yang terbina			15 Satlinmas			15 Satlinmas	
		Jumlah penegakan perda/perbub atau jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan			4 peraturan			4 peraturan	
		Jumlah paskibra yang terbina			70 orang			70 orang	
TOTAL					515.776.000,00	TOTAL	687.611.000,00		

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				2.100.067.800,00			2.499.186.500,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				2.100.067.800,00			2.499.186.500,00
4.1.4.1.12.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	361.700.000,00			504.900.000,00
4.1.4.1.12.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN MUNTILAN	2.000 Surat	5.500.000,00	-	2.000 Surat	5.200.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2.000 Surat			2.000 Surat	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		10 Dokumen			10 Dokumen	
4.1.4.1.12.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN MUNTILAN	3.000 Surat	3.200.000,00		3.000 Surat	3.200.000,00
4.1.4.1.12.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN MUNTILAN	22 Kali rakor	39.000.000,00	-	22 Kali rakor	60.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		210 Kali perjalanan dd			210 Kali perjalanan dd	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		16 Kali			16 Kali	
4.1.4.1.12.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN MUNTILAN	6 Kali pertemuan	25.000.000,00		6 Kali pertemuan	40.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		187 Kali perjalanan dd			187 Kali perjalanan dd	
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana		12 kali perjalanan dl			12 kalikali perjalanan dl	
4.1.4.1.12.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN MUNTILAN	1 Paket	20.000.000,00	-	1 Paket	45.000.000,00
		Jumlah aset yang dikelola		50 Buah			60 Buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.12.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		KELURAHAN MUNTILAN	- Paket	50.000.000,00	-	1 Paket	75.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 Paket			1 Paket	
4.1.4.1.12.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		KECAMATAN MUNTILAN	1.200 m2	50.000.000,00	-	1.200 m2	103.500.000,00
		Jumlah rekening yang dibayarkan			60 rekening			60 rekening	
4.1.4.1.12.2.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		KELURAHAN MUNTILAN	322 m2	46.000.000,00		322 m2	46.000.000,00
		Jumlah rekening yang dibayarkan			5 rekening			5 rekening	
4.1.4.1.12.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara		KECAMATAN MUNTILAN	25 buah	80.000.000,00	-	25 buah	58.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			15 Buah			5 Buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			2 Unit			2 Unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 Unit			7 Unit	
4.1.4.1.12.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		KELURAHAN MUNTILAN	21 Unit	40.000.000,00		28 Unit	40.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 Unit			5 Unit	
4.1.4.1.12.2.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang direhab		KELURAHAN MUNTILAN	- unit	0,00	-	- unit	0,00
4.1.4.1.12.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekwensi pembinaan ASN		KECAMATAN MUNTILAN	12 Kali	3.000.000,00	-	12 Kali	29.000.000,00
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			26 Orang			26 Orang	
4.1.4.1.12.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	71.000.000,00			84.500.000,00
4.1.4.1.12.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KECAMATAN MUNTILAN	17 Kegiatan	44.500.000,00		17 Kegiatan	44.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			5 Dokumen			5 Dokumen	
4.1.4.1.12.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KELURAHAN MUNTILAN	13 Kegiatan	3.500.000,00		13 Kegiatan	4.000.000,00
4.1.4.1.12.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun		KECAMATAN MUNTILAN	1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen	6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.12.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		KECAMATAN MUNTILAN	4 Dokumen	10.000.000,00	-	4 Dokumen	27.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 Dokumen			8 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 Dokumen			12 Dokumen	
4.1.4.1.12.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		KELURAHAN MUNTILAN	4 Dokumen	3.000.000,00		4 Dokumen	3.000.000,00
4.1.4.1.12.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun		KECAMATAN MUNTILAN	1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen	0,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern (SPIP) yang disusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.12.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	34.000.000,00			40.000.000,00
4.1.4.1.12.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani		KECAMATAN MUNTILAN	10.000 Dokumen	34.000.000,00		10.000 Dokumen	40.000.000,00
4.1.4.1.12.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			100 %	1.633.367.800,00			1.869.786.500,00
4.1.4.1.12.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		KECAMATAN MUNTILAN	13 Desa/Kel	60.000.000,00	-	13 Desa/Kel	256.000.000,00
		Jumlah perangkat desa terisi			10 Orang			3 Orang	
		Jumlah desa lunas PBB			8 Desa			9 Desa	
4.1.4.1.12.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa		KECAMATAN MUNTILAN	14 Desa/Kel	30.000.000,00	-	14 Desa/Kel	12.786.500,00
		Jumlah dokumen Profil desa yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			1 Dokumen			1 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.12.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan		KECAMATAN MUNTILAN	14 Desa/Kel	110.500.000,00	-	14 Desa/Kel	205.000.000,00
		Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina			14 Desa/Kel			14 Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			28 Orang/Kel			28 Orang/Kel	
		Jumlah Desa/Kel Layak Anak			4 Desa/Kel			6 Desa/Kel	
		Frekwensi penyelenggaraan festival seni dan budaya			1 Kali			1 Kali	
4.1.4.1.12.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		KECAMATAN MUNTILAN	12 Kali	30.000.000,00	-	12 Kali	97.000.000,00
		Jumlah Satlinmas desa yang terbina			56 Orang			56 Orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penaggulangan bencana			14 Desa/Kel			14 Desa/Kel	
4.1.4.1.12.2.43.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekwensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan		KELURAHAN MUNTILAN	10 Kali pertemuan	44.000.000,00		10 Kali pertemuan	35.000.000,00
		Jumlah laporan kependudukan			4 Dokumen			4 Dokumen	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar			90 persen			90 persen	
4.1.4.1.12.2.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah pemberdayaan lembaga kelurahan		KELURAHAN MUNTILAN	5 lembaga	1.238.867.800,00		5 lembaga	1.144.000.000,00
		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun			1 Paket			1 Paket	
		Frekwensi musrenbang kelurahan			1 Kali			1 Kali	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			5 Proposal			5 Proposal	
4.1.4.1.12.2.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pokja yang dibina	Kelurahan Muntilan	KELURAHAN MUNTILAN	4 Pokja	120.000.000,00	peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban	4 Pokja	120.000.000,00
		Jumlah Posyandu yang dibina			12 Posyandu			12 Posyandu	
		Jumlah anggota Satlinmas yang aktif dan terlatih			40 Orang			40 Orang	
		Jumlah jamban keluarga yang dibangun			- unit			- unit	
TOTAL						2.100.067.800,00		TOTAL	2.499.186.500,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN MUNGKID

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				3.288.700.000,00			5.443.154.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				3.288.700.000,00			5.443.154.000,00
4.1.4.1.13.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah rekening telepon, sumber daya air, listrik dan surat kabar		100 persen	540.000.000,00			2.500.500.000,00
		Jumlah rapat -rapat Koordinasi dan Surat Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100 persen				
		Jumlah Surat yang dikelola		1.600 surat				
4.1.4.1.13.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN MUNGKID	1.600 surat	7.500.000,00		1.700 surat	23.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		310 arsip			310 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		200 buku			200 buku	
4.1.4.1.13.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN MENDUT	1.090 surat	3.500.000,00	-	1.100 surat	3.500.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		1.000 arsip			1.000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		485 buku			485 buku	
4.1.4.1.13.3.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN SAWITAN	2.600 surat	4.000.000,00		2.600 surat	5.000.000,00
4.1.4.1.13.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan diselenggarakan	KECAMATAN MUNGKID	12 kali	40.000.000,00		12 kali	84.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		36 kali			36 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		12 kali			12 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	12 kali	30.000.000,00	-	12 kali	30.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			60 kali			60 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 kali			12 kali	
4.1.4.1.13.3.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah		KELURAHAN SAWITAN	32 rapat /perjalanan dinas	18.500.000,00		32 rapat /perjalanan dinas	21.000.000,00
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi luar daerah			12 orang /perjalanan dinas			12 orang /perjalanan dinas	
4.1.4.1.13.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah peralatan kantor yang dibeli		KECAMATAN MUNGKID	6 unit	40.000.000,00		6 unit	420.000.000,00
		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung yang dibeli			7 unit			8 unit	
4.1.4.1.13.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	1 paket	10.000.000,00	-	1 paket	10.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola			100 unit			100 unit	
4.1.4.1.13.3.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor		KELURAHAN SAWITAN	20 buah	20.000.000,00		25 buah	50.000.000,00
		Jumlah peralatan gedung kantor yang di beli			4 buah			1 buah	
4.1.4.1.13.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		KECAMATAN MUNGKID	100 unit	90.000.000,00		100 unit	1.500.000.000,00
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara			100 gedung			100 gedung	
4.1.4.1.13.2.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	200 M2	25.000.000,00	-	200 M2	25.000.000,00
		jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan			48 rekening bulan	
4.1.4.1.13.3.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		KELURAHAN SAWITAN	1 unit kantor	45.000.000,00		1 unit kantor	50.000.000,00
4.1.4.1.13.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		KECAMATAN MUNGKID	8 unit	90.000.000,00		8 unit	130.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	10 unit	30.000.000,00	-	10 unit	30.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			5 unit			5 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit			5 unit	
4.1.4.1.13.3.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara		KELURAHAN SAWITAN	8 peralatan	46.500.000,00		9 peralatan	49.000.000,00
		Jumlah rekening yang di bayarkan			4 rekening			4 rekening	
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			5 kendaraan			5 kendaraan	
4.1.4.1.13.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara		KECAMATAN MUNGKID	100 gedung	40.000.000,00		100 gedung	70.000.000,00
4.1.4.1.13.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	-	KECAMATAN MUNGKID	-	0,00	-	-	0,00	
4.1.4.1.13.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 dokumen	63.000.000,00			70.000.000,00
		Administrasi Keuangan tertib			100 bulan				
		Prosentase Ketercapaian pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah			100 persen				
4.1.4.1.13.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen yang dilaporkan	KECAMATAN MUNGKID	KECAMATAN MUNGKID	4 dokumen	25.000.000,00	-	4 dokumen	25.000.000,00
4.1.4.1.13.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KELURAHAN MENDUT	10 kegiatan	5.000.000,00		10 kegiatan	12.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			2 laporan			2 laporan	
4.1.4.1.13.3.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pelaporan keuangan yang dikelola		KELURAHAN SAWITAN	12 laporan	12.000.000,00		12 laporan	12.000.000,00
4.1.4.1.13.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dilaporkan	KECAMATAN MUNGKID	KECAMATAN MUNGKID	100 buku	5.000.000,00	-	100 buku	5.000.000,00
4.1.4.1.13.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	KECAMATAN MUNGKID	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	
4.1.4.1.13.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	KELURAHAN MENDUT	KELURAHAN MENDUT	12 dokumen	3.000.000,00	-	12 dokumen	3.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.3.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	KELURAHAN SAWITAN	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	
4.1.4.1.13.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	-	KECAMATAN MUNGKID	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	
4.1.4.1.13.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai sop dan sp			100 Persen	0,00			0,00
4.1.4.1.13.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	KECAMATAN MUNGKID	KECAMATAN MUNGKID	1.000 dokumen	0,00	-	1.000 dokumen	0,00
4.1.4.1.13.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			100 Persen	2.685.700.000,00			2.872.654.000,00
		Jumlah desa yng di fasilitasi hibah bansos			100 persen				
		Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepada desa			100 persen				
		Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan perangkat desa			100 persen				
4.1.4.1.13.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	-	KECAMATAN MUNGKID	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	
4.1.4.1.13.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-	KECAMATAN MUNGKID	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	
4.1.4.1.13.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah TP.PKK Desa/Kelurahan yang dibina	KECAMATAN MUNGKID	KECAMATAN MUNGKID	16 Desa/Kel	40.000.000,00	-	16 Desa/Kel	40.000.000,00
4.1.4.1.13.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	-	KECAMATAN MUNGKID	-	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	
4.1.4.1.13.2.43.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi Rakor Pembinaan dan penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan		KELURAHAN MENDUT	10 Kali	25.000.000,00		10 Kali	26.000.000,00
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan terbayar			- rupiah			- rupiah	
4.1.4.1.13.3.43.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Frekuensi rakor pembinaan dan penyuluhan pemerintahan dan pembangunan		KELURAHAN SAWITAN	12 kali	10.000.000,00		12 kali	11.500.000,00
		Jumlah laporan kependudukan			12 laporan			12 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.2.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan		KELURAHAN MENDUT	7 lembaga	1.195.138.000,00		7 lembaga	1.409.154.000,00
		Jumlah lingkungan yang menerima sarpras			7 lingkungan			7 lingkungan	
		Frekuwensi Musrenbang kelurahan			1 kali			1 kali	
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			20 proposal			20 proposal	
4.1.4.1.13.3.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi		KELURAHAN SAWITAN	6 proposal	1.119.674.000,00	pemberdayaan masyarakat	6 proposal	1.183.000.000,00
		Jumlah lingkungan yang menerima sarpras			6 lingkungan			6 lingkungan	
		Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan			4 lembaga			4 lembaga	
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang di susun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.13.2.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pokja yang di bina		KELURAHAN MENDUT	4 Pokja	35.000.000,00		4 Pokja	38.000.000,00
		Jumlah posyandu yang di bina			7 posyandu			7 posyandu	
		Jumlah anggota satlinmas yang aktif dan terlatih			25 orang			25 orang	
4.1.4.1.13.3.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah pembinaan satlinmas		KELURAHAN SAWITAN	3 kali	140.888.000,00	-	3 kali	45.000.000,00
		Frekwensi rapat kerja PKK			12 kali			12 kali	
		Jumlah posyandu aktif dan sub PPKBD			7 posyandu			7 posyandu	
TOTAL						3.288.700.000,00		TOTAL	5.443.154.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN MERTOYUDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					1.912.125.000,00			1.915.868.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					1.912.125.000,00			1.915.868.000,00
4.1.4.1.14.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	334.270.000,00			464.138.000,00
4.1.4.1.14.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola		KECAMATAN MERTOYUDAN	1.400 Surat	7.500.000,00	Biaya ATK,Cetak, Penggandaan	1.400 Surat	10.652.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			3 arsip			3 arsip	
4.1.4.1.14.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola		KELURAHAN SUMBEREJO	100 buah	3.157.000,00		100 buah	3.157.000,00
4.1.4.1.14.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	14 kali	40.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor,Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas	14 kali	46.855.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			226 Kali			226 Kali	
4.1.4.1.14.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		KELURAHAN SUMBEREJO	40 kali	8.000.000,00		52 kali	8.000.000,00
4.1.4.1.14.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	1 paket	40.000.000,00	Cetak,Penggandaan, Jilid	1 paket	151.356.000,00
		Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			1 paket			1 paket	
4.1.4.1.14.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapn gedung kantor yang dibeli	KELURAHAN SUMBEREJO	KELURAHAN SUMBEREJO	1 paket	10.000.000,00	-	1 paket	10.000.000,00
		Jumlah Pengadaan peralatan kantor yang dibeli			1 paket			1 paket	
4.1.4.1.14.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	1.864 m2	90.000.000,00	Alat Listrik dan Elektronik, alat kebersihan dan jasa kantor	1.864 m2	98.505.000,00
		Jumlah rekening yang dibayarkan			36 rekening			36 rekening	
4.1.4.1.14.2.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara		KELURAHAN SUMBEREJO	1 unit	33.000.000,00		1 unit	33.000.000,00
		Jumlah rekening yang dibayarkan			3 rekening			3 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.14.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	1 paket	72.613.000,00	Biaya Pemeliharaan alat kantor	1 paket	72.613.000,00
		jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 mobil			1 mobil	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 sepeda motor			7 sepeda motor	
4.1.4.1.14.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yg dipelihara	KELURAHAN SUMBEREJO	KELURAHAN SUMBEREJO	1 unit	30.000.000,00	-	1 unit	30.000.000,00
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			5 unit			5 unit	
4.1.4.1.14.2.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	-	KELURAHAN SUMBEREJO	-	0,00	-	-	0,00	
4.1.4.1.14.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	prosentase ketercapaian perencanaan,evaluasi kinerja OPD dan Keuangan perangkat daerah			14 kegiatan	59.455.000,00			58.863.000,00
4.1.4.1.14.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	22 kegiatan	37.955.000,00	Honor,rapat,Atk,cetak, penggandaan,perjalanan	22 kegiatan	37.955.000,00
		Jumlah laporan Keuangan yang tersusun			5 laporan			5 laporan	
4.1.4.1.14.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	KELURAHAN SUMBEREJO	-	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	
4.1.4.1.14.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	- dokumen	5.000.000,00	Honor,rapat,Atk,cetak, penggandaan,perjalanan	- dokumen	9.408.000,00
		Jumlah Dokumen Renja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.14.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan tahunan yg tersusun	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	7 dokumen	5.000.000,00	Honor,rapat,Mamin penggandaan,perjalanan	7 dokumen	5.000.000,00
4.1.4.1.14.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	-	KELURAHAN SUMBEREJO	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	
4.1.4.1.14.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun		KECAMATAN MERTOYUDAN	1 dokumen	5.000.000,00	mamin,atk,jilid penggandaan	1 dokumen	0,00
		Jumlah SP yang disusun			5 dokumen			5 dokumen	
4.1.4.1.14.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP			100 dokumen (KK,KTP,IMB, dsb)	26.000.000,00			16.000.000,00
4.1.4.1.14.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	jumlah dokumen yang terlayani	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	12.354 lembar	26.000.000,00	honor, mamin, penggandaan, perjalanan	12.354 lembar	16.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.14.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	persentase kegiatan yang dikoordinasikan dan persentase desa yang tertib administrasi			100 persen	1.492.400.000,00			1.376.867.000,00
4.1.4.1.14.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	13 Desa/Kel	40.567.000,00	Honor,rapat,Mamin penggandaan,perjalanan	13 Desa/Kel	40.567.000,00
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			11 orang			11 orang	
		Jumlah perangkat desa terpilih			4 orang			4 orang	
		Jumlah desa lunas PBB			1 Desa			1 Desa	
4.1.4.1.14.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi bantuan keuangan kepada desa	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	1 dokumen	45.695.000,00	Honor,rapat,Atk,cetak, penggandaan,perjalanan	1 dokumen	45.695.000,00
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun			130 proposal			130 proposal	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			6 desa			6 desa	
4.1.4.1.14.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Desa / Kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	13 Desa/Kel	75.000.000,00	Honor,rapat,Atk,cetak, penggandaan,perjalanan	13 Desa/Kel	79.105.000,00
		JumlahTP PKK Desa/ Kel yang di bina			1 Desa/Kel			1 Desa/Kel	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dlm lomba kebudayaan			75 orang			75 orang	
		Jumlah desa/kel layak anak			100 orang			100 orang	
		frekwensi penyelenggaraan festival seni dan budaya			6 Desa/Kel			6 Desa/Kel	
4.1.4.1.14.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satlinmas desa yang terbina	Kecamatan Mertoyudan	KECAMATAN MERTOYUDAN	13 Desa/Kel	55.000.000,00	Honor,rapat,Atk,cetak, penggandaan,perjalanan	13 Desa/Kel	93.000.000,00
		frekwensi koord forkompimcam kecamatan			12 Bulan			12 Bulan	
		jumlah PKL yang dibina			2 PKL			2 PKL	
		Jumlah pemuda/masyarakat dibina ttg narkoba			13 Desa/ kel			13 Desa/ kel	
		Jumlah paskibra yang terbina			45 orang			45 orang	
		Jumlah remaja yang dibina			13 orang			13 orang	
		Jumlah PGOT yang tertangani			1 orang			1 orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			12 desa/Kel			12 desa/kel	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.14.2.43.5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Jumlah laporan kependudukan		KELURAHAN SUMBEREJO	85 %	11.000.000,00		90 %	11.000.000,00
		Jumlah pokok pajak daerah PBB kelurahan yang terbayar			85 %			85 %	
4.1.4.1.14.2.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		KELURAHAN SUMBEREJO	1 paket	1.195.138.000,00	-	1 paket	1.037.500.000,00
		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi			3 proposal			3 proposal	
		Frekwensi Musrenbang Kelurahan			1 kali			1 kali	
4.1.4.1.14.2.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pembinaan ketertiban lingkungan dan satlimas	Kelurahan	KELURAHAN SUMBEREJO	60 orang	70.000.000,00	Terlaksananya kegiatan di Kelurahan Sumberrejo	60 orang	70.000.000,00
		2. Pembinaan posyandu dan posbindu			10 kelompok			10 kelompok	
		3. Pembinaan kelompok petani			6 kelompok			6 kelompok	
		4. Pembinaan kader PPKBD			30 orang			30 orang	
		5. Pembinaan organisasi perempuan			1 kelompok			1 kelompok	
		6. Pengelolaan kelompok bank sampah			10 kelompok			10 kelompok	
		7. Pembinaan organisasi kelembagaan			10 kelompok			10 kelompok	
TOTAL						1.912.125.000,00	TOTAL		1.915.868.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN TEMPURAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				617.500.000,00			913.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				617.500.000,00			913.000.000,00
4.1.4.1.15.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	262.500.000,00			290.000.000,00
4.1.4.1.15.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	1.600 surat	7.500.000,00	1.600 surat	35.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			10.000 jenis		10.000 jenis	
4.1.4.1.15.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rapat yang diselenggarakan	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	80 kali	40.000.000,00	90 kali	55.000.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana			150 OH		150 OH	
4.1.4.1.15.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	2 paket	50.000.000,00	- paket	0,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			1 paket		- paket	
		Jumlah paket pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas			1 Paket		- Paket	
		Jumlah paket pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan			1 paket		- paket	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.15.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	1.000 m2	70.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	1.000 m2	95.000.000,00
		Jumlah Rekening Air, Listrik, Surat Kabar, Telepon dan Internet			6 rekening			6 rekening	
4.1.4.1.15.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	10 buah	75.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	10 buah	105.000.000,00
4.1.4.1.15.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket gedung yang direhab	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	- unit	20.000.000,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	- unit	0,00
4.1.4.1.15.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			100 %	40.000.000,00			56.000.000,00
4.1.4.1.15.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	15 kegiatan	25.000.000,00	Menunjang tertib administrasi keuangan perangkat daerah	15 kegiatan	26.000.000,00
4.1.4.1.15.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA Perangkat Daerah yang disusun	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	- jenis	5.000.000,00	Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	- jenis	10.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun			2 jenis			2 jenis	
4.1.4.1.15.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	4 dokumen	5.000.000,00	Meningkatnya tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 dokumen	10.000.000,00
		Jumlahdokumen monitoring,evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlahdokumen pelaporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.15.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang disusun	KECAMATAN TEMPURAN	KECAMATAN TEMPURAN	10 SOP	5.000.000,00	Meningkatnya kualitas pelayanan	10 SOP	10.000.000,00
		Jumlah dokumen Standar Pelayanan (SP) yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.15.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			90 %	40.000.000,00			50.000.000,00
4.1.4.1.15.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani		KECAMATAN TEMPURAN	7.500 dokumen	40.000.000,00		7.500 dokumen	50.000.000,00
4.1.4.1.15.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100 %	275.000.000,00			517.000.000,00
4.1.4.1.15.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan Kepala Desa		KECAMATAN TEMPURAN	- desa	70.000.000,00		- desa	147.000.000,00
		Jumlah Perangkat Desa Yang dibina			180 orang			180 orang	
		Jumlah Perangkat Desa Terisi			2 orang			2 orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB			15 desa			15 desa	
		Jumlah Desa yang dibina administrasinya (APBDesa,RAPBDes,LKPPD/LPPD dan Peraturan Desa)			15 desa			15 desa	
		Jumlah desa yang dibina pengelolaan keuangannya			15 Desa			15 Desa	
4.1.4.1.15.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang difasilitasi hibah/bansos		KECAMATAN TEMPURAN	15 desa	55.000.000,00		15 desa	95.000.000,00
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			6 Lembaga			6 Lembaga	
		Jumlah desa yang dilakukan evaluasi / lomba desa			15 desa			15 desa	
		Jumlah RKPDesa yang tersusun			30 dokumen			30 dokumen	
		Jumlah desa yang difasilitasi inovasi desa			15 desa			15 desa	
		Jumlah Profil Desa berstatus lengkap			15 desa			15 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.15.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Tim Penanggulangan di desa yang difasilitasi		KECAMATAN TEMPURAN	15 desa	90.000.000,00		15 desa	180.000.000,00
		Jumlah peserta MTQ dan STQ yang diseleksi			100 orang			100 orang	
		Jumlah Grup Rebana yang diseleksi			15 grup			15 grup	
		Jumlah desa yang dibina seni budaya dan olahraga			15 desa			15 desa	
		Jumlah desa layak anak			15 desa			15 desa	
		Jumlah TP PKK desa yang dibina			15 desa			15 desa	
4.1.4.1.15.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah koordinasi forum pimpinan kecamatan		KECAMATAN TEMPURAN	12 kali	60.000.000,00		12 kali	95.000.000,00
		Jumlah Satlinmas desa yang dibina			15 desa			15 desa	
		Jumlah peserta yang dibina wawasan kebangsaan			50 orang			50 orang	
		Jumlah peserta sosialisasi penegakkan perda			40 orang			40 orang	
TOTAL						617.500.000,00	TOTAL		913.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN KAJORAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				592.500.000,00			837.600.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				592.500.000,00			837.600.000,00
4.1.4.1.16.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	333.500.000,00			418.000.000,00
4.1.4.1.16.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN KAJORAN	1.400 surat	8.500.000,00		1.400 surat	17.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2.000 arsip			2.000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		400 bahan pustaka			429 bahan pustaka	
4.1.4.1.16.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	KECAMATAN KAJORAN	2 kali	50.000.000,00		2 kali	51.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		36 kali			36 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		160 kali			160 kali	
4.1.4.1.16.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN KAJORAN	2 paket	40.000.000,00		1 paket	75.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
		Jumlah aset yang dikelola		817 unit			817 unit	
4.1.4.1.16.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN KAJORAN	5.410 m2	104.000.000,00		5.410 m2	104.000.000,00
		Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun		36 rekening bulan			36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.16.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN KAJORAN	15 unit	71.000.000,00		15 unit	71.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		91 unit			96 unit	
		Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara		1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan roda dua yang dipelihara		7 unit			7 unit	
4.1.4.1.16.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN KAJORAN	1 paket	60.000.000,00		1 paket	100.000.000,00
4.1.4.1.16.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Laporan Capaian Kinerja SKPD		100 %	38.000.000,00			42.500.000,00
4.1.4.1.16.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN KAJORAN	12 kegiatan	23.000.000,00		12 kegiatan	23.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		19 dokumen			19 dokumen	
4.1.4.1.16.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	6.500.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.16.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	3 dokumen	5.000.000,00		3 dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun		8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.16.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN KAJORAN	1 dokumen	5.000.000,00		1 dokumen	3.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.16.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP		100 %	11.000.000,00			11.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.16.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	KECAMATAN KAJORAN	20 Dokumen	11.000.000,00		20 Dokumen	11.000.000,00
4.1.4.1.16.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan dan Persentase Desa yang tertib administrasi		100 %	210.000.000,00			366.100.000,00
4.1.4.1.16.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan	KECAMATAN KAJORAN	29 desa	70.000.000,00		29 desa	80.000.000,00
		Jumlah desa terfasilitasi pemilihan Kepala Desa		- desa			- desa	
		Jumlah jabatan perangkat desa yang terisi		5 jabatan			5 jabatan	
		Jumlah desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD		29 desa			- desa	
		Jumlah desa yang lunas PBB		29 desa			29 desa	
4.1.4.1.16.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah RKPDesa	KECAMATAN KAJORAN	29 dokumen	40.000.000,00		29 dokumen	78.600.000,00
		Jumlah dokumen RPTK		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah desa yang difasilitasi hibah bansos		29 desa			29 desa	
		Jumlah desa yang dinilai / dievaluasi		1 desa			1 desa	
		Jumlah desa yang menyelesaikan profil desa		29 desa			29 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.16.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN KAJORAN	29 desa	60.000.000,00		29 desa	134.500.000,00	
		Jumlah TP. PKK Desa yang dibina		29 desa			29 desa		
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba MTQ dan FASI		45 orang			45 orang		
		Jumlah peserta yang dikirim dalam Festifal Rebana Tk. Kabupaten		60 orang			60 orang		
		Jumlah UMKM yang diberdayakan		29 unit usaha			29 unit usaha		
		Jumlah kelompok seni budaya dan olah raga yang dibina		5 kelompok			5 kelompok		
4.1.4.1.16.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan linmas desa yang dibina	KECAMATAN KAJORAN	29 desa	40.000.000,00		29 desa	73.000.000,00	
		Jumlah desa yang berpartisipasi dalam kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan di tingkat kecamatann		29 desa			29 desa		
		Jumlah desa yang tersosialisasi peraturan perundang-undangan		29 desa			29 desa		
		Frekuensi koordinasi forum pimpinan kecamatan		12 kali			12 kali		
TOTAL					592.500.000,00		TOTAL	837.600.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN KALIANGKRIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				493.824.000,00			952.863.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				493.824.000,00			952.863.000,00
4.1.4.1.17.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 indeks	250.000.000,00			258.500.000,00
4.1.4.1.17.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN KALIANGKRIK	5,60 surat	7.500.000,00		5,60 surat	6.000.000,00
		Pengelolaan Kearsipan		10 Jumlah arsip yang di kelola			10 Jumlah arsip yang di kelola	
4.1.4.1.17.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	KECAMATAN KALIANGKRIK	25 OH	40.000.000,00		25 OH	65.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		150 OH			150 OH	
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan		25 kali			25 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		25 OH			25 OH	
4.1.4.1.17.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN KALIANGKRIK	1 Paket	40.000.000,00		1 Paket	25.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Paket			1 Paket	
		Jumlah aset yang di kelola		300 buah			300 buah	
4.1.4.1.17.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung yang dipelihara	KECAMATAN KALIANGKRIK	4,50 M2.	75.000.000,00	geser ke Pemeliharaan Gedung Kantor	4,50 M2.	75.000.000,00
		Jumlah rumah dinas yang dipelihara		1 buah			1 buah	
		Jumlah rekening telpon ,listrik,air dan surat kabar		4 rekening			4 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.17.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara		KECAMATAN KALIANGKRIK	1 unit	80.000.000,00		110 unit	80.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			8 unit			8 unit	
4.1.4.1.17.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		KECAMATAN KALIANGKRIK	1 Paket	0,00	geser ke Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	0,00
4.1.4.1.17.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN KALIANGKRIK	KECAMATAN KALIANGKRIK	12 kali	7.500.000,00	-	12 kali	7.500.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			- orang			- orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			13 orang			13 orang	
4.1.4.1.17.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 indeks	40.080.000,00			49.363.000,00
4.1.4.1.17.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KECAMATAN KALIANGKRIK	20 kegiatan	25.080.000,00		20 kegiatan	25.080.000,00
		Jumlahlaporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	
4.1.4.1.17.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun		KECAMATAN KALIANGKRIK	1 dokumen	5.000.000,00		1 dokumen	14.283.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.17.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		KECAMATAN KALIANGKRIK	5 dokumen	5.000.000,00		5 dokumen	5.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan pelaporan yang tersusun			6 dokumen			6 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.17.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP dan SP yang disusun	KECAMATAN KALIANGKRIK	KECAMATAN KALIANGKRIK	2 Dokumen	5.000.000,00	-	2 Dokumen	5.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian Intern yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.17.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	15.000.000,00			18.000.000,00
4.1.4.1.17.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan		KECAMATAN KALIANGKRIK	20 desa	15.000.000,00		20 desa	18.000.000,00
4.1.4.1.17.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	"Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan"			100 indeks	188.744.000,00			627.000.000,00
4.1.4.1.17.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		KECAMATAN KALIANGKRIK	20 desa	50.000.000,00		20 desa	40.000.000,00
		Jumlah pemilihan kepala desa terpilih			- desa			- desa	
		Jumlah pengisian perangkat desa terisi			20 desa			20 desa	
		Jumlah BPD terisi			20 desa			20 desa	
		Jumlah desa lunas PBB			20 desa			20 desa	
4.1.4.1.17.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan		KECAMATAN KALIANGKRIK	1 dokumen	38.744.000,00		1 dokumen	382.000.000,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi hibah bansos			20 desa			20 desa	
		Jumlah desa yang menyelesaikan profil desa			20 desa			20 desa	
		Jumlah desa yang terbina administrasi			20 desa			20 desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.17.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN KALIANGKRIK	20 desa	60.000.000,00		20 desa	145.000.000,00
		Jumlah TP PKK yang dibina		20 desa			20 desa	
		Jumlah peserta yang di latih dan dikirimkan dalam lomba MTQ/FASI		20 desa			20 desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba rebana		3 kelompok			3 kelompok	
		Jumlah desa layak anak		20 desa			20 desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festifal seni dan budaya		20 kali			20 kali	
4.1.4.1.17.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekfuensi koordinasi forum pimpinan kecamatan	KECAMATAN KALIANGKRIK	12 kali	40.000.000,00		12 kali	60.000.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		20 desa			20 desa	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina		20 orang/desa			20 orang/desa	
		Jumlah penegakan perda/perbub atau jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan		4 peraturan			4 peraturan	
TOTAL					493.824.000,00	TOTAL	952.863.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN BANDONGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					535.000.000,00			747.500.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					535.000.000,00			747.500.000,00
4.1.4.1.18.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	285.000.000,00			489.000.000,00
4.1.4.1.18.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	2.500 surat	7.500.000,00	Menunjang Tertib administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500 surat	27.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			400 arsip			500 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			600 buku			630 buku	
4.1.4.1.18.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	50 rapat koordinasi	15.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	50 rapat koordinasi	40.000.000,00
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			500 perjalanan dinas dalam daerah			500 perjalanan dinas dalam daerah	
		jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 layanan			12 layanan	
4.1.4.1.18.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	2 paket	71.840.000,00	Sarana prasarana yang memadai dan menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	2 paket	150.000.000,00
		jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket			2 paket	
		jumlah aset yang dikelola			650 barang			700 barang	
4.1.4.1.18.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	300 m2	90.000.000,00	Kondisi gedung kantor yang layak	300 m2	137.000.000,00
		jumlah rekening / bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening			48 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.18.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	10 unit	69.010.000,00	Sarana prasarana kantor dalam kondisi layak	11 unit	15.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			6 unit			8 unit	
		jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.18.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	1 paket	24.150.000,00	tersedianya gedung kantor yang memadai	1 paket	0,00
4.1.4.1.18.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	12 kali/kegiatan	7.500.000,00	Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan pembangunan	12 kali/kegiatan	120.000.000,00
		jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang			2 orang	
		jumlah ASN yang terfasilitasi Penilaian Kinerjanya			15 orang			17 orang	
4.1.4.1.18.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah			100 %	50.000.000,00			60.000.000,00
4.1.4.1.18.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	15 kegiatan	35.000.000,00	Menunjang tertib administrasi keuangan perangkat daerah	15 kegiatan	35.000.000,00
		jumlah laporan keuangan yang tersusun			28 laporan			28 laporan	
4.1.4.1.18.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	- dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	- dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.18.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	4 dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 dokumen	5.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumah Dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.18.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	jumlah dokumen standar operasional prosedur yang tersusun	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	58 SOP	5.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	58 SOP	10.000.000,00
		jumlah dokumen standar pelayanan yang tersusun			10 SP			12 SP	
		Jumlah dokumen daftar informasi publik			12 laporan			12 laporan	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang (SPIP) disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			2 Dokumen			2 Dokumen	
4.1.4.1.18.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	35.000.000,00			12.500.000,00
4.1.4.1.18.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani	Sekretariat	KECAMATAN BANDONGAN	7.500 layanan	35.000.000,00	Menunjang kelancaran pelayanan Kecamatan	7.500 layanan	12.500.000,00
4.1.4.1.18.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100 %	165.000.000,00			186.000.000,00
4.1.4.1.18.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Seksi Tata Pemerintahan	KECAMATAN BANDONGAN	14 Desa	30.000.000,00	Menunjang peningkatan kualitas pelayanan desa dan tertib administrasi desa	14 Desa	30.000.000,00
		jumlah anggota BPD yang terbina			- orang			- orang	
		jumlah desa lunas PBB			14 desa			14 desa	
		jumlah perangkat desa yang terbina			28 orang			28 orang	
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			- orang			- orang	
		Jumlah perangkat desa terisi			- orang			- orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.18.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	KECAMATAN BANDONGAN	1 dokumen	35.000.000,00	Fasilitasi usulan desa dan penyediaan data desa	1 dokumen	33.000.000,00
		jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			14 desa			14 desa	
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			16 desa			16 desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			14 lembaga			14 lembaga	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			14 desa			14 desa	
4.1.4.1.18.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	Seksi Kesejahteraan Rakyat	KECAMATAN BANDONGAN	14 desa	60.000.000,00	Peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok di masyarakat	14 desa	61.000.000,00
		jumlah TP PKK Desa yang dibina			14 TP PKK desa			14 TP PKK desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			3 peserta			3 peserta	
		jumlah desa layak anak			1 desa			1 desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			2 kali			2 kali	
4.1.4.1.18.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	jumlah satlinmas desa yang terbina	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	KECAMATAN BANDONGAN	14 satuan	40.000.000,00	Peningkatan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Bandongan	14 satuan	62.000.000,00
		jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasi			5 peraturan			5 peraturan	
		Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali	
		jumlah paskibra yang terbina			40 orang			40 orang	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			14 desa			14 desa	
TOTAL						535.000.000,00	TOTAL		747.500.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN CANDIMULYO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					527.000.000,00		560.532.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					527.000.000,00		560.532.000,00
4.1.4.1.19.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	255.000.000,00		324.932.000,00
4.1.4.1.19.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN CANDIMULYO	KECAMATAN CANDIMULYO	1.200 surat	7.500.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Daerah	1.200 surat 8.000.000,00
4.1.4.1.19.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	-		-	40.000.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	-	40.000.000,00
4.1.4.1.19.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		KECAMATAN CANDIMULYO	2 paket	40.000.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	2 paket
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			2 paket			2 paket
4.1.4.1.19.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		KECAMATAN CANDIMULYO	2.117 M2	70.000.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	2.117 M2
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			48 rekening bulan			48 rekening bulan
								104.500.000,00
								63.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.19.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		KECAMATAN CANDIMULYO	27 peralatan kantor	80.000.000,00	Terjaganya kondisi peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang layak	27 peralatan kantor	84.432.000,00
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.19.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN CANDIMULYO	KECAMATAN CANDIMULYO	1 paket	10.000.000,00	-	2 paket	10.000.000,00
4.1.4.1.19.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN CANDIMULYO	KECAMATAN CANDIMULYO	12 kali	7.500.000,00	-	12 kali	7.500.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian Angka Kreditnya			- -			- -	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			22 ASN			22 ASN	
4.1.4.1.19.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	37.500.000,00			45.000.000,00
4.1.4.1.19.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KECAMATAN CANDIMULYO	16 kegiatan	22.500.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16 kegiatan	22.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 laporan			6 laporan	
4.1.4.1.19.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun		KECAMATAN CANDIMULYO	- dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	- dokumen	5.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.1.4.1.19.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun		KECAMATAN CANDIMULYO	4 dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 dokumen	7.500.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
4.1.4.1.19.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun		KECAMATAN CANDIMULYO	1 dokumen	5.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	1 dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			- dokumen			- dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.19.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	35.000.000,00			12.500.000,00
4.1.4.1.19.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani		KECAMATAN CANDIMULYO	7.000 dokumen	35.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	6.000 dokumen	12.500.000,00
4.1.4.1.19.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			100 Persen	199.500.000,00			178.100.000,00
4.1.4.1.19.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		KECAMATAN CANDIMULYO	19 desa	60.000.000,00		19 desa	49.500.000,00
		Jumlah Kepala Desa Terpilih			- desa			- desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			229 perangkat desa			231 perangkat desa	
		Jumlah desa lunas PBB			19 desa			19 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina			229 Perangkat Desa			231 Perangkat Desa	
4.1.4.1.19.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	JUmlah desa yang difasilitasi hibah/bansos		KECAMATAN CANDIMULYO	19 desa	44.500.000,00		19 desa	45.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			19 dokumen			19 dokumen	
4.1.4.1.19.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanggulangan kemiskinan		KECAMATAN CANDIMULYO	19 dokumen	60.000.000,00		19 desa	60.750.000,00
		Jumlah TP. PKK Desa/Kelurahan yang dibina			19 TP. PKK Desa			19 TP. PKK Desa	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			45 peserta			45 peserta	
		Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak			1 desa			1 desa	
4.1.4.1.19.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koodinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan		KECAMATAN CANDIMULYO	60 kali	35.000.000,00		60 kali	22.850.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			1 desa			1 desa	
TOTAL						527.000.000,00	TOTAL	560.532.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN PAKIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				556.500.000,00			790.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				556.500.000,00			790.000.000,00
4.1.4.1.20.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	237.500.000,00			325.000.000,00
		Jumlah Surat yang dikelola		2.100 buah				
		Jumlah Rekening Listrik, Telepon,Air dan Surat Kabar		4 Rekening				
4.1.4.1.20.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN PAKIS	2.200 buah	7.500.000,00		2.400 buah	15.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2 jenis			2 jenis	
4.1.4.1.20.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	KECAMATAN PAKIS	4 OH	40.000.000,00		4 OH	85.000.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana		180 OH			180 OH	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		30 kali			30 kali	
		Jumlah Layanan Humas dan protokol yang dilaksanakan		12 kali			12 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.20.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor		KECAMATAN PAKIS	- Paket	40.000.000,00		- Paket	95.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			- Paket			- Paket	
		Jumlah aset yang dikelola			2 jenis (inventaris tetap dan tidak tetap)			2 jenis (inventaris tetap dan tidak tetap)	
4.1.4.1.20.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Rekening Listrik, Telepon,Air dan Surat Kabar		KECAMATAN PAKIS	4 Rekening	58.000.000,00		4 Rekening	35.000.000,00
		Luas gedung kantor yang dipelihara			1.000 m			1.000 m	
4.1.4.1.20.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara		KECAMATAN PAKIS	13 buah	72.000.000,00		15 buah	70.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara			20 buah			20 buah	
		Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara			1 buah			1 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			6 buah			6 buah	
4.1.4.1.20.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		KECAMATAN PAKIS	1 Paket	20.000.000,00		1 Paket	25.000.000,00
4.1.4.1.20.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.			8 dokumen	34.000.000,00			97.000.000,00
4.1.4.1.20.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KECAMATAN PAKIS	16 kegiatan	19.000.000,00		16 kegiatan	20.000.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
4.1.4.1.20.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun		KECAMATAN PAKIS	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	40.000.000,00
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			7 dokumen			7 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.20.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	3 dokumen	5.000.000,00		3 dokumen	22.000.000,00
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		8 dokumen			8 dokumen	
		Jumah Dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		- dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.20.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN PAKIS	16 dokumen	5.000.000,00		16 dokumen	15.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		16 dokumen			16 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian Intern yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Dokumen data perangkat daerah yang tersusun		23 dokumen			23 dokumen	
4.1.4.1.20.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP		100 %	79.800.000,00			70.000.000,00
4.1.4.1.20.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Layanan Paten	KECAMATAN PAKIS	20 desa	79.800.000,00	-	20 desa	70.000.000,00
4.1.4.1.20.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pesentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.		100 %	205.200.000,00			298.000.000,00
4.1.4.1.20.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN PAKIS	20 desa	70.000.000,00		20 desa	120.000.000,00
		Jumlah Pemilihan Kepala Desa terpilih		- desa			- desa	
		Jumlah Pengisian Perangkat Desa terisi		- des			20 des	
		Jumlah BPD terisi		- desa			- desa	
		Jumlah Desa Lunas PBB		20 desa			20 desa	
		Jumlah Perangkat Desa yang terbina		251 perangkat			251 perangkat	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.20.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan		KECAMATAN PAKIS	1 dokumen	35.000.000,00		1 dokumen	24.000.000,00
		Jumlah Desa yang terfasilitasi Hibah/Bansos			20 desa			20 desa	
		Jumlah Desa yang menyelesaikan Profil Desa			20 desa			20 desa	
		Jumlah Desa yang terbina administrasinya			20 desa			20 desa	
4.1.4.1.20.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Peserta Lomba Rebana dan dikirim dalam lomba Rebana ke Kabupaten		KECAMATAN PAKIS	20 kelompok	60.200.000,00	-	20 kelompok	122.000.000,00
		Jumlah desa terfasilitasi Penanggulangan kemiskinan			20 desa			20 desa	
		Jumlah TP PKK Desa/kelurahan yang dibina			20 desa			20 desa	
		Jumlah Peserta yang dilatih dan dikirim dalam lomba MTQ/Fasi			50 peserta			50 peserta	
		Jumlah Desa Layak anak			20 desa			20 desa	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			1 kegiatan			1 kegiatan	
4.1.4.1.20.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah Satuan Linmas Desa/Kelurahan		KECAMATAN PAKIS	20 desa	40.000.000,00		20 desa	32.000.000,00
		Jumlah Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan			2 peraturan			2 peraturan	
		Frekwensi koordinasi forum pimpinan kecamatan			12 kali			12 kali	
TOTAL						556.500.000,00		TOTAL	790.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN NGABLAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				557.000.000,00			801.570.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				557.000.000,00			801.570.000,00
4.1.4.1.21.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	257.000.000,00			305.000.000,00
4.1.4.1.21.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN NGABLAK	12.500 surat	7.500.000,00		12.500 surat	20.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2 Jenis			2 Jenis	
		Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola		1 buku			2 buku	
4.1.4.1.21.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	KECAMATAN NGABLAK	80 kali	40.000.000,00		80 kali	50.000.000,00
		Jumlah Layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		2 layanan			2 layanan	
		Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan		12 kali			12 kali	
4.1.4.1.21.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN NGABLAK	2 buah	40.000.000,00	geser ke Pemeliharaan Gedung Kantor	2 buah	53.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		2 paket			2 paket	
		Jumlah paket pengadaan Mebeler		1 paket			1 paket	
4.1.4.1.21.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGABLAK	3 gedung	60.000.000,00	geser dari pengadaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	3 gedung	60.000.000,00
		Penyediaan jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik		4 Rekening			4 Rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.21.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN NGABLAK	10 unit	77.000.000,00	geser dari pengadaan dan pengelolaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat	10 unit	77.000.000,00
		Jumlah Perlengkapan yang dipelihara		3 buah			3 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		1 buah			1 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara		7 buah			7 buah	
		Jumlah mebeler yang di pelihara		1 paket			1 paket	
4.1.4.1.21.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN NGABLAK	3 paket	25.000.000,00		3 paket	25.000.000,00
4.1.4.1.21.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	KECAMATAN NGABLAK	1 Orang	7.500.000,00		1 orang	20.000.000,00
		jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya		22 Orang			22 orang	
		Frekwensi pembinaan ASN		12 kali			12 kali	
4.1.4.1.21.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daaerah		100 %	40.000.000,00			161.570.000,00
4.1.4.1.21.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN NGABLAK	12 Bulan	25.000.000,00		12 Bulan	25.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		12 bulan			12 bulan	
4.1.4.1.21.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra perangkat daerah yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK	1 Dokumen	5.000.000,00		1 Dokumen	35.000.000,00
		Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		jumlah dokumen rencana kerja operasional yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.21.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK	3 Dokumen	5.000.000,00		3 Dokumen	61.570.000,00
		Jumlah dokumen monitoring ,evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun		2 Dokumen			2 Dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
4.1.4.1.21.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP dan SP yang disusun	KECAMATAN NGABLAK	16 Dokumen	5.000.000,00		16 Dokumen	40.000.000,00
		Jumlah standar pelayanan yang tersusun		16 Dokumen			16 Dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi Publik		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		21 Dokumen			21 Dokumen	
4.1.4.1.21.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP		100 %	35.000.000,00			40.000.000,00
4.1.4.1.21.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	- Jumlah Dokumen yang terlayani	KECAMATAN NGABLAK	16 Desa	35.000.000,00		16 Desa	40.000.000,00
4.1.4.1.21.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Kecamatan Pemerintahan kecamatan		16 desa	225.000.000,00			295.000.000,00
4.1.4.1.21.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yg terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN NGABLAK	16 desa	60.000.000,00		16 desa	100.000.000,00
		Jumlah pemilihan kepala desa yang terpilih		- Desa			- Desa	
		Jumlah Pengisian perangkat desa terisi		16 desa			16 desa	
		Jumlah Perangkat desa yang terbina		16 Orang			16 Orang	
		Jumlah Desa Lunas PBB		16 Desa			16 Desa	
		Jumlah BPD yang terisi		- Desa			- Desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.21.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	KECAMATAN NGABLAK		16 Dokumen	55.000.000,00		16 Dokumen	75.000.000,00
		jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa			16 Desa			16 Desa	
		jumlah dokumen profil desa yang tersusun			16 dokumen			16 dokumen	
		jumlah desa yang terbina administrasinya			16 desa			16 desa	
		jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina			16 lembaga			16 lembaga	
		Jumlah peserta musrenbangkec			115 orang			115 orang	
4.1.4.1.21.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirim dalam lomba kebudayaan kebudayaan	KECAMATAN NGABLAK		16 kelompok	75.000.000,00	-	16 kelompok	90.000.000,00
		jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan			16 Desa			16 Desa	
		Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibina			60 orang			60 orang	
		Jumlah Desa layak anak			16 Desa			16 Desa	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya			1 kegiatan			1 kegiatan	
4.1.4.1.21.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan Linmas Desa yang terbina	KECAMATAN NGABLAK		16 Desa	35.000.000,00		16 Desa	30.000.000,00
		Jumlah peraturan perundang undangan yang dosialisasikan			2 Peraturan			2 Peraturan	
		Jumlah Frekwensi koordinasi forum pimpinan kecamatan			12 Bulan			12 Bulan	
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana			16 Desa			16 Desa	
		Jumlah Paskibra yang terbina			55 Orang			55 orang	
TOTAL					557.000.000,00		TOTAL	801.570.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN GRABAG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				625.500.000,00			1.072.918.800,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				625.500.000,00			1.072.918.800,00
4.1.4.1.22.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 indeks	306.500.000,00			414.500.000,00
4.1.4.1.22.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN GRABAG	2.000 surat	8.500.000,00		2.000 surat	12.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		2.000 arsip			2.000 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		23 bahan pustaka			23 bahan pustaka	
4.1.4.1.22.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	KECAMATAN GRABAG	22 kali	50.000.000,00		22 kali	80.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		50 kali			50 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		150 kali			150 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		25 kali			25 kali	
4.1.4.1.22.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN GRABAG	1 indeks	40.000.000,00		1 indeks	85.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 indeks			1 indeks	
		Jumlah aset yang dikelola		- indeks			- indeks	
4.1.4.1.22.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah rekening telepon, listrik, surat kabar	KECAMATAN GRABAG	4 indeks	72.000.000,00		4 indeks	79.000.000,00
		Luas gedung kantor yang dipelihara		4.192 m2			4.192 m2	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.22.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		KECAMATAN GRABAG	1 indeks	98.500.000,00		1 indeks	98.500.000,00
		Jumlah peralatan yang dipelihara			1 indeks			1 indeks	
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			1 indeks			1 indeks	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 indeks			7 indeks	
4.1.4.1.22.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		KECAMATAN GRABAG	1 indeks	30.000.000,00		1 indeks	50.000.000,00
4.1.4.1.22.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina		KECAMATAN GRABAG	22 indeks	7.500.000,00		22 indeks	10.000.000,00
4.1.4.1.22.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 indeks	34.000.000,00			44.000.000,00
4.1.4.1.22.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KECAMATAN GRABAG	12 indeks	19.000.000,00		13 indeks	19.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			6 indeks			6 indeks	
4.1.4.1.22.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun		KECAMATAN GRABAG	- indeks	5.000.000,00		- indeks	9.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun			1 indeks			1 indeks	
4.1.4.1.22.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		KECAMATAN GRABAG	3 indeks	5.000.000,00		3 indeks	11.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 indeks			8 indeks	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 indeks			12 indeks	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- indeks			- indeks	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.22.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN GRABAG	- indeks	5.000.000,00	-	1 indeks	5.000.000,00
		Jumlah Daftar Informasi Publik			- indeks			1 indeks	
		Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun			- indeks			1 indeks	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			- indeks			1 indeks	
4.1.4.1.22.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 indeks	45.000.000,00			45.000.000,00
4.1.4.1.22.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani		KECAMATAN GRABAG	5 dokumen	45.000.000,00		5 dokumen	45.000.000,00
4.1.4.1.22.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan"			100 indeks	240.000.000,00			569.418.800,00
4.1.4.1.22.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		KECAMATAN GRABAG	28 indeks	70.000.000,00		28 indeks	272.000.000,00
		Jumlah pemilihan kepala desa terpilih			- indeks			- indeks	
		Jumlah pengisian perangkat desa terisi			100 indeks			100 indeks	
		Jumlah BPD terisi			- indeks			- indeks	
		Jumlah desa lunas PBB			28 indeks			28 indeks	
4.1.4.1.22.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan		KECAMATAN GRABAG	29 indeks	60.000.000,00		29 indeks	64.418.800,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi hibah bansos			28 indeks			28 indeks	
		Jumlah Desa yang menyelesaikan profil desa			28 indeks			28 indeks	
		Jumlah desa yang terbina administrasi			28 indeks			28 indeks	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.22.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan		KECAMATAN GRABAG	28 indeks	60.000.000,00		28 indeks	178.500.000,00
		Jumlah TP PKK yang dibina			28 indeks			28 indeks	
		Jumlah peserta yang di latih dan dikirimkan dalam lomba MTQ/FASI			28 indeks			28 indeks	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba rebana			2 indeks			2 indeks	
		Jumlah desa layak anak			6 indeks			6 indeks	
		Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga			3 indeks			3 indeks	
		Fasilitasi Pemberdayaan UMKM			28 indeks			28 indeks	
4.1.4.1.22.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Terbinanya Linmas Desa se Kecamatan		KECAMATAN GRABAG	28 indeks	50.000.000,00		28 indeks	54.500.000,00
		Pemahaman wawasan kebangsaan			1 indeks			1 indeks	
		Tersosialisasikannya peraturan perundang indangan			2 indeks			2 indeks	
		Terlaksananya Patroli Terpadu/Patroli Wilayah			100 indeks			100 indeks	
TOTAL						625.500.000,00	TOTAL	1.072.918.800,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				680.250.000,00			1.196.450.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				680.250.000,00			1.196.450.000,00
4.1.4.1.23.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	375.000.000,00			800.050.000,00
4.1.4.1.23.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	KECAMATAN TEGALREJO	6.000 surat	7.500.000,00		6.000 surat	16.850.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		1.300 arsip			1.300 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		243 buku			243 buku	
4.1.4.1.23.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	KECAMATAN TEGALREJO	42 kali	40.000.000,00		42 kali	69.300.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		25 kali rapat			25 kali rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		150 kali			150 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		12 kali layanan			12 kali layanan	
4.1.4.1.23.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN TEGALREJO	1 paket	50.000.000,00		1 paket	55.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
4.1.4.1.23.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	KECAMATAN TEGALREJO	1.000 m2	110.000.000,00		1.000 m2	136.100.000,00
		Luas rumah dinas yang dipelihara		148 m2			148 m2	
		Jumlah rekening air, listrik, telpon, surat kabar/majalah		48 rekening			48 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.23.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	KECAMATAN TEGALREJO	26 unit	90.000.000,00		26 unit	110.000.000,00
		jumlah perlengkapan yang dipelihara		11 unit			11 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara		1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara		7 unit			7 unit	
4.1.4.1.23.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KECAMATAN TEGALREJO	- Paket	70.000.000,00		1 Paket	350.000.000,00
4.1.4.1.23.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah tenaga honorer/kontrak	KECAMATAN TEGALREJO	6 orang	7.500.000,00		6 orang	62.800.000,00
		Frekuensi pembinaan ASN		12 kali			12 kali	
		Jumlah ASN yang dibina		23 orang			25 orang	
4.1.4.1.23.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	40.250.000,00			64.075.000,00
4.1.4.1.23.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	KECAMATAN TEGALREJO	16 Kegiatan	25.250.000,00		16 Kegiatan	27.775.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		6 laporan			6 laporan	
4.1.4.1.23.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	12.100.000,00
		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.23.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	3 Dokumen	5.000.000,00		3 Dokumen	13.200.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun		3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun		3 dokumen			3 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.23.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	KECAMATAN TEGALREJO	10 buah	5.000.000,00		10 buah	11.000.000,00
		Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun		10 buah			10 buah	
		Jumlah Daftar Informasi Publik		10 dokumen			10 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya		1 orang			1 orang	
4.1.4.1.23.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP		100 %	35.000.000,00			11.000.000,00
4.1.4.1.23.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah warga yang terlayani	KECAMATAN TEGALREJO	6.000 warga	35.000.000,00		6.000 warga	11.000.000,00
4.1.4.1.23.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Presentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		100 %	230.000.000,00			321.325.000,00
4.1.4.1.23.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN TEGALREJO	21 desa	70.000.000,00		21 desa	81.725.000,00
		Jumlah desa terfasilitasi pengisian kepala desa		- desa			- desa	
		Jumlah desa terfasilitasi pengisian perangkat desa		21 desa			21 desa	
		Jumlah desa lunas PBB		21 desa			21 desa	
4.1.4.1.23.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah dokumen perencanaan	KECAMATAN TEGALREJO	1 dokumen	40.000.000,00		1 dokumen	70.100.000,00
		Jumlah desa yang terfasilitasi hibah / bansos		21 desa			21 desa	
		Jumlah desa yang menyelesaikan profil desa		21 desa			21 desa	
		Jumlah lembaga desa yang terbina administrasi		21 lembaga desa			21 lembaga desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.23.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan	KECAMATAN TEGALREJO	21 desa	80.000.000,00		21 desa	108.300.000,00	
		Jumlah TP PKK Desa yang dibina		21 TP PKK Desa			21 TP PKK Desa		
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba MTQ / FASI		65 peserta			65 peserta		
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba Rebana		150 peserta			150 peserta		
		Jumlah desa layak anak		1 desa			1 desa		
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya		1 kali			1 kali		
4.1.4.1.23.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah satuan linmas desa	KECAMATAN TEGALREJO	21 satuan linmas desa	40.000.000,00		21 satuan linmas desa	61.200.000,00	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		1 peraturan			1 peraturan		
		Frekuensi koordinasi forum pimpinan kecamatan		12 kali			12 kali		
TOTAL					680.250.000,00		TOTAL	1.196.450.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN SECANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.886.638.000,00			1.911.200.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.886.638.000,00			1.911.200.000,00
4.1.4.1.24.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	313.500.000,00			304.600.000,00
4.1.4.1.24.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SECANG	1.660 surat	7.500.000,00		1.700 surat	8.500.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		1.800 arsip			1.800 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		834 buku			834 buku	
4.1.4.1.24.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN SECANG	2.600 surat	3.500.000,00		2.730 surat	4.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		600 arsip			600 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		50 buku			50 buku	
4.1.4.1.24.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SECANG	34 kali	44.000.000,00		34 kali	44.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		33 kali			33 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		21 kali			23 kali	
4.1.4.1.24.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN SECANG	12 kali rapat	13.500.000,00		12 kali rapat	14.000.000,00
4.1.4.1.24.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SECANG	1 Paket	45.000.000,00		1 Paket	57.600.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Paket			1 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola		829 aset			894 aset	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		KELURAHAN SECANG	5 unit	10.000.000,00		6 unit	10.000.000,00
4.1.4.1.24.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		KECAMATAN SECANG	1.268 m2	54.000.000,00		1.268 m2	59.000.000,00
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			60 rekening			60 rekening	
4.1.4.1.24.2.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		KELURAHAN SECANG	3 Gedung	17.500.000,00		3 Gedung	17.500.000,00
4.1.4.1.24.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		KECAMATAN SECANG	16 buah	76.000.000,00		16 buah	78.500.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			4 buah			4 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.24.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		KELURAHAN SECANG	12 unit	35.000.000,00		12 unit	4.000.000,00
4.1.4.1.24.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	-	KECAMATAN SECANG	-	0,00	-	-	0,00	
4.1.4.1.24.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SECANG	KECAMATAN SECANG	12 kali	7.500.000,00	-	12 kali	7.500.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang			1 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			26 ASN			26 ASN	
4.1.4.1.24.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	59.500.000,00			67.600.000,00
4.1.4.1.24.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KECAMATAN SECANG	15 kegiatan	35.000.000,00		15 kegiatan	35.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			19 laporan			19 laporan	
4.1.4.1.24.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KELURAHAN SECANG	15 kegiatan	5.500.000,00		15 kegiatan	6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun		KECAMATAN SECANG	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	6.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.24.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun		KECAMATAN SECANG	4 dokumen	5.000.000,00		4 dokumen	7.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.24.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		KELURAHAN SECANG	1 Laporan	2.000.000,00		1 Laporan	2.000.000,00
4.1.4.1.24.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	Kecamatan Secang	KECAMATAN SECANG	1 dokumen	5.000.000,00	Penyusunan data	1 dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Pengendalian Intern (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.24.2.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun		KELURAHAN SECANG	22 22	2.000.000,00		22 22	1.600.000,00
4.1.4.1.24.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	20.000.000,00			20.000.000,00
4.1.4.1.24.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani		KECAMATAN SECANG	7.500 dokumen	20.000.000,00		7.500 dokumen	20.000.000,00
4.1.4.1.24.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			100 Persen	1.493.638.000,00			1.519.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		KECAMATAN SECANG	19 Desa	70.000.000,00		19 Desa	75.000.000,00
		Jumlah kepala desa terpilih			- Desa			- Desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			4 orang			4 orang	
		Jumlah Desa/Kelurahan lunas PBB			5 Desa			5 Desa	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			232 perangkat desa			232 perangkat desa	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			141 orang			141 orang	
4.1.4.1.24.2.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	-	KELURAHAN SECANG	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	
4.1.4.1.24.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa		KECAMATAN SECANG	20 Desa/Kelurahan	45.000.000,00		20 Desa/Kelurahan	82.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			7 lembaga			7 lembaga	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			19 Desa			19 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			19 dokumen			19 dokumen	
		Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan			140 orang			140 orang	
4.1.4.1.24.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanggulangan kemiskinan		KECAMATAN SECANG	20 Desa/Kelurahan	70.000.000,00		20 Desa/Kelurahan	88.500.000,00
		Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibina			20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			56 peserta			56 peserta	
		Jumlah Desa/Kelurahan layak anak			20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			1 kegiatan			1 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SECANG	12 kali	38.500.000,00		12 kali	38.500.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina		20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		5 perpu			5 perpu	
		Jumlah paskibraka yang terbina		75 orang			75 orang	
4.1.4.1.24.2.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	KELURAHAN SECANG	10 kegiatan	1.195.138.000,00		10 kegiatan	1.200.000.000,00
4.1.4.1.24.2.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang dibina	KELURAHAN SECANG	37 orang	45.000.000,00		40 orang	5.000.000,00
TOTAL					1.886.638.000,00	TOTAL	1.911.200.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN SECANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.886.638.000,00			1.911.200.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				1.886.638.000,00			1.911.200.000,00
4.1.4.1.24.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	313.500.000,00			304.600.000,00
4.1.4.1.24.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KECAMATAN SECANG	1.660 surat	7.500.000,00		1.700 surat	8.500.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		1.800 arsip			1.800 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		834 buku			834 buku	
4.1.4.1.24.2.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN SECANG	2.600 surat	3.500.000,00		2.730 surat	4.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola		600 arsip			600 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola		50 buku			50 buku	
4.1.4.1.24.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KECAMATAN SECANG	34 kali	44.000.000,00		34 kali	44.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana		33 kali			33 kali	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan		21 kali			23 kali	
4.1.4.1.24.2.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	KELURAHAN SECANG	12 kali rapat	13.500.000,00		12 kali rapat	14.000.000,00
4.1.4.1.24.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SECANG	1 Paket	45.000.000,00		1 Paket	57.600.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 Paket			1 Paket	
		Jumlah aset yang dikelola		829 aset			894 aset	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.2.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		KELURAHAN SECANG	5 unit	10.000.000,00		6 unit	10.000.000,00
4.1.4.1.24.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		KECAMATAN SECANG	1.268 m2	54.000.000,00		1.268 m2	59.000.000,00
		Jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun			60 rekening			60 rekening	
4.1.4.1.24.2.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara		KELURAHAN SECANG	3 Gedung	17.500.000,00		3 Gedung	17.500.000,00
4.1.4.1.24.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		KECAMATAN SECANG	16 buah	76.000.000,00		16 buah	78.500.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			4 buah			4 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			1 unit			1 unit	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			7 unit			7 unit	
4.1.4.1.24.2.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara		KELURAHAN SECANG	12 unit	35.000.000,00		12 unit	4.000.000,00
4.1.4.1.24.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	-	KECAMATAN SECANG	-	0,00	-	-	0,00	
4.1.4.1.24.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	KECAMATAN SECANG	KECAMATAN SECANG	12 kali	7.500.000,00	-	12 kali	7.500.000,00
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			1 orang			1 orang	
		Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kinerjanya			26 ASN			26 ASN	
4.1.4.1.24.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah			100 Persen	59.500.000,00			67.600.000,00
4.1.4.1.24.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KECAMATAN SECANG	15 kegiatan	35.000.000,00		15 kegiatan	35.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			19 laporan			19 laporan	
4.1.4.1.24.2.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		KELURAHAN SECANG	15 kegiatan	5.500.000,00		15 kegiatan	6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD yang tersusun		KECAMATAN SECANG	- dokumen	5.000.000,00		- dokumen	6.000.000,00
		Jumlah dokumen Renja PD yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen RPTK yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.24.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun		KECAMATAN SECANG	4 dokumen	5.000.000,00		4 dokumen	7.000.000,00
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.24.2.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun		KELURAHAN SECANG	1 Laporan	2.000.000,00		1 Laporan	2.000.000,00
4.1.4.1.24.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP yang tersusun	Kecamatan Secang	KECAMATAN SECANG	1 dokumen	5.000.000,00	Penyusunan data	1 dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen SP yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Daftar Informasi Publik			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Pengendalian Intern (SPIP) yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
4.1.4.1.24.2.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun		KELURAHAN SECANG	22 22	2.000.000,00		22 22	1.600.000,00
4.1.4.1.24.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP			100 %	20.000.000,00			20.000.000,00
4.1.4.1.24.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen yang terlayani		KECAMATAN SECANG	7.500 dokumen	20.000.000,00		7.500 dokumen	20.000.000,00
4.1.4.1.24.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			100 Persen	1.493.638.000,00			1.519.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		KECAMATAN SECANG	19 Desa	70.000.000,00		19 Desa	75.000.000,00
		Jumlah kepala desa terpilih			- Desa			- Desa	
		Jumlah perangkat desa terisi			4 orang			4 orang	
		Jumlah Desa/Kelurahan lunas PBB			5 Desa			5 Desa	
		Jumlah perangkat desa yang terbina			232 perangkat desa			232 perangkat desa	
		Jumlah anggota BPD yang terbina			141 orang			141 orang	
4.1.4.1.24.2.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	-	KELURAHAN SECANG	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	
4.1.4.1.24.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa		KECAMATAN SECANG	20 Desa/Kelurahan	45.000.000,00		20 Desa/Kelurahan	82.000.000,00
		Jumlah dokumen profil desa yang tersusun			20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina			7 lembaga			7 lembaga	
		Jumlah desa yang terbina administrasinya			19 Desa			19 Desa	
		Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun			19 dokumen			19 dokumen	
		Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan			140 orang			140 orang	
4.1.4.1.24.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah desa/kelurahan terkoordinasi penanggulangan kemiskinan		KECAMATAN SECANG	20 Desa/Kelurahan	70.000.000,00		20 Desa/Kelurahan	88.500.000,00
		Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang dibina			20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan			56 peserta			56 peserta	
		Jumlah Desa/Kelurahan layak anak			20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya			1 kegiatan			1 kegiatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	KECAMATAN SECANG	12 kali	38.500.000,00		12 kali	38.500.000,00
		Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana		20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah satlinmas desa yang terbina		20 Desa/Kelurahan			20 Desa/Kelurahan	
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan		5 perpu			5 perpu	
		Jumlah paskibraka yang terbina		75 orang			75 orang	
4.1.4.1.24.2.43.6	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	KELURAHAN SECANG	10 kegiatan	1.195.138.000,00		10 kegiatan	1.200.000.000,00
4.1.4.1.24.2.43.7	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang dibina	KELURAHAN SECANG	37 orang	45.000.000,00		40 orang	5.000.000,00
TOTAL					1.886.638.000,00	TOTAL	1.911.200.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : KECAMATAN WINDUSARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					437.500.000,00			546.150.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan					437.500.000,00			546.150.000,00
4.1.4.1.25.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	187.500.000,00			190.000.000,00
4.1.4.1.25.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1.500 surat	7.500.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	1.500 surat	0,00
		Jumlah Arsip dikelola			1.200 dokumen			1.200 dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			289 buku			289 buku	
		Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan			12 bulan			12 bulan	
4.1.4.1.25.1.7.1.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1500.00 surat	10.000.000,00	Kecamatan Windusari		10.000.000,00
4.1.4.1.25.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	15 kali	20.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	15 kali	20.000.000,00
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana			3 kali			3 kali	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			30 kali			30 kali	
4.1.4.1.25.1.7.2.1	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	15.00 kali	20.000.000,00	Kecamatan Windusari		20.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.25.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	3 paket	40.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	2 paket	50.000.000,00
		Jumlah Paket pengadaan peralatan gedung kantor			3 paket			1 paket	
		Jumlah Aset yang dikelola			269 buah			309 buah	
4.1.4.1.25.1.7.3.1	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	3.00 Paket	90.000.000,00	Kecamatan Windusari		50.000.000,00
4.1.4.1.25.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1.680 m2	43.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	1.680 m2	43.000.000,00
		Luas rumah dinas yang dipelihara			148 m2			148 m2	
		Jumlah rekening Telp, Listrik, Air dan Surat Kabar			4 rekening			4 rekening	
4.1.4.1.25.1.7.4.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1828.00 m2	43.000.000,00	Kecamatan Windusari		43.000.000,00
4.1.4.1.25.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung yang dipelihara	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	8 buah	77.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	8 buah	77.000.000,00
		Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara			4 paket			4 paket	
		Jumlah kendaraan dinas dinas roda empat yang dipelihara			1 buah			1 buah	
		Jumlah kendaraan dinas dinas roda dua yang dipelihara			7 buah			7 buah	
4.1.4.1.25.1.7.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	8.00 Paket	77.000.000,00	Kecamatan Windusari		77.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.25.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	- paket	0,00	Program dicantumkan akan tetapi untuk pagu anggaran sementara ditunda dikarenakan direncanakan akan dibangun Prototipe	1 paket	0,00
4.1.4.1.25.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	40.000.000,00			56.000.000,00
4.1.4.1.25.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	33 kegiatan	25.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	33 kegiatan	25.000.000,00
		Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			4 Laporan			4 Laporan	
4.1.4.1.25.1.8.1.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	6.00 dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Windusari		25.000.000,00
4.1.4.1.25.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1 Dokumen	5.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	1 Dokumen	6.000.000,00
		Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersusun			- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.25.1.8.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1.00 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Windusari		6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.1.4.1.25.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	3 dokumen	5.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	3 dokumen	25.000.000,00
		Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun			- dokumen			- dokumen	
4.1.4.1.25.1.8.3.1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	3.00 dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Windusari		25.000.000,00
4.1.4.1.25.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1 buku	5.000.000,00	Untuk SOP sudah dibuat pada tahun 2017 program dicantumkan untuk Pagu petunjuk lebih lanjut	- buku	0,00
		Jumlah standar pelayanan yang tersusun			10 buah			- buah	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			- buah			- buah	
4.1.4.1.25.1.8.4.1	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	0.00 0	0,00	Kecamatan Windusari		0,00
4.1.4.1.25.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP			100 %	10.000.000,00			15.000.000,00
4.1.4.1.25.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	100 %	10.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	100 %	15.000.000,00
4.1.4.1.25.1.42.1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kecamatan (PATEN)		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	100.00 %	10.000.000,00	Kecamatan Windusari		10.000.000,00
4.1.4.1.25.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan			100 %	200.000.000,00			285.150.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.25.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan keuangan Desa	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20 Desa	60.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	20 Desa	77.000.000,00
		Jumlah Kepala Desa terpilih			- Kades			- Kades	
		Jumlah BPD terisi			- indeks			- indeks	
		Jumlah Desa Lunas PBB			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Desa terisi perangkat			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Desa yang dibina perangkatnya			20 Desa			20 Desa	
4.1.4.1.25.1.43.1.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20.00 Desa	77.000.000,00	Kecamatan dan Desa		77.000.000,00
4.1.4.1.25.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	1 dokumen	40.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	1 dokumen	67.000.000,00
		Jumlah Desa yang terfasilitasi hibah/bansos			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah kegiatan pentas seni dan budaya			2 kali			2 kali	
		Jumlah Desa pelaku ekonomi UKM			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Desa yang menyelesaikan profil desa			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Lembaga Desa yang terbina			3 lembaga			3 lembaga	
4.1.4.1.25.1.43.2.1	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20.00 Desa	67.000.000,00	Kecamatan dan Desa		67.000.000,00
4.1.4.1.25.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Desa terfasilitasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20 Desa	60.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	20 Desa	84.150.000,00
		Jumlah TP. PKK Desa yang dibina			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Peserta seleksi MTQ/STQ			130 peserta			130 peserta	
		Jumlah grup rebana yang dikirim			3 grup			3 grup	
		Jumlah Desa Layak Anak			20 Desa			20 desa	
		Jumlah Lansia yang mengikuti sosialisasi			60 orang			60 orang	
4.1.4.1.25.1.43.3.1	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20.00 Desa	84.150.000,00	Kecamatan dan Desa		84.150.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.1.4.1.25.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	Jumlah frekwensi koordinasi forkompimcam	Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	12 kali	40.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan tersebut mohon dapatnya direalisasi	12 kali	57.000.000,00
		Jumlah Peserta yang difasilitasi penanggulangan bencana			70 orang			70 orang	
		Jumlah Linmas yang dibina			40 orang			40 orang	
		Jumlah Satlinmas Desa yang dibina			20 Desa			20 Desa	
		Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasikan			2 buah			2 buah	
		Jumlah peserta sosialisasi wasbang			80 orang			80 orang	
4.1.4.1.25.1.43.4.1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan		Kecamatan Windusari	KECAMATAN WINDUSARI	20.00 Desa	57.000.000,00	Kecamatan Windusari		57.000.000,00
TOTAL						437.500.000,00	TOTAL		546.150.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				3.816.000.000,00			3.880.000.000,00
4.2	Pengawasan				3.816.000.000,00			3.880.000.000,00
4.2.4.2.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 %	897.500.000,00			874.000.000,00
4.2.4.2.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	INSPEKTORAT	2.000 surat	30.000.000,00	-	2.000 surat	30.000.000,00
4.2.4.2.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Rakor Luar Daerah	INSPEKTORAT	200 kali	274.000.000,00	-	250 kali	275.000.000,00
		Jumlah Rakor Dalam Daerah		200 kali			200 kali	
		Jumlah rapat dinas pengawasan		1 rapat			1 rapat	
		Jumlah rapat koordinasi		15 kali			15 kali	
4.2.4.2.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pengadaan	INSPEKTORAT	3 paket	40.000.000,00	-	3 paket	50.000.000,00
4.2.4.2.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	luas gedung kantor yang dipelihara	INSPEKTORAT	710 m2	8.500.000,00		710 m2	9.000.000,00
		jumlah rekening telepon yang dipelihara		12 bulan			12 bulan	
		jumlah rekening surat kabar yang dipelihara		12 bulan			12 bulan	
4.2.4.2.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	INSPEKTORAT	24 unit	245.000.000,00		26 unit	250.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara		10 unit			12 unit	
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara		5 mobil			5 mobil	
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara		22 motor			22 motor	
4.2.4.2.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	INSPEKTORAT	1 paket	0,00	-	- paket	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.4.2.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pelatihan Kalangan Sendiri (PKS)	INSPEKTORAT	10 kali	300.000.000,00	-	10 kali	260.000.000,00
		Jumlah ASN yang bimtek/ sertifikasi		5 orang			5 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi angka kreditnya		19 orang			20 orang	
4.2.4.2.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah		100 %	165.000.000,00			207.500.000,00
4.2.4.2.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	INSPEKTORAT	21 kegiatan	35.000.000,00		22 kegiatan	37.500.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun		1 laporan			1 laporan	
		Jumlah laporan SPJ Fungsional		12 laporan			12 laporan	
4.2.4.2.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	INSPEKTORAT	- dokumen	80.000.000,00	-	- dokumen	75.000.000,00
		Jumlah Dokumen Renja		2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen PKPT		1 dokumen			1 dokumen	
4.2.4.2.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan monitoring	INSPEKTORAT	1 laporan	40.000.000,00	-	1 laporan	80.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan LP2P		1 laporan			1 laporan	
		Jumlah dokumen laporan evaluasi Renja		4 laporan			1 laporan	
		Jumlah dokumen laporan verifikasi LHKASN		- laporan			1 laporan	
		Jumlah laporan monitoring IHPS		2 laporan			2 laporan	
4.2.4.2.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	INSPEKTORAT	2 SOP	10.000.000,00		2 SOP	15.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase laporan hasil pengawasan		100 %	2.753.500.000,00			2.798.500.000,00
		Persentase tindak lanjut yang terselesaikan		86 %				
		Persentase dokumen SPIP SKPD yang memadai		66 %				
		Capaian nilai aksi pencegahan korupsi		95 %				
4.2.4.2.1.1.20.6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut LHP yang ditangani	INSPEKTORAT	420 LHP	350.000.000,00	-	420 LHP	355.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.4.2.1.1.20.13	Pelaksanaan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	INSPEKTORAT	144 LHP	1.081.825.000,00	Pendukung peningkatan akuntabilitas pemerintah	144 LHP	1.093.500.000,00
		Jumlah penanganan kasus		10 LHP			10 LHP	
4.2.4.2.1.1.20.15	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah laporan penilaian PMPRB	INSPEKTORAT	1 laporan	45.000.000,00	-	1 laporan	47.500.000,00
4.2.4.2.1.1.20.16	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi	INSPEKTORAT	4 laporan	125.000.000,00	Rencana Aksi KPK RI	4 laporan	125.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.17	Implementasi SPIP	Jumlah dokumen penilaian maturitas SPIP SKPD	INSPEKTORAT	22 dokumen	100.000.000,00		32 dokumen	105.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.18	Pelaksanaan Review	Jumlah laporan hasil review	INSPEKTORAT	11 laporan	96.675.000,00	-	11 laporan	100.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.19	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantas pungli	INSPEKTORAT	12 laporan	715.000.000,00	-	12 laporan	720.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.20	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen penilaian kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	6 dokumen	70.000.000,00		6 dokumen	75.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20.21	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD	INSPEKTORAT	1 laporan	45.000.000,00		1 laporan	47.500.000,00
4.2.4.2.1.1.20.22	Penilaian Integritas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penilaian integritas	INSPEKTORAT	1 laporan	125.000.000,00		1 laporan	130.000.000,00
TOTAL					3.816.000.000,00	TOTAL		3.880.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					8.784.955.000,00			9.249.102.000,00
4.3	Perencanaan					7.064.955.000,00			7.463.102.000,00
4.3.4.3.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	1.019.256.000,00			1.100.256.000,00
4.3.4.3.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.500 surat	69.402.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500 surat	69.402.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			1.200 arsip			1.200 arsip	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			262 bahan pustaka			265 bahan pustaka	
4.3.4.3.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	92 perjalanan dinas	315.700.000,00	Menunjang kelancaran koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	92 perjalanan dinas	315.700.000,00
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			78 perjalanan dinas			78 perjalanan dinas	
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			35 kali			35 kali	
4.3.4.3.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5 paket	132.500.000,00	Sarana prasarana yang memadai menunjang kelancaran kegiatan perkantoran	3 paket	194.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			5 paket			3 paket	
4.3.4.3.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.332 M2	89.483.000,00	Terjaganya kondisi gedung kantor yang layak	1.332 M2	89.483.000,00
		Jumlah rekening/tagihan yang dibayar			36 rekening bulan			36 rekening bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.3.4.3.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Rumah dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Bappeda dan Litbangda	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	54 unit	274.671.000,00	pemeliharaan aset rutin	54 unit	274.671.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			29 unit			29 unit	
		Jumlah Kendaraan Dinas roda empat yang dipelihara			7 unit			7 unit	
		Jumlah Kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			20 unit			20 unit	
		Jumlah aset yang dikelola			672 unit			672 unit	
4.3.4.3.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 paket	105.500.000,00	Tersedianya gedung kantor yang memadai	3 paket	125.000.000,00
4.3.4.3.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Frekuensi pembinaan ASN	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12 kali	32.000.000,00	Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur perencanaan pembangunan	12 kali	32.000.000,00
		Jumlah ASN yang dibina			43 orang			43 orang	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya			12 orang			12 orang	
4.3.4.3.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 %	1.261.354.000,00			1.296.130.000,00
4.3.4.3.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	26 kegiatan	77.000.000,00	Menunjang Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 kegiatan	77.000.000,00
4.3.4.3.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	- dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	- dokumen	10.000.000,00
		Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
4.3.4.3.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4 dokumen	10.000.000,00	Meningkatkan tertib pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja perangkat daerah	4 dokumen	15.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun			2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun			3 dokumen			3 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.3.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	Sekretariat	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5 SOP	10.000.000,00	Meningkatkan kualitas pelayanan	5 SOP
		Jumlah dokumen SP yang tersusun						
		Jumlah Daftar Informasi Publik yang tersusun						
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)						
		Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun						
4.3.4.3.1.1.8.5	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah klaster ekonomi yang terfasilitasi	Bappeda dan Litbangda	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7 klaster	1.154.354.000,00	penggabungan dari PEL, TPG, MPG, SIPD, Pangripta Abhipraya, dan Penanggulangan Kemiskinan	7 klaster
		Jumlah laporan tahunan Program TPB/SDGs						
		umlah paket buku						
		Jumlah laporan kinerja penanggulangan kemiskinan						
		Jumlah laporan kegiatan penanganan masalah gizi						
		Jumlah peserta bimbingan teknis						
4.3.4.3.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesepakatan Musrenbang yang masuk ke dalam RKPD			100 %	1.782.845.000,00		
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah			100 %			
		Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD			100 %			
4.3.4.3.1.1.21.14	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 dokumen	1.054.987.000,00	Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
4.3.4.3.1.1.21.34	Pengelolaan Data dan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data pembangunan daerah yang tersedia	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 dokumen	178.906.000,00	Meningkatkan pengendalian perencanaan perangkat daerah	1 dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan non APBD yang tersusun			4 laporan			4 laporan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.3.4.3.1.1.21.35	Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan yang tersusun	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 dokumen	548.952.000,00	Meningkatkan pengendalian perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	535.049.000,00
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan jangka menengah yang tersusun			- dokumen			- dokumen	
		Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan jangka panjang yang tersusun			- dokumen			1 dokumen	
4.3.4.3.1.1.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Prasarana Wilayah dan Infrastruktur	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pembangunan wilayah dan infrastruktur			67 %	1.750.000.000,00			2.100.000.000,00
4.3.4.3.1.1.26.1	Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	Jumlah indikator kinerja program tata ruang dan pengembangan wilayah yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrasarkan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, KECAMATAN MUNGKID, KECAMATAN TEMPURAN	20 indikator	850.000.000,00	Mengkoordinasikan urusan tata ruang dan pengembangan wilayah	26 indikator	1.050.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah			3 dokumen			4 dokumen	
		Frekuensi koordinasi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.1.1.26.2	Perencanaan Infrastruktur Daerah	Jumlah indikator kinerja program pengembangan infrastruktur yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrasarkan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15 indikator	900.000.000,00	Mengkoordinasikan perencanaan infrastruktur daerah	15 indikator	1.050.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur			4 dokumen			4 dokumen	
		Frekuensi koordinasi perencanaan infrastruktur			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.1.1.27	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam			55 %	240.000.000,00			255.100.000,00
4.3.4.3.1.1.27.1	Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah indikator kinerja program sektor pengembangan dunia usaha yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	15 indikator	170.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor pengembangan dunia usaha	15 indikator	175.100.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan sektor pengembangan dunia usaha			1 dokumen			1 dokumen	
		Frekuensi koordinasi sektor pengembangan dunia usaha			12 kali			12 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.3.4.3.1.1.27.2	Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian dan Pangan	Jumlah indikator kinerja program sektor pertanian dan pangan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13 indikator	70.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor pertanian dan pangan	14 indikator	80.000.000,00
		1 dokumen			1 dokumen				
		10 koordinasi			10 koordinasi				
4.3.4.3.1.1.28	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya			49 %	1.011.500.000,00			916.080.000,00
4.3.4.3.1.1.28.1	Perencanaan Sektor Pemerintahan Umum	Jumlah indikator kinerja program Sektor Pemerintahan Umum yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	33 indikator	500.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor pemerintahan umum	36 indikator	550.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Pemerintahan Umum			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Pemerintahan Umum			18 kali			18 kali	
4.3.4.3.1.1.28.2	Perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial	Jumlah indikator kinerja program Sektor Kesejahteraan Sosial yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	24 indikator	386.500.000,00	Mengkoordinasikan sektor kesejahteraan sosial	26 indikator	231.080.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan Sektor Kesejahteraan Sosial			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Sektor Kesejahteraan Sosial			20 kali			20 kali	
4.3.4.3.1.1.28.3	Perencanaan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah indikator kinerja program Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya III yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10 indikator	90.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor pendidikan dan kebudayaan	12 indikator	45.000.000,00
		Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya III			2 dokumen			2 dokumen	
		Frekuensi koordinasi Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya III			20 kali			20 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.3.4.3.1.1.28.4	Perencanaan Sektor Akuntabilitas Pemerintahan	Jumlah indikator kinerja perencanaan pembangunan sektor Akuntabilitas Pemerintahan yang berpredikat sangat tinggi (>91%) dan tinggi (76%-90%)	Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8 indikator	35.000.000,00	Mengkoordinasikan sektor akuntabilitas pemerintahan	9 indikator	90.000.000,00
		1 dokumen			2 dokumen				
		10 kali			16 kali				
4.7	Penelitian dan Pengembangan					1.720.000.000,00			1.786.000.000,00
4.7.4.3.1.1.15	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah			100 %	1.720.000.000,00			1.786.000.000,00
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			100 %				
4.7.4.3.1.1.15.1	Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Sosial dan Budaya	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya yang tersusun	Bidang Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2 kajian	385.000.000,00	Menfasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya	4 kajian	415.500.000,00
		Jumlah tulisan ilmiah penelitian dan dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya yang terbit			5 tulisan ilmiah			5 tulisan ilmiah	
		Jumlah seminar penelitian dan pengembangan dan pengembangan pemerintahan, sosial, dan budaya			2 seminar			2 seminar	
		Frekuensi fasilitasi DRD			3 fasilitasi			3 fasilitasi	
		Jumlah aplikasi penelitian dan pengembangan yang terbangun			1 aplikasi			- aplikasi	
4.7.4.3.1.1.15.2	Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah yang tersusun	Bidang Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4 kajian	685.000.000,00	Menfasilitasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	4 kajian	740.500.000,00
		Jumlah tulisan ilmiah dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah daerah yang dipublikasikan			5 tulisan ilmiah			5 tulisan ilmiah	
		Jumlah seminar penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah			2 seminar			2 seminar	
		Frekuensi fasilitasi DRD			3 fasilitasi			3 fasilitasi	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.7.4.3.1.1.15.3	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah program roadmap SIDA yang terlaksana	Bidang Penelitian dan Pengembangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3 program	650.000.000,00	Menfasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah	3 program	630.000.000,00
		Jumlah fasilitasi HaKI bagi masyarakat		3 fasilitasi	2 fasilitasi				
		Jumlah peserta Anugerah Krenova Kabupaten		15 peserta	15 peserta				
TOTAL						8.784.955.000,00	TOTAL		9.249.102.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				32.910.261.410,00			34.490.434.800,00
4.4	Keuangan				32.910.261.410,00			34.490.434.800,00
4.4.4.4.5.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah		100 persen	13.047.597.910,00			13.225.000.000,00
4.4.4.4.5.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah Surat yang dikelola	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.000 surat	64.208.000,00		8.000 surat	160.000.000,00
		Jumlah Arsip yang dikelola		1.500 arsip			1.500 arsip	
4.4.4.4.5.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar daerah yang terlaksana	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	110 kali	390.000.000,00		110 kali	395.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan		72 kali			72 kali	
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah yang terlaksana		30 kali			30 kali	
4.4.4.4.5.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 paket	399.922.910,00	Sarpras	1 paket	400.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		1 paket			1 paket	
4.4.4.4.5.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.243 m2	393.467.000,00	Pemeliharaan sarpras	2.243 m2	500.000.000,00
		Jumlah rekening/ tagihan yang dibayar		108 rekening/ tagihan			108 rekening/ tagihan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12 bulan	1.100.000.000,00	Smart city	12 bulan	1.100.000.000,00
		Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor			12 bulan			12 bulan	
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan			12 bulan	
		Jumlah aplikasi pendukung smart city			7 aplikasi			7 aplikasi	
4.4.4.4.5.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 paket	0,00	Rehab gedung kantor	1 paket	200.000.000,00
4.4.4.4.5.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang dibina		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	110 orang	300.000.000,00		110 orang	845.000.000,00
		Frekuensi pembinaan ASN			12 kali			12 kali	
		Jumlah JFT yang terfasilitasi angka kreditnya			5 orang			5 orang	
4.4.4.4.5.1.7.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	84 4 unit roda 4 dan 80 unit roda 2	400.000.000,00		54 unit	2.625.000.000,00
4.4.4.4.5.1.7.9	Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 lokasi	10.000.000.000,00	Pengadaan tanah	2 lokasi	7.000.000.000,00
4.4.4.4.5.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah			100 persen	315.618.000,00			388.775.000,00
4.4.4.4.5.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	35 kegiatan	223.024.000,00	Jasa keuangan	35 kegiatan	278.775.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 dokumen	19.000.000,00		2 dokumen	19.000.000,00
4.4.4.4.5.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 dokumen	58.594.000,00		4 dokumen	76.000.000,00
		Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun		2 dokumen			2 dokumen	
		Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun		3 dokumen			3 dokumen	
		Persentase peningkatan pelayanan data berbasis website		100 persen			100 persen	
4.4.4.4.5.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 dokumen	15.000.000,00		1 dokumen	15.000.000,00
		Jumlah dokumen SP yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah Daftar Informasi yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
		jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun		1 dokumen			1 dokumen	
4.4.4.4.5.1.18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan Pajak		10,39 persen	9.212.128.000,00			10.481.062.000,00
		Persentase kenaikan retribusi		33,19 persen				
		Prosentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah		100 persen				
4.4.4.4.5.1.18.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi pendapatan	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 4 kali rakor	1.094.000.000,00		4 4 kali rakor	1.254.000.000,00
		jumlah piket pos pare		4.212 kali			4.212 kali	
		Jumlah laporan kajian potensi pendapatan daera		1 dokumen			1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.18.2	Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Jumlah wajib pajak daerah di Kabupaten Magelang		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	170 wajib pajak selain BPHTB, Gol C dan Katering	675.000.000,00		182 wajib pajak selain BPHTB, Gol C dan Katering	835.000.000,00
		Jumlah obyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan			1,04 Juta OP dan paket kegiatan pembentukan basis data sismiop			1,04 Juta OP dan paket kegiatan pembentukan basis data sismiop	
		Jumlah kegiatan pembentukan basis data sismiop			1 paket			1 paket	
4.4.4.4.5.1.18.3	Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Dan Retribusi Daerah		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11 10 pajak dan 1 retribusi	77.943.000,00		11 10 pajak dan 1 retribusi	81.840.000,00
4.4.4.4.5.1.18.4	Penerbitan SPPT dan DHKP	Jumlah SPPT DAN DHKP PBB P2		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	372 desa dan kelurahan	159.270.000,00		372 desa dan kelurahan	167.234.000,00
4.4.4.4.5.1.18.5	Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah	Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang tersampaikan		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	11 10 pajak dan 1 retribusi	1.302.500.000,00	rakor pendapatan dan konsinyering	11 10 pajak dan 1 retribusi	1.475.000.000,00
		Jumlah lembar promosi			400 buah			400 buah	
4.4.4.4.5.1.18.6	Pemungutan dan Intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah dan pbb sewilayah kab magelang		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21 kecamatan	1.350.000.000,00	pendapatan	21 kecamatan	4.992.944.000,00
4.4.4.4.5.1.18.7	Pengelolaan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah pengelolaan administrasi PBB di kab Magelang		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21 kecamatan	4.320.040.000,00	Administrasi pengelolaan pendapatan	21 kecamatan	1.430.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.18.8	Penyelesaian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Ketetapan Pajak Dan Retribusi Daerah		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21 kecamatan	233.375.000,00		21 kecamatan	245.044.000,00
4.4.4.4.5.1.19	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu			100 persen	7.081.957.000,00			7.355.744.000,00
		Persentase serapan APBD			100 persen				
		Persentase penerimaan pendapatan di RKUD			100 persen				
		Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar			100 persen				
4.4.4.4.5.1.19.1	Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perbup Analisa Standar Belanja		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 perbup	480.225.000,00		1 perbup	475.151.000,00
		Jumlah Sisdur pengelolaan keuangan daerah			1 perbup			1 perbup	
		Jumlah peraturan pengelolaan keuangan daerah			1 perda/ perbup			1 perda/ perbup	
4.4.4.4.5.1.19.2	Penilaian RKA dan Pergeseran Anggaran	Jumlah penilaian RKA OPD RAPBD, Perubahan RAPBD		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49 48 OPD dan 1 PPKD	799.300.000,00		49 48 OPD dan 1 PPKD	849.500.000,00
		Jumlah usulan pergeseran anggaran			30 Usulan			30 Usulan	
4.4.4.4.5.1.19.3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Jumlah Raperda dan Raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 Raperda dan Raperbup	1.891.840.000,00	Raperda	4 Raperda dan Raperbup	1.971.840.000,00
		Jumlah penyusunan E-Budgeting			1 paket			1 paket	
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi pedoman penyusunan APBD			1 kali			1 kali	
4.4.4.4.5.1.19.4	Penelitian DPA/DPPA-SKPD	Jumlah penelitian DPA OPD RAPBD, Perubahan RAPBD		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49 48 OPD dan 1 PPKD	506.220.000,00		49 48 OPD dan 1 PPKD	511.220.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.19.5	Pengelolaan Kas Daerah	Pelayanan pencairan dana tepat waktu	BPPKAD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49 48OPD dan 1 PPKD	1.040.000.000,00	Pengelolaan Keuangan Daerah (Kas Daerah)	49 48 OPD dan 1 PPKD	1.100.000.000,00
4.4.4.4.5.1.19.6	Pengendalian Perbendaharaan	Jumlah Laporan Pendapatan dan Belanja	BPPKAD	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	48 laporan	163.220.000,00	Pengendalian Perbendaharaan	48 laporan	223.881.000,00
4.4.4.4.5.1.19.7	Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam rangka SAKD	Jumlah Data laporan keuangan		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	49 OPD dan PPKD	415.000.000,00		49 OPD dan PPKD	423.000.000,00
4.4.4.4.5.1.19.8	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	20 1 Perda, 1 Perbup, 2 Laporan Keuangan Triwulan, 1 Laporan Keuangan Semester, 1 Prognosis, 7 laporan Keuangan Unaudited dan 7 Laporan Keuangan Audited	765.000.000,00		20 1 Perda, 1 Perbup, 2 Laporan Keuangan Triwulan, 1 Laporan Keuangan Semester, 1 Prognosis, 7 laporan Keuangan Unaudited dan 7 Laporan Keuangan Audited	780.000.000,00
4.4.4.4.5.1.19.9	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Paket Buku	Kab Magelang	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 paket buku	1.021.152.000,00	Permendagri nomor 5 Tahun 2017	4 paket buku	1.021.152.000,00
4.4.4.4.5.1.20	Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase SKPD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)			100 persen	3.252.960.500,00			3.039.853.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.20.1	Pembinaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah peserta pembinaan		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	300 orang	1.127.042.500,00		300 orang	1.300.000.000,00
		Jumlah Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah			48 OPD			48 OPD	
4.4.4.4.5.1.20.2	Penyusunan Peraturan Barang Milik Daerah dan Penyusunan RKBMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 dokumen	141.000.000,00		2 dokumen	155.100.000,00
		Jumlah peraturan barang milik daerah			1 peraturan			1 peraturan	
4.4.4.4.5.1.20.3	Manajemen Pengelolaan BMD	Jumlah Manajemen Pengelolaan BMD		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	48 OPD	774.341.000,00		48 OPD	902.947.500,00
		Jumlah Papan nama milik Pemda			50 Papan Nama			50 Papan Nama	
4.4.4.4.5.1.20.4	Penyusunan Kajian Investasi	Jumlah Analisa Kajian Investasi dan Rancangan perjanjian kerjasama dengan investor		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 dokumen	119.327.000,00		1 dokumen	126.787.500,00
4.4.4.4.5.1.20.5	Pengolahan Data Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data BMD		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4 dokumen	1.031.250.000,00		4 dokumen	495.018.800,00
4.4.4.4.5.1.20.6	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Jumlah kasus yang tertangani		BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5 kasus	60.000.000,00	Penanganan kasus	5 kasus	60.000.000,00
TOTAL						32.910.261.410,00	TOTAL	34.490.434.800,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					10.438.011.000,00			12.967.500.000,00
4.5	Kepegawaian					10.438.011.000,00			12.967.500.000,00
4.5.4.5.34.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 %	664.106.500,00			734.500.000,00
4.5.4.5.34.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	Jumlah surat yang dikelola	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	11.000 surat	47.000.000,00	Perlunya surat menyurat dan pengelolaan kearsipan demi kelancaran organisasi	11.000 surat	47.000.000,00
		Jumlah arsip yang dikelola			11.000 dokumen			11.000 dokumen	
		Jumlah bahan pustaka yang dikelola			20 buku			20 buku	
4.5.4.5.34.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	330 perjalanan	248.345.000,00	Mendukung dan menunjang kelancaran Koordinasi dan Konsultasi dengan SKPD/Instansi terkait	355 perjalanan	283.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan			25 rapat			25 rapat	
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana			200 perjalanan			200 perjalanan	
4.5.4.5.34.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	4 paket	65.000.000,00	Mendukung kelancaran layanan kepegawaian	4 paket	100.000.000,00
		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor			4 paket			4 paket	
4.5.4.5.34.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1 unit	22.498.000,00	Mendukung dan menunjang kelancaran layanan kepegawaian dan menambah masa umur pakai sarpras kantor	1 unit	22.500.000,00
		Jumlah rekening telepon dan surat kabar			24 rekening			24 rekening	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	91 unit	281.263.500,00	Menambah masa umur pakai sarpras kantor	91 unit	282.000.000,00
		Jumlah perlengkapan yang dipelihara			36 buah			36 buah	
		Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara			6 kendaraan			6 kendaraan	
		Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara			11 kendaraan			11 kendaraan	
4.5.4.5.34.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah			100 %	65.000.000,00			105.000.000,00
4.5.4.5.34.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kasubag. Keuangan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	25 kegiatan	45.000.000,00	Mendukung kelancaran administrasi keuangan dan pelaporannya	25 kegiatan	55.000.000,00
		Jumlah laporan keuangan yang tersusun			14 laporan			14 laporan	
4.5.4.5.34.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	Kasubag. Program	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	4 dokumen	10.000.000,00	Penyusunan dokumen kerangka acuan program dan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun	4 dokumen	21.500.000,00
4.5.4.5.34.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	Kasubag. Program	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	5 dokumen	10.000.000,00	Menyajikan Informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang rasional atas alokasi sumber daya; pelaporan keuangan dan kinerja organisasi	5 dokumen	28.500.000,00
		Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun			8 dokumen			8 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun			12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun			5 dokumen			5 dokumen	
4.5.4.5.34.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	Jumlah SOP yang tersusun	Kasubag. Program	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	5 SOP	0,00	Memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi sehingga layanan berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis	75 SOP	0,00
		Jumlah SP yang tersusun			5 SP			46 SP	
		Jumlah Daftar Informasi Publik			10 Jenis Daftar			7 Jenis Daftar	
4.5.4.5.34.1.32	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG			71,97 %	1.314.904.500,00			1.650.000.000,00
		Persentase keterisian formasi pegawai			74,12 %				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
4.5.4.5.34.1.32.1	Pengelolaan Kebutuhan Formasi	Jumlah dokumen yang disusun	Kasubid. Informasi Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1 dokumen	100.000.000,00	Memenuhi kebutuhan ASN (PNS dan/atau PPPK)	1 dokumen
4.5.4.5.34.1.32.2	Validasi Database Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diupdate database kepegawaiannya	Kasubid. Informasi Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	9.101 ASN	274.904.500,00	Update real time data kepegawaian ASN guna layanan informasi kepegawaian yang akurat, cepat, tepat, efisien dan update	9.228 ASN
		Jumlah ASN yang diupdate dokumen kepegawaiannya			9.101 ASN			9.228 ASN
4.5.4.5.34.1.32.3	Pengelolaan Manajemen Pengadaan dan Pelayanan ASN	Jumlah penetapan formasi Calon ASN	Kasubid. Pengadaan Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	600 formasi	890.000.000,00	Pengelolaan rekrutmen Calon ASN dan layanan hak-hak kepegawaiannya	575 formasi
		Jumlah usulan karpeg/karis/karsu dan taspen yang terselesaikan			1.550 kartu			1.350 kartu
		Jumlah layanan mutasi			70 mutasi			70 mutasi
4.5.4.5.34.1.32.4	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah CPNS menjadi PNS	Kasubid. Pengadaan Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	449 CPNS	50.000.000,00	Ketentuan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 58 (3), pasal 65 dan pasal 66	350 CPNS
4.5.4.5.34.1.33	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang lulus diklat			100 %	7.679.000.000,00		9.620.000.000,00
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya			4,40 %			
		Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas			80 %			
		Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya			78 %			
4.5.4.5.34.1.33.1	Pengelolaan Diklat Dasar dan Penjenjangan	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan dasar	Subid. Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	304 ASN	4.183.000.000,00	Memenuhi Syarat jabatan amanat UU No 5 tahun 2014 tentang ASN & PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS	350 ASN
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan			35 ASN			35 ASN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.33.2	Pengembangan kompetensi kualifikasi pendidikan ASN dan Sertifikasi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kualifikasi ASN	Subid. Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	300 ASN	225.000.000,00	Memenuhi Syarat jabatan amanat UU No 5 tahun 2014 tentang ASN & PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS	300 ASN	260.000.000,00
		Jumlah peserta ujian			60 PNS			60 PNS	
4.5.4.5.34.1.33.3	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional, Sosial kultural dan Pemerintahan	Subid. Diklat Teknis dan Fungsional	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	250 ASN	1.676.000.000,00	Memenuhi Syarat jabatan untuk peningkatan kompetensi ASN sesuai ketentuan	275 ASN	2.200.000.000,00
4.5.4.5.34.1.33.4	Penataan ASN	Jumlah mutasi/promosi/pengugasan pejabat ASN	Subid. Jabatan dan Penilaian Kinerja	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	250 ASN	970.000.000,00	Pemenuhan dan Penataan SDM pada SKPD	240 ASN	1.100.000.000,00
4.5.4.5.34.1.33.5	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah ASN yang terevaluasi kinerjanya	Subid. Jabatan dan Penilaian Kinerja	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	9.101 ASN	200.000.000,00	Mengukur, Memonitor dan Mengevaluasi penilaian kinerja ASN	9.228 ASN	275.000.000,00
4.5.4.5.34.1.33.6	Fasilitasi Kepangkatan	Jumlah SK KP yang terbit	Subid. Pengembangan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1.500 SK KP	125.000.000,00	Fasilitasi layanan kepegawaian ASN berkenaan dengan kepangkatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kepangkatan	1.500 SK KP	200.000.000,00
		Jumlah SK PMK yang terbit			50 SK PMK			50 SK PMK	
		Jumlah SP KGB yang terbit			4.500 SP KGB			4.500 SP KGB	
4.5.4.5.34.1.33.7	Pengembangan Jabatan fungsional	Jumlah pejabat fungsional yang dikembangkan	Subid. Pengembangan Jabatan Fungsional dan Kepangkatan	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	750 ASN	100.000.000,00	Pembinaan, pemantauan, pengembangan karier, mutasi jabatan (pengangkatan pertama, naik/alih jenjang jabatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali, PAK)	750 ASN	135.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4		5	6	7	8
4.5.4.5.34.1.33.8	Penyelenggaraan Bintek	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kasubid. Diklat Teknis dan Fungsional	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	180 ASN	200.000.000,00	Penyelenggaraan Bintek bagi ASN untuk peningkatan kompetensi ASN	180 ASN
4.5.4.5.34.1.34	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	Persentase pembinaan ASN			40 %	715.000.000,00		858.000.000,00
		Persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN			100 %			
4.5.4.5.34.1.34.1	Fasilitasi Pemberhentian ASN	Jumlah PNS yang terlayani pemberhentiannya	Kasubid. Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	595 PNS	80.000.000,00	Fasilitasi Pemberhentian ASN	572 PNS
		Jumlah PNS yang terlayani klaim taspennya			595 PNS			572 PNS
4.5.4.5.34.1.34.2	Fasilitasi Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan ASN	Jumlah SKPD yang tercetak daftar gajinya	Kasubid. Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	48 SKPD	200.000.000,00	Fasilitasi Layanan Kesejahteraan dan Penghargaan ASN	48 SKPD
		Jumlah PNS yang diusulkan tanda penghargaan Satyalancana			86 PNS			90 PNS
		Jumlah ASN yang terlayani kesejahteraannya			9.101 ASN			9.228 ASN
4.5.4.5.34.1.34.3	Penegakan Disiplin ASN	Jumlah instansi yang dimonitor kedisiplinannya	Kasubid. Pembinaan Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	48 SKPD	310.000.000,00	Pembinaan, pemantauan dan penegakan disiplin ASN	48 SKPD
		jumlah ASN yang diuji kesehatannya			10 ASN			10 ASN
		Jumlah wajib LHKPN yang melaporkan LHKPN tepat waktu			186 wajib LHKPN			186 wajib LHKPN
4.5.4.5.34.1.34.4	Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian	Jumlah kasus yang diproses	Kasubid. Pembinaan Pegawai	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	40 kasus	125.000.000,00	Pembinaan, pemantauan dan penegakan aturan kepegawaian ASN	40 kasus
TOTAL						10.438.011.000,00	TOTAL	12.967.500.000,00

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pada tahap ke-4 (keempat) dari RPJPD Kabupaten Magelang tahun 2005-2025 dan menjadi tahap awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, sampai dengan implementasinya. Hal ini penting untuk meletakkan landasan yang kokoh untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi pencapaian target lima tahun terakhir RPJPD Kabupaten Magelang.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2020, digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja. Indikator kinerja tersebut terdiri atas Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah. Ketiga indikator tersebut dituangkan dalam matriks yang digunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

6.1

Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan indikator yang menggambarkan kinerja Kepala Daerah. Pada tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama Daerah. Secara lengkap Indikator Kinerja Utama Daerah yang dilengkapi dengan Indikator Sasaran Daerah disajikan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1

Matriks Indikator Kinerja Utama Daerah

Kabupaten Magelang Tahun 2020

No.	Aspek/Tujuan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019		
	MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia						
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	Tujuan : Meningkatnya kualitas SDM						
1	Nilai IPM	Indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak	angka (0-100)	69,11	69,11	69,34	70,33
	Sasaran :						
	Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	tahun	7,57	7,72	7,86	8,41

No.	Aspek/Tujuan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019		
	Harapan Lama Sekolah	lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	tahun	12,48	12,67	12,76	13,27
	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	((Jumlah SD berakreditasi minimal B/Jumlah SD)*100%+(jumlah SMP berakreditasi minimal B/Jumlah SMP)*100%)/2	persen	93,86	93,89	94,41	95,94
	Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	tahun	73,47	73,47	73,52	73,70
Tujuan : Meningkatkan paritas daya beli masyarakat							
2	Angka kemiskinan		persen	11,23	10,58	9,93	7,33
3	Pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan	Kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa	ribu rupiah	9.025,00	9.262,68	9.400,64	10.400,12
4	Inflasi	$\text{Inflasi} = ((\text{Inf } n+1 - \text{Inf } n) / \text{Inf } n) * 100\%$ Dimana: Inf n = nilai inflansi pd tahun n Inf(n+1) = nilai inflasi pada 1 th berikutnya n = tahun	persen	2,66	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5
	Sasaran :						
	Persentase penurunan PMKS	(Jumlah PMKS tahun n - jumlah PMKS tahun n-1)*100%	persen	0,57	0,58	0,58	0,58
	Indeks ketahanan pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	angka (0-100)	76,32	77,37	78,42	82,62
	Tingkat pengangguran terbuka	(Jumlah Pengangguran/Jumlah Angkatan Kerja)*100%	persen	2,91	2,4-3,0	2,4-3,0	2,25-2,55
	Cakupan hunian layak dan berkualitas	(Persentase ketersediaan rumah layak huni+Persentase kawasan permukiman berkualitas)/2	persen	55,29	69,88	72,66	96,28
Tujuan : Meningkatkan pembangunan berbasis gender							
5	IPG	$\text{IPG} = (\text{Xede}(1)+\text{Xede}(2)+\text{Iinc-dis})/3$ Xede(1) = Xede untuk harapan hidup Xede(2)= Xede untuk harapan pendidikan Sensus Penduduk Iinc-dsi = indeks distribusi pendapatan, variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan sensus penduduk	angka (0-100)	92,23	92,91	93,21	94,41
	Sasaran :						
	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	<div>1/3 (Ipar+IDM+Linc-dist)</div> Ipar= Indek keterwakilan perempuan di parlemen IDM=Indek pengambilan keputusan, Linc-dist=indek distribusi pendapatan	angka (0-100)	62,43	69,03	69,33	70,53

No.	Aspek/Tujuan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019		
	Kabupaten layak anak	Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak	kategori	madya	madya	nindya	utama
	Misi II : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup						
	ASPEK DAYA SAING						
	Tujuan : Meningkatnya daya saing daerah						
6	Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	(Persentase ketercapaian IKLH+Cakupan pembangunan wilayah)/2	persen	60,07	63,20	66,95	83,16
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	$LPE = ((LPE \text{ tahun } n - LPE \text{ tahun } n-1)/LPE \text{ tahun } n-1)*100\%$	persen	5,06*	5,0-5,5	5,1-5,6	5,5-6,0
8	PDRB Perkapita	BPS	juta rupiah	23,70*	25,20	26,70	32,72
	Sasaran :						
	IKLH	IKLH = $(IKA*30\%)+(IKU*30\%)+(IKTL*40\%)$ IKA = Indek Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka (0-100)	71,93	72,10	72,12	72,20
	Cakupan pembangunan wilayah	(Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang+Cakupan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman+Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan)/3	persen	48,21	54,29	61,79	94,12
	Peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan tahun ke n - PDRB sektor perdagangan tahun (n-1)	milliar rupiah	200,15*	227,64	255,56	367,20
	Peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian tahun ke n - PDRB sektor pertanian tahun (n-1)	milliar rupiah	113,80*	120,09	150,89	274,10
	Peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan	PDRB sektor industri pengolahan tahun ke n - PDRB sektor industri pengolahan tahun (n-1)	milliar rupiah	369,23*	370,28	372,47	380,61
	Peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata	PDRB sektor pariwisata tahun ke n - PDRB sektor pariwisata tahun (n-1)	milliar rupiah	52,32*	52,32	52,32	54,25
	Pertumbuhan investasi	$((Investasi \text{ tahun } n - Investasi \text{ tahun } n-1)/Investasi \text{ tahun } n)*100\%$	persen	0,92	5,00	5,00	5,00
	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	(Cakupan penegakan hukum+Cakupan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana+Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3	persen	84,42	79,25	82,97	88,09
	Indeks desa membangun	Indeks komposit yang terdiri dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan	angka (0-1)	0,66*	0,67	0,68	0,72

No.	Aspek/Tujuan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			2018	2019			
	Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah						
	ASPEK DAYA SAING						
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel						
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan		56,45	63,82	65,53	72,39
	Sasaran :						
	Nilai AKIP	Indeks untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	angka (0-100) (huruf)	59,05 (CC)	61,04 (B)	63,03 (B)	71 (BB)
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks untuk mengukur pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	angka (0-5)	1,85	1,85	2,00	3,00
	Opini BPK "WTP"	Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material	-	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	angka (0-100)	82,01	82,74	84,23	90,16
	Indek merit system	Indeks untuk mengukur profesionalitas manajemen kepegawaian ASN dalam memberikan pelayanan publik	angka (0-1)	-	0,50	0,55	0,76

Sumber: Bappeda dan Litbangda, 2019

Keterangan: *) Angka proyeksi

6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun matriks Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Matriks Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2020

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	$(APK\ PAUD + APK\ SD/MI/Paket\ A + APK\ SMP/MTS/Paket\ B)/3$	angka (0-100)	87,43	89,97	91,14	95,80
		2	Angka Partisipasi Murni (APM)	$(APM\ SD/MI/Paket\ A + APM\ SMP/MTS/Paket\ B)/2$	Angka (0-100)	87,64	88,25	88,79	90,94
		3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	$(APS\ SD/MI/Paket\ A + APS\ SMP/MTS/Paket\ B)/2$	angka (0-100)	98,30	98,62	98,93	99,92
		4	Rerata Nilai UN	$(Rerata\ Nilai\ UN\ SD + Rerata\ Nilai\ UN\ SMP)/2$	Angka (0-10)	6,28	6,30	6,40	6,65
		5	Angka Kelulusan	$(Angka\ Kelulusan\ SD + Angka\ kelulusan\ SMP)/2$	angka (0-100)	99,88	99,90	99,92	100
		6	Persentase peningkatan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	$((karya\ budaya\ yang\ direvitalisasi\ dan\ diinventarisasi\ pada\ tahun\ n) - (karya\ budaya\ yang\ diinventarisasi\ dan\ direvitalisasi\ pada\ tahun\ n-1) / karya\ budaya\ yang\ direvitalisasi\ dan\ diinventarisasi\ pada\ tahun\ n-1) * 100\%$	persen	1	1	1	5
2	DINAS KESEHATAN	7	Kualitas pelayanan kesehatan	$(Jumlah\ FKTP/FKTL/Lab\ yang\ bermutu) / (Jumlah\ FKTP/FKTL/Lab\ yang\ ada) * 100\%$	persen	10	15	25	45
		8	Angka kesakitan	SIM Dinkes	persen	-	-	5,33	4,68
		9	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun	jumlah kasus	6	-	11	9
		10	Angka Kematian Bayi (AKB)	$(Jumlah\ Kematian\ Bayi\ (berumur\ kurang\ 1\ tahun)\ pada\ satu\ tahun\ tertentu / Jumlah\ Kelahiran\ Hidup\ pada\ satu\ tahun\ tertentu) * 1000$	per 1000 KH	5,72	-	6,5	6,3

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
		11	Angka Kematian Balita (AKABa)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000	per 1000 KH	6,70	-	8	7,6
		12	Angka Kematian Neonatal (AKN)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000	per 1000 KH	4	-	6	5,6
3	RSUD MUNTILAN	13	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Madya (Bintang 3)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	(Cakupan Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan + Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik + cakupan layanan jaringan irigasi + Cakupan layanan Sumber Daya Air + Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik + Cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik + Persentase terbangunnya landmark + Cakupan layanan air minum + Cakupan layanan sanitasi + Cakupan layanan drainase lingkungan + Cakupan sarana prasarana ke- PU-an + cakupan layanan Jasa konstruksi + Persentase dokumen rekomendasi perijinan + Persentase kesesuaian tata ruang + Cakupan kinerja pertanahan)/ 15	persen	57,69	60,83	66,37	92,13

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15	Persentase ketersediaan rumah layak huni	(Persentase peningkatan rumah layak huni + Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi MBR+Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana+Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi warga terdampak proyek pemerintah+Persentase Penanganan PSU Perumahan)/5	persen	43,46	71,34	75,59	92,56
		16	Persentase kawasan permukiman berkualitas	(persentase penanganan kawasan permukiman kumuh + persentase pengendalian kawasan permukiman + persentase penyediaan TPU + persentase penanganan PSU Permukiman)/4	persen	47,20	49,45	51,70	79,47
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	17	Cakupan penegakan hukum	((jml penindakan / jml pelanggaran)*0,50 + ((jml penertiban/(jml target perencanaan penertiban + jml aduan))*0,50	persen	-	80,45	88,50	92,50
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18	Cakupan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana	((jml desa tangguh bencana/jml desa rawan bencana)*100 + (jml penanganan tanggap darurat yg dilakukan / jml sasaran dampak bencana yg harus dilakukan tanggap bencana)*100 + (jml kejadian bencana yg direkomendasikan rehabilitasi dan rekonstruksi / jml kejadian bencana yg harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi*100))/3	persen	74,1	75	75,9	79,48
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	((jml ormas, LSM dan OKP yg aktif / jml ormas, LSM dan OKP yg tercatat)*0,50 + (jml konflik sosial tertangani/jml konflik sosial)*0,50	persen	80	80	80	80

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
9	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20	Cakupan penanganan PMKS	(Persentase PMKS yang tertangani + Persentase PSKS yang berperan dalam penanganan PMKS)/2	persen	46,32	46,86	47,46	49,8
		21	Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	(Persentase perempuan di lembaga legeslatif+Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi+Persentase SKPD yang melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)+rasio kekerasan terhadap perempuan + rasio kekerasan terhadap anak)/5	persen	60,91	57,99	57,99	58,63
		22	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	BPS	persen	0,79	0,76	0,73	0,65
		23	Presentase keluarga Pra Sejahtera	(Jumlah Keluarga Pra sejahtera/Jumlah keluarga)*100%	persen	21,23	20,69	20,15	18
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	24	Produktivitas tenaga kerja	nilai PDRB/Total angkatan kerja yang bekerja	rupiah	689.827	700.905	711.763	756.306
		25	Persentase Pertumbuhan Industri	((jumlah industri tahun n-jumlah industri tahun (n-1)) / (jumlah industri s/d tahun n)) x 100%	persen	2,10	2,21	2,33	12,16
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	26	Ketersediaan pangan utama	(Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (/Jumlah Penduduk) x 100%	kg/jiwa/tahun	284,121	320,692	341,502	424,745
		27	Stabilitas harga pangan	inflasi harga bahan pangan pokok (BPS)	persen	93,95	93,96	93,97	94,30
		28	Skor PPH	persen Angka Kecukupan Gizi (A) x bobot masing-masing kelompok pangan	persen	87,90	87,95	87,98	88,40
		29	Produksi Padi	Jumlah produksi padi dalam 1 tahun	ton	478.199	478.300	478.500	480.500
		30	Produksi Jagung	Jumlah produksi jagung dalam 1 tahun	ton	51.446	51.448	51.450	51.650
		31	Produksi Cabai	Jumlah produksi cabai dalam 1 tahun	ton	211.124	215.346	219.653	237.760

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
		32	Produksi Kopi	Jumlah produksi kopi dalam 1 tahun	ton	1.468	1.480	1.490	1.530
		33	Produksi Cengkeh	Jumlah produksi cengkeh dalam 1 tahun	ton	161	163	165	173
		34	Produksi kelengkeng	Jumlah produksi kelengkeng dalam 1 tahun	ton	88	90	93	100
		35	Produksi jeruk	Jumlah produksi jeruk dalam 1 tahun	ton	2.646	2.650	2.655	2.675
		36	Produksi kelapa	Jumlah produksi kelapa dalam 1 tahun	ton	7.520	7.525	7.530	7.550
		37	Produksi Salak	Jumlah produksi salak dalam 1 tahun	ton	69.362	69.372	69.380	69.420
		38	Produksi Bawang putih	Jumlah produksi bawang putih dalam 1 tahun	ton	2.053,5	2.156,2	2.264	2.522,7
		39	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	(produksi produk unggulan terstandarisasi : total produksi produk unggulan) x 100%	persen	0,3*	0,3	0,3	1,5
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	((Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking emas + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking hijau + Jumlah perusahaan peserta proper yang mencapai ranking biru)/Jumlah perusahaan peserta proper)*100%	persen	6	8	10	22
		41	Persentase pengelolaan sampah	Neraca Jakstrada pengelolaan sampah	persen	32,42	39,87	43,00	65,43
		42	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	(Persentase Ketersediaan RTH Publik di Wilayah Perkotaan+Persentase RTH Publik yang terkelola+Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan)/3	persen	39,59	39,27	40,06	40,06

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
		43	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	(Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi + Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi + Persentase mata air yang dikonservasi + Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim + Persentase sekolah Adiwiyata)/5	persen	5,52	5,94	7,64	13,52
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	44	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK	(Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP+Persentase penerbitan KK)/2	angka	96,10	96,83	97,48	99,75
		45	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	(Persentase penerbitan Akta Kelahiran+Persentase Penerbitan Akta perkawinan+Persentase Penerbitan Akta Kematian)/3	angka	55,01	63,75	66,67	96,67
		46	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	(Persentase Pengelolaan Informasi+Persentase Pemanfaatan Data)/2	angka	-	70	77,5	95
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	47	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	(Jumlah Desa Maju, Mandiri dan Berkembang)/Jumlah Seluruh Desa)*100%	persen	10	10	20	30
15	DINAS PERHUBUNGAN	48	Cakupan Infrastruktur perhubungan	(Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan + Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas + Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas + Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan)/4	persen	38,72	47,76	57,20	96,12
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	(Cakupan SKPD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil+Cakupan Layanan Komunikasi+Persentase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah)/3	persen	31,28	37,26	44,52	76,67

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
		50	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	(Persentase aplikasi sistem informasi SKPD yang terintegrasi dengan sistem informasi instansi vertikal+Persentase ketersediaan perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK+Persentase layanan domain dan subdomain bagi Desa dan SKPD)/3	persen	40,44	41,32	48,16	98,32
		51	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	((Persentase layanan website SKPD dan Desa yang memenuhi kriteria+Persentase diseminasi informasi melalui media massa+Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat+Cakupan diseminasi melalui media interpersonal+Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang+Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah))/6	persen	36,67	57,36	83,94	94,15
		52	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	(Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan+Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar)/2	persen	62,50	66,67	75	100
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	53	Cakupan Pelayanan Perdagangan	((Cakupan legalitas pelayanan perdagangan x 0,5) + (Cakupan Promosi perdagangan x 0,2) + (Cakupan Sarpras perdagangan x 0,3))	miliar rupiah	-	-	70	78
		54	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	Kementerian Perdagangan	unit	7	7	8	12
		55	Persentase koperasi sehat	((jumlah koperasi sehat/Jumlah total koperasi)) x 100%	persen	78,13	78,13	78,13	80
		56	Peningkatan Omzet usaha Mikro	(nilai omzet tahun n - nilai omzet tahun n-1)/(nilai omzet tahun n-1) x 100%	persen	-	5	5	25

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	57	Jumlah nilai investasi PMA	Jumlah investasi yang masuk dari LN (PMA)	miliar rupiah	68.858	75.000	78.750	95.721
		58	Jumlah nilai investasi PMDN	Jumlah investasi yang masuk dari DN (PMDN)	triliun rupiah	1.907	2.174	2.391	3.501
		59	Survey kepuasan pelayanan perizinan	Survey/kuesioner pengguna layanan perizinan	angka	86,3	86,5	87	89
19	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	60	Cakupan prestasi generasi muda	$((\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah pemuda peserta lomba}) * 100) * 0,50 + (\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet yang ikut kejuaraan}) * 100) * 0,50$	persen	36,50	38,50	41,00	52,00
		61	Peningkatan kunjungan wisatawan	$((\text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - 1 / \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - 1) * 100) * 0,35 + ((\text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n - 1 / \text{jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke } n - 1) * 100) * 0,65$	persen	1,82	5	5	25
		62	Peningkatan lama tinggal wisatawan	$((\text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1 / \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1) * 100) * 0,35 + ((\text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - 1 / \text{lama tinggal wisatawan mancanegara tahun ke } n - 1) * 100) * 0,65$	persen	3,70	5,3	5,3	30

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	63	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	(Jumlah pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten/jumlah penduduk) x 100%	persen	0,06	0,07	0,07	0,10
		64	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	(Pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku / jumlah pengolah arsip) x 100%	persen	-	38,46	38,46	100
21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	65	Produksi daging	Jumlah produksi daging dalam 1 tahun	ton	15.622,3	16.111,4	16.393,3	90.997,4
		66	Produksi Telur	Jumlah produksi telur dalam 1 tahun	ton	16.204,2	16.787,5	17.071,2	105.078
		67	Produksi susu	Jumlah produksi susu dalam 1 tahun	liter	-	746.158	761.08	4.706.851
			Produksi benih ikan	Jumlah produksi ikan (benih) dalam 1 tahun (ekor)	ekor (x1000)	2.008.038	2.008.038	2.100.000	13.603.826
		68	Produksi ikan konsumsi	Jumlah produksi ikan (konsumsi) dalam 1 tahun	ton	23.097,01	23.097,01	24.150,00	156.444,00
		69	Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi dalam 1 tahun	ton	278,14	280,50	294,53	1.907,94
22	SEKRETARIAT DAERAH	70	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	((jumlah kebijakan yang tidak bermasalah/jumlah kebijakan yang ada	persen	-	-	70,00	80,00
		71	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Angka (1-100)	83,25	83,50	83,75	85,00
23	SEKRETARIAT DEWAN	72	Cakupan fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah	((jumlah fasilitasi raperda yang dikeluarkan/jumlah fasilitasi propemperda)x100%)+(jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati)x100%) + (jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati /jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan) x 100%)))/3	persen	-	-	93	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	73	Tingkat ketercapaian dan keterukuran kinerja pembangunan daerah	(Jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program daerah yang berpredikat sangat tinggi ($\geq 91\%$) dan tinggi (76%-90%)/Jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program)*100%	persen	-	-	69,42	77,82
		74	Persentase implementasi rencana kelitbangan	(Jumlah kelitbangan dalam RKPD/Jumlah kelitbangan dalam RPJMD) *100%	persen	-	100	100	100
25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	75	Persentase kenaikan PAD	$((\text{PAD th-n} - \text{PAD th-n-1}))/\text{PAD n-1} * 100\%$	persen	15,07	10,49	-6,30	14,15
		76	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	(Jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu/jumlah APBD)x100%	persen	100	100	100	100
		77	Persentase kejelasan status aset daerah	(Jumlah Aset yang jelas statusnya / Jumlah aset seluruhnya) x 100%	persen	100	100	100	100
26	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH	78	Indek profesionalitas ASN	$\text{IdxPro} = \text{koef}(1-\text{gaps}) + \text{Koef}(\text{Kj}) + \text{Koef}(1 - \delta \text{Sl}(\text{inex})) + \text{Koef}(1 - \text{inDiscpl})$	angka (0-100)	63	65	67	76
27	INSPEKTORAT	79	Level kapabilitas APIP	Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	level (1-5)	3	3	3	4
		80	Nilai maturitas SPIP	Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas SPIP	level (0-5)	3	3	3	4
28	KECAMATAN	81	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan						
		82	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan						

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN BANDONGAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	81,2	82	83	87
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%))/2	persen	-	100	100	100
	KECAMATAN BOROBUDUR		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	78	80	81	82,5
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%))/2	persen	85	85	85	90
	KECAMATAN CANDIMULYO		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	80,03	81,35	82,67	87,95
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%))/2	persen	-	100	100	100
	KECAMATAN DUKUN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	80	81	82	86
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%))/2	persen	100	100	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN GRABAG		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	88	88	88	88
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN KAJORAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	-	70,75	70,75	80
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	-	100	100	100
	KECAMATAN KALIANGKRIK		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	79,55	80	80	80
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN MERTOYUDAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	75	77	79	85
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	80	83	85	87

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN MUNGKID		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	85,57	87,00	87,50	87,90
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%))/2	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN MUNTILAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	87,73	87,90	88,50	90,25
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%))/2	persen	-	-	80	80
	KECAMATAN NGABLAK		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	82,85	82,85	82,85	82,85
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%))/2	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN NGLUWAR		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	88,90	89	89	90
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%))/2	persen	78	79	80	84

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN PAKIS		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	82	84	86	95
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	-	100	100	100
	KECAMATAN SALAM		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	81	82	83	87
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	81	82	83	87
	KECAMATAN SALAMAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	80	86	87	88
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	88	95	95	95
	KECAMATAN SAWANGAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	81,98	81,98	82,00	82,40
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	-	-	80	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN SECANG		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	89,40	89,40	90,00	91,00
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	90	90	90	90
	KECAMATAN SRUMBUNG		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	80,45	81	82	86
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	80	82,5	85	95
	KECAMATAN TEGALREJO		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	82	84	86	94
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	100	100	100	100
	KECAMATAN TEMPURAN		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	$((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang})$	angka (0-100)	85,80	86,40	86,50	88,30
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$((\text{Jumlah urusan yang dilaksanakan} / \text{jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan}) * 100\%) + ((\text{Jumlah desa tertib administrasi} / \text{jumlah desa}) * 100\%) / 2$	persen	100	100	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Formula	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Akhir Kinerja
						2018	2019		
	KECAMATAN WINDUSARI		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang)	angka (0-100)	-	81,98	82,00	82,40
			Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100%)+((Jumlah desa tertib administrasi/jumlah desa)*100%))/2	persen	-	-	80	100

Sumber: Bappeda dan Litbangda, 2019

Keterangan: *) Angka proyeksi

6.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah. Indikator tersebut terdiri dari indikator tujuan dan sasaran daerah, serta indikator sasaran Perangkat Daerah yang dibagi sesuai aspek dan urusan. Matriks Indikator Kinerja Daerah disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Matriks Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	angka (0-100)	69,11	69,11	69,34	70,33
2	Angka Kemiskinan	persen	11,23	10,58	9,93	7,33
3	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,23	92,91	93,21	94,41
4	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	62,43	69,03	69,33	70,53
5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,57	0,58	0,58	0,58
6	Kabupaten Layak Anak	kategori	madya	madya	nindya	utama
7	Angka Harapan Hidup	tahun	73,47	73,47	73,52	73,70
8	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,57	7,72	7,86	8,41
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,48	12,67	12,76	13,27
10	Presentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,86	93,89	94,41	95,94
11	Indeks ketahanan pangan	angka (0-100)	76,32	77,37	78,42	82,62
12	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	55,29	69,88	72,66	96,28
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,06*	5,0-5,5	5,1-5,6	5,5-6,0
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,91	2,4-3,0	2,4-3,0	2,25-2,55
15	PDRB Per Kapita	juta rupiah	23,70*	25,20	26,70	32,72
16	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.025,00	9.262,68	9.400,64	10.400,12
17	Inflasi	persen	2,66	2,5-4,5	2,5-4,5	2,5-4,5
18	Peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	200,15*	227,64	255,56	367,20
19	Peningkatan nilai PDRB sektor pertanian	miliar rupiah	113,80*	120,09	150,89	274,10
20	Peningkatan nilai PDRB sektor perindustrian pengolahan	miliar rupiah	369,23*	370,28	372,47	380,61

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
21	Peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	52,32*	52,32	52,32	54,25
B. ASPEK PELAYANAN UMUM						
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
	PENDIDIKAN					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	angka (0-100)	87,43	89,97	91,14	95,80
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	angka (0-100)	87,64	88,25	88,79	90,94
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	angka (0-100)	98,30	98,62	98,93	99,92
4	Rerata Nilai UN	angka (0-100)	6,28	6,30	6,40	6,65
5	Angka Kelulusan	angka (0-100)	99,88	99,90	99,92	100
	KESEHATAN					
6	Kualitas pelayanan kesehatan	persen	10	15	25	45
7	Angka kesakitan	persen	-	-	5,33	4,68
8	Jumlah Kematian Ibu	jumlah kasus	6	-	11	9
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	5,72	-	6,5	6,3
10	Angka Kematian Balita (AKABa)	per 1000 KH	6,70	-	8	7,6
11	Angka Kematian Neonatal (AKN)	per 1000 KH	4	-	6	5,6
12	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Madya (Bintang 3)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
13	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	persen	57,69	60,83	66,37	92,13
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
14	Persentase ketersediaan rumah layak huni	persen	43,46	71,34	75,59	92,56
15	Persentase kawasan permukiman berkualitas	persen	47,20	49,45	51,70	79,47
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
16	Cakupan penegakan hukum	persen	-	80,45	88,50	92,50
17	Cakupan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana	persen	74,1	75	75,9	79,48

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
18	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	persen	80	80	80	80
	SOSIAL					
19	Cakupan penanganan PMKS	persen	46,32	46,86	47,46	49,8
20	Presentase keluarga Pra sejahtera	persen	21,23	20,69	20,15	18,00
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
	TENAGA KERJA					
21	Produktivitas tenaga kerja	rupiah	689.827	700.905	711.763	756.306
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
22	Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	persen	60,91	57,99	57,99	58,63
	PANGAN					
23	Ketersediaan pangan utama	kg/jiwa/tahun	284,121	320,692	341,503	424,745
24	Stabilitas harga pangan	persen	93,95	93,96	93,97	94,30
25	Skor PPH	persen	87,90	87,95	87,98	88,40
	LINGKUNGAN HIDUP					
26	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	persen	6	8	10	22
27	Persentase pengelolaan sampah	persen	32,42	39,87	43,00	65,43
28	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	persen	39,59	39,27	40,06	40,06
29	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	persen	5,52	5,94	7,64	13,52
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
30	Rasio perekaman KTP - elektronik dan keluarga yang ber-KK	angka (0-100)	96,10	96,83	97,48	99,75
31	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	angka (0-100)	55,01	63,75	66,67	96,67
32	Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data	angka (0-100)	-	70	77,5	95
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
33	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	persen	10	10	20	30
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
34	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	0,79	0,76	0,73	0,65
	PERHUBUNGAN					
35	Cakupan Infrastruktur perhubungan	persen	38,72	47,76	57,20	96,12
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
36	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	36,67	57,36	83,94	94,15
37	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	62,50	66,67	75	100
	KOPERASI DAN UKM					
38	Persentase koperasi sehat	persen	78,13	78,13	78,13	80
39	Peningkatan omzet usaha Mikro	persen	-	5	5	5
	PENANAMAN MODAL					
40	Jumlah nilai investasi PMA	miliar rupiah	68.858	75.000	78.750	95.721
41	Jumlah nilai investasi PMDN	triliun rupiah	1,907	2,174	2,391	3,501
42	Survey kepuasan pelayanan perijinan	angka (0-100)	86,3	86,5	87	89
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
43	Cakupan prestasi generasi muda	persen	36,50	38,50	41,00	52,00
	STATISTIK					
44	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	persen	40,44	41,32	48,16	98,32
	PERSANDIAN					
45	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	31,28	37,26	44,52	76,67
	KEBUDAYAAN					
46	Persentase peningkatan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	persen	1	1	1	1
	PERPUSTAKAAN					
47	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	persen	0,056	0,066	0,07	0,10
	KEARSIPAN					
48	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	persen	-	-	38,46	100
	URUSAN PILIHAN					
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
49	Produksi daging (ton)	ton	15.622,3	16.111,4	16.393,3	90.997,4

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
50	Produksi Telur (ton)	ton	16.204,2	16.787,5	17.071,2	105.078
51	Produksi susu	liter	-	746.158	761.08	4.706.851
52	Produksi benih ikan	ekor (x1000)	2.008.038	2.008.038	2.100.000	13.603.826
53	Produksi ikan konsumsi	ton	23.097,01	23.097,01	24.150,00	156.444,00
54	Produksi perikanan tangkap	ton	278,14	280,50	294,53	1.907,94
	PARIWISATA					
55	Peningkatan kunjungan wisatawan	persen	1,82	5	5	25
56	Peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	3,70	5,3	5,3	30
	PERTANIAN					
57	Produksi Padi	ton	478.199	478.300	478.500	480.500
58	Produksi Jagung	ton	51.446	51.448	51.450	51.650
59	Produksi Cabai	ton	211.124	215.346	219.653	237.760
60	Produksi Kopi	ton	1.468	1.480	1.490	1.530
61	Produksi Cengkeh	ton	161	163	165	173
62	Produksi kelengkeng	ton	88	90	93	100
63	Produksi jeruk	ton	2.646	2.650	2.655	2.675
64	Produksi kelapa	ton	7.520	7.525	7.530	7.550
65	Produksi Salak	ton	69.362	69.372	69.380	69.420
66	Produksi Bawang putih	ton	2.053,5	2.156,2	2.264	2.522,7
67	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	persen	0,3	0,3	0,3	1,5
	PERDAGANGAN					
68	Cakupan pelayanan perdagangan	persen	-	-	70	78
69	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	unit	7	7	8	12
	PERINDUSTRIAN					
70	Persentase pertumbuhan industri	persen	2,10	2,21	2,33	12,16
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					
71	Tingkat ketercapaian dan keterukuran kinerja pembangunan daerah	persen	-	-	69,42	77,82
	KEUANGAN					
72	Persentase kenaikan PAD	persen	15,07	10,49	-6,3	4,75

No	Aspek/ Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian Tahun 2020	Kondisi Kinerja Periode RPJMD
			2018	2019		
73	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	persen	100	100	100	100
74	Persentase kejelasan status aset daerah	persen	100	100	100	100
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
75	Indek profesionalitas ASN	Angka (0-100)	63	65	67	76
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
76	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	-	100	100	100
	PENGAWASAN					
77	Level kapabilitas APIP	Level (1-5)	3	3	3	4
78	Nilai maturitas SPIP	Level (0-5)	3	3	3	4
	FUNGSI LAINNYA					
79	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	persen	-	-	70,00	80,00
80	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Angka (1-100)	83,25	83,50	83,75	85,00
81	Cakupan fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	persen	-	-	93	100
C. ASPEK DAYA SAING						
1	Cakupan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan	persen	60,07	63,20	66,95	83,16
2	IKLH	Angka (0-100)	71,93	72,10	72,12	72,20
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	56,45	63,82	65,53	72,39
4	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	persen	84,42	79,25	82,97	88,09
5	Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	59,05 (CC)	61,04 (B)	63,03 (B)	71,00 (BB)
6	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	1,85	1,85	2	3
7	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	82,01	82,74	84,23	90,16
9	Indek Merit System	angka (0-1)	-	0,5	0,55	0,76
10	Pertumbuhan Investasi	persen	0,92	5,00	5,00	5,00
11	Cakupan Pembangunan Wilayah	persen	48,21	54,29	61,79	94,12
12	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,66*	0,67	0,68	0,72

Sumber: Bappeda dan Litbangda, 2019

Keterangan: *) Angka proyeksi

BAB VII PENUTUP

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 disusun melalui serangkaian tahapan penyusunan. Pelaksanaan Musrenbang melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk dari anggota DPRD sebagai penyeimbang dalam mengimplementasikan pola pendekatan perencanaan pembangunan. Hasil proses perencanaan pembangunan sebelumnya, seperti Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan menjadi salah satu bahan utama dalam menentukan sasaran/target maupun lokasi kegiatan yang dirancang oleh perangkat daerah. Sehingga dalam proses tahapan perencanaan akan tergambarkan simbiosis mutualisme antara pendekatan perencanaan pembangunan secara partisipatif, teknokratis dan politis.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 merupakan tahapan strategis dalam rangkaian proses perencanaan karena sebagai *starting point* (titik awal) dalam rencana pencapaian pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahap selanjutnya yaitu tahun 2019-2024. RKPD tahun 2020 ini, memetakan permasalahan dan isu strategis serta menentukan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 secara tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah.

Dokumen RKPD merupakan bagian dan implementasi dokumen RPJMD di setiap tahunnya. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sedang berproses menyusun Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Sehingga penyusunan RKPD Tahun 2020 disamping memperhatikan masukan-masukan dalam setiap tahapan perencanaan, RKPD Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2019-2024. Dokumen RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 diharapkan mampu mensinergiskan seluruh pelaku pembangunan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.

Pada Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2019-2024 berhenti pada tataran program, sedangkan dalam RKPD program-program yang ada sudah harus dijabarkan kedalam nomenklatur kegiatan, sehingga nama-nama program dan kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2020 akan lebih fokus sesuai hasil pembahasan dalam Musrenbang. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 adalah "Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal didukung pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi". Arah kebijakan ini menjadi bingkai untuk seluruh perangkat daerah dalam merancang pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan rencana pencapaian target-target indikator kinerja yang ditetapkan, baik pada tataran kegiatan, program, maupun indikator kinerja perangkat daerah, yang akan bermuara pada pencapaian target indikator kinerja daerah pada Tahun 2020. Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD, beberapa hal tersebut menjadi batasan yang tegas dalam pembahasan tentang kondisi kemampuan keuangan daerah yang dirancang untuk

membiayai program dan kegiatan dimasing-masing rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 sangat diperlukan. Pada saatnya RKPD ini akan menjadi titik awal dalam merancang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. KUA dan PPAS tersebut akan menentukan bagaimana dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sudah mencerminkan pelaksanaan penjabaran Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang pada Tahun 2020 yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga upaya untuk melaksanakan Visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)" sudah mantap sejak Tahun 2020 yang merupakan awal pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang pada Tahun 2019-2024.

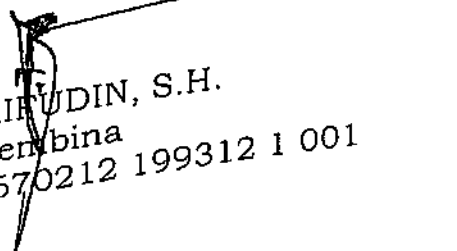
Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2020 memerlukan dukungan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparat pemerintah, peran masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai cita-cita dan harapan masyarakat.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 19670212 199312 1 001